



MOVING BEYOND COLLABORATION TO BECOME A LEGENDARY COMPANY

Kolaborasi Tanpa Batas untuk Menjadi Perusahaan Legendaris

KESINAMBUNGAN TEMA

Theme Sustainability



2023

MOVING BEYOND COLLABORATION TO BECOME A LEGENDARY COMPANY

Melampaui Kolaborasi untuk Menjadi Perusahaan Legendaris

Berbagai strategi inisiatif yang dilakukan Abipraya sepanjang tahun 2023 merupakan langkah-langkah strategis dan sistemik untuk memperkuat fundamental bisnis Perusahaan dalam jangka panjang. Abipraya telah menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan, baik dalam aspek operasional maupun keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa Abipraya yang semakin memantapkan diri mencapai tujuan.

The various strategic initiatives carried out by Abipraya throughout 2023 are strategic and systemic steps to strengthen the Company's business fundamentals in the long term. Abipraya has shown significant performance improvements, both in operational and financial aspects. It shows that Abipraya is increasingly establishing itself in achieving its goals.



2022

SMART AND GROWING FASTER

Cerdas dan Tumbuh Cepat

Di tengah kondisi perbaikan ekonomi yang menjanjikan pasca Pandemi COVID-19, Abipraya menempuh strategi untuk memperkuat platform bisnis. Berbagai inovasi dan perbaikan dilakukan disemua lini organisasi, penguatan proses bisnis, sistem, dan sumber daya manusia; yang akhirnya mampu mewujudkan operational excellence dan menghantarkan Abipraya ke tingkat yang lebih tinggi. Melalui *operational excellence* yang solid, Abipraya percaya dapat menciptakan pertumbuhan bisnis berkesinambungan di masa-masa yang akan datang.

In the middle of promising economic recovery conditions after the COVID-19 Pandemic, Abipraya pursued a strategy to strengthen the business platform. Various innovations and improvements are carried out in all aspects of the company, strengthening business processes, systems, and human capital, which can realize operational excellence and deliver Abipraya to a higher level eventually. Through solid operational excellence, Abipraya believes it can create sustainable business growth in the future.



2021

DRIVEN TO INNOVATE, GROWING NETWORK
 Menggerakan Inovasi, Mengembangkan Jaringan

Brantas Abipraya meyakini bahwa transformasi perusahaan merupakan kunci dari pertumbuhan berkesinambungan dan perlu terus dilanjutkan guna mendukung semangat kerja yang terintegrasi pada tahun-tahun mendatang. Untuk itu, Brantas Abipraya Terus melakukan penyempurnaan baik dari sisi proses bisnis, strategi maupun operasional, sehingga dapat terus tumbuh dan berkembang dimasa mendatang dengan menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.

Brantas Abipraya believes that company transformation is the key to sustainable growth and needs to continue to support an integrated work spirit in the coming years. For this reason, Brantas Abipraya continues to make improvements in terms of business processes, strategies, and operations, so it can continue to grow and develop in the future by facing challenges and taking advantage of existing opportunities.



2020

TOGETHER WE THRIVE
 Bersama Kita Berkembang

Upaya maksimal di tahun 2020 telah dilakukan dengan cermat dalam berbagai peluang yang ada. Kebijakan pemerintah untuk mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur menjadi peluang bagi Perseroan untuk memaksimalkan usaha agar peningkatan kinerja dapat tercapai lebih baik. Sebagaimana diketahui, pandemi global memukul hampir semua industri tidak hanya di tanah air tapi juga dunia internasional, hal ini tentu berdampak bagi Abipraya, tetapi dengan semangat kebersamaan, guyub dan profesionalisme yang tinggi, Abipraya berusaha bangkit dan tetap pada jalur yang ditetapkan sebelumnya.

Maximum efforts in 2020 have been carried out carefully in various opportunities. Government policy to accelerate the completion of infrastructure development is an opportunity for the Company to maximize efforts so that increased performance can be achieved better. As is known, the global pandemic hit almost all industries, not only in the country but also internationally, this will have an impact on Abipraya, but with a spirit of togetherness, friendship, and high professionalism, Abipraya tried to rise and stay on the previously set path.

IKHTISAR KINERJA

Performance Overview

Perseroan menerapkan kebijakan strategis yang mendukung pertumbuhan usaha dan terus memperkuat sumber daya manusia guna menciptakan dan meningkatkan kemampuan berkarya, berkreasi dan berinovasi tetap menjadi salah satu misi yang dilakukan Perusahaan di tahun 2023 ini.

The Company implements strategic policies that support business growth. In 2023, the Company continuously focused on encouraging employees to create and enhance their ability to do, create and innovate.

REALISASI TENDER

Realization Of Tenders

Rp53,82
triliun / trillion

Realisasi tender tercapai 129,31% dari anggaran yang sebesar Rp 41,62 triliun, meningkat 150,80% dari realisasi tahun 2022. Tender realization reached 129.31% of the budget IDR 41.62 trillion, an increase of 150.80% from the realization in 2022.



TENDER YANG DIMENANGKAN

The Value of Tenders Won

Rp11,87
triliun / trillion

Tender yang dimenangkan tercapai sebesar Rp11,87 triliun atau 131,87% dari anggaran 2023 dan 157,29% dari tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp7,55 triliun.

The value of tenders won was IDR11.87 trillion or 131.87% off the 2023 budget or 157.29% from realization in 2022 which amounted to IDR7.55 trillion.



KINERJA SEGMENT PENGAIRAN

Irrigation Segment Performance

Rp3,21
triliun / trillion

Realisasi kinerja segmen pengairan sebesar Rp3,21 triliun atau tercapai 116,63% dari anggaran tahun 2023.

Realization of Irrigation segment performance amounted to IDR 3.21 trillion or achieved 116.63% of the 2023 budget.



KINERJA SEGMENT JALAN/JEMBATAN

Road/Bridge Segment Performance

Rp3,06
triliun / trillion

Realisasi kinerja segmen jalan/jembatan Rp3,06 triliun atau tercapai 124,32% dari anggaran tahun 2023.

Realized of the road/bridge segment performance is IDR 3.06 trillion or achieved 124.32% of the 2023 budget.



KINERJA SEGMENT GEDUNG/BANGUNAN

Building/Establishment Segment Performance

Rp2,43
triliun / trillion

Realisasi kinerja segmen gedung/bangunan sebesar Rp2,43 triliun atau tercapai 121,83% dari anggaran tahun 2023.

Realization of building segment performance is IDR 2.48 trillion or achieved 121.83% of the 2023 budget.





PENDAPATAN USAHA
Operating income

Rp4,86
triliun / trillion

Meningkat 21,24% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp4,01 triliun.
Increase of 21.24% compared to 2022 of IDR 4.01 trillion.



LABA BERSIH TAHUN BERJALAN
Net Profit for the Year

Rp201,90
miliar / billion

Meningkat 49,14% dari tahun 2022 yang berjumlah sebesar Rp135,38 miliar.
Increase of 49.14% from 2022 which amounted to IDR 135.38 billion.



ASET
Asset

Rp9,28
triliun / trillion

Meningkat 17,33% dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp7,97 triliun.
Increase of 17.33% from the previous year which amounted to IDR 7.97 trillion.



EKUITAS
Equity

Rp2,14
triliun / trillion

Meningkat 15,60% dari tahun 2022 sebesar Rp1,86 triliun.
Increase of 15.60% from 2022 of IDR 1.86 trillion.



DAFTAR ISI

Table of Content

Kesinambungan Tema Theme Sustainability	II	Visi, Misi Dan Nilai-Nilai Perusahaan Vision, Mission, and Company Values	59
Ikhtisar Kinerja Performance Overview	2	Nilai - Nilai Dan Budaya Perusahaan Corporate Values and Culture	61
Daftar Isi Table of Content	4	Struktur Organisasi Organizational Structure	62
Ikhtisar Data Keuangan Penting Financial Highlights	6	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile	64
Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications	10	Dewan Komisaris Board of Commissioners	70
Sertifikasi Certifications	13	Direksi Board of Directors	71
Peristiwa Penting Important Events	14	Profil Direksi Board of Directors Profile	72
LAPORAN MANAJEMEN Management Report	20	Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition	78
Laporan Komisaris Board of Commissioners Report	22	Informasi Anak Perusahaan Subsidiary Information	80
Laporan Direksi Board of Directors Report	34	Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure	82
Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Untuk Laporan Tahunan 2023 Statement of Responsibility from Board of Commissioners for 2023 Annual Report	44	Lembaga Penunjang Supporting Institutions	84
Pernyataan Tanggung Jawab Direksi Untuk Laporan Tahunan 2023 Statement of Responsibility from Board of Directors for 2023 Annual Report	45	Unit Bisnis dan Kantor Perwakilan Business Units and Representative Offices	85
PROFIL PERUSAHAAN Company Profile	46	Informasi Perusahaan Company Information	87
Identitas Perusahaan Corporate Identity	48	SUMBER DAYA MANUSIA Human Capital	88
Sekilas Perusahaan Company Overview	49	Pengembangan Sumber Daya Manusia Human Capital Development	90
Jejak Langkah Perusahaan Milestone	52	ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion & Analysis	102
Bidang Usaha Business line	54	Tinjauan Per Segmen Usaha Business Segment Overview	104
		Kinerja Keuangan Financial Performance	109

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

156

Prinsip Tata Kelola Governance Principles	158
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	174
Dewan Komisaris Board of Commissioners	185
Direksi Board of Directors	209
Kebijakan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi Remuneration Policy for The Board of Commissioners and The Board of Directors	225
Komite Audit Audit Committee	230
Komite Nominasi Dan Remunerasi Nomination And Remuneration Committee	243
Komite Manajemen Risiko dan GCG Risk Management Committee and GCG	253
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	264
Satuan Pengawasan Intern Internal Supervisory Unit	270
Akuntan Publik Public Accountant	280
Manajemen Risiko Risk Management	282
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	231
Akses Informasi dan Data Perusahaan Access To Company Information and Data	308
Kode Etik Code of Conduct	311
Whistleblowing System Whistleblowing System	315
Perkara Penting Litigation	324

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

326

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility	328
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkup Pemenuhan Hak Asasi Manusia Corporate Social Responsibility Scope of Human Rights Fulfillment	338
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Untuk Operasi Yang Adil Corporate Social Responsibility for Fair Operation	341
Tanggung Jawab Sosial Kepada Pelanggan Social Responsibility to Customers	344
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Corporate Social Responsibility In The Environmental Sector	350
Tanggung Jawab Sosial Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Social Responsibility Related to Employment, Occupational Health and Safety	359
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Corporate Social Responsibility Related to Social and Community Development	369

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Financial Highlights

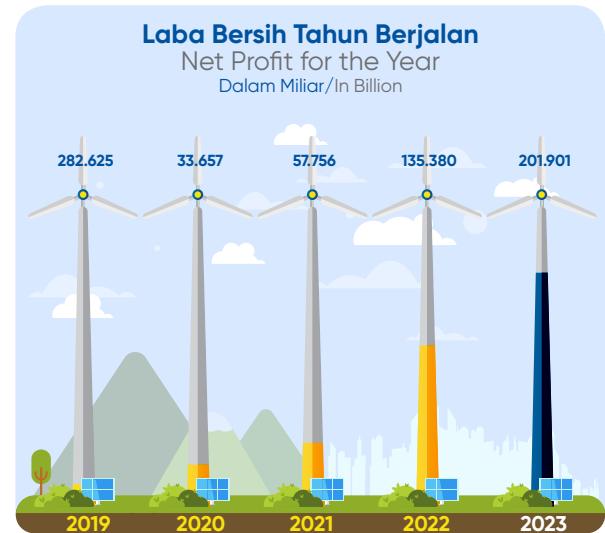
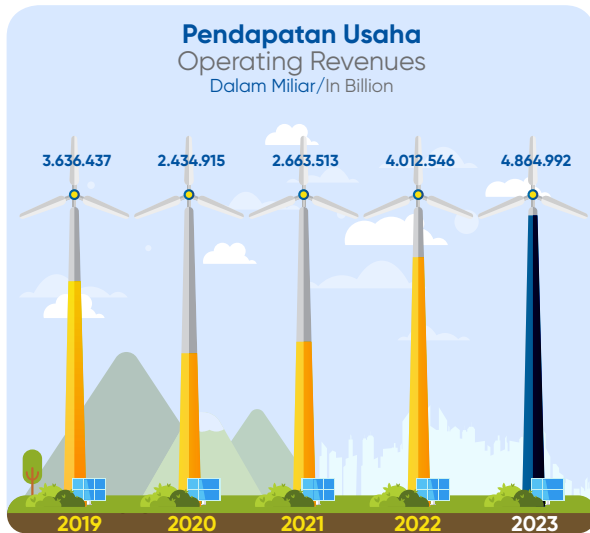
Laporan Laba Rugi Dan Pendapatan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statement of Income and Other Comprehensive Income

Rp juta

Million

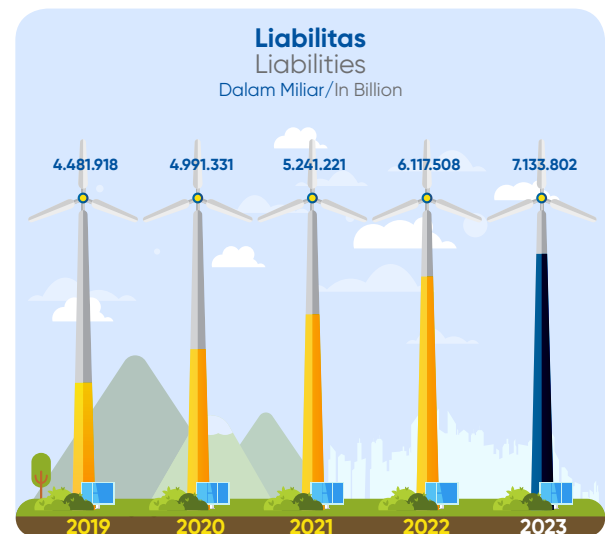
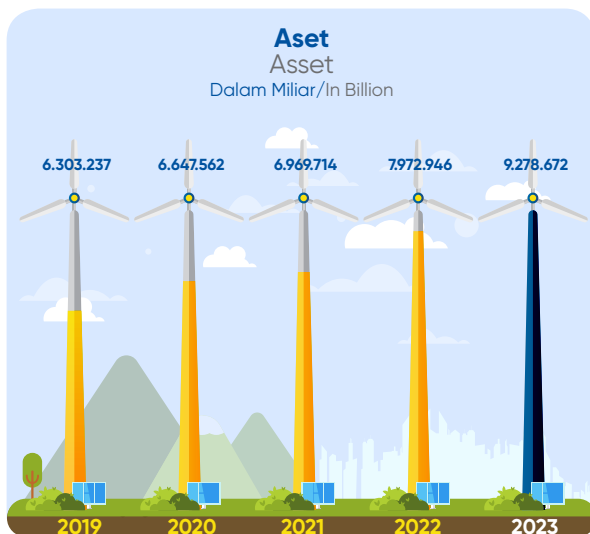
Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Pendapatan Usaha Operating Revenues	4.864.992	4.012.546	2.663.513	2.434.915	3.636.437
Beban Pokok Pendapatan Cost of Income	(4.529.177)	(3.640.561)	(2.500.409)	(2.326.358)	(3.300.925)
Laba Kotor- Sebelum Bagian Laba Ventura Bersama Gross Profit- Before Share of the Joint Venture Profit	335.815	371.985	163.104	108.557	335.511
Bagian Laba Ventura Bersama Shared of Profit on Joint Venture	427.685	251.159	278.818	243.994	284.964
Laba Kotor Gross Profit	763.499	623.144	441.922	352.551	620.476
Beban Usaha Operating Expenses	(233.916)	(210.847)	(159.792)	(127.033)	(169.119)
Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih Other Income (Expense) - Net	(45.429)	(5.212)	2.947	(8.638)	22.481
Beban Pajak Penghasilan Final Final Income Tax Expense	(99.345)	(90.981)	(63.546)	(62.267)	(92.570)
Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan Profit Before Tax and Financial Expenses	378.535	407.086	285.503	154.613	381.267
Beban Keuangan Financial expenses	(174.409)	(177.678)	(161.168)	(117.079)	(98.002)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	210.401	138.426	60.770	37.534	283.264
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(8.500)	(3.046)	(3.033)	(3.877)	(639)
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	201.901	135.380	57.737	33.657	282.625
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Profit for the year attributable to:	201.901	135.380	57.737	33.657	282.625
Pemilik entitas induk Owner of parent entity	200.486	134.201	56.510	31.305	274.951
Kepentingan non pengendali Non-controlling interests	1.415	1.180	1.228	2.352	7.674
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Total comprehensive profit attributable to:	290.446	126.916	73.265	46.923	307.188
Pemilik entitas induk Owner of parent entity	289.025	125.761	72.003	44.567	299.514
Kepentingan non pengendali Non-controlling interests	1.422	1.155	1.262	2.356	7.674

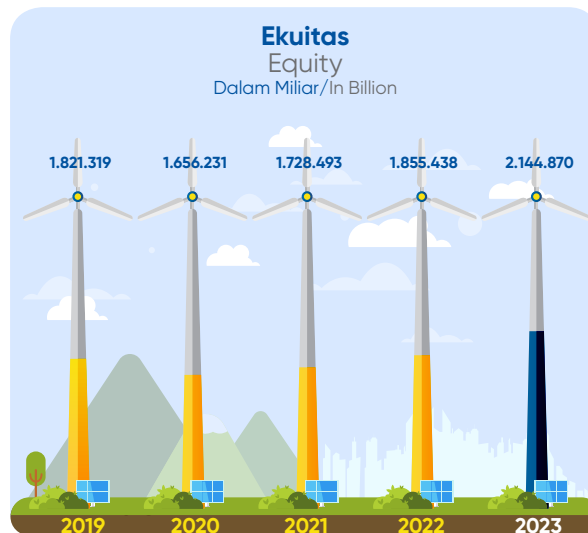


Laporan Posisi Keuangan
Statement of Financial Position

Rp juta
Million

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Aset Lancar Current Assets	5.149.183	4.960.569	4.105.924	3.884.428	3.888.980
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	4.129.489	3.012.377	2.863.790	2.763.134	2.414.257
Jumlah Aset Total Assets	9.278.672	7.972.946	6.969.714	6.647.562	6.303.237
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities	5.028.743	3.702.223	3.302.174	2.898.796	3.089.041
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	2.105.059	2.415.284	1.939.047	2.092.535	1.392.877
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	7.133.802	6.117.508	5.241.221	4.991.331	4.481.918
Jumlah Ekuitas Total Equity	2.144.870	1.855.438	1.728.493	1.656.231	1.821.319





Laporan Arus Kas

Cash Flow Statement

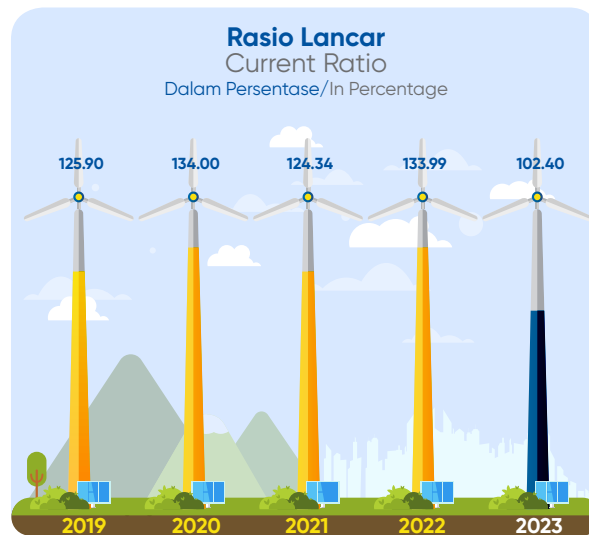
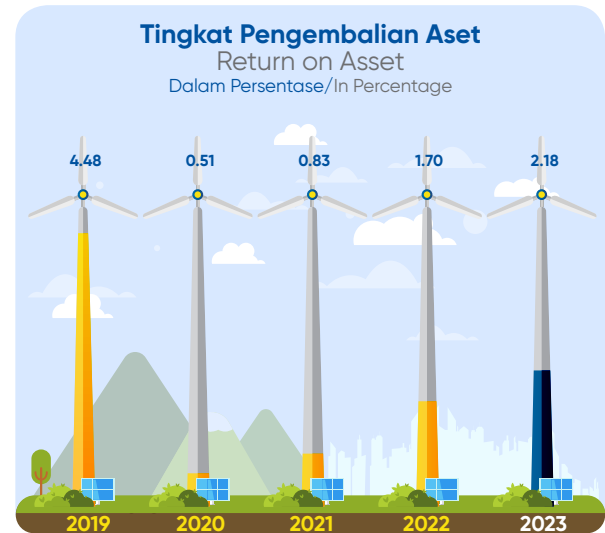
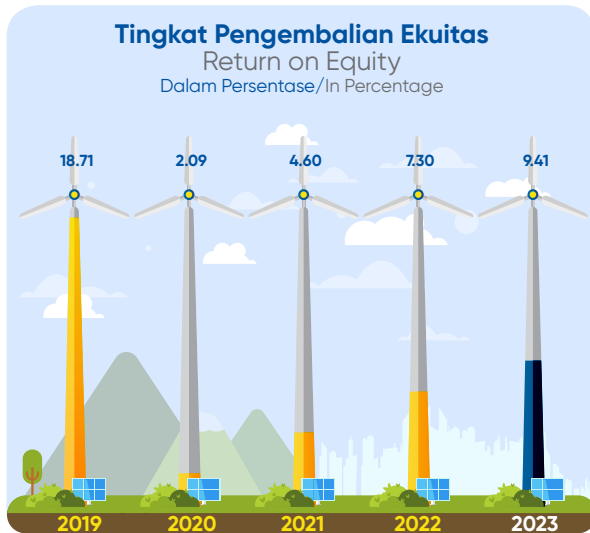
Rp juta
Million

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	401.905	380.689	359.729	(469.129)	256.745
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investment Activities	(319.915)	(436.139)	(77.139)	285.312	304.013
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	(479.68)	163.148	(28.639)	662.253	269.070
Dampak Perubahan Kurs Terhadap Kas dan Setara Kas Impact of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents	1.202	(13.227)	561	(3.483)	4.050
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun Equivalents at beginning of the year	1.476.793	1.382.323	1.127.811	1.223.482	997.630
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun End of year Cash Balance and Cash Equivalents	1.512.017	1.476.793	1.382.323	1.127.811	1.223.482

Rasio Keuangan

Financial Ratios

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Tingkat Pengembalian Ekuitas(%) Return on Equity (%)	9,41	7,30	4,60	2,09	18,71
Tingkat Pengembalian Aset (%) Return on Asset (%)	2,18	1,70	0,83	0,51	4,48
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	30,07	39,89	41,86	38,91	39,61
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	102,40	133,99	124,34	134,00	125,90
Total Modal Sendiri terhadap Aset (%) Total Own Capital to Assets (%)	20,94	23,27	23,76	24,20	24,09
Rata-rata Jangka Waktu Penagihan (hari) Average Collection Period of receivable (day)	69,09	58,25	56,38	49,19	60,00
Perputaran Persediaan (kali) Inventory Turnover (day)	26,74	29,91	43,28	67,49	54,73
Rasio Hutang terhadap Ekuitas (%) Debt to Equity Ratio (%)	332,60	329,71	306,61	304,81	246,08
Rasio Hutang terhadap Aset (%) Debt to Asset Ratio (%)	76,88	76,73	75,41	75,30	71,11



INFORMASI SAHAM

Pada 2023, Perseroan tidak menawarkan sahamnya di Pasar Modal manapun. Abipraya sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia sehingga dalam laporan ini tidak dapat memberikan informasi tentang harga saham, nilai kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah, harga penutupan, dan volume perdagangan.

STOCK INFORMATION

In 2023, the Company did not offer its shares in any Capital Market. Abipraya is wholly owned by the Government of Indonesia, thus this report cannot provide information on share price, market capitalization value, highest share price, lowest share price, closing price, and trading volume.

INFORMASI OBLIGASI

Perseroan menerbitkan Obligasi Pertama Brantas Abipraya dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,5% per tahun untuk jangka waktu 3 tahun. Obligasi ini diterbitkan dengan nilai nominal sebesar Rp300.000.000.000 dan jatuh tempo pada tanggal 8 April 2018. Dana hasil penawaran obligasi tersebut akan digunakan untuk tambahan setoran modal kepada entitas anak usaha sebesar 50%, pembangunan pabrik beton pracetak sebesar 33,33%, dan sisanya sebesar 16,67% untuk refinancing. Tepat pada tanggal 8 April 2018, obligasi tersebut telah dilunasi.

BOND INFORMATION

The Company issued the First Bond of Brantas Abipraya with a fixed interest rate of 11.5% per year for a period of 3 years. This bond was issued with a nominal value of Rp300,000,000,000 and matured on April 8, 2018. The proceeds from the bond offering will be used for additional capital deposits to subsidiaries of 50%, construction of precast concrete plants of 33.33%, and the remaining 16.67% for refinancing. On April 8, 2018, the bonds were repaid.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications

No	Nama Penghargaan	Award Name	Penyelenggara Organizers	Tahun Year
1	Partnership Achievement, Jakone Award 2023	Partnership Achievement, Jakone Award 2023	Pegadaian	2023
2	World Safety Organization WSO Indonesia Safety Culture Award (WISCA) 2023, Kategori Gold (Bintang 4)	World Safety Organization WSO Indonesia Safety Culture Award (WISCA) 2023, Kategori Gold (Bintang 4)	World Safety Organization WSO	2023
3	Best Stakeholder Relations Management, BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2023	Best Stakeholder Relations Management, BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2023	Kementerian BUMN Ministry of State-Owned Enterprises	2023
4	Top Digital Public Relations Award 2023 - Special Achievement for BUMN	Top Digital Public Relations Award 2023 - Special Achievement for BUMN	Info Ekonomi ID	2023
5	Top Leader on CSR Commitment 2023	Top Leader on CSR Commitment 2023	Top Bussiness	2023
6	Top CSR Award 2023 - Four Star	Top CSR Award 2023 - Four Star	Top Bussiness	2023
7	Zero Accident Award / Penghargaan Kecelakaan Nihil - Pembangunan Tol Cisumdawu Seksi 4B, Sumedang, Jawa Barat	Zero Accident Award - Nil - Construction of Cisumdawu Toll Road Section 4B, Sumedang, West Java	Kementerian Tenaga Kerja Ministry of Manpower	2023
8	Zero Accident Award / Penghargaan Kecelakaan Nihil - Kab.Bandung Barat, Jawa Barat	Zero Accident Award - Nil - West Bandung Regency, West Java	Kementerian Tenaga Kerja Ministry of Manpower	2023
9	Program Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Tempat Kerja dengan kategori PLATINUM	COVID-19 Prevention and Control Program in the Workplace with the PLATINUM category	Kementerian Tenaga Kerja Ministry of Manpower	2023

No	Nama Penghargaan	Award Name	Penyelenggara Organizers	Tahun Year
10	Zero Accident Award / Penghargaan Kecelakaan Nihil - Jakarta Timur, DKI Jakarta	Zero Accident Award - Nil - East Jakarta, DKI Jakarta	Kementerian Tenaga Kerja Ministry of Manpower	2023
11	Zero Accident Award / Penghargaan Kecelakaan Nihil - Pembangunan Rusun DKI Cakung Barat, Jakarta Timur	Zero Accident Award - Nil - Construction of West Cakung DKI Flats, East Jakarta	Kementerian Tenaga Kerja Ministry of Manpower	2023
12	Program Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Tempat Kerja dengan kategori GOLD - Pembangunan/Peningkatan Kapasitas Sungai/Kali Besar dan Sodetan/Kanal Museum Bahari DKI Jakarta	COVID-19 Prevention and Control Program in the Workplace with the GOLD category - Construction/ Capacity Building of Rivers/Kali Besar and Sodetan/Canal of Museum Bahari DKI Jakarta	Kementerian Tenaga Kerja Ministry of Manpower	2023
13	Zero Accident Award / Penghargaan Kecelakaan Nihil - Proyek Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Sungai/Kali Besar dan Sodetan/Kanal Museum Bahari	Zero Accident Award - Nil - Construction and Capacity Building Project of River/Kali Besar and Sodetan/Canal of Museum Bahari	Kementerian Tenaga Kerja Ministry of Manpower	2023
14	Program Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Tempat Kerja dengan kategori GOLD - Proyek Paket Pembangunan Waduk Brigif dan Waduk Lebak Bulus beserta Kelengkapannya	COVID-19 Prevention and Control Program in the Workplace with the GOLD category - Brigif Reservoir and Lebak Bulus Reservoir Development Package Project and their Completeness	Kementerian Tenaga Kerja Ministry of Manpower	2023
15	Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja dengan kategori SILVER	HIV-AIDS Prevention and Control Program in the workplace with the SILVER category	Kementerian Tenaga Kerja Ministry of Manpower	2023
16	Zero Accident Award / Penghargaan Kecelakaan Nihil - Kota Jambi, Provinsi Jambi	Zero Accident Award - Nil - Jambi City, Jambi Province	Kementerian Tenaga Kerja Ministry of Manpower	2023
17	Proyek dengan Hasil International Roughness Index (Iri) Test TERBAIK di Tol Cisumdawu	Project with BEST International Roughness Index (Iri) Test Results on Cisumdawu Toll Road	PT Citra Karya Jabar Tol	2023
18	The Best of Indonesia CSR Award-IV 2023, Program: Green Energy, Score: 85, Gold Award (Excellent)	The Best of Indonesia CSR Award-IV 2023, Program: Green Energy, Score: 85, Gold Award (Excellent)	Economic Review	2023
19	Iuran Tepat Bulan (ITB) Terbaik Periode Tahun 2023	The Best Monthly Contribution (Iuran Tepat Bulan: ITB) for the 2023 Period	BPJS Ketenagakerjaan BPJS Employment	2023
20	Penghargaan K3 Zero Accident - Proyek Penyelesaian Bendungan Keureuto, Aceh Utara	OHS Zero Accident Award - Keureuto Dam Completion Project, North Aceh	Kementerian Tenaga Kerja Ministry of Manpower	2023
21	Penghargaan K3 Zero Accident - Proyek Pengendali Banjir dan Rob Sungai Loji dan Banger paket 2, Kota Pekalongan	OHS Zero Accident Award - Flood Control Project and Rob Sungai Loji and Banger package 2, Pekalongan City	Kementerian Tenaga Kerja Ministry of Manpower	2023
22	Penghargaan K3 Zero Accident - Proyek Bendungan Sepaku Semoi, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur	OHS Zero Accident Award - Sepaku Semoi Dam Project, North Penajam Paser Regency, East Kalimantan	Kementerian Tenaga Kerja Ministry of Manpower	2023
23	Penghargaan K3 Zero Accident - Rentang Irrigation Modernization Project LSS-05, Kabupaten Indramayu; Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Tempat Kerja Kategori GOLD - Rentang Irrigation Modernization Project LSS-05, Kabupaten Indramayu	OHS Zero Accident Award - Range Irrigation Modernization Project LSS-05, Indramayu Regency; Award for COVID-19 Prevention and Control Program in the Workplace GOLD Category - Rentang Irrigation Modernization Project LSS-05, Indramayu Regency	Kementerian Tenaga Kerja Ministry of Manpower	2023

No	Nama Penghargaan	Award Name	Penyelenggara Organizers	Tahun Year
24	Best SOE 2023 with TOP Financial Performance and Expanding Business Activities (Cat: Infrastructure Services)	Best SOE 2023 with TOP Financial Performance and Expanding Business Activities (Cat: Infrastructure Services)	Warta Ekonomi	2023
25	Most Brilliant Overall Pillars of Human Capital Drivers 2023	Most Brilliant Overall Pillars of Human Capital Drivers 2023	Indonesia Human Capital Brilliant Awards	2023
26	Most Brilliant Leadership Quality 2023	Most Brilliant Leadership Quality 2023	Indonesia Human Capital Brilliant Awards	2023
27	Most Brilliant Company Agility 2023	Most Brilliant Company Agility 2023	Indonesia Human Capital Brilliant Awards	2023
28	Brilliant Human Capital Director of Year 2023	Brilliant Human Capital Director of Year 2023	Indonesia Human Capital Brilliant Awards	2023
29	Best Commercial Reputation in Construction Category	Best Commercial Reputation in Construction Category	5th Anniversary Indonesia BUMN Awards 2023 - The Economics	2023
30	Top Human Capital Awards 2023 #4 Stars	Top Human Capital Awards 2023 #4 Stars	Top Human Capital Awards 2023	2023
31	The Most Committed Human Capital Leader 2023	The Most Committed Human Capital Leader 2023	Top Human Capital Awards 2023	2023
32	The High Performing Human Capital Director 2023	The High Performing Human Capital Director 2023	Top Human Capital Awards 2023	2023
33	The Best Talent Mobility 2023	The Best Talent Mobility 2023	Economic Review	2023
34	Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award	Public Information Disclosure (Keterbukaan Informasi Publik: KIP) Award	BUMN Track	2023
35	CEO Safety Leadership	CEO Safety Leadership	ICSA 2023	2023
36	Director Safety Leadership	Director Safety Leadership	ICSA 2023	2023
37	Safety Performance	Safety Performance	ICSA 2023	2023
38	Emergency Response	Emergency Response	ICSA 2023	2023
39	MURI: Pengerjaan Galian Terowong Spillway dengan Tingkat Kemiringan Tertinggi	MURI: Work on Excavating the Highest Slope Spillway Tunnel	MURI	2023
40	MURI: Pengerjaan Galian Terowong Spillway Terlebar	MURI: Work on the Widest Spillway Tunnel Excavation	MURI	2023
41	MURI: Pengerjaan Jalan Tol Tipe Konstruksi Rigid dengan Nilai International Roughness Index (IRI) Terendah	MURI: Construction Type Rigid Toll Road Work with the Lowest International Roughness Index (IRI) Value	MURI	2023
42	Best CEO Indonesia Digital Innovation and Achievement of the Year	Best CEO Indonesia Digital Innovation and Achievement of the Year	Indonesia Digital Innovation and Achievement Awards 2023	2023
43	Best Digital Organization and IOT Implementation 2023	Best Digital Organization and IOT Implementation 2023	Indonesia Digital Innovation and Achievement Awards 2023	2023
44	TOP 100 CEO 2023	TOP 100 CEO 2023	Infobank	2023
45	5th TOP Digital Corporate Brand Award 2023	5th TOP Digital Corporate Brand Award 2023	InfoEkonomi	2023
46	Peringkat 1 Nasional KIP Kategori BUMN	1st Ranked National KIP in SOE Category	Wakil Presiden Rep. Indonesia - Komisi Informasi Pusat RI Vice President of the Republic of Indonesia - Central Information Commission of the Republic of Indonesia	2023

SERTIFIKASI

Certifications



ISO 45001:2018
Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Occupational Health and Safety Management System (OHS)
20 Maret/ March 2022 – 19 Maret/ March 2025



ISO 21500:2021
Guidance on Project Management
4 Januari/ January 2024 – 4 Januari/ January 2027



ISO 21502 : 2020
Guidance on Project Management
4 Januari/ January 2024 – 4 Januari/ January 2027



ISO 37001 : 2016
Sistem Manajemen Anti Penyuaan Anti-Bribery Management System
15 Juli/ July 2020 – 14 Juni/ June 2023



ISO 9001 : 2015
Sistem Manajemen Management System
21 Desember/ December 2023 – 20 Desember/ December 2026



ISO 31000 : 2018
Sistem Manajemen Risiko Risk Management System
19 Desember/ December 2023 – 18 Desember/ December 2024



ISO 19650-2 : 2018
Digitalisasi Organisasi Organizational Digitalization
3 April/ April 2023-2 April/ April 2024

PERISTIWA PENTING

Important Events



1 - 9 / 2 / 2023
 Bangun Instalasi pengolahan air di IKN, Brantas Abipraya tanda tangani proyek sepaku paket
 Build a water treatment plant at IKN, Brantas Abipraya signs the sepaku package project



6 / 2 / 2023
 Groundbreaking Jalan Tol Probolinggo bersama Presiden RI Bapak Joko Widodo
 Groundbreaking of Probolinggo Toll Road with the President of the Republic of Indonesia, Mr. Joko Widodo



7 / 2 / 2023
 Mengadakan Abipraya Youth Gathering, dihadiri Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga, Abipraya Muda siap berkontribusi penuh bangun Indonesia.
 The Abipraya Youth Gathering, attended by Special Staff III of the Ministry of SOE (BUMN), Arya Sinulingga, Abipraya Muda is ready to fully contribute to building Indonesia.



16 / 2 / 2023
 Brantas Abipraya Menandatangani Kontrak Proyek Pembangunan Jalan Kerja Kawasan Sub BWP 1B dan 1C di IKN
 Brantas Abipraya Signed a Work Road Construction Project Contract for Sub BWP Areas 1B and 1C at IKN



1 / 3 / 2023
 Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada PT Brantas Abipraya
 Submission of BPK RI Examination Report to PT Brantas Abipraya



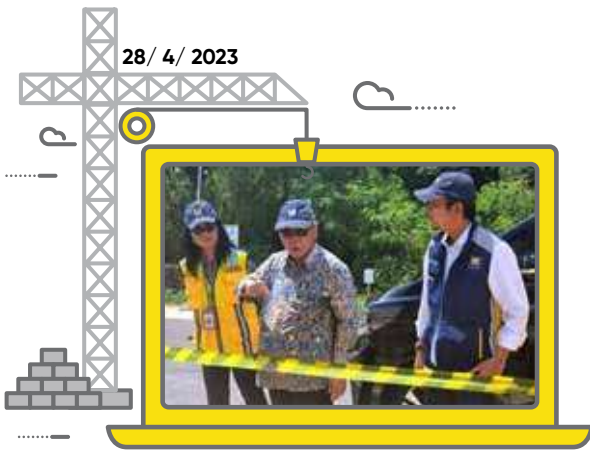
12 / 3 / 2023
 HUT Kementerian BUMN, Brantas Abipraya Menggelar Jalan Sehat Serentak di Bantaeng dan Makassar
 Anniversary of the Ministry of SOEs, Brantas Abipraya Held Healthy Roads Simultaneously in Bantaeng and Makassar



Safari Ramadhan BUMN 2023, Abipraya Gelar Pasar Murah 1000 Paket Sembako
 SOEs Ramadhan Safari 2023, Abipraya Holds Cheap Market for 1000 Basic Food Packages



Groundbreaking Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Brantas Abipraya Konsorsium dengan Kepemilikan Saham 2,5%
 Groundbreaking of Yogyakarta-Bawen Toll Road Development, Brantas Abipraya Consortium with 2.5% Share Ownership



Kunjungan Kerja Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan ke Proyek Peningkatan Infrastruktur Labuan Bajo Garapan Brantas Abipraya
 Working Visit of the Minister of PUPR and Minister of Transportation to the Labuan Bajo Infrastructure Improvement Project by Brantas Abipraya



Brantas Abipraya menggelar Halal Bihalal Insan Abipraya, Silaturahmi keluarga besar Brantas Abipraya
 Brantas Abipraya held Halal Bihalal Insan Abipraya, Brantas Abipraya's big family gathering



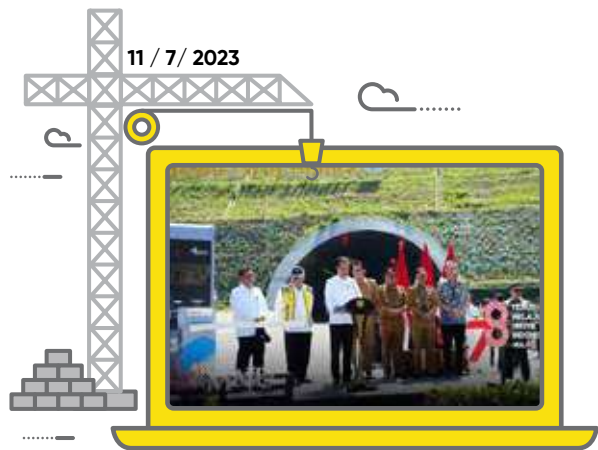
Brantas Abipraya Bangun Gedung DPRD Sulawesi Barat Berteknologi RISHA
 Brantas Abipraya Builds West Sulawesi DPRD Building with RISHA Technology



Sinergi Brantas Abipraya dan KPPU, Sosialisasikan Kepatuhan Persaingan Usaha di Perusahaan
 The synergy between Brantas Abipraya and KPPU, Socializing Business Competition Compliance in the Company



Brantas Abipraya Salurkan 18 Ekor Sapi dan 88 Ekor Kambing untuk Hari Raya Idul Adha
Brantas Abipraya Distributes 18 Cows and 88 Goats for Eid Al-Adha



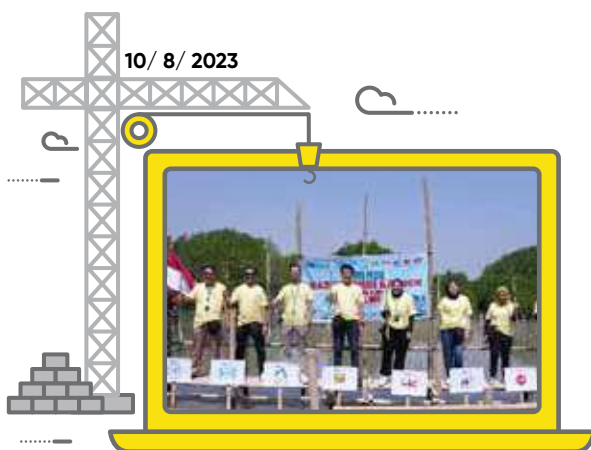
Peresmian Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo
Inauguration of Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) Toll Road by the President of the Republic of Indonesia, Mr. Joko Widodo



Rapat Kerja Tahun 2023, AKHLAK for Best Performance
Working Meeting 2023, AKHLAK for Best Performance



Brantas Abipraya Gelar Townhall Meeting, Peringati HUT AKHLAK yang ke-3
Brantas Abipraya Holds Townhall Meeting, Commemorates 3rd AKHLAK Anniversary



Brantas Abipraya Berkolaborasi Tanam Bibit Mangrove di Demak
Brantas Abipraya Collaborates to Plant Mangrove Seedlings in Demak



Brantas Abipraya menggelar upacara dan pengibaran bendera untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia di Gunung Gede
Brantas Abipraya held a ceremony and flag-raising to commemorate Indonesia's Independence Day at Gunung Gede



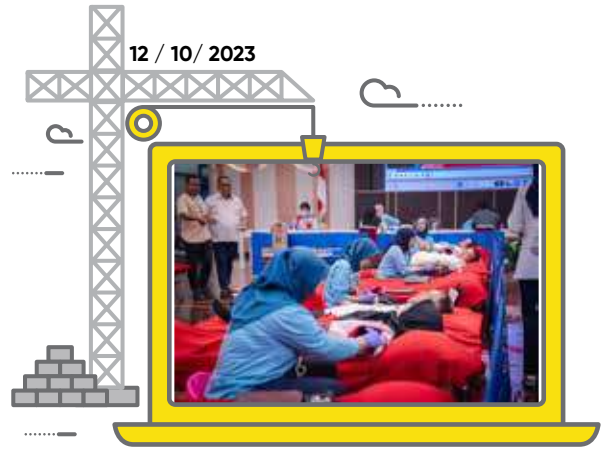
Peresmian SPAM Regional Mebidang, Siap Penuhi Air Minum 440.000 Jiwa di Sumut oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo
 Inauguration of Mebidang Regional SPAM, Ready to Fulfill 440,000 Drinking Water in North Sumatra by the President of the Republic of Indonesia, Mr. Joko Widodo



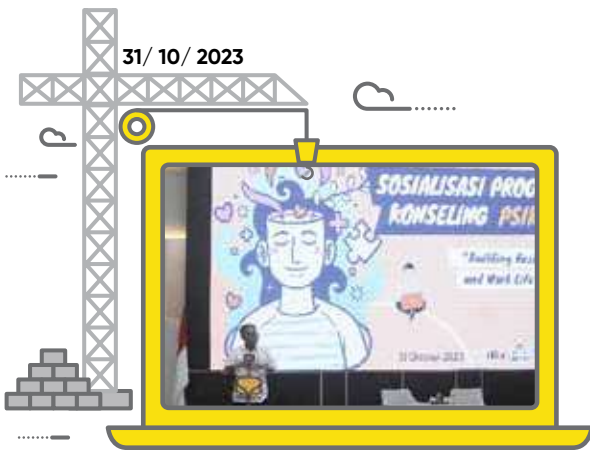
Pengisian Awal Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur bersama Presiden RI Bapak Joko Widodo
 Initial Filling of the Sepaku Semoi Dam in North Penajam Paser, East Kalimantan, with the President of the Republic of Indonesia, Mr. Joko Widodo



Jalin kerjasama dengan China, Brantas Abipraya menandatangani MOU dengan Zhejiang Dafeng Industries
 Collaborate with China, Brantas Abipraya signs MOU with Zhejiang Dafeng Industries



Kegiatan Donor Darah yang diselenggarakan Brantas Abipraya untuk Menyambut HUT ke-43 Abipraya
 Blood Donation Activities organized by Brantas Abipraya to Welcome Abipraya's 43rd Anniversary



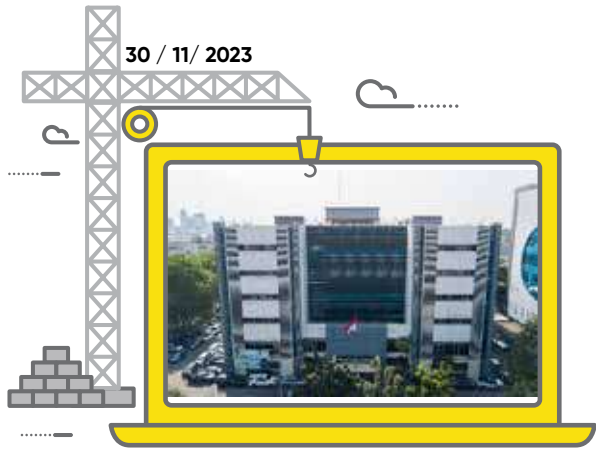
Srikandi Abipraya bersama IIBA dan BSI Berkolaborasi mengadakan Seminar Kesehatan Seputar Mental Health
 Srikandi Abipraya, together with IIBA and BSI, collaborate to hold a Health Seminar About Mental Health



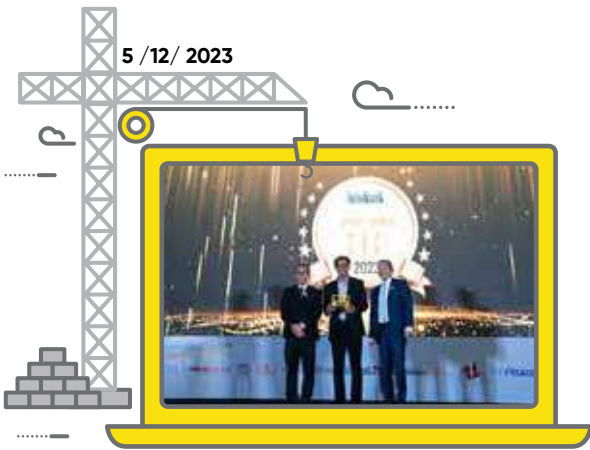
Kolaborasi TJSL BUMN Tahun 2023 Tanalino Lestari II, Labuan Bajo
 CSR/TJSL SOEs Collaboration in 2023 Tanalino Lestari II, Labuan Bajo



HUT ke-43 Brantas Abipraya Berbagi Keceriaan untuk Semua Lapisan Insan Abipraya dan Lingkungan
Brantas Abipraya's 43rd Anniversary Sharing Joy for All Layers of Abipraya People and the Environment



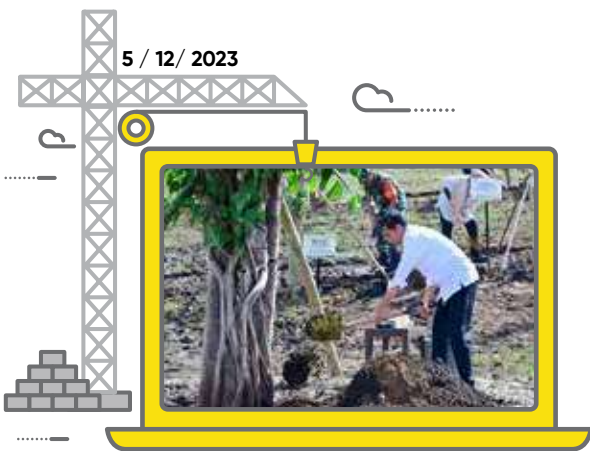
Brantas Abipraya menerima Penanaman Modal Negara non-Tunai, Yaitu gedung Sapta Taruna
Brantas Abipraya receives non-cash State Investment, which is Sapta Taruna building



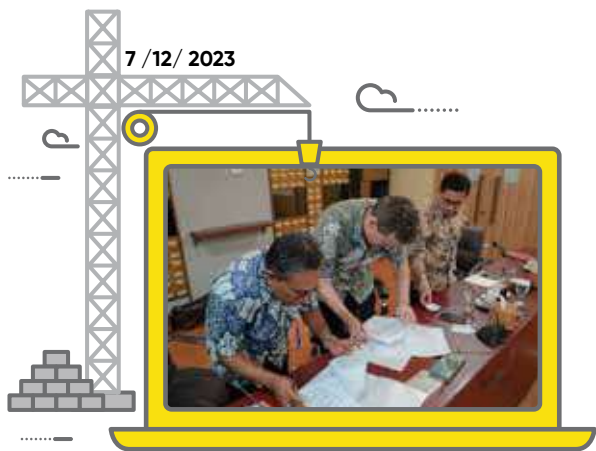
Direktur Operasi II Brantas Abipraya, Purnomo mewakili Sugeng Rochadi, Direktur Utama Brantas Abipraya atas raih penghargaan Top 100 CEO dari Infobank
Director of Operations II Brantas Abipraya, Purnomo represented Sugeng Rochadi, President Director of Brantas Abipraya for winning the Top 100 CEO award from Infobank



Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Proyek Bendungan Mbay, NTT yang Sedang Dikerjakan Brantas Abipraya
President Joko Widodo's Visit to Mbay Dam Project, NTT Underway by Brantas Abipraya



Presiden Joko Widodo Menanam Pohon di Embung Anak Munting Proyek yang Dikerjakan Brantas Abipraya di NTT
President Joko Widodo Plants Trees in Embung Anak Munting Project Undertaken by Brantas Abipraya in NTT



Bersinergi dengan Monash University Indonesia, Brantas Abipraya Tandatangani MoU untuk Tingkatkan Kompetensi
Synergizing with Monash University Indonesia, Brantas Abipraya Signs MoU to Improve Competency



Peringatan Hari Ibu, Ketua Srikandi Abipraya sebagai Narasumber untuk Topik Employee Well-Being Concern, Dihadiri oleh Menteri Erick Thohir
 In commemoration of Mother's Day, Chief of Srikandi Abipraya as the Source Person for the Topic of Employee Well-Being Concern, Attended by Minister Erick Thohir



Ratusan Anak Antusias Ikuti Khitanan Massal yang Digelar Brantas Abipraya.
 Hundreds of Children Enthusiastically Join Mass Circumcision Held by Brantas Abipraya.



Brantas Abipraya Raih Penghargaan BUMN Terbaik di Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2023
 Brantas Abipraya Wins the Best BUMN Award at the 2023 Public Information Disclosure Award

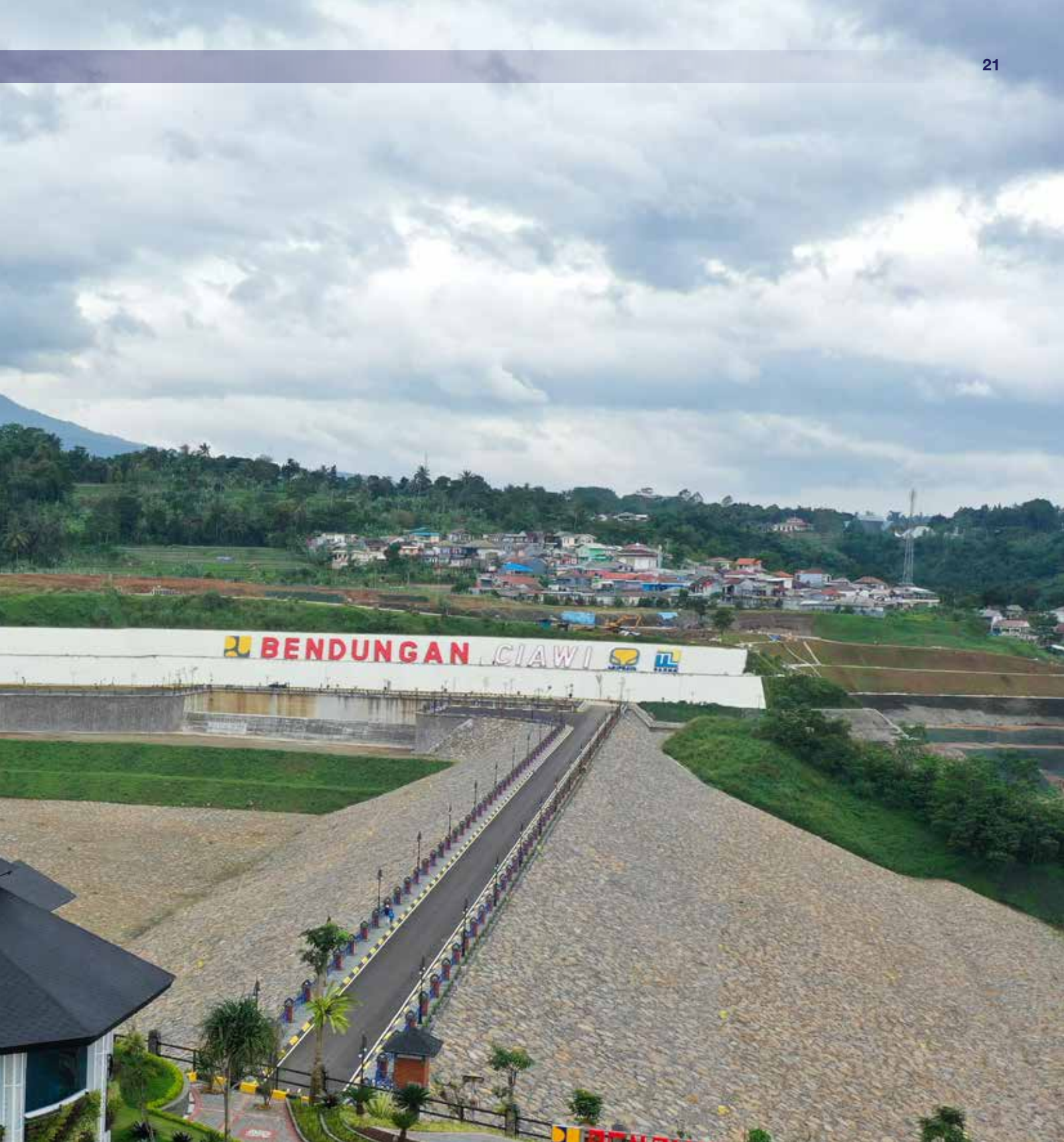


Bersamaan dengan Peringatan Hari Ibu, Brantas Abipraya Mengadakan Bazaar Akhir Tahun
 Along with Mother's Day Commemoration, Brantas Abipraya Holds Year-End Bazaar



Laporan Manajemen

Management Report



SEBAGAI PERUSAHAAN YANG AGILE, PERSEROAN SELALU BERUPAYA UNTUK BERADAPTASI DENGAN KONDISI PASAR. KAMI MENYUSUN BERBAGAI TARGET BISNIS DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PERUBAHAN YANG TERJADI .

As an agile Company, we always strive to adapt with the market conditions. We set up various business targets by considering the current changes.

LAPORAN KOMISARIS

Board of Commissioners Report

LAPORAN MANAJEMEN
Management Report



HARYADI
KOMISARIS UTAMA/INDEPENDEN
PRESIDENT/INDEPENDENT COMMISSIONER

// Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus mendorong Direksi Perusahaan melanjutkan inovasi bisnis dalam rangka mewujudkan visi misi Perusahaan.

Board of Commissioners commits to continuously encourage the Company's Board of Directors to do business innovation to achieve the Company's vision and mission.

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Izinkan kami mengawali laporan ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, PT Brantas Abipraya dapat melewati tahun yang dinamis ini dan mencatat kinerja yang cukup baik bila mengingat berbagai tantangan yang mewarnai perjalanan usaha Perseroan di sepanjang tahun 2023.

Selanjutnya, perkenankan kami selaku Dewan Komisaris untuk menyampaikan pokok-pokok Laporan Pengawasan terhadap operasional Perseroan pada tahun buku 2023 yang merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Pengawasan dan Pemberian Nasehat kepada Direksi berdasarkan Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Pasal 31 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Program percepatan pembangunan oleh pemerintah Indonesia telah mendorong geliat pengembangan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Fokus pemerintah untuk dapat menumbuhkan potensi ekonomi masyarakat melalui pembangunan konektivitas dengan infrastruktur patut diapresiasi. Melalui pembangunan infrastruktur, keterhubungan antar daerah akan semakin terbuka, yang akan

Dear Shareholders and Stakeholders,

Allow us to start this report by giving thanks to God Almighty. PT Brantas Abipraya was able to go through this dynamic year and record quite a good performance considering the various challenges that will characterize the company's business journey throughout 2023.

Furthermore, please allow us, as the Board of Commissioners, to submit the main points of the supervision report on the company's operations in the 2023 financial year, which is part of the duties and responsibilities of supervising and providing advice to the Directors based on Article 108 of Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning limited liability companies and Article 31 of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State-owned Enterprises (BUMN).

The accelerated development program by the Indonesian government has encouraged infrastructure development throughout Indonesia. The government's focus on growing the community's economic potential through building connectivity with infrastructure should be appreciated. Through infrastructure development, connectivity between regions will become increasingly open, which will facilitate

memudahkan pertukaran barang dan jasa serta manusia antar daerah tersebut, dan memberikan keuntungan baik secara sosial maupun ekonomi.

Sebagai BUMN, Abipraya akan turut berkontribusi terhadap program di atas. Kemampuan yang dimiliki Abipraya akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Hal ini sekaligus memberikan hasil yang baik terhadap perkembangan operasional dan usaha perseroan yang berjalan beriringan dengan peningkatan infrastruktur di Indonesia.

Laporan tahunan Abipraya untuk tahun buku 2023 ini merupakan upaya untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja perseroan di sepanjang tahun 2023. Melalui buku laporan ini, manajemen perseroan mencoba merangkum dan mendokumentasikan perjalanan dan pencapaian perseroan di tahun 2023, yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari pertanggungjawaban manajemen perseroan dalam melakukan pengelolaan perseroan.

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS DAN HUBUNGAN KERJA DENGAN DIREKSI

Fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris merupakan bagian dari amanat pemegang saham yang telah diputuskan melalui mekanisme RUPS, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dewan Komisaris menjadi representasi atas kepentingan pemegang saham untuk mengawasi pengurusan perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Kompetensi anggota Dewan Komisaris memungkinkan untuk memberikan masukan kepada Direksi terkait arah dan strategi pengurusan perseroan; tentunya dengan batas-batas hak, wewenang dan kewajiban yang dimiliki Dewan Komisaris dan Direksi.

Hubungan antara fungsi pengurusan oleh Direksi dan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris harus berjalan secara sinergis. Dalam tatanan

the exchange of goods, services, and people between these regions and provide benefits both socially and economically.

As a BUMN, Abipraya will also contribute to those program. Abipraya's capabilities will have a positive impact on quality infrastructure development. This also provides good results for the company's operational and business development, which go hand in hand with improving infrastructure in Indonesia.

The goal of Abipraya's annual report for the 2023 fiscal year is to present a thorough overview of the business's performance in that year. The firm's management attempts to compile and record the company's accomplishments and journey through this report book, which will eventually become a part of management's accountability to the company in carrying out its management.

SUPERVISORY FUNCTIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND WORKING RELATIONS WITH THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners' supervisory role is an extension of the shareholders' mandate, which was determined both directly and indirectly through the GMS mechanism. In overseeing the Board of Directors' management of the corporation, the Board of Commissioners speaks for the interests of the shareholders. The Board of Directors can receive input from the competent members of the Board of Commissioners regarding the company's management strategy and direction, provided that the members stay within the boundaries of their respective roles and responsibilities.

The relationship between the management function of the Board of Directors and the supervisory function of the Board of

organisasi yang berlaku di perseroan, hubungan sinergis ini terbangun baik secara formal maupun informal. Secara formal, Dewan Komisaris memiliki forum rapat gabungan dengan mengundang direksi untuk melakukan fungsi pengawasan atas pengurusan perseroan yang dilakukan Direksi.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris menggelar 12 (dua belas) kali rapat gabungan dengan direksi. Rapat-rapat tersebut menjadi forum pembahasan sekaligus pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi, yang membahas beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemantauan dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2023 serta Rencana Jangka panjang Perseroan.
2. Pemantauan atas pelaksanaan penerapan GCG.
3. Pemantauan atas pelaksanaan investasi perseroan serta beberapa agenda strategis lainnya.

Pemantauan dan rekomendasi atas pelaksanaan RKAP disampaikan melalui monitoring dan evaluasi hasil kegiatan usaha Perseroan dalam pelaksanaan rapat rutin internal Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang dinyatakan dalam Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Melalui upaya pengembangan hubungan sinergis berlandaskan tatanan organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan, Dewan Komisaris berharap fungsi pengawasan dapat berjalan secara efektif dan menyeluruh, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap kinerja perseroan.

Commissioners must operate synergistically. In the organizational structure that applies to the company, this synergistic relationship is built both formally and informally. Formally, the Board of Commissioners has a joint meeting forum by inviting directors to carry out supervisory functions over the management of the company carried out by the Board of Directors.

In the year 2023, the Board of Directors and the Board of Commissioners convened twelve times together. The following topics were covered at these sessions, which served as a forum for the Board of Commissioners to monitor and discuss the performance of the Board of Directors:

1. Monitoring and providing recommendations on the implementation of the 2023 work plan and company budget (RKAP), as well as the company's long-term plan.
2. Monitoring the implementation of GCG.
3. Monitoring the implementation of the company's investments and several other strategic agendas.

Monitoring and recommendations on the implementation of the RKAP are conveyed through monitoring and evaluation of the results of the company's business activities in the implementation of routine internal meetings of the Board of Commissioners and joint meetings of the Board of Commissioners and Directors, as stated in the Minutes of Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors.

Through efforts to develop synergistic relationships based on an accountable organizational structure, the Board of Commissioners hopes that the supervisory function can run effectively and comprehensively, which will ultimately have a positive impact on the company's performance.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI MENGENAI PENGELOLAAN PERSEROAN

Sebagai representasi dari kepentingan pemegang saham, Dewan Komisaris memantau proses dan hasil penilaian kinerja direksi. Secara umum, penilaian kinerja direksi ditetapkan melalui mekanisme persetujuan RUPS, yang kemudian tertuang dalam Kontrak Manajemen.

Kontrak Manajemen ini, yang didalamnya terkandung *Key Performance Indicator* (KPI) menjadi dasar penilaian keberhasilan direksi dalam menjalankan roda usaha perseroan. KPI yang tertuang dalam Kontrak Manajemen perseroan memuat target-target operasional dan keuangan perseroan untuk tahun 2023. Penyusunan target-target tersebut didasarkan pada asumsi-asumsi situasi sosial dan perekonomian global serta dalam negeri. KPI ini menjadi salah satu indikator keberhasilan Direksi dalam melakukan pengelolaan perseroan, yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya.

EVALUASI KINERJA PERSEROAN DAN DIREKSI

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi secara keseluruhan telah menunjukkan kinerja yang baik sepanjang tahun 2023, yang tercermin dari indikator-indikator keuangan yang tersaji pada Laporan Keuangan Auditan Tahun Buku 2023. Bila dilihat dari Laporan Laba Rugi Konsolidasian, Perseroan membukukan Pendapatan Usaha yang meningkat 21,24% menjadi Rp4,86 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp4,01 triliun. Kenaikan ini disebabkan karena keberhasilan menjalankan strategi serta kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kepercayaan mitra kerja. Perseroan juga mampu membukukan Laba Bersih sebesar Rp201,90 miliar, meningkat 49,14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 135,38 miliar.

ASSESSMENT OF THE DIRECTORS' PERFORMANCE REGARDING COMPANY MANAGEMENT

As a representative of shareholder interests, the Board of Commissioners monitors the process and results of the performance assessment of directors. In general, the performance assessment of directors is determined through the GMS approval mechanism, which is then stated in the management contract.

The evaluation of the directors' performance in managing the company's operations is based on this management contract, which includes Key Performance Indicators (KPIs). The company's operational and financial goals for 2023 are included in the KPI found in the management contract. These goals have been prepared with assumptions about the social and economic conditions both at home and abroad. This KPI measures how well the Board of Directors is managing the business, which will eventually result in increased value for stakeholders and shareholders.

EVALUATION OF COMPANY AND BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE

The financial metrics shown in the Audited Financial Report for the 2023 Fiscal Year support the Board of Commissioners' assessment that the Board of Directors as a whole performed well in 2023. According to the consolidated profit and loss report, the company's operational income increased from IDR 4.01 trillion to IDR 4.86 trillion in the previous year, a 21.24% rise. This growth was brought about by the company's ability to keep its partners' trust and to successfully implement its plan. In addition, the business reported a net profit of IDR 201.90 billion, up 49.14% from IDR 135.38 billion the year before.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai strategi yang diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan target yang telah dicanangkan, di antaranya strategi penguatan eksistensi Perseroan di industri infrastruktur.

Dewan Komisaris juga melihat bahwa Direksi telah mampu melakukan pengelolaan risiko yang efektif. Upaya Direksi secara berkala dan berkelanjutan untuk terus mengembangkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dinilai dapat memberikan deteksi dini tentang adanya potensi risiko yang berpengaruh pada kinerja Perseroan.

Dalam hal teknologi informasi, Direksi telah menunjukkan kapabilitasnya melalui penggunaan teknologi otomatisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas. Direksi juga dinilai telah menerapkan prinsip kehati-hatian guna mendorong pertumbuhan bisnis non organik sesuai dengan masukan dari Dewan Komisaris sehingga dapat berkontribusi secara optimal pada kinerja Perseroan.

Dewan Komisaris merasa gembira atas pencapaian Perseroan yang dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diterima oleh Perseroan sepanjang tahun 2023, di antaranya Best SOE 2023 with TOP Financial Performance and Expanding Business Activities (Category: Infrastructure Services), World Safety Organization WSO Indonesia Safety Culture Award (WISCA) 2023, Kategori Gold (Bintang 4) dari World Safety Organization serta berbagai penghargaan keselamatan kerja lainnya. Tak hanya itu, di tahun 2023 Perseroan juga berhasil meraih peringkat 1 nasional Monev KIP dengan predikat "Informatif" pada kategori BUMN dengan capaian nilai 97,82.

According to the Board of Commissioners, this success is inextricably linked to a number of strategies that were successfully carried out and adhered to the predetermined goals, one of which was to fortify the company's position in the infrastructure sector.

The Board of Commissioners also sees that the Board of Directors has been able to carry out effective risk management. The Board of Directors' regular and continuous efforts to continue to develop an integrated and comprehensive risk management system framework and internal control structure are considered to be able to provide early detection of potential risks that have an impact on the company's performance.

In terms of information technology, the Board of Directors has demonstrated its capabilities through the use of automation technology to increase productivity. The Board of Directors is also considered to have implemented the precautionary principle to encourage non-organic business growth in accordance with input from the Board of Commissioners so that it can contribute optimally to the company's performance.

The Board of Commissioners is proud of the company's accomplishments, which proven by the various awards that received in 2023. These include the World Safety Organization's Gold Category (4 Star) award, the World Safety Organization's Best SOE 2023 with TOP Financial Performance and Expanding Business Activities (Category: Infrastructure Services), and numerous other work safety honors. Not only that, in 2023 the Company also succeeded in achieving 1st place in the national Monev KIP with the title "Informative" in the BUMN category with a score of 97.82.

Dewan Komisaris memandang bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari adanya sinergi yang baik. Untuk kedepannya, Dewan Komisaris berharap agar sinergi yang sudah terjalin dengan baik ini dapat dipertahankan guna mendukung pembangunan ekonomi nasional secara lebih optimal sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERSEROAN YANG DISUSUN DIREKSI

Perkembangan sektor infrastruktur pada beberapa tahun belakangan telah menciptakan ceruk pasar yang besar, sudah selayaknya perseroan dapat turut berkontribusi dan menjadi pemain yang diperhitungkan dalam industri ini. RKAP tahun 2024 telah disusun sebagai bagian dari arah pengembangan perseroan selama 1 (satu) tahun ke depan. Dewan Komisaris menyambut baik target-target kinerja yang telah dituangkan dalam RKAP tersebut. Kenaikan di seluruh target pos akun keuangan mengindikasikan optimisme Direksi untuk dapat mengoptimalkan kemampuan serta sumber daya Perseroan. Proyeksi pendapatan Usaha tahun 2024 yang dapat meningkat dibandingkan realisasi tahun 2023, serta proyeksi Laba tahun berjalan tahun 2024 yang dapat tumbuh hingga dibandingkan realisasi tahun 2023, menunjukkan bahwa Direksi memiliki motivasi yang kuat untuk dapat membawa perseroan ke tingkat yang lebih tinggi.

Penyusunan target RKAP telah melalui proses penelaahan dan persetujuan Dewan Komisaris sebagai pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya sekaligus mengemban amanat fungsi pengawasan atas pengelolaan perseroan, Dewan Komisaris telah memberikan masukan terkait asumsi-asumsi yang mendasari perhitungan target RKAP tersebut. Dewan Komisaris juga telah memberikan pandangan atas proyeksi kondisi makro dan mikro ekonomi, serta proyeksi sektor infrastruktur tahun

The Board of Commissioners believes that this success cannot be separated from good synergy. In the future, the Board of Commissioners hopes that this well-established synergy can be maintained to support national economic development more optimally so that it can have a positive impact on the wider community.

VIEWS ON THE COMPANY'S BUSINESS PROSPECTS PREPARED BY THE BOARD OF DIRECTORS

The development of the infrastructure sector in recent years has created a large market niche, so it is appropriate for the company to contribute and become a player to be reckoned with in this industry. The 2024 RKAP has been prepared as part of the company's development direction for the next year. The Board of Commissioners welcomes the performance targets outlined in the RKAP. The increase in all financial account target targets indicates the Board of Directors' optimism about optimizing the company's capabilities and resources. The projected business income in 2024, which could increase compared to the realization in 2023, as well as the projected profit for the current year in 2024, which could grow compared to the realization in 2023, show that the Board of Directors has a strong motivation to be able to take the company to a higher level.

The preparation of RKAP targets has gone through a process of review and approval by the Board of Commissioners. As a party that has competence in its field and also carries out the supervisory function over the management of the company, the Board of Commissioners has provided input regarding the assumptions underlying the calculation of the RKAP target. The Board of Commissioners has also provided views on projections of macro- and microeconomic conditions, as well as projections

2024 yang akan menjadi acuan dasar dari perkembangan industri.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tata Kelola perusahaan yang baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebuah pendekatan organisasi yang berlandaskan pada prinsip dan praktik pengelolaan korporasi yang sehat. Penerapan GCG dalam entitas usaha tentunya akan menciptakan sebuah tatanan organisasi yang tangguh, yang akan menjadi fondasi bagi pengembangan operasi dan usaha hingga ke masa yang akan datang.

Penerapan GCG di lingkup perseroan telah mengacu kepada pedoman penerapan GCG serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai salah satu organ utama, Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk mengambil peran dalam penerapan GCG secara konsisten. Fungsi pengawasan yang berjalan beriringan dengan fungsi pengelolaan oleh direksi menjadi catatan penting agar konsep keseimbangan 2 (dua) badan dalam entitas perseroan terbatas dapat terwujud.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) organ pendukung, yaitu Komite Audit, Komite Manajemen Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Ketiga komite ini bekerja sesuai dengan lingkup pengawasan, yang kemudian bersinergi dengan beberapa perangkat organisasi yang berada di bawah Direksi untuk dapat menciptakan konsep keseimbangan seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Dewan Komisaris memandang, penerapan GCG di lingkup perseroan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, serta harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Direksi telah melekatkan manajemen risiko sebagai skema mitigasi atas kemungkinan

for the infrastructure sector in 2024, which will be the basic reference for industrial development.

VIEWS ON THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

Good Corporate Governance (GCG) is an organizational approach that is based on the principles and practices of healthy corporate management. The implementation of GCG in business entities will certainly create a strong organizational structure, which will become the foundation for operational and business development in the future.

The company's implementation of GCG has referred to relevant laws and regulations as well as the GCG implementation guidelines. The Board of Commissioners, one of the primary organs, is accountable for helping to ensure that GCG is implemented consistently. It is imperative to acknowledge the supervisory function, which is closely linked to the management function performed by the board of directors, in order to achieve the desired balance between the two bodies within an entity that is a limited liability corporation.

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners is assisted by three supporting organs, namely the Audit Committee, the Risk Management Committee, and the Nomination and Remuneration Committee. These three committees work in accordance with the scope of supervision, which then synergizes with several organizational devices under the Board of Directors to create the concept of balance as previously mentioned.

The Board of Commissioners views that the implementation of GCG within the company has proceeded in accordance with existing regulations as well as the expectations of shareholders and other stakeholders. The Board of Directors has embedded risk management as



risiko yang ada, dan telah menerapkan audit sebagai mekanisme pengawasan internal yang dapat memberikan rekomendasi dan perbaikan. Kedua pendekatan ini, manajemen risiko dan audit, memberikan landasan yang cukup kuat bagi penerapan GCG yang akan berujung pada praktik korporasi yang sehat.

Di samping itu, perseroan telah menerapkan proses audit eksternal oleh akuntan publik atas laporan keuangan perseroan. Agar independensi akuntan publik terjaga, mekanisme penunjukan akuntan publik dilakukan hingga level persetujuan pemegang saham dalam RUPS. Mekanisme ini diharapkan dapat menciptakan proses audit yang lepas dari benturan kepentingan, khususnya dari lingkup internal perseroan. Laporan keuangan teraudit yang telah disertai opini dari akuntan publik akan menjadi laporan dasar yang dapat mencerminkan kinerja perseroan yang telah disesuaikan dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia.

Melalui keterlibatan Dewan Komisaris atas praktik GCG di lingkup Perseroan seperti yang telah diuraikan di atas, Dewan Komisaris berharap agar tata kelola organisasi perseroan yang kuat dapat memberikan wadah bagi perkembangan perseroan hingga masa-masa yang akan datang.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris diwujudkan melalui organ-organ pendukungnya, yaitu Komite Audit, Komite Manajemen Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan serta pemantauan terhadap keandalan dan integritas Laporan Keuangan, proses audit, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, tingkat

a mitigation scheme for possible existing risks and has implemented audits as an internal monitoring mechanism that can provide recommendations and improvements. These two approaches, risk management and audit, provide a strong foundation enough for implementing GCG, which will lead to healthy corporate practices.

In addition, the company has implemented an external audit process by a public accountant on the company's financial reports. In order to maintain the independence of public accountants, the mechanism for appointing public accountants is carried out up to the level of shareholder approval at the GMS. This mechanism is expected to create an audit process that is free from conflicts of interest, especially within the company's internal scope. An audited financial report that has been accompanied by an opinion from a public accountant will be a basic report that can reflect the company's performance, which has been adjusted to the financial reporting standards applicable in Indonesia.

Through the involvement of the Board of Commissioners in GCG practices within the company as described above, the Board of Commissioners hopes that the company's strong organizational governance can provide a platform for the company's development in the future.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The supervisory function of the Board of Commissioners is realized through its supporting organs, namely the Audit Committee, Risk Management Committee, and Nomination and Remuneration Committee. The Audit Committee was formed to assist the Board of Commissioners in supervising and monitoring the reliability and integrity of financial reports, the audit process, compliance with applicable laws, the level of

independensi, kualifikasi, dan kinerja dari internal dan eksternal auditor.

Komite Audit perseroan senantiasa mendorong terbentuknya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang baik, meningkatkan keterbukaan dalam pelaporan keuangan, mengkaji ruang lingkup dan ketepatan penugasan auditor eksternal meliputi dan tidak terbatas kepada kewajaran biaya jasa audit, pengalaman, independensi, serta objektivitas.

Dewan Komisaris menilai Komite Audit telah bekerja sangat baik dengan membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap proses audit atas Laporan Keuangan Tahun 2023 serta bersama-sama Satuan Pengawasan Internal mengikuti proses audit internal sehingga dapat mengetahui secara langsung kondisi di lapangan dan hal-hal yang masih perlu diperbaiki.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO UNTUK MITIGASI ATAS RISIKO-RISIKO YANG SEDANG ATAU AKAN DIHADAPI PERSEROAN

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan untuk memberikan dukungan dalam mengawasi implementasi kebijakan nominasi dan remunerasi di lingkup perseroan dan telah menjalankan fungsinya dengan baik. di tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyusun usulan remunerasi dewan Komisaris dan Direksi perseroan tahun 2023 serta tantiem atas kinerja tahun buku 2022 yang telah disahkan oleh pemegang saham.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN DAN PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM

Salah satu bentuk penerapan GCG di lingkup perseroan dilakukan dengan pengimplementasian sistem pelaporan

independence, qualifications, and performance of internal and external auditors.

The company's Audit Committee always encourages the establishment of a good internal monitoring and control system, increasing openness in financial reporting, and reviewing the scope and accuracy of external auditor assignments, including but not limited to the reasonableness of audit service fees, experience, independence, and objectivity.

The Board of Commissioners assesses that the Audit Committee has worked very well by assisting the Board of Commissioners in supervising the audit process for the 2023 Financial Report and, together with the Internal Audit Unit, following the internal audit process so that they can find out directly about conditions in the field and things that still need to be repaired.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE TO MITIGATE RISKS CURRENTLY OR WILL BE FACED BY THE COMPANY

The formation of the Nomination and Remuneration Committee was carried out to provide support in overseeing the implementation of nomination and remuneration policies within the company, and it has carried out its functions well. In 2023, the Nomination and Remuneration Committee has prepared proposals for remuneration for the company's Board of Commissioners and Directors for 2023, as well as bonuses for performance of the 2022 financial year, that has been approved by shareholders.

VIEWS ON THE IMPLEMENTATION AND MANAGEMENT OF WHISTLEBLOWING SYSTEMS

One form of implementing GCG within the company is the implementation of a violation reporting system, or Whistleblowing System (WBS).



pelanggaran, atau *Whistle Blowing System* (WBS). Mekanisme WBS memungkinkan pemangku kepentingan dan pihak yang berhubungan dengan perseroan turut serta melakukan pengawasan dan pelaporan atas kemungkinan praktik kecurangan yang terjadi, yang biasanya dikenal sebagai *Fraud Control System*.

Perseroan telah memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan dalam hal adanya indikasi terjadinya suatu pelanggaran *Code of Conduct* di lingkungan perseroan. Pelaporan tersebut dapat dilakukan oleh setiap insan perseroan dan oleh pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sistem dan mekanisme tersebut, Dewan Komisaris memiliki keterlibatan dengan tingkat pelaporan tertentu. Fungsi penerima laporan pelanggaran akan menyampaikan laporan beserta data dan fakta yang didapat dari pelapor kepada Dewan Komisaris tanpa mengungkapkan identitas pelapor jika yang terlapor adalah Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap laporan pelanggaran apakah diperlukan investigasi lebih lanjut atau sudah cukup dilakukan penetapan hukuman. Dengan keterlibatan dewan Komisaris pada *level* tersebut, mekanisme WBS perseroan akan dapat berjalan dengan baik.

PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Pada kesempatan ini Dewan Komisaris juga ingin melaporkan bahwa susunan Dewan Komisaris telah mengalami perubahan di mana Bapak Khalawi Abdul Hamid tidak lagi berada di jajaran Dewan Komisaris. Pada tahun 2023 Abipraya melantik dua orang anggota Dewan Komisaris yang baru yaitu Ibu Diana Kusumastuti dan Bapak Tursandi Alwi. Adapun alasan perubahan susunan Dewan Komisaris ini karena penyegaran organisasi dalam rangka upaya peningkatan kinerja Perseroan.

The WBS mechanism allows stakeholders and parties related to the company to participate in monitoring and reporting on possible fraudulent practices that occur, which is usually known as the Fraud Control System.

The company has a reporting and handling mechanism in the event of an indication of a violation of the Code of Conduct within the company. This reporting can be carried out by every person in the company and by other stakeholders.

In this system and mechanism, the Board of Commissioners has a certain level of involvement in reporting. The function of the recipient of the violation report will submit a report along with data and facts obtained from the whistleblower to the Board of Commissioners without revealing the identity of the reporter if the reported person is the Board of Directors. With the involvement of the Board of Commissioners at this level, the company's WBS mechanism will be able to run well.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

On this occasion, the Board of Commissioners would also like to report that the composition of the Board of Commissioners has undergone changes, and Mr. Khalawi Abdul Hamid is no longer on the Board of Commissioners. In 2023, Abipraya appointed two new members of the Board of Commissioners, namely Mrs. Diana Kusumastuti and Mr. Tursandi Alwi. The reason for this change in the composition of the Board of Commissioners is due to organizational refreshment in order to improve the company's performance.

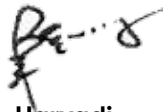
PENUTUP

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemegang saham, pelanggan dan mitra usaha, Direksi dan karyawan, atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan, kepemimpinan, kerja keras serta dedikasi dalam mendukung laju perseroan di tengah kondisi yang menantang ini. Semoga perseroan terus dapat bertumbuh untuk mewujudkan visi dan misinya, memberikan kontribusi kepada pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan.

CONCLUSION

The Board of Commissioners would like to thank all shareholders, customers, business partners, directors, and employees for the trust and support given, leadership, hard work, and dedication in supporting the company's progress amidst these challenging conditions. Hopefully, the company can continue to grow to realize its vision and mission, contributing to shareholders and all stakeholders.

Jakarta, April 2024



Haryadi

Komisaris Utama/Independen

President/Independent Commissioner

LAPORAN DIREKSI

Board of Directors' Report

LAPORAN MANAJEMEN
Management Report



SUGENG ROCHADI
DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR

Perseroan meningkatkan fungsi riset dan pengembangan dalam menghasilkan solusi inovatif yang dapat meningkatkan efisiensi operasional sehingga dapat semakin kompetitif dalam menghadapi persaingan yang ketat.

The Company improves the research and development function in producing innovative solutions that can improve operational efficiency so that it can be more competitive in the face of fierce competition

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Pertama-tama, perkenankan kami memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas tuntunan-Nya, Perseroan dapat menjaga keberlangsungan usaha di sepanjang tahun 2023.

Menjadi suatu kehormatan bagi kami selaku Direksi Perseroan pada kesempatan ini untuk dapat menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023 kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan Tahunan ini memuat kinerja dan beragam pencapaian Perseroan sepanjang tahun 2023.

Dear Shareholders and Stakeholders,

First of all, allow us to express our thanks to the presence of Almighty God because, with His guidance, the company can maintain business continuity throughout 2023.

It is an honor for us as the company's Directors to take this opportunity to present the company's 2023 annual report to shareholders and other stakeholders. This annual report contains the company's performance and various achievements throughout 2023.

KONDISI EKONOMI MAKRO

Konflik Rusia dan Ukraina yang terjadi sejak tahun 2022 lalu telah menjadi pendorong utama ketidakpastian dan memberikan efek domino pada perekonomian global diantaranya peningkatan harga komoditas, lonjakan harga gas hingga dampak terhadap peningkatan harga pupuk disertai dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan lainnya. Selain itu, Pemerintah di berbagai negara mengalami kesulitan dalam upaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga harga di dalam negeri, inflasi di berbagai negara pun tak terelakan.

MACROECONOMIC CONDITIONS

Since 2022, the conflict between Russia and Ukraine has been the primary source of uncertainty and has had a cascading effect on the world economy. This includes rising commodity and gas prices, as well as the impact of rising fertilizer prices coupled with rising costs for other necessities. Aside from that, governments around the world are struggling to strike a balance between sustaining domestic pricing and economic growth. Inflation is unavoidable in many nations.

Belum reda konflik Rusia-Ukraina (Laut Hitam), di tahun 2023 dunia kembali diguncang dengan eskalasi geopolitik di Laut Merah antara Israel dan Palestina. Meskipun dampak gejolak kedua negara tersebut belum terasa di tahun 2023 ini, pengaruhnya harus tetap diwaspadai mengingat Laut Merah merupakan jalur strategis transportasi berbagai komoditas global. Selain geopolitik, ketidakpastian lain yang perlu diantisipasi adalah kinerja ekonomi China yang merupakan salah satu negara dengan fundamental perekonomian yang kuat di dunia. Negeri Tirai Bambu itu menutup kinerja tahunan nasional yang tidak mengesankan di akhir tahun 2023.

Sementara itu, berbeda dengan situasi global, perekonomian Indonesia justru tetap tumbuh kuat dan stabil. Berdasarkan data yang dirilis kementerian keuangan, meskipun berangkat dari basis yang tinggi (*high base*) pada tahun 2022, perekonomian Indonesia tetap berhasil mencatatkan pertumbuhan yang kuat yakni sebesar 5,05% untuk keseluruhan tahun 2023.

Selain itu, perkembangan ekonomi makro domestik dapat dikatakan cukup positif karena adanya program percepatan pembangunan infrastruktur yang membawa dampak pertumbuhan sektor konstruksi yang hingga saat ini masih menjadi fokus utama pemerintah. Maraknya proyek infrastruktur jadi momen tepat bagi Perseroan untuk meningkatkan kinerja.

KINERJA PERSEROAN

Dengan kondisi makro ekonomi yang cukup kondusif, Direksi patut berbangga dengan pencapaian kinerja seluruh Insan Abipraya di sepanjang tahun 2023.

Sepanjang tahun 2023, Perseroan mampu mempersembahkan kinerja yang positif baik dari sisi keuangan, maupun operasional. Berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun

The geopolitical escalation between Israel and Palestine in the Red Sea in 2023 will rock the world once more, adding to the ongoing turmoil surrounding the Russia-Ukraine (Black Sea) confrontation. Given that the Red Sea serves as a vital transit route for a number of international commodities, we need to be mindful of the implications of the unrest between the two nations even though they won't be felt until end of 2023. Aside from geopolitics, the performance of China's economy—which is among the nations with the strongest economic fundamentals globally—needs to be anticipated. By the end of 2023, the nation behind the Bamboo Curtain had concluded its lackluster national annual performance.

In the meantime, the Indonesian economy is still expanding steadily and robustly in contrast to the state of the world economy. Based on data released by the finance ministry, despite departing from a high base in 2022, the Indonesian economy still managed to record strong growth of 5.05% for the whole of 2023.

Apart from that, domestic macroeconomic developments can be said to be quite positive due to the accelerated infrastructure development program, which has had an impact on the growth of the construction sector, which is currently still the government's main focus. The rise of infrastructure projects is the right moment for the company to improve its performance.

COMPANY PERFORMANCE

With fairly conducive macroeconomic conditions, the Board of Directors should be proud of the performance achievements of all Abipraya personnel throughout 2023.

The business will be able to demonstrate strong success in 2023 from both an operational and financial standpoint. The company reported operational revenues of IDR 4.86 trillion for the

Buku 2023, Perseroan membukukan Pendapatan Usaha sebesar Rp4,86 triliun, meningkat 21,24% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4,012 triliun.

Sementara itu, dilihat dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Perseroan membukukan Total Aset sebesar Rp9,28 triliun, meningkat 16,38% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7,97 triliun. Kenaikan Aset tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan jumlah Aset Lancar dari Rp4,96 triliun di tahun 2022 menjadi Rp5,14 triliun di tahun 2023. Total Ekuitas yang tumbuh 15,60% dari Rp1,85 triliun menjadi Rp2,14 triliun menunjukkan semakin kuatnya permodalan Perseroan.

Sejauh ini Perseroan sudah mampu membangun *cash flow* yang cukup kuat guna mendanai proyek-proyek yang akan datang. *Cash flow Perseroan* yang positif juga mencerminkan bahwa bisnis Perseroan berjalan dengan baik, seperti yang kita ketahui bersama begitu banyak perusahaan yang menghadapi persoalan *cash flow* di mana hal ini menjadi sebuah masalah besar. Ke depannya, Perseroan dapat memilih portofolio pendanaan sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI

Jika dibandingkan target RKAP 2023, secara keseluruhan kami mencatat kinerja yang sesuai dengan target-target bisnis yang telah ditetapkan. Realisasi Pendapatan Bersih terhadap RKAP mencapai 119,95 %, sedangkan realisasi Laba Tahun Berjalan mencapai 122,33 % dari target RKAP. Sementara itu, baik jumlah Aset maupun Ekuitas Perseroan membukukan pencapaian masing-masing sebesar 105,24 % dan 97,15 % jika dibandingkan dengan target RKAP.

fiscal year 2023, up 21.24% from IDR 4.012 trillion the year before, according to the audited financial report.

Meanwhile, as seen in the consolidated financial position report, the company recorded total assets of IDR 9.28 trillion, an increase of 16.38% compared to the previous year's IDR 7.97 trillion. The increase in assets was mainly due to an increase in the number of current assets, from IDR 4.96 trillion in 2022 to IDR 5.14 trillion in 2023. Total equity grew 15.60% from IDR 1.85 trillion to IDR 2.14 trillion, indicating increasingly strong capital. Company.

So far, the Company has been able to build a strong enough cash flow to fund future projects. The Company positive cash flow also reflects that the company's business is running well, as we all know that many companies are facing cash flow problems, which is a big problem. In the future, the Company can choose a funding portfolio according to the company's business needs.

COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION

Overall, we saw performance that was in accordance with the predetermined business targets when contrasted with the 2023 RKAP aim. While the year's profit realization was 122.33% of the RKAP objective, the net income realization against the RKAP was 119.95%. Comparing the company's total assets and equity to the RKAP target, the results were 105.24% and 97.15%, respectively.

KEBIJAKAN STRATEGIS

Sebagai salah satu BUMN, Perseroan secara aktif berkontribusi mendukung program pemerintah dalam pembangunan ekonomi melalui proyek-proyek infrastruktur. Hingga akhir tahun 2023, Perseroan mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp 11,868 triliun, meningkat 57% atau sebesar Rp 433,22 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp 7,545 triliun. Dari keseluruhan proyek yang ditangani Perseroan, Segmen bisnis Gedung/Bangunan masih merupakan kontributor utama dengan porsi sebesar 41%, yang diikuti oleh segmen Jalan/Jembatan sebesar 39%, kemudian segmen pengairan sebesar 16%, dan lainnya sebesar 4%.

Kami menyadari bahwa di tahun-tahun mendatang tantangan bisnis akan semakin berat dimana tuntutan dari Pemegang Saham juga semakin tinggi. Oleh karena itu, kami berupaya meletakkan dasar-dasar yang lebih kokoh di tahun 2023 ini. Sepanjang tahun, Perseroan telah menerapkan berbagai inovasi guna meningkatkan daya saing perusahaan, salah satunya adalah inovasi penggunaan teknologi mmGPS guna mencapai mutu yang unggul dan efisiensi waktu pada Proyek Pekerjaan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 4B.

KENDALA BISNIS DAN STRATEGI 2023

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari kendala bisnis di sepanjang tahun 2023, yaitu adanya persaingan bisnis yang semakin ketat. Namun demikian, kami mampu mempertahankan posisi kami di industri infrastruktur menorehkan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan berkat adanya upaya penguatan fundamental dan juga penerapan berbagai strategi sebagai berikut:

- Optimalisasi Sumber Daya Manusia dan Produksi.
- Penggunaan sistem produksi otomatisasi yang terbaru guna meningkatkan produktivitas.
- Melakukan efisiensi biaya di segala lini.

STRATEGIC POLICY

As a state-owned enterprise, the corporation actively supports government initiatives aimed at promoting economic development by means of infrastructural projects. By the end of 2023, the corporation had registered new contract purchases of IDR 11.868 trillion, up IDR 433.22 billion, or 57%, from IDR 7.545 trillion the year before. With a share of 41% of all the projects the company manages, the building business section continues to be the largest contributor. At 39%, the road/bridge segment comes in second, followed by the Irrigation segment at 16%, and other segments at 4%.

We realize that in the coming years, business challenges will become increasingly difficult, and demands from shareholders will also become higher. Therefore, we are working to lay stronger foundations in 2023. Throughout the year, the company has implemented various innovations to increase the company's competitiveness, one of which is the innovative use of mmGPS technology to achieve superior quality and time efficiency on the Cisumdawu Section 4B Toll Road Works Project.

BUSINESS OBSTACLES AND STRATEGY 2023

In the course of conducting business in 2023, the company will face barriers in the form of fiercer competition from rival companies. But because of our efforts to solidify our foundation and apply the following tactics, we were able to hold onto our position in the infrastructure sector and achieve consistent performance growth as follows:

- Optimization of Human Capital and Production.
- Use of the latest automation production systems to increase productivity.
- Carry out cost efficiency in all lines.

IMPLEMENTASI TATA KELOLA TERBAIK

Bagi Perseroan, implementasi GCG bukan hanya sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan, namun merupakan hal mendasar yang mengacu pada *international best practices*. Manajemen meyakini bahwa dengan menerapkan GCG, maka Perseroan akan mampu menciptakan nilai yang lebih baik dan meningkatkan daya saing.

Sepanjang tahun 2023, kami telah berupaya menerapkan GCG dengan mengacu tidak hanya pada regulasi yang berlaku, namun juga perangkat internal yang kami miliki seperti Board Manual, *Code of Conduct (CoC)*, *Code of Corporate Governance (CoCG)* dan Piagam Komite-komite. Meningkatnya praktik-praktik GCG di lingkungan Perseroan tidak terlepas dari komitmen penuh dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan Perseroan untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan bisnis, yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, serta Kewajaran dan Kesetaraan.

INISIATIF PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan melaksanakan program pengembangan karyawan untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan yang berkesinambungan (*continuous improvement*) agar Abipraya dapat terus bertumbuh. Pelatihan dan pembelajaran dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja dan kompetensi karyawan baik keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), serta sikap dan perilaku (*attitude*).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan persaingan usaha, setiap karyawan Perseroan dituntut untuk meningkatkan standar kompetensi diri secara berkelanjutan agar mampu menghadapi perkembangan dan perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Kami terus mengidentifikasi kompetensi-kompetensi yang menjadi kebutuhan dalam

GOOD GOVERNANCE IMPLEMENTATION

For the Company, implementing GCG is not just about fulfilling statutory regulations; it is a fundamental thing that refers to international best practices. Management believes that by implementing GCG, the company will be able to create better value and increase competitiveness.

Throughout 2023, we have attempted to implement GCG by referring not only to applicable regulations but also to the internal tools we have, such as the Board Manual, Code of Conduct (CoC), Code of Corporate Governance (CoCG), and Committee Charters. Increasing GCG practices within the company cannot be separated from the full commitment of all levels of management and employees of the company to implement GCG principles as a basis for carrying out business activities, which include transparency, accountability, responsibility, independence, fairness, and equality.

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT INITIATIVE

In order to assure continual improvement and boost performance, the Company implements personnel development programs, which enables the company to expand. The goal of training and education is to raise employee competency and performance, which includes abilities, knowledge, attitudes, and behaviors.

Along with technological developments and business competition, every employee of the company is required to continuously improve their own competency standards in order to be able to face rapid developments and changes in the business environment. We continue to identify competencies that are needed in our growing business processes and design appropriate

proses bisnis kami yang terus berkembang dan merancang program-program pelatihan dan pengembangan SDM yang sesuai secara berkesinambungan.

PROSPEK BISNIS TAHUN 2024

Pemulihan kondisi ekonomi global masih terus berlanjut untuk bisa lepas dari bayang-bayang krisis yang melanda dunia dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Menurut *International Monetary Fund* (IMF) dalam Laporan *World Economic Outlook Update* Januari 2024 memproyeksikan ketahanan pertumbuhan ekonomi global yaitu 3,1% di tahun 2023 dan diperkirakan tetap di tahun 2024, dengan pertumbuhan di tahun 2025 sebesar 3,2%.

Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 dan transisi kepemimpinan selanjutnya akan memegang peran penting dalam membentuk lintasan ekonomi Indonesia. Pemerintah menargetkan pertumbuhan antara 5% hingga 5,2% (yoy) dan inflasi sekitar 2,8%, sesuai dengan target koridor Bank Indonesia sebesar 3% ± 1%.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024, Pemerintah Indonesia telah menganggarkan belanja negara sebesar Rp3.304,1 triliun, dengan pembagian sebesar Rp2.446,5 triliun merupakan belanja Pemerintah Pusat dan sebesar Rp 857,6 triliun merupakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Infrastruktur sendiri memperoleh anggaran sebesar Rp 422,7 triliun, berada pada urutan ke-3 setelah anggaran untuk sektor pendidikan serta perlindungan sosial. Anggaran infrastruktur tahun 2024 diarahkan untuk memperkuat penyediaan pelayanan dasar; peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier; hingga dukungan atas proyek pembangunan IKN.

training and HC development programs on an ongoing basis.

BUSINESS PROSPECTS FOR 2024

The recovery of global economic conditions is still continuing to be able to escape the shadow of the crisis that has hit the world in the last three (three) years. According to the International Monetary Fund (IMF), in its World Economic Outlook Update January 2024 report, it projects resilient global economic growth of 3.1% in 2023 and is expected to remain the same in 2024, with growth in 2025 of 3.2%.

The implementation of the 2024 general election and the subsequent leadership transition will play an important role in shaping Indonesia's economic trajectory. The government is targeting growth of between 5% and 5.2% (yoy) and inflation of around 2.8%, in line with Bank Indonesia's corridor target of 3% ± 1%.

In the Draft State Revenue and Expenditure Budget (RAPBN) for 2024, the Indonesian Government has budgeted state spending of IDR 3,304.1 trillion, with a division of IDR2,446.5 trillion being central government spending and IDR857.6 trillion being transfers to regional and village funds (TKDD). Infrastructure itself received a budget of IDR 422.7 trillion, the third after to education and social protection. The 2024 infrastructure budget is directed at strengthening the provision of basic services, increasing productivity through connectivity and mobility infrastructure, improving the irrigation network through the construction of dams and primary, secondary, and tertiary irrigation channels, and supporting IKN development projects.

Abipraya optimis dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024, walaupun persaingan semakin. Berbekal pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, kami yakin dapat melewati tahun 2024 dengan baik meskipun masih dipenuhi oleh tantangan.

Terkait prospek bisnis yang cukup cerah tersebut, kami telah menetapkan fokus strategi dalam jangka pendek-menengah sebagai berikut:

- Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan daya saing, sejalan dengan fokus pembangunan Pemerintah di tahun 2024.
- Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Mempertahankan posisi market leader sektor Sumber Daya Air (SDA), walau dikenal sebagai BUMN terunggul dalam pembangunan bendungan, Brantas Abipraya akan terus juga meningkatkan pangsa pasar non-SDA.
- Lalu di segmen Energi Baru dan Terbarukan (EBT), Brantas Abipraya merealisasikan rencana investasi PLTM, PLTA, yang memenuhi standar kelayakan, serta mengembangkan rencana investasi PLTM/PLTA sesuai dengan rencana pemerintah.
- Meningkatkan realisasi investasi SPAM, meningkatkan realisasi investasi IPAL, dan lain sebagainya. Serta investasi lainnya dengan strategi meningkatkan pengembangan produk-produk residensi dan komersial, dan lain sebagainya.

Kesemua strategi tersebut diterapkan untuk meraih kinerja positif, namun tak ketinggalan dengan praktik GRC di perusahaan mulai dari level top management hingga yang bertanggung jawab terhadap aspek GCG, manajemen risiko, dan kepatuhan ke regulasi yang ada.

Abipraya feels confident in the goals established for 2024, despite heightened competition. Even though 2024 will still present many difficulties, we are optimistic that we can navigate it successfully by drawing on our prior experience.

Regarding the bright business prospects, we have determined the strategic focus in the short-medium term as follows:

- Human Capital Development in order to increase competitiveness, in line with the government's development focus in 2024.
- Development of information and communication technology.
- Maintaining its market leader position in the Water Resources (SDA) sector, even though it is known as the best state-owned company in dam construction, Brantas Abipraya will continue to increase its non-SDA market share.
- In the New and Renewable Energy (EBT) segment, Brantas Abipraya is realizing investment plans for PLTM and PLTA that meet feasibility standards, as well as developing PLTM/PLTA investment plans in accordance with government plans.
- Increase the realization of SPAM investment, increase the realization of IPAL investment, and so on. As well as other investments with strategies to increase the development of residential and commercial products, and so on.

Although the goal of all these techniques is to create positive performance, they also make sure that the company's GRC practices—from top management to those in charge of risk management, GCG, and regulatory compliance—are not overlooked.

PENUTUP

Akhir kata, seluruh jajaran Direksi mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, serta mitra bisnis. Apresiasi mendalam kami tujukan juga kepada Dewan Komisaris yang telah menjadi penasihat bagi kami dan telah menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, komite-komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi, serta seluruh insan Perseroan yang telah berkontribusi menjadikan Perseroan memiliki pencapaian sebagaimana saat ini.

CONCLUSION

Lastly, the entire Board of Directors would like to thank the stakeholders, business partners, and shareholders for their support. We also extend our sincere gratitude to the Board of Commissioners, who have served as our advisors and have performed their supervisory duties admirably; the committees under the direction of the Board of Commissioners and Directors; and all employees of the company who have helped the business attain its present successes.

Jakarta, April 2024



Sugeng Rochadi
Direktur Utama

President Director



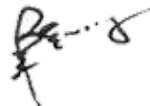
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS UNTUK LAPORAN TAHUNAN 2023

Statement of Responsibility from Board of Commissioners for 2023
Annual Report

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report 2023 have been fully disclosed and being solely responsible upon the accountability of the Annual Report Contents altogether with the Financial Statements.

Jakarta, April 2024



HARYADI
KOMISARIS UTAMA/INDEPENDEN
President/Independent Commissioner



IMAM HARYONO
KOMISARIS
Commissioner



DIANA KUSUMASTUTI
KOMISARIS
Commissioner



TURSANDI ALWI
KOMISARIS
Commissioner



KENNY DARYAT NANANG
KOMISARIS INDEPENDEN
Independent Commissioner

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI UNTUK LAPORAN TAHUNAN 2023

Statement of Responsibility from Board of Directors for 2023 Annual Report

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report 2023 have been fully disclosed and being solely responsible upon the accountability of the Annual Report Contents altogether with the Financial Statements.

Jakarta, April 2024



SUGENG ROCHADI
DIREKTUR UTAMA
President Director



MUHAMMAD TOHA FAUZI
DIREKTUR OPERASI I
Director of Operations I



SURADI
DIREKTUR KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
Director of Finance and Risk Management



TUMPANG MUHAMMAD
DIREKTUR SDM DAN UMUM
Director of HC and General Affairs



PURNOMO
DIREKTUR OPERASI II
Director of Operations II



Profil Perusahaan

Company Profile



SESUAI DENGAN AKTA NO. 15/2008, KEGIATAN USAHA PERSEROAN YAITU MELAKUKAN USAHA DI BIDANG INDUSTRI KONSTRUKSI, INDUSTRI PABRIKASI, JASA PENYEWAAN, JASA KEAGENAN, INVESTASI, AGRO INDUSTRI, PERDAGANGAN, PENGELOLAAN KAWASAN, JASA PENINGKATAN KEMAMPUAN BIDANG KONSTRUKSI, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGEMBANG.

According to Deed No. 15/2008, the Company business activities are doing business in the construction industry, manufacturing industry, rental services, agency services, investment, agro-industry, trading, area management, capacity building services in construction, information technology, and developers.

IDENTITAS PERUSAHAAN

Corporate Identity

PROFIL PERUSAHAAN
Company Profile



Nama Perusahaan
Company Name

PT Brantas Abipraya (Persero)



Bidang Usaha
Business line

Industri Konstruksi
Construction Industry



Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Incorporation

Akta No. 88 tanggal 12 November 1980; Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 12 Maret 1982, Tambahan No. 306

Deed No. 88 dated November 12, 1980; State Gazette of the Republic of Indonesia No. 21 dated March 12, 1982, Supplement No. 306



Kantor Pusat
Head Office

Jl. D. I. Panjaitan Kav. 14 Cawang,
Jakarta Timur, 13340
Telp: (021) 851 6290
Fax: (021) 851 6095
Website: www.brantas-abipraya.co.id
Email: brap@brantas-abipraya.co.id



Status Perusahaan
Company Status

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
State-Owned Enterprise (SOE)



Tanggal Pendirian
Date of Establishment

12 November/ November 1980



Kegiatan Usaha
Business Activities

- **Jasa Kontruksi/** Constructions Services
- **Energi Terbarukan/** Renewable energy
- **Beton/** Precast Concrete
- **Properti/** Property
- **Penyewaan Alat Berat/** Heavy Equipment Rental
- **Jalan Tol/** Toll Road



SEKILAS PERUSAHAAN

Company Overview

PT Brantas Abipraya (Persero) yang dalam laporan ini disebut dengan Abipraya dan atau Perseroan, berdiri pada 12 November 1980 di Malang, Jawa Timur. Pendirian Abipraya dilatarbelakangi oleh ekspansi Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Brantas atau dikenal dengan Proyek Brantas. Hal tersebut dikemukakan pertama kali oleh Menteri PU dan Kelistrikan saat itu, Ir. Sutami. Ide ini muncul ketika beliau melakukan kunjungan ke Proyek Karangates dan Selorejo pada 1970.

Pendirian Perseroan tercatat dalam akta berikut ini: Akta Perseroan Terbatas Brantas Abipraya No.88 tanggal 12 November 1980 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta juncto akta Perubahan No. 36 tanggal 6 April 1981, yang kesemuanya telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. Y.A.5/257/15 tanggal 11 April 1981, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang di bawah No. 171/PP/IV/1981 tanggal

PT Brantas Abipraya (Persero), which in this report is called Abipraya and or the Company, was established on November 12, 1980, in Malang, East Java. The establishment of Abipraya was motivated by the expansion of the Brantas River Development Project, known as the Brantas Project. It was first stated by the Minister of Public Works and Electricity at that time, Ir. Sutami. This idea came about when he visited the Karangates and Selorejo Project in 1970.

The establishment of the Company in the following deeds: Deed of Limited Liability Company Brantas Abipraya No.88 dated November 12, 1980, made before Kartini Muljadi, S.H., Notary in Jakarta juncto Deed of Amendment No. 36 dated April 6, 1981, all of which have obtained the approval of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia according to its Decree No. Y.A.5/257/15 dated April 11, 1981, and has been registered at the Registrar of the Malang District Court under No. 171/PP/IV/1981 dated April 23,



23 April 1981, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 306, Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 12 Maret 1982.

Sesuai dengan Akta No. 15/2008, kegiatan usaha Abipraya yaitu melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, perdagangan, pengelolaan kawasan, jasa peningkatan kemampuan bidang konstruksi, teknologi informasi dan pengembang. Aktivitas Abipraya menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan. Kegiatan usaha Perseroan banyak menghasilkan konstruksi monumental di antaranya; Dam Kotapanjang HEPP, Bangkinang, Riau yang telah dibangun dengan menggunakan metode Roller Compacted Concrete (RCC). Pada 2011, Perseroan memperluas kegiatan usaha pada bidang pembangunan, perindustrian, perdagangan, dan jasa dengan mendirikan PT Brantas Energi. Seiring dengan perkembangan bisnis Perseroan, pada tahun 2019 Perseroan memiliki dua unit fasilitas Pabrik Beton Pracetak yang terletak di Gempol dan Subang, dengan Jenis beton yang diproduksi yaitu *corrugated concrete sheet pile*, *flat prestress concrete sheet pile*, *girder* dan *ditch*. Fasilitas produksi Perseroan

1981, and has been announced in Supplement No. 306, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 21 dated March 12, 1982.

According to Deed No. 15/2008, Abipraya's business activities are business in the construction industry, manufacturing industry, rental services, agency services, investment, agro-industry, trading, area management, capacity building services in the construction sector, information technology, and developers. Abipraya's activities produce goods and/or services of high quality and strong competitiveness, as well as pursue profits to increase the value of the Company. The Company's business activities produce many monumental constructions including; Kotapanjang HEPP Dam, Bangkinang, Riau, which have been built using the Roller Compacted Concrete (RCC) method. In 2011, the Company expanded its business activities in development, industry, trading, and services by establishing PT Brantas Energi. Along with the development of the Company's business, in 2019, the Company has two units of Precast Concrete Plant facilities located in Gempol and Subang, with the types of concrete produced, namely corrugated concrete sheet pile, flat prestress concrete sheet pile, girder, and ditch. The Company's production facilities are also supported by the availability of



juga didukung oleh ketersediaan 2 *plant*, yaitu Pabrik Precast di Subang dan Pabrik Precast di IKN yang khusus mendukung percepatan pekerjaan beton di proyek IKN.

Selain konstruksi bangunan, Perseroan berpengalaman dalam membangun Bendungan Besar. Seiring dengan kapabilitas yang dimiliki, Perseroan memperluas kegiatan usahanya dengan membangun jalan dan jembatan, prasarana perhubungan (darat, laut, dan udara) seperti pelabuhan laut dan bandar udara, kelistrikan, bangunan gedung, sehingga Perseroan telah berkembang menjadi *general contractor*.

Perubahan anggaran dasar terakhir dilakukan dalam rangka peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor yang telah disahkan dalam akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan (RUPSLB) PT Brantas Abipraya (Persero) No. 32 tanggal 15 Agustus 2012 ("Akta No. 32/2012").

KETERANGAN PERUBAHAN NAMA

Sesuai dengan uraian riwayat singkat, Abipraya tidak pernah melakukan perubahan nama sejak pertama kali berdiri hingga saat ini.

2 factories, namely the Precast Factory in Subang and the Precast Factory in IKN which specifically supports the acceleration of concrete work in the IKN project.

In addition to building construction, the Company has experience building Large Dams. Along with its capabilities, the Company expanded its business activities by building roads and bridges, transportation infrastructure (land, sea, and air) such as seaports and airports, electricity, and buildings, so Abipraya has developed into a general contractor.

The latest amendment to the articles of association was made to increase the authorized capital, issued, and paid up, which has been ratified in the deed of Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (RUPSLB) PT Brantas Abipraya (Persero) No. 32 dated August 15, 2012 ("Deed No. 32/2012").

DESCRIPTION OF NAME CHANGE

According to the brief history, Abipraya has never changed its name since then.

JEJAK LANGKAH PERUSAHAAN

Milestone

PROFIL PERUSAHAAN
Company Profile

BRANTAS ABIPRAYA

JOURNEY AND TRANSFORMATION

#DELIVERING THE BEST

#delivering the best
#delivering the best
#delivering the best

Malang
1980

1980 Watershed Development

It begins from the construction of the Brantas River Watershed or known as the Brantas Project in 1980, and based on the expansion of the Brantas project, the Indonesian Government established PT Brantas Abipraya with its head office in Malang, East Java.

Jakarta
1995

1992 Build with trust

The Company was trusted to build the Kolapang HEPP dam, Bangkinang Riau with the Roller Compacted Concrete (RCC) method which was first used in dam construction in Indonesia.

2011 Pioneer of dam managing contractor

The Company was awarded as the Pioneer in implementing dams with the most projects in Indonesia by the Construction Association and received an award as a green contractor in the building sector by the Ministry of Public Works.

2012 Diversification into other business

The Company diversifies its business by investing in new and renewable energy through Brantas Energy as a subsidiary of PT Brantas Abipraya.

2013 Breaking the limit

The Company was awarded the Muri Record for the longest underpass tunnel with a jacking system.



t
t
t

2016
Build the longest dam in Asean

dam in Asean
The Company has established itself as a construction company that excels in building dams by working on the **Semantok Dam** which will be the longest dam in Asean.



2018
Contribute to build the nation

The Company fully participates in the provision of sports facilities and infrastructure as well as infrastructure for the **2018 Asian Games XVIII**. The Company has also proven its expertise in building dams, by building the **Bener Dam** which will be the highest dam in Indonesia and the second highest in Southeast Asia.



2019
Best Construction Service

The Company received an award as the best construction service provider in implementing a **construction safety management system (SMKK)** from the Ministry of PUPR.



2024
Integration Diversification

Become a **market leader** in the water sector in Indonesia and increase the Company's investment in the Renewable Energy sector.



2021 - 2024

Global Market Expansion

The Company is doing expansion in the global market, become a global player in the water infra (dams) sector

THE 
FUTURE IS NEW JOURNEY





BIDANG USAHA

Business Line

KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa konstruksi. Lebih lengkapnya, penjelasan mengenai kegiatan usaha, produk, dan jasa yang dihasilkan oleh Perseroan ada dalam akta Anggaran Dasar Perusahaan. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir, dalam pasal 3 disebutkan maksud dan tujuan pendirian Perseroan yaitu melakukan usaha di bidang industri konstruksi, pengusahaan jalan tol, industri pabrikasi, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, pengembang dan pengelolaan perusahaan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

PRODUK DAN JASA

Guna mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yang meliputi:

BUSINESS ACTIVITIES

The core business activity carried out by the Company is construction services. In more detail, an explanation of the business activities, products, and services produced by the Company is in the deed of the Company's Articles of Association. Based on the latest Articles of Association of the Company, Article 3 states the purpose and objective of the establishment of the Company, namely doing business in the construction industry, toll road business, manufacturing industry, trading, area management, capacity building services in the field of construction services, information technology, developer, and company management, as well as optimizing the utilization of the Company's resources by applying the principles of Limited Liability Company.

PRODUCTS AND SERVICES

To achieve the purpose and objectives mentioned above, the Company can carry out business activities, which include:



Jasa Konstruksi/ Construction Services

Jasa konstruksi terdiri dari segmen jasa pengairan, jalan dan jembatan, gedung/bangunan, kelistrikan, prasarana perhubungan (laut & udara) dan lain-lain.

1. Pengairan

Jasa konstruksi pengairan yang diberikan oleh Perseroan meliputi pekerjaan bendungan, bendung, Irigasi, perbaikan bangunan sungai atau normalisasi kali atau perkuatan tebing banjir, prasarana pengendali banjir, tanggul laut dengan geotube, tanggul lumpur lapindo, dan pembangunan sarana penyediaan air baku.

2. Jalan atau Jembatan

Jasa konstruksi jalan/jembatan merupakan salah satu kegiatan usaha Abipraya yang membantu pemerintah dalam membangun akses distribusi antar wilayah.

3. Gedung atau Bangunan

Bentuk jasa konstruksi gedung atau bangunan yang diberikan oleh Perseroan meliputi pondasi gedung, struktur gedung, arsitektur mekanikal dan elektrik, serta *landscape*.

4. Kelistrikan

Jasa konstruksi kelistrikan yang diberikan oleh Perseroan meliputi pembangunan pembangkit listrik tenaga *mini hydro*.

5. Prasarana Perhubungan (Darat, Laut, & Udara)

Jasa konstruksi prasarana perhubungan yang diberikan oleh Perseroan meliputi dermaga, *airport building*, pekerjaan *runway* dan *taxiway*.

Construction services consist of irrigation services, roads and bridges, buildings, electricity, transportation infrastructure (sea & air), and others.

1. Irrigation

Irrigation construction services provided by the Company include dam work, weirs, irrigation, river building repair or river normalization or strengthening of flood cliffs, flood control infrastructure, sea dikes with geotubes, lapindo mud dikes, and construction of raw water supply facilities.

2. Road or Bridge

Road/bridge construction services are one of Abipraya's business activities that assist the government in building distribution access between regions.

3. Building

The forms of building construction services provided by the Company include building foundations, building structures, mechanical and electrical architecture, and landscape.

4. Electrical

Electrical construction services provided by the Company include the construction of mini hydro power plants.

5. Transportation Infrastructure (Land, Sea, & Air)

Transportation infrastructure construction services provided by the Company include docks, airport buildings, runways, and taxiway work.



Energi/ Energy

Perseroan melakukan diversifikasi usaha dan mengembangkan bisnis melalui Entitas Anak, yaitu PT Brantas Energi yang bergerak di bidang Pembangkit Listrik *Hydro Power*. Melalui usaha ini, Perseroan turut mendukung program penyediaan listrik 35.000 MW melalui PLTS sebagai sumber energi baru dan terbarukan. *Hydro Power* ini mempunyai risiko yang tidak *linear* dengan risiko sektor konstruksi, sehingga ke depannya diharapkan arus kas Perseroan dapat lebih kuat dan "*sustain*".

The Company diversified its business and developed its business through its subsidiary, PT Brantas Energi engaged in Hydro Power Plants. Through this business, Brantas Abipraya also supports the program of providing 35,000 MW of electricity through PLTS as a new and renewable energy source. Hydro Power has risks that are not linear with the construction sector risk, so in the future, it is expected the Company's cash flow can be stronger and "sustained".



Produk Beton/ Concrete Products

Perseroan memproduksi beton dengan jenis produk *corrugated concrete sheet pile, flat prestress concrete sheet pile, I girder, box girder, box culvert, U ditch, dan V ditch*.

The Company produces concrete with corrugated concrete sheet piles, flat prestress concrete sheet piles, I girder, box girder, box culvert, U ditch, and V ditch.



Properti/ Property

Perseroan merintis pembentukan unit usaha strategis di bidang properti. Strategi ini dilakukan dalam rangka optimalisasi aset perusahaan, melalui kerja sama dengan konsultan yang berpengalaman dalam bisnis properti. Proyek-proyek properti terbagi dalam 2 kategori, yaitu *HIGH RISE BUILDING* seperti Apartemen, hotel dan perkantoran serta *landed house* yaitu perumahan. Beberapa proyek properti diantaranya: Apartemen *Urban Heights Residences*, *Arya Green Tajurhalang*, *Arya Green Simatupang*, dan *Arya Setu*.

The Company pioneered the establishment of strategic business units in the property sector. This strategy is carried out to optimize company assets, through cooperation with consultants who are experienced in the property business. Property projects are divided into 2 categories, *HIGH RISE BUILDINGS*, such as apartments, hotels, and offices, and landed houses, namely housing. Some projects include *Urban Heights Residences Apartments*, *Arya Green Tajurhalang*, *Arya Green Simatupang*, and *Arya Setu*.



Tol/ Toll Road

Perseroan menambah keikutsertaan konsesi perusahaan jalan tol pada ruas-ruas tol yang prioritas dan layak untuk dikembangkan melalui skema kerja sama.

The Company increases the participation of toll road concessions on priority toll roads that are feasible to develop through cooperation schemes.



Alat/ Heavy Equipments

Perseroan meningkatkan kapabilitas alat melalui investasi peralatan sesuai segmen produk yang disasar dengan mengembangkan jenis pekerjaan yang terkait utilisasi alat selain dari penyewaan alat.

The Company improves equipment capabilities through equipment investment according to targeted product segments by developing types of work related to equipment utilization other than equipment rental.

VISI, MISI DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Vision, Mission, And Company Values

PROFIL PERUSAHAAN



VISI

Menjadi Perusahaan terpercaya dalam industri konstruksi dan investasi.

Artinya:

1. Membangun reputasi perusahaan dan mengutamakan kepuasan pelanggan.
2. Dalam 5 (lima) tahun kedepan mampu menjadi 5 (lima) besar perusahaan konstruksi nasional.

VISION

To be a trusted company in the construction and investment industry.

Meaning:

- 1. Build the company's reputation and prioritize customer satisfaction.*
- 2. Being top 5 national construction company within 5 years.*

MISI/ MISSION

Menyediakan produk konstruksi bermutu secara profesional dan berkelanjutan.

Provide qualified construction product professionally and sustainable.

Konsistensi menjaga kualitas dan daya saing produk

Keeping its product quality and product competitiveness constantly



Mengutamakan keselamatan & kesehatan kerja, kelestarian lingkungan dan ekonomi hijau

Give priority to safety & health in work, preservation of environment and green economy



Membina hubungan baik dengan stakeholder

Develop a good relationship with stakeholder



Visi dan Misi disahkan oleh Direksi dengan Surat Keputusan Direksi No. 76.1/D/KPTS/II/2021

The Vision and Mission are ratified by the Board of Directors, with the Decree of the Board of Directors No. 76.1/D/KPTS/II/2021



PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS VISI, MISI, BUDAYA KERJA, DAN NILAI PERUSAHAAN

Seluruh hal yang tercantum dalam visi, misi, dan nilai budaya atau filosofi Perseroan telah disepakati dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2020-2024.

APPROVAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS ON THE VISION, MISSION, WORK CULTURE, AND COMPANY VALUES

All matters stated in the Company's vision, mission, and cultural values or philosophy have been agreed upon and signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors and outlined in the RJPP for the 2020-2024 RJPP year.

**SEMBOYAN
MOTTO**

Spirit for Giving the Best

NILAI – NILAI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Corporate Values and Culture

AKHLAK



AMANAH Trustworthy

- Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
1. Memenuhi janji dan komitmen.
 2. Bertanggungjawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan hingga tuntas.
 3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

- Hold fast to the trust given.
1. Fulfill promises and commitments.
 2. Be responsible for the duties, decisions, and actions performed to the fullest.
 3. Adhering to moral and ethical values.



KOMPETEN Competent

- Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
 2. Membantu orang lain untuk belajar
 3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
 4. Berani mengambil keputusan secara cepat dan tepat berdasarkan risiko yang terukur
 5. Mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta kepedulian kepada orang lain, lingkungan sosial dan alam sebagai *way of life*.
 6. Melayani dengan hati tanpa batas.

- Continue to learn and develop capabilities.
1. Improve self-competence to respond to ever-changing challenges.
 2. Helping others to learn
 3. Complete tasks of the highest quality.
 4. Dare to make decisions quickly and precisely based on measurable risks
 5. Prioritizing Occupational Health and Safety and concern for others, social, and natural environment as a way of life.
 6. Serve with a boundless heart.



HARMONIS Harmonious

- Saling peduli dan menghargai perbedaan.
1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
 2. Saling membantu dan mendukung untuk kepentingan Perusahaan
 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif

- Care for each other and respect differences.
1. Respect for everyone regardless of background
 2. Mutual assistance and support for the benefit of the Company
 3. Building a conducive work environment



LOYAL Loyal

- Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
1. Menjaga nama baik sesama pekerja, pimpinan, BUMN dan Negara
 2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
 3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika
 4. Berkontribusi lebih melampaui harapan untuk membangun dan meningkatkan kapasitas nasional
 5. Pantang menyerah menghadapi tantangan dan harapan.

- Dedicated and prioritizing the interests of the nation and the country.
1. Maintaining the name of fellow employees, leaders, SOEs, and the country
 2. Willing to sacrifice to achieve a greater goal.
 3. Obey the leadership as long as it does not conflict with law and ethics
 4. Contribute more beyond expectations to build and increase national capacity
 5. Never give up in the face of challenges and hopes.



ADAPTIF Adaptive

- Terus berinovasi dan antusias dalam meggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
 2. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
 3. Bertindak proaktif
 4. Kreatif dan inovatif dalam menghasilkan solusi dan nilai tambah
 5. Menunjukkan semangat, antusiasme dan energi positif

- Continue to innovate and be enthusiastic about moving or facing change.
1. Quickly adjust to get better.
 2. Making improvements following technological developments constantly.
 3. Act proactively
 4. Creative and innovative in generating solutions and added value
 5. Show spirit, enthusiasm, and positive energy



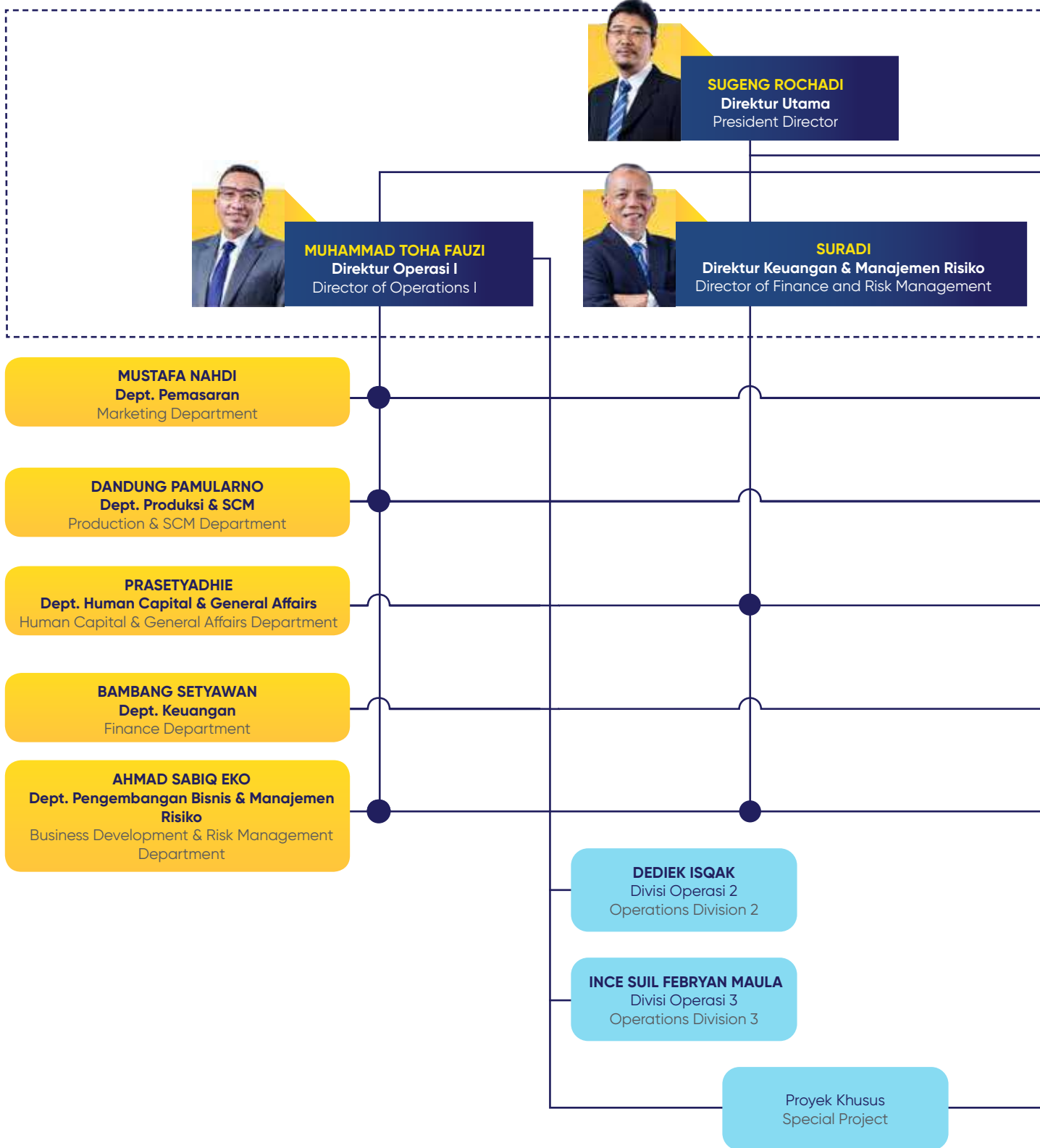
KOLABORATIF Collaborative

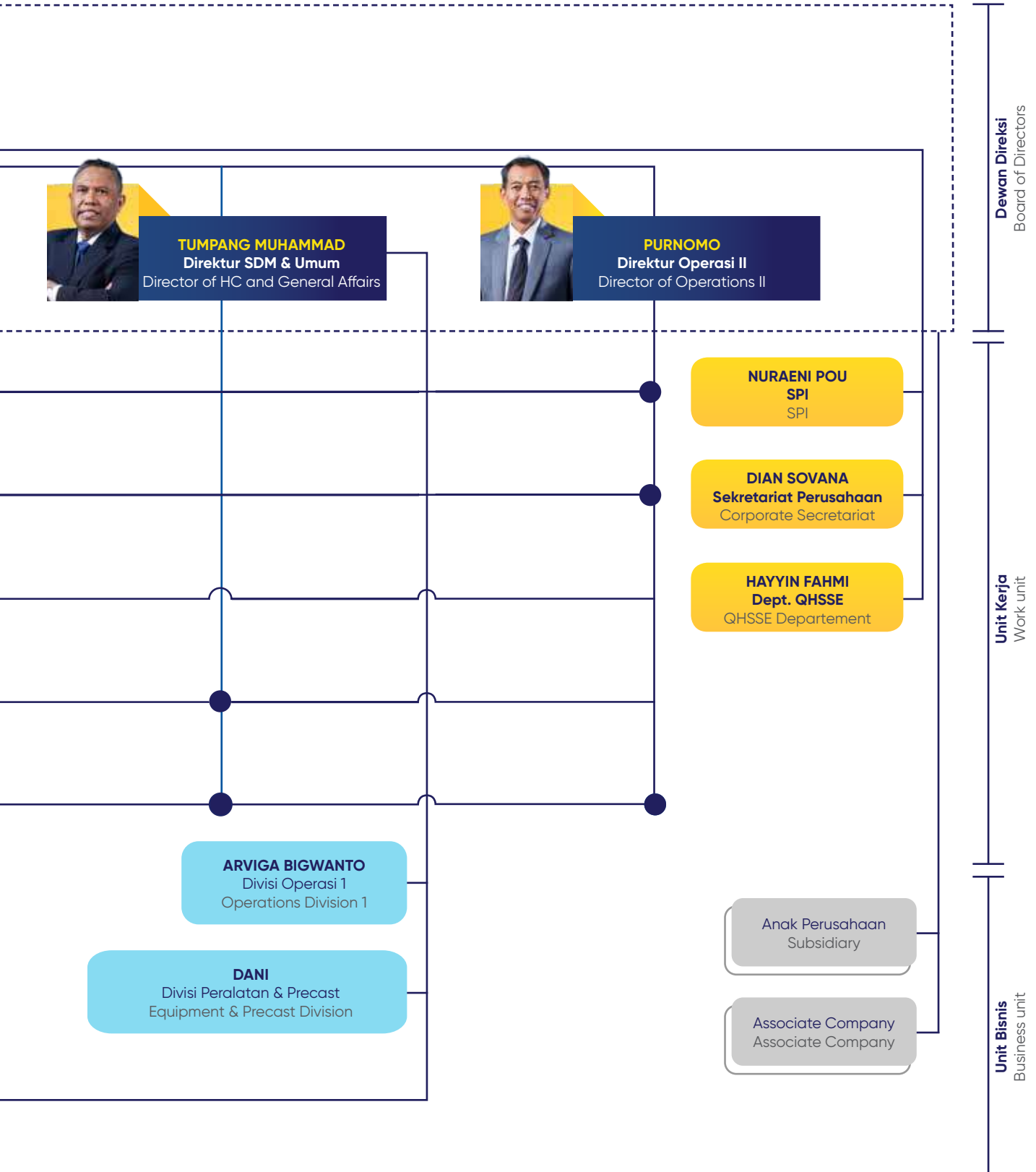
- Membangun kerjasama yang sinergis
1. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Perusahaan.
 4. Bersinergi secara agresif untuk memberikan nilai tambah sebesar-besarnya untuk perusahaan dan *stakeholder* lainnya.

- Building synergistic cooperation
1. Provide opportunities for various parties to contribute
 2. Open to working together to produce added value
 3. Drive the utilization of resources for the Company.
 4. Synergize aggressively to provide maximum added value for the company and other stakeholders.

STRUKTUR ORGANISASI

Organizational Structure





PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board Of Commissioners Profile



HARYADI

KOMISARIS UTAMA/INDEPENDEN
PRESIDENT/INDEPENDENT COMMISSIONER

Haryadi adalah seorang Warga Negara Indonesia, yang lahir di Tanjung Pinang (Riau) pada 9 Mei 1958 (65 tahun). Beliau menandatangani gelar Sarjana dan Master dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 1986 dan pada 1994. Beliau juga menempuh pendidikan Development Studies pada University of California at Berkeley USA pada 1999. Haryadi ditunjuk sebagai Komisaris Utama/Independen Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor 133/MBU/08/2015 pada 4 Agustus 2015, dengan masa jabatan lima tahun dan menjabat kembali berdasarkan Nomor SK-281/MBU/09/2020 pada tanggal 10 September 2020.

Saat ini beliau masih aktif menduduki jabatan sebagai pengajar di Departemen Politik dan Pascasarjana FISIP Universitas Airlangga (1986-sekarang), dan pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Airlangga (1995-sekarang). Di USU Medan, beliau pengajar di Program Pascasarjana Studi Pembangunan (2005-sekarang). Selain itu, beliau juga merupakan Penasehat Senior Kantor Staf Presiden (2016-sekarang). Haryadi saat ini juga masih aktif di beberapa Institusi Pendidikan dan lembaga lainnya, terutama di bidang politik, komunikasi, dan pendidikan.

Di bidang pendidikan, Haryadi mendapat anugerah dari Pemerintah Indonesia-Malaysia-Brunei dalam penyusunan Kamus Padanan Istilah Serumpun Ilmu Politik pada tahun 2009. Beliau juga pernah dianugerahi sebagai Dosen Teladan I Tingkat Nasional dari Kemendikbud RI.

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan dan tidak memiliki hubungan keluarga, keuangan, dan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya ataupun pemegang saham pengendali yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen.

Haryadi is an Indonesian citizen, born in Tanjung Pinang (Riau) on May 9, 1958 (65 years old). He holds his Bachelor and Master degrees from Gadjah Mada University Yogyakarta in 1986 and in 1994. He also studied Development Studies at the University of California at Berkeley, USA, in 1999. Haryadi was appointed as the Company's President/Independent Commissioner through the General Meeting of Shareholders and was appointed based on the Decree of the Minister of SOEs Number 133/MBU/08/2015 on August 4, 2015, with a tenure of five years and served again based on Number SK-281/MBU/09/2020 on September 10 2020.

Currently, he is still actively serving as a lecturer at the Department of Politics and Postgraduate FISIP Universitas Airlangga (1986-present) and lecturer at the Postgraduate Program in Political Science, Universitas Airlangga (1995-present). At USU Medan, he teaches at the Postgraduate Program in Development Studies (2005-present). In addition, he is also a Senior Advisor to the Presidential Staff Office (2016-present). Haryadi is still active in several educational institutions and other institutions, especially in the politics, communication, and education fields.

In the field of education, Haryadi was awarded by the Government of Indonesia-Malaysia-Brunei for compiling the Dictionary of Allied Terms in Political Science in 2009. He has also been awarded, as an Exemplary Lecturer I at the National Level from the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia.

He does not hold concurrent positions and has family, financial, and shareholding relations with the Board of Commissioners and the Board of Directors members or controlling shareholders that may affect his ability to act independently.



IMAM HARYONO
KOMISARIS
COMMISSIONER

Imam Haryono adalah seorang Warga Negara Indonesia, yang lahir di Sukoharjo Jawa Tengah pada 1 April 1961 (61 tahun). Beliau menamatkan pendidikan Sarjana di Universitas Gadjah Mada jurusan Fakultas Teknologi Pertanian pada tahun 1984 dan meraih gelar Master dari Tokyo University of Agriculture pada tahun 1990. Pada tahun 1995 menyelesaikan gelar Doktor di Tokyo University of Agriculture jurusan Agricultural Chemistry dan lulus Summa *Cum Laude*.

Imam Haryono menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan SK Kementerian BUMN Nomor SK-137/MBU/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 dan menjabat kembali berdasarkan Nomor SK-232/MBU/07/2021 pada tanggal 9 Juli 2021.

Imam Haryono mengawali karirnya sebagai Pj. Kasubag Monitoring & Evaluasi Program di Kementerian Perindustrian. Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Badan Litbang Industri dan Perdagangan (2002-2005), Direktur Industri Minuman dan Tembakau (2005-2008), Kepala Biro Perencanaan (2008-2010), Inspektur Jenderal (2010-2014), dan Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayah Industri (2014-2017) di Kementerian Perindustrian. Selain itu, Dari 2005-2007, beliau menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Alimentarius Commission (FAO/WMO Food Standards Programme). Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Boma Bisma Indra (2011-2016).

Pada akhir tahun 2017, beliau menjabat sebagai Staf Ahli Menteri bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan pada awal tahun 2019 sebagai Staf Ahli Menteri bidang Iklim Usaha dan Investasi.

Imam Haryono is an Indonesian citizen who was born in Sukoharjo, Central Java, on April 1, 1961 (61 years old). He completed his Bachelor's degree at Universitas Gadjah Mada in Agricultural Technology in 1984 and earned a Master's degree from Tokyo University of Agriculture in 1990. In 1995, he completed his doctoral degree at Tokyo University of Agriculture majoring in Agricultural Chemistry and graduated Summa *Cum Laude*.

Imam Haryono has served as Commissioner of the Company since it stipulated at the General Meeting of Shareholders based on the Decree of the Ministry of SOEs Number SK-137/MBU/7/2016 dated July 12, 2016 and served again based on Number SK-232/MBU/07/2021 on July 9 2021.

Imam Haryono started his career as the person in charge of the Head of Program Monitoring & Evaluation at the Ministry of Industry. He has served as Secretary of the Industrial and Trade Research and Development Agency (2002-2005), Director of the Beverage and Tobacco Industry (2005-2008), Head of the Planning Bureau (2008-2010), Inspector General (2010-2014), and Director General of Industrial Area Development (2014-2017) at the Ministry of Industry. In addition, from 2005-2007, he served as Chairman of the Working Group of the Alimentarius Commission (FAO/WMO Food Standards Programme). He served as President Commissioner of PT Boma Bisma Indra (2011-2016).

At the end of 2017, he served as Expert Staff to the Minister for Increasing the Use of Domestic Products, and in early 2019, as Expert Staff to the Minister for Business Climate and Investment.



KENNY DARYAT NANANG
KOMISARIS INDEPENDEN
INDEPENDENT COMMISSIONER

Kenny Daryat Nanang adalah seorang Warga Negara Indonesia, yang lahir di Sumedang pada 18 April 1958 (65 tahun). Beliau menamatkan pendidikan Sarjana Teknik Mesin di Universitas Trisakti pada tahun 1986.

Kenny Daryat Nanang ditunjuk sebagai Komisaris Independen Perseroan—melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-281/MBU/09/2020 Tanggal 9 Januari 2020.

Sebelumnya, beliau pernah berkarir sebagai Kasubdit Media Elektronika (2005-2006), Kepala Bagian Perencanaan, BPPA (2006-2008), Pejabat Promotor Investasi di Tokyo (2008-2011), Kasubdit Jasa Perdagangan dan Pariwisata (2011-2012), Direktur Pengembangan Potensi Daerah (2012), Kepala Biro Umum, Sekretariat Utama BKPM (2012-2018), dan Beliau pernah menjabat sebagai Direktur PT Andalas Sejahtera Jelita Abadi (2018-2019).

Kenny Daryat Nanang is an Indonesian citizen who was born in Sumedang on April 18, 1958 (65 years old). He completed his Bachelor of Mechanical Engineering education at Universitas Trisakti in 1986.

Kenny Daryat Nanang was appointed as Independent Commissioner of the Company through the General Meeting of Shareholders and was appointed based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-281/MBU/09/2020, dated January 9, 2020.

Previously, he had a career as Head of the Sub-Directorate of Media Electronics (2005-2006), Head of the Planning Section, BPPA (2006-2008), Investment Promoter Officer in Tokyo (2008-2011), Head of the Sub-Directorate of Trade and Tourism Services (2011-2012), Director of Regional Potential Development (2012), Head of General Bureau, Main Secretariat of BKPM (2012-2018), and he served as Director of PT Andalas Sejahtera Jelita Abadi (2018-2019).



Diana Kusumastuti adalah seorang Warga Negara Indonesia, yang lahir di Surakarta pada 17 Jul 1967. (56 tahun). Beliau menamatkan pendidikan Sarjana Arsitektur di Universitas Diponegoro pada tahun 1991 dan Magister Teknik di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2004.

Diana Kusumastuti ditunjuk sebagai Komisaris Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.SK-19/MBU/01/2023 pada 31 Januari 2023.

Sebelumnya, beliau pernah berkarir sebagai Kepala Seksi Program Air Minum & Penyehatan Lingkungan (2009-2011), Kepala Seksi Program Tata Bangunan & Lingkungan Permukiman (2011-2013), Kepala Bidang Kajian Kebijakan & Program BPPPSPAM (2013-2015), Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis (2013-2015), Direktur Bina Penataan Bangunan (2019-2020) dan Direktur Jenderal Cipta Karya 2020-sekarang).

Diana Kusumastuti is an Indonesian citizen, born in Surakarta on Jul 17, 1967. (56 years old). She completed her Bachelor of Architecture education at Universitas Diponegoro in 1991 and Master of Engineering at Institut Teknologi Bandung in 2004.

Diana Kusumastuti was appointed as Commissioner of the Company through the General Meeting of Shareholders and appointed based on SOE Minister Decree No.SK-19/MBU/01/2023 on January 31, 2023.

Previously, she had a career as Section Head of the Drinking Water & Environmental Health Program (2009-2011), Section Head of the Building & Settlement Environment Program Section (2011-2013), Head of Policy Studies & BPPPSPAM Program (2013-2015), Head of Technical Planning Sub-directorate (2013-2015), Director of Building Planning Development (2019-2020) and General Director of Cipta Karya 2020-present).



Tursandi Alwi adalah seorang Warga Negara Indonesia, yang lahir di Sukau, Lampung Barat pada 14 Oktober 1950 (73 tahun). Beliau menamatkan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Taruma Negara pada tahun 1991 dan Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta pada tahun 1997

Tursandi Alwi ditunjuk sebagai Komisaris Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.SK-19/MBU/01/2023 pada 31 Januari 2023.

Sebelumnya, beliau pernah berkarir sebagai Sekretaris Wakil Presiden RI (2007-2010), Komisaris PT Pelindo 3 (2007-2010), Anggota Tim Telaahan Strategi Wakil Presiden RI (2010-2014), Peneliti Utama Bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia (2010-2015), Komisaris PT Angkasa Pura 2 (2010-2015), dan Wakil Ketua Umum KONI Pusat (2019-2023).

Tursandi Alwi is an Indonesian citizen who was born in Sukau, West Lampung, on October 14, 1950 (73 years old). He completed his Bachelor of Law education at Universitas Tarumanegara in 1991 and Master of Management at Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta in 1997

Tursandi Alwi was appointed as Commissioner of the Company through the General Meeting of Shareholders and appointed based on SOE Minister Decree No.SK-19/MBU/01/2023 on January 31, 2023.

Previously, he had a career as Secretary to the Vice President of the Republic of Indonesia (2007-2010), Commissioner of PT Pelindo 3 (2007-2010), Member of the Strategy Study Team of the Vice President of the Republic of Indonesia (2010-2014), Principal Researcher for Indonesian Politics and Government (2010-2015), Commissioner of PT Angkasa Pura 2 (2010-2015), and Vice Chairman of KONI Pusat (2019-2023).

Halaman ini Sengaja dikosongkan
This page intentionally left blank

DEWAN KOMISARIS

Board Of Commissioners

1
IMAM HARYONO
KOMISARIS
Commissioner

2
TURSANDI ALWI
KOMISARIS
Commissioner

3
DIANA KUSUMASTUTI
KOMISARIS
Commissioner

4
HARYADI
KOMISARIS UTAMA/INDEPEN
President/Independent Commissioner

5
KENNY DARYAT NANANG
KOMISARIS INDEPEN
Independent Commissioner



DIREKSI

Board Of Directors

1
SURADI

DIREKTUR KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
Director of Finance and Risk Management

2
TUMPANG MUHAMMAD
DIREKTUR SDM DAN UMUM
Director of HC and General Affairs

3
SUGENG ROCHADI
DIREKTUR UTAMA
President Director

4
MUHAMMAD TOHA FAUZI
DIREKTUR OPERASI I
Director of Operations I

5
PURNOMO
DIREKTUR OPERASI II
Director of Operations II

1

2

3

4

5

PROFIL DIREKSI

Board Of Directors Profile



Sugeng Rochadi adalah seorang Warga Negara Indonesia, yang lahir di Tuban tahun 1966 (57 tahun). Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Merdeka pada tahun 1990 dan Magister Manajemen dari Universitas Negeri Jakarta tahun 2016.

Sugeng Rochadi menjabat Direktur Utama sejak Juli 2021 dengan masa jabatan lima tahun, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasi III dan Merangkap sebagai Komisaris di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk periode (2020-2021), Direktur Operasi III PT Hutama Karya (Persero) periode (2018-2020), Direktur Wilayah Timur PT Hutama Karya (Persero) periode (2014-2018), General Manager Produksi PT Brantas Abipraya periode (2012-2014).

Sugeng Rochadi menjabat sebagai Direktur Utama dengan dasar pengangkatan SK-231/MBU/07/2021. Beliau tidak memiliki rangkap jabatan dan tidak memiliki hubungan keluarga, keuangan, dan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya ataupun pemegang saham pengendali yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen.

Sugeng Rochadi is an Indonesian citizen, born in Tuban in 1966 (57 years old). He earned his Bachelor of Civil Engineering from Universitas Merdeka in 1990 and a Master of Management from Universitas Negeri Jakarta in 2016.

Sugeng Rochadi has served as President Director since July 2021 with a five-year term, previously served as Director of Operations III and concurrently as Commissioner at PT Wijaya Karya (Persero) Tbk for the period (2020-2021), Director of Operations III of PT Hutama Karya (Persero) for the period (2018-2020), Director of the Eastern Region of PT Hutama Karya (Persero) for the period (2014-2018), General Manager of Production of PT Brantas Abipraya for the period (2012-2014).

Sugeng Rochadi has been appointed President Director based on SK-231/MBU/07/2021. He does not hold concurrent positions and has family, financial, and shareholding relations with the Board of Commissioners and the Board of Directors members or controlling shareholders that may affect his ability to act independently.



Suradi adalah seorang Warga Negara Indonesia, lahir 10 April 1967 (56 tahun). Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi dari Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah pada tahun 1993 dan Magister Manajemen Keuangan dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tahun 2007.

Suradi menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM Perseroan sejak 2017 hingga kini. Lalu berdasarkan SK-144/MBU/07/2022 Suradi diangkat kembali menjadi Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko PT Brantas Abipraya (Persero). Pada tanggal 26 Oktober 2022, berdasarkan SK-238/MBU/10/2022 nomenklatur jabatan yang semula Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko, diubah menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Sejak 2014 hingga 2017, Manajer Biro Investor Relations PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Di tahun 2014, Manajer Keuangan dan Human Capital Biro Keuangan Operasi Industrial Plant PT wijaya karya (Persero) Tbk. (2012-2014), Manajer keuangan dan human Capital Industrial Plant PT Wljaya Karya (Persero) Tbk (2011-2014), karyawan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Sejak 1994. Suradi menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM dengan dasar pengangkatan SK-82/MBU/04/2017.

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan dan tidak memiliki hubungan keluarga, keuangan, dan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya ataupun pemegang saham pengendali yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen.

Suradi is an Indonesian citizen born on April 10, 1967 (56 years old). He completed his Bachelor of Accounting from Universitas Sebelas Maret, Central Java, in 1993 and his Master of Financial Management from Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin in 2007.

Suradi has served as the Finance and Human Resources Director of the Company since 2017 until now. Based on SK-144/MBU/07/2022, Suradi was reappointed as Finance, Human Resources and Risk Management Director of PT Brantas Abipraya (Persero). On October 26, 2022, based on SK-238/MBU/10/2022, the nomenclature of the position, which was originally Finance, HR and Risk Management Director, was changed to Finance and Risk Management Director. Previously served as Corporate Secretary of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. From 2014 to 2017, Manager of Investor Relations Bureau of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. In 2014, Manager of Finance and Human Capital Bureau of Industrial Plant Operations of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (2012-2014), Manager of Finance and Human Capital Industrial Plant of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (2011-2014), an employee of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Since 1994. Suradi serves as Finance and HR Director with the basis of appointment SK-82/MBU/04/2017.

He has no concurrent positions and has no family, financial, or share ownership relations with other members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors or controlling shareholders that may affect his ability to act independently.



TUMPANG MUHAMMAD
DIREKTUR SDM DAN UMUM
DIRECTOR OF HC AND GENERAL AFFAIRS

Tumpang Muhammad adalah seorang Warga Negara Indonesia, lahir 15 Februari 1970 (53 tahun). Beliau menyelesaikan Magister Manajemen Bidang Manajemen Stratejik - Program Pasca Sarjana di Prasetya Mulya Business School Jakarta pada tahun 2016.

Tumpang Muhammad menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum Perseroan di tahun 2022. Sebelumnya sejak tahun 2021 menjabat sebagai Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko PT Brantas Energi berdasarkan surat Menteri BUMN Nomor SR-565/MBU/08/2021. Sebelumnya menjabat sebagai Senior Manager Keuangan PT Brantas Abipraya (2017 - 2021), sebagai GM Keuangan PT Brantas Abipraya (2012 - 2017), Manager Akuntansi & Perpajakan Biro Keuangan & Akuntansi (2007 - 2012), sebagai Kepala Bagian Keuangan & SDM Divisi Operasi I (2004 - 2007), sebagai Kepala Bagian Administrasi & Keuangan Cabang IV Makassar (2002 - 2004).

Tumpang Muhammad is an Indonesian citizen born on February 15, 1970 (53 years old). He completed his Master of Management in Strategic Management - Postgraduate Program at Prasetya Mulya Business School Jakarta in 2016.

Tumpang Muhammad served as the Company's HR and General Director in 2022. Previously, since 2021, he has served as Finance, HR & Risk Management Director of PT Brantas Energi based on the letter of the Minister of SOE Number SR-565/MBU/08/2021. Previously, he served as Senior Manager of Finance of PT Brantas Abipraya (2017 - 2021), as GM of Finance of PT Brantas Abipraya (2012 - 2017), as Manager of Accounting & Taxation of Finance & Accounting Bureau (2007 - 2012), as Head of Finance & HR of Operation Division I (2004 - 2007), as Head of Administration & Finance of Branch IV Makassar (2002 - 2004).



Muhammad Toha Fauzi adalah seorang Warga Negara Indonesia, lahir di Kab. Bangkalan, 28 Januari 1966 (57 tahun), Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1991 dan Magister Teknik Sipil di Institut Teknologi Bandung tahun 2003.

M. Toha Fauzi menjabat Direktur Operasi I sejak Juli 2021 dengan masa jabatan lima tahun, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasi II PT PP (Persero) Tbk periode (2019-2021), Direktur of Infrastructure Construction PT PP (Persero) Tbk periode (2017-2019), Direktur Operasi PT PP (Persero) Tbk periode (2016-2017), Kepala Divisi Operasi PT PP (Persero) Tbk periode (2011-2016).

M. Toha Fauzi menjabat sebagai Direktur Operasi I dengan dasar pengangkatan SK-231/MBU/07/2021. Beliau tidak memiliki rangkap jabatan dan tidak memiliki hubungan keluarga, keuangan, dan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya ataupun pemegang saham pengendali yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen.

Muhammad Toha Fauzi is an Indonesian citizen, born in Bangkalan Regency on January 28, 1966 (57 years old), he completed his Bachelor of Civil Engineering from Universitas Gadjah Mada in 1991 and Master of Civil Engineering at Institut Teknologi Bandung in 2003.

M. Toha Fauzi has served as Director of Operations I since July 2021 with a five-year term, previously served as Director of Operations II of PT PP (Persero) Tbk for the period (2019-2021), Infrastructure Construction Director of PT PP (Persero) Tbk for the period (2017-2019), Director of Operations of PT PP (Persero) Tbk for the period (2016-2017), Head of Operations Division of PT PP (Persero) Tbk for the period (2011-2016).

M. Toha Fauzi serves as Director of Operations I with the basis of appointment SK-231/MBU/07/2021. He has no concurrent positions and has no family, financial, or share ownership relations with other members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors or controlling shareholders that may affect his ability to act independently.



Purnomo adalah seorang Warga Negara Indonesia, yang lahir di Solo pada 1970 (53 tahun). Beliau menyelesaikan pendidikan Teknik Sipil di Universitas Negeri Sebelas Maret pada tahun 1994 dan Magister Manajemen di Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2007, Magister Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta pada tahun 2022 dan Program Insinyur di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2022.

Purnomo menjabat sebagai Direktur Operasi II, sebelumnya menjabat sebagai EVP Divisi gedung merangkap sebagai EVP legal di PT Hutama Karya (Persero) dari tahun 2020 - 2022. Menempati posisi sebagai kepala Divisi Gedung PT Hutama Karya (Persero) (2017-2020). Senior Manajer II Bagian Produksi dan Sumber Daya Divisi Jalan dan Jembatan PT Hutama Karya (Persero) (2014-2017), Senior Manajer II Bagian Teknik Divisi Jalan dan Jembatan PT Hutama Karya (Persero) 2014.

Purnomo is an Indonesian citizen born in Solo in 1970 (53 years old). He completed his Civil Engineering education at Universitas Negeri Sebelas Maret in 1994 and Master of Management at Universitas Lambung Mangkurat in 2007, Master of Law at Universitas Bhayangkara Jakarta in 2022, and Engineer Program at Universitas Gadjah Mada in 2022.

Purnomo served as Director of Operations II and previously served as EVP of the building division concurrently as EVP of legal at PT Hutama Karya (Persero) from 2020 - 2022. Occupied the position as head of the Building Division of PT Hutama Karya (Persero) (2017-2020). Senior Manager II of the Production and Resources Section of the Road and Bridge Division of PT Hutama Karya (Persero) (2014-2017), Senior Manager II of the Engineering Section of the Road and Bridge Division of PT Hutama Karya (Persero) 2014.





KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholders Composition

Pemegang Saham PT Brantas Abipraya (Persero) adalah 100% Pemerintah Republik Indonesia dengan modal saham sebagaimana Keputusan RUPS Luar Biasa tentang Peningkatan Modal Dasar, No. 32 tanggal 15 Agustus 2012 sebagai berikut:

- Modal Dasar 2018 600.000 saham nominal @ Rp1.000.000 Rp600.000.000.000
- Modal dalam portepel Rp438.445.000.000
- Modal ditempatkan dan disetor Rp161.555.000.000

KOMPOSISI 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR

Sampai dengan 31 Desember 2023, Abipraya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai komposisi 20 (dua puluh) pemegang saham terbesar.

The shareholders of PT Brantas Abipraya (Persero) are 100% of the Government of the Republic of Indonesia with share capital as per the Resolution of the Extraordinary GMS on the Increase of Authorized Capital, No. 32, dated August 15, 2012, as follows:

- Authorized Capital 2018 600,000 shares @ IDR1,000,000 IDR600,000,000,000
- Capital in portfolio IDR438,445,000,000
- Issued and paid-up capital IDR161,555,000,000

COMPOSITION OF THE 20 LARGEST SHAREHOLDERS

As of December 31, 2023, Abipraya is a State-Owned Enterprise whose shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia. Thus, there is no information about the composition of the 20 (twenty) largest shareholders.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM 5% ATAU LEBIH

Sampai dengan 31 Desember 2023, Abipraya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Informasi mengenai komposisi pemegang saham 5% atau lebih perusahaan telah dijelaskan pada uraian komposisi pemegang saham.

KELOMPOK PEMEGANG SAHAM MASYARAKAT KURANG DARI 5%

Sampai dengan 31 Desember 2023, Abipraya merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Informasi mengenai komposisi pemegang saham 5% atau lebih perusahaan telah dijelaskan pada uraian komposisi pemegang saham.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Direksi maupun Dewan Komisaris tidak mempunyai kepemilikan saham atas Abipraya. Kepemilikan saham seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, tidak menyajikan rincian anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang memiliki saham langsung maupun tidak langsung.

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS 5% OR MORE

As of December 31, 2023, Abipraya is a State-Owned Enterprise whose shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia. Information regarding the composition of shareholders of 5% or more of the company has been explained, in the description of shareholder' composition.

PUBLIC SHAREHOLDING GROUP LESS THAN 5%

As of December 31, 2023, Abipraya is a State-Owned Enterprise whose shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia. Information regarding the composition of shareholders of 5% or more of the company has been explained, in the description of the composition of shareholders.

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Neither the Board of Directors nor the Board of Commissioners has any share ownership of Abipraya. The share ownership is owned by the Government of the Republic of Indonesia and does not provide details of members of the Board of Directors or the Board of Commissioners who own direct or indirect shares.

INFORMASI ANAK PERUSAHAAN

Subsidiary Information

No	Entitas Anak Subsidiaries	Persentase Kepemilikan Saham Share Ownership Percentage	Bidang Usaha Business line	Status Operasi Operation Status
1	PT Brantas Energi	99,93%	Pembangunan, Perindustrian, Perdagangan, dan Jasa Development, Industrial, Trading, and Services	Beroperasi Sejak 2011 Operating since 2011

PT BRANTAS ENERGI

PT Brantas Energi ("BE") merupakan Entitas Anak Perusahaan yang dimiliki oleh PT Brantas Abipraya (Persero) dengan persentase kepemilikan saham sebesar 99,93%. PT Brantas Energi beroperasi sejak tahun 2011, dan aktif hingga saat ini. Pendirian BE dilaksanakan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Brantas Energi" No. 06 tanggal 12 Desember 2011, dibuat oleh Notaris Suparmin, S.H., M.Kn. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Brantas Energi, kegiatan usaha BE bergerak di bidang pembangunan, perindustrian, perdagangan, dan jasa.

PT Brantas Energi

Alamat : Gedung Sapta Taruna Lt.5-6
Jl. D.I Panjaitan Kav. 12, Cawang -
Jakarta Timur 13340
Telp : (021) 8516290
Email : bren@brantas-energi.co.id

Dalam menjalankan usahanya, BE dikelola oleh Direksi, yang diawasi oleh Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi Board of Directors	Nama Name
Direktur Utama President Director	Satiyobudi Santoso
Direktur Pengembangan Usaha & Operasi Business Development & Operations Director	Dody Setiawan
Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Finance, HC and Risk Management Director	Miftakhul Anas

PT BRANTAS ENERGI

PT Brantas Energi ("BE") is a Subsidiary owned by PT Brantas Abipraya (Persero) with a share ownership percentage of 99.93%. PT Brantas Energi has been operating since 2011 and has been active until now. The establishment of BE was carried out based on the Deed of Establishment of Limited Liability Company "PT Brantas Energi" No. 06 dated December 12, 2011, made by Notary Suparmin, S.H., M.Kn. Based on the provisions of Article 3 of the Articles of Association of Brantas Energi, BE's business activities are engaged in development, industry, trading, and services.

PT Brantas Energi

Alamat : Gedung Sapta Taruna Lt.5-6
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 12, Cawang - East
Jakarta 13340
Phone : (021) 8516290
Email : bren@brantas-energi.co.id

In running its business, BE is managed by the Board of Directors, which is supervised by the Board of Commissioners, with the following structure:

Dewan Komisaris Dewan Komisaris	Nama Name
Komisaris Utama President Commissioner	Ramli Ibrahim
Komisaris Commissioner	Buyung Wijaya Kusuma
Komisaris Commissioner	Bambang Pamungkas

INFORMASI PENYERTAAN SAHAM

Perseroan juga memiliki saham di beberapa proyek yang sedang dikerjakan. Informasi penyertaan saham Perseroan, antara lain pada proyek:

SHARE PARTICIPATION INFORMATION

The Company also has shares in several projects that are being worked on. Information on the Company's share participation, among others, in the project:

Nama Proyek Project Name	Mitra Usaha Business Partners	Kepemilikan Saham Share Ownership	Bidang Usaha Business line	Status Operasi Operation Status
Tol Cisumdawu	PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, Waskita Toll Road, PT PP, PT Jasa Sarana	10%	Jalan Tol Highway/Toll Road	Beroperasi Operated
Tol Probolinggo-Banyuwangi	PT Jasa Marga	5%	Jalan Tol Highway/Toll Road	Beroperasi Operated



STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

Company Group Structure



KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

Perseroan belum melakukan pencatatan saham perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) sehingga informasi mengenai kronologi pencatatan saham tidak dapat disajikan dalam laporan tahunan ini.

INFORMASI PENCATATAN OBLIGASI

Pada April 2015, Perseroan menerbitkan Obligasi I Brantas Abipraya dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,5% per tahun untuk jangka waktu 3 tahun. Obligasi ini diterbitkan dengan nilai nominal sebesar Rp300.000.000.000 dan jatuh tempo pada tanggal 8 April 2018.

CHRONOLOGY OF STOCK LISTING

The Company has not yet conducted an Initial Public Offering (IPO), so information regarding the chronology of the stock listing, cannot be presented in this annual report.

BOND LISTING INFORMATION

In April 2015, the Company issued Brantas Abipraya Bond I with a fixed interest rate of 11.5% per annum for three years. This bond was issued with a nominal IDR300,000,000,000 and matured on April 8, 2018.



Seri Obligasi Bond Series	Nilai Obligasi Obligation Value	Tingkat Bunga Interest Rate	Jatuh Tempo Due Date	Peringkat Rank
A	Rp300.000.000.000	11.5%	8 April 2018	IdBBB+

Dana hasil penawaran obligasi ini digunakan sebagai tambahan modal entitas anak sebesar 50% kemudian untuk pembangunan pabrik beton pracetak sebesar 33,33% dan sisanya sebesar 16,67% untuk *refinancing*. Obligasi tersebut telah dilunasi pada 8 April 2018.

The proceeds from this bond offering are used as additional capital for the subsidiary by 50%, then for a precast concrete plant construction by 33.33%, and the remaining 16.67% for refinancing. The bonds were repaid on April 8, 2018.

LEMBAGA PENUNJANG

Supporting Institutions

Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan

Palma Tower, Jl. R.A Kartini II-S Kav.6 TB
Simatupang, Jakarta Selatan 12310
Telp : +6221-75930431, 75930432
Fax : +6221-75930434
website : www.hgkfirm.com

Virly Yusrini, S.H., M.Kn.

Jl. Utan Kayu No. 68H, Jakarta Timur 13120
Telp : (021) 8516107
HP : 0878 8071 6019, 0856 9752 1119

Hestyani Hassan, S.H., M.Kn.

Jl. Otto Iskandar Dinata III No. 13A, Cipinang
Cempedak - Jakarta 13340
Telp : 021 8511952, 021 8566965
Fax : 021-85906165

Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Jl. Panglima Polim No.1 RT.11/RW.7, Kramat Pela,
Jakarta Selatan
Telp : 021 7221269

Notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.Kn.
Jl. Tegar Beriman, Perumahan Graha Kartika
Pratama Blok BB 1/7, Kecamatan Bojong Gede,
Kabupaten Bogor

Telp : 021 29333950; 0812 42492771

Kantor Advokat Kurator dan Pengurus Indonesia

Dr. harris Arthur hedar. S.H., M.H. & Rekan
Jl. Suryopranoto No. 47 Jakarta Pusat 10160
Telp : 021 22039393
Fax : 021 3519393

Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan

Palma Tower, Jl. R.A Kartini II-S Kav.6 TB
Simatupang, South Jakarta 12310
Telp : +6221-75930431, 75930432
Fax : +6221-75930434
website : www.hgkfirm.com

Virly Yusrini, S.H., M.Kn.

Jl. Utan Kayu No. 68H, East Jakarta 13120
Phone : (021) 8516107
HP : 0878 8071 6019, 0856 9752 1119

Hestyani Hassan, S.H., M.Kn.

Jl. Otto Iskandar Dinata III No. 13A, Cipinang
Cempedak - Jakarta 13340
Phone : 021 8511952, 021 8566965
Fax : 021-85906165

Attorney General's Office of the Republic of Indonesia

Jl. Panglima Polim No.1 RT.11/RW.7, Kramat Pela,
South Jakarta
Phone : 021 7221269

Notary Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.Kn.
Jl. Tegar Beriman, Graha Kartika Pratama
Housing Block BB 1/7, Bojong Gede District,
Bogor Regency

Phone : 021 29333950; 0812 42492771

Indonesian Advocates, Curators and Administrators Office

Dr. Harris Arthur Hedar S.H., M.H. & Partner
Jl. Suryopranoto no. 47, Central Jakarta 10160
Phone : 021 22039393
Fax : 021 3519393

UNIT BISNIS DAN KANTOR PERWAKILAN

Business Units and Representative Offices

ALAMAT PABRIK ABIPRAYA BETON

Abipraya Beton – Plant Subang
 Jl. Raya wantilan–Cipeundeuy
 Desa Cibeunying, Kel. Cipeundeuy
 Kec. Cipeundeuy, Kab. Subang
 Jawa Barat

DIVISI OPERASI I

Gedung Sapta Taruna Lt.6
 Jl. D.I Panjaitan Kav.12, Cawang, Jakarta Timur
 13340
 Telp: (021) 851 6290 | Fax: (021) 851 6095

DIVISI OPERASI II

Jl. D.I Panjaitan Kav.14, Cawang, Jakarta Timur
 13340
 Telp: (021) 851 6290 | Fax: (021) 851 6095

DIVISI OPERASI III

Jl. D.I Panjaitan Kav.14, Cawang, Jakarta Timur
 13340
 Telp: (021) 851 6290 | Fax: (021) 851 6095

DIVISI PERALATAN & PRECAST

Gedung Sapta Taruna Lt.5
 Jl. D.I Panjaitan Kav.12, Cawang, Jakarta Timur
 13340
 Telp: (021) 851 6290 | Fax: (021) 851 6095

ADDRESS OF ABIPRAYA BETON FACTORY

Abipraya Beton – Plant Subang
 Jl. Raya Wantilan–Cipeundeuy
 Cibeunying Village, Cipeundeuy Subdistrict
 Cipeundeuy District, Subang Regency
 West Java

OPERATIONS DIVISION I

Sapta Taruna Building, 6th Floor
 Jl. D.I Panjaitan Kav.12, Cawang, East Jakarta
 13340
 Phone: (021) 851 6290 | Fax: (021) 851 6095

OPERATIONS DIVISION II

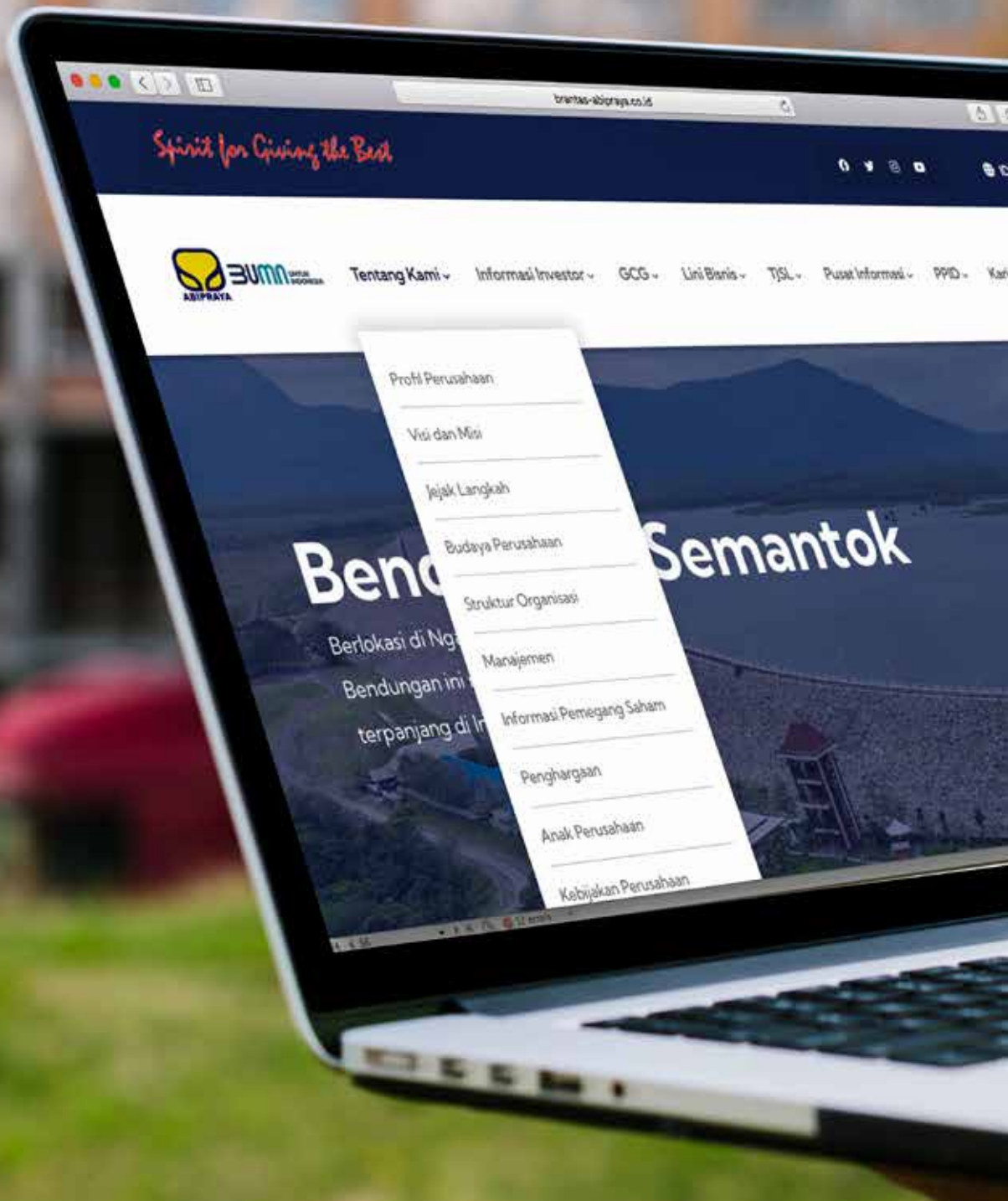
Jl. D.I Panjaitan Kav.14, Cawang, East Jakarta
 13340
 Phone: (021) 851 6290 | Fax: (021) 851 6095

OPERATIONS DIVISION III

Jl. D.I Panjaitan Kav.14, Cawang, East Jakarta
 13340
 Phone: (021) 851 6290 | Fax: (021) 851 6095

EQUIPMENT AND PRECAST DIVISION

Sapta Taruna Building 5th floor
 Jl. D.I Panjaitan Kav.12, Cawang, East Jakarta
 13340
 Phone: (021) 851 6290 | Fax: (021) 851 6095



INFORMASI PERUSAHAAN

Company Information

Website adalah halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet. Sebagai sarana komunikasi, promosi, dan pemenuhan terhadap aspek *Good Corporate Governance*, Abipraya telah memiliki website perusahaan yaitu <https://www.brantas-abipraya.co.id/id>.

Peraturan yang diterapkan terkait keterbukaan dalam penyampaian informasi pada website perseroan adalah Undang-Undang no. 14 tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Perseroan selalu berupaya menyempurnakan *website* tersebut secara berkala agar menjadi semakin informatif dan mudah untuk diakses oleh para *Stakeholders*. *Website* perusahaan memiliki dua versi bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Website perusahaan juga memuat informasi mengenai praktik GCG yang telah diterapkan oleh perusahaan antara lain Struktur organisasi dan Tim manajemen (memuat susunan terbaru dari Dewan Komisaris dan Direksi), pemegang Saham, *Core Values* serta *Governance Structure* (memuat dokumen-dokumen GCG seperti pedoman GCG, *Code of Conduct*, pedoman pengendalian Gratifikasi, Pedoman Kebijakan *Whistleblowing System*, dan dokumen kebijakan lainnya).

A website is a web page that contains information or data that can be accessed, through an internet network system. As a means of communication, promotion, and fulfillment of aspects of Good Corporate Governance, Abipraya already has a company website, namely <https://www.brantasabipraya.co.id>.

The regulations applied regarding the disclosure of information on the company's website are Law No. 14 of 2008, dated April 30, 2008, concerning public information disclosure.

The Company always strives to improve the website regularly so it becomes more informative and easy to access stakeholders. The company's website has two language versions, Indonesian and English

The company's website also contains information about GCG practices that have been implemented by the company, including the organizational structure and management team (containing the latest composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors), shareholders, Core Values, and Governance Structure (contains GCG documents, such as GCG guidelines, Code of Conduct, Gratuity control guidelines, Whistleblowing System Policy Guidelines, and other policy documents).



Sumber Daya Manusia

Human Capital



PERSEROAN BERKOMITMEN PENUH PADA PROSES PENGEMBANGAN KARYAWAN MELALUI PERENCANAAN PROGRAM-PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG MAMPU MENINGKATKAN KOMPETENSI.

The Company is fully committed to the employee development process through the planning of education and training programs that are able to improve competencies



PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Human Capital Development

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penggunaan Teknologi Informasi (TI) yang menjadi modal utama Perseroan dalam menghadapi persaingan industri yang semakin masif dan mewujudkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Perseroan memandang SDM sebagai aset penting yang harus selalu ditingkatkan dan dikembangkan kompetensinya dalam rangka mencetak SDM yang memiliki integritas dan kapabilitas tinggi dan mampu berkontribusi dalam mewujudkan Visi, Misi, dan strategi Bisnis Perseroan.

Perseroan memandang bahwa SDM merupakan komponen yang sangat penting dalam rangka mempertahankan keunggulan kompetitif dan mendukung strategi bisnis.

The Company recognizes the significance of strengthening the fundamental aspects of business support in order to attain success. Hence, we are committed to always improving the quality of human capital management and the use of Information Technology (IT) so as to become the main capital of the Company in addressing the increasingly massive industry competition and realizing sustainable business growth.

The Company regards the aspect of human capital as the key asset of which the competency must always be enhanced in order to create human capital with high integrity and capability, able to contribute to the realization of the Company's Vision, Mission, and Business Strategies.

The Company considers human capital as a valuable component in order to maintain its competitive advantage and support business strategies.

Hingga 31 Desember 2023, jumlah pegawai Perseroan mencapai 811 orang, sedangkan tahun 2022 sebanyak 812 orang. Kenaikan ini telah disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Perseroan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Berikut adalah komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, level jabatan, tingkat usia, status kepegawaian dan jenis kelamin.

As of December 31, 2023, the number of employees within the Company reached 811 people and 2022 of 812 people. This decrease has been adjusted to the Company's business needs both in terms of quality and quantity. The following is the composition of employees based on education level, position level, age level, employment status, and gender.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Employee Composition Based on Employment Status

Status Kepegawaian Employment Status	2023	2022	2021
Pegawai Tetap (PO & PKT) Permanent Employee (PO & PKT)	642	669	714
Pegawai Tidak Tetap (PK) Temporary Employees (PK)	169	143	127
Jumlah Total	811	812	841

Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Jabatan

Employee Composition Based on Position Level

Level Jabatan Employment Level	2023	2022	2021
Senior Vice President	15	14	16
Vice President	66	62	64
Assistant Vice President	92	88	78
Project Supervisor	245	161	139
Staff	393	487	544
Jumlah Total	811	812	841

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Employee Composition Based on Education Level

Level Pendidikan Education Level	2023	2022	2021
S2/ S3 Masters	105	81	72
S1/ D4 Bachelor	542	546	542
Diploma	64	69	81
SMA High School	100	116	129
Jumlah Total	811	812	814

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Usia

Employee Composition Based on Age

Usia Age	2023	2022	2021
≤ 30	244	288	339
31 - 34	218	188	177
35 - 38	108	96	78
39 - 42	61	50	52
43 - 46	49	47	43
47 - 50	46	54	61
≥ 51	85	89	91
Jumlah Total	811	812	841

Komposisi Pegawai Berdasarkan jenis Kelamin

Employee Composition Based on Gender

Jenis Kelamin Gender	2023	2022	2021
Pria Male	727	739	772
Wanita Female	84	73	69
Jumlah Total	811	812	841

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA**

Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM karena Abipraya meyakini kualitas SDM sangat berperan dalam meningkatkan daya saing perseroan. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui pelatihan profesional yang berkelanjutan maupun dengan merekrut SDM yang berkualitas.

Perseroan merealisasikan program pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan model kompetensi (*competency model*) dan kesempatannya terbuka bagi setiap pegawai. Setiap pegawai berhak mengajukan diri menjadi peserta pelatihan dengan mengajukan persyaratan administrasi tertentu, dan mendapatkan persetujuan dari atasannya. Pengajuan jenis pelatihan dan pengembangan yang hendak diikuti harus selaras dengan kebutuhan tugas, rencana pengembangan kompetensi dan pengembangan usaha.

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

The Company continues to improve the quality of Human Capital. The company believes that the quality of Human Capital plays an important role in enhancing the company's competitiveness. The initiatives are carried out through continuous professional training and recruiting qualified Human Capital.

The Company realizes employee competency development programs based on the competency model and the opportunity is exposed to every employee. All personnel within the company have the right to apply to be a trainee by submitting certain administrative requirements and obtaining approval from their leaders. The submission of the type of training and development to be followed must be in line with the needs of the task, competency development plan, and business development.

PEMETAAN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Dalam Pengembangan kompetensi, perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan dimana selama tahun 2023 diperoleh beragam sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan keterampilan tertentu, sesuai kompetensi yang diperlukan masing – masing karyawan.

Adapun maksud dan tujuan penyelenggaraan Diklat, yaitu untuk:

1. Membentuk karyawan menjadi manusia yang profesional dan berkepribadian sesuai nilai-nilai perusahaan dengan wawasan/cara pandang yang luas dalam melaksanakan tugas pekerjaannya untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan;
2. Mengembangkan kompetensi, inovasi, kreativitas, kerja sama dan disiplin karyawan sehingga mampu mendayagunakan potensi diri secara optimal untuk kepentingan Perseroan;
3. Menumbuhkan dan mengembangkan suasana, metode kerja serta koordinasi antar unit secara lebih baik.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

Perseroan berkomitmen penuh pada proses pengembangan karyawan melalui perencanaan program-program pendidikan dan pelatihan yang mampu meningkatkan kompetensi. Program pengembangan SDM yang tepat dan dibutuhkan oleh masing-masing karyawan dilakukan melalui Analisa kebutuhan Pembelajaran dengan memperhatikan target unit kerja dan visi misi perusahaan dalam pemenuhan gap kompetensi.

COMPETENCY DEVELOPMENT MAPPING

In terms of competency development, the company gives equal opportunity to all employees. During 2023, numerous certifications are gained to suit specific skill needs based on each employee's competencies.

The aims and objectives of the implementation of Training and Education initiatives are to:

1. Shaping employees into professional and personable people in accordance with company values with broad insight/perspective in carrying out their work duties to support the achievement of the company's vision and mission;
2. Developing employee competence, innovation, creativity, cooperation, and discipline in order to be able to utilize their potential optimally for the benefit of the company;
3. Encourage and develop a better atmosphere, working methods, and coordination between business units.

HC COMPETENCY DEVELOPMENT

The Company is fully committed to the employee development process through the planning of education and training programs that are able to improve competencies. The right HC development program needed by each employee is carried out through Learning needs analysis by taking into account the target work unit and the company's vision and mission in fulfilling the competency gap.

Program pelatihan untuk pengembangan SDM di Perseroan melalui :

1. In-House Training

Perseroan mengembangkan program pelatihan secara internal dengan melakukan kerja sama dengan pihak eksternal dalam pemberian materi pelatihan yang ditujukan untuk peningkatan kompetensi karyawan terkait bidang pekerjaan, yang disebut dengan *knowledge sharing session*, menghadirkan para pembicara sesuai dengan kompetensi di bidangnya.

2. Public Training Program

Pada *Public Training Program*, Perseroan mengikutsertakan para karyawan secara intens pada program pelatihan – pelatihan serta seminar Dalam dan Luar Negeri sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Pengembangan SDM melalui pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja, dalam arti pengembangan bersifat formal dan berkaitan dengan karir.

Selama tahun 2023, Perseroan telah merealisasikan kegiatan pelatihan karyawan, dengan rincian sebagai berikut:

Training programs for Human Capital development in the company, as follow:

1. In-House Training

The company develops training programs internally by collaborating with external parties in providing training materials aimed at improving employee competencies related to the field of work, called *knowledge sharing session*, presenting professional speakers in accordance with competencies within their field of operations;

2. Public Training Program

In the *Public Training Program*, the company engages employees intensely in domestic and foreign training programs and seminars in accordance with the need to improve employee competence. Human Capital development through education aims to improve employability, in the sense that development is formal and career-related.

During 2023, the company has realized employee training activities, with the following details:

No	Uraian Pelatihan Karyawan	Description of Employee Training
1	PMBOK Level Intermediate (SEM, SOM)	PMBOK Level Intermediate (SEM, SOM)
	- Batch 1	- Batch 1
	- Batch 2	- Batch 2
	- Batch 3	- Batch 3
	- Batch 4	- Batch 4
	- Batch 5	- Batch 5
2	PMBOK Level Professional (PM)	PMBOK Level Professional (PM)
	- Batch 1	- Batch 1
	- Batch 2	- Batch 2
	- Batch 3	- Batch 3
3	Pelatihan I2LI School of Dam & Water Resources Indonesia Infrastructure Learning Institute (I2LI) Batch 3	I2LI School of Dam & Water Resources training Indonesia Infrastructure Learning Institute (I2LI) Batch 3
4	Indonesia Infrastructure Learning Institute (I2LI): Talent & Knowledge Management	Indonesia Infrastructure Learning Institute (I2LI): Talent & Knowledge Management
	Indonesia Infrastructure Learning Institute (I2LI): Talent & Knowledge Management Certified Knowledge Manager (KM)	Indonesia Infrastructure Learning Institute (I2LI): Talent & Knowledge Management Certified Knowledge Manager (KM)

No	Uraian Pelatihan Karyawan	Description of Employee Training
5	Indonesia Infrastructure Learning Institute (I2LI): Claim & Change Management Certified Contract Drafter (CCD)	Indonesia Infrastructure Learning Institute (I2LI): Claim & Change Management Certified Contract Drafter (CCD)
	Indonesia Infrastructure Learning Institute (I2LI): Claim & Change Management	Indonesia Infrastructure Learning Institute (I2LI): Claim & Change Management
	Indonesia Infrastructure Learning Institute (I2LI): Claim & Change Management FIDIC Contract Manager Certification (FIDIC Int.)	Indonesia Infrastructure Learning Institute (I2LI): Claim & Change Management FIDIC Contract Manager Certification (FIDIC Int.)
6	Indonesia Infrastructure Learning Institute (I2LI): Procurement & SCM Certified Supply Chain and Logistics Analyst in Construction (CSLC)	Indonesia Infrastructure Learning Institute (I2LI): Procurement & SCM Certified Supply Chain and Logistics Analyst in Construction (CSLC)
	Indonesia Infrastructure Learning Institute (I2LI): Procurement & SCM Certified Professional in Supply Chain and Logistics in Construction (CPSC)	Indonesia Infrastructure Learning Institute (I2LI): Procurement & SCM Certified Professional in Supply Chain and Logistics in Construction (CPSC)
7	Pelatihan & Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan & HI	Corporate Law & HI Practitioner Training & Certification
8	Pelatihan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Surabaya	Domestic Component Level Training (TKDN) Surabaya
9	Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan: 1. Awareness SMAP (43 Pegawai) 2. Auditor Internal SMAP(20 Pegawai)	Anti-Bribery Management System Training: 1. Awareness SMAP (43 Employees) 2. SMAP Internal Auditor (20 Employees)
10	Pelatihan & Sertifikasi K3 Confined Space (Kemnaker & BNSP)	K3 Confined Space Training & Certification (Ministry of Manpower & BNSP)
11	1. Pelatihan & Sertifikasi Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU); 2. Pelatihan & Sertifikasi Pengendalian Pencemaran Air (PPPA); 3. Pelatihan & Sertifikasi Pengelolaan Limbah B3 (PLB3)	1. Air Pollution Control Training & Certification (PPPU); 2. Water Pollution Control Training & Certification (PPPA); 3. B3 Waste Management Training & Certification (PLB3)
12	Usulan Pelatihan & Sertifikasi Manajemen Risiko Batch 2	Proposed Batch 2 Risk Management Training & Certification
13	Usulan Pelatihan & Sertifikasi Manajemen Risiko Batch 1	Proposed Batch 1 Risk Management Training & Certification
14	Pelatihan Ka SPI + Asesment Sertifikasi BNSP - Workshop Standar dan kode Etik Profesional - Pra Manajerial - Manajerial	Head of SPI Training + BNSP Certification Assessment - Professional Standards and Code of Ethics Workshop - Pre Managerial - Managerial
15	Pelatihan Pimpinan Unit Kerja Sekper	Training for Corporate Secretary Work Unit Leaders
16	Pelatihan Leadership Development Program	Leadership Development Training Program
17	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Kurator dan Pengurus Angkatan IX Tahun 2023	Training and Certification Examination for Curators and Administrators Batch IX in 2023
18	Training & Workshop terkait Introduction to Control Objective for Information and Related Technology (COBIT)	Training & Workshop terkait Introduction to Control Objective for Information and Related Technology (COBIT)
19	Pelatihan Accounting for Consolidation Reporting	Accounting for Consolidation Reporting Training
20	Pelatihan dan Sertifikasi QIA (Qualified Internal Auditor) Tingkat Manajerial	Managerial Level QIA (Qualified Internal Auditor) Training and Certification
21	Pelatihan Lifting Engineer & Scaffolding Planner	Lifting Engineer & Scaffolding Planner Training
22	Pelatihan dan sertifikasi ahli Muda K3	Training and certification of young OHS experts
23	Valuation on Merger & Acquisition	Valuation on Merger & Acquisition
24	Program Pelatihan & Sertifikasi SMK3	SMK3 Training & Certification Program
25	Pelatihan Business Continuity Management (BCM)	Business Continuity Management (BCM) Training
26	Pelatihan dan sertifikasi Damkar Kelas C	Class C Firefighter training and certification

No	Uraian Pelatihan Karyawan	Description of Employee Training
27	Awareness Management System ISO Intergrated	Awareness Management System ISO Intergrated
28	Pelatihan Damkar Internal	Internal Firefighter Training
29	Pelatihan dan Sertifikasi QIA (Qualified Internal Auditor) Tingkat Dasar	Basic Level QIA (Qualified Internal Auditor) Training and Certification
30	Program Pelatihan & Sertifikasi Damkar D	D Firefighters Training & Certification Program
31	Pelatihan Manajemen Investasi Dana Pensiun (MIDP) an. Unggul Alvianto	Pension Fund Investment Management Training (MIDP)
32	Program Pelatihan & Sertifikasi P3K	First Aid Training & Certification Program
33	Program Pelatihan & Sertifikasi K3 Konstruksi	Construction OHS Training & Certification Program
34	Program Pelatihan & Sertifikasi Ahli Lingkungan Kerja	Work Environment Expert Training & Certification Program
35	Pelatihan Modul Akuntansi	Accounting Module Training
36	Sharing CPO - Tema: Unforeseen condition	Sharing CPO - Tema: Unforeseen condition
37	Pelatihan Applied Financial Project Model	Applied Financial Project Model Training
38	Pelatihan Modul Digital Talent	Digital Talent Module Training

BIAYA PENDIDIKAN & PELATIHAN

Untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme, perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pekerja untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat). Selama tahun 2023, Perseroan telah menyelenggarakan 38 program pelatihan pekerja, perseroan mengeluarkan total biaya sebesar Rp4.190.411.329, naik 44% dibandingkan biaya tahun sebelumnya, yang mencapai Rp2.910.835.443.

PENGLOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengelola SDM dilakukan dengan berbasis pada strategi dan rencana bisnis perusahaan serta budaya kerja yang diinginkan. Untuk memastikan pengelolaan sumber daya manusia di Perseroan sejalan dengan visi perusahaan, Perseroan telah menyusun *Key Performance Indicator (KPI)* dan target kinerja sebagai dasar untuk pengukuran kinerja pegawai dan sistem *rewards & punishment*.

EDUCATION & TRAINING BUDGET

In order to improve quality and professionalism, Abipraya provides equal opportunities to all workers to attend education and training. In 2023, The company has organized 38 worker training programs, the company incurred a total cost of IDR4.190.411.329 increase 44% to the previous year's budget, which reached IDR 2.910.835.443.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

Human capital management is performed based on Abipraya's strategy and business plan as well as the desired work culture. With the intention to ensure that the management of human capital is in line with the company's vision, the Company has developed Key Performance Indicators (KPIs) and performance targets as the basis for employee performance measurement and reward & punishment system.

UNIT PENGEMBANGAN SDM

Identifikasi fungsi dan penataan infrastruktur organisasi dilakukan dalam rangka penguatan sistem pengelolaan SDM Perseroan guna menjamin keteraturan struktur organisasi, ruang lingkup tanggung jawab dan kejelasan kompetensi setiap fungsi. Pengelolaan SDM yang baik menjadi dasar agar operasional perusahaan dapat berjalan melalui koordinasi dan komunikasi yang baik. Dalam pengelolaan SDM, Perseroan juga melaksanakan program peningkatan kinerja manajemen dan berbagai program lain yang mampu meningkatkan keahlian dan kemampuan masing-masing SDM yang dimiliki Perseroan.

Perseroan membentuk unit pengelola SDM sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam pengelolaan SDM. Unit Pengembangan SDM dibentuk untuk tujuan menciptakan SDM tangguh, kompeten, profesional, dan berintegritas tinggi guna mendukung keberlanjutan bisnis.

TUGAS POKOK DEPARTEMEN HUMAN CAPITAL & GENERAL AFFAIRS

Dalam menjalankan tugasnya, Departemen Human Capital & General Affairs memiliki tugas pokok yaitu mengelola dan membina kegiatan yang terkait dengan pegawai sebagai *partner* usaha yang strategis. Tugas pokok Unit Pengembangan SDM dijabarkan dalam uraian berikut:

1. Perumusan kebijakan dan sistem manajemen sumber daya manusia.
Prosedur dan program kerja yang dirancang oleh Perseroan melalui Departemen Human Capital & General Affairs merupakan panduan untuk mempermudah kinerja pegawai Perseroan sebagai komponen

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT UNIT

Identification of functions and structuring of organizational infrastructure is carried out in order to strengthen the Company's human capital management system to ensure the regularity of the organizational structure, the scope of responsibility and the clarity of competence of each function. Good human capital management is the basis for company operations to run through good coordination and communication. In managing human capital, the Company performs management performance improvement programs and various other programs that are able to improve the expertise and ability of each Human Capital owned by the company.

As a demonstration of the company's dedication to HC management, the Company formed an HC management unit. In order to strengthen business sustainability, the HC Development Unit was established with the goal of developing strong, capable, professional, and high-integrity Human Capital.

THE HUMAN CAPITAL & GENERAL AFFAIRS DEPARTMENT'S PRIMARY RESPONSIBILITIES

In carrying out its duties, the Human Capital & General Affairs Department has the main task of managing and fostering activities related to employees as strategic business partners. The main tasks of the HC Development Unit are described in the following description:

1. Formulation of human capital management policies and systems.
The procedures and work programs designed by the Company through the Human Capital & General Affairs Department are a guide to facilitate the performance of the Company employees as the most important component

terpenting penggerak roda bisnis. Kebijakan-kebijakan yang disusun meliputi sistem pola karir, sistem kompensasi & benefit, sistem penilaian kinerja, sistem talent management, dan program strategis lainnya.

2. Perencanaan organisasi dan kebutuhan sumber daya manusia.

Komposisi struktur organisasi dihitung menggunakan metode analisa beban kerja. Hasil dari analisis beban kerja menjadi gambaran kebutuhan pegawai yang bisa diterapkan dalam pola rekrutmen. Departemen Human Capital & General Affairs juga menyusun fungsi jabatan dan *job description* sebagai pedoman setiap unit dalam menjalankan fungsinya. Analisa jabatan adalah metode yang digunakan dalam penyusunan *job description*.

3. Manajemen kinerja individu.

Abipraya dinilai dengan KPI, yang hasilnya berhubungan dengan indeks prestasi. Saat ini penilaian kinerja menggunakan sistem online sehingga efisien dalam waktu dan biaya. Departemen Human Capital & General Affairs memfasilitasi penyelesaian masalah terkait penilaian kinerja dan membina pegawai melalui konseling, mentoring, dan evaluasi.

4. Perencanaan organisasi dan sumber daya manusia.

Perubahan struktur organisasi adalah menggunakan metode analisis beban kerja. Hasil analisa tersebut menjadi preferensi kebutuhan, jumlah karyawan dan diterapkan sebagai pedoman perekrutan. Departemen Human Capital & General Affairs juga mengatur pekerjaan deskripsi sebagai pedoman untuk setiap pekerjaan satuan. Analisis posisi adalah metode yang digunakan dalam pengaturan deskripsi pekerjaan.

driving the wheels of business. The policies prepared include a career pattern system, compensation & benefits system, performance appraisal system, talent management system, and other strategic programs.

2. Organizational planning and human capital needs.

The composition of the organizational structure is calculated using the workload analysis method. The results of the workload analysis provide an illustration of employee needs that can be applied to recruitment patterns. The Human Capital and General Affairs Department also prepares position functions and job descriptions as guidelines for each unit in carrying out its functions. Job analysis is a method used in preparing job descriptions.

3. Personal Performance Oversight.

KPIs are used to evaluate Abipraya, and the outcomes are connected to the achievement index. Currently, an online method is used for performance reviews. It is therefore economical and time-efficient. The HC Development Unit supports staff members through evaluation, coaching, and mentoring while facilitating problem-solving linked to performance reviews;

4. Organizational planning and human capitals.

Changes in organizational structure are using workload analysis methods. The results of this analysis become preferences for needs and the number of employees and are applied as recruitment guidelines. The Human Capital and General Affairs Department also regulates job descriptions as a guide for each unit's work. Position analysis is a method used in setting job descriptions.



REKRUTMEN

Rekrutmen pegawai baru berfungsi untuk melakukan regenerasi serta memberikan keseimbangan komposisi pegawai. Perseroan menyusun program rekrutmen yang komprehensif serta memerhatikan faktor lainnya agar jumlah pegawai yang ada dapat meningkatkan efisiensi kinerja Perseroan.

Perseroan menjunjung tinggi asas kesetaraan kesempatan dalam proses rekrutmen tanpa adanya unsur diskriminasi. Oleh karenanya, rekrutmen pegawai Perseroan dilakukan secara terbuka bagi siapapun. Untuk mendapatkan calon karyawan yang berkualitas terbaik, Perseroan melakukan rekrutmen secara internal dan eksternal.

a. Rekrutmen internal

Rekrutmen internal dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang telah dimiliki sebagai bentuk percepatan pergerakan karir pegawai.

RECRUITMENT

Recruitment of new employees functions as regeneration and provides balance in employee composition. The Company develop a comprehensive recruitment program and pay attention to other factors so that the number of existing employees can increase the efficiency of the company's performance.

The Company upholds the principle of equality of opportunity in the recruitment process without any element of discrimination. For this reason, the recruitment procedure of the Company employees is open to anyone. In order to obtain the best qualified employee candidates, the Company conducts recruitment internally and externally.

a. Internal recruitment

Internal recruitment is carried out by optimizing the resources already owned as a form of accelerating employee career movements;

- b. Rekrutmen eksternal,
Rekrutmen eksternal difokuskan pada perekrutan pegawai berpendidikan yang lebih tinggi dan pegawai dengan kompetensi yang belum dimiliki Perseroan.

- b. Pro hire recruitment
The goal of pro hire recruitment is to find applicants who are more educated and has skills that the Company does not already possess.

Jumlah Pegawai Yang Masuk dan Yang Keluar

Employees Turnover

Uraian Description	PO	PKT	PK	TOTAL
Pegawai Baru New Employees	-	-	57	57
Pensiun Pension	12	7	-	19
Mengundurkan Diri Resigned	9	1	12	22
Indisipliner Interdisciplinary	1	-	1	2
Kebijakan Perusahaan Company Policy	-	-	-	-
Meninggal Dunia Passed Away	-	-	-	-

PENILAIAN KINERJA

Fokus pengelolaan SDM Perseroan dilakukan dengan peningkatan kualitas dan profesi melalui program penilaian kinerja yang berkelanjutan. Program penilaian kinerja diterapkan pada semua level pegawai. Penilaian kinerja pegawai dilakukan dalam tiga tahap, yakni:

- Penetapan poin-poin penilaian. Target kinerja pegawai ditetapkan berdasarkan objektivitas organisasi yang diturunkan ke unit kerja masing-masing, hingga ke level individu.

PERFORMANCE ASSESSMENT

The focus of Abipraya's Human Capital management is performed by improving quality and profession through a continuous performance appraisal program. Performance appraisal programs are applied at all levels of employees. Employee performance appraisal is carried out in three stages, namely:

- Assignment of scoring points. Employee performance targets are based on organizational objectives that are derived from their respective work units, down to the individual level;

- Pengawasan dan penilaian kinerja karyawan dilakukan secara berkala terhadap target per periode, fase monitoring dilakukan melalui evaluasi setiap enam bulan. Penilaian ini bertujuan untuk memetakan kekuatan dan kelemahan kinerja setiap pegawai. Dengan begitu, poin-poin penilaian yang hasilnya belum memuaskan dapat diperbaiki sehingga target yang direncanakan bisa tercapai enam bulan sekali.
- Periodically, employees' performance is assessed and supervised in relation to predetermined goals; evaluations are conducted every six months to complete the monitoring phase. The purpose of this evaluation is to map each employee's performance strengths and shortcomings. In this manner, evaluation points with unsatisfactory outcomes might be adjusted to help reach the intended goals. every six months on average.

Tahap-tahap tersebut menjadi skema penilaian KPI untuk masing-masing pegawai, dan KPI ditetapkan setiap tahun berdasarkan konsep *balance scorecard*.

These stages become a KPI assessment scheme for each employee, and KPIs are determined every year based on the balanced scorecard concept.

Departemen Human Capital & General Affairs juga mengelola sistem *reward & punishment* serta mengelola manajemen karir pegawai melalui *assessment*, pemetaan kompetensi, serta mekanisme mutasi, magang, dan penugasan. Departemen Human Capital & General Affairs juga memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah hubungan industrial antara manajemen dengan pegawai.

The Human Capital & General Affairs Department also manages the reward & punishment system and manages employee career management through assessment, competency mapping, as well as mechanisms for transfers, internships and assignments. The Human Capital & General Affairs Department also has responsibility for resolving industrial relations problems between management and employees.



Analisa & Pembahasan Manajemen

Management Discussion & Analysis



MELALUI KINERJA LINI BISNISNYA, HINGGA KINI PERSEROAN TELAH BANYAK DIPERCAYA UNTUK MENERJAKAN PROYEK STRATEGIS PEMERINTAH. DALAM PENCATATAN KINERJA OPERASIONAL, ABIPRAYA JEMBATAN, GEDUNG/BANGUNAN, LISTRIK, PRASARANA PERHUBUNGAN (DARAT, LAUT, & UDARA), DAN SEGMENT LAIN- LAIN (BETON, ENERGI TERBARUKAN, PROPERTI).

Through the performance of its business platform, until now the Company has been trusted to obtain work on strategic government projects. In recording operational performance, Abipraya Bridges, Buildings/Edifice, Electricity, Transportation Infrastructure (land, sea & air), and other segments (concrete, renewable energy, property).



TINJAUAN PER SEGMENT USAHA

Business Segment Overview

Perseroan memiliki lini bisnis yang cukup lengkap di sektor konstruksi. Adapun lini bisnis Perseroan antara lain Bendungan, Irigasi, Terowongan, Reklamasi, Jalan/Jembatan, Bandara, Gedung, Mekanikal & Elektrikal, Pembangkit Listrik, serta Beton. Melalui kinerja lini bisnisnya, hingga kini Perseroan telah banyak dipercaya untuk mengerjakan proyek strategis pemerintah.

Kinerja operasi per segmen di tahun 2023 dipengaruhi oleh jumlah tender yang dimenangkan, dikerjakan, hingga selesainya kontrak proyek tersebut. Pada 2023, Keikutsertaan tender yang diikuti dan diumumkan adalah sebesar Rp 53,82 triliun, sehingga realisasi tender tercapai 129,31% dari target awal yaitu sebesar Rp 41,62 triliun. Sementara itu, nilai tender yang dimenangkan senilai Rp11,87 triliun atau tercapai 157,29% dari nilai tender yang dimenangkan tahun lalu yang senilai Rp7,55 triliun.

The Company has a complete business line in the construction sector. The Company's business lines include Dam, Irrigation, Tunnel, Reclamation, Road/Bridge, Airport, Building, Mechanical & Electrical, Power Plant, and Concrete. Through the performance of its business lines, until now Abipraya has been trusted to work on many strategic government projects.

The operating performance per segment in 2023 is influenced by the number of tenders won, and worked on, until the completion of the project contract. In 2023, the participation of tenders followed and announced was IDR53.82 trillion, so the realization of tenders reached 129.31% of the initial target of IDR41.62 trillion. Meanwhile, the value of tenders won was IDR11.87 trillion or 157.29% of the value of tenders won last year, which amounted to IDR7.55 trillion.

Perolehan Kontrak Proyek Project Contract Acquisition

Uraian Description	Realisasi 2023 Realization 2023	RKAP 2023	Realisasi 2022 Realization 2022	Pencapaian RKAP 2023 (%) Realization of Budget (%)	Pertumbuhan (%) 2022/2023 Growth (%) 2022/2023
	Nilai (Rp Milliar) Value (IDR Billion)	Nilai (Rp Milliar) Value (IDR Billion)	Nilai (Rp Milliar) Value (IDR Billion)		
Lelang yang diikuti Auctions participated	53.821	41.623	35.690	129,31%	150,80%
Lelang yang dimenangkan Auctions won	11.868	9.000	7.545	131,87%	157,29%
% Lelang yang dimenangkan % Auction won	22,05%	21,62%	21,14%	101,98%	104,3%
Perolehan Kontrak Baru Melalui lelang Acquisition of new contracts through the auction	11.868	9.000	7.545	131,87%	157,29%
Perolehan kontrak baru melalui tanpa lelang Acquisition of new contracts without auction	-	-	-	-	-
Jumlah Kontrak Baru Number of new contracts	11.868	9.000	7.545	131,87%	157,29%
Kontrak Lama Old contract	9.978	9.861	8.791	101,19%	113,49%

Nilai kontrak baru yang diperoleh perseroan selama tahun 2023 sebesar Rp11.87 triliun tercapai 131,87% dari anggaran perusahaan, dan 157,29% dari realisasi tahun 2022. Tercapainya target kontrak baru banyaknya proyek-proyek strategis nasional yang diperoleh dari IKN dan proyek penugasan G-20 di TMII dan Mandalika, serta ada beberapa proyek penunjukan langsung proyek-proyek Bencana Cianjur dan Semeru, serta proyek-proyek investasi Tol Cisumdawu.

Di sepanjang tahun 2023, Abipraya mengerjakan pekerjaan dari sisa perolehan kontrak tahun lalu dan dari kontrak baru pada tahun berjalan (tidak termasuk PPN). Tabel berikut ini memperlihatkan realisasi nilai produksi per segmen tahun 2023 yang dibandingkan anggaran perusahaan serta dengan realisasi tahun 2022. Secara keseluruhan, nilai produksi perseroan di tahun 2023 tercatat senilai Rp9.168,34 juta, naik 33,94% dari realisasi tahun 2022. Ketidaktercapaian produksi tersebut disebabkan karena beberapa proyek kontrak lama khususnya proyek bendungan masih terkendala masalah pembebasan lahan dan desain. Beberapa proyek mengalami

The value of new contracts obtained by the company during 2023 amounted to Rp 11.87 trillion, reaching 131.87% of the company's budget, and 157.29% of the realization in 2022. The achievement of the new contract target was due to the large number of national strategic projects obtained from IKN and the G-20 assignment projects at TMII and Mandalika, as well as several direct appointment projects for the Cianjur and Semeru Disaster projects, as well as the Cisumdawu Toll Road investment projects. Throughout 2023, Abipraya performed work from the remaining contract awards from last year and from new contracts in the current year (excluding VAT). The following table shows the realization of production value per segment in 2023 compared to the company's budget and the realization in 2022. Overall, the company's production value in 2023 was IDR Rp9.168,34 million, up 33,94% from the realization in 2022. The non-achievement of production was due to several old contract projects, especially dam projects, still constrained by land acquisition and design issues. Some projects experienced a shift in the tender schedule, which affected the time

penggeseran jadwal tender sehingga berpengaruh terhadap waktu perolehan kontrak (berpengaruh pada produksi) juga produksi proyek tidak maksimal akibat COVID-19.

of contract acquisition (affecting production) as well as project production was not maximized due to COVID-19.

Kinerja Operasi PerSegmen Usaha

Operating Performance per Business Segment

Uraian Description	2023		2022	Realisasi (%) berada diatas/ dibawah Realization (%) is above/below	
	RKAP	Realisasi (Rp Milliar) Realization (IDR Billion)	Realisasi (Rp Milliar) Realization (IDR Billion)	RKAP 2023	Realisasi 2022 Realization 2022
Pengairan Irrigation	2.751	3.208	3.474	16,63%	(7,64%)
Jalan/Jembatan Road/bridge	1.864	2.947	1.822	60,07%	63,78%
Gedung/Bangunan Building	2.001	2.478	1.034	21,85%	135,90%
Listrik Electricity	58	-	-	-	-
Prasarana Perhubungan (Darat, Laut, & Udara) Transportation infrastructure (land, sea, & air)	197	118	153	(40,10%)	(22,88%)
Lain-lain (Beton, BE, Properti) Others (concrete, BE, property)	773	457	364	(40,80%)	18,62%

Adapun penjelasan kinerja per segmen bisnis Perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Pengairan

Segmen ini terdiri dari bidang usaha jasa konstruksi yang meliputi pembangunan bendungan, bendung, pengaman pantai, irigasi, dan normalisasi sungai. Realisasi kinerja segmen pengairan sebesar Rp3,2 triliun yang berada 16,63% di atas anggaran tahun 2023, dan -7,64% di bawah realisasi tahun lalu. Hal tersebut disebabkan karena beberapa proyek kontrak lama khususnya proyek bendungan masih terkendala masalah pembebasan lahan dan desain.

2. Jalan/Jembatan

Segmen ini terdiri dari bidang usaha jasa konstruksi yang meliputi pembangunan jalan, jalan tol, *fly over*, *underpass*, jalan layang

The explanation of performance per business segment of the Company is as follows:

1. Irrigation

This segment consists of the construction services business, which includes the construction of dams, weirs, coastal protection, irrigation, and river normalization. The performance realization of the irrigation segment amounted to IDR3.2 trillion, which is 16.63% above the 2023 budget, and -7.64% below last year's realization. This is due to several old contract projects, especially dam projects, still constrained by land acquisition and design issues.

2. Road/Bridge

This segment consists of the construction services business, which includes the construction of roads, toll roads, flyovers,

non-toll, dan jembatan. Di tahun 2023, kinerja segmen bisnis jalan/jembatan sudah mencapai target. Realisasi kinerja segmen ini sebesar Rp2,95 triliun yang berada 60,07% diatas anggaran tahun 2023. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya proyek-proyek infrastruktur yang sudah berjalan kembali sepanjang tahun 2023.

3. Gedung/Bangunan

Segmen ini terdiri dari bidang usaha jasa konstruksi yang meliputi bangunan perkantoran, komersil, kesehatan, pendidikan, dan hunian. Di tahun 2021, kinerja segmen bisnis gedung/bangunan tercapai diatas target anggaran. Realisasi kinerja segmen ini sebesar Rp2,48 triliun di tahun 2023. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya proyek pembangunan gedung sepanjang tahun 2023.

4. Listrik

Pada segmen ini, Abipraya menyediakan dan/atau mengerjakan jasa konstruksi pembangunan pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT). Di tahun 2023, kinerja segmen ini belum mencapai target. Realisasi kinerja segmen ini tidak tercapai, hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya proyek pembangkit listrik yang dikerjakan.

5. Lain-lain

Pada segmen lain-lain, Abipraya mengerjakan produksi Precast dan Peralatan, Brantas Energi, dan investasi pada properti. Kinerja segmen bisnis ini di tahun 2023 lebih besar dari realisasi tahun lalu. Realisasi kinerja operasi segmen ini sebesar Rp457,39 miliar atau tercapai 59,19% dari target RKAP 2023. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya proyek-proyek pada tahun 2023.

underpasses, non-toll flyovers, and bridges. In 2023, the performance of the road/bridge business segment has reached its target. The realization of this segment's performance amounted to IDR2.95 trillion, which is 60.07% above the 2023 budget. This is due to the many infrastructure projects that have been running again throughout 2023.

3. Building

This segment consists of construction services businesses, which include office, commercial, health, education, and residential buildings. In 2021, the performance of the building business segment was achieved above the budget target. The realization of this segment's performance amounted to IDR2.48 trillion in 2023. It was due to the large number of building construction projects throughout 2023.

4. Electricity

In this segment, Abipraya provides and / or works on construction services for the construction of New Renewable energy (EBT) power plants. In 2023, the performance of this segment has not reached the target. The realization of this segment's performance was not achieved, this was due to no power plant projects being undertaken.

5. Others

In the others segments, Abipraya works on Precast and Equipment production, Brantas Energi, and property investment. The performance of this business segment in 2023 is greater than last year's realization. The realization of this segment's operating performance amounted to IDR457.39 billion or achieved 59.19% of the 2023 RKAP target. It was due to the large number of projects in 2023.

PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS SEGMENT

Pendapatan dan profitabilitas segmen operasi disajikan dalam table berikut:

SEGMENT REVENUE AND PROFITABILITY

The revenue and profitability of operating segments are presented in the following table:

Segmentasi Segment	Uraian Description	RKAP 2023 RKAP 2023	% Pendapatan % Revenue	Realisasi 2023 Realization 2023	% Pendapatan % Revenue
Gedung dan Bangunan Building	Pendapatan Revenue	2.001,34	100,00%	2.438,25	100,00%
	Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	1.899,36	94,90%	2.328,62	95,50%
	Laba Kotor Gross Profit	135,06	5,10%	109,61	4,50%
Perairan Irrigation	Pendapatan Revenue	2.404,43	100,00%	3.208,45	100,00%
	Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	2.123,35	88,31%	3.023,57	94,24%
	Laba Kotor Gross Profit	281,08	11,69%	184,89	5,76%
Infrastruktur, Jalan, Jembatan, Perhubungan Infrastructure, Roads, Bridges, Transportation	Pendapatan Revenue	2.464,78	100,00%	3.064,25	100,00%
	Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	2.276,88	92,38%	2.786,09	90,92%
	Laba Kotor Gross Profit	187,90	7,62%	279,16	9,08%
Kelistrikan dan lain-lain Electricity and others	Pendapatan Revenue	772,65	100,00%	475,39	100,00%
	Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	651,79	84,36%	266,55	58,28%
	Laba Kotor Gross Profit	120,86	15,64%	190,85	41,72%
Jumlah Total	Pendapatan Revenue	7.643,20	100,00%	9.168,34	100,00%
	Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	6.951,38	90,95%	8.404,84	91,67%
	Laba Kotor Gross Profit	691,82	9,05%	763,50	8,33%

KINERJA KEUANGAN

Financial Performance

Secara keseluruhan kinerja keuangan Perseroan sangat baik, dan seluruhnya diuraikan dalam Laporan Keuangan Audited yang terlampir dilaporan tahunan ini. Kinerja keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo, & Rekan serta mendapat opini wajar dalam semua hal yang material.

The Company overall financial performance is excellent, and all of them are outlined in the Audited Financial Statements attached to this annual report. The financial performance described below refers to the Financial Statements for the years ended December 31, 2023, and 2022. The Financial Statements have been audited by the Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo, & Rekan and received a fair opinion in all material respects.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

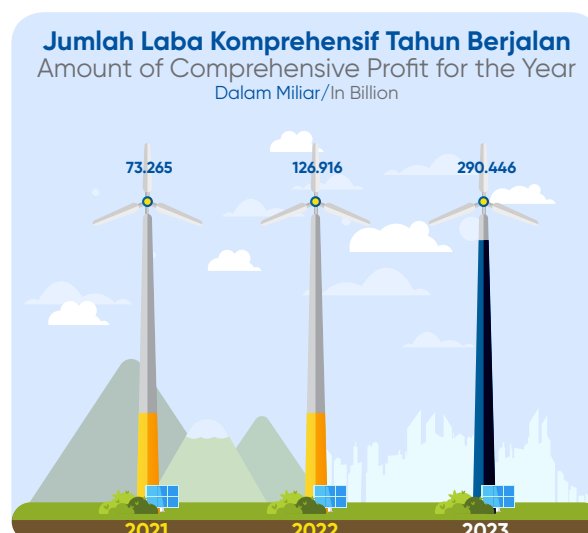
Consolidated Income Statement and Other Comprehensive Income

Uraian Description	2023	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)	
				2023-2022	2022-2021
PENDAPATAN USAHA OPERATING REVENUE	4.864.992	4.012.546	2.663.513	21,24%	50,65%
BEBAN POKOK PENDAPATAN COST OF REVENUE	(4.529.177)	(3.640.561)	(2.500.409)	24,41%	45,60%
LABA KOTOR GROSS PROFIT	335.815	371.985	163.104	-9,72%	128,07%
Bagian laba bersih ventura bersama Shared venture net profit share	322.065	208.305	278.818	54,61%	-25,29%
Beban penjualan Sales Expenses	(1.174)	(1.031)	(604)	13,85%	70,69%
Beban administrasi dan umum Administrative and General Expenses	(232.742)	(209.815)	(158.602)	10,93%	32,29%
Beban keuangan Financial Expenses	(174.409)	(177.678)	(161.168)	-1,84%	10,24%
Pendapatan (beban) lainnya - bersih Other income (expenses) - net	(45.429)	(5.212)	2.947	771,56%	-276,86%
Bagian laba (rugi) bersih entitas asosiasi The share of the net profit (loss) of the associated entity	105.620	42.853	(178)	-146,47%	24207,55%
Pajak penghasilan final Final Income Tax	(99.345)	(90.981)	(63.546)	9,19%	43,17%
LABA SEBELUM PAJAK PROFIT BEFORE TAX	210.401	138.426	60.770	52,00%	127,79%
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH INCOME TAX EXPENSES - NET	(8.500)	(3.046)	(3.033)	179,09%	0,42%
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN NET PROFIT FOR THE YEAR	201.901	135.380	57.737	49,14%	134,48%

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Income Statement and Other Comprehensive Income

Uraian Description	2023	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)	
				2023-2022	2022-2021
PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN: OTHER COMPREHENSIVE REVENUES (EXPENSES)					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada tahun berikutnya: Items that will not be reclassified to profit and loss in the following year					
Keuntungan atas revaluasi aset tetap Advantages of the revaluation of fixed assets	98.166	-	6.217	100,00%	-100,00%
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti Remeasurement of defined reward obligations	(9.621)	(8.465)	9.311	13,66%	190,91%
Jumlah pendapatan komprehensif lain - setelah pajak The amount of other comprehensive income - after tax	88.545	(8.465)	15.528	-1146,08%	-154,51%
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN AMOUNT OF COMPREHENSIVE PROFIT FOR THE YEAR	290.446	126.916	73.265	128,85%	73,23%
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Profit for the year attributable to:					
Pemilik entitas induk Owner of the parent entity	200.486	134.201	56.510	49,39%	137,48%
Kepentingan non pengendali Non-controlling interests	1.415	1.180	1.228	19,92%	-3,89%
Laba bersih tahun berjalan Net profit for the year	201.901	135.380	57.737	49,14%	134,48%
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada: Total comprehensive profit attributable to:					
Pemilik entitas induk Owner of the parent entity	289.025	125.761	72.003	129,82%	74,66%
Kepentingan non pengendali Non-controlling interests	1.422	1.155	1.262	23,04%	-8,48%
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan Total comprehensive profit for the year	290.446	126.916	73.265	128,85%	73,23%



PENDAPATAN USAHA

Pada 2023, pendapatan usaha Perseroan sebesar Rp4,86 triliun, meningkat 21,24% jika dibandingkan dengan pendapatan usaha tahun sebelumnya sebesar Rp4,01 triliun. Pendapatan ini didominasi oleh segmen usaha jasa konstruksi sebesar 92,58% dari total pendapatan. Peningkatan terjadi terutama karena meningkatnya pendapatan dari jasa konstruksi sebesar Rp838,71 miliar.

OPERATING REVENUE

In 2023, the Company's operating revenue amounted to IDR4.86 trillion, an increase of 21.24%, compared to the previous year's operating revenue of IDR4.01 trillion. This revenue was dominated by the construction services business segment, amounting to 92.58% of total revenue. The increase occurred mainly due to revenue from construction services of IDR838.71 billion.

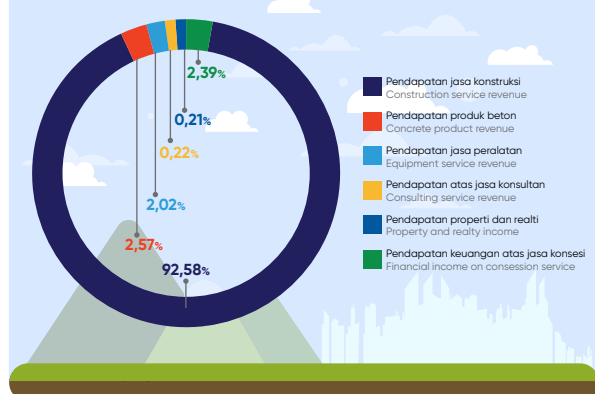
Komposisi Pendapatan Usaha (dalam Jutaan Rupiah)

Composition of Operating Income (in Million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)	
				2023-2022	2022-2021
Pendapatan jasa konstruksi Construction service revenue	4.503.896	3.665.185	2.192.009	22,88%	67,21%
Pendapatan produk beton Concrete product revenue	125.203	37.301	85.121	235,66%	-56,18%
Pendapatan jasa peralatan Equipment service revenue	98.505	145.241	108.285	-32,18%	34,13%
Pendapatan atas jasa konsultan Consulting service revenue	10.710	-	-	100,00%	-
Pendapatan properti dan realti Property and realty income	10.389	26.258	149.268	-60,43%	-82,41%
Pendapatan keuangan atas jasa konsesi Financial income on consession service	116.289	89.493	67.493	29,94%	32,60%
Pendapatan konstruksi atas jasa konsesi Construction revenue on concession service	-	49.069	61.336	-100,00%	-20,00%
Jumlah Total	4.864.992	4.012.546	2.663.513	21,24%	50,65%

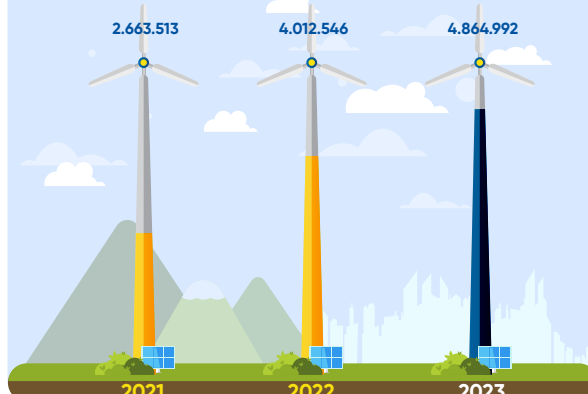
Komposisi Pendapatan Usaha Tahun 2023

Composition of Operating Income in 2023
Persentase/Percentage



Pendapatan Usaha

Operating Revenue
Dalam Miliar/In Billion



BEBAN POKOK PENDAPATAN

Beban pokok pendapatan mengalami peningkatan sebesar 24,41%, dari Rp3,64 triliun di tahun 2022 menjadi Rp4,53 triliun di tahun 2023.

COST OF REVENUE

Cost of revenue increased by 24.41%, from IDR3.64 trillion in 2022 to IDR4.53 trillion in 2023.

Uraian Description	2023	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)	
				2023-2022	2022-2021
Subkontraktor Subcontractor	2.118.924	1.461.597	838.505	44,97%	74,31%
Bahan material Material	1.326.407	1.166.946	753.766	13,66%	54,82%
Peralatan Equipment	403.741	400.467	238.216	0,82%	68,11%
Upah langsung Direct wages	116.236	129.591	123.410	-10,31%	5,01%
Properti dan realti Property and realty	24.192	24.357	135.013	-0,67%	-81,96%
Persiapan dan penyelesaian proyek Project preparation and completion	124.661	83.713	99.946	48,91%	-16,24%
Penyusutan Depreciation	58.672	55.617	32.452	5,49%	71,38%
Beban konstruksi atas jasa konsesi Construction expenses concession services	-	35.830	43.035	-100,00%	-16,74%
Beban umum proyek General expenses of the project					
Pegawai Employee	221.858	175.697	145.451	26,27%	20,80%
Umum & administrasi General and administration	102.138	82.442	56.598	23,89%	45,66%
Kendaraan Vehicle	19.398	14.888	12.048	30,30%	23,57%
Administrasi bank dan keuangan Bank administration and finance	9.957	6.434	14.454	54,76%	-55,48%
Penjualan Sales	2.993	2.983	7.516	0,36%	-60,32%
Jumlah Total	4.529.177	3.640.561	2.500.409	24,41%	45,60%



LABA SEBELUM PAJAK

Pada tahun 2023, laba sebelum pajak Perseroan mengalami peningkatan 35% dari tahun lalu yang tercatat Rp229,41 miliar menjadi Rp309,75 miliar. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan pendapatan usaha.

BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH

Di tahun 2023, Perseroan mencatat jumlah beban pajak penghasilan - bersih sebesar Rp107,85 miliar, naik 14,70% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp94,03 miliar.

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN

Perseroan berhasil membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp201,90 miliar selama tahun 2023, naik 49,14% dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp135,38 miliar. Peningkatan ini dipengaruhi peningkatan pendapatan usaha.

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan dibukukan Perseroan sebesar Rp290,45 miliar selama tahun 2023, naik 128,84% dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp126,92 miliar.

PROFIT BEFORE TAX

In 2023, the Company's profit before tax increased by 35% from last year's IDR229.41 billion to IDR309.75 billion. This increase was in line with the increase in operating income.

INCOME TAX EXPENSE - NET

In 2023, the Company recorded total income tax expense - net of IDR107.85 billion, which increased by 14.70% compared to the previous year of IDR94.03 billion.

NET PROFIT FOR THE YEAR

The Company managed to book a net profit of IDR201.90 billion during 2023, which increased by 49.14% from the previous year, which amounted to IDR135.38 billion. This increase was influenced by an increase in operating income.

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Total comprehensive income for the year amounted to IDR290.45 billion during 2023, which increased by 128.84% from the previous year, which amounted to IDR126.92 billion.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Aset

Total aset pada akhir tahun 2023 sebesar Rp9,28 triliun, naik 16,38% atau senilai Rp1,31 triliun dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp7,97 triliun. Peningkatan ini terjadi seiring dengan meningkatnya aset lancar sebesar 3,74% dan aset tidak lancar sebesar 37,23%.

ASET (dalam jutaan Rupiah)

ASSETS (in Million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)	
				2023-2022	2022-2021
Aset lancar Current Assets					
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	1.512.017	1.476.793	1.382.323	2,39%	6,83%
Piutang usaha - bersih Accounts receivable - net					
Pihak berelasi Related parties	1.209.733	574.752	224.811	110,48%	155,66%
Pihak ketiga Third parties	240.844	330.388	421.255	-27,10%	-21,57%
Piutang retensi - bersih Retention receivables - net					
Pihak berelasi Related parties	251.424	138.792	103.301	81,15%	34,36%
Pihak ketiga Third parties	33.455	45.154	47.915	-25,91%	-5,76%
Tagihan bruto kepada pemberi kerja - bersih Gross bills to the employer - net					
Pihak berelasi Related parties	321.563	757.933	601.151	-57,57%	26,08%
Pihak ketiga Third parties	189.194	170.866	185.228	10,73%	-7,75%
Pekerjaan dalam proses Work in Progress	32.247	65.021	-	-50,40%	100,00%
Piutang lain-lain - bersih Piutang lain-lain - bersih					
Pihak berelasi Related parties	13.807	2.028	1.488	580,98%	36,24%
Pihak ketiga Third parties	24.122	14.088	8.373	71,23%	68,25%
Piutang sewa pembiayaan - bagian jatuh tempo dalam satu tahun - bersih Financing lease receivables - portion due within one year - net	13.491	11.546	8.088	16,85%	42,76%
Aset keuangan dari proyek konsesi - bagian jatuh tempo dalam satu tahun Financial assets of the concession project - portion due within one year	13.455	23.247	2.311	-42,12%	906,07%
Persediaan Supplies	253.907	162.221	200.953	56,52%	-19,27%

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

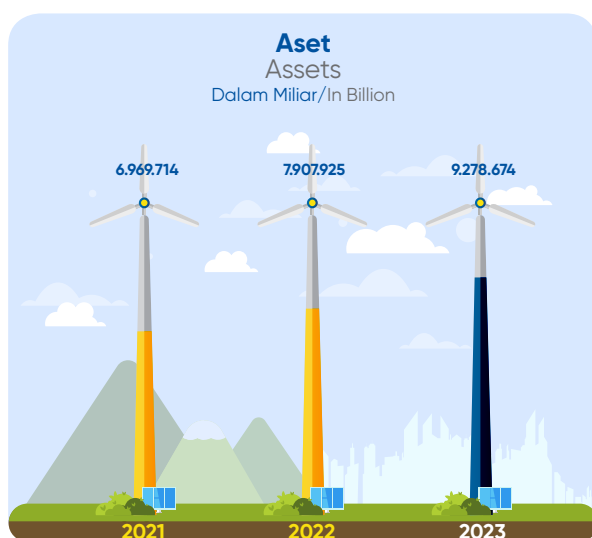
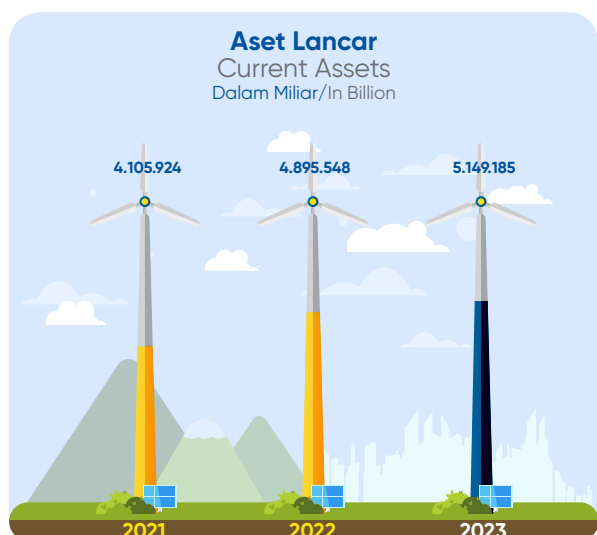
Assets

Total assets at the end of 2023 amounted to IDR9.28 trillion, which increased by 16.38% or IDR1.31 trillion from the previous year, which amounted to IDR7.97 trillion. This increase occurred in line with the increase in current assets by 3.74% and non-current assets by 37.23%.

ASET (dalam jutaan Rupiah)

ASSETS (in Million Rupiah)

Uraian Description	2023	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)	
				2023-2022	2022-2021
Uang muka dari pihak ketiga Advances from third parties	134.248	420.648	134.197	-68,09%	213,45%
Pajak dibayar dimuka Prepaid taxes	288.104	187.303	106.943	53,82%	75,14%
Beban dibayar dimuka Prepaid expenses	199.689	181.084	266.517	10,27%	-32,06%
Jaminan Guarantee	-	70	70	(1)	-
Aset real estate - bagian lancar Real estate assets - current share	417.883	398.634	411.001	4,83%	-3,01%
Jumlah aset lancar Total current assets	5.149.183	4.960.569	4.105.924	5,18%	19,23%
Aset tidak lancar Non-current assets					
Piutang usaha - jangka panjang Accounts receivable - long term	368.012	3.191	-	11434,15%	100,00%
Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun - bersih Financing lease receivables - after deducting the portion of maturity in one year - net	203.222	212.625	221.225	-4,42%	-3,89%
Aset keuangan dari proyek konsesi - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun Financial assets of the concession project - after deducting the portion of maturity in one year	831.691	839.953	524.593	-0,98%	60,12%
Kas yang dibatasi penggunaannya Restricted cash	11.773	11.772	69	-	16991,44%
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama Investment in associate and joint venture entities	974.284	357.600	249.488	172,45%	43,33%
Investasi jangka panjang lainnya Other long-term investments	36.570	17.613	15.988	107,63%	10,16%
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	905	675	463	34,01%	45,83%
Aset tetap - bersih Fixed assets - net	1.566.752	1.440.631	1.695.493	8,75%	-15,03%
Aset real estate - bagian tidak lancar Real estate assets - non-current share	13.601	13.601	13.601	-	-
Aset tidak berwujud Intangible assets	4.515	5.374	5.460	-16,00%	-1,57%
Uang muka proyek IPP IPP projects advances	118.165	109.341	137.408	8,07%	-20,43%
Jumlah aset tidak lancar Total non-current assets	4.129.489	3.012.377	2.863.790	37,08%	5,19%
JUMLAH ASET TOTAL ASSET	9.278.672	7.972.946	6.969.714	17,33%	13,46%



Aset Lancar

Pada tahun 2023, aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar 3,80% atau senilai Rp188,61 miliar dari Rp4.960,60 miliar di tahun 2022 menjadi Rp5.149,18 miliar. Kenaikan ini seiring dengan kenaikan piutang usaha pihak berelasi sebesar 110,48%.

Current Assets

In 2023, the Company's current assets increased by 3.80% or Rp188.61 billion from IDR4,960.60 billion in 2022 to IDR5,149.18 billion. This increase was in line with the increase in accounts receivable from related parties by 110.48%.

Kas dan Setara Kas

Pada tahun 2023, kas dan setara kas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 2,39% dari Rp1,48 triliun di tahun 2022 menjadi Rp1,51 triliun. Kenaikan ini disebabkan peningkatan saldo deposito berjangka.

Cash and Cash Equivalents

In 2023, the Company's cash and cash equivalents increased by 2.39% from IDR1.48 trillion in 2022 to IDR1.51 trillion. This increase was due to an increase in time deposits.

Piutang Usaha

Pada tahun 2023, piutang usaha pihak berelasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar 110,48% dari Rp574,75 miliar di tahun 2022 menjadi Rp1,21 triliun.

Pada tahun 2023, piutang usaha pihak ketiga Perseroan mengalami penurunan sebesar 27,10% dari Rp330,39 miliar di tahun 2022 menjadi Rp240,84 miliar.

Piutang Retensi

Pada tahun 2023, piutang retensi pihak berelasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar 81,15% dari Rp138,79 miliar di tahun 2022 menjadi Rp251,42 miliar.

Pada tahun 2023, piutang retensi pihak ketiga Perseroan mengalami penurunan sebesar 25,91% dari Rp45,15 miliar di tahun 2022 menjadi Rp33,46 miliar.

Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja

Pada tahun 2023, tagihan bruto kepada pemberi kerja pihak berelasi Perseroan mengalami penurunan sebesar 57,57% dari Rp757,93 miliar di tahun 2022 menjadi Rp321,56 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh penagihan atas tagihan pemberi kerja yang mulai lancar setelah pandemi.

Pada tahun 2023, tagihan bruto kepada pemberi kerja pihak ketiga Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp10,73% dari Rp170,87 miliar di tahun 2022 menjadi Rp189,19 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh penagihan atas tagihan pemberi kerja yang mulai lancar setelah pandemi.

Piutang Lain-lain

Pada tahun 2023, piutang lain-lain pihak berelasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar 580,98% dari Rp2,03 miliar di tahun 2022 menjadi Rp13,81 miliar.

Accounts Receivable

In 2023, the Company's accounts receivable from related parties increased by 110,48% from IDR574.75 billion in 2022 to IDR1.21 trillion.

In 2023, the Company's third-party accounts receivable decreased by 27.10% from IDR330.39 billion in 2022 to IDR240.84 billion.

Retention Receivables

In 2023, the Company's related party retention receivables increased by 81.15% from IDR138.79 billion in 2022 to IDR251.42 billion.

In 2023, the Company's third-party retention receivables decreased by 25.91% from IDR45.15 billion in 2022 to IDR33.46 billion.

Gross Bills to the Project Owner

In 2023, gross bills to the related party project owner decreased by 57.57% from IDR757.93 billion in 2022 to IDR321.56 billion. This decrease was due to the collection of project owner bills that began to smoothly after the pandemic.

In 2023, gross bills to the related party project owner increased by 10.73% from IDR170.87 billion in 2022 to IDR189.19 billion. This increase was due to the collection of project owner bills that began to run smoothly after the pandemic.

Other Receivables

In 2023, other receivables from related parties increased by 580.98% from IDR2.03 billion in 2022 to IDR13.81 billion.

Pada tahun 2023, piutang lain-lain pihak ketiga Perseroan mengalami peningkatan sebesar 71,23% dari Rp14,09 miliar di tahun 2022 menjadi Rp24,12 miliar.

Piutang Sewa Pembiayaan

Pada tahun 2023, piutang sewa pembiayaan – bagian jatuh tempo dalam satu tahun – bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar 16,85% dari Rp11,55 miliar di tahun 2022 menjadi Rp13,49 miliar. Kenaikan ini disebabkan peningkatan progress penjualan Listrik di anak perusahaan.

Aset Keuangan dari Proyek Konsesi

Aset keuangan dari proyek konsesi ini terkait dengan pengembalian biaya modal atas pembangkit listrik sebagaimana diatur dalam PPA dengan PLN.

Pada tahun 2023, aset keuangan dari proyek konsesi – bagian jatuh tempo dalam satu tahun – bersih perseroan mengalami penurunan sebesar 42,12% dari Rp23,25 miliar di tahun 2022 menjadi Rp13,46 miliar.

Persediaan

Pada tahun 2023, persediaan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 56,52% dari Rp162,22 miliar di tahun 2022 menjadi Rp253,91 miliar. Peningkatan ini disebabkan peningkatan produksi.

Uang Muka

Pada tahun 2023, uang muka dari pihak ketiga Perseroan mengalami penurunan sebesar 68,09% dari Rp420,65 miliar di tahun 2022 menjadi Rp134,25 miliar. Penurunan ini disebabkan setoran modal investasi.

Pajak Dibayar Dimuka

Pada tahun 2023, pajak dibayar dimuka Perseroan mengalami peningkatan sebesar 53,82% dari Rp187,30 miliar di tahun 2022 menjadi

In 2023, other receivables from third parties increased by 71.23% from IDR14.09 billion in 2022 to IDR24.12 billion.

Financing Lease Receivables

In 2023, the financing lease receivables – portion due within one year – net increased by 16.85% from IDR11.55 billion in 2022 to IDR13.49 billion. This increase was due to the increase in progress of electricity sales in subsidiaries.

Financial Assets of the Concession Projects

Financial assets of the concession projects are related to the return of capital costs on power plants as stipulated in the PPA with PLN.

In 2023, financial assets of the concession projects – portion due within one year – net decreased by 42.12% from IDR23.25 billion in 2022 to IDR13.46 billion.

Inventory

In 2023, the Company's inventory increased by 56.52% from IDR162.22 billion in 2022 to IDR253.91 billion. This increase was due to increased production.

Advances

In 2023, advances from third parties decreased by 68.09% from IDR420.65 billion in 2022 to IDR134.25 billion. This decrease was due to investment capital deposits.

Prepaid Tax

In 2023, the Company's prepaid taxes increased by 53.82% from IDR187.30 billion in 2022 to IDR288.10 billion. This increase was due to an

Rp288,10 miliar. Peningkatan ini disebabkan peningkatan uang muka pajak pertambahan nilai (PPN).

Beban Dibayar Dimuka

Pada tahun 2023, beban dibayar dimuka Perseroan mengalami peningkatan sebesar 10,27% dari Rp181,08 miliar di tahun 2022 menjadi Rp199,69 miliar. Peningkatan ini disebabkan peningkatan pekerjaan persiapan konstruksi.

Jaminan

Pada 2023 jaminan Perseroan mengalami penurunan 100% dari Rp70,30 juta. Jaminan merupakan saldo dana perusahaan yang ditahan oleh sebagai jaminan retensi proyek Bandara Juanda.

Aset Real Estate

Pada tahun 2023, aset real estate Perseroan mengalami peningkatan sebesar 4,83% dari Rp398,63 miliar di tahun 2022 menjadi Rp417,88 miliar. Peningkatan ini disebabkan peningkatan properti hunian berupa bangunan jadi.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar 37,08% dari Rp3,01 triliun di tahun 2022 menjadi Rp4,13 triliun di tahun 2023. Kenaikan ini didukung kenaikan setoran modal pada investasi sebesar 172,45%.

Piutang usaha – jangka panjang

Piutang usaha – jangka panjang pada Perseroan mengalami peningkatan sebesar 11434,15% dari Rp3,19 miliar di tahun 2022 menjadi Rp368,01 miliar di tahun 2023.

Piutang sewa pembiayaan

Piutang sewa pembiayaan – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun – bersih pada Perseroan mengalami penurunan sebesar 4,42% dari Rp212,63 miliar di tahun 2022 menjadi Rp203,22 miliar di tahun 2023.

increase in value added tax (VAT) advances.

Prepaid Expenses

In 2023, the Company's prepaid expenses increased by 10.27% from IDR181.08 billion in 2022 to IDR199.69 billion. This increase was due to an increase in construction preparation work.

Guarantee

In 2023, the Company's guarantee decreased by 100% from IDR70.30 billion. The guarantee represents the balance of the company's funds held by the retention guarantee for the Juanda Airport project.

Real Estate Assets

In 2023, the Company's real estate assets increased by 4.83% from IDR398.63 billion in 2022 to IDR417.88 billion. This increase was due to an increase in residential property in the form of finished buildings.

Non-Current Assets

The Company's non-current assets increased by 37.08% from IDR3.01 trillion in 2022 to IDR4.13 trillion in 2023. This increase was supported by an increase in capital deposits in investments by 172.45%.

Accounts Receivable - long-term

Accounts receivable – long-term in the Company increased by 11434.15% from IDR3.19 billion in 2022 to IDR368.01 billion in 2023.

Financing lease receivables

Financing lease receivables – after deducting the portion of maturity in one year – net of the Company decreased by 4.42% from IDR212.63 billion in 2022 to IDR203.22 billion in 2023.

Aset keuangan dari proyek konsesi

Aset keuangan dari proyek konsesi ini terkait dengan pengembalian biaya modal atas pembangkit listrik sebagaimana diatur dalam PPA dengan PLN.

Aset keuangan dari proyek konsesi – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun pada perseroan mengalami penurunan sebesar 0,98% dari Rp839,95 miliar di tahun 2022 menjadi Rp831,69 miliar di tahun 2023.

Kas yang dibatasi penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya perseroan mengalami peningkatan dari Rp11,772 miliar di tahun 2022 menjadi Rp11,773 miliar di tahun 2023.

Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama Perseroan mengalami peningkatan sebesar 172,45% dari Rp357,60 miliar di tahun 2022 menjadi Rp974,28 miliar di tahun 2023. Kenaikan ini terutama karena peningkatan investasi pada entitas asosiasi yaitu investasi pada PT Citra Karya Jabar Tol untuk pembangunan dan pengusahaan jalan tol.

Investasi Jangka Panjang Lainnya

Investasi jangka panjang lainnya Perseroan mengalami peningkatan sebesar 107,63% dari Rp17,61 miliar di tahun 2022 menjadi Rp36,57 miliar di tahun 2023.

Aset pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 34,01% dari Rp675,43 juta di tahun 2022 menjadi Rp905,12 juta di tahun 2023.

Aset Tetap

Aset tetap – bersih perseroan mengalami peningkatan sebesar 8,75% dari Rp1,44 triliun di tahun 2022 menjadi Rp1,57 triliun di tahun 2023.

Financial assets of the concession projects

Financial assets of the concession projects relate to the recovery of capital costs on power plants as stipulated in the PPA with PLN.

Financial assets of the concession projects – after deducting the portion of maturity in one year decreased by 0.98% from IDR839.95 billion in 2022 to IDR831.69 billion in 2023.

Restricted cash

The company's restricted cash increased from IDR11.772 billion in 2022 to IDR11.773 billion in 2023.

Investment in Associates and Joint Ventures Entities

Investment in associates and joint ventures entities increased by 172.45% from IDR357.60 billion in 2022 to IDR974.28 billion in 2023. This increase was mainly due to an increase in investment in associates, namely investment in PT Citra Karya Jabar Tol for the construction and exploitation of toll roads.

Other Long-Term Investments

The Company's other long-term investments increased by 107.63% from IDR17.61 billion in 2022 to IDR36.57 billion in 2023.

Deferred tax assets

The Company's deferred tax assets increased by 34.01% from IDR675.43 million in 2022 to IDR905.12 million in 2023.

Fixed Assets

The Company's fixed assets – net increased by 8.75% from IDR1.44 trillion in 2022 to IDR1.57 trillion in 2023.

Aset Real Estate

Pada 2023 dan 2022, aset real estate – bagian tidak lancar Perseroan sebesar Rp13,60 miliar, tidak mengalami peningkatan dan penurunan.

Aset tidak Berwujud

Aset tidak berwujud Perseroan mengalami penurunan sebesar 16,00% dari Rp5,37 miliar di tahun 2022 menjadi Rp4,52 miliar di tahun 2023.

Uang Muka Proyek IPP

Uang muka proyek IPP Perseroan mengalami kenaikan sebesar 8,07% dari Rp109,34 miliar di tahun 2022 menjadi Rp118,17 miliar di tahun 2023. Peningkatan ini karena pengembangan PLTM baru.

LIABILITAS

Jumlah liabilitas terdiri atas liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Perseroan mencatat jumlah liabilitas untuk tahun 2023 sebesar Rp7,13 triliun, atau naik 16,61% dari tahun sebelumnya sebesar Rp6,12 triliun. Peningkatan liabilitas seiring dengan peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar 35,83%.

Liabilitas

Liability

Uraian Description	2023	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)	
				2023-2022	2022-2021
Liabilitas jangka pendek Short-term liabilities					
Utang usaha Accounts payable					
Pihak berelasi Related parties	465.463	545.958	924.756	-14,74%	-40,96%
Pihak ketiga Third parties	2.727.080	2.198.047	1.658.188	24,07%	32,56%
Utang lain-lain Other debts					
Pihak berelasi Related parties	11.038	10.495	12.717	5,18%	-17,48%
Pihak ketiga Third parties	492	1.300	1.796	-62,18%	-27,62%
Utang pajak Tax debt	157.129	175.743	102.404	-10,59%	71,62%
Biaya masih harus dibayar Accrued fees	915.190	414.417	310.763	120,84%	33,35%
Uang muka pemberi kerja dan konsumen Project owners and consumers advances	524.118	261.823	168.692	100,18%	55,21%

Real Estate Assets

In 2023 and 2022, real estate assets – non-current portion of the Company amounted to IDR13.60 billion, with no increase or decrease.

Intangible Assets

The Company's intangible assets decreased by 16.00% from IDR5.37 billion in 2022 to IDR4.52 billion in 2023.

IPP Project Advances

The Company's IPP project advances decreased by 8.07% from IDR109.34 billion in 2022 to IDR118.17 billion in 2023. This increase was due to the development of a new PLTM.

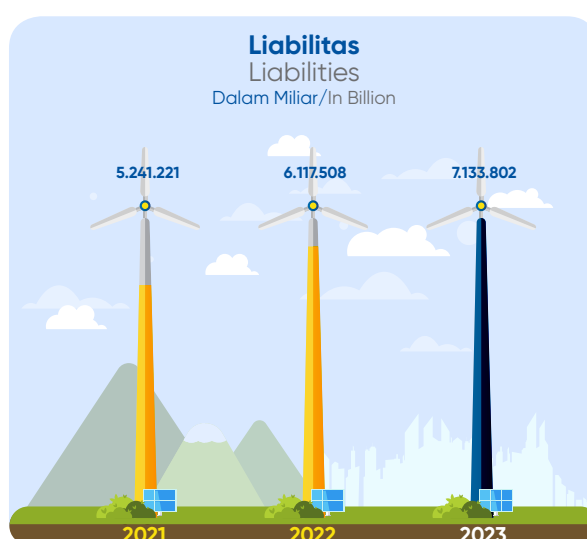
LIABILITIES

Total liabilities consist of short-term liabilities and long-term liabilities. The Company recorded total liabilities for 2023 of IDR7.13 trillion, an increased of 16.61% from the previous year of IDR6.12 trillion. The increase in liabilities is in line with the increase in short-term liabilities by 35.83%.

Liabilitas

Liability

Uraian Description	2023	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)	
				2023-2022	2022-2021
Utang bank jangka pendek Short-term bank debt	-	-	50.000	-	-100,00%
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun: Long-term liabilities mature within one year					
Utang bank Bank debt	17.654	25.756	35.378	-31,48%	-27,20%
Utang lembaga keuangan non bank Non-bank financial institution debt	210.580	68.684	37.479	206,59%	83,26%
Jumlah liabilitas jangka pendek Total short-term liabilities	5.028.743	3.702.223	3.302.174	35,83%	12,11%
Liabilitas jangka panjang Long-term liabilities					
Utang usaha - jangka panjang Accounts payable - long-term	598.334	445.434	-	34,33%	100,00%
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun: Long-term liabilities-after deducting the portion of maturity in one year					
Utang bank Bank debt	939.932	1.207.586	1.074.343	-22,16%	12,40%
Utang lembaga keuangan non bank Non-bank financial institution debt	359.072	508.795	716.083	-29,43%	-28,95%
Uang muka pemberi kerja dan konsumen Project owners and consumers advances	182.196	226.977	125.507	-19,73%	80,85%
Liabilitas imbalan pasca kerja Post-employment benefit liability	18.651	20.738	21.257	-10,06%	-2,44%
Cadangan pemeliharaan Maintenance backup	6.874	5.754	1.859	19,47%	209,56%
Jumlah liabilitas jangka panjang Total long-term liabilities	2.105.059	2.415.284	1.939.047	-12,81%	24,56%
JUMLAH LIABILITAS TOTAL LIABILITIES	7.133.802	6.117.508	5.241.221	16,61%	16,72%



Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek pada tahun 2023 sebesar Rp5,03 triliun, mengalami peningkatan 35,83% dari tahun sebelumnya sebesar Rp3,70 triliun. Kenaikan ini disebabkan kenaikan biaya masih harus dibayar sebesar Rp500,77 miliar serta utang Lembaga keuangan non bank sebesar Rp141.896 miliar.

Utang Usaha

Utang usaha pihak berelasi pada tahun 2023 sebesar Rp465,46 miliar, mengalami penurunan 14,74% dari tahun sebelumnya sebesar Rp545,96 miliar.

Short-term Liabilities

Short-term liabilities in 2023 amounted to IDR5.03 trillion, an increase of 35.83% from the previous year of IDR3.70 trillion. This increase was due to an increase in accrued expenses of IDR500.77 billion and non-bank financial institutions debt of IDR141,896 billion.

Accounts Payable

Accounts payable to related parties in 2023 amounted to IDR465.46 billion, a decrease of 14.74% from the previous year of IDR545.96 billion.

Utang usaha pihak ketiga pada tahun 2023 sebesar Rp2,73 triliun, mengalami peningkatan 24,07% dari tahun sebelumnya sebesar Rp2,20 triliun.

Utang Lain-lain

Utang lain-lain pihak berelasi pada tahun 2023 sebesar Rp11,04 miliar, mengalami peningkatan 5,18% dari tahun sebelumnya sebesar Rp10,50 miliar.

Utang lain-lain pihak ketiga pada tahun 2023 sebesar Rp491,61 juta, mengalami penurunan 62,18% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,30 miliar.

Utang pajak

Utang pajak pada tahun 2023 sebesar Rp157,13 miliar, mengalami penurunan 10,59% dari tahun sebelumnya sebesar Rp175,74 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan menurunnya utang pph pasal 4 ayat 2 Final.

Biaya Masih harus Dibayar

Biaya masih harus dibayar pada tahun 2023 sebesar Rp915,19 miliar, mengalami peningkatan 120,84% dari tahun sebelumnya sebesar Rp414,42 miliar. Kenaikan ini disebabkan peningkatan beban produksi.

Uang Muka Pemberi Kerja dan Konsumen

Uang muka pemberi kerja dan konsumen pada tahun 2023 sebesar Rp524,12 miliar, mengalami peningkatan 100,18% dari tahun sebelumnya sebesar Rp261,82 miliar. Kenaikan ini disebabkan peningkatan uang muka pemberi kerja jasa konstruksi dalam jangka waktu pendek dari perolehan kontrak baru.

Liabilitas Jangka Panjang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

Utang bank yang merupakan liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun pada tahun 2023 sebesar Rp17,65 miliar, mengalami

Third party accounts payable in 2023 amounted to IDR2.73 trillion, an increase of 24.07% from the previous year of IDR2.20 trillion.

Other Debts

Other debts to related parties in 2023 amounted to IDR11.04 billion, an increase of 5.18% from the previous year of IDR10.50 billion.

Other debts to third parties in 2023 amounted to IDR491.61 million, a decrease of 62.18% from the previous year of IDR1.30 billion.

Tax payable

Tax payable in 2023 amounted to IDR157.13 billion, a decrease of 10.59% from the previous year of IDR175.74 billion.

Accrued Expenses

Accrued expenses in 2023 amounted to IDR915.19 billion, an increase of 120.84% from the previous year of IDR414.42 billion. This increase was due to an increase in production expenses.

Project Owners and Consumers Advances

Advances from project owners and consumers in 2023 amounted to IDR524.12 billion, an increase of 100.18% from the previous year of IDR261.82 billion. This increase was due to an increase in advances from project owners of construction services in the short-term from the acquisition of new contracts.

Long-term Liabilities Mature Within One Year

Bank debt which are long-term liabilities Mature within one year in 2023 amounted to IDR17.65 billion, a decrease of 31.48% from the previous

penurunan 31,48% dari tahun sebelumnya Rp25,76 miliar. Penurunan ini disebabkan pelunasan utang pendanaan pada PT Bank Syariah Indonesia dan PT Bank BNI (Persero) Tbk yang telah jatuh tempo.

Utang lembaga keuangan non bank yang merupakan liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun pada tahun 2023 sebesar Rp210,58 miliar, mengalami peningkatan 206,59% dari tahun sebelumnya Rp68,68 miliar. Kenaikan ini disebabkan penambahan utang pendanaan pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Liabilitas jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang pada tahun 2023 sebesar Rp2,11 triliun mengalami penurunan 12,81% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp2,42 triliun. Peningkatan ini disebabkan perubahan utang Lembaga non bank dari jangka Panjang ke jangka pendek sebesar Rp149,72 miliar.

Utang Usaha – Jangka Panjang

Utang usaha – jangka panjang pada tahun 2023 sebesar Rp598,33 miliar, naik 34,33% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp445,43 miliar.

Liabilitas Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun

Utang bank yang merupakan liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun pada tahun 2023 sebesar Rp939,93 miliar, turun 22,16% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp1,21 triliun. Penurunan ini disebabkan turunnya saldo utang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp192,40 miliar dan PT Bank negara indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp226 miliar. Pinjaman ini digunakan untuk fasilitas modal kerja dan fasilitas non-cash lainnya.

Utang lembaga keuangan non bank yang merupakan liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun

year of IDR25.76 billion. This decrease was due to the repayment of funding payables to PT Bank Syariah Indonesia and PT Bank BNI (Persero) Tbk which have matured.

Non-bank financial institutions debt which are long-term liabilities mature within one year in 2023 amounted to IDR210.58 billion, an increase of 206.59% from the previous year of IDR68.68 billion. This increase was due to the addition of funding debt to PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Long-term Liabilities

Long-term liabilities in 2023 amounted to IDR2.11 trillion, a decrease of 12.81% compared to the previous year of IDR2.42 trillion. This increase was due to a change in non-bank institutional debt from long-term to short-term amounting to IDR149.72 billion.

Accounts Payable – Long Term

Accounts payable – long-term in 2022 amounted to IDR598.33 billion, an increase of 34.33% compared to the previous year of IDR445.43 billion.

Long-term Liabilities – After deducting the portion of maturity in one year

Bank debts which are long-term liabilities after deducting the portion of maturity in one year in 2023 amounted to IDR939.93 billion, a decrease of 22.16% compared to the previous year of IDR1.21 trillion. This decrease was due to a decrease in the debt balance of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk by IDR192.40 billion and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk by IDR226 billion. These loans were used for working capital facilities and other non-cash facilities.

Non-bank financial institutions debt which are long-term liabilities after deducting the portion of maturity in one year in 2023 amounted to

pada tahun 2023 sebesar Rp359,07 miliar, turun 29,43% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp508,80 miliar. Penurunan ini disebabkan perubahan utang Lembaga non bank dari jangka Panjang ke jangka pendek sebesar Rp149,72 miliar.

Uang Muka Pemberi Kerja dan Konsumen

Uang muka pemberi kerja dan konsumen pada tahun 2023 sebesar Rp182,20 miliar, turun 19,73% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp226,98 miliar. Penurunan ini disebabkan perubahan uang muka pemberi kerja jangka Panjang ke jangka pendek.

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Liabilitas imbalan pasca kerja pada tahun 2023 sebesar Rp18,65 miliar, turun 10,06% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp20,74 miliar. Penurunan ini disebabkan turunnya liabilitas imbalan pasca kerja untuk program manfaat PHK karyawan (post-retirement benefit).

Cadangan Pemeliharaan

Cadangan pemeliharaan merupakan cadangan pemeliharaan dan rekondisi asset pembangkit listrik pada PLTM Padang Guci 1, PLTS Gorontalo, dan PLTM Sako. Cadangan pemeliharaan pada tahun 2023 sebesar Rp6,87 miliar, naik 19,47% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp5,75 miliar.

EKUITAS

Jumlah ekuitas Perseroan pada tahun 2023 sebesar Rp2,15 triliun, mengalami peningkatan 15,60% dari tahun 2022 sebesar Rp289,43 miliar. Peningkatan ekuitas tersebut antara lain dikontribusikan dari peningkatan saldo laba.

IDR359.07 billion, a decrease of 29.43% compared to the previous year of IDR508.80 billion. This decrease was due to the change in non-bank financial institution debt from long-term to short-term amounting to IDR149.72 billion.

Project Owners and Consumers Advances

Advances from the project owners and consumers in 2023 amounted to IDR182.20 billion, a decrease of 19.73% compared to the previous year of IDR226.98 billion. This decrease was due to the change of long-term to short-term employer advances.

Post-employment Benefit Liabilities

Post-employment benefit liabilities in 2023 amounted to IDR18.65 billion, a decrease of 10.06% compared to the previous year of IDR20.74 billion. This decrease was due to a decrease in post-employment benefit liabilities for employee termination benefit programs (post-retirement benefit).

Maintenance Backup

The maintenance backup represents reserves for maintenance and reconditioning of power plant assets at PLTM Padang Guci 1, PLTS Gorontalo, and PLTM Sako. The maintenance reserve in 2023 amounted to IDR6.87 billion, an increase of 19.47% compared to the previous year of IDR5.75 billion.

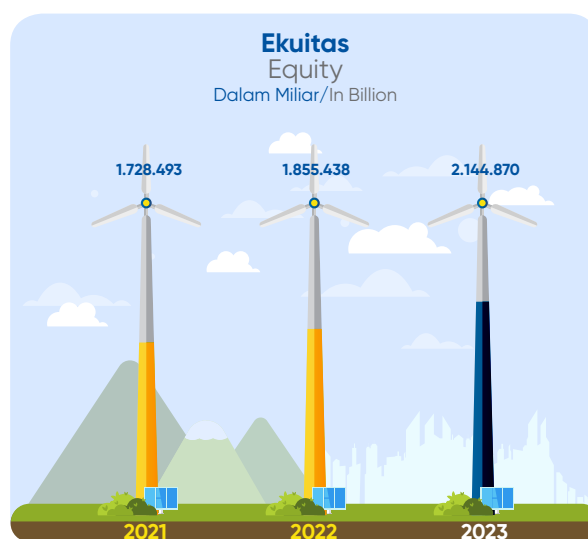
EQUITY

The Company's total equity in 2023 amounted to IDR2.15 trillion, an increase of 15.60% from 2022 of IDR289.43 billion. The increase in equity was contributed by an increase in retained earnings.

Ekuitas

Equity

Uraian Description	2023	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)	
				2023-2022	2022-2021
Modal saham – nilai nominal Rp1.000.000 per saham Share Capital – nominal value IDR 1,000,000 per share					
Modal dasar – 600.000 saham Authorized Capital – 600,000 shares					
Ditempatkan dan disetor penuh 161.555 saham Issued and fully paid up 161,555 shares	161.555	161.555	161.555	-	-
Revaluasi aset tetap Fixed assets revaluation	529.485	431.318	431.318	98.166	0,00%
Rugi komprehensif lain Other comprehensive loss	(46.612)	(36.984)	(28.538)		
Saldo Laba Retained earnings					
Ditentukan penggunaannya Determine for use					
Cadangan untuk pengembangan Perusahaan Reserves for the development of the Company	1.205.059	1.070.858	1.014.330	12,53%	5,57%
Cadangan bertujuan Intended recommendations	32.311	32.311	32.311	-	-
Belum ditentukan penggunaannya Not yet determined	232.198	165.913	88.240	39,95%	88,02%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Equity attributable to owners of parent entities	2.113.996	1.824.971	1.699.217	15,84%	7,40%
Kepentingan non pengendali Non-controlling interests	30.874	30.467	29.277	1,34%	4,07%
JUMLAH EKUITAS TOTAL EQUITY	2.144.870	1.855.438	1.728.493	15,60%	7,34%



LAPORAN ARUS KAS

Arus kas merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang memuat pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan/pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih kas selama satu periode.

Laporan Arus Kas (Rp juta)

Cash Flow Statement (IDR million)

Uraian Description	2023	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)	
				2023-2022	2022-2021
Kas bersih diterima dari (digunakan untuk) aktivitas operasi Net cash received from (used for) operating activities	401.905	380.689	359.729	5,57%	5,83%
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Net cash is obtained from (used for) investing activities	(319.915)	(436.139)	(77.139)	-26,65%	465,40%
Kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan Net cash (used for) obtained from financing activities	(479.68)	163.148	(27.636)	-129,40%	690,35%
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS INCREASE (DECREASE) IN NET CASH AND CASH EQUIVALENTS	34.022	107.697	254.954	-68,41%	-57,76%
DAMPAK SELISIH KURS IMPACT OF EXCHANGE DIFFERENCES	1.202	(13.227)	561	109,09%	-2457,99%
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN CASH AND CASH EQUIVALENTS IN THE BEGINNING OF THE YEAR	1.476.793	1.382.323	1.127.811	6,83%	22,57%
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR	1.512.017	1.476.793	1.383.326	2,39%	6,76%

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Pada tahun 2023, Perseroan mencatat kas bersih yang diterima dari aktivitas operasi sebesar Rp401,91 miliar, meningkat 5,57% dibanding tahun 2022 sebesar Rp380,69 miliar. Faktor utama peningkatan tersebut adalah kenaikan penerimaan dari pelanggan sebesar 9,34%.

CASH FLOW STATEMENT

Cash flow is one of the components of financial statements that contain the effect of cash from operating activities, investment transaction activities, and financing/funding transaction activities, as well as the net increase or decrease in cash during a period.

CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

In 2023, the Company recorded net cash received from operating activities of IDR401.91 billion, an increase of 5.57% compared to IDR380.69 billion in 2022. The main factor was the increase in revenue from customers by 9.34%.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi (Rp Juta)

Cash Flow from Operating Activities (IDR million)

Uraian Description	2023	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)	
				2023-2022	2022-2021
Penerimaan dari pelanggan Reception from customers	4.254.513	3.891.205	2.864.928	9,34%	35,82%
Pembayaran ke pemasok, sub kontraktor, karyawan dan pihak ketiga lainnya Payment to suppliers, subcontractors, employees, and other third parties	(3.631.728)	(3.289.265)	(2.319.364)	10,41%	41,82%
Penerimaan bunga Interest receipts	8.299	6.472	6.097	28,24%	6,15%
Pembayaran pajak Tax payment	(136.400)	(237.644)	(213.632)	-42,60%	11,24%
Pembayaran bunga dan beban keuangan Interest payment and financial expenses	(173.828)	(172.743)	(157.617)	0,63%	9,60%
Penerimaan restitusi pajak Receipt of tax restitution	77.607	136.384	173.662	-43,10%	-21,47%
Penerimaan klaim dan lainnya - bersih Claims and other receipts - net	3.442	46.280	5.655	-92,56%	718,37%
Kas bersih diterima dari aktivitas operasi Net cash received from operating activities	401.905	380.689	359.729	5,57%	5,83%

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi di tahun 2023 sebesar Rp319,92 miliar, menurun 26,65% dibanding tahun 2022 sebesar Rp436,14 miliar. Faktor utama penurunan tersebut karena penurunan penambahan investasi entitas asosiasi sebesar 30,64%.

CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES

Cash flows used for investing activities in 2023 amounted to IDR319,92 billion, a decrease of 26.65% compared to 2022 of IDR436.14 billion. The main factor was due to a decrease in the addition of investment in associates by 30.64%.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Rp Juta)

Cash Flow from Investing Activities (IDR million)

Uraian Description	2023	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)	
				2023-2022	2022-2021
Perolehan aset tetap Acquisition of fixed assets	(100.622)	(110.088)	(2.317)	-8,60%	4650,91%
Pembayaran uang muka proyek IPP Advance payment of IPP projects	(8.824)	(8.844)	(56.238)	-0,23%	-84,27%
Penambahan investasi entitas asosiasi Addition investment of associated entities	(209.330)	(301.800)	(7.490)	-30,64%	3929,43%
Kenaikan investasi jangka panjang Increase in long-term investment	(18.957)	(1.625)	(8.363)	1066,58%	-80,57%
Penambahan aset tidak berwujud Addition of intangible assets	(1.604)	(2.079)	(2.730)	-22,85%	-23,86%
Hasil penjualan aset tetap Proceeds from sale of fixed assets	6.316	-	-	100,00%	-
Penerimaan hibah Receipt of grants	13.107	-	-	100,00%	-
Penempatan pada kas yang dibatasi penggunaannya Placement on cash that is restricted in use	-	-	-	-100,00%	100,00%

Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Rp Juta)

Cash Flow from Investing Activities (IDR million)

Uraian Description	2023	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)	
				2023-2022	2022-2021
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Net cash is obtained from (used for) investment activities	(319.915)	(436.139)	(77.139)	-26,65%	465,40%

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Di tahun 2023, Perseroan mencatat kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan menurun 129,40%, yaitu dari diperolehnya kas bersih sebesar Rp163,15 miliar di tahun 2022 menjadi digunakannya sebesar Rp47,97 miliar. Faktor utama peningkatan ini disebabkan adanya pembayaran pada pinjaman Lembaga keuangan non bank.

CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES

In 2023, the Company recorded net cash used in financing activities decreased by 129.40%, from net cash of IDR163.15 billion in 2022 to IDR47.97 billion. The main factor of this increase was due to payments on loans from non-bank financial institutions.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Cash Flow from Financing Activities

Uraian Description	2023	2022	2021	Pertumbuhan (%) Growth (%)	
				2023-2022	2022-2021
Penerimaan pinjaman bank Receipt of bank loans	155.000	470.000	800.400	-67,02%	-41,28%
Pembayaran pinjaman bank Bank loan repayment	(430.844)	(396.481)	(1.311.461)	8,67%	-69,77%
Penerimaan pinjaman lembaga keuangan non bank Non-bank financial institutions loans acceptance	240.000	119.438	503.228	100,94%	-76,27%
Pembayaran pinjaman lembaga keuangan non bank Payment of loans from non-bank financial institutions	(248.322)	(302.726)	(308.076)	-17,97%	-1,74%
Pendanaan kerjasama operasi Joint operations funding	236.197	272.917	288.273	-13,45%	100,00%
Pembayaran Dividen Dividend Payments	-	-	1.002.950.578	-	-
Kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan Net cash (used for) obtained from financing activities	(47.968)	163.148	(28.639)	-129,40%	690,35%

Rasio Kinerja Keuangan

Financial Performance Ratio

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Tingkat Pengembalian Ekuitas Return on Equity (ROE)	9,41	7,30	4,60	2,75	18,71
Tingkat Pengembalian Aset Return on Asset (ROA)	2,18	1,70	0,83	0,51	4,48

Rasio Kinerja Keuangan

Financial Performance Ratio

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Rasio Kas Cash Ratio	30,07	39,89	41,86	38,91	39,61
Rasio Lancar Current Ratio	102,40	119,68	124,34	134,00	125,90
Total Modal Sendiri terhadap Aset Total Own Capital to Assets	20,94	21,57	23,76	24,20	24,41
Rata-Rata Jangka Waktu Penagihan (hari) Average Collection Period (days)	69,09	58,25	56,38	49,19	60,00
Perputaran Persediaan (kali) Inventory Turnover (times)	26,74	29,91	43,28	67,79	54,73
Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	332,60	329,71	306,61	304,81	246,08
Rasio Hutang Terhadap Aset Debt to Asset Ratio	76,88	76,73	75,41	75,30	71,11

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang jangka panjang maupun jangka pendek diukur melalui beberapa rasio. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya, sedangkan rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan memenuhi seluruh kewajiban termasuk kewajiban jangka panjang perusahaan. Rasio likuiditas yang digunakan oleh Perseroan antara lain rasio kas (*cash ratio*) dan rasio lancar (*current ratio*), sedangkan rasio solvabilitas yang digunakan yaitu rasio jumlah liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*), dan rasio jumlah liabilitas terhadap aset (*debt to total assets ratio*).

SOLVENCY

The ability of a company to pay long-term and short-term debt is measured through several ratios. Liquidity ratios are used to measure the company's ability to pay off its short-term obligations, while solvency ratios are used to measure the ability to fulfill all obligations, including the company's long-term obligations. The liquidity ratios used by the Company include cash ratio and current ratio, while the solvency ratios used are debt to equity ratio and debt to total assets ratio.

Tabel Likuiditas dan Solvabilitas (%)

Liquidity and Solvency Table (%)

Uraian Description	2023	2022	2021
Rasio kas Cash Ratio	30,07	39,89	41,86
Rasio lancar Current Ratio	102,40	119,68	124,34
Rasio liabilitas terhadap aset Total liabilities to assets ratio	76,88	76,73	75,41
Rasio liabilitas terhadap ekuitas Total liabilities to equity ratio	332,60	329,71	306,61

Berdasarkan rasio likuiditas tahun 2023, rasio kas perseroan mengalami penurunan, demikian juga dengan rasio lancar. Perseroan mampu mempertahankan rata-rata rasio likuiditasnya di atas 1,2. Rasio lancar yang menunjukkan nilai di atas 1 kali, berarti bahwa perseroan memiliki kemampuan yang sangat baik untuk membayar utang-utang jangka pendeknya.

Dari rasio solvabilitas tahun 2023, rasio liabilitas terhadap aset sebesar 76,88% atau naik sedikit dari tahun lalu 76,73%. Hal tersebut menunjukkan bahwa total hutang yang dimiliki Perseroan masih dapat ditutup oleh seluruh aset yang dimiliki.

Pada 2023, rasio liabilitas terhadap ekuitas adalah sebesar 332,60%, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 329,71%. Dengan nilai rasio liabilitas terhadap ekuitas tersebut menunjukkan komitmen pemegang saham yang terus berusaha mengakomodir kebutuhan permodalan perseroan melalui proporsi pembiayaan utang dan modal yang optimal.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Kolektibilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menagih piutang (*collection period*). Perputaran piutang pada tahun 2023 yaitu selama 69,09 hari, lebih lambat dari tahun 2022 yang selama 58,25 hari. Hal ini disebabkan oleh pencairan pertumbuhan pendapatan dari tahun 2022. Perputaran persediaan Perseroan pada tahun 2023 yaitu 26,74 hari, lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu selama 29,91 hari. Cepatnya perputaran persediaan terjadi karena adanya peningkatan progress pekerjaan pada tahun 2023.

Tabel Tingkat Kolektibilitas Piutang

Receivables Collectibility Table

Uraian Description	2023	2022	2021
Perputaran piutang Accounts Receivable Turnover	69,09	58,25	56,38
Perputaran persediaan Inventory Turnover	26,74	29,91	43,28
Perputaran aset Asset Turnover	105,54	92,11	85,53

Based on the liquidity ratio in 2023, the company's cash ratio has decreased, as well as the current ratio. The company was able to maintain its average liquidity ratio above 1.2. The current ratio, which shows a value above 1 time, means that the company has a very good ability to pay its short-term debts.

From the solvency ratio in 2023, the ratio of liabilities to assets amounted to 76.88%, up slightly from last year's 76.73%. It shows that the Company's total debt can still be covered by all of its assets.

In 2023, the ratio of liabilities to equity was 332.60%, while in 2022 it was 329.71%. The value of the ratio of liabilities to equity shows the commitment of shareholders who continue to try to accommodate the company's capital needs through an optimal proportion of debt and capital financing.

COLLECTIBILITY RATE OF RECEIVABLES

Collectibility describes the company's ability to collect receivables (*collection period*). Receivables turnover in 2023 was 69.09 days, slower than in 2022, which was 58.25 days. It is due to the disbursement of revenue growth from 2022. The Company's inventory turnover in 2023 was 26.74 days, faster than in 2022, which was 29.91 days. The rapid inventory turnover occurred due to an increase in work progress in 2023.

Rasio perputaran aset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan asset perseroan untuk memperoleh pendapatan. Semakin cepat aset berputar maka semakin besar pendapatan perseroan. Perputaran aset pada tahun 2023 sebesar 105,54% atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 92,11%. Kenaikan tersebut disebabkan pertumbuhan pendapatan pada tahun 2021.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Kebijakan Struktur Modal

Perseroan mengelola modal dengan memastikan struktur modal tetap kuat, guna mendukung kinerja usaha dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Perseroan mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya. Agar dapat menjaga dan menyesuaikan struktur modalnya, salah satu kebijakan Perseroan yaitu menyesuaikan jumlah utang neto. Utang neto merupakan total utang dikurangi dengan kas dan setara kas.

Strategi Perseroan ditahun 2023 mengenai manajemen permodalan masih tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Perseroan melakukan manajemen modal dengan cara mempertahankan rasio utang terhadap modal, yang disesuaikan pada batas bawah dari kisaran 6:53. Rasio utang terhadap modal yang disesuaikan pada tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 2,62 dan 2,50.

RINCIAN STRUKTUR MODAL

Perseroan memiliki komposisi struktur modal 76,88% berasal dari liabilitas dan 23,12% berupa ekuitas di tahun 2023. Komposisi tersebut mengalami perubahan jika dibandingkan dengan 2022. Secara keseluruhan total modal perseroan meningkat sebesar 15,60%.

Asset turnover ratio is a ratio used to measure the ability of the company's assets to generate revenue. The faster the assets rotate, the greater the company's income. Asset turnover in 2023 amounted to 105.54% or increased compared to 2022, which amounted to 92.11%. The increase was due to revenue growth in 2021.

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICIES ON CAPITAL STRUCTURE

Capital Structure Policy

The Company manages its capital by ensuring its capital structure remains strong, to support business performance and maximize shareholder value. The Company manages its capital structure and makes adjustments in response to changes in economic conditions and the characteristics of its business risks. In order to maintain and adjust its capital structure, one of the Company's policies is to adjust the amount of net debt. Net debt is total debt less cash and cash equivalents.

The Company's strategy in 2023 regarding capital management is still not much different from previous years. The Company conducts capital management by maintaining the debt-to-capital ratio, which is adjusted to the lower limit of the 6:53 range. The adjusted debt-to-equity ratio in 2023 and 2022 will be 2.62 and 2.50.

CAPITAL STRUCTURE DETAILS

The Company has a capital structure composition of 76.88% from liabilities and 23.12% from equity in 2023. The composition has changed when compared to 2022. Overall, the company's total capital increased by 15.60%.

Tabel Struktur Modal (Rp juta)

Capital Structure Table (IDR million)

Uraian Description	2023	2022	2021
Jumlah liabilitas Total liabilities	7.133.802	6.117.508	6.117.508
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	1.512.017	1.476.793	1.382.323
Liabilitas bersih Net liability	5.621.785	4.640.714	4.735.185
Jumlah ekuitas Total equity	2.144.870	1.855.438	1.855.438
Rasio utang terhadap modal Debt to equity ratio	2,62	2,50	2,55

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Terdapat Ikatan investasi/kredit yang digunakan oleh Perseroan untuk membiayai investasi pengembangan yaitu sebagai berikut:

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, memberikan fasilitas kredit modal kerja revolving, kredit modal kerja transaksional, serta non cash loan berupa bank garansi, *supplier financing*, SKBDN dengan nilai sebesar Rp6.022 miliar dan *treasury line* dengan nilai sebesar USD 4 juta.
2. PT Bank BNI Syariah memberikan fasilitas pembiayaan murabahah investasi dan fasilitas pembiayaan penjaminan IB Hasanah dengan total nilai fasilitas sebesar Rp500 miliar
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, memberikan fasilitas kredit modal kerja *revolving*, kredit modal kerja transaksional serta *non cash loan* berupa bank garansi, *supplier financing*, SKBDN dengan nilai sebesar RpRp2.825 miliar dan forex line sebesar USD 10 juta.
4. PT Bank Syariah Mandiri, memberikan fasilitas pembiayaan *Islamic Banking Buyer Financing* dan pembiayaan investasi *line* dengan nilai sebesar Rp550 miliar.
5. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia-Indonesia Eximbank, memberikan fasilitas kredit modal kerja ekspor sebesar Rp500 miliar.

MATERIAL BONDING FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

There are investment/credit bonds used by the Company to finance development investments as follows:

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk provides revolving working capital credit facilities, transactional working capital credit, as well as non-cash loans in the form of bank guarantees, *supplier financing*, SKBDN with a value of Rp6,022 billion, and a Treasury line with a value of USD 4 million.
2. PT Bank BNI Syariah provides murabahah investment financing facilities, and IB Hasanah guarantees financing facilities with a total facility value of Rp500 billion.
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk provides revolving working capital credit facilities, transactional working capital credit, and non-cash loans in the form of bank guarantees, *supplier financing*, SKBDN with a value of Rp2,825 billion, and a forex line of USD10 million.
4. PT Bank Syariah Mandiri, provides Islamic Banking Buyer Financing and line investment financing facilities with a value of Rp550 billion.
5. Indonesia Export Financing Institution -- Indonesia Eximbank, provides export working capital credit facilities with amount Rp500 billion.

- | | |
|---|--|
| <p>6. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) memberikan fasilitas pembiayaan modal kerja sebesar Rp300 miliar.</p> <p>7. PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk, memberikan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp100 miliar.</p> <p>8. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, memberikan fasilitas <i>non cash loan</i> berupa <i>supplier financing</i> sebesar Rp200 miliar.</p> | <p>6. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) provides working capital financing facilities amounting to Rp300 billion.</p> <p>7. PT Bank Pembangunan Jawa Barat and Banten Tbk, provides working capital credit facilities amounting to Rp100 billion</p> <p>8. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, provides non-cash loan facilities in the form of supplier financing of Rp200 billion.</p> |
|---|--|

TUJUAN IKATAN

Perseroan dalam memperkuat kegiatan usaha melalui pilar bisnis investasi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan dan pertumbuhan Perseroan kedepan. Kegiatan investasi yang dilakukan saat ini melalui:

1. Pembelian Aset Tetap, yang berupa peralatan konstruksi, *Land Bank* dan Bangunan dan Prasarana Penunjang.
2. Penyertaan modal, yang berupa tambahan penyertaan pada Entitas Anak maupun Entitas Asosiasi yang bertujuan untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan profitabilitas.
3. Pengembangan Usaha modal, yang berupa pengembangan usaha baru yang mendukung strategi Perseroan.

Keikutsertaan Perseroan didalam proyek proyek investasi yang dimasukinya diharapkan juga memberikan sumbangan dalam membantu pencapaian target Pemerintah diantaranya dalam bidang energy terbarukan, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, peningkatan daya saing industri serta mengurangi ketergantungan atas barang import.

SUMBER DANA

Sumber Dana yang digunakan untuk memenuhi investasi berasal dari sumber dana internal maupun eksternal, sumber dana tersebut dapat berupa kas/modal sendiri maupun pinjaman bank/lembaga keuangan lainnya.

PURPOSE OF COMMITMENT

The Company strengthens its business activities through the investment business pillar which is expected to make a major contribution to the Company's future development and growth. Investment activities carried out currently through:

1. Purchase of Fixed Assets, in the form of construction equipment, Land Bank and Supporting Buildings and Infrastructure.
2. Capital investment, in the form of additional investment in subsidiaries and associates aimed at strengthening competitiveness and increasing profitability.
3. Capital Business Development, in the form of new business development that supports the Company's strategy.

The Company's participation in the investment projects it enters is also expected to contribute in helping to achieve the Government's targets including in the field of renewable energy, job creation, technology transfer, increasing industrial competitiveness, and reducing dependence on imported goods.

SOURCE OF FUNDS

Sources of funds used to fulfill investments come from internal and external sources, these sources can be in the form of cash / own capital or bank loans / other financial institutions.

MATA UANG

Transaksi yang dilakukan dalam rangka pengikatan material untuk belanja modal adalah dalam mata uang Rupiah atau dalam mata uang lainnya yang telah disepakati didalam perjanjian.

LANGKAH PERLINDUNGAN RISIKO MATA UANG

Dalam melakukan transaksi investasi, Perseroan dapat menggunakan mata uang Rupiah atau mata uang lainnya yang telah disepakati didalam perjanjian. Apabila Perseroan menggunakan mata uang selain Rupiah, maka terdapat risiko nilai tukar (*currency exposure*), dalam hal ini Perseroan selaku kontraktor memiliki beberapa sumber penerimaan dalam bentuk mata uang asing, apabila memiliki eksposur maka secara natural dapat terpenuhi dari penerimaan mata uang asing (*natural hedge*).

Informasi Penyertaan Saham

Perseroan juga memiliki saham di beberapa proyek yang sedang dikerjakan. Informasi penyertaan saham Perseroan, antara lain pada proyek:

Nama Proyek Project Name	Mitra Usaha Business Partner	Kepemilikan Saham Shareholding	Bidang Usaha Business lines
Tol Cisumdawu Cisumdawu Toll Road	PT Citra Marga Nushapala Persada Tbk, PT Waskita Toll Road, PT Jasa Sarana	29,79%	Jalan Tol Toll Road
Tol Probolinggo- Banyuwangi Probolinggo- Banyuwangi Toll Road	PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita Toll Road	5,00%	Jalan Tol Toll Road
Tol Jogja-Bawen Jogja-Bawen Toll Road	PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk	2,86%	Jalan Tol Toll Road
Jalintim Sumsel Jalintim Sumsel	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	40,00%	Jalan Non Tol Non-toll Road
Perusahaan Beton IKN IKN Concrete Company	PT Utama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, PT Nindya Karya (Persero)	14,71%	Industri Readymix dan Material Readymix and Material Industry

CURRENCY

Transactions carried out in the framework of material binding for capital expenditure are in Rupiah or in other currencies that have been agreed upon in the agreement.

HEDGING VALUE

In conducting investment transactions, the Company may use Rupiah or other currencies agreed in the agreement. If the Company uses a currency other than Rupiah, there is a currency risk (*currency exposure*), in this case, the Company as a contractor has several sources of revenue in the form of foreign currency, if it has exposure, it can naturally be fulfilled from foreign currency revenue (*natural hedge*).

Share Participation Information

The Company also has shares in several projects that are being worked on. Information on the Company's investment in shares, among others in the project:

INVESTASI BARANG MODAL

Tujuan Pembiayaan

Perusahaan membutuhkan pembiayaan untuk berinvestasi di bidang sarana, prasarana maupun berinvestasi barang modal dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Di dalam kegiatan investasi barang modal pada tahun 2023, Perusahaan menggunakan modal sendiri dan pembiayaan perbankan maupun lembaga keuangan nonbank.

SUMBER DANA DAN DENOMINASI MATA UANG

Sumber dana yang digunakan untuk memenuhi kegiatan investasi di atas berasal dari sumber internal maupun eksternal Perusahaan. Secara historis Perusahaan memiliki tingkat leverage yang baik. Di tahun 2023, Perusahaan mengalokasikan belanja modal yang disesuaikan dengan rencana bisnis perusahaan.

Mitigasi Risiko dari Mata Uang Asing

Perusahaan tidak melakukan perikatan kontrak forward pembelian valuta asing, dikarenakan realisasi investasi barang modal di tahun 2023 menggunakan mata uang rupiah, sehingga Perseroan tidak memiliki risiko terkait nilai tukar mata uang asing.

Sepanjang tahun 2023, Perseroan telah melakukan beberapa investasi barang modal. Sumber dana untuk merealisasikan investasi barang modal berasal dari dana intern, *financing* (kredit dan leasing), dan ekuitas. Realisasi investasi barang modal di tahun 2023 menggunakan mata uang rupiah, sehingga Perseroan tidak memiliki risiko terkait nilai tukar mata uang asing.

CAPITAL EXPENDITURE INVESTMENT

Purpose of Financing

The Company needs financing to invest in facilities, infrastructure and invest in capital goods to achieve the predetermined performance targets.

In investing in capital goods in 2023, the Company uses its capital and financing from banks and non-bank financial institutions.

SOURCE OF FUNDS AND CURRENCY DENOMINATION

The source of funds used to fulfill the above investment activities comes from internal and external sources of the Company. Historically, the Company has a good level of leverage. In 2023, the Company allocates capital expenditures that are adjusted to the company's business plan.

Risk Mitigation from Foreign Currency

The Company does not enter into forward contracts for the purchase of foreign currencies, because the realization of investment in capital goods in 2023 uses rupiah currency, so the Company does not have risks related to foreign exchange rates.

Throughout 2023, the Company has made several investments in capital goods. The source of funds to realize the investment in capital goods came from internal funds, financing (credit and leasing), and equity. The realization of investment in capital goods in 2023 uses rupiah currency, so the Company has no risk related to foreign exchange rates.

Realisasi Investasi Barang Modal (Dalam Jutaan Rupiah)

Realization of Capital Expenditure Investment (in IDR Million)

Uraian Description	Nilai Realisasi 2023 Realization Value 2023
Investasi Rutin Regular Investment	
Peralatan Kantor Office Equipment	229,55
Peralatan IT IT Equipment	1.603,85
Bangunan dan Prasarana Building and Infrastructure	7.232,04
Investasi Non Rutin Non-Reguler Investment	
Jalan Tol dan Non Tol Toll and Non-Toll Road	
PT Citra Karya Jabar Tol	184.484,40
PT Jasamarga Jogja Bawen	5.257,00
PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	1.200,00
PT Jalintin Adhi Abipraya	39.146,00
Pengembangan Bisnis Lainnya Other Business Development	
Pengembangan Bisnis Brantas Energi Brantas Energy Business Development	17.227,00
Investasi SPV Perusahaan Beton IKN IKN Concrete Company SPV Investment	12.500,00
Jumlah Total	268.879,85

PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI DAN PROYEKSI

Di tahun 2023, Abipraya mencatat realisasi laba bersih tahun berjalan sebesar Rp201,90 miliar atau lebih tinggi dari target tahun 2023 sebesar Rp165 miliar. Perseroan berhasil mencapai target 122,42% seiring dengan tercapainya pendapatan usaha.

Dengan pencapaian tahun 2023, maka Perseroan menargetkan laba bersih tahun berjalan tahun 2024 sebesar Rp218,53 miliar.

COMPARISON BETWEEN TARGET, REALIZATION, AND PROJECTION

In 2023, Abipraya recorded a realized net profit for the year of IDR201.90 billion, or higher than the 2023 target of IDR165 billion. The Company managed to achieve the target of 122.42% along with the achievement of operating income.

With the achievement in 2023, the Company targets a net profit for the year 2024 of IDR218.53 billion.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2023 (Dalam Miliaran Rupiah)

Comparison between target and Realization In 2023 (In IDR Million)

Uraian Description	RKAP 2023	Realisasi 2023 Realization 2023	Pencapaian (%) Achievement (%)	RKAP 2024
Pendapatan usaha Operating Revenue	7.643	4.865	63,65	9.800,00
Beban pokok pendapatan Cost of Revenue	(6.951)	(4.529)	65,16	(8.959,15)
Laba kotor Gross Profit	692	336	48,55	840,85

Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2023 (Dalam Miliaran Rupiah)

Comparison between target and Realization In 2023 (In IDR Million)

Uraian Description	RKAP 2023	Realisasi 2023 Realization 2023	Pencapaian (%) Achievement (%)	RKAP 2024
Jumlah beban usaha Total Operating Expenses	(236)	(234)	99,15	(281,13)
Laba sebelum pajak dan beban keuangan Profit before Tax and Financial Expenses	456	379	83,11	559,73
Beban keuangan Financial Expenses	(186)	(174)	93,55	(284,05)
Laba sebelum pajak penghasilan Profit before Income Tax	270	210	77,78	315,80
Beban pajak penghasilan Income Tax Expenses	(105)	(9)	8,57	(97,27)
Laba bersih tahun berjalan Net Profit for the Year	165	202	122,42	218,53

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI POSISI KEUANGAN

Dalam mendukung kegiatan usaha, Perseroan memantau posisi aset, liabilitas, dan ekuitas. Perseroan menjaga realisasi akun-akun posisi keuangan di tahun 2023 tidak jauh dari target yang telah ditetapkan di awal tahun. Jumlah aset tahun 2023 sebesar Rp9,28 triliun, lebih tinggi dari rencana RKAP sebesar Rp8,82 triliun atau mencapai sebesar 105,25%.

COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION OF FINANCIAL POSITION

In supporting its business activities, the Company monitors its assets, liabilities, and equity position. The Company maintained the realization of financial position accounts in 2023 not far from the target set at the beginning of the year. Total assets in 2023 amounted to IDR9.28 trillion, higher than the RKAP plan of IDR8.82 trillion or reached 105.25%.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2023 (Dalam Miliaran Rupiah)

Comparison between Target and Realization in 2023 (in IDR Million)

Uraian Description	RKAP 2023	Realisasi 2023 Realization 2023	Pencapaian (%) Achievement (%)	RKAP 2024
Aset lancar Current assets	4.573	5.149	112,60	5.484,93
Aset tidak lancar Non-current assets	4.244	4.129	97,29	4.290,94
Jumlah aset Total assets	8.816	9.279	105,25	9.775,87
Liabilitas jangka pendek Short-term liabilities	4.541	5.029	110,75	5.741,45
Liabilitas jangka panjang Long-term liabilities	2.068	2.105	101,79	1.854,64
Jumlah liabilitas Total liabilities	6.609	7.134	107,94	7.326,09
Ekuitas Equity	2.208	2.145	97,15	2.449,79

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Selama tahun 2023, Perseroan tidak memiliki informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

INFORMASI PENINGKATAN ATAU PENURUNAN YANG MATERIAL DARI PENJUALAN ATAU PENDAPATAN

Pada tahun 2023, terdapat peningkatan yang material atas peningkatan pendapatan dari jasa konstruksi secara signifikan sebesar Rp838,71 miliar.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENDAPATAN

Pada tahun 2023, Perseroan tidak mengalami dampak perubahan harga.

PROSPEK USAHA DAN PENGEMBANGAN BISNIS

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2023 sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang dapat mencapai 5,3%, ekonomi Indonesia di Tahun 2023 tumbuh sebesar 5,1%.

Beberapa kondisi makro ekonomi tahun 2023 yang menjadi highlight adalah inflasi yang diprediksi mencapai 3,1% atau lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 5,51%. Nilai tukar Rupiah secara rata-rata mencapai Rp15.255 per dolar Amerika Serikat (AS) atau di atas asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu Rp14.800 per dolar AS, *lifting* minyak mencapai 614 ribu barel per hari dari yang ditargetkan 660 ribu barel per hari, dan *lifting* gas mencapai 985 ribu barel per hari dari yang ditargetkan 1.050 ribu barel per hari. Walaupun belum sesuai dengan asumsi dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun

MATERIAL INFORMATION AND FACTS THAT OCCURRED AFTER THE DATE OF THE ACCOUNTANT'S REPORT

During 2023, the Company has no material information and facts that occurred after the date of the accountant's report.

INFORMATION ON A MATERIAL INCREASE OR DECREASE IN SALES OR REVENUE

In 2023, there was a material increase in revenue from construction services significantly amounting to IDR838.71 billion.

IMPACT OF PRICE CHANGES ON REVENUE

In 2023, the Company did not experience the impact of price changes.

BUSINESS PROSPECTS AND BUSINESS DEVELOPMENT

Indonesia's economic growth in 2023 slightly decreased compared to 2022, which could reach 5.3%, Indonesia's economy in 2023 grew by 5.1%.

One of the macroeconomic conditions in 2023 that are highlighted is inflation, which is predicted to reach 3.1% or better than in 2022, which reached 5.51%. The average Rupiah exchange rate reached IDR15,255 per US dollar or above the macro assumption in the State Budget (APBN) of IDR14,800 per US dollar, oil lifting reached 614 thousand barrels per day from the targeted 660 thousand barrels per day, and gas lifting reached 985 thousand barrels per day from the targeted 1,050 thousand barrels per day. Although not yet in line with the assumptions in the 2023 State Budget (APBN), Indonesia's economy is included in the economies of countries that are in better condition compared to other countries.

2023, ekonomi Indonesia termasuk dalam perekonomian negara-negara yang lebih baik kondisinya dibandingkan dengan negara lain.

Kondisi pasar konstruksi mencatat adanya pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam RAPBN 2024, sektor Infrastruktur tumbuh 5,78% atau menjadi Rp422,7 triliun, sedangkan data dari Konsultan BCI Asia menunjukkan bahwa pasar konstruksi Indonesia juga tumbuh 4,68% dari tahun 2023 atau menjadi Rp 349,2 triliun.

Sejalan dengan data yang dirilis BPS, pasar konstruksi nasional juga mencatat gairah yang cukup menjanjikan. Pasar konstruksi di tahun 2023 mencatat kinerja sebesar Rp435 triliun, meningkat hingga 55% dari tahun sebelumnya dengan nilai sebesar Rp281 triliun. Dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, sektor infrastruktur dianggarkan sebesar Rp392 triliun, meningkat 7,8% dari tahun sebelumnya dengan anggaran sebesar Rp363 triliun. IKN sebagai mega proyek yang diharapkan mampu mendorong sektor konstruksi juga mengalami peningkatan yang cukup eksponensial, dari sebelumnya dengan anggaran sebesar Rp5,5 triliun di tahun 2022 menjadi Rp29,4 triliun di tahun 2023.

Secara umum, perkembangan lapangan usaha konstruksi dan komponen pengeluaran PMTB yang dirilis BPS tersebut terutama dipengaruhi kebijakan Pemerintah Indonesia dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan, termasuk dengan target *net zero emission* yang dicanangkan dapat tercapai pada tahun 2060. Pengembangan pemukiman dan perumahan, waduk dan irigasi serta infrastruktur air bersih, industri pengolahan dan kawasan industri, konektivitas antar daerah melalui infrastruktur

Construction market conditions recorded growth compared to the previous year. In the 2024 Draft State Budget, the Infrastructure sector grew by 5.78% or to IDR422.7 trillion, while data from BCI Asia Consultants shows that Indonesia's construction market also grew by 4.68% from 2023 or to IDR349.2 trillion.

In line with the data released by BPS, the national construction market also recorded a promising passion. The construction market in 2023 recorded a performance of Rp435 trillion, an increase of 55% from the previous year with a value of Rp281 trillion. In terms of the State Budget (APBN) in 2023, the infrastructure sector is budgeted at IDR392 trillion, an increase of 7.8% from the previous year with a budget of IDR363 trillion. IKN as a mega project that is expected to encourage the construction sector has also experienced a fairly exponential increase, from the previous budget of IDR5.5 trillion in 2022 to IDR29.4 trillion in 2023.

In general, the development of the construction business field and the expenditure component of PMTB released by BPS is mainly influenced by the Government of Indonesia's policy in sustainable national development, including the net zero emission target that is set to be achieved by 2060. The development of settlements and housing, reservoirs and irrigation and clean water infrastructure, processing industries and industrial estates, inter-regional connectivity through land, air, and sea infrastructure, the

darat, udara dan laut, pembentukan ekosistem kelautan, transformasi digital melalui infrastruktur teknologi informasi, infrastruktur energi khususnya berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT), hingga mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

ASPEK PEMASARAN

Pangsa Pasar

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penyetaraan subklasifikasi sertifikat badan usaha KBli 2015 ke KBli 2020, yaitu:

1. Pekerjaan Konstruksi bersifat general (umum);
2. Pekerjaan Konstruksi bersifat spesialis; dan
3. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur mengenai penyederhanaan perizinan Berusaha Melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis perizinan berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Perizinan berusaha dan pengawasan merupakan instrumen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan perizinan berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis perizinan berusaha di dalam sistem perizinan berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan.

establishment of marine ecosystems, digital transformation through information technology infrastructure, energy infrastructure, especially based on New Renewable Energy (EBT), to the Capital City of the Nusantara (IKN) mega project in East Kalimantan.

MARKETING ASPECTS

Market Share

Based on government regulation number 5 of 2021 concerning the implementation of Risk-Based Business licensing, the equalization of KBli 2015 to KBli 2020 business entity certificate sub-classifications, namely:

1. Construction work is general;
2. Construction work is specialized; and
3. Integrated construction work.

Law number 11 of 2020 concerning Job Creation, hereinafter referred to as the Job Creation Law, regulates the simplification of business license through the implementation of risk-based business license, which is a standard method based on the risk level of a business activity in determining the type of business license and the quality/frequency of supervision. Business license and supervision are instruments of the central government and local governments in controlling business activity. The implementation of a risk-based approach requires a change in mindset (*change management*) and adjustments to the work procedures for organizing business license services (*business process re-engineering*) and requires a re-design of the business license business process in the electronic business licensing system. Through the application of this concept, the implementation of business license issuance can be more effective and simpler because not all business activities are required to have a license, in addition, through the application of this concept, supervision activities become more structured both from the period and substance that must be supervised.

Risiko yang menjadi dasar perizinan berusaha diklasifikasikan menjadi risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan usaha risiko rendah, pelaku usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB. Untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah, pelaku usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha risiko menengah tinggi, pelaku usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha risiko tinggi, pelaku usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan izin yang telah diverifikasi.

Perseroan memahami bahwa persaingan dalam penjualan di industri konstruksi di Indonesia sangatlah ketat. Namun dengan keahlian dan pengalaman yang telah dimilikinya, perseroan yakin memiliki posisi kuat dalam persaingan karena didukung dengan *cost structure* yang sangat kompetitif, tenaga kerja yang ahli, serta pengalaman khusus yang dimiliki perseroan dalam beberapa jenis proyek tertentu. Selain itu, perseroan merupakan *market leader* dalam jasa konstruksi untuk proyek-proyek bendungan. Kinerja perseroan mampu bersaing dengan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam industri yang sama, dan saat ini perseroan berada di kelompok 6 besar.

Strategi Pemasaran

Pemasaran dilakukan secara desentralisasi sesuai dengan kewenangan masing-masing divisi dan unit usaha. Di bidang jasa konstruksi, kegiatan pemasaran baru dapat terlaksana apabila pengguna jasa telah menaruh kepercayaan kepada pelaksana. Hal tersebut berkaitan dengan jasa konstruksi yang menawarkan sesuatu yang belum berwujud dengan suatu harga, kualitas, dan waktu penyerahan yang telah ditentukan.

Proses perolehan informasi pasar harus dapat diperoleh sedini mungkin, dengan melakukan

The risks that are the basis for Business license are classified into low, medium low, medium high, and high risks. For low-risk business activities, business actors are only required to have NIB. For medium low risk business activities, business actors are required to have NIB and a statement of fulfilment of the Standard Certificate. For medium high risk business activities, business actors are required to have NIB and a verified Standard Certificate. As for high-risk business activities, business actors are required to have NIB and a verified license.

The Company understands that competition in sales in the construction industry in Indonesia is very tight. However, with its expertise and experience, the Company believes it has a strong position in the competition because it is supported by a very competitive cost structure, skilled workforce, and specialized experience in certain types of projects. In addition, the company is a market leader in construction services for dam projects. The company's performance can compete with state-owned enterprises in the same industry, and currently the company is in the top 6.

Marketing Strategy

Marketing is carried out in a decentralized manner according to the authority of each division and business unit. In the field of construction services, marketing activities can only be carried out if service users have put their trust in the implementer. It relates to construction services that offer something that is not yet tangible at a predetermined price, quality, and delivery time.

The process of obtaining market information must be obtained as early as possible, by conducting

inteligensi marketing untuk memperoleh info pasar baru yang akan tayang pada setiap tahunnya. Melakukan evaluasi terhadap informasi pasar yang diperoleh dan menetapkan target pasar yang akan ditindaklanjuti. Kemudian melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap progress pasar yang masuk dalam target perusahaan.

Proses produksi dalam bentuk pengerjaan proyek dilaksanakan di tempat pengguna jasa berdasarkan kontrak yang disepakati bersama. Perseroan melakukan pemasaran secara konsisten dengan program peningkatan kepuasan pemberi kerja (*klien*) dari tahun ke tahun. Prinsip saling menguntungkan menjadi salah satu dasar Perseroan dalam upayanya untuk memberikan alternatif solusi kepada pelanggan.

Di sisi lain, Perseroan memanfaatkan kemajuan teknologi sistem informasi dalam aspek pemasaran. Perseroan memiliki system informasi yang tangguh yang memungkinkan pengambilan keputusan secara tepat dan cepat, sehingga kesempatan dalam memperoleh berbagai jenis pekerjaan atau proyek yang menguntungkan dapat dilakukan secara terintegrasi pada tingkat operasional.

Berbagai informasi pasar dari berbagai sumber daya (departemen/instansi, konsultan, hubungan individual, dan lain-lain) dikelola secara optimal oleh Perseroan. Hal tersebut dilakukan agar proses tender dapat dilakukan secara terintegrasi dalam memperoleh berbagai jenis pekerjaan atau proyek yang saling menguntungkan.

Selain itu, guna mengintensifkan usaha pemasaran, Perseroan melakukan pemasaran untuk mendapatkan proyek-proyek dari pelanggan baru dan pelanggan yang sudah ada. Namun demikian, tingkat margin untuk pasar pelanggan baru memiliki tingkat margin yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan

marketing intelligence to obtain new market info that will air every year. Evaluate the market information obtained and determine the target market to be followed up. Then conduct regular evaluation and monitoring of the progress of the market that is included in the company's target.

The production process in the form of project work is carried out at the service user's place based on a mutually agreed contract. The Company conducts marketing consistently with a program to increase employer (client) satisfaction from year to year. The principle of mutual benefit is one of the Company's foundations in its efforts to provide alternative solutions to customers.

On the other hand, the Company utilizes advances in information system technology in the marketing aspect. The Company has a robust information system that enables precise and quick decision-making so that opportunities to obtain various types of profitable work or projects can be integrated at the operational level.

Various market information from various resources (departments/agencies, consultants, individual relations, etc.) are optimally managed by the Company. It is done so that the tender process can be carried out in an integrated manner to obtain various types of mutually beneficial work or projects.

In addition, to intensify marketing efforts, the Company conducts marketing to obtain projects from new and existing customers. However, the margin rate for the new customer market has a relatively lower margin rate compared to the market from existing customers. The Company maintains good relations with existing customers,

pasar dari pelanggan yang sudah ada. Perseroan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan *existing*, untuk mendapatkan proyek berupa pekerjaan tambah, *repeat order*, yang dilakukan melalui pemilihan maupun penunjukkan langsung tanpa melalui proses tender. Jika perolehan proyek dari pelanggan *existing* dilakukan melalui penunjukan langsung, hal tersebut lebih menguntungkan karena *margin* relatif lebih tinggi.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan Dividen Abipraya diatur berdasarkan Anggaran Dasar tentang Penggunaan Laba yaitu sebagai berikut:

1. Pembagian dividen diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham,
2. Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif,
3. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu,
4. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi,
5. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan,
6. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan,
7. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris,

to obtain projects in the form of additional work, and repeat orders, which are carried out through direct selection or appointment without going through a tender process. If the acquisition of projects from existing customers is done through direct appointment, it is more profitable because the margin is relatively higher.

DIVIDEND POLICY

Abipraya's Dividend Policy is regulated based on the Articles of Association regarding the Use of Profit, as follows:

1. Dividend distribution is decided by the General Meeting of Shareholders,
2. Dividends may only be distributed if the Company has a positive profit balance,
3. Dividends that are not taken within 5 (five) years after being provided to be paid are included in a reserve fund specifically designated for that purpose,
4. Dividends in the special reserve fund can be taken by the entitled Shareholders by submitting proof of their rights to the dividends which can be received by the Board of Directors of the Company on the condition that the collection is not in one go and by paying administrative costs set by the Board of Directors,
5. Dividends that have been included in the special reserve and not taken within 10 (ten) years will become the rights of the Company,
6. The Company may distribute interim dividends before the end of the Company's financial year if requested by Shareholders representing at least 1/10 (one-tenth) of the issued shares, taking into account the projected profit and the Company's financial capacity,
7. The distribution of interim dividends shall be determined by resolution of the Board of Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners,

8. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN ATAU MANAJEMEN

Sampai dengan tahun 2023, seluruh saham dimiliki oleh Negara, tidak ada kepemilikan saham oleh karyawan dan manajemen perusahaan. Dengan demikian, Abipraya tidak melaporkan informasi terkait ESOP (*Employee Stock Option Program*) dan MSOP (*Management Stock Option Program*) baik jumlah saham dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak maupun harga *exercise*.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Abipraya merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah. Di tahun 2023, Perseroan tidak melakukan kegiatan penawaran umum di Bursa Efek manapun.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI UTANG/ MODAL

Pada tahun 2023, Perseroan tidak melakukan kegiatan investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, dan restrukturisasi utang/modal.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Kewajaran Transaksi

Seluruh transaksi dengan Pihak Berelasi di tahun 2023 dan 2022 merupakan transaksi yang wajar yang tercerminkan dari persentase Aset, Liabilitas dan Pendapatan Usaha terkait transaksi dengan

8. The Board of Directors and the Board of Commissioners shall be jointly and severally liable for the Company's losses, if the Shareholders are unable to return the interim dividends.

EMPLOYEE OR MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM

Until 2023, all shares are owned by the State, there is no share ownership by employees and management of the company. Thus, Abipraya does not report information related to ESOP (*Employee Stock Option Program*) and MSOP (*Management Stock Option Program*) both the number of shares and their realization, period, requirements of employees and/or management who are entitled, and the exercise price.

REALIZATION OF THE USE OF PROCEEDS FROM THE PUBLIC OFFERING

Abipraya is a company owned by the Government. In 2023, the Company did not conduct public offering activities on any stock exchange.

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENTS, EXPANSIONS, DIVESTMENT, ACQUISITIONS, AND DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

In 2023, the Company did not conduct any investment, expansion, divestment, acquisition, and debt/capital restructuring activities.

MATERIAL TRANSACTIONS INFORMATION THAT CONTAINS CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

Transaction Fairness

All transactions with Related Parties in 2023 and 2022 are reasonable transactions as reflected in the percentage of Assets, Liabilities, and Operating Revenues related to transactions



pihak Berelasi bila dibandingkan dengan jumlah keseluruhannya tidak memberikan dampak yang signifikan.

Manajemen menganalisa bahwa seluruh transaksi dengan Pihak Berelasi diperlukan guna mendukung kelancaran kegiatan operasional Perseroan yang dapat mendorong kinerja finansial pada tahun buku 2023 dan 2022.

Review Atas Kewajaran Transaksi

Berdasarkan review yang telah dilaksanakan pada tahun buku 2023 dan 2022, Manajemen menganalisa bahwa seluruh transaksi dengan Pihak Berelasi pada 2 (dua) tahun tersebut telah memenuhi peraturan dan ketentuan terkait.

SIFAT HUBUNGAN BERELASI

- Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan adalah pemegang saham utama Perusahaan.
- Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan: Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Perusahaan.
- Entitas yang merupakan Perusahaan asosiasi dari Perusahaan.
- Entitas yang merupakan ventura bersama dari Perusahaan.
- Manajemen kunci yang meliputi anggota dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi." Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- Orang atau anggota keluarga terdekatnya dikatakan memiliki relasi dengan Perseroan jika orang tersebut:

with Related Parties when compared to the total amount do not have a significant impact.

Management analyzes that all transactions with Related Parties are needed to support the smooth running of the Company's operational activities that can boost financial performance in the 2023 and 2022 financial years.

Review Of Transaction Fairness

Based on the review that has been carried out in the financial years 2023 and 2022, the Management analyzes that all transactions with Related Parties in the 2 (two) years have complied with the relevant rules and regulations.

NATURE OF RELATION

- The Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance is the ultimate shareholder of the Company.
- All entities owned and controlled by the Ministry of Finance of the Government of the Republic of Indonesia and entities over which the Ministry of Finance of the Government of the Republic of Indonesia has significant influence: State-Owned Enterprises (SOEs).
- Related parties whose major shareholders are the same as the Company.
- Entities that are associated companies of the Company.
- Entities that are joint ventures of the Company.
- Key management which includes members of the Company's board of Commissioners and Directors.

Throughout 2023, the Company has conducted transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 regarding "Related Party Disclosures." A related party is a person or entity related to the reporting entity:

- Person or a member of his/her immediate family is said to be related to the Company if that person:

- Memiliki pengendalian ataupun pengendalian bersama terhadap Perseroan,
- Memiliki pengaruh signifikan terhadap Perseroan,
- Merupakan personil manajemen kunci dari Perseroan ataupun entitas induk.

- Has control or joint control over the Company,
- Has significant influence over the Company,
- A key management personnel of the Company or main entity.

Sedangkan suatu entitas dikatakan memiliki relasi dengan Perseroan jika memenuhi salah satu dari hal berikut ini:

1. Entitas tersebut dan Perseroan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama, merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari Perseroan (atau entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut merupakan anggota suatu kelompok usaha di mana Perseroan adalah anggota dari kelompok usaha tersebut),
2. Entitas tersebut dan Perseroan adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama, satu entitas yang merupakan ventura bersama dari Perseroan dan entitas lain yang merupakan entitas asosiasi dari Perseroan,
3. Merupakan suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Perseroan atau entitas yang terkait dengan Perseroan. Jika Perseroan adalah penyelenggara program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perseroan,
4. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (i) di atas,
5. Orang yang diidentifikasi dalam angka (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau personil manajemen kunci dari entitas tersebut (atau entitas induk dari entitas).
6. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Meanwhile, an entity is called to have a relationship with the Company if it complies one of the following points:

1. The entity and the Company are members of the same group, are associates or joint ventures of the Company (or the associate or joint venture is a member of a group of which the Company is a member),
2. These entities and the Company are joint ventures of the same third party, one entity which a joint venture of the Company and the other entity which an associate of the Company,
3. It is a post-employment benefit plan for employee benefits of the Company or an entity related to the Company. If the Company is the caretaker of the plan, so the sponsoring entity is also related to the Company,
4. An entity controlled or jointly controlled by a person identified in (i) above,
5. The person identified in (i) has significant influence over the entity or the key management personnel of the entity (or a main entity of the entity).
6. The entity, or a member of a group of which the entity is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or a main entity of the reporting entity.

NAMA DAN SIFAT HUBUNGAN BERELASI

Pihak-pihak berelasi adalah perusahaan dan perorangan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Tabel dibawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Perseroan beserta sifat dari transaksi tersebut.

Pengungkapan saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

NAME AND NATURE OF RELATED RELATIONSHIP

Related parties are companies and individuals that have direct or indirect ownership or management relation with the Company. The table below shows details of related parties with the Company and the nature of the transactions.

Disclosure of significant balances and transactions with related parties are as follows:

Pihak berelasi Related parties	Sifat pihak berelasi Nature of related parties	Transaksi Transaction
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Kepemilikan sama terkait Equal ownership	Kas dan setara kas, utang bank Cash and cash equivalent, bank debt
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Kepemilikan sama terkait Equal ownership	Kas dan setara kas, utang bank Cash and cash equivalent, bank debt
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Kepemilikan sama terkait Equal ownership	Kas dan setara kas, utang bank Cash and cash equivalent, bank debt
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	Kepemilikan sama terkait Equal ownership	Kas dan setara kas Cash and cash equivalent
PT BPD Nusa Tenggara Barat	Kepemilikan sama terkait Equal ownership	Kas dan setara kas Cash and cash equivalent
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk	Kepemilikan sama terkait Equal ownership	Kas dan setara kas, utang bank Cash and cash equivalent, bank debt
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	Kepemilikan sama terkait Equal ownership	Kas dan setara kas Cash and cash equivalent
PT Bank DKI	Kepemilikan sama terkait Equal ownership	Kas dan setara kas Cash and cash equivalent
PT Aneka Tambang Tbk	Kepemilikan sama terkait Equal ownership	Piutang usaha, tagihan bruto kepada pemberi kerja Accounts receivable, gross bill to project owners
Pemda Kabupaten Tulang Bawang	Kepemilikan sama terkait Equal ownership	Piutang usaha Accounts receivable
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Kepemilikan sama terkait Equal ownership	Piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja Accounts receivable, retention receivables, gross bills to project owners
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Kepemilikan sama terkait Equal ownership	Piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja Accounts receivable, retention receivables, gross bills to project owners
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR)	Kepemilikan sama terkait Equal ownership	Piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja Accounts receivable, retention receivables, gross bills to project owners
Pemda Kabupaten Lombok Tengah	Kepemilikan sama terkait Equal ownership	Piutang retensi retention receivables

Pihak berelasi Related parties	Sifat pihak berelasi Nature of related parties	Transaksi Transaction
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Kepemilikan sama terkait Equal ownership	Piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja Retention receivables, gross bills to project owners
PT Jalintim Adhipraya Abipraya	Kepemilikan sama terkait Equal ownership	Tagihan bruto kepada pemberi kerja, piutang lain-lain, investasi pada entitas asosiasi, utang lain-lain Gross bills to project owners, other receivables, investments in associated entities, other debt
Perum Bulog	Kepemilikan sama terkait Equal ownership	Tagihan bruto kepada pemberi kerja Gross bills to project owners
Otoritas Jasa Keuangan	Kepemilikan sama terkait Equal ownership	Tagihan bruto kepada pemberi kerja Gross bills to project owners
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Kepemilikan sama terkait Equal ownership	Tagihan bruto kepada pemberi kerja Gross bills to project owners
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Kepemilikan sama terkait Equal ownership	Tagihan bruto kepada pemberi kerja Gross bills to project owners
PT Rajawali Liki Energi	Kepemilikan sama terkait Equal ownership	Investasi pada entitas asosiasi, utang usaha, utang lain-lain Investments in associated entities, accounts payable, other debt
PT Buana Enjiniring Konsultan	Kepemilikan sama terkait Equal ownership	Investasi pada entitas asosiasi, utang usaha Investments in associated entities, accounts payable
PT Citra Karya Jabar Tol	Entitas asosiasi Associated entities	Investasi pada entitas asosiasi, utang lain-lain Investments in associated entities, other debt
PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	Kepemilikan sama terkait Equal ownership	Investasi jangka panjang lainnya Other long-term investments
PT Jasamarga Jogja Bawen	Kepemilikan sama terkait Equal ownership	Investasi jangka panjang lainnya Other long-term investments
Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kepemilikan sama terkait Equal ownership	Piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja Retention receivables, gross bills to project owners
Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Dinas Pu Dan Penataan Ruang Perumahan	Kepemilikan sama terkait Equal ownership	Piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja Retention receivables, gross bills to project owners

TABEL JUMLAH TRANSAKSI MATERIAL DENGAN PIHAK BERELASI

Rincian item yang terkait dengan transaksi pihak-pihak berelasi:

TABLE OF THE NUMBER OF MATERIAL TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Details of item related to related parties' transactions

Uraian Description	2023		2022	
	Jumlah Total	Persentase terhadap jumlah aset atau liabilitas Percentage to total asset or liability	Jumlah Total	Persentase terhadap jumlah aset atau liabilitas Percentage to total asset or liability
Aset Assets				
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	1.076.604.966.862	11,45%	1.192.641.398.189	14,96%
Piutang usaha - bersih Accounts receivable - net	1.577.744.854.361	17,00%	577.943.043.012	7,25%
Piutang retensi - retensi Retention receivables - retention	251.424.097.675	2,71%	138.792.417.083	1,74%
Tagihan bruto kepada pemberi kerja - bersih Gross bills to project owners - net	321.563.045.906	3,47%	757.933.486.559	9,51%
Pekerjaan dalam proses Work in progress	32.247.235.198	0,35%	65.020.620.444	0,82%
Piutang lain-lain-bersih Other receivables - net	13.807.242.463	0,15%	2.027.566.728	0,03%
Liabilitas Liability				
Utang usaha Accounts payable	1.063.796.274.047	14,91%	991.392.365.936	16,21%
Utang lain-lain Other debt	11.038.447.871	0,15%	10.494.552.280	0,17%
Pinjaman jangka panjang Long-term loans	1.365.740.754.388	18,81%	1.582.654.270.492	25,87%

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN

Selama tahun 2023, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS THAT HAVE A SIGNIFICANT EFFECT ON THE COMPANY'S PERFORMANCE

During 2023, there were no changes in laws and regulations that had a significant effect on the company's performance.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Standar akuntansi revisian berikut, yang relevan untuk Grup, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 dan tidak memiliki pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material;
- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas;
- Amendemen PSAK 16: "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- Amendemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi, Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi "estimasi akuntansi" dan penjelasannya;
- Amendemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tanggahan, terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal yang diadopsi dari Amendemen IAS 12 Income Taxes tentang Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction.

Standar akuntansi revisian berikut yang telah diterbitkan dan relevan untuk Grup berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 dan belum diterapkan secara dini oleh Grup:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar;
- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka Panjang dengan kovenan; dan

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

Application Of New And Revised Financial Accounting Standards (PSAK) And Interpretation Of Financial Accounting Standards (ISAK)

Amendments to Statement of Financial Accounting Standards (PSAK)

The following revised accounting standards, which are relevant to the Group, are effective from January 1, 2023, and have no material effect on the Group's consolidated financial statements:

- Amendment to PSAK 1: "Presentation of Financial Statements" on disclosure of accounting policies, which changes the term "significant" to "material" and provides an explanation of material accounting policies;
- Amendment to PSAK 1: "Presentation of Financial Statements" regarding the classification of liabilities;
- Amendment to PSAK 16: "Property, Plant and Equipment" on intensive pre-use results;
- Amendment to PSAK 25: "Accounting Policies, Changes in Estimates, Accounting, and Errors" on the definition of "accounting estimate" and its explanation;
- Amendment to PSAK 46: "Income Taxes" on Deferred Taxes related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction adopted from Amendment to IAS 12 Income Taxes on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction.

The following revised accounting standards that have been issued and are relevant to the Group are effective from January 1, 2024, and have not been early adopted by the Group:

- Amendment to PSAK 1: "Presentation of Financial Statements" on liabilities classified as current or non-current;
- Amendment to PSAK 1: "Presentation of Financial Statements" about long-term liabilities with covenants; and

- Amendemen PSAK 73: "Sewa" tentang liabilitas sewa pada transaksi jual beli dan sewa-balik.

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025.

- PSAK 74 (amendemen) Kontrak Asuransi.
- PSAK 74 (amendment) Insurance Contract.

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan konsolidasian, Grup sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar-standar tersebut, terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Berdasarkan hasil penilaian manajemen atas kemampuan Perseroan untuk melanjutkan kelangsungan usaha di masa yang akan datang, dapat disimpulkan bahwa Perseroan tidak memiliki hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Assessment Manajemen Atas Hal-Hal yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Seiring dengan keberhasilan Perseroan dalam mencatatkan kinerja yang sangat baik. Pencapaian beberapa indikator utama Perseroan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan target dan realisasi tahun sebelumnya. Nilai kontrak baru yang diperoleh perseroan selama tahun 2023 sebesar Rp 11.868 triliun tercapai 131,87 % dari anggaran perusahaan, dan 157,29% dari realisasi tahun 2022.

Pencapaian kontrak ini menunjukkan bahwa seiring dengan tingkat pertumbuhan yang agresif, Perseroan juga dituntut untuk mengambil langkah strategis agar dapat mewujudkan hal tersebut. Hal ini antara lain diwujudkan dengan

- Amendment to PSAK 73: "Leases" regarding lease liabilities in sale and purchase and leaseback transactions.

Effective for periods beginning on or after January 1, 2025.

- PSAK 74 (amendment) Insurance Contract.
- PSAK 74 (amendment) Insurance Contract.

At the date of authorization of the consolidated financial statements, the Group is considering the implications of the adoption of these standards, on the Group's consolidated financial statements.

BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

Issues with Potentially Significant Effect on Business Continuity

Based on management's assessment of the Company's ability to continue as a going concern in the future, it can be concluded that the Company does not have any matters that have the potential to significantly affect the Company's business continuity.

Management Assessment of Issues that Have a Significant Effect on Business Continuity

Along with the Company's success in recording excellent performance. The achievement of several key indicators of the Company showed a significant increase compared to the target and realization of the previous year. The value of new contracts obtained by the company during 2023 is IDR 11,868 trillion, reaching 131.87% of the company's budget and 157.29% of the realization in 2022

This contract achievement shows that along with the aggressive growth rate, the Company is also required to take strategic steps to realize this. This is realized, among others, by basing the strategy on efforts to create opportunities

melandaskan strategi pada upaya penciptaan peluang sehingga Perusahaan kini tidak hanya mengandalkan atau menunggu tender namun bergerak lebih aktif untuk menjemput peluang bisnis yang ada. Strategi Pemasaran Perseroan dilakukan seiring dengan upaya memenangkan tantangan-tantangan akan tingginya tingkat kompetisi di industri infrastruktur. Oleh karena itu, dalam hal ini Perseroan senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk dapat membangun keunggulan kompetitif terutama dengan tetap mementingkan kualitas di setiap proyek yang dikerjakan.

Berdasarkan asumsi di atas, peluang bagi Perseroan untuk bertumbuh tentunya masih sangat luas. Perseroan menyakini bahwa keseluruhan target yang ditetapkan pada tahun 2024 mendatang serta tahun-tahun selanjutnya bukanlah suatu target yang tidak realistis mengingat besarnya potensi pasar.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN ASSESSMENT

Dalam melaksanakan penilaian atas kemampuan Perseroan untuk melanjutkan kelangsungan usaha di masa yang akan datang, digunakan beberapa asumsi dan pertimbangan. Asumsi dan pertimbangan tersebut, antara lain analisis SWOT, kinerja keuangan, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, permasalahan internal dan perkara hukum yang dihadapi, serta kondisi ekonomi mikro dan makro pada saat ini dan masa yang akan datang.

Sementara itu, untuk menjaga kelangsungan usaha, Perseroan masih melaksanakan strategi perusahaan yang sudah ditetapkan. Adapun strategi bisnis tersebut sebagai berikut:

1. Fokus pada *Core Business* untuk mengimbangi pertumbuhan bisnis konstruksi nasional. Perseroan berupaya mengimbangi pertumbuhan tersebut dengan memfokuskan kepada core business yaitu bidang konstruksi

so that the Company now does not only rely on or wait for tenders but moves more actively to pick up existing business opportunities. The Company's Marketing Strategy is carried out in line with efforts to win the challenges of the high level of competition in the infrastructure industry. Therefore, in this case, the Company always increases its capacity and capability to be able to build a competitive advantage, especially by continuing to prioritize quality in every project undertaken.

Based on the assumptions above, the opportunities for the Company to grow are certainly still very broad still very wide. The Company believes that the overall target set for 2024 and the following years is not an unrealistic target given the large market potential.

ASSUMPTIONS USED BY MANAGEMENT IN CONDUCTING THE ASSESSMENT

In assessing the Company's ability to continue as a going concern in the future, several assumptions and considerations are used. These assumptions and considerations include SWOT analysis, financial performance, liquidity, solvency, profitability, internal problems and legal cases faced, as well as current and future micro and macroeconomic conditions.

Meanwhile, to maintain business continuity, the Company is still implementing the corporate strategy that has been set. The business strategy is as follows:

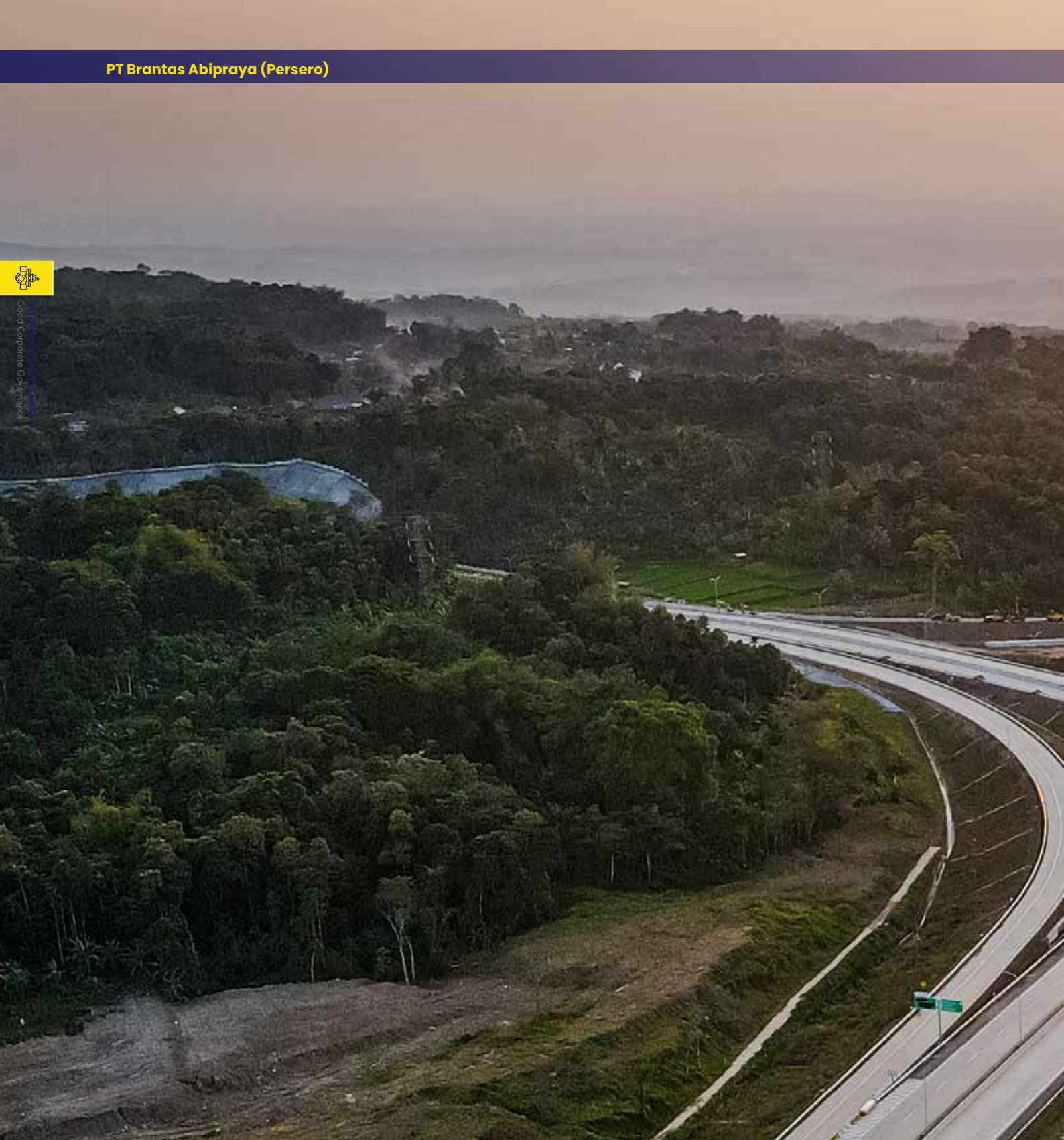
1. Focus on *Core Business* to offset the growth of the national construction business. The Company seeks to offset this growth by focusing on its core business, namely the construction of Water Resources (SDA) and

Sumber Daya Air (SDA) dan non SDA yaitu pembangunan jalan dan jembatan, perhubungan, dan *hydro power*.

2. Diversifikasi Pasar Perseroan telah berhasil melakukan penetrasi pasar-pasar baru dari sisi pemberi kerja. Penetrasi pasar baru yang dilakukan Perseroan saat ini adalah menciptakan proyek melalui *financial restructuring*.
3. Diversifikasi Produk Perusahaan melakukan diversifikasi produk dengan melakukan investasi pada *hydro power*, pengembangan usaha beton pracetak, dan pengembangan usaha properti.
4. Turut sertanya perusahaan dalam proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) guna menciptakan *recurring income* yang berkelanjutan bagi perusahaan, seperti SPAM, pengoperasian bendungan dan pengoperasian dan pemeliharaan irigasi, perumahan ASN dan lain-lain pada ibukota negara nusantara (IKN)..
5. Turut menciptakan peluang kerja sama dalam bentuk *business to business* (B to B) dan *Business to government* (B to B) dalam hal investasi secara keseluruhan.

non-water Resources, namely road and bridge construction, transportation, and hydropower.

2. Market Diversification
The Company has successfully penetrated new markets from the employer side. The Company's new market penetration is currently creating projects through financial restructuring.
3. Product Diversification
The Company diversified its products by investing in hydropower, precast concrete business development, and property business development.
4. Participation in government and business entity cooperation (PPP) projects to create sustainable recurring income for the company, such as SPAM, dam operations and irrigation operations and maintenance, civil servant housing, and others in the national capital city (IKN).
5. Participate in creating cooperation opportunities in the form of Business-to-Business (B to B) and Business to government (B to B) in terms of overall investment.



Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance



PERSEROAN BERKEYAKINAN BAHWA DENGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK AKAN MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET DAN VISI MISI PERUSAHAAN.

The Company believes that the implementation of Good Corporate Governance will support target achievement and the Company's vision and mission.



PRINSIP TATA KELOLA

Governance Principles

Perseroan memandang bahwa penerapan GCG merupakan pilar kuat untuk memajukan pertumbuhan. Oleh sebab itu, Perseroan berupaya untuk senantiasa menerapkan GCG terhadap seluruh pemangku kepentingan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan kualitas dari penerapan praktik terbaik GCG dengan secara terus menerus dilakukan, melakukan pemutakhiran berbagai kebijakan, standar, pedoman, prosedur yang disesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keadaan lingkungan bisnis, dan juga perkembangan usaha dan kinerja Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga mempublikasikan kebijakan, standar, pedoman, dan prosedur tersebut di situs web untuk mendorong pengendalian diri dari seluruh insan Perseroan agar dalam melaksanakan aktivitas pekerjaannya selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma etika yang berlaku di Perseroan.

The Company views the implementation of GCG as an advanced growth. Therefore, the Company strives to implement GCG for all stakeholders by complying with applicable legislation. Improving the quality of the GCG best practices implementation by continuously carrying out and updating various policies, standards, guidelines, and procedures that adjusted to changes in applicable legislation, the state of the business environment, and business development and the Company's performance. In addition, the Company also publishes these policies, standards, guidelines, and procedures on the website to encourage self-control of all the Company personnel so that in carrying out their work activities, they always pay attention to the values and ethical norms applicable in the Company.

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten merupakan faktor yang sangat penting dalam pengelolaan perusahaan, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi semakin meningkat. Oleh karena itu, Perseroan atau Perusahaan berkomitmen secara penuh untuk menjadikan GCG sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan di Perusahaan. Perseroan meyakini bahwa penerapan GCG dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan usaha Perusahaan dan akan memberikan kontribusi dan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham, karyawan dan *stakeholders* lainnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Sebagai wujud penerapan GCG yang komprehensif dan guna memastikan bahwa GCG diterapkan secara konsisten di seluruh level organisasi, Perseroan mengadopsi standar terbaik dalam penerapan GCG, serta mematuhi seluruh aturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan secara konsisten dan sistematis.

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, prinsip GCG turut mengalami perkembangan yang mencakup sistem pengawasan dan pengendalian yang mendukung etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mendukung integritas dalam pelaporan keuangan, pengelolaan risiko yang layak, serta hubungan pemangku kepentingan dan Perusahaan yang berlandaskan etika. Di lingkup Perusahaan, penilaian dilakukan atas penerapan GCG untuk memastikan terwujudnya prinsip GCG secara komprehensif.

The consistent implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles is a factor in company management, considering the increasing risks and challenges faced. Therefore, the Company is fully committed to make GCG as the basis for every decision making in the Company. The Company believes that the GCG implementation can improve the efficiency, effectiveness, and sustainability of the Company's business and will provide sustainable contribution and added value for shareholders, employees, and other stakeholders in the short and long term.

As a form of comprehensive GCG implementation and to ensure that GCG is implemented consistently at all levels of the organization, the Company adopts the best standards in GCG comply with all applicable laws and regulations that are carried out consistently and systematically.

In line with the development of the business world, GCG principles have also developed, which include a supervisory and control system that supports work ethics and responsible decision-making, integrity in financial reporting, proper risk management, and ethics-based stakeholder and company relations. Within the Company, an assessment is carried out on the GCG implementation to ensure the realization of GCG principles comprehensively.

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dasar Penerapan GCG

Prinsip-prinsip GCG dijalankan agar dapat mewujudkan kinerja Perseroan yang berkelanjutan. Dalam menerapkan GCG, Perseroan berpedoman pada *international best practices* serta peraturan dan perundangundangan yang berlaku di antaranya:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER- 2/MBU/2023 tentang Pedoman Tatakelola dan kegiatan korporasi signifikan Negara (BUMN).

TUJUAN PENERAPAN DAN PRINSIP GCG

Tujuan Penerapan GCG

Tujuan Perseroan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di antaranya:

1. Mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang maksimal sehingga meningkatkan kemakmuran Perusahaan, serta mewujudkan nilai tambah bagi pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya;
2. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan seluruh pemangku kepentingan perusahaan;
3. Mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan perusahaan;
4. Mengelola sumber daya secara lebih beramanah;
5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
6. Memperbaiki budaya kerja Perusahaan; dan
7. Menjadikan Perusahaan bernilai tambah yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh insan Abipraya berikut peningkatan kemanfaatan bagi pemangku kepentingan perusahaan.

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

Basic GCG Implementation

GCG principles are implemented to realize the Company's sustainable performance. In implementing GCG, the Company is guided by international best practices as well as applicable laws and regulations including:

- Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
- Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/2023 concerning Guidelines for Governance and activities of State-significant corporations (BUMN).

GCG IMPLEMENTATION OBJECTIVES AND PRINCIPLES

GCG Implementation Purposes

The Company's objectives in implementing GCG principles include:

1. Achieving maximum growth and returns to increase the Company's prosperity, and realizing added value for shareholders in the long term without neglecting the interests of other stakeholders;
2. Controlling and directing good relations between shareholders, the board of commissioners, the board of directors, and all stakeholders of the company;
3. Support internal control activities and company development;
4. Manage resources more trustfully;
5. Increase accountability to stakeholders;
6. Improve the Company's work culture; and
7. Making the Company value-added is improving the welfare of all Abipraya people along with increasing benefits for company stakeholders.

PRINSIP GCG

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan mengacu pada lima prinsip dasar GCG.

Transparansi

Perseroan memberikan informasi yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perseroan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

Akuntabilitas

Perseroan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar dengan pengelolaan yang benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perseroan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pertanggungjawaban

Perseroan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga kesinambungan usaha dalam jangka panjang dapat terpelihara dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Independensi

Perseroan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

GCG PRINCIPLES

The implementation of good corporate governance by the Company refers to five basic principles of GCG.

Transparency

The Company provides relevant information in a way that is easily accessible and understood by stakeholders. The Company takes the initiative to disclose not only issues required by legislation, but also matters that are important for decision-making by shareholders, creditors, and other stakeholders.

Accountability

The Company can account for its performance transparently and reasonably with correct, measurable, and according to the interests of the Company while taking into account the interests of shareholders and other stakeholders. Accountability is a necessary prerequisite for achieving sustainable performance.

Accountability

The Company complies with legislation and carries out responsibilities towards the community and the environment so that long-term business continuity, can be maintained and recognized as a good corporate citizen.

Independence

The Company is managed independently so that each organ of the company does not dominate each other and can't be intervened by other parties. The Company is managed professionally without conflict of interest and influence or pressure from any party that is not in accordance with applicable laws and regulations and sound corporate principles.

Kewajaran dan Kesetaraan

Perseroan menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Perseroan menggunakan prinsip kesetaraan yang wajar dalam pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip GCG tersebut diimplementasikan dalam menjalankan operasional Perseroan sehari-hari yang merupakan wujud pemahaman dan kepedulian Abipraya dalam menjaga dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan baik yang berasal dari pihak internal maupun eksternal Perusahaan. Implementasi GCG di Perseroan dilakukan secara berkesinambungan terutama terpusat kepada 4 (empat) aktivitas yaitu sebagai berikut:

1. *Awareness*

GCG diterapkan di Perseroan sebagai panduan bagi seluruh Insan Abipraya agar senantiasa bekerja dan berkontribusi pada Perusahaan sesuai dengan tatanan dan prinsip yang diatur dalam GCG. Manajemen menerapkan konsep pimpinan sebagai contoh bagi karyawan dalam mengimplementasikan prinsip GCG sebagai upaya internalisasi sehingga tercipta budaya perusahaan yang patuh dan tumbuh sesuai dengan tatanan yang ada.

2. *Assessment*

Perseroan telah melakukan asesmen GCG sebanyak 14 kali. Tahun 2005 - 2011 Asesmen GCG dilakukan menggunakan Kepmen BUMN Nomor 117 Tahun 2002. Sedangkan tahun 2012 - 2019 Asesmen dilakukan menggunakan SK Sekretaris Menteri Nomor 16 Tahun 2012.

3. *Improvement*

Perseroan selalu berkomitmen untuk melaksanakan asesmen GCG yang dilakukan setiap tahunnya yakni baik secara *Self*

Fairness and Equality

The Company guarantees that every interested party receives fair treatment according to the provisions of the prevailing legislation. The Company uses the reasonable equality principle in fulfilling the stakeholder's rights arising based on agreements and applicable legislation.

The GCG principles are implemented in carrying out the Company's daily operations, which are a manifestation of Abipraya's understanding and concern in safeguarding and protecting the interests of stakeholders from internal and external parties of the Company. The GCG implementation in the Company is carried out on an ongoing basis, especially centered on 4 (four) activities, namely as follows:

1. *Awareness*

GCG is implemented in the Company as a guide for all Abipraya personnel to always work and contribute to the Company according to the order and principles regulated in GCG. Management applies the concept of leadership as an example for employees in implementing GCG principles as an internalization effort to create a company culture that is obedient and grows according to the existing order.

2. *Assessment*

The Company has conducted GCG assessments 14 times. 2005 - 2011, GCG assessment was carried out using SOE Decree Number 117 of 2002. In 2012 - 2019, the assessment was carried out using the Decree of the Secretary of the Minister Number 16 of 2012.

3. *Improvement*

The Company is always committed to carrying out GCG assessments carried out every year, both by *Self-Assessment* and by the external

Assesmen maupun oleh Tim Assesmen eksternal dari Badan Pemeriksa Pembangunan dan Keuangan (BPKP) terkait pelaksanaan dan penerapan GCG dan rekomendasi tindak lanjut *Area Of Imperovement* (AOI) dari proses pelaksanaan GCG dalam Perusahaan.

4. Socialization

Sosialisasi GCG dilakukan dalam beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Induksi Direksi dan komisaris baru
- b. Sosialisasi dan *Knowledge Sharing Forum* (KSF) yang dilakukan oleh sekretariat Perusahaan mengenai GCG dan perangkat lainnya.
- c. Penandatanganan Pakta Integritas yang diperbaharui setiap tahunnya.
- d. Mensosialisasikan Pedoman - pedoman *Board Manual*, *Code Of Conduct* dan *Code Of Corporate Governance* GCG yg diperbaharui secara berkala setiap tahunnya atau maksimal setiap 3 tahun.
- e. Mensosialisasikan penyesuaian Implementasi undang - undang yg terbaru terhadap penerapan dan pelaksanaan GCG di Perusahaan.

PENCAPAIAN TERBAIK PENERAPAN GCG 2023

Efektivitas penerapan GCG tercermin dari hasil yang telah diperoleh. Hasil dari implementasi GCG terlihat dari kepercayaan pihak eksternal kepada Perusahaan dengan pencapaian sebagai berikut:

1. Perseroan telah melakukan Assessment GCG secara berkala 1 kali dalam 2 tahun, asesmen terakhir dilaksanakan pada tahun 2022 secara *Self Assessment*. untuk periode tahun 2023 seharusnya dilangsungkan oleh Tim Eksternal tetapi tidak dilaksanakan mengingat adanya aturan terbaru mengenai Tatakelola Perusahaan yakni PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka dari itu turunan dari Peraturan

Assessment Team from the Development and Finance Audit Agency (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan: BPKP) related to the GCG implementation and recommendations for Area of Improvement (AOI) follow-up of the GCG implementation process in the Company.

4. Socialization

GCG socialization is carried out in several activities, including:

- a. Induction of new Directors and Commissioners
- b. Socialization and Knowledge Sharing Forum (KSF) conducted by the corporate secretariat regarding GCG and other tools.
- c. The signing of the Integrity Pact is renewed every year.
- d. Disseminate Board Manual Guidelines, Code of Conduct, and Code of Corporate Governance GCG, which are updated regularly every year or a maximum of every 3 years.
- e. Socialize the adjustment of the latest laws implementation to the GCG implementation in the Company.

BEST ACHIEVEMENT OF GCG IMPLEMENTATION 2023

The effectiveness of GCG implementation is reflected in the results that have been obtained. The results of GCG implementation can be seen from the trust of external parties in the Company with the following achievements:

1. The Company has conducted GCG Assessments periodically 1 time in 2 years, the last assessment was carried out in 2022 by Self-Assessment. For the 2023 period, it should have been carried out by the External Team but was not implemented considering the latest regulation on Corporate Governance, namely PER-2/MBU/03/2023, concerning Guidelines for Governance and significant corporate activities of State-Owned Enterprises (SOEs), derivatives of the

tersebut pun dicabut oleh pemerintah khususnya kementerian BUMN dikarenakan ada aturan yang akan menggantikan aturan terkait Parameter Assessment GCG tersebut yakni SK 16 /S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan. Hasil yang signifikan dari periode Assessment GCG pada Periode Tahun 2022, dengan Skor 88,057 % dari skor maksimal 100%. Adapun skor dengan nilai tersebut masuk dalam kategori SANGAT BAIK, masih tetap berlaku sampai dengan hasil peraturan terbaru terbit.

regulation were revoked by the government, especially the Ministry of SOEs, because there is a regulation that will replace the regulation related to the GCG Parameter of Assessment and Evaluation. Significant results from the GCG Assessment period in 2022, with a score of 88.057% from a maximum score of 100%. The score with this value is in the VERY GOOD category, it remains valid until the results of the latest regulation are published.

KEBIJAKAN DAN STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kebijakan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Komitmen Perseroan dalam penerapan GCG diwujudkan dengan implementasi tata kelola perusahaan yang baik secara penuh. Perseroan memberlakukan berbagai kebijakan seperti Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Policy/CGP*), *Code of Conduct* (CoC), Charter Dewan Komisaris (BoC Charter), dan *Charter* Direksi (BoD Charter), *Charter-charter* Komite Penunjang Dewan Komisaris, *Charter* Internal Audit, Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang mendukung penerapan tata kelola perusahaan secara berkesinambungan dan konsisten.

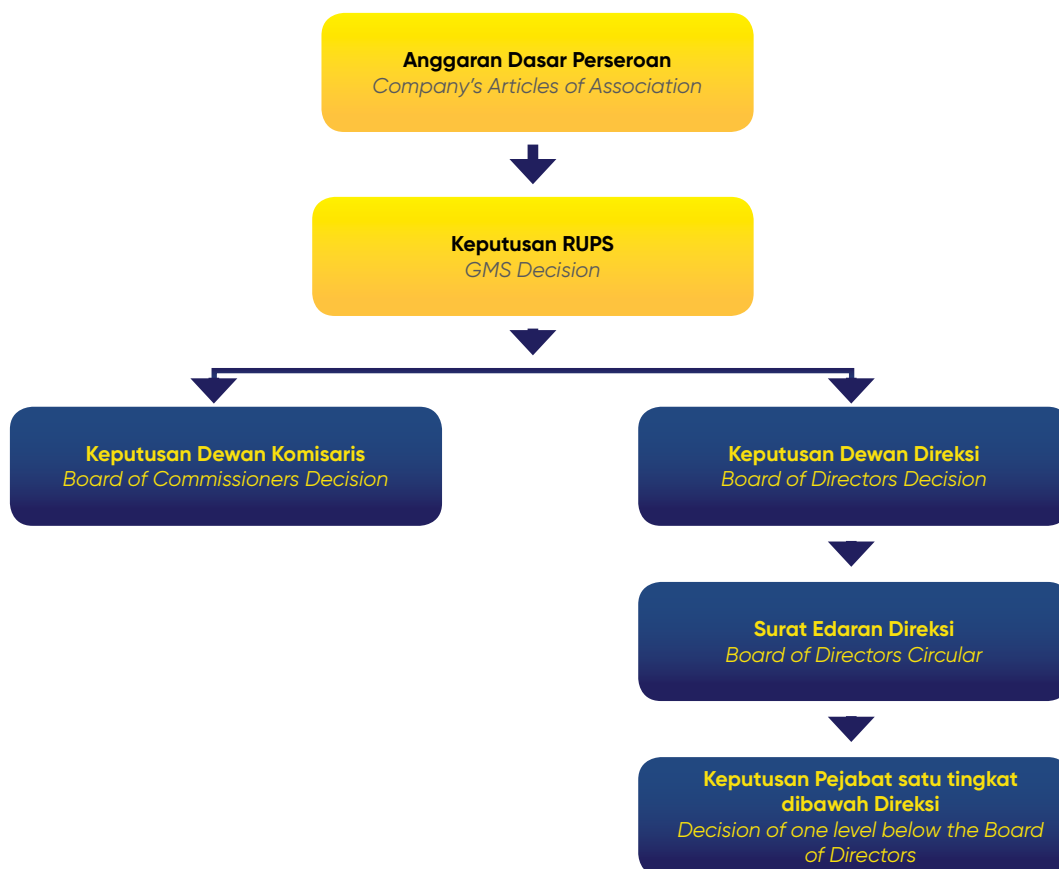
CORPORATE GOVERNANCE POLICIES AND STRUCTURES

Corporate Governance Implementation Policy

The Company's commitment to implementing GCG is realized by the full implementation of good corporate governance. The Company enforces various policies such as the Corporate Governance Policy (CGP), Code of Conduct (CoC), BoC Charter, BoD Charter, Board of Commissioners Supporting Committee Charter, Internal Audit Charter, Risk Management Policy Guidelines, and other policies that support the implementation of corporate governance continuously and consistently.

Hierarki peraturan perusahaan digambarkan sebagai berikut:

The hierarchy of company regulations is described as follows:



Struktur Kebijakan GCG

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Organ Perseroan tersebut memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan GCG. Organ Perseroan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan dan ketentuan lainnya atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan terbaik perusahaan.

GCG Policy Structure

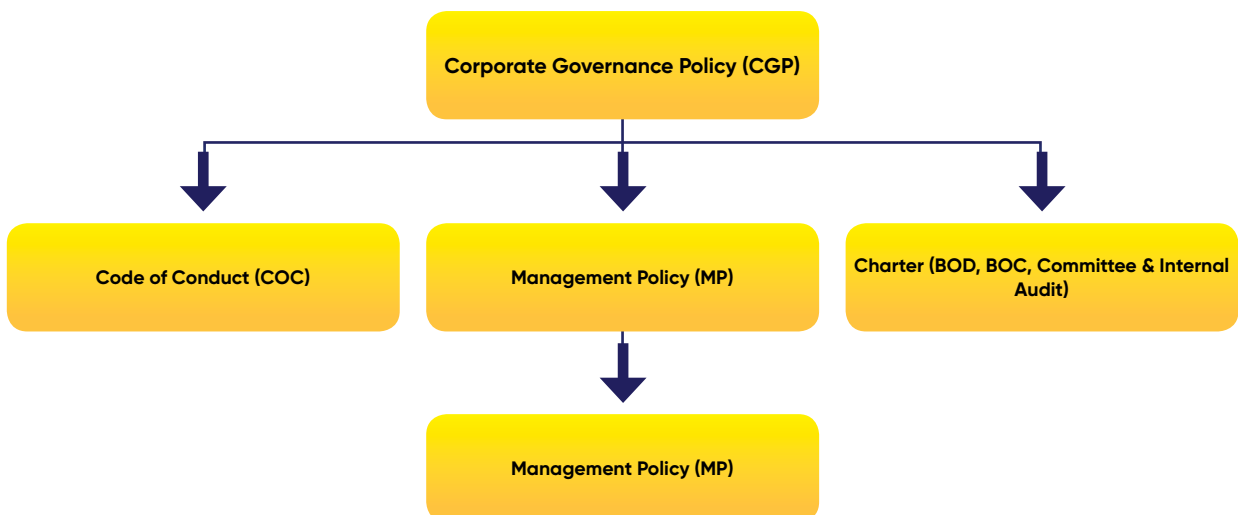
According to Law Number. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, the Company's organs consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. These organs of the Company play a key role in the successful implementation of GCG. The Company's organs carry out their functions in accordance with statutory provisions, the Company's articles of association and other provisions on the basis of the principle that each organ has independence in carrying out its duties, functions and responsibilities for the best interests of the company.

Perseroan memiliki induk kebijakan perusahaan yaitu *Corporate Governance Policy (CGP)*, yang berisi himpunan pedoman-pedoman pokok pengelolaan perusahaan yang bersifat holistik dan terintegrasi sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Dengan demikian seluruh peraturan, keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan Perseroan harus merujuk dan menyebut dengan jelas butir CGP sebagai standar dan pedoman dasar dalam pembentukannya. CGP mengatur antara lain hierarki peraturan, kebijakan perusahaan dan pendekatan penyusunan kebijakan.

The Company has a parent corporate policy, namely the *Corporate Governance Policy (CGP)*, which contains a set of basic guidelines for company management that are holistic and integrated according to GCG principles. Thus, all regulations, decisions, or policies issued by the Company must refer to and mention CGP items as basic standards and guidelines in its formation. CGP governs, among others, the hierarchy of regulations, corporate policies, and policy-making approaches.

Struktur Kebijakan di Abipraya terdiri dari tiga tingkat, yaitu:

The Policy Structure in Abipraya consists of three levels, namely:



CGP berisi himpunan pedoman-pedoman pokok pengelolaan Perusahaan yang baik, sebagai acuan bagi seluruh kegiatan Brantas Abipraya. CoC, *Charter*, MP, SOP dan WI merupakan himpunan kebijakankebijakan bisnis dan uraian pendukungnya yang mengatur kegiatan-kegiatan Perseroan dalam melakukan usahanya dan disusun dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam CGP. Agar alur kebijakan tetap konsisten maka pada setiap CoC, *Charter*, MP, SOP dan WI harus memuat langsung bagian-bagian yang terkait dengan CGP.

CGP contains a set of basic guidelines for the management of the Company, as a reference for all activities of Brantas Abipraya. CoC, *Charter*, MP, SOP, and WI are a set of business policies and supporting descriptions that regulate the Company's activities in conducting its business and are prepared by referring to the provisions in the CGP. In order for the policy flow to remain consistent, each CoC, *Charter*, MP, SOP and WI must contain directly the parts related to the CGP.

Ruang Lingkup Kebijakan GCG

Secara berkesinambungan, Perseroan mengembangkan kebijakan terkait GCG yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan terlebih dahulu disetujui dan ditandatangani oleh manajemen tertinggi yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam pelaksanaan GCG, seluruh kebijakan strategis yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG.

Code of Corporate Governance

Perseroan telah menyusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance* atau COCG), sebagai upaya meningkatkan kinerja dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG. Pedoman COCG merupakan seperangkat peraturan dan praktik yang menjadi dasar atau acuan bagi *top management* dan seluruh insan Perseroan, serta menjadi acuan bagi *stakeholder* lainnya dalam pengelolaan perusahaan. Isi dari COCG yaitu prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan, yang sesuai dengan kaidah GCG, peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan dan *best practices* GCG. Selain itu, COCG juga memuat berbagai kebijakan serta peraturan teknis sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Sosialisasi Kebijakan GCG

Sosialisasi tentang tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi GCG di Perseroan, mencakup *softstructure* dan *Infrastructure* GCG, *Whistleblowing System*, Pencegahan Gratifikasi, serta pelaporan LHKPN. Sosialisasi dilakukan melalui portal internal Perseroan, *website*, dan sosialisasi langsung kepada pegawai di anak perusahaan dan unit bisnis maupun *stakeholder* lainnya.

GCG Policy Scope

On an ongoing basis, the Company develops GCG-related policies that are tailored to business needs and prevailing laws and regulations, with prior approval and signatures from top management, namely the Board of Commissioners and Board of Directors. In implementing GCG, all strategic policies carried out by the Board of Commissioners and the Board of Directors consider GCG principles.

Code of Corporate Governance

The Company has developed a Code of Corporate Governance (COCG), to improve performance and compliance with GCG principles. The COCG Guidelines are a set of regulations and practices that become the basis or reference for top management and all the Company personnel, as well as a reference for other stakeholders in the company management. The content of the COCG is the principles of corporate management that are in line with the vision, mission, and values of the Company, which are according to GCG principles, legislation, the Company's Articles of Association, and GCG best practices. In addition, COCG also contains various policies and technical regulations according to the company's needs.

GCG Policy Socialization

Socialization on good corporate governance (GCG) is carried out to provide a deep understanding of GCG implementation in the Company, including GCG soft structure and infrastructure, Whistleblowing System, Gratuity Prevention, and LHKPN reporting. Socialization is carried out through the Company internal portal, website, and direct socialization to employees in subsidiaries, business units, and other stakeholders.

Perseroan juga menyediakan wadah untuk bertanya bagi seluruh insan Perseroan apabila terdapat hal-hal yang tidak dimengerti. Pegawai dapat bertanya kepada atasan langsung atau kepada Unit Sekretariat Perusahaan sebagai penanggung jawab implementasi GCG di Perseroan.

TAHAPAN IMPLEMENTASI GCG

Perseroan menyadari bahwa praktik GCG sangat penting diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan mewujudkan bisnis yang berkelanjutan bagi Perseroan. Penguatan GCG di Perseroan juga dilaksanakan melalui sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan Perseroan agar seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui dan memahami praktik-praktik GCG di Perseroan.

Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan praktik-praktik bisnis yang dilakukannya agar mampu meningkatkan daya saing. Penguatan daya saing dilakukan melalui peningkatan praktik tata kelola perusahaan sehingga dapat memacu kinerja finansial dan operasional serta meningkatkan kepercayaan investor, disamping terus menjaga kinerja Perseroan.

Dalam rangka mempersiapkan analisis yang komprehensif bagi penyusunan *Roadmap* GCG, setiap gugus kerja mendiskusikan kesenjangan atau masalah yang ditemukan dari hasil penilaian. Selanjutnya, kesimpulan hasil diskusi oleh semua gugus kerja kemudian dianalisis guna mencapai kesepakatan sehingga dapat diimplementasikan dalam tata kelola perusahaan.

Implementasi GCG Perseroan diterapkan dalam bentuk siklus untuk memastikan prinsip-prinsip GCG menjadi acuan dalam setiap kegiatan Perseroan, serta mewujudkan PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai salah satu warga korporasi yang baik (*Good Corporate Citizen*).

The Company also provides a place to ask questions for all the Company people if there are things that are not understood. Employees can ask their direct supervisor or the Corporate Secretariat Unit as the person in charge of GCG implementation in the Company.

STAGES OF GCG IMPLEMENTATION

The Company realizes that GCG practices are very important to be implemented to increase stakeholder trust and realize a sustainable business for the Company. GCG strengthening in the Company is also carried out through socialization to all the Company stakeholders so that all stakeholders can know and understand GCG practices in the Company.

The Company is committed to improving its business practices to increase competitiveness. Strengthening competitiveness is carried out through improving corporate governance practices to spur financial and operational performance and increase investor confidence while continuing to maintain the Company's performance.

To prepare the GCG Roadmap comprehensive analysis, each working force discusses gaps or problems in the assessment results. Furthermore, the conclusions of the results of discussions by all working forces are then analyzed to reach an agreement so it can implemented in corporate governance.

The Company's GCG implementation is implemented in a cyclical form to ensure GCG principles become a reference in every activity of the Company, as well as realizing PT Brantas Abipraya (Persero) as one of the Good Corporate Citizens.

Berikut ini merupakan tahapan implementasi GCG:

The following are the stages of GCG implementation:



PENILAIAN PENERAPAN GCG

Pengukuran implementasi GCG Perseroan dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan yang dapat berkontribusi terhadap kerentanan Perseroan, menilai kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan, praktik bisnis dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang dikeluarkan oleh otoritas.

Tujuan dari penilaian penerapan GCG yaitu untuk mewujudkan tata kelola perusahaan dengan cara:

1. Menguji dan menilai penerapan GCG melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan perbandingan dengan indikator dan parameter pengujian yang telah ditentukan.
2. Memberikan gambaran hasil pengukuran melalui pemberian nilai atas penerapan GCG.
3. Memantau konsistensi penerapan GCG di lingkungan organisasi perusahaan, serta untuk memperoleh masukan demi penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG.

GCG IMPLEMENTATION ASSESSMENT

The measurement of the Company's GCG implementation is carried out based on the prevailing laws and regulations. The assessment is conducted to identify various weaknesses that may contribute to the Company's vulnerability, and assess the legal and regulatory framework, business practices, and compliance with governance principles issued by the authority.

The purpose of the GCG implementation assessment is to realize corporate governance by:

1. Test and assess the implementation of GCG through the elaboration of GCG implementation conditions and comparison with predetermined indicators and test parameters.
2. Provide an overview of measurement results by giving value to the implementation of GCG.
3. Monitor the consistency of GCG implementation within the company's organization, and obtain input for the improvement and development of GCG policies.

4. Mendorong pengelolaan perusahaan yang semakin profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Perseroan melakukan penilaian GCG secara tahunan, yang pelaksanaannya oleh pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Penilaian tersebut sudah berjalan sejak tahun 2011 dan dalam pelaksanaannya bekerja sama dan didukung penuh oleh BPKP DKI Jakarta.

Kriteria yang Digunakan Dalam Penilaian

Penilaian penerapan GCG dapat dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau secara internal (*self assessment*) berdasarkan kriteria yang digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/3/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Kegiatan Korporasi signifikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hasil Penilaian Penerapan GCG

Pada tabel berikut ini, disajikan skor penilaian masing-masing kriteria penilaian penerapan GCG.

Hasil Penilaian Penerapan GCG

GCG Implementation Assessment Results

No	Aspek Pengujian/Indikator/Parameter Test Aspects/Indicators/Parameters	Bobot Weight	Capaian Achievements		Penjelasan Explanation
			Skor Score	%	
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Persahaan yang Baik secara Berkelanjutan Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7.000	6.201	88.58%	Sangat Baik Excellent
II	Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	9.000	8.270	91.89%	Sangat Baik Excellent
III	Dewan Komisaris Board of Commissioners	35.000	33.117	94.62%	Sangat Baik Excellent
IV	Direksi Board of Directors	35.000	33.100	94.57%	Sangat Baik Excellent
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9.000	7.368	81.87%	Sangat Baik Excellent

4. Encourage more professional, transparent, and efficient company management, empowering functions and increasing the independence of company organs.

Assessing Party

The Company conducts an annual GCG assessment, which is carried out by an independent party appointed by the Company. It has been running since 2011, and its implementation is in collaboration and fully supported by BPKP DKI Jakarta.

Criteria Used in Assessment

Assessment of GCG implementation can be carried out by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) or internally (self assessment) based on the criteria used in accordance with Minister of State for State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/3/2023 dated 24 March 2023 concerning Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises (BUMN).

GCG Implementation Assessment Results

In the following table, the assessment score of each GCG implementation assessment criterion is presented.

Hasil Penilaian Penerapan GCG

GCG Implementation Assessment Results

No	Aspek Pengujian/Indikator/Parameter Test Aspects/Indicators/Parameters	Bobot Weight	Capaian Achievements		Penjelasan Explanation
			Skor Score	%	
VI	Aspek Lainnya Other Aspects	5.000	0.000	0.00%	Baik Good
	Jumlah Total	100.000	88.057	88.057%	Sangat Baik Excellent

Dari hasil *self assesment* menunjukkan total skor sebesar 88.057 dari total nilai maksimal 100 dengan kualifikasi "Sangat Baik"

PERKEMBANGAN ASESSMENT DAN SELF ASESSMENT PENERAPAN GCG

Sejak pertama kali dilakukan assessment GCG tercatat perkembangan hasil atau skor *assessment* GCG cenderung meningkat. Hal ini mencerminkan komitmen Perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dan konsisten menindaklanjuti rekomendasi yang muncul. *Assessment* juga dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik (*best practice*) dalam penerapan GCG, sehingga area-area yang memerlukan perbaikan/penyempurnaan dapat diidentifikasi. Hasil *assessment* menjadi masukan yang sangat penting bagi Perusahaan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

Struktur Tata Kelola Perusahaan Organ Perseroan terdiri dari rapat umum Pemegang saham, Direksi, dan Dewan komisaris.

1. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang undang dan/atau Anggaran Dasar.
2. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk

From the self-assessment's results, it shows a total score of 88.057 out of a maximum total score of 100 with the qualification "Very Good"

DEVELOPMENT OF ASSESSMENT AND SELF-ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Since the first GCG assessment was conducted, the development of GCG assessment results or scores tended to increase. It reflects the Company's commitment to implement GCG principles and consistently follow up on emerging recommendations. Assessment is also linked to applicable provisions and best practices in GCG implementation, so that areas that require improvement can be identified. The results of the assessment become very important input for the Company in making decisions in the future.

Corporate Governance Structure the Company's organs consist of the general meeting of shareholders, the Board of Directors, and the Board of Commissioners.

1. The General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as GMS is an organ of the Company that has authority not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits specified in the law and/or the Articles of Association.
2. The Board of Directors is an organ of the Company that is authorized and fully responsible for the management of the

kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

3. Dewan komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Implementasi GCG Perseroan mengacu pada optimalisasi peran dan hubungan antara Organ Perseroan yaitu rapat umum Pemegang saham, Dewan komisaris dan Direksi. Dalam perkembangannya, ketiga organ tersebut membutuhkan dukungan dari infrastruktur tambahan tata kelola Perusahaan baik berupa sistem/mekanisme (*softstructure*) maupun unit kerja (*hardstructure*). Pelaksanaan GCG Perseroan tentunya mengacu pada ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan lainnya atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan.

RUPS, Direksi dan Dewan komisaris saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dalam menjalankan tugas pengurusan perusahaan, Direksi dibantu oleh sekretaris Perusahaan dan Internal Audit serta satuan kerja lain yang menjalankan fungsi pengurusan Perseroan.

Company for the benefit of the Company, according to the aims and objectives of the Company, and represents the Company, both inside and outside the court according to the provisions of the Articles of Association.

3. The Board of Commissioners is the Company's organ in charge of conducting general and/or special supervision according to the Articles of Association and providing advice to the Board of Directors.

The Company's GCG implementation refers to optimizing the role and relation between the Company's Organs, namely the general meeting of shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors. In their development, these organs require support from additional infrastructure of corporate governance in the form of systems/mechanisms (*softstructure*) and work units (*hardstructure*). The implementation of the Company's GCG certainly refers to the provisions in the legislation, the Company's Articles of Association, and other provisions based on the principle that each organ has independence in carrying out its duties, functions, and responsibilities for the benefit of the Company.

GMS, the Board of Directors, and the Board of Commissioners respect each other's duties, responsibilities, and authorities according to legislation and the Company's Articles of Association.

In carrying out the duties of managing the company, the Board of Directors is assisted by the Corporate Secretary and Internal Audit and other work units that carry out the Company's management functions.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berdasarkan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kajian dokumen, tidak ditemukan penyimpangan yang dapat mengurangi kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan, seperti perkara tindak pidana korupsi yang dihadapi oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Pencemaran Lingkungan, adanya permohonan pailit maupun pembekuan produk utama Perseroan.

Perseroan menyadari bahwa praktik-praktik *Bad Corporate Governance* akan mengganggu sistem Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) yang telah di implementasikan oleh Perseroan.

Dalam rangka mendukung penguatan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perseroan tidak melakukan segala tindakan serta kebijakan yang berkaitan dengan praktik *bad corporate governance* sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut:

IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

Based on applicable regulations. Based on the document review, no irregularities were found that could reduce the quality of the implementation of Good Corporate Governance in the Company, such as corruption cases faced by Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners, Environmental Pollution, bankruptcy applications, and freezing of the Company's main products.

The Company realizes that Bad Corporate Governance practices will disrupt the Good Corporate Governance (GCG) system that has been implemented by the Company.

To support the strengthening of Good Corporate Governance, the Company does not carry out any actions and policies related to bad corporate governance practices, as shown in the following table:

No	Keterangan Description	Praktik Practice
1	Laporan atas aktivitas Perseroan yang mencemari lingkungan Report on the Company's activities that pollute the environment	Nihil Nil
2	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Perseroan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam laporan tahunan Important matters being faced by the Company, subsidiaries, members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who are currently serving are not disclosed in the annual report	Nihil Nil
3	Ketidakpatuhan dalam pengungkapan pemenuhan kewajiban perpajakan Non-compliance in disclosure of tax obligations	Nihil Nil
4	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK Non-conformity in the presentation of annual reports and financial reports with applicable regulations and SAK	Nihil Nil
5	Kasus terkait buruh dan karyawan Cases related to labor and employees	Nihil Nil
6	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada laporan keuangan There is no disclosure of operating segments in the financial reports	Nihil Nil
7	Terdapat ketidaksesuaian antara Buku Laporan Tahunan dengan laporan tahunan softcopy There is a discrepancy between the Annual Report Book and the softcopy annual report	Nihil Nil

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Mengacu kepada Pasal 20 Anggaran Dasar Perusahaan, pelaksanaan RUPS terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Rapat umum Pemegang saham Tahunan (RUPST), yang merupakan agenda rutin setiap tahun minimal satu kali, dan
2. Rapat umum Pemegang saham luar Biasa (RUPSLB), yang waktu pelaksanaannya terjadi diluar waktu RUPST.

WEWENANG RUPS

Pemegang saham memiliki hak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perusahaan, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan di dalam RUPS. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, RUPS juga memiliki wewenang yaitu:

1. Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS;
2. Memperoleh informasi material mengenai Perusahaan secara tepat waktu, terukur dan teratur;
3. Menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya;
4. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Menyetujui perubahan anggaran dasar perusahaan;

The General Meeting of Shareholders (GMS) is an organ of the company that has authority not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the specified limits as described in law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). Referring to Article 20 of the Company's Articles of Association, the implementation of the GMS is divided into 2 (two), namely:

1. Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), which is a routine agenda at least once a year, and
2. Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), whose implementation occurs outside the AGMS time.

GMS AUTHORITY

Shareholders have the right to obtain information related to the Company, as long as it is related to the agenda of the meeting and does not conflict with the interests of the Company in the GMS. Based on the provisions of the Company's Articles of Association, the GMS also has the authority, namely:

1. Attend and vote at a GMS;
2. Obtain material information about the Company in a timely, measurable, and regular manner;
3. Receive a distribution of the Company's profits intended for shareholders in the form of dividends and the remaining assets resulting from liquidation, in proportion to the number of shares/capital owned;
4. Appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
5. Evaluate the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
6. Approve changes to the company's articles of association;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 7. Menyetujui laporan keuangan; 8. Menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi; 9. Menyetujui penggunaan laba Perusahaan, dan hal lainnya. | <ul style="list-style-type: none"> 7. Approve financial reports; 8. Determine remuneration for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors; 9. Approve the use of the Company's profits, and other matters. |
|---|---|

PELAKSANAAN RUPS

Perseroan melaksanakan kegiatan RUPS tahun 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik terkait dengan pemberitahuan yang disampaikan kepada Pemegang saham maupun pada saat penyelenggaraan RUPS. Tahun 2023 Perseroan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS sebagai berikut:

1. RUPS RKAP yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2022 dengan agenda persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023;
2. RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2022 dengan agenda persetujuan laporan tahunan.

GMS IMPLEMENTATION

The Company will carry out GMS activities in 2023 according to applicable regulations, both related to notifications submitted to shareholders and during the GMS. In 2023, the Company hosted 2 (two) GMS as follows:

1. GMS RKAP held on January 28, 2022 with the agenda of approval of the Company's work plan and budget (RKAP) 2023.
2. Annual GMS held on June 17, 2022 with the agenda of annual report approval.

Agenda dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Agenda and Resolution of RKAP of GMS for Financial Year 2023

No	Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan RUPS GMS Decision	Realisasi Realization
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan - Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan dan Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2022, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 Approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report and Social and Environmental Responsibility Implementation Report for the 2022 Financial Year, and Ratification of the Company's Consolidated Financial Report for the 2022 Financial Year	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdian, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath International) sebagaimana dimuat dalam laporannya, Nomor 00117/2.1051/AU.1/03/0555- 3/1/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Brantas Abipraya (Persero) dan entitas anak per 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas mereka, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	Telah direalisasikan has been realized

Agenda dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Agenda and Resolution of RKAP of GMS for Financial Year 2023

No	Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan RUPS GMS Decision	Realisasi Realization
		<p>1. Approved the Company's Annual Report including the Supervisory Duties that have been carried out by the Board of Commissioners for the Financial Year 2022, and ratified the Consolidated Financial Statements ended and audited by the Public Accounting Firm (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners (Crowe Horwath International) as contained in their report, Number 00117/2.1051/AU.1/03/0555- 3/1/III/2023 dated March 9, 2023, with the opinion "fair, in all material respects, the consolidated financial position of PT Brantas Abipraya (Persero) and subsidiaries as of December 31, 2022, and their financial performance and cash flows, for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards", and granting full release and discharge responsibility (volledig acquit de charge) to all members of the Board of Directors for their management and members of the Board of Commissioners for their supervision of the Company that has been carried out during Financial Year 2022, to the extent that such actions are not a criminal offense and such actions are reflected in the Consolidated Financial Statements that ended on December 31, 2022.</p>	
2	<p>Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022 Ratification of the Financial Report for the Micro and Small Business Funding Program for the 2022 Fiscal Year</p>	<p>2. Mengesahkan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath International)</p> <p>2. Ratification of the Micro and Small Business Funding Program Report for the Financial Year 2022, which ended on December 31, 2022, and has been audited by Public Accounting Firm (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath International)</p>	Telah direalisasikan has been realized
3	<p>Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2022 Fiscal Year</p>	<p>3. Menetapkan penggunaan Laba Bersih yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar 134.200.623.524 (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sebagai Cadangan</p> <p>3. Determining the use of Net Income attributable to the Owners of the Company's Parent Entity for the Financial Year 2022 amounting to 134,200,623,524 (one hundred thirty-four billion two hundred million six hundred twenty-three thousand five hundred and twenty-four rupiah) as Reserve</p>	Telah direalisasikan has been realized
4	<p>Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023. Appointment of a Public Accounting Firm to Audit the Company's Consolidated Financial Report for the 2023 Financial Year and the Financial Report for the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 Financial Year.</p>	<p>a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Hertanto Grace Karunawan (The International Accounting Group/TIAG) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023 serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga)</p> <p>b. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut,</p>	Telah direalisasikan has been realized

Agenda dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Agenda and Resolution of RKAP of GMS for Financial Year 2023

No	Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan RUPS GMS Decision	Realisasi Realization
		<p>c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis RUPS untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Hertanto Grace Karunawan (The International Accounting Group/TIAG), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023 serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan - persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut</p> <p>a. Appointed Public Accounting Firm Hertanto Grace Karunawan (The International Accounting Group/TIAG) as the Public Accountant Firm that will audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2023 (two thousand twenty-three) and other periods within Financial Year 2023 as well as the Financial Statements of the Funding Program for Micro and Small Enterprises (PUMK) which ended on December 31 (thirty-one), 2023 (two thousand twenty-three)</p> <p>b. Granting delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the compensation for audit services, additional scope of work required, and other requirements that are reasonable for a Public Accounting Firm,</p> <p>c. Granting authority and power to the Board of Commissioners with prior written approval of the GMS to determine Public Accountant Office if the Public Accountant Office of Hertanto Grace Karunawan (The International Accounting Group/TIAG), for any reason, cannot complete the audit of the Financial Statements of able to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for Financial Year 2023 and other periods in Financial Year 2023 as well as the Financial Statements of Micro and Small Business Funding Program (PUMK) Financial Year 2023, including determining the audit fees and - other requirements for the replacement Public Accounting Firm.</p>	
5	<p>Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022 serta Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Tahun Buku 2023 untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan</p> <p>Determination of Tantiem for the 2022 Financial Year and Determination of Salary/Honorarium, Allowances and Facilities for the 2023 Financial Year for the Company's Board of Commissioners and Directors</p>	<p>Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2022, akan ditetapkan secara tersendiri.</p> <p>Determination of salary/honorarium, facilities, and benefits for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year 2023, as well as tantiem for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the performance of the Financial Year 2022, will be determined separately</p>	<p>Telah direalisasikan has been realized</p>

Realisasi Keputusan RUPS tahun sebelumnya

Realization of GMS Decision of the previous year

No	Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan RUPS GMS Decision	Realisasi Realization
1	Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan - Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 36 Tahun Buku 2021	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath International) sebagaimana dimuat dalam laporannya, Nomor 00158/2.1051/AU.1/03/0555-2/1/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 dengan pendapat "laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Brantas Abipraya (Persero) dan entitas anak per 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas mereka, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath International) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00153 2 1051 / AU 1 03 0555 11 / 2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan pendapat "laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian PT Brantas Abipraya (Persero) dan entitas anak serta kinerja keuangan dan arus kas mereka untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku buku Laporan Perseroan.

Realisasi Keputusan RUPS tahun sebelumnya

Realization of GMS Decision of the previous year

No	Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan RUPS GMS Decision	Realisasi Realization
	Approval of the Company's Annual Report including the Report - Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the Financial Year 2021, and Ratification of the Company's Consolidated Financial Reports 36 Financial Year 2021	1. Approve the Company's Annual Report including the Report on Supervisory Duties that has been carried out by the Board of Commissioners for the Financial Year 2021, and ratify the Company's Consolidated Financial Reports ended December 31, 2021, and have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath International) as contained in its report, Number 00158/2.1051/AU.1/03/0555-2/1/III/2022, dated March 18, 2022, with the opinion "report the attached financial presents fairly, in all material aspects, the consolidated financial position of PT Brantas Abipraya (Persero) and subsidiaries as of December 31, 2021, as well as their financial performance and cash flows, for the year ended on that date, according to Financial Accounting Standards in Indonesia", as well as providing full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for the management actions of the Company and members of the Board of Commissioners for the Company's supervisory actions that have been carried out during the 2021 Financial Year, to the extent that such actions do not constitute a criminal offense and such actions are reflected in the Consolidated Financial Reports ended December 31, 2021.	Approve the Company's Annual Report including the Report on Supervisory Duties that have been carried out by the Board of Commissioners for the financial year 2020 and ratify the Company's Consolidated Financial Reports for the financial year 2020 which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners (Crowe Horwath International) as contained in its report Number 00153 2 1051 /AU 1 03 0555 1 1/2021, dated March 19, 2021, with the opinion "the accompanying financial statements present fairly in all material respects the consolidated financial position of PT Brantas Abipraya (Persero) and its subsidiaries performance and cash flows for the year ended on that date, according to Financial Accounting Standards in Indonesia", and provide full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for management and supervisory actions that have been carried out during the 2020 financial year as long as these actions are not criminal acts and are reflected in the Company's Report book.

Realisasi Keputusan RUPS tahun sebelumnya

Realization of GMS Decision of the previous year

No	Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan RUPS GMS Decision	Realisasi Realization
2	Persetujuan Laporan Keuangan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan melalui Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2021	2. Menyetujui Laporan Keuangan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan melalui Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath International) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00159/2.1051/AU.2/03/0555-2/1/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 dengan pendapat "laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Brantas Abipraya (Persero) tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan melalui Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.	Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath International) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00032 2 1051 / 03 05551 1 / 2021 dengan pendapat "laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Brantas Abipraya (Persero) (tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut

Realisasi Keputusan RUPS tahun sebelumnya

Realization of GMS Decision of the previous year

No	Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan RUPS GMS Decision	Realisasi Realization
	Approval of Financial Reports of Social and Environmental Responsibility Program through Micro and Small Business Funding Program for the Financial Year 2021	2. Approve the Financial Reports of the Social and Environmental Responsibility Program through the Micro and Small Business Funding Program for the Financial Year 2021, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath International) as contained in its report Number 00159/2.1051/AU.2/03/0555-2/1/III/2022, dated March 18, 2022, with the opinion "the attached financial reports present fairly, in all material aspects, the financial position of the Social and Environmental Responsibility unit of PT Brantas Abipraya (Persero) as of December 31, 2021, as well as financial performance and cash flows for the year ended on that date, according to the Financial Accounting Standards of Entities Without Public Accountability (SAK-ETAP) in Indonesia", as well as providing full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for management actions and members Board of Commissioners for supervisory actions that have been carried out during the 2021 Financial Year, to the extent that such actions are not criminal offenses and such actions are reflected in the Financial Reports of the Social and Environmental Responsibility Program through the Micro and Small Business Funding Program ended on December 31, 2021.	Ratifying the Annual Report on the Implementation of the Partnership and Community Development Program for 2020 which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners (Crowe Horwath International) as contained in its report Number 00032 2 1051 / 03 05551 1 / 2021, with the opinion "the accompanying financial statements present fairly in all material respects the financial position of the PT Brantas Abipraya (Persero) Partnership and Community Development Program unit as of December 31, 2020 and its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) in Indonesia", as well as providing full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for management and supervisory actions that have been carried out during the 2020 financial year as long as such actions are not criminal acts and are reflected in in the report
3	<p>Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021</p> <p>Determination of the Use of the Company's Net Profit for the Financial Year 2021</p>	<p>3. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2021 sebesar Rp56.528.271.146 (lima puluh enam miliar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh enam Rupiah) sebagai Laba Ditahan.</p> <p>3. Determine the use of Net Profit Attributable to Owners of the Company's Parent Entity for the Financial Year 2021 of IDR56,528,271,146 (fifty-six billion five hundred twenty-eight million two hundred seventy-one thousand one hundred forty-six Rupiah) as Retained Earnings.</p>	<p>Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp 31.305.184.069 (tiga puluh satu miliar tiga ratus lima juta seratus delapan puluh empat ribu enam puluh sembilan rupiah) sebagai laba Ditahan</p> <p>Determine the use of Net Profit Attributable to Owners of the Parent Entity for the Financial Year 2020 amounting to IDR31,305,184,069 (thirty-one billion three hundred five million one hundred eighty-four thousand sixty nine rupiah) as retained earnings</p>

Realisasi Keputusan RUPS tahun sebelumnya

Realization of GMS Decision of the previous year

No	Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan RUPS GMS Decision	Realisasi Realization
4	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022.	<p>a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath International) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang berakhir tanggal 31 Desember 2022;</p> <p>b. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta melakukan 39 audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.</p> <p>c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk KAP pengganti dalam hal KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath International), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut</p>	Penetapan gaji /honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2020 akan ditetapkan secara tersendiri

Realisasi Keputusan RUPS tahun sebelumnya

Realization of GMS Decision of the previous year

No	Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan RUPS GMS Decision	Realisasi Realization
	Appointment of a Public Accounting Firm to Audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2022 and Financial Reports of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Financial Year 2022.	<p>a. Establish a Public Accounting Firm (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath International) as the Public Accounting Firm that will audit the Company's Consolidated Financial Reports and the Financial Reports and Implementation of Micro and Small Business Funding Programs (PUMK) ending December 31, 2022;</p> <p>b. Delegate authority to the Board of Commissioners of the Company to determine audit service fees, increase the scope of work required and other reasonable requirements for the Public Accounting Firm and conduct 39 audits of the Company's Consolidated Financial Reports for periods in the Financial Year 2022 for the purposes and interests of the Company.</p> <p>c. Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint a replacement KAP if KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath International), for any reason, is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Reports and Financial Reports and Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) ended December 31, 2022, including determining audit service fees and other requirements for replacement KAP aforementioned</p>	Determination of salary and honorarium, along with other facilities and allowances for directors and; The Company's Board of Commissioners for the 2021 Financial Year, as well as bonuses for the Directors and Board Commissioners regarding the performance of the 2020 financial year will be determined separately.
5	Penetapan Tantiem Tahun Buku 2021 serta Penetapan Gaji/ Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Tahun Buku 2022 untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan	Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2021, akan ditetapkan secara tersendiri.	<p>a. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath International) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) (untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021)</p> <p>b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan</p> <p>c. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut serta menunjuk KAP pengganti dalam hal KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath International), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2021 termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut Keputusan Agenda 5</p>

Realisasi Keputusan RUPS tahun sebelumnya

Realization of GMS Decision of the previous year

No	Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan RUPS GMS Decision	Realisasi Realization
	<p>The determination of salary/honorarium along with other facilities and benefits for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year 2021 and tantiem for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the performance of the Financial Year 2020 will be determined separately</p>	<p>Determination of Tantien for the Financial Year 2021 and Determination of Salary/Honorarium, Allowances, and Facilities for the Financial Year 2022 for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company</p>	<p>a. Public Accounting Firm (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners (Crowe Horwath International) as a Public Accounting Firm that will audit the Company's Consolidated Financial Reports and the Financial Reports and Implementation of Micro and Small Business Funding Programs (PUMK) (for the financial year ended December 31, 2021)</p> <p>b. Grant authority and power of attorney to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Reports for other periods in the Financial Year 2021 for the purposes and interests of the Company</p> <p>c. Authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the audit fee and other requirements for the Public Accounting Firm and appoint a replacement Public Accountant in the case of Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Partners (Crowe Horwath International) Public Accountant, for any reason to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Reports and Financial Reports and Implementation of Micro and Small Business Funding Programs (for the Financial Year 2021), including determining audit service fees and requirements others for the replacement of KAP Agenda Decision 5</p>

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dewan komisaris juga berkewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan fungsi serta bersama-sama Direksi memastikan bahwa seluruh elemen Abipraya mengimplementasikan GCG sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Fungsi Pengawasan dijalankan Dewan komisaris bersama organ pendukung yang ada dibawahnya, yang terdiri dari komite-komite dan sekretaris Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan koordinasi secara rutin bersama komite-komite dan Sekretaris Dewan komisaris guna membahas setiap perkembangan Perusahaan agar senantiasa siap dalam memberikan solusi dan menyelesaikan setiap tantangan yang dihadapi Abipraya.

PANDUAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Anggota Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS serta memenuhi persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dan khusus yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan ketentuan lain yang berlaku. Dewan Komisaris tidak turut serta dalam pengambilan keputusan terkait operasional perusahaan, namun tetap tegas dalam fungsi pengawasan.

KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2023 tidak terjadi perubahan komposisi anggota Dewan komisaris Abipraya baik karena pergantian dan pengunduran diri.

The Board of Commissioners is a corporate organ tasked with supervising and advising to the Board of Directors as referred to in Article 1 paragraph (6) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The board of commissioners is also obliged to implement the GCG principles in carrying out its functions and together with the Board of Directors ensure that all elements of Abipraya implement GCG in accordance with applicable provisions in the Company.

The supervisory function is carried out by the Board of Commissioners together with supporting organs under it, consisting of committees and secretaries of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners coordinates regularly with committees and the Secretary of the Board of Commissioners to discuss every development of the Company so that it is always ready to provide solutions and solve every challenge.

WORKING GUIDE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Members of the Board of Commissioners of the Company are appointed and dismissed by the GMS and comply with the general and special requirements stipulated in the Articles of Association and specifically stipulated in the Articles of Association and other applicable provisions. The Board of Commissioners does not participate in decision-making related to the company's operations but remains firm in its supervisory function.

COMPOSITION OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2023, there will be no change in the composition of Abipraya's Board of Commissioners members due to changes or

Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis Perseroan untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

Komposisi anggota Dewan Komisaris Abipraya berjumlah empat orang. Selama tahun berjalan tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris.

resignations. The composition and number of the Board of Commissioners members are determined by the GMS by taking into account the vision, mission, and strategic plan of the Company to enable effective, appropriate, and fast decision-making, and can act independently.

The composition of the members of the Board of Commissioners of Abipraya is four people. During the current year, there was no change in the composition of the Board of Commissioners.

Nama Name	Jabatan Position	SK Pengangkatan Appointment Decree
Haryadi	Komisaris Utama/Independen President/Independent Commissioner	SK-281/MBU/09/2020 pada 10 September 2020 SK-281/MBU/09/2020 on September 10, 2020
Khalawi Abdul Hamid*	Komisaris Commissioner	SK-05/MBU/01/2018 Tanggal 5 Januari 2018 SK-05/MBU/01/2018 dated January 5, 2018
Kenny Daryat Nanang	Komisaris Independen Independent Commissioner	SK-17/MBU/01/2020 tanggal 09 Januari 2020 SK-17/MBU/01/2020 dated January 9, 2020
Imam Haryono	Komisaris Commissioner	SK-232/MBU/07/2021 pada 09 Juli 2021 SK-232/MBU/07/2021 on July 9, 2021
Diana Kusumastuti	Komisaris Commissioner	SK-19/MBU/01/2023 pada 31 Januari 2023 SK-19/MBU/01/2023 on January 31, 2023
Tursandi Alwi	Komisaris Commissioner	SK-19/MBU/01/2023 pada 31 Januari 2023 SK-19/MBU/01/2023 on January 31, 2023

* Masa jabatan berakhir pertanggal 5 Januari 2023

* Term ends January 5, 2023

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan yaitu lima tahun sejak diangkat. Penetapan masa jabatan tertuang dalam surat keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang pengangkatan masing-masing anggota Dewan Komisaris. Namun demikian, hal tersebut tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan jabatan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah mengarahkan dan menyelesaikan masalah internal, serta berhubungan dengan pihak eksternal. Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap kebijakan Perseroan

TENURE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The tenure of the Company's Board of Commissioners is five years from the time of appointment. The determination of the tenure is contained in the decree of the Minister of State-Owned Enterprises regarding the appointment of each member of the Board of Commissioners. However, this does not reduce the right of the GMS to dismiss the position of members of the Board of Commissioners at any time before their tenure ends.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The duties and responsibilities of the Board of Commissioners are to direct and resolve internal issues and liaise with external parties. The Board of Commissioners also supervises the Company's policies carried out by the Board of Directors,

yang dilakukan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), ketentuan Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semuanya itu dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disiapkan oleh Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta memberikan pendapat, saran, dan alasan penandatanganan kepada RUPS. Dewan Komisaris juga memiliki kewajiban melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan atau perusahaan lain.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Selain itu, Dewan Komisaris harus beriktikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero) Nomor: 04/DK/KPTS/V/2023 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Dewan Komisaris PT Brantas Abipraya (Persero) Nomor 01/DK/KPTS/I/2023 Tentang Pembagian Tugas Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Komite PT Brantas Abipraya (Persero) diuraikan sebagai berikut:

providing advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the Company's Long-Term Plan (RJPP), the Company's Work Plan and Budget (RKAP), the provisions of the Articles of Association, and the resolutions of the GMS, and applicable legislation. All of this is done for the benefit of the Company and according to the aims and objectives of the Company.

The Board of Commissioners must examine, review, and sign the RJPP, the Company's Work Plan, and Budget prepared by the Board of Directors, according to the provisions of the Articles of Association, and provide opinions, suggestions, and reasons for signing to the GMS. The Board of Commissioners also have to report to the Company regarding their share ownership and/or family ownership in the Company or other companies.

In carrying out its duties, the Board of Commissioners must comply with the Articles of Association and legislation and the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, accountability, and fairness. In addition, the Board of Commissioners must be in good faith, prudent, and responsible in carrying out its supervisory duties and providing advice to the Board of Directors for the benefit of the Company and according to the aims and objectives of the Company.

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Brantas Abipraya (Persero) Number: 04/DK/KPTS/V/2023 concerning the Sixth Amendment to the Decree of the Board of Commissioners of PT Brantas Abipraya (Persero) Number 01/DK/KPTS/I/2023 concerning the Division of Duties of Members The Board of Commissioners and Committees of PT Brantas Abipraya (Persero) are described as follows:

Haryadi : Komisaris Utama/Independen, meliputi:

1. Mengkoordinir tugas-tugas anggota Dewan Komisaris dan melakukan pengawasan bidang Direktorat Utama;
2. Melakukan pengawasan kegiatan Nominasi dan Remunerasi;

Tursandi Alwi, Komisaris, meliputi :

1. Memberikan rekomendasi terkait Nominasi dan Remunerasi;
2. Memberikan rekomendasi terkait kegiatan pengawasan Komite Audit;
3. Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris

Kenny Daryat Nanang, Komisaris Independen, meliputi :

1. Memberikan rekomendasi terkait Nominasi & Remunerasi
2. Melakukan pengawasan kegiatan Komite Pemantau Manajemen Risiko (PMR dan Good Corporate Governance).
3. Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris.

Imam Haryono, Komisaris, meliputi :

1. Melakukan pengawasan kegiatan Komite Audit
2. Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris

Diana Kusumawati, Komisaris, meliputi

1. Melakukan pengawasan kegiatan Komite Pemantau Manajemen Risiko (PMR) dan *Good Corporate Governance*.
2. Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris

Haryadi: President/Independent Commissioner, including:

1. Coordinate the duties of members of the Board of Commissioners and supervise the Main Directorate;
2. Provide recommendations related to Nomination and Remuneration;

Tursandi Alwi, Commissioner, includes:

1. Provide recommendations related to Nomination and Remuneration;
2. Provide recommendations regarding the Audit Committee's supervisory activities;
3. Carry out tasks delegated by the Board of Commissioners

Kenny Daryat Nanang, Independent Commissioner, includes:

1. Provide recommendations regarding Nomination & Remuneration
2. Supervise the activities of the Risk Management Monitoring Committee (PMR and Good Prorate Governance).
3. Carry out tasks delegated by the Board of Commissioners.

Imam Haryono, Commissioner, includes:

1. Supervise the activities of the Audit Committee
2. Carry out tasks delegated by the Board of Commissioners

Diana Kusumawati, Commissioner, includes

1. Supervise the activities of the Risk Management Monitoring Committee (PMR) and Good Corporate Governance.
2. Carry out tasks delegated by the Board of Commissioners

RAPAT DAN KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Koordinasi pelaksanaan tugas Dewan Komisaris diwujudkan dalam bentuk rapat terpisah maupun rapat gabungan, berupa rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi dan Komite yang ada di bawahnya. Rapat yang terencana dengan baik, dengan bahan yang lengkap akan sangat mendukung terwujudnya hasil yang optimal dari rapat, berupa pengambilan keputusan yang efisien dan efektif.

MEETING AND ATTENDANCE OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Coordination of the implementation of the duties of the Board of Commissioners is manifested in the form of separate meetings and joint meetings, in the form of meetings of the Board of Commissioners that invite the Board of Directors and Committees under it. A well-planned meeting, with complete materials, will support the realization of optimal results from the meeting in the form of efficient and effective decision-making.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Dalam Rapat Gabungan

Frequency and Level of Attendance of Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors in Joint Meetings

No	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % Attendance
Komisaris Board of Commissioner					
1	Haryadi	Komisaris Utama/Independen President/Independent Commissioner	12	12	100%
2	Imam Haryono	Komisaris Commissioner	12	12	100%
3	Khalawi Abdul Hamid *	Komisaris Commissioner	12	0	-
4	Kenny Daryat Nanang	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	12	100%
5	Diana Kusumastuti	Komisaris Commissioner	12	12	100%
6	Tursandi Alwi	Komisaris Commissioner	12	12	100%
Direksi Board of Directors					
1	Sugeng Rochadi	Direktur Utama President Director	12	12	100%
2	Suradi	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	12	10	83%
3	Tumpang Muhammad	Direktur SDM dan Umum Director of HC and General Affairs	12	11	92%
4	Muhammad Toha Fauzi	Direktur Operasi I Director of Operations I	12	10	83%
5	Purnomo	Direktur Operasi II Director of Operations II	12	11	92%

* Masa jabatan berakhir pertanggal 5 Januari 2023

* Term ends January 5, 2023

Agenda Rapat Gabungan Bersama Direksi

Joint Meeting Agenda with the Board of Directors

No	Bulan Agenda Month Agenda	Agenda
1	Januari January	<p>a. Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya (Desember 2022); b. Evaluasi atas kinerja perusahaan bulan Desember 2022; c. Evaluasi Laporan Unaudited PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2022; d. Pembahasan Potensi Kontrak Baru Tahun 2023; e. Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; f. Evaluasi penanganan Piutang per-tahun 2022 serta Strategi Penanganan Piutang pada tahun 2023; g. Pembahasan Progres Raihan Kontrak Baru dari Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara) pada tahun 2023;</p> <p>a. Follow-up to the Previous Month's Meeting (December 2022); b. Evaluation of the company's performance in December 2022; c. Evaluation of the Unaudited Report of PT Brantas Abipraya (Persero) Year 2022; d. Discussion of Potential New Contracts in 2023; e. Evaluation and Risk Mitigation of Ongoing and Upcoming Projects; f. Evaluation of Receivables handling per year 2022 and Receivables Handling Strategy in 2023; g. Discussion of the Progress of Achieving New Contracts from IKN (National Capital City) Infrastructure Projects in 2023;</p>
2	Februari February	<p>a. Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya (Januari 2023); b. Evaluasi atas kinerja perusahaan bulan Januari 2023; c. Pembahasan Potensi dan Realisasi Kontrak Baru; d. Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; e. Evaluasi penanganan Piutang serta Strategi Penanganan Piutang; f. Pembahasan Progres Raihan Kontrak Baru dari Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara); g. Pembahasan Pengelolaan Dana Pensiun dan Manfaat Pasti Brantas Abipraya;</p> <p>a. Follow-up to the Previous Month's Meeting (January 2023); b. Evaluation of the company's performance in January 2023; c. Discussion of Potential and Realization of New Contracts; d. Evaluation and Risk Mitigation of Ongoing and Future Projects; e. Evaluation of Receivables handling and Receivables Handling Strategies; f. Discussion of the Progress of Achieving New Contracts from IKN (National Capital City) Infrastructure Projects; g. Discussion of Pension Fund Management and Defined Benefits of Brantas Abipraya;</p>
3	Maret March	<p>a. Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya (Februari 2023); b. Evaluasi atas kinerja perusahaan bulan Februari 2023; c. Telaah Komite atas Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; d. Telaah Komite atas Evaluasi penanganan piutang perusahaan serta strategi penanganannya; e. Pembahasan Progres Raihan Kontrak Baru dari Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara);</p> <p>a. Follow-up to the Previous Month's Meeting (February 2023); b. Evaluation of the company's performance in February 2023; c. Committee Review of Ongoing and Future Project Risk Evaluation and Mitigation; d. Committee Review on the Evaluation of the handling of company receivables and their handling strategies; e. Discussion of the Progress of Achieving New Contracts from IKN (National Capital City) Infrastructure Projects;</p>
4	April April	<p>a. Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya (Maret 2023); b. Evaluasi atas Laporan Audited Tahun 2022; c. Evaluasi atas kinerja perusahaan per TW I Tahun 2023 d. Pembahasan Potensi dan Realisasi Kontrak Baru; e. Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; f. Evaluasi penanganan Piutang serta Strategi Penanganan Piutang; g. Pembahasan Progres Proyek Infrastruktur Ibu Kota Negara;</p> <p>a. Follow-up to the Previous Month's Meeting (March 2023); b. Evaluation of the 2022 Audited Report; c. Evaluation of the company's performance per TW I Year 2023 d. Discussion of Potential and Realization of New Contracts; e. Evaluation and Risk Mitigation of Ongoing and Upcoming Projects; f. Evaluation of Receivables handling and Receivables Handling Strategies; g. Discussion of the Progress of the National Capital City Infrastructure Project;</p>

Agenda Rapat Gabungan Bersama Direksi

Joint Meeting Agenda with the Board of Directors

No	Bulan Agenda Month Agenda	Agenda
5	Mei May	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya (April 2023); b. Evaluasi atas Kinerja Perusahaan bulan April 2023; c. Pembahasan Potensi dan Realisasi Kontrak Baru; d. Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; e. Evaluasi penanganan Piutang serta Strategi Penanganan Piutang; f. Pembahasan Progres Proyek Infrastruktur Ibu Kota Negara; g. Pembahasan Persiapan RUPS Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2022;
		<ul style="list-style-type: none"> a. Follow-up to the Previous Month's Meeting (April 2023); b. Evaluation of the Company's Performance in April 2023; c. Discussion of Potential and Realization of New Contracts; d. Evaluation and Risk Mitigation of Ongoing and Future Projects; e. Evaluation of Receivables handling and Receivables Handling Strategies; f. Discussion of the Progress of the National Capital City Infrastructure Project; g. Discussion on the Preparation of GMS Audited Financial Reports for the Financial Year 2022;
6	Juni June	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya (Mei 2023); b. Evaluasi atas Kinerja Perusahaan dan Pemasaran bulan Mei 2023; c. Evaluasi atas Kinerja Keuangan bulan Mei 2023; d. Evaluasi atas Kinerja Human Capital; e. Evaluasi penanganan Piutang serta Strategi Penanganan Piutang; f. Pembahasan Opportunity Proyek Infrastruktur Ibu Kota Negara; g. Pembahasan Tindak Lanjut Arahan RUPS Audited " 2022;
		<ul style="list-style-type: none"> a. Follow-up to the Previous Month's Meeting (May 2023); b. Evaluation of Company and Marketing Performance in May 2023; c. Evaluation of Financial Performance in May 2023; d. Evaluation of Human Capital Performance; e. Evaluation of Receivables handling and Receivables Handling Strategies; f. Discussion of Opportunities for National Capital City Infrastructure Project; g. Discussion of Follow-up Directives of the Audited GMS " 2022;
7	Juli July	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya (Juni 2023) b. Evaluasi atas Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2023 c. Pembahasan Potensi dan Realisasi Kontrak Baru; d. Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; e. Laporan penanganan Piutang beserta Strategi Penyelesaian Piutang; f. Pembahasan Opportunity dan progress proyek Infrastruktur Ibu Kota Negara;
		<ul style="list-style-type: none"> a. Follow-up to Previous Month's Meeting (June 2023) b. Evaluation of the Management Report for the Second Quarter of 2023 c. Discussion of Potential and Realization of New Contracts; d. Evaluation and Risk Mitigation of Ongoing and Future Projects; e. Report on handling Receivables along with Receivables Settlement Strategy; f. Discussion of Opportunities and progress of the National Capital City Infrastructure project;
8	Agustus August	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya (Juli 2023); b. Evaluasi atas Laporan Manajemen Bulan Juli 2023; c. Pembahasan Potensi dan Realisasi Kontrak Baru; d. Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; e. Laporan penanganan Piutang beserta Strategi Penyelesaian Piutang; f. Pembahasan progress proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara);
		<ul style="list-style-type: none"> a. Follow-up to the previous month's meeting (July 2023); b. Evaluation of the Management Report for July 2023; c. Discussion of Potential and Realization of New Contracts; d. Evaluation and Risk Mitigation of Ongoing and Future Projects; e. Report on handling Receivables along with Receivables Settlement Strategy; f. Discussion of the progress of the IKN (National Capital City) infrastructure project;
9	September September	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya (Agustus 2023); b. Evaluasi atas Laporan Manajemen Bulan Agustus 2023; c. Pembahasan Potensi dan Realisasi Kontrak Baru; d. Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; e. Laporan penanganan Piutang beserta Strategi Penyelesaian Piutang; f. Pembahasan progress proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara);
		<ul style="list-style-type: none"> a. Follow-up to the Previous Month's Meeting (August 2023); b. Evaluation of the Management Report for August 2023; c. Discussion of Potential and Realization of New Contracts; d. Evaluation and Risk Mitigation of Ongoing and Future Projects; e. Report on handling Receivables along with Receivables Settlement Strategy; f. Discussion of the progress of the IKN (Capital City of the Archipelago) Infrastructure project;

Agenda Rapat Gabungan Bersama Direksi

Joint Meeting Agenda with the Board of Directors

No	Bulan Agenda Month Agenda	Agenda
10	Oktober October	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya (September 2023); b. Evaluasi atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2023; c. Pembahasan Potensi dan Realisasi Kontrak Baru; d. Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; e. Laporan penanganan Piutang beserta Strategi Penyelesaian Piutang; f. Pembahasan progress proyek Infrastruktur KIN (Ibu Kota Nusantara); <ul style="list-style-type: none"> a. Follow-up to the Previous Month's Meeting (September 2023); b. Evaluation of the Management Report for the First Quarter of 2023; c. Discussion of Potential and Realization of New Contracts; d. Evaluation and Risk Mitigation of Ongoing and Future Projects; e. Report on handling Receivables along with Receivables Settlement Strategy; f. Discussion of the progress of the KIN (Capital City of the Archipelago) Infrastructure project;
11	November November	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya (Oktober 2023); b. Evaluasi atas Laporan Manajemen bulan Oktober 2023; c. Pembahasan Prognosa Kinerja Keuangan Tahun Buku 2023; d. Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; e. Laporan penanganan Piutang beserta Strategi Penyelesaian Piutang; f. Pembahasan progress proyek infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara); <ul style="list-style-type: none"> a. Follow-up to the Previous Month's Meeting (October 2023); b. Evaluation of the Management Report for October 2023; c. Discussion of Financial Performance Prognosis for Financial Year 2023; d. Evaluation and Risk Mitigation of Ongoing and Future Projects; e. Report on handling Receivables along with Receivables Settlement Strategy; f. Discussion of the progress of the IKN (National Capital City) infrastructure project;
12	Desember December	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya (November 2023); b. Evaluasi atas Laporan Manajemen bulan November 2023; c. Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; d. Laporan penanganan Piutang beserta Strategi Penyelesaian Piutang; e. Pembahasan progress proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara); <ul style="list-style-type: none"> a. Follow-up to the Previous Month's Meeting (November 2023); b. Evaluation of the Management Report for November 2023; c. Evaluation and Risk Mitigation of Ongoing and Future Projects; d. Report on handling Receivables along with Receivables Settlement Strategy; e. Discussion of the progress of the IKN (National Capital City) infrastructure project;

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Bersama Anggota Komite

Frequency and Level of Attendance of Members of the Board of Commissioners in Joint Meetings of Committee Members

No	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	%Kehadiran % Attendance
1	Haryadi	Komisaris Utama/Independen President/Independent Commissioner	12	12	100%
2	Imam Haryono	Komisaris Commissioner	12	12	100%
3	Khalawi Abdul Hamid*	Komisaris Commissioner	12	0	-
4	Kenny Daryat Nanang	Komisaris Independen Independent Commissioner	12	12	100%
5	Diana Kusumastuti	Komisaris Commissioner	11	11	100%
6	Tursandi Alwi	Komisaris Commissioner	11	11	100%

* Masa jabatan berakhir pertanggal 5 Januari 2023

* Term ends January 5, 2023

Agenda Rapat Bersama Komite

Agenda of the Joint Committee Meeting

No	Bulan Agenda Month Agenda	Agenda
1	Januari January	<p>a. Telaah Komite atas kinerja perusahaan bulan Desember 2022</p> <p>b. Telaah atas Evaluasi Laporan Unaudited PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2022;</p> <p>c. Telaah Komite atas Potensi Kontrak Baru Tahun 2023;</p> <p>d. Telaah Komite atas Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang;</p> <p>e. Telaah Komite atas Evaluasi penanganan piutang perusahaan per-tahun 2022 serta strategi penanganan piutang pada tahun 2023;</p> <p>f. Pembahasan Progres Raihan Kontrak Baru dari Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara) pada tahun 2023.</p> <p>a. Committee Review of the Company's Performance in December 2022</p> <p>b. Review of the Evaluation of the Unaudited Report of PT Brantas Abipraya (Persero) in 2022;</p> <p>c. Committee Review of Potential New Contracts in 2023;</p> <p>d. Committee Review of Ongoing and Future Project Risk Evaluation and Mitigation;</p> <p>e. Committee Review on the Evaluation of the Company's Receivables Handling in 2022 and Receivables Handling Strategy in 2023;</p> <p>f. Discussion on the Progress of Achieving New Contracts from IKN (National Capital City) Infrastructure Projects in 2023.</p>
2	Februari February	<p>a. Telaah Komite atas kinerja perusahaan bulan Januari 2023</p> <p>b. Telaah Komite atas Potensi dan Realisasi Kontrak Baru;</p> <p>c. Telaah Komite atas Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang;</p> <p>d. Telaah Komite atas Evaluasi penanganan piutang perusahaan serta strategi penanganannya;</p> <p>e. Pembahasan Progres Raihan Kontrak Baru dari Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara);</p> <p>f. Pembahasan Pengelolaan Dana Pensiun dan Manfaat Pasti Brantas Abipraya.</p> <p>a. Committee Review of the Company's Performance in January 2023</p> <p>b. Committee Review of Potential and Realization of New Contracts;</p> <p>c. Committee Review of Ongoing and Future Project Risk Evaluation and Mitigation;</p> <p>d. Committee Review on Evaluation of the handling of company receivables and their handling strategies;</p> <p>e. Discussion of the progress of Achieving New Contracts from IKN (National Capital City) Infrastructure Project;</p> <p>f. Discussion of Pension Fund Management and Definite Benefits of Brantas Abipraya.</p>
3	Maret March	<p>a. Telaah Komite atas kinerja perusahaan bulan Februari 2023</p> <p>b. Telaah Komite atas Potensi dan Realisasi Kontrak Baru;</p> <p>c. Telaah Komite atas Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang;</p> <p>d. Telaah Komite atas Evaluasi penanganan piutang perusahaan serta strategi penanganannya;</p> <p>e. Pembahasan Progres Raihan Kontrak Baru dari Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara).</p> <p>a. Committee Review of the Company's Performance in February 2023</p> <p>b. Committee Review of Potential and Realization of New Contracts;</p> <p>c. Committee Review of Ongoing and Future Project Risk Evaluation and Mitigation;</p> <p>d. Committee Review on Evaluation of the handling of company receivables and their handling strategies;</p> <p>e. Discussion of the Progress of Achieving New Contracts from IKN (National Capital City) Infrastructure Projects.</p>
4	April April	<p>a. Telaah Komite atas kinerja perusahaan bulan Maret 2023;</p> <p>b. Telaah Komite atas Laporan Audited 2022;</p> <p>c. Telaah Komite atas Laporan Triwulan I Tahun 2023</p> <p>d. Telaah Komite atas Potensi dan Realisasi Kontrak Baru;</p> <p>e. Telaah Komite atas Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang;</p> <p>f. Telaah Komite atas Evaluasi penanganan piutang perusahaan serta strategi penanganannya;</p> <p>g. Pembahasan Progres Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara);</p> <p>a. Committee review of the company's performance in March 2023;</p> <p>b. Committee Review of the 2022 Audited Report;</p> <p>c. Committee Review of the First Quarter 2023 Report</p> <p>d. Committee Review of Potential and Realization of New Contracts;</p> <p>e. Committee Review of Ongoing and Future Project Risk Evaluation and Mitigation;</p> <p>f. Committee Review on Evaluation of the handling of company receivables and their handling strategies;</p> <p>g. Discussion of the Progress of IKN (National Capital City) Infrastructure Project;</p>

Agenda Rapat Bersama Komite

Agenda of the Joint Committee Meeting

No	Bulan Agenda Month Agenda	Agenda
5	Mei May	<p>a. Telaah Komite atas kinerja perusahaan bulan April 2023;</p> <p>b. Telaah Komite atas Potensi dan Realisasi Kontrak Baru;</p> <p>c. Telaah Komite atas Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang;</p> <p>d. Telaah Komite atas Evaluasi penanganan piutang perusahaan serta strategi penanganannya</p> <p>e. Pembahasan Progres Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara);</p> <p>f. Telaah Hasil Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2022 dalam rangka Persiapan RUPS TB 2022.</p> <p>a. Committee review of the company's performance in April 2023;</p> <p>b. Committee Review of Potential and Realization of New Contracts;</p> <p>c. Committee Review of Ongoing and Future Project Risk Evaluation and Mitigation;</p> <p>d. Committee Review on Evaluation of the handling of company receivables and their handling strategies</p> <p>e. Discussion of the Progress of IKN (National Capital City) Infrastructure Project;</p> <p>f. Review of the Results of the Audited Financial Reports for the Financial Year 2022 in the context of Preparation for the 2022 TB GMS.</p>
6	Juni June	<p>a. Telaah Komite atas Kinerja Perusahaan dan Pemasaran bulan April 2023;</p> <p>b. Telaah Komite atas Kinerja Keuangan bulan April 2023;</p> <p>c. Telaah Komite atas Kinerja Human Capital;</p> <p>d. Telaah Komite atas Evaluasi penanganan piutang perusahaan serta strategi penanganannya;</p> <p>e. Pembahasan Opportunity Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara);</p> <p>a. Committee Review on Corporate Performance and Marketing in April 2023;</p> <p>b. Committee Review of Financial Performance in April 2023;</p> <p>c. Committee Review on Human Capital Performance;</p> <p>d. Committee Review on Evaluation of the handling of company receivables and their handling strategies;</p> <p>e. Discussion of the Progress of IKN (National Capital City) Infrastructure Project;</p>
7	Juli July	<p>a. Telaah Komite atas Kinerja Perusahaan dan Pemasaran bulan Juni 2023;</p> <p>b. Telaah Komite atas Kinerja Keuangan Triwulan II Tahun 2023;</p> <p>c. Telaah Komite atas Evaluasi penanganan piutang perusahaan serta strategi penanganannya;</p> <p>d. Pembahasan Opportunity Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara);</p> <p>a. Committee Review of Corporate Performance and Marketing in June 2023;</p> <p>b. Committee Review of Financial Performance in the Second Quarter of 2023;</p> <p>c. Committee Review on Evaluation of the handling of company receivables and their handling strategies;</p> <p>d. Discussion of IKN (National Capital City) Infrastructure Project Opportunities;</p>
8	Agustus August	<p>a. Telaah Komite atas Laporan Manajemen bulan Juli 2023;</p> <p>a. Telaah Komite atas Potensi dan Realisasi Kontrak Baru;</p> <p>b. Telaah Komite atas Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang;</p> <p>c. Telaah Komite atas Evaluasi penanganan piutang beserta solusi dari permasalahan tersebut;</p> <p>d. Pembahasan progress Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara);</p> <p>a. Committee review of the July 2023 Management Report;</p> <p>b. Committee Review of Potential and Realization of New Contracts;</p> <p>c. Committee Review of Ongoing and Future Project Risk Evaluation and Mitigation;</p> <p>d. Review the Committee on the Evaluation of the handling of receivables and solutions to these problems;</p> <p>e. Discussion of the progress of the IKN Infrastructure Project (National Capital City);</p>
9	September September	<p>a. Telaah Komite atas Laporan Manajemen bulan Agustus 2023;</p> <p>b. Telaah Komite atas Potensi dan Realisasi Kontrak Baru;</p> <p>c. Telaah Komite atas Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang;</p> <p>d. Telaah Komite atas Evaluasi penanganan piutang beserta solusi dari permasalahan tersebut;</p> <p>e. Pembahasan progress Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara);</p> <p>a. Committee review of the August 2023 Management Report;</p> <p>b. Committee Review of Potential and Realization of New Contracts;</p> <p>c. Committee Review of Ongoing and Future Project Risk Evaluation and Mitigation;</p> <p>d. Review the Committee on the Evaluation of the handling of receivables and solutions to these problems;</p> <p>e. Discussion of the progress of the IKN Infrastructure Project (National Capital City);</p>

Agenda Rapat Bersama Komite

Agenda of the Joint Committee Meeting

No	Bulan Agenda Month Agenda	Agenda
10	Oktober October	<p>a. Telaah Komite atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2023; b. Telaah Komite atas Potensi dan Realisasi Kontrak Baru; c. Telaah Komite atas Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; d. Telaah Komite atas Evaluasi penanganan piutang beserta solusi dari permasalahan tersebut; e. Pembahasan progress Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara).</p> <p>a. Committee Review of the Management Report in the First Quarter of 2023; b. Committee Review of Potential and Realization of New Contracts; c. Committee Review of Ongoing and Future Project Risk Evaluation and Mitigation; d. Review the Committee on the Evaluation of the handling of receivables and solutions to these problems; e. Discussion of the progress of the IKN (National Capital City) Infrastructure Project.</p>
11	November November	<p>a. Telaah Komite atas Laporan Manajemen bulan Oktober 2023; b. Pembahasan Prognosa Kinerja Keuangan Tahun Buku 2023; c. Telaah Komite atas Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; d. Telaah Komite atas Evaluasi penanganan piutang beserta solusi dari permasalahan tersebut; e. Pembahasan progress Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara);</p> <p>a. Committee review of the October 2023 Management Report; b. Discussion of Financial Performance Prognosis in Financial Year 2023; c. Committee Review of Ongoing and Future Project Risk Evaluation and Mitigation; d. Review the Committee on the Evaluation of the handling of receivables and solutions to these problems; e. Discussion of the progress of the IKN Infrastructure Project (National Capital City);</p>
12	Desember December	<p>a. Telaah Komite atas Laporan Manajemen bulan November 2023; b. Telaah Komite atas Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; c. Telaah Komite atas Evaluasi penanganan piutang beserta solusi dari permasalahan tersebut; d. Pembahasan progress Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara).</p> <p>a. Committee review of the Management Report for November 2023; b. Committee Review of Ongoing and Future Project Risk Evaluation and Mitigation; c. Review the Committee on the Evaluation of the handling of receivables and solutions to these problems; d. Discussion of the progress of the IKN Infrastructure Project (National Capital City).</p>

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Terbatas

Frequency and Attendance Rate of Members of the Board of Commissioners in Limited Meetings

No	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % Attendance
1	Haryadi	Komisaris Utama/Independen President/Independent Commissioner	6	6	100%
2	Imam Haryono	Komisaris Commissioner	6	6	100%
3	Kenny Daryat Nanang	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	6	100%
4	Diana Kusumastuti	Komisaris Commissioner	6	6	100%
5	Tursandi Alwi	Komisaris Commissioner	6	6	100%

Agenda Rapat Terbatas Dewan Komisaris

Limited Meeting Agenda of the Board of Commissioners

No	Bulan Agenda Month Agenda	Agenda
1	Maret March	Pembahasan Penyusunan Roadmap Dana Pensiun PT Brantas Abipraya (Persero) Discussion on the Preparation of the Pension Fund Roadmap of PT Brantas Abipraya (Persero)
2	Juli July	Detail Pekerjaan Proyek Jalan Tol Cisumdawu; Details of Cisumdawu Toll Road Project Work;
3	Agustus August	Pembahasan Rencana Investasi Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poigar-2 (30 MW) Discussion of Investment Plan for Poigar-2 Hydropower Plant Development (30 MW)
4	Desember December	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan Tindak Lanjut Investasi Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poigar-2 (30 MW) - Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Piutang Proyek Cisaumdawu - Evaluasi Program HC & GA Tahun 2023 dan Pembahasan Program 2024 - Discussion on Follow-up Investment in Poigar-2 Hydropower Plant Development (30 MW) - Discussion of Solving Cisumdawu Project Receivables Problems - HC & GA Program Evaluation in 2023 and 2024 Program Discussion

PROGRAM PENGENALAN KOMISARIS BARU

Perseroan memiliki kebijakan Program Pengenalan bagi Dewan komisaris yang baru menjabat. Program tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan lebih kepada Dewan komisaris baru terkait organisasi dan operasional Perseroan khususnya terkait bidang tugas pengawasan yang diberikan kepada komisaris tersebut. Penanggung jawab Program Pengenalan bagi anggota Dewan komisaris Baru berada pada fungsi sekretaris Perusahaan.

Program Pengenalan tersebut meliputi:

1. Mekanisme Tata Kelola Dewan Komisaris & Direksi Anggaran Dasar PT Brantas Abipraya (Persero)
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan-peraturan terkait dengan Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris.
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012.
5. Buku Board Manual, Pedoman GCG, Budaya Perusahaan serta Kode Etik.

NEW COMMISSIONER INDUCTION PROGRAM

The Company has an Induction Program policy for the newly appointed Board of Commissioners. The program aims to provide more knowledge to the new Board of Commissioners regarding the organization and operations of the Company, especially related to the areas of supervisory duties assigned to the commissioners. The person in charge of the Induction Program for members of the New Board of Commissioners is the corporate secretary function.

The Induction Program includes:

1. Governance Mechanism of the Board of Commissioners & the Board of Directors of PT Brantas Abipraya (Persero) Articles of Association
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies
3. Regulations related to the Board of Commissioners and the Board of Commissioners Organs.
4. SOE Minister Regulation Number: PER-01/MBU/2011 concerning Good Corporate Governance implementation in State-Owned Enterprises as amended by SOE Minister Regulation No. PER-09/MBU/2012.
5. Board Manual Book, GCG Guidelines, Corporate Culture, and Code of Conduct.

Komisaris baru juga aktif mengikuti forum-forum yang diselenggarakan oleh Perusahaan, baik yang berskala nasional serta Internasional. Selama tahun 2023 terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris, sehingga diadakan program pengenalan Komisaris baru pada tanggal 28 Februari 2023.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Pemahaman terhadap aktivitas dan proses bisnis Perseroan harus selalu diingat oleh setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan. Hal ini penting agar dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris tidak ragu dan salah dalam mengambil keputusan dikarenakan ketidakpahaman atas proses bisnis perusahaan.

Perseroan menyediakan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris di lingkungan Perseroan agar proses adaptasi ke dalam lingkungan Perseroan berlangsung lancar. Untuk mendorong implementasi program ini berjalan secara efektif, maka program ini harus dijalankan dan dipatuhi secara berkelanjutan.

The new Commissioner also actively participates in forums organized by the Company, both national and international. During 2023 there was a change in the composition of the Board of Commissioners, so an introduction program for new Commissioners was held on February 28, 2023.

COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Understanding the Company's business activities and processes must always be kept in mind by every member of the Company's Board of Commissioners. This is important so that in carrying out its duties, the Board of Commissioners does not hesitate and make wrong decisions due to incomprehension of the company's business processes.

The Company provides orientation programs for members of the Board of Commissioners within the Company so that the adaptation process to the Company's environment runs smoothly. To encourage effective implementation of this program, it must be implemented and adhered to on an ongoing basis.

Pelaksanaan Pelatihan Dewan Komisaris

Implementation of the Board of Commissioners Training

No	Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan Training	Waktu Time
1	Haryadi	Komisaris Utama/ Independen President/ Independent Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> · Sertifikasi Manajemen Risiko · Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN · ESG of Boards–Governance of ESG · GRC Integrated Information For Supervisory Board · Joint Venture Between SOE and Private Sector · CG Methodology and Enviromental and Social Management Systems · Risk Management Certification · Socialization of SOE Ranking & SOE Subsidiaries · ESG of Boards–Governance of ESG · GRC Integrated Information for Supervisory Board · Joint Venture Between SOE and Private Sector · CG Methodology and Enviromental and Social Management Systems 	<ul style="list-style-type: none"> · 26 Juli 2023 · 14 September 2023 · 28 September 2023 · 5 Oktober 2023 · 19 Oktober 2023 · 25 Oktober 2023 · July 26, 2023 · September 14, 2023 · September 28, 2023 · October 5, 2023 · October 19, 2023 · October 25, 2023
2	Imam Haryono	Komisaris Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> · Sertifikasi Manajemen Risiko · ESG of Boards–Governance of ESG · Introduction to ESG & IFC Performance Standard · GRC Integrated Information For Supervisory Board · Pre IPO dan Post IPO · Joint Venture Between SOE and Private Sector · Pemeringkatan & Penerbitan efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) · Risk Management effectiveness Evaluation · CG Methodology and Enviromental and Social Management Systems · Risk Management Certification · ESG of Boards–Governance of ESG · Introduction to ESG & IFC Performance Standard · GRC Integrated Information for Supervisory Board · Pre IPO dan Post IPO · Joint Venture Between SOE and Private Sector · Rating & Issuance of Debt and Sukuk (Efek Bersifat Utang dan Sukuk: EBUS) securities · Risk Management effectiveness Evaluation · CG Methodology and Enviromental and Social Management Systems 	<ul style="list-style-type: none"> · 26 Juli 2023 · 28 September 2023 · 16 Agustus 2023 · 5 Oktober 2023 · 10 Agustus 2023 · 19 Oktober 2023 · 10 Agustus 2023 · 7 September 2023 · 25 Oktober 2023 · July 26, 2023 · September 28, 2023 · August 16, 2023 · October 5, 2023 · August 10, 2023 · October 19, 2023 · August 10, 2023 · September 7, 2023 · October 25, 2023

Pelaksanaan Pelatihan Dewan Komisaris

Implementation of the Board of Commissioners Training

No	Nama Name	Jabatan Position	Pelatihan Training	Waktu Time
3	Kenny Daryat Nanang	Komisaris Independen Independent Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> · Sertifikasi Manajemen Risiko · Sosialisasi Peningkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN · Introduction to ESG & IFC Performance Standard · GRC Integrated Information For Supervisory Board · Joint Venture Between SOE and Private Sector · Risk Management Effectiveness Evaluation · CG Methodology and Environmental and Social Management Systems · Risk Management Certification · Socialization of SOE Rating & SOE Subsidiaries · Introduction to ESG & IFC Performance Standard · GRC Integrated Information for Supervisory Board · Joint Venture Between SOE and Private Sector · Risk Management Effectiveness Evaluation · CG Methodology and Environmental and Social Management Systems 	<ul style="list-style-type: none"> · 13 Juli 2023 · 14 September 2023 · 16 Agustus 2023 · 5 Oktober 2023 · 19 Oktober 2023 · 7 September 2023 · 25 Oktober 2023 · July 13, 2023 · September 14, 2023 · August 16, 2023 · October 5, 2023 · October 19, 2023 · September 7, 2023 · October 25, 2023
4	Diana Kusumastuti	Komisaris Commissioner	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	26 Juli 2023 July 26, 2023
5	Tursandi Alwi	Komisaris Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> · Sertifikasi Manajemen Risiko · Sosialisasi Peningkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN · ESG of Boards-Governance of ESG · Joint Venture Between SOE and Private Sector · CG Methodology and Environmental and Social Management Systems · Risk Management Certification · Socialization of SOE Rating & SOE Subsidiaries · ESG of Boards-Governance of ESG · Joint Venture Between SOE and Private Sector · CG Methodology and Environmental and Social Management Systems 	<ul style="list-style-type: none"> · 13 Juli 2023 · 14 September 2023 · 28 September 2023 · 19 Oktober 2023 · 25 Oktober 2023 · July 13, 2023 · September 14, 2023 · September 28, 2023 · October 19, 2023 · October 25, 2023

BOARD CHARTER DEWAN KOMISARIS

Dewan komisaris Perseroan telah dilengkapi Pedoman Direksi dan Dewan komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan yang telah dikukuhkan dalam RUPS. Pedoman tersebut disusun berdasarkan peraturan dan perundang undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang dan dimutakhirkan secara berkala. Pedoman Direksi dan Dewan komisaris merupakan naskah yang telah disepakati Direksi dan Dewan komisaris dan wajib dijadikan pedoman atau rujukan dalam menjalankan tugas pokok

BOARD CHARTER BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners of the Company has been equipped with Guidelines for the Board of Directors and the Board of Commissioners in carrying out supervisory duties that have been confirmed in the GMS. The guidelines are prepared based on applicable laws and regulations and constantly reviewed and updated regularly. The Board of Directors and the Board of Commissioners Guidelines are texts that have been agreed upon by the Board of Directors and the Board of Commissioners and must be used

dan fungsi kerja masing-masing organ, agar meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ Perusahaan sejalan dengan penerapan asas-asas GCG untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan.

Pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris dalam *Board Manual*, mencakup:

- Fungsi Dewan Komisaris
 - Pernyataan Dewan Komisaris
 - Keanggotaan Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama
 - Independensi Dewan Komisaris
 - Etika Jabatan Dewan Komisaris
 - Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
- Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris
 - Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Rencana kerja Dewan komisaris Tahun 2023 telah direalisasikan melalui berbagai kegiatan, meliputi:

1. Melakukan telaah serta arahan Dewan komisaris terkait dengan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko.
2. Melakukan pengawasan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya tentang manajemen karir di Perusahaan, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan demosi di Perusahaan.
3. Dewan komisaris melalui komite Audit melakukan pengawasan mengenai kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4. Melakukan pengawasan mengenai kepatuhan perusahaan terhadap GCG dan seluruh perjanjian serta komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RKAP mencakup program kerja (inisiatif Perusahaan) dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP.

as guidelines or references in carrying out the core duties and work functions of each organ, to improve the quality and effectiveness of working relations between the Company's organs in line with the implementation of GCG principles to achieve the Company's Vision and Mission.

The guidelines for the Board of Commissioners' work procedures in the Board Manual include:

- Functions of the Board of Commissioners
- Board of Commissioners Statement
- Board of Commissioners Membership
- President Commissioner
- Independence of the Board of Commissioners
- Board of Commissioners Position Ethics
- Duties and Authorities of the Board of Commissioners
- Board of Commissioners Decision Making
- Accountability of the Board of Commissioners

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The work plan of the Board of Commissioners for 2023 has been realized through various activities, including:

1. Conduct reviews and directions from the Board of Commissioners related to the internal control system and risk management.
2. Supervise human capital management policies, especially regarding career management in the Company, systems, and procedures for promotion, mutation, and demotion.
3. The Board of Commissioners through the Audit Committee supervises accounting policies and prepares financial reports according to generally accepted accounting standards in Indonesia.
4. Supervise the company's compliance with GCG and all agreements and commitments made by the company with third parties.
5. Supervise the implementation of the RKAP, including work programs (Company initiatives) and budgets that have been stipulated in the RKAP.

6. Melakukan pengawasan terhadap transaksi atau tindakan dalam lingkungan kewenangan oleh Dewan komisaris/Dewan Pengawas yang terjadi pada tahun berjalan.
 7. Melakukan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan komisaris/Dewan Pengawas.
 8. Memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan Direksi.
6. Supervise transactions or actions within the authority environment by the Board of Commissioners/Supervisory Board that occur in the current year.
 7. Supervise the effectiveness of external and internal audits and review complaints related to the Company received by the Board of Commissioners/Supervisory Board.
 8. Approve the RKAP draft submitted by the Board of Directors.

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris

Board of Commissioners Working Visit

No	Lokasi Location	Tanggal Date
1	Proyek IKN Balikpapan Balikpapan IKN Project	9-11 Februari/ February 2023
2	Proyek IKN Balikpapan Balikpapan IKN Project	21-22 Februari/ February 2023
3	Proyek Itera Lampung Itera Lampung Project	2-3 Maret/ March 2023
4	Proyek Kesawan Medan Kesawan Medan Project	5-7 Maret/ March 2023
5	Proyek Mamuju dan Balikpapan Mamuju and Balikpapan Project	8-12 Mei/ May 2023
6	Proyek Jragung Jragung Project	2 Juni/ June 2023
7	Peresmian Lokananta Inauguration of Lokananta	3-4 Juni/ June 2023
8	Proyek Polimarin Polimarin Project	14-15 Juli/ July 2023
9	Proyek Sidan Sidan Project	18-19 Juli/ July 2023
10	Hangzou China Hangzou China	24-29 September/ September 2023
11	Proyek IKN Balikpapan Balikpapan IKN Project	3-4 Oktober/ October 2023
12	Proyek IKN Balikpapan Balikpapan IKN Project	19-21 Oktober/ October 2023
13	Proyek IKN Balikpapan Balikpapan IKN Project	19-20 Oktober/ October 2023
14	Proyek Balikpapan Ground Breaking Ground Breaking Balikpapan IKN Project	31 Oktober/ October - 3 November/ November 2023
15	Polimarin Semarang Polimarin Semarang	15-16 November/ November 2023
16	Itera Lampung Itera Lampung	24-25 November/ November 2023
17	Bendungan Jragung Jragung Dam	2-3 Desember/ December 2023
18	Bulango Gorontalo Bulango Gorontalo	5-6 Desember/ December 2023
19	Proyek Bendungan Keureuto Aceh Aceh Keureuto Dam Project	29 Desember/ December 2023 -1 Januari/ January 2024

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Dewan Komisaris bertindak independen dan bebas intervensi dari pihak manapun. Perseroan juga memiliki minimal 1 orang Komisaris Independen dari total empat orang anggota komisaris pada kepengurusan terakhir, atau 30% dari total anggota, yang berarti telah memenuhi peraturan perundangan yang berlaku. Komisaris Independen Perseroan tidak pernah memiliki hubungan usaha apapun maupun hubungan afiliasi dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi maupun anggota Komisaris lainnya sampai dengan hubungan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda. Dengan demikian, Dewan Komisaris dapat bertindak independen dalam mengambil keputusan.

Komitmen independensi Dewan Komisaris juga diwujudkan melalui "Surat Pernyataan" yang ditandatangani oleh masing-masing Dewan Komisaris di atas materai. Dalam "Surat Pernyataan" tersebut, memuat pernyataan:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
4. Tidak pernah dinyatakan pailit
5. Tidak pernah menjadi Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
6. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
7. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
8. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
9. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.

INDEPENDENCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

All members of the Board of Commissioners act independently and free of intervention from any party. The Company also has at least 1 Independent Commissioner out of four commissioners in the last management, or 30% of the total members, which means it has complied with applicable legislation. Independent Commissioner has never had any business relation or affiliation and family relation with members of the Board of Directors or other members of the Board of Commissioners up to the third-degree relation, either according to a straight line or sideways or temporary relation. Thus, the Board of Commissioners can act independently in making decisions.

The commitment to the independence of the Board of Commissioners is also manifested through a "Statement Letter" signed by each Board of Commissioners on a stamp duty. In the "Affidavit", it contains the statement:

1. Have good morals and integrity.
2. Capable of doing legal deeds.
3. Within 5 (five) years before the appointment and during office:
4. Never declared bankrupt
5. Never been a Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt
6. Never been convicted of committing a criminal offense that harms state finances and/or is related to the financial sector
7. Has never been a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners
8. Commit to comply with legislation.
9. Does not have shares either directly or indirectly in the Company.

10. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan.
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Pada tahun 2023, seluruh anggota Dewan Komisaris telah menandatangani "Surat Pernyataan" tersebut.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Misi Komisaris Independen adalah mendorong terciptanya iklim yang lebih obyektif dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan stakeholder sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris. Beberapa hal berkenaan dengan Komisaris Independen, mencakup:

- Komisaris Independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik di dalam Perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.
- Komisaris Independen berjumlah paling kurang 30% (tiga puluh per seratus) dari jajaran anggota Dewan Komisaris.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, maka Komisaris Independen secara proaktif mengupayakan

10. Has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or major shareholders of the Company.
11. Does not have a business relation either directly or indirectly related to the Company's business activities.

In 2023, all members of the Board of Commissioners have signed the "Statement Letter".

INDEPENDENT COMMISSIONER

An Independent Commissioner is a Member of the Board of Commissioners who is not affiliated with the Board of Directors, other Members of the Board of Commissioners, and controlling Shareholders, and is free from business or other relations that may affect his ability to act independently or act solely in the interests of the company.

The mission of the Independent Commissioner is to encourage the creation of a more objective climate and place fairness among various interests, including the interests of the company and the interests of stakeholders as the core principle in decision-making by the Board of Commissioners. Some matters relating to the Independent Commissioner include:

- The Independent Commissioner has the core responsibility to encourage the implementation of good corporate governance principles within the Company by empowering the Board of Commissioners to be able to carry out supervisory duties and provide advice to the Board of Directors effectively and provide more added value to the company.
- Independent Commissioners shall amount to at least 30% of the members of the Board of Commissioners.

To carry out its responsibilities properly, the Independent Commissioners proactively seek to have the Board of Commissioners supervise and

agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi yang terkait dengan, namun tidak terbatas, pada hal-hal sebagai berikut:

- Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektivitas strategi tersebut
- Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manager-manager professional
- Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang berjalan secara efektif
- Memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
- Memastikan prinsip-prinsip dan praktik GCG dipatuhi dan diterapkan dengan baik
- Memastikan pengawasan dan pengelolaan perusahaan dilaksanakan dalam kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku.

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

Anggota Dewan Komisaris Perseroa telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 Tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN yaitu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris harus merupakan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini adalah 4 (empat) orang, 1 (satu) orang diantaranya atau sama dengan 25% anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Dengan demikian, komposisi tersebut juga telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan mengenai Komisaris Independen.

provide advice to the Board of Directors related to, but not limited to, the following:

- Ensure that the company has an effective business strategy, including monitoring the schedule, budget, and effectiveness of the strategy
- Ensure that the company appoints professional executives and managers
- Ensure that the company has information, control systems, and audit systems that run effectively
- Ensure risks and potential crises are always identified and managed properly.
- Ensure GCG principles and practices are adhered to and implemented properly
- Ensure that the supervision and management of the company are carried out in compliance with all applicable regulations.

CRITERIA FOR DETERMINING INDEPENDENT COMMISSIONERS

Members of the Board of Commissioners of the Company have fulfilled the number, composition, criteria, and independence according to the Regulation of the State Minister of SOEs Number: PER-01/MBU/2011, dated August 1, 2011, concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs as last amended through the Regulation of the Minister of SOEs Number: PER-09/MBU/2012, dated July 6, 2012, concerning Amendments to the Regulation of the Minister of SOEs Number: PER-01/MBU/2011, concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs, namely at least 20% (twenty percent) of the members of the Board of Commissioners must be Independent Commissioners. The current number of members of the Board of Commissioners is 4 (four) people, 1 (one) of whom, or equal to 25% of the Board of Commissioners members, are Independent Commissioners. Thus, the composition is also according to the regulations stipulated regarding Independent Commissioners.

KRITERIA DAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu :

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan yang terafiliasi dengan Perusahaan
3. Tidak bekerja pada pemerintah termasuk departemen, lembaga dan kemiliteran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir
4. Tidak bekerja di Perusahaan atau afliasinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir
5. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Perusahaan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada Perusahaan dan afliasinya
6. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perusahaan.

KOMISARIS INDEPENDEN DAN INDEPENDENSINYA

Komisaris Independen Abipraya adalah Bapak Haryadi yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama/Independen. Komisaris Independen berfungsi menjamin terlaksananya mekanisme check and balances. Independensi dari Komisaris Independen berkontribusi penting dalam pengambilan keputusan Dewan Komisaris karena memiliki pandangan yang objektif dalam menilai kinerja Direksi.

Perseroan menjamin independensi Komisaris Independen Perseroan. Komisaris Independen yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama

CRITERIA AND INDEPENDENCE OF INDEPENDENT COMMISSIONER

The Company's Independent Commissioners have met the established criteria, namely:

1. Does not have financial, management, shareholding, and/or family relations with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or Controlling Shareholders or relations with the relevant SOEs, which may affect its ability to act independently.
2. Does not serve as a Board of Directors in a company affiliated with the Company
3. Not working for the government, including departments, institutions, and military within the last 3 (three) years
4. Not working in the Company or its affiliates within the last 3 (three) years
5. Has no financial relation, either directly or indirectly, with the Company or companies that provide services and products to the Company and its affiliates
6. Free from interests and other business activities or relations that may hinder or interfere with the ability of the Board of Commissioners to act or think freely within the scope of the Company.

INDEPENDENT COMMISSIONER AND HIS INDEPENDENCE

The Independent Commissioner of Abipraya is Mr. Haryadi who also serves as President/Independent Commissioner. The Independent Commissioners serve to ensure the implementation of the check and balance mechanism. The independence of the Independent Commissioner contributes significantly to the decision-making of the Board of Commissioners because it has an objective view in assessing the performance of the Board of Directors.

The Company guarantees the independence of the Company's Independent Commissioner. The Independent Commissioner, who also serves as

Perseroan tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Kriteria penentuan komisaris Independen, antara lain:

1. Tidak memiliki keterkaitan financial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan atau Perseroan yang menyediakan jasa dan produk kepada Abipraya dan afiliasinya;
2. Tidak bekerja kepada Pemerintah termasuk departemen, lembaga dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Tidak menjabat sebagai Direksi di Perseroan yang terafiliasi dengan Brantas Abipraya;
3. Tidak bekerja di Perseroan atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
4. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan anggota Komisaris independen untuk bertindak atau berpikir secara bebas.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam rangka mendukung serta membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi memberi arahan, kontrol atau melakukan pengawasan, dan memberikan persetujuan, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-Komite yang terdiri dari Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko.

Dalam pelaksanaan fungsinya, komite telah dilengkapi dengan pedoman kerja yang tertuang dalam Piagam Komite dan program kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dalam satu tahun. Selama tahun 2023 Dewan

President Commissioner of the Company does not have financial and family relations up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or Controlling Shareholders, or relations that may affect his ability to act independently.

The criteria for determining the independent commissioner include:

1. Has no financial relation, either directly or indirectly with the Company or the Company that provides services and products to Abipraya and its affiliates;
2. Not working for the Government, including departments, agencies, and the military in the last three years. Does not serve as a Board of Directors in a Company affiliated with Brantas Abipraya;
3. Not employed by the Company or its affiliates in the last three years;
4. Free from interests and other business activities or relations that may impede or interfere with the ability of independent Commissioners to act or think freely.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS COMMITTEE AND THE BASIS FOR ITS ASSESSMENT

To support and assist the Board of Commissioners in carrying out the functions of directing, controlling or supervising, and giving approvals, according to its authority and responsibility, the Board of Commissioners is assisted by Committees consisting of the Audit Committee and the Risk Management Committee.

In carrying out its functions, the committee has been equipped with work guidelines contained in the Committee Charter and work programs as a reference in the implementation of duties in one year. During 2023, the Board of Commissioners

Komisaris menilai peran, fungsi serta rekomendasi yang diberikan komite telah sangat efektif berkontribusi dalam membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat.

Sekretaris Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris Perseroan dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara adalah membantu tugas-tugas Dewan Komisaris yang bersifat teknis administratif, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun Rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris dan Anggaran Dewan Komisaris;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta oleh Dewan Komisaris;
7. Selaku Pimpinan Sekretariat mempunyai kewajiban lainnya yaitu:
 - a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;

assesses that the roles, functions, and recommendations provided by the committee have been very effective in contributing to assisting the Board of Commissioners in the implementation of supervisory and advisory functions.

Secretary of the Board of Commissioners

In carrying out its duties, the Board of Commissioners of the Company is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners.

Duties of Secretary of the Board of Commissioners

The duties of the Secretary of the Board of Commissioners as stipulated in the provisions of Article 4 Paragraph (1) and Paragraph (2) of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER12/MBU/2012, dated August 24, 2012, concerning the Supporting Organs of the Board of Commissioners of State-Owned Enterprises are to assist the duties of the Board of Commissioners of an administrative technical nature, including the following:

1. Prepare meetings, including briefing sheets of the Board of Commissioners;
2. Make minutes of meetings of the Board of Commissioners according to the provisions of the Company's Articles of Association;
3. Administering the Board of Commissioners' documents, both incoming letters, minutes of meetings, and other documents;
4. Prepare the Draft Work Plan and Budget of the Board of Commissioners;
5. Prepare draft reports of the Board of Commissioners and Budget of the Board of Commissioners;
6. Carry out other duties requested by the Board of Commissioners;
7. The Head of the Secretariat has other obligations, namely:
 - a. Ensure that the Board of Commissioners complies with legislation and implements GCG principles;

- b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
- c. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
- d. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

- b. Provide information required by the Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested;
- c. Coordinate members of the Committee, if necessary to expedite the duties of the Board of Commissioners;
- d. As a liaison officer of the Board of Commissioners with other parties.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners Secretary



Lahir di Semarang pada tanggal 24 September 1990 merupakan warga negara Indonesia berusia 33 tahun yang berdomisili di Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana jurusan Administrasi Bisnis di Universitas Diponegoro, Magister Manajemen di Universitas Bandar Lampung. Titus Laksa Gumilang menjabat Sekretaris Dewan Komisaris sejak 2022 di PT Brantas Abipraya (Persero) dengan riwayat jabatan sebelumnya sebagai Sekretaris Dewan Komisaris di PT Surabaya Industrial Estate Rungkut pada Tahun 2020-2022, dan sebagai Staf Dewan Komisaris di PT Len Industri (Persero) pada Tahun 2019-2020. Saudara Titus Laksa Gumilang juga merupakan Analis kinerja BUMN di kementerian BUMN sejak Tahun 2017.

Born in Semarang on September 24, 1990, a 33-year-old Indonesian citizen domiciled in Jakarta. He completed his undergraduate education, majoring in Business Administration at Universitas Diponegoro and Master of Management at Universitas Bandar Lampung. Titus Laksa Gumilang has served as Secretary of the Board of Commissioners since 2022 at PT Brantas Abipraya (Persero) with a history of previous positions at PT Surabaya Industrial Estate Rungkut in 2020-2022 and as Staff of the Board of Commissioners at PT Len Industri (Persero) in 2019-2020. Titus Laksa Gumilang has been a SOE performance analyst at the SOE ministry since 2017.

DIREKSI

Board of Directors

Direksi merupakan organ utama dalam tata kelola Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan, untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan secara kolektif melakukan pengelolaan Perusahaan serta melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Direksi Perseroan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam mengelola Perusahaan setiap tahun kepada Pemegang saham di dalam RUPS. Pertanggungjawaban Direksi pada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh RUPS Perusahaan melalui proses pencalonan berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN PER-7/MBU/09/2022 Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Pengangkatan anggota Direksi Perusahaan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. Direksi yang akan diangkat harus lulus dalam *fit & proper test* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan GCG.

The Board of Directors is the main organ in corporate governance that is authorized and responsible for the management of the Company, for the benefit of the Company, according to the aims and objectives of the Company, and represents the Company, both inside and outside the court according to the provisions of the articles of association and collectively manages the Company and implements GCG at all levels of the organization.

The Board of Directors of the Company is responsible for its duties implementation in managing the Company every year to the Shareholders at the GMS. The accountability of the Board of Directors at the GMS is a manifestation of accountability for the management of the Company according to GCG principles.

COMPOSITION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The appointment of members of the Board of Directors is carried out by the Company's GMS through a nomination process based on guidelines regulated in the Regulation of the Minister of SOEs PER-7/MBU/09/2022 Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-11/MBU/07/2021 concerning Requirements, Procedures for Appointment, and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises. The appointment of members of the Company's Board of Directors is carried out based on the principles of Good Corporate Governance, namely professionalism, transparency, independence, accountability, accountability, and fairness. Directors to be appointed must pass the *fit & proper test* according to applicable legislation and GCG provisions.

Direksi Perseroan pada akhir tahun buku berjumlah 5 (lima) dan salah satunya ditunjuk sebagai Direktur utama, sehingga jumlah dan komposisi Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan yang terdapat pada *Board Manual*. Masa jabatan Direksi Perseroan adalah sejak penutupan RUPS pengangkatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 setelah anggota Direksi tersebut memangku jabatan sebagai Direksi (dalam 1 periode jabatan).

The Company's Board of Directors at the end of the financial year numbered 5 (five), and one of them was appointed as President Director so that the number and composition of the Board of Directors had fulfilled the provisions contained in the Board Manual. The tenure of the Board of Directors of the Company is from the closing of the GMS appointment until the closing of the 5th Annual GMS after the member of the Board of Directors assumes the position of Board of Directors (within 1 tenure).

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Sugeng Rochadi	Direktur Utama President Director	SK-231/MBU/07/2021
Suradi	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	SK-82/MBU/04/2017
Tumpang Muhammad	Direktur SDM dan Umum Director of HC and General Affairs	SK-238/MBU/10/2022
Muhammad Toha Fauzi	Direktur Operasi I Director of Operations I	SK-231/MBU/07/2021
Purnomo	Direktur Operasi II Director of Operations II	SK-231/MBU/07/2021

MASA JABATAN DIREKSI

Masa jabatan Direksi Perseroan yaitu lima tahun sejak diangkat. Penetapan masa jabatan tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang pengangkatan masing-masing anggota Direksi. Namun demikian, hal tersebut tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan jabatan anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab secara umum dan secara khusus. Secara umum, Direksi memimpin, mengurus, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan perusahaan, dan berusaha dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas Perseroan. Dalam menjalankan perusahaan, Direksi wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

TENURE OF THE BOARD OF DIRECTORS

The tenure of the Board of Directors is five years from the date of appointment. The determination of the tenure is contained in the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises regarding the appointment of each member of the Board of Directors. However, this does not reduce the right of the GMS to dismiss the position of members of the Board of Directors at any time before their tenure ends.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

The Board of Directors has duties and responsibilities in general and in particular. In general, the Board of Directors leads, manages, and controls the Company according to the company's objectives, and strives to improve the Company's efficiency and effectiveness. In running the company, the Board of Directors must follow the prevailing legislation and the Company's Articles of Association.

Direksi bertanggung jawab dalam memenuhi KPI secara jelas, lengkap, dan berimbang, baik dari aspek keuangan maupun non keuangan untuk menentukan pencapaian misi dan tujuan Perseroan, serta melaksanakan RJPP dan RKAP dengan penuh tanggung jawab. Direksi juga harus memastikan penerapan GCG di seluruh bagian perusahaan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING DIREKSI

Direktur Utama

Berwenang memimpin dan mengkoordinasi anggota-anggota Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan dan memabawahi satuan Pengawasan Intern, sekretaris Perusahaan dan Departemen QHSSE.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Membidangi serta memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang/fungsi keuangan, Manajemen Risiko, Manajemen Teknologi Informasi dan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pengendalian anak Perusahaan dan perusahaan terafiliasi sesuai dengan lingkup kewenangannya, bersama-sama dengan Direktur Operasi I bertindak sebagai Pembina PT Brantas Energi.

Dalam tugasnya, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, membawahi Departemen Keuangan dan Departemen Pengembangan Bisnis.

Direktur SDM dan Umum

Membidangi serta memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang/fungsi sumber Daya Manusia, *Good Corporate Governance* (GCG), memantau dan menjaga agar kegiatan usaha perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga, legal korporasi, rumah tangga dan Perkantoran, Program Tanggung Jawab Sosial

The Board of Directors is responsible for fulfilling KPIs in a clear, complete, and balanced manner, both from financial and non-financial aspects to determine the achievement of the Company's mission and objectives, as well as implementing RJPP and RKAP responsibly. The Board of Directors must also ensure the implementation of GCG in all parts of the company.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF EACH DIRECTOR

President Director

Authorize to lead and coordinate the members of the Board of Directors in carrying out the company's business activities and supervise the Internal Control unit, Corporate Secretary, and QHSSE Department.

Director of Finance and Risk Management

In charge and has authority and responsibility in the fields/functions of finance, Risk Management, Information Technology Management, and BPK Audit, Control of subsidiaries and affiliated companies according to the scope of their authority, together with Director of Operations I acts as Supervisors of PT Brantas Energi.

In his duties, the Director of Finance and Risk Management oversees the Finance Department and Business Development Department.

Director of HC and General Affairs

In charge and has authority and responsibility in the fields/functions of Human Capital, Good Corporate Governance (GCG), monitors and maintains that the company's business activities do not deviate from applicable regulations, monitors and maintains company compliance with all agreements and commitments made by the company with third parties, corporate legal, household and offices, The Social and Environmental Responsibility Program (TJSL),

dan Lingkungan (TJSL), Pengendalian anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi sesuai dengan lingkup kewenangannya, bertindak sebagai pembina PT Brantas Enjinerig Konsultan. Dalam tugasnya, Direktur SDM dan Umum membawahi Departemen *Human Capital* dan Departemen Pengembangan Bisnis.

Direktur Operasi I

Membidangi serta memiliki wewenang dan tanggung jawab dibidang/fungsi Pemasaran, Pengembangan Bisnis, Perencanaan dan Pengendalian Produksi Proyek dan Pengelolaan Peralatan Proyek/Produksi, Proyek Investasi dan konsesi, Pelaksanaan harian *Quality, Health, Security, Safety* dan *Environment System* (QHSSE) diwilayah kerja Direktorat Operasi I, Pengendalian anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi sesuai dengan lingkup kewenangannya, bersama-sama dengan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko bertindak sebagai pembina PT Brantas Energi. Dalam tugasnya, Direktur Operasi I membawahi Departemen Pemasaran, Departemen Produksi, Departemen Pengembangan Bisnis, Divisi Operasi 2 dan Divisi Operasi 3.

Direktur Operasi II

Membidangi serta memiliki wewenang dan tanggung jawab dibidang/fungsi Pemasaran, Pengembangan Bisnis, Perencanaan dan Pengendalian Produksi Proyek dan Pengelolaan Peralatan Proyek/Produksi, Proyek Investasi dan konsesi, legal litigasi, Pelaksanaan harian *Quality, Health, Security, Safety* dan *Environment System* (QHSSE) diwilayah kerja Direktorat Operasi II dan Koordinator *Project Management Office* (PMO) klaster BUMN karya, Pengendalian anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi sesuai dengan lingkup kewenangannya, bertindak sebagai pembina PT Guna Rogate Indah dan PT Graha Investama Bersama.

Control of subsidiaries and affiliated companies according to the scope of their authority, acts as a supervisor of PT Brantas Enjinerig Konsultan. In his duties, the Director of HC and General Affairs is in charge of the Human Capital Department and the Business Development Department.

Director of Operations I

Responsible and has authority and responsibility in the fields/functions of Marketing, Business Development, Project Production Planning and Control and Management of Project/Production Equipment, Investment Projects and concessions, Daily implementation of *Quality, Health, Security, Safety* and *Environment System* (QHSSE) in the working area of the Directorate of Operations I, Control of subsidiaries and affiliated companies according to the scope of their authority, together with the Director of Finance and Risk Management acts as supervisors of PT Brantas Energi. In his duties, Director of Operations I is in charge of the Marketing Department, Production Department, Business Development Department, Operations Division 2, and Operations Division 3.

Director of Operations II

Responsible and has authority and responsibility in the fields/functions of Marketing, Business Development, Project Production Planning and Control and Management of Project/Production Equipment, Investment Projects and concessions, legal litigation, Daily implementation of *Quality, Health, Security, Safety* and *Environment System* (QHSSE) in the Directorate of Operations II work area and Project Management Office Coordinator of BUMN (SOE) karya cluster, Control subsidiaries and affiliated companies according to the scope of their authority, acting as supervisors of PT Guna Rogate Indah and PT Graha Investama Bersama.

Dalam tugasnya, Direktur Operasi II membawahi Departemen Pemasaran, Departemen Produksi, Departemen Pengembangan Bisnis, Divisi Operasi I dan unit Peralatan, Precast & Properti.

In his duties, the Director of Operations II is in charge of the Marketing Department, Production Department, Business Development Department, Operations Division I and Equipment, Precast & Property units.

RAPAT DAN KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI

Selama tahun 2023, Perseroan mencatat terdapat 26 (dua puluh enam) kali pertemuan internal yang dilaksanakan oleh Direksi. Di sisi lain, Direksi juga bergabung dengan Dewan Komisaris untuk membahas kinerja perusahaan dan evaluasi lainnya dalam rapat gabungan yang diadakan sebanyak 12 (dua belas) kali di tahun 2023. Agenda rapat gabungan telah disajikan dalam Bab Dewan Komisaris dalam laporan ini.

MEETINGS AND ATTENDANCE OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

During 2023, the Company recorded 26 (twenty-six) internal meetings held by the Board of Directors. On the other hand, the Board of Directors also joins the Board of Commissioners to discuss the company's performance and other evaluations in joint meetings held 12 (twelve) times in 2023. The agenda of the joint meeting has been presented in the Chapter of the Board of Commissioners in this report.

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Internal Meeting			Rapat Gabungan Join Meeting		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	%	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Attendance	%
Sugeng Rochadi	Direktur Utama President Director	26	25	96,15	12	12	100
Suradi	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	26	26	100	12	10	83,33
Tumpang Muhammad	Direktur SDM dan Umum Director of HC and General Affairs	26	26	100	12	10	83,33
Muhammad Toha Fauzi	Direktur Operasi I Director of Operations I	26	26	100	12	11	91,66
Purnomo	Direktur Operasi II Director of Operations II	26	26	100	12	11	91,66

Agenda Rapat Internal Direksi

Agenda of the Board of Directors' Internal Meeting

No	Hari Day	Tanggal Date	Agenda
1	Senin Monday	30-01-23	Kinerja BE, Suksesi BOD-1, Fasilitas Kendaraan Operasional BE Performance, BOD-1 Succession, Operational Vehicle Facilities
2	Senin Monday	06-02-23	Kandidat Ka. SPI dan SEKPER, LHKPN, Renovasi Lt. 6 Candidates Head of SPI and SEKPER, LHKPN, Renovation 6th Floor
3	Senin Monday	13-02-23	Kinerja Divisi 2, IHL, Promosi Jabatan, FGD PM Performance Division 2, IHL, Promotion, FGD PM

Agenda Rapat Internal Direksi

Agenda of the Board of Directors' Internal Meeting

No	Hari Day	Tanggal Date	Agenda
4	Senin Monday	20-02-23	KPBU SDA, Purnajabatan, Suksesi BE KPBU SDA, Retirement, BE Succession
5	Senin Monday	27-02-23	Rotasi BOD2, PMO, BAPP Proyek, IHL Rotation BOD2, PMO, BAPP Project, IHL
6	Senin Monday	13-03-23	Pemasaran, ERP, Keuangan Marketing, ERP, Finance
7	Senin Monday	12-06-23	Kinerja Divisi 2, IHL, PHT. Division 2 Performance, IHL, PHT
8	Senin Monday	19-06-23	Struktur Organisasi, Keuangan, Re-organisasi, Zonasi PM. Organizational Structure, Finance, Re-organization, PM Zoning
9	Senin Monday	26-06-23	HC, Divisi Operasi 2, HUT BA, CKJT HC, Operations Division 2, BA Anniversary, CKJT
10	Senin Monday	03-07-23	Pemasaran, IKN, Organisasi SCM, HC Marketing, IKN, SCM Organization, HC
11	Senin Monday	24-07-23	Bonus, Kebijakan HOPE, Aset Ekstra Comp Bonus, HOPE Policy, Extra Assets Comp
12	Senin Monday	01-08-23	Pelatihan PM, Tunjangan, Rekrut MT, Finalisasi KPI PM Training, Benefits, MT Recruitment, KPI Finalization
13	Senin Monday	14-08-23	Kenaikan Gaji, Operasional, IHL, Usulan Organisasi Salary Increase, Operations, IHL, Organization Proposal
14	Senin Monday	21-08-23	FnP calon Direktur CKJT, Konsep Gaji, Holding Company FnP candidate for CKJT Director, Salary Concept, Holding Company
15	Senin Monday	29-08-23	PMO, SDM, Usia Pensiun Pegawai PMO, HR, Employee Retirement Age
16	Senin Monday	09-10-23	Karir Pad, Permasalahan Operasi, PMO, Penyusunan RKAP 2024, Cash Flow Career Pad, Operating Issues, PMO, Preparation of RKAP 2024, Cash Flow
17	Senin Monday	24-10-23	FGD AKHLAK, RKT 2024, Evaluasi Pabrik Subang FGD AKHLAK, RKT 2024, Subang Factory Evaluation
18	Senin Monday	30-10-23	Pelaksanaan HUT, Cuti Bersama, Tunjangan Daerah Anniversary Implementation, Mass Leave, Regional Allowances
19	Senin Monday	20-11-23	Peningkatan Status, Pemenuhan Pejabat BOD-1 dan BOD-2, Pelaksanaan Vendor Gathering Status Improvement, BOD-1 and BOD-2 Official Fulfillment, Vendor Gathering Implementation
20	Senin Monday	27-11-23	Keuangan, Produksi, HC Finance, Production, HC
21	Senin Monday	04-12-23	Vendor Gathering, RKT 2024, POM, Organisasi Pemasaran, Transformasi HC Vendor Gathering, RKT 2024, POM, Marketing Organization, HC Transformation
22	Senin Monday	27-12-23	Tutup Buku, SDM 2024, GRI, Pemasaran 2024, Sertifikasi Proyek Close the Book, HC 2024, GRI, Marketing 2024, Project Certification

No	Tanggal Date	Agenda
1	02 Januari/ January 2023	Kinerja th 2022, Kinerja BE, HC, Hasil Usaha dan Cash Flow Performance 2022, BE Performance, HC, Operating Results and Cash Flow
2	09 Januari/ January 2023	Piutang, HC, RKT 2023 Receivables, HC, RKT 2023
3	16 Januari/ January 2023	RKT, Kinerja BE, RUPS RKAP, Renovasi Gedung, SDM RKT, BE Performance, RKAP GMS, Building Renovation, HR
4	24 Januari/ January 2023	Kualifikasi Tender, Kinerja Proyek, HC Tender Qualification, Project Performance, HC
5	30 Januari/ January 2023	Kinerja BE, Suksesi BOD-1, Fasilitas Kendaraan Operasional BE Performance, BOD-1 Succession, Operational Vehicle Facilities
6	06 Februari/ February 2023	Kandidat Ka. SPI dan SEKPER, LHKPN, Renovasi Lt. 6 Candidates Head of SPI and SEKPER, LHKPN, Renovation 6th Floor
7	13 Februari/ February 2023	Kinerja Divisi 2, IHL, Promosi Jabatan, FGD PM Division 2 Performance, IHL, Promotion, FGD PM
8	20 Februari/ February 2023	KPBU SDA, Purnajabatan, Suksesi BE KPBU SDA, Retirement, BE Succession
9	27 Februari/ February 2023	Rotasi BOD2, PMO, BAPP Proyek, IHL Rotation BOD2, PMO, BAPP Project, IHL
10	13 Maret/ March 2023	Pemasaran, ERP, Keuangan Marketing, ERP, Finance
11	12 Juni/ June 2023	Kinerja Divisi 2, IHL, PHT. Division 2 Performance, IHL, PHT
12	19 Juni/ June 2023	Struktur Organisasi, Keuangan, Re-organisasi, Zonasi PM. Organizational Structure, Finance, Re-organization, Zoning PM
13	26 Juni/ June 2023	HC, Divisi Operasi 2, HUT BA, CKJT HC, Operations 2 Division, BA Anniversary, CKJT
14	03 Juli/ July 2023	Pemasaran, IKN, Organisasi SCM, HC Marketing, IKN, SCM Organization, HC
15	24 Juli/ July 2023	Bonus, Kebijakan HOPE, Aset Ekstra Comp Bonus, HOPE Policy, Extra Assets Comp
16	01 Agustus/ August 2023	Pelatihan PM, Tunjangan, Rekrut MT, Finalisasi KPI PM Training, Benefits, MT Recruitment, KPI Finalization
17	14 Agustus/ August 2023	Kenaikan Gaji, Operasional, IHL, Usulan Organisasi Salary Increase, Operations, IHL, Organization Proposal
18	21 Agustus/ August 2023	FnP calon Direktur CKJT, Konsep Gaji, Holding Company FnP candidate for CKJT Director, Salary Concept, Holding Company
19	29 Agustus/ August 2023	PMO, SDM, Usia Pensiun Pegawai PMO, HR, Employee Retirement Age
20	09 Oktober/ October 2023	Karir Pad, Permasalahan Operasi, PMO, Penyusunan RKAP 2024, Cash Flow Career Pad, Operating Issues, PMO, Preparation of RKAP 2024, Cash Flow
21	24 Oktober/ October 2023	FGD AKHLAK, RKT 2024, Evaluasi Pabrik Subang FGD AKHLAK, RKT 2024, Subang Factory Evaluation
22	30 Oktober/ October 2023	Pelaksanaan HUT, Cuti Bersama, Tunjangan Daerah Anniversary Implementation, Mass Leave, Regional Allowances
23	20 November/ November 2023	Peningkatan Status, Pemenuhan Pejabat BOD-1 dan BOD-2, Pelaksanaan Vendor Gathering Status Improvement, Fulfillment of BOD-1 and BOD-2 Officials, Vendor Gathering Implementation
24	27 November/ November 2023	Keuangan, Produksi, HC Finance, Production, HC
25	04 Desember/ December 2023	Vendor Gathering, RKT 2024, POM, Organisasi Pemasaran, Transformasi HC Vendor Gathering, RKT 2024, POM, Marketing Organization, HC Transformation
26	27 Desember/ December 2023	Tutup Buku, SDM 2024, GRI, Pemasaran 2024, Sertifikasi Proyek Close the Book, HC 2024, GRI, Marketing 2024, Project Certification

BOARD CHARTER DIREKSI

Penyusunan pedoman tata tertib (*Board Manual*) merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan GCG secara konsisten, dalam rangka pengelolaan Perseroan untuk menjalankan misi dan mencapai visi yang telah ditetapkan. *Board Manual* adalah pedoman yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan tata kerja Direksi dan Dewan Komisaris serta proses hubungan fungsi antara Direksi, Dewan Komisaris, dan antara kedua organ Perseroan tersebut.

Board Manual merupakan salah satu *sofstructure* GCG, sebagai penjabaran dari pedoman tata kelola perusahaan yang mengacu pada anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Isi dari *Board Manual* harus dikaji secara berkala dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKSI TAHUN 2023

Selama 2023, Direksi Perseroan telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik. Selain pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan, Direksi Perseroan juga melakukan kunjungan ke proyek-proyek yang Abipraya kerjakan.

Sepanjang tahun 2023, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan sasaran dan tujuannya. Di antaranya, Direksi telah membuat keputusan-keputusan strategis dan mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk hal-hal berikut ini:

1. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk tahun buku 2022
2. Menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk tahun buku 2023

BOARD CHARTER BOARD OF DIRECTORS

The preparation of the Board Manual is a manifestation of the Company's commitment to implement GCG consistently, in the context of managing the Company to carry out the mission and achieve the vision that has been set. The Board Manual is a guideline that outlines matters relating to the working procedures of the Board of Directors and the Board of Commissioners and the process of functional relations between the Board of Directors, the Board of Commissioners, and between the two organs of the Company.

The Board Manual is one of the GCG soft structures, as an elaboration of corporate governance guidelines that refer to the articles of association and applicable legislation. The contents of the Board Manual must be reviewed periodically and adjusted to legislation.

IMPLEMENTATION OF THE BOARD OF DIRECTORS ACTIVITIES IN 2023

During 2023, the Board of Directors of the Company has performed its duties and responsibilities very well. In addition to the implementation of duties and responsibilities in managing the company, the Board of Directors also visited the projects that Abipraya worked on.

Throughout 2023, the Board of Directors has carried out its duties and responsibilities for the benefit of the Company according to its goals and objectives. Among other things, the Board of Directors has made strategic decisions and taken the necessary actions for the following:

1. Establish the Company's Work Plan and Budget for the 2022 financial year
2. Prepare the draft Company's Work Plan and Budget for the 2023 financial year

PROGRAM PENGENALAN DIREKSI BARU

Program pengenalan anggota Direksi baru wajib diberikan kepada anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya. Program pengenalan dilakukan dengan tujuan agar anggota Direksi tersebut memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi, proses bisnis Perseroan serta dapat bekerja selaras dengan organ Perseroan lainnya.

Program pengenalan dapat dilakukan berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya sesuai kebutuhan Perseroan. Program pengenalan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan Direktur bersangkutan dan pelaksanaannya merupakan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan. Kebijakan program pengenalan anggota Direksi yang baru tertuang dalam *Board Manual* Perseroan. Pada tahun 2023, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi.

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Program pengenalan Perusahaan kepada Dewan komisaris dan Anggota Direksi Baru pada organ Perusahaan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman Dewan komisaris dan Anggota Direksi Baru terhadap kondisi-kondisi yang ada dalam Perusahaan sehingga Dewan komisaris dan Anggota Direksi baru mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas Perusahaan baik secara organisasi maupun operasional. Pada tahun 2023 Direksi tidak mengikuti program pengembangan/pelatihan

NEW BOARD OF DIRECTORS INDUCTION PROGRAM

The induction program for new members of the Board of Directors must be given to members of the Board of Directors who are appointed for the first time. The induction program is carried out with the aim that members of the Board of Directors understand their duties and responsibilities as members of the Board of Directors and the Company's business processes and can work in harmony with other organs of the Company.

The induction program can be carried out of presentations, meetings, visits to the Company, and review of documents or other programs according to the needs of the Company. The induction program is carried out no later than 3 (three) months after the appointment of the Director concerned, and its implementation is the responsibility of the Corporate Secretary. The policy for the induction of new members of the Board of Directors is stated in the Company's Board Manual. In 2023, there will be no change in the composition of the Board of Directors.

TRAINING AND COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

The Company's induction program for the Board of Commissioners and New Board of Directors Members in the Company's organs is intended to provide an understanding of the Board of Commissioners and New Board of Directors members of the existing conditions in the Company so that the Board of Commissioners and new Board of Directors members get a comprehensive understanding of the Company both organizationally and operationally. In 2023, the Board of Directors will not participate in development/training programs

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Perseroan tidak memiliki komite apapun di bawah Direksi. Dalam rangka mengelola perusahaan dan menerapkan GCG, Direksi telah bersinergi dengan seluruh unit kerja dan Sekretaris Perusahaan.

HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki hubungan keluarga hingga derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. Selain itu, mayoritas Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali; dan pada saat yang sama, semua anggota Dewan Komisaris juga tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi.

Dengan status tersebut, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

The Company does not have any committees under the Board of Directors. To manage the company and implement GCG, the Board of Directors has synergized with all work units and the Corporate Secretary.

AFFILIATION RELATION OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS WITH THE BOARD OF DIRECTORS AND MAJOR AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

There are no members of the Board of Commissioners who have family relations up to the second degree with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Major Shareholders, and/or Controllers. In addition, the majority of the Board of Commissioners does not have a financial relation with the controlling shareholder; and at the same time, all members of the Board of Commissioners also have no financial relation with other members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.

With this status, members of the Board of Commissioners can act independently in carrying out their duties and responsibilities.

Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Family Relation with						Hubungan Keluarga dengan Family Relation with					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak Tidak	Ya Yes	Tidak Tidak	Ya Yes	Tidak Tidak	Ya Yes	Tidak Tidak	Ya Yes	Tidak Tidak	Ya Yes	Tidak Tidak
Dewan Komisaris Board of Commissioners												
Haryadi		x		x		x		x		x		x
Imam Haryono		x		x		x		x		x		x
Kenny Daryat Nanan		x		x		x		x		x		x
Diana Kusumastuti		x		x		x		x		x		x
Tursandi Allwi		x		x		x		x		x		x

Nama Name	Hubungan Keluarga dengan Family Relation with						Hubungan Keluarga dengan Family Relation with					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak Tidak	Ya Yes	Tidak Tidak	Ya Yes	Tidak Tidak	Ya Yes	Tidak Tidak	Ya Yes	Tidak Tidak	Ya Yes	Tidak Tidak
Direksi Board of Directors												
Sugeng Rochadi		x		x		x		x		x		x
Suradi		x		x		x		x		x		x
Tumpang Muhammad		x		x		x		x		x		x
Muhammad Toha Fauzi		x		x		x		x		x		x
Purnomo		x		x		x		x		x		x

KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DEWAN KOMISARIS

Perseroan secara berkala melakukan pemantauan, pencatatan, dan pembaharuan atas kepemilikan saham Dewan Komisaris dan anggota keluarganya dalam Daftar Khusus Kepemilikan Saham. Karena Perseroan merupakan BUMN yang tidak menjualbelikan sahamnya di Bursa Efek Indonesia maka seluruh saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Semua anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan yang menyalahi ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki jabatan rangkap pada entitas anak Brantas Abipraya. Jabatan rangkap Dewan Komisaris di luar Brantas Abipraya dapat dilihat pada tabel berikut:

SHARE OWNERSHIP BY THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Company periodically monitors, records, and updates the share ownership of the Board of Commissioners and its family members in the Special List of Share Ownership. Because the Company is a state-owned enterprise that does not buy and sell its shares on the Indonesia Stock Exchange, all of the Company's shares are owned by the Government of Indonesia.

CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

All members of the Board of Commissioners do not have concurrent positions that violate the provisions of the Minister of SOE Regulation No. PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

All members of the Board of Commissioners do not hold concurrent positions in subsidiaries of Brantas Abipraya. Concurrent positions of the Board of Commissioners outside Brantas Abipraya can be seen in the following table:

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris per 31 Desember 2023

Concurrent Positions of the Board of Commissioners as of December 31, 2023

Nama Name	Posisi di Brantas Abipraya Position in Brantas Abipraya	Posisi di Instansi Lain Positions in Other Agencies
Haryadi	Komisaris Utama/ Independen President/Independent Commissioner	UNAIR
Imam Haryono	Komisaris Commissioner	Tidak ada No
Kenny Daryat Nanang	Komisaris Independen Independent Commissioner	Tidak ada No
Tursandi Alwi	Komisaris Commissioner	Tidak ada No
Diana Kusumastuti	Komisaris Commissioner	Direktur Jendral Cipta Karya Director General of Cipta Karya

HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pengelolaan Perseroan Terbatas di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan UU tersebut Indonesia menganut sistem dual board (two-tier board) yaitu adanya pemisahan fungsi antara Dewan Komisaris yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dan Direksi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi menjalankan kewajibannya sesuai yang diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*) yang berlaku. Prinsip dasar hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah berdasarkan prinsip keterbukaan dan saling menghormati yang keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan visi, misi, nilai-nilai dan strategi perusahaan.

Hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ Perusahaan dapat bekerja sesuai fungsinya dengan efektif dan efisien. Untuk itu Perusahaan, dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan

THE WORKING RELATION BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The management of Limited Liability Companies in Indonesia refers to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Based on the Law, Indonesia adheres to a dual board (two-tier board) system, there is a separation of functions between the Board of Commissioners, which supervises and advises the Board of Directors, and the Board of Directors, that authorized and responsible for the management of the company. The Board of Commissioners and the Board of Directors carry out their obligations as mandated in the Articles of Association and applicable fiduciary responsibility. The basic principle of the working relation between the Board of Commissioners and the Board of Directors is based on the principles of openness and mutual respect, that have responsibility to maintain the Company's business continuity in the long term. Therefore, the Board of Commissioners and the Board of Directors must have the same vision, mission, values, and corporate strategy.

A good working relation between the Board of Commissioners and the Board of Directors is one of the most important things so that each organ of the Company can work according to its function effectively and efficiently. For this reason, the Company, in maintaining a good working relation between the Board of Commissioners

Direksi menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peranan Direksi dalam mengurus Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perseroan.
3. Dalam hal surat menyurat antara Direksi dan Dewan Komisaris harus menjelaskan maksud dan tujuan atas surat tersebut.
4. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan kelembagaan dalam arti bahwa Dewan Komisaris dan Direksi sebagai jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan anggotanya sehingga setiap hubungan kerja antara Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi harus diketahui oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya.

and the Board of Directors applies the following principles:

1. The Board of Commissioners respects the functions and roles of the Board of Directors in managing the Company as stipulated in legislation and the Company's Articles of Association.
2. The Board of Directors respects the function and role of the Board of Commissioners to supervise and advise on the Company's management policies.
3. In the case of correspondence between the Board of Directors and the Board of Commissioners, it must explain the purpose of the letter.
4. Every working relation between the Board of Commissioners and the Board of Directors is a formal relation, in the sense that it must always be based on a standard mechanism or correspondence that can be accounted for.
5. Any informal working relation can be carried out by each Member of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors but cannot be used as a formal policy before going through a mechanism or correspondence that can be accounted for.
6. Every working relation between the Board of Commissioners and the Board of Directors is an institutional relation in the sense that the Board of Commissioners and the Board of Directors as a collective position that represents all its members so that every working relation between Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors must be known by Members of the Board of Commissioners and other Members of the Board of Directors.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan komisaris merupakan bagian dari laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan. Pertanggungjawaban Dewan komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

Kinerja Dewan komisaris dievaluasi dengan kriteria yang ditetapkan dalam RUPS, meliputi: Aspek Perencanaan; Aspek Pengawasan dan nasehat; Aspek Pelaporan; Aspek Dinamis.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners in its function as a supervisor, submits a report on the accountability of supervision for the management of the Company by the Board of Directors. The supervisory report of the Board of Commissioners is part of the annual report submitted to the GMS for approval. The accountability of the Board of Commissioners to the GMS is a manifestation of supervisory for the management of the Company in the context of implementing GCG principles.

The performance of the Board of Commissioners is evaluated with the criteria set out in the GMS, including Planning aspects; Supervision and advisory aspects; Reporting aspects; and Dynamic aspects.

Pencapaian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2023

Achievement of the Board of Commissioners' Performance Assessment in 2023

No	Aspek & Parameter Aspects & Parameters	Rencana Plan		Realisasi Realization	
		KPI KPI	Bobot Weight	KPI KPI	Bobot Weight
I	Aspek Perencanaan Planning Aspect		10		10
1	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dekom tahun 2023 Preparing Work Plan and Budget and the Board of Commissioners' KPI in 2023	1	10	1	10
II	Aspek Pengawasan & Nasihat Supervision & Advice Aspect		60		
1	Memberikan Tanggapan/Rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap: Provide Feedback/Recommendations to Shareholders on:		15		
	a. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Company Budget Work Plan	1	5	1	5
	b. Laporan Tahunan Annual Report	1	5	1	5
	c. Analisis Kinerja Triwulanan Quarterly Performance Analysis	3	5	4	5
2	Memberikan nasihat kepada Direksi sesuai bidang tugas Dewan Komisaris Provide advice to the Board of Directors according to the Board of Commissioners' areas of duty	12	10	17	10
3	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting				
	a. Jumlah Rapat Number of Meetings	12	10	17	10
	b. Kehadiran Rapat Meeting Attendance	100%	5	100%	5

Pencapaian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2023

Achievement of the Board of Commissioners' Performance Assessment in 2023

No	Aspek & Parameter Aspects & Parameters	Rencana Plan		Realisasi Realization	
		KPI KPI	Bobot Weight	KPI KPI	Bobot Weight
	c. Penyelesaian Risalah Completion of Minutes	12	5	17	5
4	Rapat Komite Dewan Komisaris dengan Unit terkait Board of Commissioners Committee Meeting with related Units	5	5		5
5	Rekomendasi/Persetujuan Aksi Korporasi Recommendation/Corporate Action Approval	6	5	27	5
6	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Board of Commissioners Working Visit	3	5		5
III	Aspek Pelaporan Reporting Aspect		15		15
1	Laporan realisasi pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Report on the realization of KPI implementation of the Board of Commissioners	3	5	3	5
2	Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Report on the supervisory duties of the Board of Commissioners	1	10	1	10
IV	Aspek Dinamis Dynamic Aspect		15		15
1	Pengusulan Eksternal Auditor kepada Pemegang Saham External Auditor Proposal to Shareholders	1	4	1	4
2	Peningkatan kompetensi melalui seminar, workshop dan lain-lain Competency improvement through seminars, workshops, and others	4	4		4
3	Hasil Assessment GCG Dewan Komisaris oleh BPKP GCG Assessment Results of the Board of Commissioners by BPKP	85	4		4
4	Tanggapan terhadap tindak lanjut temuan auditor/SPI Response to follow-up auditor/SPI findings	1	3	1	3
	Total Bobot Total Weight		100		100

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian kinerja Direksi dilakukan secara kolegial maupun individual oleh Pemegang saham. Penilaian kinerja oleh pemegang saham dilakukan dalam RUPS Tahunan tentang laporan Pertanggungjawaban laporan keuangan. Indikator penilaian kinerja Direksi meliputi aspek sebagai berikut:

1. Pencapaian *Key Performance Indicators* (KPI) kontrak Manajemen tahun 2023;
2. Pencapaian kinerja Operasional dan keuangan tahun 2023;
3. Pelaksanaan implementasi GCG tahun 2023;

THE BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE APPRAISAL

The performance assessment of the Board of Directors is carried out collegially and individually by shareholders. Performance assessment by shareholders is carried out at the Annual GMS regarding financial report accountability reports. The Directors' performance assessment indicators include the following aspects:

1. Achievement of Key Performance Indicators (KPIs) of Management contracts in 2023;
2. Operational and financial performance achievements in 2023;
3. GCG implementation in 2023;

Key Performance Indicator (KPI) sebagai dasar evaluasi kinerja Tahun 2023 Direksi terdiri dari penilaian terkait aspek nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, kepemimpinan Teknologi, Pengembangan Investasi serta Pengembangan Talenta.

Key Performance Indicator (KPI) as the basis for performance evaluation in 2023, the Board of Directors consists of assessments related to aspects of economic and social value for Indonesia, Business Model Innovation, Technology leadership, Investment Development, and Talent Development.

Pencapaian Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2023

Achievement of the Board of Directors Performance Assessment in 2023

No	KPI	Skor Score
1	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia	48,62
2	Inovasi Modal Bisnis Business Model Innovation	10,12
3	Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership	10,78
4	Pengembangan Investasi Investment Development	11,52
5	Pengembangan Talenta Talent Development	19,30
Total	Total	100,35

KEBIJAKAN REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remuneration Policy for The Board of Commissioners and The Board of Directors

Prosedur penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Abipraya mengacu pada:

- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN;
- Perubahan terakhir dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-06/MBU/06/2018 tanggal 4 Juni 2018, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/BUMN/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Prosedur Penetapan dan Besaran Remunerasi Dewan Komisaris Penetapan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris ditetapkan setiap tahun dalam RUPS bersamaan dengan penetapan besaran remunerasi Direksi. Besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris diusulkan dalam RUPS, didasarkan atas capaian kinerja Dewan Komisaris. Dalam menyusun dasar penetapan dan rekomendasi besaran remunerasi yang kredibel, Pemegang Saham menggunakan database yang kuat dari survei pasar pada perusahaan sejenis dan sekelas Perseroan, kemudian menyusun beberapa faktor utama dalam mengusulkan besaran remunerasi Komisaris.

Dewan Komisaris menerima remunerasi tetap dan tidak tetap yang terdiri atas honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya yang dibayarkan/diberikan bulanan, serta tantiem

The procedure for determining remuneration for the Board of Commissioners and the Board Directors of Abipraya refers to:

- Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/MBU/2014, concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs;
- The latest amendment in the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-06/MBU/06/2018, dated June 4, 2018, concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-04/BUMN/MBU/2014, dated March 10, 2014, concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs.

Procedure for Determination and Amount of Remuneration of the Board of Commissioners. The determination of remuneration of members of the Board of Commissioners is determined annually at the GMS along with the determination of remuneration of the Board of Directors. The amount of remuneration for members of the Board of Commissioners is proposed at the GMS, based on the performance achievements of the Board of Commissioners. In preparing the basis for determining and recommending a credible remuneration, shareholders use a database of market surveys in similar companies, then compile several main factors in proposing the amount of remuneration of the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners receives fixed and non-fixed remuneration consisting of honorarium, allowances, and other facilities paid/given monthly, as well as tantiem as an

sebagai insentif kinerja tahunan, yang jumlahnya direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, dan diputuskan oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan.

STRUKTUR DAN PROSEDUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remunerasi untuk Dewan komisaris dan Direksi dapat berbeda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Jumlah total remunerasi yang diterima oleh anggota Dewan komisaris dan Direksi dilaporkan oleh perusahaan dalam RUPS. Demikian juga besaran tantiem yang diberikan kepada anggota Dewan komisaris maupun Direksi ditetapkan sesuai dengan kinerja Perseroan dan ketercapaian KPI untuk Dewan komisaris maupun Direksi. Penetapan remunerasi mengacu pada ketentuan sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER -13/ MBU/09/2021 Tentang Perubahan keenam atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri negara BUMN tersebut, prinsip penetapan penghasilan Dewan komisaris ditetapkan oleh RUPS, dimana komponen penghasilan Dewan komisaris terdiri dari:

1. Honorarium
2. Tunjangan
 - a. Tunjangan hari raya;
 - b. Asuransi Purna Jabatan;
 - c. Tunjangan Transportasi.
3. Fasilitas
 - a. fasilitas kesehatan;
 - b. Bantuan hukum.
4. Tantiem/Insentif kinerja.

annual performance incentive, the amount of which is recommended by the Nomination and Remuneration Committee and decided by the shareholders at the Annual GMS.

STRUCTURE AND PROCEDURE OF REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors may differ according to their duties and responsibilities. The total amount of remuneration received by members of the Board of Commissioners and the Board of Directors is reported in the GMS. Likewise, the amount of tantiem given to members of the Board of Commissioners and the Board of Directors is determined according to the Company's performance and the achievement of KPI for the Board of Commissioners and the Board of Directors. The determination of remuneration refers to the provisions as contained in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-13/MBU/09/2021, concerning the Sixth Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-04/MBU/2014, concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises. Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises, the principle of determining the income of the Board of Commissioners is determined by the GMS, where the income component of the Board of Commissioners consists of:

1. Honorarium
2. Allowances
 - a. Holiday allowance;
 - b. Retirement Insurance;
 - c. Transport Allowance.
3. Facilities
 - a. Health Facilities;
 - b. Legal Aid.
4. Tantiem/Performance incentives.

Prosedur ringkas penetapan remunerasi Dewan komisaris tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Pemegang Saham menyusun kriteria dasar penetapan remunerasi dengan memperhatikan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik negara nomor PER -13/MBU/09/2021 Tentang Perubahan keenam atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
- Dewan Komisaris menetapkan usulan remunerasi Direksi tahun 2023 yang akan disampaikan kepada Pemegang Saham.
- RUPS menetapkan memberi kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan pemegang saham untuk menetapkan besarnya tantiem tahun buku 2022 serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2023.

BESARAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-10/Wk.MBU.10/0/2023 tanggal 09 Agustus 2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan komisaris PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2023, dengan ini kami sampaikan penetapan penghasilan Direksi dan Dewan komisaris Tahun 2023 serta Tantiem atas kinerja Tahun Buku 2022 sebagai berikut:

Gaji/honorarium, Tunjangan, dan fasilitas

- a. Gaji Direktur utama ditetapkan sebesar Rp196.000.000/bulan dan gaji Anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur utama;

The brief procedure for determining the remuneration of the Board of Commissioners in 2023 is as follows:

- Shareholders prepare the basic criteria for determining remuneration by taking into account the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises number PER -13/MBU/09/2021 concerning the Sixth Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State Owned Enterprises.
- The Board of Commissioners determines the Board of Directors' remuneration proposal for 2023 which will be submitted to the Shareholders.
- The GMS stipulates to give authority and power to the Board of Commissioners by first obtaining shareholder approval to determine the amount of tantiem for the 2022 financial year and determine the salary/honorarium, allowances and facilities for the Board of Directors and the Board of Commissioners for 2023.

AMOUNT OF REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Based on the Decree of the Minister of SOEs Number SK-10/Wk.MBU.10/0/2023, dated August 9, 2023, concerning the Determination of the Income of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Brantas Abipraya (Persero) in 2023, we convey the determination of the income of the Board of Directors and the Board of Commissioners in 2023 and Tantiem on the performance of the 2022 Financial Year as follows:

Salary/honorarium, benefits, and facilities

- a. The salary of the President Director is set at IDR196,000,000/month and the salary of other Members of the Board of Directors is 85% of the salary of the President Director;

- b. Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari gaji Direktur utama, dan honorarium Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama;
- c. Tunjangan dan/atau fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris diberikan sebagaimana tabel terlampir. Direksi dan Dewan Komisaris dilarang untuk menerima jenis tunjangan dan/atau fasilitas lainnya di luar yang telah ditetapkan dalam surat ini;
- d. Gaji/honorarium serta tunjangan dan/ atau fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2023 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023.
- b. The honorarium of the president commissioner is set at 45% of the salary of the president director, and the honorarium of the board of commissioners is set at 90% of the honorarium of the president commissioner;
- c. Allowances and/or facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners are provided as the table attached. The Board of Directors and Board of Commissioners are prohibited from receiving other types of allowances and/or facilities beyond those stipulated in this letter;
- d. Salary/honorarium and allowances and/or facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners for 2023 are effective from January 1, 2023.

Nama Name	Jabatan Position	Gaji/Honorarium Tahun 2023 (Dalam Rupiah/Bulan) Salary/Honorarium Year 2023 (In Rupiah/Month)
Haryadi	Komisaris Utama/Independen President/Independent Commissioner	1.270.080.000
Imam Haryono	Komisaris Commissioner	1.143.072.000
Kenny Daryat Nanang	Komisaris Independen Independent Commissioner	1.143.072.000
Tursandi Alwi	Komisaris Commissioner	1.035.688.091
Diana Kusumastuti	Komisaris Commissioner	1.035.688.091
Sugeng Rochadi	Direktur Utama President Director	2.682.000.000
Suradi	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	2.329.200.000
Tumpang Muhammad	Direktur SDM dan Umum Director of Human Capital and General Affairs	2.329.200.000
Muhammad Toha Fauzi	Direktur Operasi I Director of Operations I	2.329.200.000
Purnomo	Direktur Operasi II Director of Operations II	2.329.200.000

Sedangkan total tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 ditetapkan sebesar Rp 8.849.000.000,- dengan ketentuan:

1. Direktur utama 100%
2. Anggota Direksi lainnya 85% dari Direktur Utama
3. Komisaris Utama 45% dari Direktur Utama
4. Anggota Dewan Komisaris 90% dari Komisaris Utama

INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI

Perseroan, melalui Dewan Komisaris, mempertimbangkan lima faktor utama dalam menetapkan usulan remunerasi Direksi, yakni:

- Imbalan jasa untuk menutupi biaya-biaya yang diperlukan dalam menjalankan usaha.
- Menghargai kompetensi dan pengalaman yang dimiliki dan dibutuhkan oleh Perseroan
- Ketersediaan waktu secara penuh dalam mencurahkan tenaga dan pikiran guna menjalankan tugas Perseroan.
- Kemampuan memitigasi risiko bagi Perseroan dan memberi imbalan terhadap tindakan kedinasan yang berisiko bagi pribadinya.
- Menghargai pencapaian target sesuai dengan ukuran kinerja utama (*Key Performance Indicator*) yang ditetapkan.

Meanwhile, the total tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners for Fiscal Year 2022 is set at IDR 8.849.000.000,- with the following conditions:

1. President Director 100%
2. Other members of the Board of Directors 85% of the President Director
3. President Commissioner 45% of President Director
4. Member of the Board of Commissioners 90% of the President Commissioner

REMUNERATION DETERMINATION INDICATORS

The Company, through the Board of Commissioners, considers five main factors in determining the proposed remuneration of the Board of Directors, namely:

- Service fees to cover the costs needed in running a business.
- Appreciate the competence and experience possessed and needed by the Company
- Full availability of time in devoting energy and thought to carry out the Company's duties.
- The ability to mitigate risks for the Company and reward official actions that are risky for their individuals.
- Reward the achievement of targets in accordance with the key performance measures (*Key Performance Indicators*) set.

KOMITE AUDIT

Audit Committee

Komite Audit menjalankan tugas berdasarkan mandat yang ditetapkan dengan keputusan Dewan komisaris. Tugas utama komite Audit adalah memberikan pendapat independen dan profesional kepada Dewan Komisaris berkenaan dengan kegiatan kepatuhan, efektivitas pelaksanaan tata kelola perusahaan, audit internal, audit eksternal dan pelaporan keuangan Abipraya.

KOMITE AUDIT

Komite Audit berfungsi sebagai organ pendukung yang membantu Dewan Komisaris, melaksanakan tugas monitoring, evaluasi, supervisi, dan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan. Pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara, dan Pasal 13 ayat (1);
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara.

The Audit Committee carries out its duties based on the mandate established by the decision of the Board of Commissioners. The core task of the Audit Committee is to provide independent and professional opinions to the Board of Commissioners regarding compliance activities, effectiveness of corporate governance implementation, internal audit, external audit, and financial reporting of Abipraya.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee functions as a supporting organ that assists the Board of Commissioners, carrying out the tasks of monitoring, evaluating, and supervising the management of the Company. Guidelines for the implementation of the work of the Audit Committee based on the Decree of the Minister of

1. State Owned Enterprises Number: 05/MBU/2006 dated December 20, 2006, concerning the Audit Committee for State-Owned Enterprises, and Article 13 paragraph (1);
2. Regulation of the State Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-12/MBU/2012, dated August 24, 2012, concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners of State-Owned Enterprises.

Susunan Keanggotaan Komite Audit

Composition of Audit Committee Membership

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Imam Haryono	Ketua Chairman	Nomor 04/DK/KPTS/V/2023 tanggal 03 Mei 2023 Number 04/DK/KPTS/V/2023 dated May 3, 2023
Tursandi Alwi	Anggota Member	Nomor 04/DK/KPTS/V/2023 tanggal 03 Mei 2023 Number 04/DK/KPTS/V/2023 dated May 3, 2023
Buntoro Heri Prasetya	Anggota Member	Nomor 04/DK/KPTS/V/2023 tanggal 03 Mei 2023 Number 04/DK/KPTS/V/2023 dated May 3, 2023
Tri Prijana	Anggota Member	Nomor 04/DK/KPTS/V/2023 tanggal 03 Mei 2023 Number 04/DK/KPTS/V/2023 dated May 3, 2023

PROFIL KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE PROFILE



IMAM HARYONO
KETUA KOMITE AUDIT
 CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE

Selain menjabat sebagai Ketua Komite Audit, Imam Haryono juga seorang Komisaris Perseroan. Profil beliau telah diuraikan dalam Bab Profil Anggota Dewan Komisaris.

In addition to serving as Chairman of the Audit Committee, Imam Haryono is also a Commissioner of the Company. His profile has been described in the Member Profile Chapter of the Board of Commissioners.



TURSANDI ALWI
ANGGOTA KOMITE AUDIT
 MEMBER OF THE AUDIT COMMITTEE

Selain menjabat sebagai anggota Komite Audit, Tursandi Alwi juga seorang Komisaris Perseroan. Profil beliau telah diuraikan dalam Bab Profil Anggota Dewan Komisaris.

In addition to serving as member of the Audit Committee, Tursandi Alwi is also a Commissioner of the Company. His profile has been described in the Member Profile Chapter of the Board of Commissioners.



Warga Negara Indonesia, lahir di Sleman, 25 Oktober 1962 (61 tahun). Beliau menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen pada tahun 2015 dan Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Trisakti pada tahun 2021.

Buntoro Heri Prasetya mengawali karir sebagai Tim Gabungan BPKP-Departemen Keuangan, Satgasgab BAPEKSTA, Pajak dan Bea Cukai (1995-2022), Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2005-2007), Direktorat Pengaduan Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (2007-2017), Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (2021-2022), Auditor di Kedeputan Investigasi BPKP (1984-2022) dan sebagai Pengajar di Universitas Pakuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (1995-sekarang).

Indonesian citizen, born in Sleman, October 25, 1962 (61 years old). He completed his Master of Management education in 2015 and Doctor of Economics at Universitas Trisakti in 2021.

Buntoro Heri Prasetya started his career as a Joint Team of BPKP-Ministry of Finance, Satgasgab BAPEKSTA, Tax and Customs (1995-2022), Corruption Eradication Team (2005-2007), Directorate of Public Complaints, Corruption Eradication Commission (2007-2017), Task Force for Handling State Bill Rights of BLBI Fund (2021-2022), Auditor at BPKP Investigation Deputy (1984-2022) and as a Lecturer at Universitas Pakuan, Faculty of Economics and Business (1995-present).



Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 17 Juli 1959 (64 tahun). Beliau menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Perencanaan dan Pengembangan Wilayah di Universitas Samratulangi Manado pada tahun 1998

Tri Prijana mengawali karir dan bekerja di Departemen Keuangan (1981-1983), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (1983-2010), Kementerian Perumahan Rakyat (2010-2014) dan Kementerian PUPR (2015-2019).

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Perseroan memastikan independensi anggota Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Seluruh anggota Komite Audit merupakan pihak independen, yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Pengendali.

Indonesian citizen, born in Bandung, July 17, 1959 (64 years old). He completed his Master of Regional Planning and Development at Universitas Samratulangi Manado in 1998

Tri Prijana started his career and worked at the Financial Department (1981-1983), the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) (1983-2010), the Ministry of Public Housing (2010-2014) and the Ministry of PUPR (2015-2019).

INDEPENDENCE OF THE AUDIT COMMITTEE

The Company ensures the independence of the Audit Committee members in carrying out their duties and responsibilities. All members of the Audit Committee are independent parties, who do not have financial, management, share ownership, and/or family relations with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Controlling Shareholders.

Kriteria Independensi Independence Criteria	Imam Haaryono	Tursandi Alwi	Buntoro Heri Prasetya	Tri Prijana
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Pengawas dan Direksi Do not have a financial relation with the Supervisory Board and the Board of Directors	x	x	x	x
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi Do not have a management relation in the Company, subsidiaries, or affiliated companies	x	x	x	x

Kriteria Independensi Independence Criteria	Imam Haaryono	Tursandi Alwi	Buntoro Heri Prasetya	Tri Prijana
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan Do not have a shareholding relation in the Company	x	x	x	x
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Direksi dan/atau sesama anggota komite Do not have a family relation with the Supervisory Board, the Board of Directors, and/or fellow committee members	x	x	x	x

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA ANGGOTA KOMITE AUDIT

Anggota Komite Audit Perseroan dipilih yang memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja yang sesuai dengan karakteristik bisnis Abipraya.

Salah satu dari anggota Komite Audit yang dimiliki perseroan merupakan lulusan D-III STAN Jakarta spesialisasi Akuntansi, dan berpengalaman menjadi auditor Madya BPKP di beberapa provinsi, juga berpengalaman sebagai Kepala Seksi Pengawas. Sementara itu, anggota yang lain memiliki pengalaman yang sangat memadai terkait sektor usaha yang dijalankan Abipraya dan berpengalaman dalam menangani proyek-proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002, dalam membantu Komisaris, Komite Audit bertugas untuk:

- Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Ekstern sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar;
- Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system pengendalian manajemen Perseroan serta pelaksanaannya;
- Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/

EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND WORK EXPERIENCE AUDIT COMMITTEE MEMBERS

Members of the Company Audit Committee are selected who have educational qualifications and work experience according to Abipraya's business characteristics.

One of the members of the Audit Committee owned by the company is a graduate of D-III STAN Jakarta specializing in accounting and has experience as an associate auditor of BPKP in several provinces, and experience as Head of the Supervisory Section. Meanwhile, the other members have extensive related to the business sector run by Abipraya and in handling projects under the Ministry of Public Works.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

According to the Decree of the Minister of SOEs Number: Kep-103/MBU/2002, in assisting the Commissioners, the Audit Committee task to:

- Assess the implementation of activities and audit results conducted by the Internal Supervisory Unit and External Auditors so that implementation and reporting that do not meet standards can be prevented;
- Provide recommendations regarding the improvement of the Company's management control system and its implementation;
- Ensure that there is a satisfactory review procedure for information issued by SOEs, including brochures, periodic financial reports, projections/forecasts, and other financial

forecast dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemangku kepentingan;

- c. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Audit juga bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

MASA JABATAN KOMITE AUDIT

Keberadaan Komite Audit diatur melalui keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002. Komite Audit sedikitnya terdiri dari tiga orang, diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Komite Audit Perseroan beranggotakan tiga orang, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris untuk masa jabatan lima tahun.

FREKUENSI PERTEMUAN KOMITE AUDIT

Selama tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan 32 Kali rapat, yang terdiri dari 12 Rapat internal Dewan Komisaris, 5 Rapat Terbatas, 12 Rapat Gabungan dengan mitra kerja serta 2 Rapat dengan eksternal Auditor dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

information submitted to stakeholders;

- d. Identify matters that require the attention of the Commissioners;
- e. Carry out other duties assigned by the Commissioner as long as it is within the scope of the Commissioner's duties and obligations based on the provisions of applicable legislation.

The Audit Committee is also tasked with providing opinions to the Board of Commissioners on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, identifying that require the Commissioner's attention, and carrying out other duties related to the Board of Commissioners.

TENURE OF THE AUDIT COMMITTEE

The existence of the Audit Committee is regulated through the decree of the Minister of SOEs Number: Kep-103/MBU/2002. The Audit Committee consists of at least three people, chaired by an Independent Commissioner with two independent external people who master and have a background in accounting and finance. The Company's Audit Committee consists of three members, appointed and dismissed by the Board of Commissioners for a five-year term.

FREQUENCY OF THE AUDIT COMMITTEE MEETINGS

During 2023, the Audit Committee has held 32 meetings, consisting of 12 internal meetings of the Board of Commissioners, 5 Limited Meetings, 12 Joint Meetings with partners, and 2 meetings with external auditors with the following attendance levels:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Imam Haryono	Ketua Chairman	32	100%
Tursandi Alwi	Anggota Member	32	100%
Buntoro Heri Prasetya	Anggota Member	32	100%
Tri Prijana	Anggota Member	32	100%

Agenda Rapat Dewan Komisaris Bersama Komite

Meeting Agenda of the Board of Commissioners Joint Committee

No	Bulan Agenda Month Agenda	Agenda
1	Januari January	<p>a. Telaah Komite atas kinerja perusahaan bulan Desember 2022</p> <p>b. Telaah atas Evaluasi Laporan Unaudited PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2022;</p> <p>c. Telaah Komite atas Potensi Kontrak Baru Tahun 2023;</p> <p>d. Telaah Komite atas Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang;</p> <p>e. Telaah Komite atas Evaluasi penanganan piutang perusahaan per-tahun 2022 serta strategi penanganan piutang pada tahun 2023;</p> <p>f. Pembahasan Progres Raihan Kontrak Baru dari Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara) pada tahun 2023.</p> <p>a. Committee Review of the company's performance in December 2022</p> <p>b. Review of the Evaluation of PT Brantas Abipraya (Persero) Unaudited Report 2022;</p> <p>c. Committee Review of Potential New Contracts in 2023;</p> <p>d. Committee Review of Ongoing and Future Project Risk Evaluation and Mitigation;</p> <p>e. Committee Review on the Evaluation of the Company's Receivables Handling in 2022 and Receivables Handling Strategy in 2023;</p> <p>f. Discussion on the Progress of Achieving New Contracts from IKN (National Capital City) Infrastructure Projects in 2023.</p>
2	Februari February	<p>a. Telaah Komite atas kinerja perusahaan bulan Januari 2023</p> <p>b. Telaah Komite atas Potensi dan Realisasi Kontrak Baru;</p> <p>c. Telaah Komite atas Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang;</p> <p>d. Telaah Komite atas Evaluasi penanganan piutang perusahaan serta strategi penanganannya;</p> <p>e. Pembahasan Progres Raihan Kontrak Baru dari Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara);</p> <p>f. Pembahasan Pengelolaan Dana Pensiun dan Manfaat Pasti Brantas Abipraya.</p> <p>a. Committee Review of the company's performance in January 2023</p> <p>b. Committee Review of the Potential and Realization of New Contracts;</p> <p>c. Committee Review of Ongoing and Future Project Risk Evaluation and Mitigation;</p> <p>d. Committee Review on Evaluation of the handling of company receivables and their handling strategies;</p> <p>e. Discussion of the Progress of Achieving New Contracts from IKN (National Capital City) Infrastructure Projects;</p> <p>f. Discussion of Pension Fund Management and Definite Benefits of Brantas Abipraya.</p>
3	Maret March	<p>a. Telaah Komite atas kinerja perusahaan bulan Februari 2023</p> <p>b. Telaah Komite atas Potensi dan Realisasi Kontrak Baru;</p> <p>c. Telaah Komite atas Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang;</p> <p>d. Telaah Komite atas Evaluasi penanganan piutang perusahaan serta strategi penanganannya;</p> <p>e. Pembahasan Progres Raihan Kontrak Baru dari Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara).</p> <p>a. Committee Review of the company's performance in February 2023</p> <p>b. Committee Review of the Potential and Realization of New Contracts;</p> <p>c. Committee Review of Ongoing and Future Project Risk Evaluation and Mitigation;</p> <p>d. Committee Review on Evaluation of the handling of company receivables and their handling strategies;</p> <p>e. Discussion of the Progress of Achieving New Contracts from IKN (National Capital City) Infrastructure Projects.</p>
4	April April	<p>a. Telaah Komite atas kinerja perusahaan bulan Maret 2023;</p> <p>b. Telaah Komite atas Laporan Audited 2022;</p> <p>c. Telaah Komite atas Laporan Triwulan I Tahun 2023</p> <p>d. Telaah Komite atas Potensi dan Realisasi Kontrak Baru;</p> <p>e. Telaah Komite atas Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang;</p> <p>f. Telaah Komite atas Evaluasi penanganan piutang perusahaan serta strategi penanganannya;</p> <p>g. Pembahasan Progres Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara);</p>

Agenda Rapat Dewan Komisaris Bersama Komite

Meeting Agenda of the Board of Commissioners Joint Committee

No	Bulan Agenda Month Agenda	Agenda
		<ul style="list-style-type: none"> a. Committee Review of the company's performance in March 2023; b. Committee Review of the 2022 Audited Report; c. Committee Review of the First Quarter Report of 2023 d. Committee Review of the Potential and Realization of New Contracts; e. Committee Review of Ongoing and Future Project Risk Evaluation and Mitigation; f. Committee Review on Evaluation of the handling of company receivables and their handling strategies; g. Discussion of the Progress of IKN (National Capital City) Infrastructure Project;
5	Mei May	<ul style="list-style-type: none"> a. Telaah Komite atas kinerja perusahaan bulan April 2023; b. Telaah Komite atas Potensi dan Realisasi Kontrak Baru; c. Telaah Komite atas Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; d. Telaah Komite atas Evaluasi penanganan piutang perusahaan serta strategi penanganannya e. Pembahasan Progres Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara); f. Telaah Hasil Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2022 dalam rangka Persiapan RUPS TB 2022. <ul style="list-style-type: none"> a. Committee Review of the company's performance in April 2023; b. Committee Review of Potential and Realization of New Contracts; c. Committee Review of Ongoing and Future Project Risk Evaluation and Mitigation; d. Committee Review on Evaluation of the handling of company receivables and their handling strategies e. Discussion of the Progress of the IKN (National Capital City) Infrastructure Project; f. Review of the Results of the Audited Financial Reports for the Financial Year 2022 in the context of Preparation for the 2022 TB GMS.
6	Juni June	<ul style="list-style-type: none"> a. Telaah Komite atas Kinerja Perusahaan dan Pemasaran bulan April 2023 b. Telaah Komite atas Kinerja Keuangan bulan April 2023; c. Telaah Komite atas Kinerja Human Capital d. Telaah Komite atas Evaluasi penanganan piutang perusahaan serta strategi penanganannya e. Pembahasan Opportunity Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara) <ul style="list-style-type: none"> a. Committee Review on the Company Performance and Marketing in April 2023 b. Committee Review on Financial Performance in April 2023; c. Committee Review on Human Capital Performance d. Committee Review on Evaluation of the handling of company receivables and their handling strategies e. Discussion of IKN (National Capital City) Infrastructure Project Opportunity
7	Juli July	<ul style="list-style-type: none"> a. Telaah Komite atas Kinerja Perusahaan dan Pemasaran bulan Juni 2023 b. Telaah Komite atas Kinerja Keuangan Triwulan II Tahun 2023 c. Telaah Komite atas Evaluasi penanganan piutang perusahaan serta strategi penanganannya d. Pembahasan Opportunity Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara) <ul style="list-style-type: none"> a. Committee Review on Corporate and Marketing Performance in June 2023 b. Committee Review on Financial Performance in the Second Quarter of 2023 c. Committee Review on Evaluation of the handling of company receivables and their handling strategies d. Discussion of IKN (National Capital City) Infrastructure Project Opportunity
8	Agustus August	<ul style="list-style-type: none"> a. Telaah Komite atas Laporan Manajemen bulan Juli 2023; a. Telaah Komite atas Potensi dan Realisasi Kontrak Baru; b. Telaah Komite atas Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; c. Telaah Komite atas Evaluasi penanganan piutang beserta solusi dari permasalahan tersebut; d. Pembahasan progress Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara). <ul style="list-style-type: none"> a. Committee Review of Management Report in July 2023; b. Committee Review of Potential and Realization of New Contracts; c. Committee Review of Ongoing and Future Project Risk Evaluation and Mitigation; d. Review the Committee on the Evaluation of the handling of receivables and solutions to these problems; e. Discussion of the progress of the IKN (National Capital City) Infrastructure Project.
9	September September	<ul style="list-style-type: none"> a. Telaah Komite atas Laporan Manajemen bulan Agustus 2023; b. Telaah Komite atas Potensi dan Realisasi Kontrak Baru; c. Telaah Komite atas Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; d. Telaah Komite atas Evaluasi penanganan piutang beserta solusi dari permasalahan tersebut; e. Pembahasan progress Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara);

Agenda Rapat Dewan Komisaris Bersama Komite

Meeting Agenda of the Board of Commissioners Joint Committee

No	Bulan Agenda Month Agenda	Agenda
		<ul style="list-style-type: none"> a. Committee Review of Management Report in August 2023; b. Committee Review of Potential and Realization of New Contracts; c. Committee Review of Ongoing and Future Project Risk Evaluation and Mitigation; d. Review the Committee on the Evaluation of the handling of receivables and solutions to these problems; e. Discussion of the progress of the IKN(National Capital City) Infrastructure Project;
10	Oktober October	<ul style="list-style-type: none"> a. Telaah Komite atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2023; b. Telaah Komite atas Potensi dan Realisasi Kontrak Baru; c. Telaah Komite atas Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; d. Telaah Komite atas Evaluasi penanganan piutang beserta solusi dari permasalahan tersebut; e. Pembahasan progress Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara). <ul style="list-style-type: none"> a. Committee Review of the First Quarter 2023 Management Report; b. Committee Review of Potential and Realization of New Contracts; c. Committee Review of Ongoing and Future Project Risk Evaluation and Mitigation; d. Review the Committee on the Evaluation of the handling of receivables and solutions to these problems; e. Discussion of the progress of the IKN (National Capital City) Infrastructure Project.
11	November November	<ul style="list-style-type: none"> a. Telaah Komite atas Laporan Manajemen bulan Oktober 2023; b. Pembahasan Prognosa Kinerja Keuangan Tahun Buku 2023; c. Telaah Komite atas Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; d. Telaah Komite atas Evaluasi penanganan piutang beserta solusi dari permasalahan tersebut; e. Pembahasan progress Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara); <ul style="list-style-type: none"> a. Committee Review of Management Report in October 2023; b. Discussion of Financial Performance Prognosis for the Financial Year 2023; c. Committee Review of Ongoing and Future Project Risk Evaluation and Mitigation; d. Review the Committee on the Evaluation of the handling of receivables and solutions to these problems; e. Discussion of the progress of the IKN (National Capital City) Infrastructure Project;
12	Desember December	<ul style="list-style-type: none"> a. Telaah Komite atas Laporan Manajemen bulan November 2023; b. Telaah Komite atas Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; c. Telaah Komite atas Evaluasi penanganan piutang beserta solusi dari permasalahan tersebut; d. Pembahasan progress Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara). <ul style="list-style-type: none"> a. Committee Review of Management Report in November 2023; b. Committee Review of Ongoing and Future Project Risk Evaluation and Mitigation; c. Review the Committee on the Evaluation of the handling of receivables and solutions to these problems; d. Discussion of the progress of the IKN (National Capital City) Infrastructure Project.

Agenda Rapat dengan Departemen Lain

Meeting Agenda with Other Departments

No	Bulan Agenda Month Agenda	Agenda
1	Juni 2023 dengan Dept PGB June 2023 with PGB Dept	Penyajian Informasi Risiko pada LMP Risk Information Presentation on LMP
2	Agustus 2023 dengan SPI August 2023 with SPI	Hasil Audit Bendungan Bener Bener Dam Audit Results
3	Agustus 2023 dengan SPI August 2023 with SPI	Pembahasan Pelaporan Manajemen Risiko Risk Management Reporting Discussion
4	Oktober 2023 dengan SPI dan Dept Keuangan October 2023 with SPI and Finance Dept.	Pembahasan ICOFR ICOFR Discussion
5	November 2023 dengan Dept Keuangan November 2023 with Finance Dept.	Pembahasan mengenai persamaan persepsi plafon kredit Bank dll. Discussion on the similarity of perceptions of bank credit ceilings etc.
6	Desember 2023 dengan Legal, SPI, Produksi, Sekper December 2023 with Legal, SPI, Production, Corporate Secretary	Pemenuhan AOI Self Assesment GCG AOI Self-Assessment Fulfillment GCG

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT

Dalam rangka memastikan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah dikelola dengan efektif, berikut di bawah ini beberapa kegiatan terkait audit dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Komite Audit sepanjang tahun 2023 yakni antara lain sebagai berikut:

Auditor Eksternal

Pada tahun 2023, Perseroan menunjuk auditor independen untuk melaksanakan audit tahun buku 2023. Penunjukan auditor independen sesuai surat keputusan Dewan Komisaris yang merupakan mandat rUPs untuk mendelegasikan kewenangan penetapan KAP kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit telah menelaah dan membahas dengan auditor independen terkait dengan kualitas dan akseptabilitas dari standar akuntansi keuangan yang diterapkan oleh Perseroan yakni sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, *International Financial Reporting Standard* (IFRS), Peraturan OJK dan perundangan lain yang berlaku.

Evaluasi Atas Kinerja Audit Eksternal

Komite Audit telah menelaah dan membahas dengan KAP yang bertanggung jawab untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia serta terkait efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan, kualitas dan akseptabilitas dari standar akuntansi keuangan yang diterapkan oleh Perseroan.

Penilaian Atas Efektivitas Pelaksanaan Audit Internal

Komite Audit telah melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal melalui penelaahan laporan hasil Audit yang tertera pada risalah rapat Komite. Audit internal telah

IMPLEMENTATION OF THE AUDIT COMMITTEE ACTIVITIES

To ensure that the implementation of Good Corporate Governance has been managed effectively, the following are some activities related to auditing and supervision that have been carried out by the Audit Committee throughout 2023, including the following:

External Auditor

In 2023, the Company appointed an independent auditor to conduct the audit for the 2023 financial year. The appointment of an independent auditor, according to the decision letter of the Board of Commissioners, is the mandate of the GMS to delegate the authority to determine the KAP to the Board of Commissioners.

The Audit Committee has reviewed and discussed with independent auditors related to the quality and acceptability of financial accounting standards applied by the Company, namely according to applicable financial accounting standards in Indonesia, *International Financial Reporting Standard* (IFRS), OJK Regulations, and other applicable laws.

Evaluation of the External Audit Performance

The Audit Committee has reviewed and discussed with the KAP and is responsible for providing opinions on the fairness of the presentation of financial reports and notes to financial reports according to financial accounting standards in Indonesia and related to the effectiveness of internal control over financial reporting, quality, and acceptability of accounting standards applied by the Company.

Assessment of the Effectiveness of Internal Audit Implementation

The Audit Committee has assessed the effectiveness of internal audit implementation through a review of the Audit report listed in the minutes of the committee meeting. Internal

dilakukan sesuai dengan rencana audit tahunan.

Penilaian Atas Efektivitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Komite Audit telah melakukan penilaian atas efektivitas penerapan tata kelola perusahaan melalui penelaahan laporan hasil Asesmen GCG yang dilakukan Perseroan yang saat ini berjalan memadai namun masih perlu ditingkatkan.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMITE AUDIT

Peningkatan kompetensi Komite Audit mengenai perkembangan dunia usaha khususnya terkait pelaksanaan kebijakan sistem pengendalian internal dan audit. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite Audit dalam mengawal aktivitas Perseroan.

Pelatihan/Pengembangan Komite Audit

Audit Committee Training/Development

No	Pelatihan Training	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
1	Audit Teknologi Informasi Information Technology Audit	27 Juni/ June 2023	BLMI GRC Masterclass
2	ESG For Auditor ESG For Auditor	13 Juli/ July 2023	BLMI GRC Masterclass
3	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification	13 Juli/ July 2023	BNSP dan KAN
4	Konferensi Nasional Komite Audit Audit Committee National Conference	19 Oktober/ October 2023	KBUMN-IKAI
5	Pemeringkatan & Penerbitan efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) Rating & Issuance of Debt and Sukuk Securities (Efek Bersifat Utang dan Sukuk: EBUS)	19 Oktober/ October 2023	KBUMN-IKAI
6	Pre IPO dan Post IPO Pre IPO dan Post IPO	19 Oktober/ October 2023	KBUMN-IKAI
7	ESG of Boards-Governance of ESG ESG of Boards-Governance of ESG	19 Oktober/ October 2023	KBUMN-IKAI
8	CG Methodology and Enviromental and Social Management Systems CG Methodology and Enviromental and Social Management Systems	25 Oktober/ October 2023	KBUMN-IKAI

audits have been conducted according to the annual audit plan.

Assessment of the Effectiveness of Corporate Governance Implementation

The Audit Committee has assessed the effectiveness of corporate governance implementation through a review of the GCG Assessment results report conducted by the Company, which is currently running adequately but still needs to be improved.

AUDIT COMMITTEE DEVELOPMENT PROGRAM

The Audit Committee competency improvement regarding business developments, especially related to the implementation of internal control system policies and audits. These activities are expected to be able to support the implementation of the duties and responsibilities of the Audit Committee in overseeing the Company's activities.

Pelatihan/Pengembangan Komite Audit

Audit Committee Training/Development

No	Pelatihan Training	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
9	Audit Teknologi Informasi Information Technology Audit	27 Juni/ June 2023	BLMI GRC Masterclass
10	ESG For Auditor ESG For Auditor	13 Juli/ July 2023	BLMI GRC Masterclass
11	Sertifikasi Manajemen Risiko Sertifikasi Manajemen Risiko	13 Juli/ July 2023	BNSP dan KAN
12	Pemeringkatan & Penerbitan efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) Pemeringkatan & Penerbitan efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS)	13 Juli/ July 2023	BNSP dan KAN
13	Pre IPO dan Post IPO Pre IPO dan Post IPO	10 Agustus/ August 2023	KBUMN
14	Forum Penguatan Governansi dan Peningkatan Integritas Sektor Jasa Keuangan Forum Penguatan Governansi dan Peningkatan Integritas Sektor Jasa Keuangan	10 Agustus/ August 2023	KBUMN
15	ESG of Boards–Governance of ESG ESG of Boards–Governance of ESG	10 Agustus/ August 2023	KBUMN
16	Konferensi Nasional Komite Audit Konferensi Nasional Komite Audit	19 Oktober/ October 2023	KBUMN–IKAI
17	CG Methodology and Enviromental and Social Management Systems CG Methodology and Enviromental and Social Management Systems	25 Oktober/ October 2023	KBUMN–IKAI

EVALUASI ATAS KINERJA AUDITOR EKSTERNAL

Komite Audit telah menelaah dan membahas dengan KAP yang bertanggung jawab untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia serta terkait efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan, kualitas dan akseptabilitas dari standar akuntansi keuangan yang diterapkan oleh Perseroan.

EVALUATION OF EXTERNAL AUDITOR PERFORMANCE

The Audit Committee has reviewed and discussed with the Public Accounting Firm responsible for providing opinions on the fairness of the presentation of financial reports and notes to financial reports according to financial accounting standards in Indonesia and related to the effectiveness of internal control over financial reporting, quality and acceptability of accounting standards applied by the Company.

Penilaian atas efektivitas Pelaksanaan audit internal

Komite Audit telah melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal melalui penelaahan Laporan Hasil Audit yang tertera pada Risalah Rapat Komite. Audit internal telah dilakukan sesuai dengan rencana audit tahunan.

Penilaian atas efektivitas Penerapan Tata kelola Perusahaan

Komite Audit telah melakukan penilaian atas efektivitas penerapan tata kelola perusahaan melalui penelaahan Laporan Hasil Asesmen GCG yang dilakukan Perseroan yang saat ini berjalan memadai namun masih perlu ditingkatkan.

Assessment of the effectiveness of internal audit

The Audit Committee has assessed the effectiveness of the implementation of the internal audit through a review of the Audit Results Report listed in the Minutes of the Committee Meeting. Internal audits have been conducted according to the annual audit plan.

Assessment of the effectiveness of Corporate Governance Implementation

The Audit Committee has assessed the effectiveness of the implementation of corporate governance through the review of the GCG Assessment Results Report conducted by the Company, which is currently running adequately but still needs to be improved.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Nomination and Remuneration Committee

Fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi melekat kepada tugas Dewan Komisaris. Oleh karena itu, fungsi komite ini dijalankan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan mengenai Remunerasi dan Nominasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kebijakan atas seleksi dan pengusulan calon Direksi kepada Pemegang Saham:
 - Secara berkala, Dewan Komisaris menerima hasil talent pool dari Direksi untuk karyawan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Direksi Perusahaan Anak. Di antaranya berupa: (i) curriculum vitae; (ii) hasil uji kepatutan dan kelayakan dari lembaga profesional sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi BUMN;
 - Dewan Komisaris melakukan review atas kebijakan dan proses penilaian serta uji kepatutan dan kelayakan bakal calon anggota Direksi serta review atas hasil penilaian yang disampaikan;
 - Dewan Komisaris memberikan pendapat tertulis mengenai calon anggota Direksi sewaktu-waktu apabila diminta oleh Pemegang Saham, termasuk penyampaian hasil uji kepatutan dan kelayakan dari lembaga profesional;
 - Penunjukan lembaga profesional yang akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan dilakukan oleh Pemegang Saham.

The function of the Remuneration and Nomination Committee is attached to the duties of the Board of Commissioners. Therefore, the functions of this committee are carried out by the Board of Commissioners according to the provisions of the prevailing legislation.

Policy regarding Remuneration and Nomination can be explained as follows:

- Policy on selection and proposal of candidates for the Board of Directors to Shareholders:
 - Periodically, the Board of Commissioners receives the results of the talent pool from the Board of Directors for employees 1 (one) level below the Board of Directors and Directors of Subsidiaries. Among them are: (i) curriculum vitae; (ii) the results of appropriateness and feasibility tests from professional institutions according to the provisions in the Regulation of the Minister of SOEs regarding the requirements and procedures for appointment and dismissal of members of the Board of Directors of SOEs;
 - The Board of Commissioners reviews the policies and assessment processes as well as the appropriateness and eligibility test of prospective members of the Board of Directors and reviews the results of the assessments submitted;
 - The Board of Commissioners provides written opinions on prospective members of the Board of Directors at any time when requested by Shareholders, including submission of due diligence results from professional institutions;
 - The appointment of a professional institution that will conduct due diligence and feasibility is carried out by the Shareholders.

- Kebijakan atas Pengusulan Remunerasi Direksi:
 - Dewan Komisaris melakukan review atas kebijakan dan mekanisme penyusunan usulan remunerasi Direksi Perusahaan setiap tahunnya serta menguji kesesuaiannya dalam pelaksanaannya;
 - Dewan Komisaris melakukan penelaahan atas usulan remunerasi Direksi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan dengan pertimbangan, antara lain: (i) ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris BUMN, (ii) prognosa pencapaian kinerja dan KPI tahun sebelumnya, (iii) kemampuan keuangan perusahaan dan kewajarannya;
 - Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi atas penetapan anggaran remunerasi Direksi sebagai bagian dari rekomendasi atas penetapan RKAP kepada Pemegang Saham;
 - Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi remunerasi Direksi kepada Pemegang Saham dalam RUPS.
 - Dewan Komisaris dalam melakukan proses telahannya menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris.
- Policy on the Proposal of Remuneration of the Board of Directors:
 - The Board of Commissioners reviews the policies and mechanisms for preparing the proposal for remuneration of the Board of Directors every year and tests its suitability in its implementation;
 - The Board of Commissioners reviews the proposed remuneration of the Board of Directors in the preparation of the Annual Corporate Work Plan and Budget (RKAP) with consideration, among others: (i) provisions in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. PER-04/MBU/2014, concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Board of Commissioners of SOEs, (ii) prognosis of performance achievements and KPIs for the previous year, (iii) the company's financial capabilities and fairness;
 - The Board of Commissioners submits recommendations on the determination of the Board of Directors' remuneration budget as part of recommendations on the determination of RKAP to Shareholders;
 - The Board of Commissioners submits recommendations for the remuneration of the Board of Directors to the Shareholders at the GMS.
 - The Board of Commissioners in conducting its review process, uses all tools in the Board of Commissioners.

Susunan Keanggotaan Komite Nominasi & Remunerasi

Composition of Nomination & Remuneration Committee

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Haryadi	Ketua Chairman	Nomor/ Number: 04/DK/KPTS/V/2023
Kenny Daryat Nanang	Anggota Member	Nomor/ Number: 04/DK/KPTS/V/2023
Tursandi Alwi	Anggota Member	Nomor/ Number: 04/DK/KPTS/V/2023
Azka Merci Fauzia Lestari	Anggota Member	Nomor/ Number: 04/DK/KPTS/V/2023

PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PROFILE OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE



HARYADI

KETUA KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

CHAIRMAN OF THE NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE

Selain menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, Haryadi juga menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Profil beliau telah diuraikan dalam Bab Profil Anggota Dewan Komisaris.

In addition to serving as Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Haryadi also serves as Commissioner of the Company. His profile has been described in the Member Profile Chapter of the Board of Commissioners.



KENNY DARYAT NANANG

ANGGOTA KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

MEMBER OF THE NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE

Selain menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, Kenny Daryat Nanang juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan. Profil beliau telah diuraikan dalam Bab Profil Anggota Dewan Komisaris.

In addition to serving as member of the Nomination and Remuneration Committee, Kenny Daryat Nanang also serves as Independent Commissioner of the Company. His profile has been described in the Member Profile Chapter of the Board of Commissioners.



TURSANDI ALWI

ANGGOTA KOMITE NOMINASI & REMUNERASI
MEMBER OF THE NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE

Selain menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, Tursandi Alwi juga menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Profil beliau telah diuraikan dalam Bab Profil Anggota Dewan Komisaris.

In addition to serving as a Member of the Nomination and Remuneration Committee, Tursandi Alwi also serves as Commissioner of the Company. His profile has been described in the Member Profile Chapter of the Board of Commissioners.



AZKA MERCI FAUZIA LESTARIE

ANGGOTA KOMITE NOMINASI & REMUNERASI
MEMBER OF THE NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 23 Februari 1996. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Psikologi di Universitas Indonesia pada tahun 2018

Indonesian citizen, born in Jakarta, February 23, 1996. He completed his Bachelor of Psychology at the University of Indonesia in 2018

Azka Merci Fauzia Lestarie mengawali karir sebagai Analis Sumber Daya Manusia dan Transformasi Organisasi di PT Daya Dimensi Indonesia (2018-2019), Konsultan Junior di Assessment Center di PT Daya Dimensi Indonesia (2019-2020).

Azka Merci Fauzia Lestarie started her career as a Human Capital Analyst and Organizational Transformation at PT Daya Dimensi Indonesia (2018-2019), Junior Consultant at the Assessment Center at PT Daya Dimensi Indonesia (2019-2020).

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sepanjang tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain menyampaikan usulan nominasi calon Direksi dari internal Perseroan dan usulan penyesuaian remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, program dan kegiatan komite dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu (1) Pengawasan dan Pemberian saran/nasihat di bidang nominasi, dan (2) Pengawasan dan Pemberian saran/nasihat di bidang remunerasi.

PENGAWASAN DAN PEMBERIAN SARAN/NASIHAT DI BIDANG NOMINASI

Pengawasan dan Pemberian saran/nasihat di bidang nominasi diantaranya dilakukan dengan cara melakukan kajian untuk merumuskan saran dan masukan kepada Dewan Komisaris terkait usulan nominasi calon Direksi. Saran dan masukan tersebut menjadi bahan masukan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat di bidang nominasi.

PENGAWASAN DAN PEMBERIAN SARAN/NASIHAT DI BIDANG REMUNERASI

Sepanjang 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan *review* atas kebijakan remunerasi bagi pengurus Perseroan melalui *benchmarking* dan berdasarkan kinerja yang dicapai. Selanjutnya merumuskan usulan penyesuaian remunerasi pengurus Perseroan kepada Dewan komisaris.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Throughout 2023, the Nomination and Remuneration Committee has carried out its duties and responsibilities, including submitting proposals for the nomination of candidates for the Board of Directors from within the Company and proposals for remuneration adjustments for the Board of Directors and the Board of Commissioners.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

According to its duties and functions, the committee's programs and activities can be grouped into two parts, namely (1) Supervision and Provision of advice in the nomination field and (2) Supervision and Provision of advice in the remuneration field.

SUPERVISION AND PROVISION OF ADVICE IN THE NOMINATION FIELD

Supervision and Provision of advice in the nomination field are carried out by conducting studies to formulate suggestions and inputs to the Board of Commissioners regarding the proposal for nomination of candidates for the Board of Directors. These suggestions and inputs become input for the Board of Commissioners in carrying out supervisory and advisory functions in the nomination field.

SUPERVISION AND PROVISION OF ADVICE IN THE REMUNERATION FIELD

Throughout 2023, the Nomination and Remuneration Committee will review the remuneration policy for the Company's management through benchmarking and based on the performance achieved. Furthermore, formulate a proposal for adjusting the remuneration of the Company's management to the Board of Commissioners.

FREKUENSI PERTEMUAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Selama tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan 30 Kali rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Haryadi	Ketua Chairman	30	100%
Kenny Daryat Nanang	Anggota Member	30	100%
Tursandi Alwi	Anggota Member	30	100%
Azka Merci Fauzia Lestari	Anggota Member	30	100%

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETING FREQUENCY

During 2023, the Nomination and Remuneration Committee held 30 meetings, with attendance levels as follows:

Rapat NR- Agenda Rapat Gabungan Bersama Direksi

NR Meeting- Joint Meeting with the Board of Directors Agenda

No	Bulan Agenda Month Agenda	Agenda	Agenda
1	Januari January	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya (Desember 2022); b. Evaluasi atas kinerja perusahaan bulan Desember 2022; c. Evaluasi Laporan Unaudited PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2022; d. Pembahasan Potensi Kontrak Baru Tahun 2023; e. Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; f. Evaluasi penanganan Piutang per-tahun 2022 serta Strategi Penanganan Piutang pada tahun 2023; g. Pembahasan Progres Raihan Kontrak Baru dari Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara) pada tahun 2023; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Follow-up to the previous month's meeting (December 2022); b. Evaluation of company performance in December 2022; c. Evaluation of PT Brantas Abipraya (Persero) Unaudited Report in 2022; d. Discussion of Potential New Contracts in 2023; e. Evaluation and Mitigation of Ongoing and future Project Risks; f. Evaluation of Receivables handling per 2022 and Receivables Handling Strategy in 2023; g. Discussion of the Progress of Obtaining New Contracts from the IKN (National Capital City) Infrastructure Project in 2023;
2	Februari February	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya (Januari 2023); b. Evaluasi atas kinerja perusahaan bulan Januari 2023; c. Pembahasan Potensi dan Realisasi Kontrak Baru; d. Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; e. Evaluasi penanganan Piutang serta Strategi Penanganan Piutang; f. Pembahasan Progres Raihan Kontrak Baru dari Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara); g. Pembahasan Pengelolaan Dana Pensiun dan Manfaat Pasti Brantas Abipraya; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Follow-up to the previous month's meeting (January 2023); b. Evaluation of company performance in January 2023; c. Discussion of Potential and Realization of New Contracts; d. Evaluation and Mitigation of Ongoing and future Project Risks; e. Evaluation of Receivables handling and Receivables Handling Strategy; f. Discussion of the Progress of Obtaining New Contracts from the IKN (National Capital) Infrastructure Project; g. Discussion of Brantas Abipraya Pension Fund Management and Defined Benefits;
3	Maret March	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya (Februari 2023); b. Evaluasi atas kinerja perusahaan bulan Februari 2023; c. Telaah Komite atas Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; d. Telaah Komite atas Evaluasi penanganan piutang perusahaan serta strategi penanganannya; e. Pembahasan Progres Raihan Kontrak Baru dari Proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Negara); 	<ul style="list-style-type: none"> a. Follow-up to the previous month's meeting (February 2023); b. The evaluation of company performance in February 2023; c. Committee Review of Ongoing and Future Project Risk Evaluation and Mitigation; d. Committee review of the evaluation of the company's receivables handling and handling strategies; e. Discussion of the Progress of Obtaining New Contracts from the IKN (National Capital) Infrastructure Project;

Rapat NR- Agenda Rapat Gabungan Bersama Direksi

NR Meeting- Joint Meeting with the Board of Directors Agenda

No	Bulan Agenda Month Agenda	Agenda	Agenda
4	April April	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya (Maret 2023); b. Evaluasi atas Laporan Audited Tahun 2022; c. Evaluasi atas kinerja perusahaan per TW I Tahun 2023 d. Pembahasan Potensi dan Realisasi Kontrak Baru; e. Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; f. Evaluasi penanganan Piutang serta Strategi Penanganan Piutang; g. Pembahasan Progres Proyek Infrastruktur Ibu Kota Negara; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Follow-up to the previous month's meeting (March 2023); b. Evaluation of the 2022 Audited Report; c. Evaluation of company performance as of Quarter 1 (Q1) 2023 d. Discussion of Potential and Realization of New Contracts; e. Evaluation and Mitigation of Ongoing and future Project Risks; f. Evaluation of Receivables handling and Receivables Handling Strategy; g. Discussion of the Progress of the IKN (National Capital City) Infrastructure Project;
5	Mei May	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya (April 2023); b. Evaluasi atas Kinerja Perusahaan bulan April 2023; c. Pembahasan Potensi dan Realisasi Kontrak Baru; d. Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; e. Evaluasi penanganan Piutang serta Strategi Penanganan Piutang; f. Pembahasan Progres Proyek Infrastruktur Ibu Kota Negara; g. Pembahasan Persiapan RUPS Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2022; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Follow-up to the previous month's meeting (April 2023); b. Evaluation of Company Performance in April 2023; c. Discussion of Potential and Realization of New Contracts; d. Evaluation and Mitigation of ongoing and future Project risks; e. Evaluation of receivables handling and receivables handling strategy; f. Discussion of the Progress of the IKN (National Capital City) Infrastructure Project; g. Discussion of GMS Preparation for Audited Financial Report for Financial Year 2022;
6	Juni June	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya (Mei 2023); b. Evaluasi atas Kinerja Perusahaan dan Pemasaran bulan Mei 2023; c. Evaluasi atas Kinerja Keuangan bulan Mei 2023; d. Evaluasi atas Kinerja Human Capital; e. Evaluasi penanganan Piutang serta Strategi Penanganan Piutang; f. Pembahasan Opportunity Proyek Infrastruktur Ibu Kota Negara; g. Pembahasan Tindak Lanjut Arahan RUPS Audited " 2022; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Follow-up to the previous month's meeting (May 2023); b. Evaluation of Company and Marketing Performance in May 2023; c. Evaluation of Financial Performance in May 2023; d. Evaluation of Human Capital Performance; e. Evaluation of Receivables handling and Receivables Handling Strategy; f. Discussion of the IKN (National Capital City) Infrastructure Project Opportunity; g. Discussion of Follow-up to Audited GMS Directions "2022;
7	Juli July	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya (Juni 2023) b. Evaluasi atas Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2023 c. Pembahasan Potensi dan Realisasi Kontrak Baru; d. Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; e. Laporan penanganan Piutang beserta Strategi Penyelesaian Piutang; f. Pembahasan Opportunity dan progress proyek Infrastruktur Ibu Kota Negara; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Follow-up to the previous month's meeting (June 2023) b. Evaluation of the Management Report for the Quarter 2 (Q2) of 2023 c. Discussion of Potential and Realization of New Contracts; d. Evaluation and Mitigation of ongoing and future project risks; e. Receivables handling report along with receivables settlement strategy; f. Discussion of opportunity and progress of the IKN (National Capital City) Infrastructure project;

Rapat NR- Agenda Rapat Gabungan Bersama Direksi

NR Meeting- Joint Meeting with the Board of Directors Agenda

No	Bulan Agenda Month Agenda	Agenda	Agenda
8	Agustus August	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya (Juli 2023); b. Evaluasi atas Laporan Manajemen Bulan Juli 2023; c. Pembahasan Potensi dan Realisasi Kontrak Baru; d. Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; e. Laporan penanganan Piutang beserta Strategi Penyelesaian Piutang; f. Pembahasan progress proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara); 	<ul style="list-style-type: none"> a. Follow-up to the previous month's meeting (July 2023); b. Evaluation of Management Report in July 2023; c. Discussion of Potential and Realization of New Contracts; d. Evaluation and Mitigation of ongoing and future project risks; e. Receivables handling report along with receivables settlement strategy; f. Discussion of the progress of the IKN (National Capital City) Infrastructure project
9	September September	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya (Agustus 2023); b. Evaluasi atas Laporan Manajemen Bulan Agustus 2023; c. Pembahasan Potensi dan Realisasi Kontrak Baru; d. Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; e. Laporan penanganan Piutang beserta Strategi Penyelesaian Piutang; f. Pembahasan progress proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara); 	<ul style="list-style-type: none"> a. Follow-up to the previous month's meeting (August 2023); b. Evaluation of Management Report in August 2023; c. Discussion of Potential and Realization of New Contracts; d. Evaluation and Mitigation of ongoing and future project risks; e. Receivables handling report along with receivables settlement strategy; f. Discussion of the progress of the IKN (National Capital City) Infrastructure project;
10	Oktober October	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya (September 2023); b. Evaluasi atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2023; c. Pembahasan Potensi dan Realisasi Kontrak Baru; d. Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; e. Laporan penanganan Piutang beserta Strategi Penyelesaian Piutang; f. Pembahasan progress proyek Infrastruktur KIN (Ibu Kota Nusantara); 	<ul style="list-style-type: none"> a. Follow-up to the previous month's meeting (September 2023); b. Evaluation of the Management Report for the Quarter 1 (Q1) of 2023; c. Discussion of Potential and Realization of New Contracts; d. Evaluation and Mitigation of ongoing and future project risks; e. Receivables handling report along with receivables settlement strategy; f. Discussion of the progress of the IKN (National Capital City) infrastructure project;
11	November November	<ul style="list-style-type: none"> a. Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya (Oktober 2023); b. Evaluasi atas Laporan Manajemen bulan Oktober 2023; c. Pembahasan Prognosa Kinerja Keuangan Tahun Buku 2023; d. Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; e. Laporan penanganan Piutang beserta Strategi Penyelesaian Piutang; f. Pembahasan progress proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara); 	<ul style="list-style-type: none"> a. Follow-up to the previous month's meeting (October 2023); b. Evaluation of Management Report for October 2023; c. Discussion of Financial Performance Prognosis for the Financial Year 2023; d. Evaluation and Mitigation of ongoing and future project risks; e. Receivables handling report along with receivables settlement strategy; f. Discussion of the progress of the IKN (National Capital City) Infrastructure project;

Rapat NR- Agenda Rapat Gabungan Bersama Direksi

NR Meeting- Joint Meeting with the Board of Directors Agenda

No	Bulan Agenda Month Agenda	Agenda	Agenda
12	Desember December	a. Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya (November 2023); b. Evaluasi atas Laporan Manajemen bulan November 2023; c. Evaluasi dan Mitigasi Risiko Proyek Ongoing dan yang akan datang; d. Laporan penanganan Piutang beserta Strategi Penyelesaian Piutang; e. Pembahasan progress proyek Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara);	a. Follow-up to the previous month's meeting (November 2023); b. Evaluation of Management Report for November 2023; c. Evaluation and Mitigation of ongoing and future project risks; d. Receivables handling report along with receivables settlement strategy; e. Discussion of the progress of the IKN (National Capital City) infrastructure project;

Pelatihan/Pengembangan Komite Nominasi & Remunerasi

Training/Development of Nomination & Remuneration Committee

No	Pelatihan Training	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Penyelenggara Organizer
1	The 4th Human Capital Summit 2023	6-7 November/ November 2023	FHCI 2023

PENILAIAN KINERJA NOMINASI DAN REMUNERASI

Evaluasi penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Dewan Komisaris. Metode penilaian kinerja tersebut berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah tersusun dalam RKA tahunan Komite yang dilaporkan secara tahunan dalam laporan Komite.

Penilaian juga dilakukan atas saran, rekomendasi dan masukan yang diberikan oleh Komite nominasi dan Remunerasi terkait penyempurnaan soft-structure pendukung pelaksanaan nominasi dan remunerasi perseroan. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite.

PERFORMANCE APPRAISAL NOMINATION AND REMUNERATION

Evaluation of the performance appraisal of the Nomination and Remuneration Committee is carried out once a year by the Board of Commissioners. The performance appraisal method is based on the realization and completion of work programs compiled in the Committee's annual RKA, which is reported annually in the Committee's report.

The assessment was also carried out on suggestions, recommendations, and inputs provided by the nomination and remuneration committee related to improving the soft structure supporting the implementation of the company's nomination and remuneration. The results of the assessment are considered by the Board of Commissioners to reappoint and/or dismiss Committee members.

KEBIJAKAN MENGENAI SUKSESI DIREKSI

Perseroan berupaya untuk menjaga keberlangsungan usaha, salah satunya dengan merancang Kebijakan Suksesi Direksi demi terciptanya pola kaderisasi kepemimpinan yang efektif, transparan dan wajar. Proses pemilihan calon Direksi perseroan mempertimbangkan kinerja, kompetensi, pengalaman berkarir dan persyaratan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PROSES SUKSESI DIREKSI

Dalam mewujudkan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Direksi yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan, calon anggota Direksi perseroan telah melalui beberapa rangkaian proses sebelum diusulkan oleh pemegang Saham.

POLICY ON SUCCESSION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Company strives to maintain business continuity by designing a Board of Directors Succession Policy to create an effective, transparent, and fair leadership regeneration pattern. The process of selecting candidates for the company's Board of Directors considers performance, competence, career experience, and other requirements according to applicable regulations.

BOARD OF DIRECTORS SUCCESSION PROCESS

In realizing a transparent and accountable mechanism for selecting and replacing members of the Board of Directors, candidates for members of the Board of Directors of the company have gone through several series of processes before being proposed by shareholders.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN GCG

Risk Management Committee and GCG

Berdasarkan Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*), Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam mewujudkan sistem dan pelaksanaan Pengawasan yang kompeten dan independen di Perseroan

Selain Komite Audit, Perseroan memiliki komite lain di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG. Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-10/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris. Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG bertanggung jawab melakukan pengawasan dan evaluasi pada penerapan strategi, metode, kebijakan, dan system manajemen risiko Perseroan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pengelolaan manajemen risiko. Selain itu, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG juga memantau risiko potensial yang dihadapi Perseroan. Secara tidak langsung, komite tersebut memiliki peran penting dalam penerapan GCG.

Based on the Board Manual of the Board of Directors and the Board of Commissioners, the Risk Management and GCG Monitoring Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in realizing a competent and independent Supervision system and implementation in the Company

In addition to the Audit Committee, the Company has other committees under the Board of Commissioners, namely the Risk Management and GCG Monitoring Committee. The establishment of the Risk Management and GCG Monitoring Committee is based on the Regulation of the State Minister of SOEs Number PER-10/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners. The Risk Management and GCG Monitoring Committee reports directly to the Board of Commissioners.

The Risk Management and GCG Monitoring Committee is responsible for supervising and evaluating the implementation of the Company's strategies, methods, policies, and risk management systems in improving the effectiveness of risk management activities. In addition, the Risk Management and GCG Monitoring Committee also monitors potential risks faced by the Company. Indirectly, the committee has a role in the implementation of GCG.

Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG

Composition of the Risk Management and GCG Monitoring Committee Membership

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Diana Kusumastuti	Ketua Chairman	Nomor/ Number: 04/DK/KPTS/V/2023
Kenny Daryat Nanang	Anggota Member	Nomor/ Number: 04/DK/KPTS/V/2023
Fajar Rachman	Anggota Member	Nomor/ Number: 04/DK/KPTS/V/2023
Amiruddin	Anggota Member	Nomor/ Number: 04/DK/KPTS/V/2023

PROFIL KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE PROFILE



DIANA KUSUMASTUTI
KETUA KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
CHAIRMAN OF THE RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Diana Kusumastuti selaku Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG Perseroan, juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris. Profil lengkap beliau telah dilaporkan dalam Bab Profil Anggota Dewan Komisaris.

Diana Kusumastuti as Chairman of the Risk Management and GCG Monitoring Committee, also serves as a Member of the Board of Commissioners. Her profile has been reported in the Member Profile Chapter of the Board of Commissioners.



KENNY DARYAT NANANG
ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO
MEMBER OF THE RISK MONITORING COMMITTEE

Kenny Daryat Nanang selaku Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG Perseroan, juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris. Profil lengkap beliau telah dilaporkan dalam Bab Profil Anggota Dewan Komisaris.

Kenny Daryat Nanang as Member of the Risk Management and GCG Monitoring Committee, also serves as a Member of the Board of Commissioners. His profile has been reported in the Member Profile Chapter of the Board of Commissioners.



FAJAR RACHMAN
ANGGOTA KOMITE PMR DAN GCG
 MEMBER OF PMR AND GCG COMMITTEE

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 19 Desember 1963 (60 tahun). Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Jayabaya pada tahun 1987.

Fajar Rachman mengawali karir sebagai Staff Satuan Kerja Audit Internal di PT Bank QNB Indonesia, Tbk (1991-1997), kemudian Manajer Administrasi (1997-2006), Staff Spesial Asset Management (2006-2007), Kepala Bagian Umum (2008-2009), Kepala Bagian Personalia (2009-2010), Loan Operational Head (2010-2014) dan Internal Control Officer (2015-2018).

Indonesian citizen, born in Jakarta, December 19, 1963 (60 years old). He completed his Bachelor of Economics education at Universitas Jayabaya in 1987.

Fajar Rachman started his career as Internal Audit Work Unit Staff at PT Bank QNB Indonesia, Tbk (1991-1997), then Administration Manager (1997-2006), Special Asset Management Staff (2006-2007), Head of General Affairs (2008-2009), Head of Personnel (2009-2010), Loan Operational Head (2010-2014), and Internal Control Officer (2015-2018).



AMIRUDDIN
ANGGOTA KOMITE PMR DAN GCG
 MEMBER OF PMR AND GCG COMMITTEE

Warga Negara Indonesia, lahir di Gombong, 05 Agustus 1953 (70 tahun). Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Sipil di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1983 dan S2 CES Urban Management di Lyon, France pada tahun 1987

Indonesian citizen, born in Gombong, August 5, 1953 (70 years old). He completed his Bachelor of Civil Engineering education at Universitas Gadjah Mada in 1983 and S2 CES Urban Management in Lyon, France in 1987

Amiruddin mengawali karir sebagai Kasubdit Permukiman Baru Dit Bangkim Ditjen Cipta Karya (2008), PLT Kasubdit Peningkatan Permukiman Wilayah 1 Dit Bangkim Cipta Karya (2008-2009), Jabatan Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Madya (2009), Program Management Unit Wasior (2013-2014), dan Tim Pemantau Proyek Strategis Nasional PUPR (2015-2020).

INDEPENDENSI KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Seluruh anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah pihak independen, yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Independensi Anggota Komite Manajemen Risiko

Independence of the Risk Management Committee Members

Kriteria Independensi Independence Criteria	Diana Kusumastuti	Kenny Daryat Nanang	Fajar Rachman	Amiruddin
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Do not have a financial relation with the Board of Commissioners and the Board of Directors	x	x	x	x
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi Do not have a management relation in the Company, subsidiaries, or affiliated companies	x	x	x	x
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan Do not have a shareholding relation in the Company	x	x	x	x
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Direksi dan/atau sesama anggota komite Do not have a family relation with the Supervisory Board, the Board of Directors, and/or fellow committee members	x	x	x	x

TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Tujuan dari pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko Perseroan adalah membantu Dewan Komisaris dalam memastikan terlaksananya pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi serta kepatuhan

Amiruddin started his career as Head of Sub-Directorate of New Settlements Dit Bangkim Directorate General of Cipta Karya (2008), PLT Head of Sub-Directorate of Settlement Improvement Area 1 Dit Bangkim Cipta Karya (2008-2009), Functional Department of Building Planning and Intermediate Housing (2009), Wasior Program Management Unit (2013-2014), and PUPR National Strategic Project Monitoring Team (2015-2020).

INDEPENDENCE OF THE RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

All members of the Risk Management Monitoring Committee are independent parties who do not have financial, shareholding, and/or family relations with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or Shareholders that may affect their ability to act independently.

RESPONSIBILITIES OF THE RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

The purpose of establishing the Company's Risk Management Monitoring Committee is to assist the Board of Commissioners in ensuring the implementation of supervision and advisory to the Board of Directors and compliance with

terhadap peraturan perundangundangan dan peraturan pengelolaan usaha yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Terlaksananya fungsi pengawasan manajemen risiko yang kuat;
- Terbangunnya budaya manajemen risiko sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud* dan praktik-praktik yang tidak sehat;
- Teridentifikasinya hal-hal berkaitan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Keberadaan Komite Pemantau Manajemen Risiko diatur melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-10/MBU/2012. Komite Pemantau Manajemen Risiko sedikitnya terdiri dari tiga orang, diketuai oleh seorang Komisaris dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang manajerial yang *capable*, serta memiliki pengetahuan dasar tentang manajemen risiko. Komite Pemantau Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris untuk masa jabatan lima tahun.

FREKUENSI PERTEMUAN KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Selama tahun 2023, Komite Pemantau Manajemen Risiko melaksanakan rapat bersama dengan Dewan Komisaris. Informasi tersebut telah dilaporkan dalam Bab Dewan Komisaris. Rapat antara Dewan Komisaris dan Komite di bawahnya dilaksanakan sebanyak 32 di tahun 2023.

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Charter Komite Manajemen Risiko serta Program Kerja Komite Manajemen Risiko 2023.

laws and regulations on business management relating to the following:

- Implementation of a strong risk management supervision function;
- Establishing a risk management culture to reduce the possibility of fraud and unhealthy practices;
- Identification of matters related to risk management that require the attention of the Board of Commissioners.

TENURE OF MEMBERS OF THE RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

The existence of the Risk Management Monitoring Committee is regulated through the Regulation of the State Minister of SOEs Number PER-10/MBU/2012. The Risk Management Monitoring Committee consists of at least three, chaired by the Commissioner, with two independent external people who master and have a capable managerial background and basic knowledge of risk management. The Risk Management Monitoring Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners for a five-year.

THE RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE MEETINGS' FREQUENCY

During 2023, the Risk Management Monitoring Committee will hold joint meetings with the Board of Commissioners. Such information has been reported in the Board of Commissioners Chapter. The 32 meetings between the Board of Commissioners and the Committees below will be held in 2023.

IMPLEMENTATION OF THE RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE ACTIVITIES

The Risk Management Monitoring Committee has carried out its duties and responsibilities according to the Risk Management Committee Charter and the Risk Management Committee

Dalam pelaksanaannya, Komite Manajemen Risiko dengan prinsip kehati-hatian melaksanakan analisis risiko terutama untuk bisnis perusahaan yang utama sebagai penyangga *cash flow* Perseroan, serta bisnis dalam perseroan yang berpotensi mendatangkan kerugian (*down-side risk*) melalui berbagai upaya mitigasi risiko yang dilakukan bersama-sama dengan Unit Kerja Manajemen Risiko.

Adapun realisasi kegiatan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG di tahun 2023 sebagai berikut:

Work Program 2023. In its implementation, the Risk Management Committee, with the principle of prudence, carries out risk analysis, especially for the core business as a buffer for the Company's cash flow, as well as businesses within the company that has the potential to bring losses (*down-side risk*) through various risk mitigation efforts carried out together with the Risk Management Work Unit.

The realization of the activities of the Risk Management and GCG Monitoring Committee in 2023 is as follows:

Bulan Month	Kegiatan Activities
Januari January	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Tugas Kegiatan KPMR&GCG Triwulan IV Tahun 2022 Menyiapkan Bahan dan Mengikuti Rapat Komisaris & Rapat Gabungan Rapat dengan Kantor Akuntan Publik Crowe dan PT Brantas Abipraya (Seluruh Divisi) mengenai lingkup pemeriksaan, rencana on the spot, progress dan target waktu penyelesaian Rapat SPI dan Komite dengan agenda : Program Kerja SPI untuk tahun 2023 mengenai penentuan objek pemeriksaan untuk proyek dan unit kerja, prioritas pemeriksaan SPI adalah untuk proyek maupun unit kerja yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi berdasarkan Laporan dari Manajemen Risiko Departemen Meeting Komite dengan unit kerja Manajemen Risk Tanggal 18 Januari 2023, mengenai rencana kegiatan Assesment atas PT Brantas Abipraya oleh perusahaan penilai independen berkaitan dengan penerapan manajemen risiko pada PT Brantas Abipraya Meeting dengan Legal korporasi dan unit kerja strategi Korporasi (divisi pengembangan). Agenda Tanggapan dan persetujuan atas Perubahan/Revisi RKAP karena adanya perubahan nilai investasi, KPBU dan lain-lain perubahan Telaahan Permohonan Persetujuan atas Perubahan dan Perpanjangan Line Facility serta Pembiayaan Investasi Baru Pada PT Bank Syariah Indonesia Telaahan atas Revisi rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 KPMR & GCG Activity Task Report Quarter IV of 2022 Prepare Materials and Attend Commissioner's Meetings & Joint Meetings Meeting with Crowe Public Accounting Firm and PT Brantas Abipraya (All Divisions) regarding the scope of the examination, on-the-spot plan, progress, and target completion time SPI and Committee meetings with the agenda: SPI Work Program for 2023 regarding the determination of inspection objects for projects and work units, the priority of SPI examination is for projects and work units that have a high level of risk based on the Report from the Risk Management Department Committee Meeting with the Risk Management work unit on January 18, 2023, regarding the planned assessment of PT Brantas Abipraya by an independent assessment company related to the implementation of the risk management at PT Brantas Abipraya Meeting with Corporate Legal and Corporate Strategy work unit (development division). Agenda Response and approval of changes/revisions to RKAP due to changes in investment value, KPBU, and other changes Review of Application for Approval of Line Facility Changes and Extensions and New Investment Financing at PT Bank Syariah Indonesia Review of the Revision of the Company's 2023 Work Plan and Budget (RKAP)
Februari February	<ul style="list-style-type: none"> Meeting ke 2 KAP, PT Brantas dan Komite mengenai pencapaian/perolehan hasil pemeriksanaan PT Brantas Abipraya (Persero) oleh KAP Crowe Menyiapkan Bahan dan Mengikuti Rapat Komisaris & Rapat Gabungan Kegiatan On the spot Proyek Bendungan Gondang atas penguatan dinding bendungan Rapat dengan Bagian Keuangan Brantas dan KAP Crowe. Mengenai progress pelaksanaan Audit dan pending matters The 2nd Meeting of KAP, PT Brantas, and the Committee regarding the achievements/results of the examination of PT Brantas Abipraya (Persero) by KAP Crowe Prepare Materials and Attend Commissioner's Meetings & Joint Meetings On the spot activities of the Gondang Dam Project on strengthening the dam wall Meeting with the Finance Department of Brantas and KAP Crowe. Regarding the progress of audit implementation and pending matters

Bulan Month	Kegiatan Activities
Maret March	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Telaah atas Laporan Tahunan Kegiatan Satuan Pengawasan Intern Tahun 2022 • Telaahan terkait Pelaksanaan proyek-proyek Penunjukkan Langsung Penanganan Keadaan Darurat Bencana Alam dengan Skema Prefinancing • Telaahan Atas Permohonan persetujuan tertulis Perpanjangan Fasilitas Cash Loan dan Non Cash Loan PT Bank Mandiri Tbk (Persero) • Telaahan Penyampaian Dokumen dan penjelasan Tambahan Terkait dengan permohonan Persetujuan Tertulis untuk Pelepasan Aktiva Tetap Bergerak • Laporan Hasil Telaah atas Permohonan Tanggapan dan Rekomendasi Tertulis Terkait Dengan Perubahan Jumlah Anggota Konsorsium dan Persentase Kepemilikan pada Pendirian PT Karya Logistik Nusantara (PT KLN) • Laporan Hasil Telaah atas Permohonan Persetujuan Tertulis Terkait Tata Kelola Proyek Turnkey/contractor Pre Financing (CPF) • Rapat Terbatas Direksi dan Komisaris serta pengurus Dapen mengenai Dana Pensiun PT Brantas Abipraya (Persero) • Review Report on the Annual Report on the Activities of the Internal Control Unit in 2022 • Study related to the Implementation of Direct Appointment Projects for Natural Disaster Emergency Management with Prefinancing Schemes • Review of Written Approval Application for Extension of Cash Loan and Non-Cash Loan Facilities of PT Bank Mandiri Tbk (Persero) • Review of Document Submission and Additional Explanations Related to the Application for Written Approval for the Release of Movable Fixed Assets • Review Report on Requests for Written Responses and Recommendations Related to Changes in the Number of Consortium Members and Percentage of Ownership in the Establishment of PT Karya Logistik Nusantara (PT KLN) • Review Report on Request for Written Approval Related to Turnkey/Contractor Pre Financing (CPF) Project Governance • Limited Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners and Dapen management regarding the Pension Fund of PT Brantas Abipraya (Persero)
April April	<ul style="list-style-type: none"> • Telaahan atas Permohonan tanggapan dan dukungan tertulis atas rencana pendirian Perusahaan Patungan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) • Mengikuti live via Youtube dari Kementerian BUMN mengenai Sosialisasi Tiga Omnibus Peraturan menteri BUMN • Menyiapkan/pembuatan Bahan dan Mengikuti Rapat Komisaris & Rapat Gabungan • Telaahan atas Usulan KAP Untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian, Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan Sistem Informasi Manajemen Anaplan KBUMN Tahun Buku 2023 • Review of the Request for written response and support for the plan to establish a Joint Venture Company for the Implementation of Government Cooperation Projects with Business Entities (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha: KPBU) • Follow live via YouTube from the Ministry of SOEs regarding the Socialization of Three Omnibus Regulations of the Minister of SOEs • Prepare Materials and Attending Commissioner Meetings & Joint Meetings • Review of KAP's Proposal to Audit Consolidated Financial Reports, Micro and Small Business Funding (PUMK), and Management Information System Anaplan KBUMN for the Financial Year 2023
Mei May	<ul style="list-style-type: none"> • Telaahan atas Laporan Laporan Keuangan Konsolidasian Audited Tahun 2022 PT Brantas Abipraya (Persero) • meeting Komite dengan Unit Kerja Manajemen Risiko mengenai Peraturan Menteri 02 tahun 2023 mengenai Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Manajemen Risiko) • Telaahan Laporan Kinerja Manajemen Perusahaan Triwulan 1 tahun 2023 • Menyiapkan bahan dan mengikuti Rapat Komisaris dan Rapat Gabungan • Mengikuti RUPS di Lt.1 Gedung Brantas Abipraya • Review of the 2022 Audited Consolidated Financial Reports of PT Brantas Abipraya (Persero) Committee • Meeting with the Risk Management Working Unit regarding Ministerial Regulation 02 of 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises (Risk Management) • Review of the Company's Management Performance Report Quarter 1 of 2023 • Prepare materials and attend Commissioner Meetings and Joint Meetings • Attending GMS on the 1st Floor of Brantas Abipraya Building

Bulan Month	Kegiatan Activities
Juni June	<ul style="list-style-type: none"> • Telaahan Penyampaian Penjelasan tambahan terkait dengan permohonan persetujuan tertulis prefinancing-Turnkey • Mengikuti rapat Komite dan Satuan Pengawasan Intern (SPI). Mengenai Efisiensi, efektifitas dan Pengendalian • Telaahan Penyampaian Penjelasan tambahan terkait dengan permohonan persetujuan tertulis prefinancing-Turnkey • Menyiapkan bahan dan mengikuti Rapat Komisaris dan Rapat Gabungan • Rapat Komite dengan unit Legal Korporasi dan Pengurus Dana Pensiun PT Brantas Abipraya. Agenda mengenai perhitungan kekurangan iuran tambahan dana Pensiun yang harus disetor oleh perusahaan • Review of Submission Additional explanations related to the application for prefinancing-Turnkey written approval • Attend meetings of the Committee and Internal Supervisory Unit (SPI). Regarding Efficiency, Effectiveness, and Control • Review of Submission Additional explanations related to the application for prefinancing-Turnkey written approval • Prepare materials and attend Commissioner Meetings and Joint Meetings • Committee Meeting with Corporate Legal Unit and Pension Fund Management of PT Brantas Abipraya. Agenda regarding the calculation of the lack of additional contributions to pension funds that must be deposited by the Company
Juli July	<ul style="list-style-type: none"> • Telaahan atas Permohonan Persetujuan Tertulis Terkait Persetujuan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poigar-2 (30 MW) di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara • Menyiapkan bahan dan mengikuti Rapat komisaris & Rapat Gabungan untuk Kinerja Manajemen dan Keuangan Posisi Neraca Juni 2023 • Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko tanggal 24 s/d 26 Juli 2023 Ujian Kompetensi Skema QRG (Qualified Risk Governance Professional) • Review of Written Approval Application Related to Approval of Poigar-2 Hydroelectric Power Plant (30 MW) in South Minahasa Regency, North Sulawesi Province • Prepare materials and attend the Commissioner Meetings & Joint Meetings for Management and Financial Performance of Balance Sheet Position June 2023 • Risk Management Training and Certification from July 24 – 26, 2023 QRG (Qualified Risk Governance Professional) Scheme Competency Exam
Agustus August	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Komite dengan SPI mengenai hasil audit SPI atas Proyek Pembangunan Bendungan Bener, Purworejo dan Proses Penyusunan Laporan Keuangan • Pelatihan GRC masterclass "Pre IPO dan Post IPO" • GRC masterclass training "Pemeriksaan & Penerbitan Efek Bersifat Utang & Sukuk (EBUS)" • Telaahan Atas Permohonan persetujuan tertulis Penambahan Fasilitas Kredit Baru Cash Loan & Non Cash Loan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Telaahan Laporan Kinerja Manajemen Perusahaan Triwulan II tahun 2023 • Rapat Terbatas Komisaris, PT Brantas Abipraya dan PT Brantas Energi mengenai rencana Investasi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poigar-2 (30 MW) di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara • Menyiapkan bahan Rapat Komisaris dan Rapat Gabungan untuk kinerja Manajemen dan posisi Keuangan Neraca per 31 Juli 2023 • Committee Meeting with SPI regarding the results of SPI audit of the Bener Dam Construction Project, Purworejo, and the Financial Report Preparation Process • GRC training masterclass "Pre IPO and Post IPO" • GRC masterclass training "Rating & Issuance of Debt Securities & Sukuk (EBUS)" • Review of Written Approval Application for Addition of New Credit Facility Cash Loan & Non-Cash Loan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Review of the Company's Management Performance Report for the Second Quarter of 2023 • The Board of Commissioners Limited Meeting, PT Brantas Abipraya, and PT Brantas Energi regarding the Investment Plan for the Poigar-2 Hydropower Plant (30 MW) Project in South Minahasa Regency, North Sulawesi Province • Prepare materials for the Commissioner's Meetings and Joint Meetings for Management's performance and Balance Sheet Financial position as of July 31, 2023

Bulan Month	Kegiatan Activities
September September	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Komite dengan SPI agenda pengarahan mengenai kesiapan data dokumen SPI sehubungan dengan akan dilakukannya Audit ICoFR (Internal Control over Financial Reporting) • Master Class "Efektifitas Penerapan Manajemen Risiko penyelenggara dari Kementerian BUMN • Zoom Meeting dengan Kementerian BUMN (Deputi bidang Keuangan dan Manajemen Risk) agenda : Pembahasan Progress Tindak Lanjut Pelaksanaan ICOFR BUMN Konstruksi • Zoom Meeting dengan Kementerian BUMN Pembahasan Progress Tindak Lanjut Pelaksanaan ICOFR BUMN Konstruksi • Pelatihan GRC masterclass "ESG for Boads-Governance of ESG" • Menyiapkan bahan Rapat Komisaris dan Rapat Gabungan untuk kinerja Manajemen dan posisi Keuangan Neraca per 31 Agustus 2023. • Rapat Komite dengan KAP perihal ruang lingkup pemeriksaan audit independen oleh Kantor Akuntan Publik • Committee meeting with SPI briefing agenda regarding the readiness of SPI document data in connection with the ICoFR (Internal Control over Financial Reporting) Audit • Master Class "Effectiveness of the Implementation of Operator Risk Management from the Ministry of SOEs • Zoom Meeting with the Ministry of SOEs (Deputy for Finance and Risk Management) agenda: Discussion on the Progress of Follow-up Implementation of ICOFR for Construction SOEs • Zoom Meeting with the Ministry of SOEs Discusses the Progress of Follow-up Implementation of ICOFR for Construction SOEs • GRC training masterclass "ESG for Boads-Governance of ESG" • Prepare materials for the Commissioners' Meeting and Joint Meeting for Management's performance and Balance Sheet Financial position as of August 31, 2023. • Committee Meeting with KAP regarding the independent audit examination scope by the Public Accounting Firm
Oktober October	<ul style="list-style-type: none"> • Telaahan Atas Permohonan persetujuan tertulis Penambahan Fasilitas Kredit Baru Cash Loan & Non Cash Loan PT Bank Negara Indonesia Tbk • Pelatihan GRC masterclass "<i>Joint Venture between SOE and Private Sector</i>" • Pelatihan GRC masterclass "<i>CG Methodology and Environmental and Social Managements Systems</i>" • Menyiapkan bahan Rapat Komisaris dan Rapat Gabungan untuk kinerja Manajemen dan posisi Keuangan Neraca per 31 September 2023 • Review of Written Approval Application for Addition of New Credit Facility Cash Loan & Non-Cash Loan PT Bank Negara Indonesia Tbk • GRC masterclass training "<i>Joint Venture between SOE and Private Sector</i>" • GRC training masterclass "<i>CG Methodology and Environmental and Social Managements Systems</i>" • Prepare materials for the Commissioners' Meetings and Joint Meetings for Management's performance and Balance Sheet Financial position as of September 31, 2023
November November	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Komite PMR/GCG, Komite Audit dan Divisi Keuangan/Treasury mengenai Persamaan persamaan persepsi Plafond Pinjaman kepada Bank. • Telaahan Laporan Hasil telaahan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan (RKAP) th 2024 • Kunjungan Monev Proyek Loji Banger Jawa Tengah • Telaahan Laporan Kinerja Manajemen Perusahaan Triwulan III tahun 2023 • Kunjungan Monev Proyek Bendungan Jragung Jawa Tengah • Telaahan Atas Permohonan Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit PT Bank Jawa Barat dan Banten, Tbk • Telaah atas Penjelasan tambahan Permohonan Persetujuan Tertulis atas investasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poigar-2 di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara • Menyiapkan bahan Rapat Komisaris dan Rapat Gabungan untuk kinerja Manajemen dan posisi Keuangan Neraca per 31 Oktober 2023 • Meeting of PMR/GCG Committee, Audit Committee, and Finance/Treasury Division regarding Equality of Perception of Loan Ceiling to Banks. • Review of the Report on the Results of the Draft Work Plan and Budget of the Company (RKAP) in 2024 • Monev Visit of Loji Banger Project Central Java • Review of the Company's Management Performance Report for the 3rd Quarter of 2023 • Monev Visit to the Jragung Dam Project in Central Java • Review of Application for Approval of Credit Facility Extension of PT Bank Jawa Barat and Banten, Tbk • Review of Additional Explanation Application for Written Approval of Poigar-2 Hydropower Plant (PLTA) investment in South Minahasa Regency, North Sulawesi Province • Prepare materials for the Commissioner's Meetings and Joint Meetings for Management's performance and Balance Sheet Financial position as of October 31, 2023

Bulan Month	Kegiatan Activities
Desember December	<ul style="list-style-type: none"> Telaahan atas usulan Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Sekretaris Perusahaan, surat telaahan No. 02/KNR-KA-KPMR/BA/XII/2023 Rapat Terbatas terkait Pembahasan Tindak Lanjut Investasi Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poigar-2 (30MW) Rapat Komisaris dan Komite mengenai syarat dan ketentuan perundangan baik internal maupun eksternal untuk untuk jabatan (Direksi-1) Sekper dan kepala SPI Rapat Terbatas terkait Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Piutang Proyek Cisumdawu Review of the proposal of the Head of Internal Supervisory Unit (SPI) and Corporate Secretary, review letter No. 02/KNR-KA-KPMR/BA/XII/2023 Limited Meeting related to Discussion of Follow-up Investment in Poigar-2 Hydropower Plant Development (30MW) Meeting of Commissioners and Committees regarding the terms and conditions of laws internal and external for the position (Directors-1) Corporate Secretary and head of SPI Limited Meeting related to Discussion on Solving Cisumdawu Project Receivables Problems

FREKUENSI PERTEMUAN KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Selama tahun 2023, Komite Pemantau Manajemen Risiko melaksanakan rapat bersama dengan Dewan Komisaris. Informasi tersebut telah dilaporkan dalam Bab Dewan Komisaris. Rapat antara Dewan Komisaris dan Komite di bawahnya dilaksanakan di tahun 2023.

FREQUENCY OF THE RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE MEETINGS

During 2023, the Risk Management Monitoring Committee has held 32 meetings, consisting of 12 internal meetings of the Board of Commissioners, 6 Limited Meetings, 12 Joint Meetings with partners, and 2 Meetings with external Auditors with the following attendance levels:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	Presentase Percentage
Diana Kusumastuti	Ketua Chairman	32	100%
Kenny Daryat Nanang	Anggota Member	32	100%
Fajar Rachman	Anggota Member	32	100%
Amiruddin	Anggota Member	32	100%

Agenda Rapat Komite

Committee Meeting Agenda

No	Bulan Agenda Bulan Agenda	Agenda	Agenda
1	Maret March	Pembahasan Penyusunan Roadmap Dana Pensiun PT Brantas Abipraya (Persero)	Discussion on Preparing PT Brantas Abipraya (Persero) Pension Fund Roadmap
2	Juli July	Detail Pekerjaan Proyek Jalan Tol Cisumdawu;	Cisumdawu Toll Road Project Work Detail;
3	Agustus August	Pembahasan Rencana Investasi Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poigar-2 (30 MW)	Discussion of the Investment Plan for Poigar-2 Hydroelectric Power Plant (PLTA) Development (30 MW)
4	Desember December	Pembahasan Tindak Lanjut Investasi Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poigar-2 (30 MW)	Discussion on Follow-up Investment for Poigar-2 Hydroelectric Power Plant (PLTA) Development (30 MW)
		Pembahasan Penyelesaian Permasalahn Piutang Proyek Cisumdawu	Discussion on Resolving Cisumdawu Project Receivables Problems
		Evaluasi Program HC & GA Tahun 2023 dan Pembahasan Program 2024	Evaluation of the 2023 HC & GA Program and Discussion of the 2024 Program

Pelatihan/Pengembangan Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee Training/Development

No	Nama Name	Pelatihan Training	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Penyelenggara Organizer
1	Fajar Rachman	<ul style="list-style-type: none"> · Sertifikasi Manajemen Risiko · Risk Management Certification · Risk Management Effectiveness Evaluation · Risk Management Effectiveness Evaluation · ESG of Boards-Governance of ESG · ESG of Boards-Governance of ESG 	26 Juli/ July 2023	BNSP dan KAN BNSP and KAN
		<ul style="list-style-type: none"> · Joint Venture Between SOE and Private Sector · Joint Venture Between SOE and Private Sector 	19 Oktober/ October 2023	
		<ul style="list-style-type: none"> · CG Methodology and Enviromental and Social Management Systems · CG Methodology and Enviromental and Social Management Systems 	25 Oktober/ October 2023	
2	Amiruddin	<ul style="list-style-type: none"> · Sertifikasi Manajemen Risiko · Risk Management Certification · Risk Management Effectiveness Evaluation · Risk Management Effectiveness Evaluation · ESG of Boards-Governance of ESG · ESG of Boards-Governance of ESG 	26 Juli/ July 2023	BNSP dan KAN BNSP and KAN
		<ul style="list-style-type: none"> · Joint Venture Between SOE and Private Sector · Joint Venture Between SOE and Private Sector 	19 Oktober/ October 2023	
		<ul style="list-style-type: none"> · CG Methodology and Enviromental and Social Management Systems · CG Methodology and Enviromental and Social Management Systems 	25 Oktober/ October 2023	

PENILAIAN ATAS KINERJA MASING-MASING KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris. Komite tersebut di antaranya Komite Audit, dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. Komite-komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris telah berjalan dengan baik dan sesuai aturan, dan Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite telah banyak memberikan masukan-masukan penting yang berguna bagi keberlangsungan perusahaan.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF EACH COMMITTEE UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners appreciates the committee's performance under the Board of Commissioners. These committees include the Audit Committee and the Risk Management Monitoring Committee. The committees under the supervision of the Board of Commissioners have run well and according to the rules, and the Board of Commissioners considers that the committees have provided many inputs that are useful for the company's sustainability.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan bertugas menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta, serta pelayanan pemberian informasi yang dibutuhkan mengenai data atau *performance* Perseroan dalam batas-batas yang ditetapkan dalam protokol informasi yang telah ditetapkan oleh Perseroan dan penyampaian laporan-laporan lainnya kepada *Stakeholders* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disampaikan secara tepat waktu.

Keberadaan Sekretaris Perusahaan Perseroan diatur dalam undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, Direksi Perseroan dibantu oleh organ pendukung antara lain unit Sekretariat Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat Perseroan yang diangkat secara khusus untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan serta diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya langsung kepada Direktur Utama.

Pada tahun 2023 terjadi dua kali pergantian Sekretaris Perusahaan. Hingga Maret 2023 Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Miftakhul Anas berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 491/D/KPTS/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017, kemudian pada tanggal 2 Maret 2023 terjadi

The Corporate Secretary is in charge of providing information required by the Board of Directors and the Board of Commissioners periodically and / or at any time when requested, and providing the required information services regarding the Company's data or performance within the limits set in the information protocol established by the Company and submitting the other reports to other Stakeholders in accordance with statutory regulations submitted on time.

The existence of the Corporate Secretary of the Company is regulated in Law No. 19 of 2003 concerning SOEs and the decree of the ministerial secretary of State-Owned Enterprises No. SK-16 / S.MBU / 2012 concerning Indicators of Assessment and Evaluation Parameters for the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.

CORPORATE SECRETARY PROFILE

The Corporate Secretary is an officer of the Company who is specially appointed to carry out the functions of the corporate secretary and is appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners, the Corporate Secretary is responsible and reports his activities directly to the President Director.

In 2023, there were two changes of Corporate Secretary. Until March 2023, the Corporate Secretary held by Miftakhul Anas based on the Decree of the Board of Directors No. 491/D/KPTS/XII/2017 dated December 18, 2017, then on March 2, 2023, there is a change based on

pergantian berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 141/D/KPTS/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 mengangkat Hayyin Fahmi sebagai Pjs. Sekretaris Perusahaan. Pada tanggal 12 Desember 2023 digantikan oleh Dian Sovana sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 408/D/KPTS/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023

the Decree of the Board of Directors No.141/D/KPTS/III/2023 dated March 2, 2023, with Hayyin Fahmi as Interim Official of Corporate Secretary. On December 12, 2023, he was replaced by Dian Sovana as Interim Official Corporate Secretary based on the Decree of the Board of Directors No. 408/D/KPTS/XII/2023 dated December 12, 2023



DIAN SOVANA
SEKRETARIS PERUSAHAAN
 CORPORATE SECRETARY

Warga Negara Indonesia, Lahir di Payakumbuh, 15 November 1981.

Indonesian citizen, born in Payakumbuh, on November 15, 1981

Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Teknik Sipil di Universitas Bung Hatta (2004). Bachelor Studiengänge Non Degree Exchange Student, Fachhochschule Hildesheim-Holzminden (2005), Master of Studiengänge Technical University Brandenburg Technologie und Innovations Management (2007). Master of Engineering Universitas Bung Hatta (2010). Saat ini menempuh Pendidikan Doctor of Philosophy in Civil Engineering bidang Manajemen Konstruksi di UTHM.

Completed a Bachelor of Civil Engineering at Bung Hatta University (2004). Bachelor Studiengänge Non-Degree Exchange Student, Fachhochschule Hildesheim-Holzminden (2005), Master of Studiengänge Technical University Brandenburg Technology and Innovation Management (2007). Master of Engineering, Bung Hatta University (2010). Currently studying a Doctor of Philosophy in Civil Engineering in Construction Management at UTHM.

Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan, pernah menjabat sebagai Vice President Vendor Management System, Vice President Pengembangan Bisnis dan Investasi, Manager Pemasaran Investasi, Executive Bidang Investasi/ KPBU/PPP/Kerjasama Luar Negeri.

Before serving as Corporate Secretary, he served as Vice President Vendor Management System, Vice President Business Development and Investment, Investment Marketing Manager, and Investment/ KPBU/PPP/Foreign Cooperation Executive.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Brantas Abipraya (Persero) No. 136.1/D/KPTS/III/2023 tentang Struktur Organisasi Perusahaan mengenai Tata Kerja dan Fungsi Organisasi Sekretaris Perusahaan, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan, *fairness, accountability, responsibility* sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan atau sewaktu – waktu apabila diminta.
3. Menyelenggarakan fungsi sebagai penghubung (*liaison officer*)
4. Menyelenggarakan fungsi tata usaha serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada risalah rapat Direksi, risalah rapat Dewan Komisaris dan RUPS.
5. Menyelenggarakan tata kelola perkantoran, pengelolaan rumah tangga perusahaan agar menjamin terlaksananya tata kelola Perusahaan.
6. Menyelenggarakan fungsi hubungan kemasyarakatan dan aspek informasi.
7. Menyelenggarakan fungsi promosi Perusahaan.
8. Menyelenggarakan fungsi pengelolaan Legal, yang mencakup Legal Litigasi dan Legal Korporasi.

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Selama 2023, Sekretaris Perusahaan telah melakukan tugasnya dalam bidang legal dan bidang lainnya yang mendukung bisnis Perseroan, di antaranya:

- Memastikan Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan informasi sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CORPORATE SECRETARY

Based on the Decision Letter of the Directors of PT Brantas Abipraya (Persero) No. 136.1/D/KPTS/III/2023 concerning Company Organizational Structure regarding the Work Procedures and Organizational Functions of the Corporate Secretary, the duties and responsibilities of the Corporate Secretary are as follows:

1. Ensure that the company complies with regulations regarding the requirements for openness, fairness, accountability, and responsibility in line with the implementation of GCG principles.
2. Provide information required by the Board of Directors and Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested.
3. Carrying out functions as a liaison officer
4. Carrying out administrative functions and storing company documents, including but not limited to minutes of Board of Directors' meetings, minutes of meetings of the Board of Commissioners, and GMS.
5. Organizing office governance and corporate household management to ensure the implementation of corporate governance.
6. Carrying out public relations functions and information aspects.
7. Carrying out company promotional functions.
8. Carrying out legal management functions, which include litigation legal and corporate legal.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SECRETARY DUTIES

In 2023, the Corporate Secretary has carried out his duties in the legal and other fields that support the Company's business, including:

- Ensure that the Company complies with regulations on information disclosure requirements in line with the implementation of GCG principles.

- Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
- Melaksanakan pemantauan atas Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku.
- Melakukan sosialisasi atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) kepada insan Perseroan secara berkala maupun kepada karyawan
- Penyampaian Buku Laporan Tahunan (*Annual Report*) Perseroan untuk Tahun Buku 2022 kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan sehubungan dengan pemenuhan ketentuan keterbukaan dan menayangkannya di *website* Perseroan.
- Penyampaian Laporan Manajemen Triwulanan selama Tahun 2023 kepada Pemegang Saham dan disampaikan tembusan laporan kepada Dewan Komisaris.
- Pembuatan rangkuman dan matrik hasil asesmen GCG oleh BPKP untuk kemudian disampaikan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja terkait agar dapat ditindaklanjuti dan dilakukan pemenuhan atas *Area of Improvement* (AOI) yang disarankan.
- Memfasilitasi kunjungan proyek dan media.
- Melakukan dan mengikuti pelatihan *Capacity Building* untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi karyawan.
- Melakukan pemutakhiran saluran komunikasi seperti *website*, dalam rangka meningkatkan kualitas komunikasi Perseroan, terutama terkait dengan transparansi pada para Pemangku Kepentingan.
- Board of Commissioners Meeting, Board of Directors Meeting, and Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors.
- Carry out monitoring of the Code of Business Ethics and Code of Conduct.
- Disseminate the Corporate Governance Guidelines and Business Ethics and Code of Conduct to the Company's personnel periodically and employees
- Submission of the Annual Report Book of the Company for the Financial Year 2022 to Shareholders and Stakeholders in connection with the fulfillment of disclosure provisions and publish it on the Company's website.
- Submission of Quarterly Management Report during 2023 to Shareholders and submission of a copy of the report to the Board of Commissioners.
- Making summaries and matrices of GCG assessment results by BPKP and then submitted to Shareholders, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and related work units so that they can be followed up and fulfilled the recommended Areas of Improvement (AOI).
- Facilitate project and media visits.
- Conduct and attend training *Capacity Building* to increase employee capacity and competence.
- Update communication channels, such as the website, to improve the quality of the Company's communication, especially related to transparency to Stakeholders.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Perseroan membuka peluang dan kesempatan bagi Sekretaris Perusahaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik internal maupun dari eksternal. Selama tahun 2023, pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti oleh Sekretaris Perusahaan di antaranya:

CORPORATE SECRETARY COMPETENCY DEVELOPMENT

The Company opens opportunities for the Corporate Secretary to attend education and training internally and externally. During 2023, the education and/or training that has been attended by the Corporate Secretary include:

Pelatihan yang Diikuti Sekretariat Perusahaan Tahun 2023

Training Attended by Corporate Secretariat in 2023

No	Nama Pelatihan Training Name	Nama Peserta Participant Name
1	<i>Delegation Indonesia for UN Women CSW67</i> Delegation Indonesia for UN Women CSW67	Dian Sovana
2	<i>Women in Infrastructure Forum London</i> Women in Infrastructure Forum London	Dian Sovana
3	Penghargaan Anugrah Perempuan Indonesia IX Indonesian Women's Award IX	Dian Sovana
4	Pelatihan & Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan & HI Corporate Law & HI Practitioner Training & Certification	Rinaldo Prima
5	Pelatihan Pimpinan Unit Kerja Sekper Training for Company Secretary Work Unit Leaders	Dian Sovana
6	Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System Training	Dian Sovana & Aldimas Febrinur
7	<i>Valuation on Merger & Acquisition</i> Valuation on Merger & Acquisition	Dian Sovana & Aldimas Febrinur
8	Pelatihan Modul Digital Talent Digital Talent Module Training	Atria Dea P, Andra Tito, Deden Heryadesastra, Danang Eko, Silvia Octaviani dan Viskha Futry Utami

Pelaporan

Pelaporan Korporasi bertugas untuk menyajikan informasi dan data kemajuan pekerjaan untuk kepentingan internal maupun eksternal dalam rangka penyelenggaraan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Sampai dengan bulan Desember 2023, realisasi kegiatan Pelaporan Korporasi antara lain:

Reporting

Corporate Reporting is tasked, with presenting information and data on work progress for internal and external interests in the context of implementing Good Corporate Governance (GCG). Until December 2023, the realization of Corporate Reporting activities includes:

Jenis Laporan Report Type	Direksi Board of Director	Dewan Komisaris Board of Commissioner	Pemegang Saham Shareholder
Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2023 2023 First Quarter Management Report	✓	✓	✓
Laporan Manajemen Triwulan II tahun 2023 Second Quarter Management Report 2023	✓	✓	✓
Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2023 Third Quarter Management Report 2023	✓	✓	✓
Laporan Manajemen tahun 2023 Management Report for 2023	✓	✓	✓
Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 Annual Report for Fiscal Year 2022	✓	✓	✓
Laporan Sekretaris Perusahaan Semester I tahun 2023 Corporate Secretary Report Semester I 2023	✓	-	-
Laporan Sekretaris Perusahaan Semester II tahun 2023 Corporate Secretary Report Semester II 2023	✓	-	-

Evaluasi Kinerja Sekretariat Perusahaan

Berdasarkan realisasi kinerja Sekretariat Perusahaan, capaian *Key Performance Indicator* (KPI) Sekretariat Perusahaan dengan indikator keuangan, pelanggan, internal proses, kepemimpinan dan tata kelola serta pembelajaran dan pertumbuhan pada tahun 2023 adalah sebesar 100%.

Performance Assessment of the Corporate Secretary

The Corporate Secretary's Key Performance Indicator (KPI) with regard to financial indicators, customers, internal processes, leadership and governance, as well as learning and growth in 2023, is 100%.

SATUAN PENGAWASAN INTERN

Internal Supervisory Unit

Kegiatan Audit Internal di Perseroan adalah bagian dari suatu fungsi pengendalian internal yang mengidentifikasi dan mengukur secara objektif dan independen mengenai keselarasan antara pelaksanaan aktivitas dengan rencana, kebijakan, peraturan dan ketentuan, sistem pencatatan dan pelaporan, serta sistem pembinaan sumber daya manusia yang telah ditetapkan. Perseroan membentuk Satuan Pengawasan Intern sebagai pelaksana fungsi audit internal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Dalam pelaksanaan kinerjanya, Perseroan memosisikan SPI sebagai mitra strategis bagi manajemen yang dipercaya profesional, objektif, dan independen, yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Perusahaan, melalui peningkatan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola perusahaan yang baik.

Kegiatan Audit Internal Perseroan merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Bidang Satuan Pengawasan Intern (SPI). SPI merupakan bagian dari organ Perseroan yang melaksanakan aktivitas secara independen, memberikan layanan *assurance* objektif dan jasa konsultasi dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah dan peningkatan terhadap operasi Perseroan guna mencapai tujuan. Dalam mengawasi kinerja Perseroan, SPI memiliki fungsi dan peran sebagai Audit Internal sekaligus Pengendalian Internal.

Keberadaan SPI diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Kepala SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah

Internal Audit activities in the Company are part of an internal control function that identifies and measures objectively and independently the alignment between the implementation of activities with plans, policies, rules, and regulations, recording and reporting systems, and established human capital development systems. Abipraya established an Internal Audit unit as the executor of the internal audit function, led by a head who is appointed, dismissed, and responsible to the President Director. In carrying out its performance, the Company positions SPI as a strategic partner for management that is trusted professionally, objectively, and independently, providing added value for the Company's goals by improving the effectiveness of risk management, internal control, and good corporate governance processes.

The Company's Internal Audit activities are part of the duties and responsibilities of the Internal Supervisory Unit (SPI). SPI is part of the Company's organs that carry out activities independently, providing objective assurance and consulting services to provide added value and improvement to the Company's operations to achieve goals. In overseeing the Company's performance, SPI has the function and role of Internal Audit and Internal Control.

The existence of SPI is regulated in Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 of 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises The Head of SPI reports directly to the President Director and is appointed and dismissed by the President

mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Selain itu, keberadaan SPI Perseroan juga mengikuti peraturan dan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 1998 tanggal 17 Januari 1998 tentang Perseroan, tercantum pada BAB III Satuan Pengawasan Intern: Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30;
2. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, tercantum pada BAB VI Bagian Pertama : Satuan Pengawasan Intern.
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/ POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

KEDUDUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERN

Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama, serta bertindak sebagai mitra kerja Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan, pemantauan dan tindak lanjut temuan audit serta perkembangan proses audit. Temuan-temuan dari SPI disampaikan kepada manajemen dan Komite Audit sebagai masukan dalam melakukan peningkatan efektivitas pengendalian internal, serta melakukan tindak lanjut atas penerapannya.

Kedudukan SPI sebagai organ yang membantu Direktur Utama ditempatkan dalam struktur organisasi di bawah Direktur Utama. Oleh sebab itu, pihak yang dapat mengangkat dan memberhentikan SPI yaitu Direksi. Kedudukan SPI memiliki peran dan tanggung jawabnya dalam pengungkapan pandangan dan pemikiran yang tidak dapat dipengaruhi ataupun ditekan dari manajemen dan pihak lain.

Director after obtaining approval from the Board of Commissioners. In addition, the existence of the Company's SPI also follows the following laws and regulations:

1. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 1998, dated January 17, 1998, concerning the Company, listed in Chapter III of the Internal Control unit: Article 28, Article 29, and Article 30;
2. Government Regulation No. 45 of 2005, concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises, is listed in Chapter VI Part One: Internal Supervisory Unit.
3. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 of 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises
4. Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015, dated December 23, 2015, concerning the Establishment and Guidelines for the Internal Audit Unit Charter Preparation.

POSITION OF INTERNAL SUPERVISORY UNIT

The Internal Supervisory Unit is responsible directly to the President Director and acts as a partner of the Audit Committee in carrying out the functions of supervision, monitoring, and follow-up of audit findings and the development of the audit process. Findings from SPI submitted to management and the Audit Committee as input in improving the effectiveness of internal control and following up on its implementation.

SPI's position as an organ that assists the President Director is placed in the organizational structure under the President Director. Therefore, the party that can appoint and dismiss SPI is the Board of Directors. The position of SPI has its role and responsibility in expressing views and thoughts that cannot be influenced or suppressed, by management and other parties.

PROFIL KEPALA SPI

HEAD OF SPI PROFILE



NURAENI POU
PJS. KEPALA SPI
 Act. Head of SPI

Warga Negara Indonesia, lahir di Kabupaten Muna, 26 Januari 1976 (47 tahun). Beliau menyelesaikan Pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Hasanuddin pada tahun 2000.

Indonesian citizen, born in Muna Regency, January 26, 1976 (47 years old). She completed his Bachelor of Accounting Education at Universitas Hasanuddin in 2000.

Nuraeni Pou memulai karir di PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai Staf *Treasury* di Departemen Keuangan (2012 – 2017). Selanjutnya, perjalanan karir beliau di Perseroan dilanjutkan sebagai *Vice President Akutansi* di Departemen Keuangan (2017 – 2023), Sejak tanggal 12 Desember 2023 beliau dipercaya Perseroan untuk menjabat sebagai Kepala SPI berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Brantas Abipraya (Persero) Nomor 408/D/KPTS/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023.

Nuraeni Pou started her career at PT Brantas Abipraya (Persero) as a Treasury Staff in the Finance Department (2012 – 2017). Furthermore, her career journey in Abipraya continued as Vice President of Accounting at the Finance Department (2017 – 2023), in December 12, 2023, she was trusted by Abipraya to serve as Head of SPI, based on the Decree of the Board of Directors of PT Brantas Abipraya (Persero) Number 408/D/KPTS/XII/2023 dated December 12, 2023.

PIAGAM AUDIT INTERN

Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern didasarkan kepada Surat Kepala SPI No. 053/SPI/OPS/IX/2020 perihal Piagam Pengawasan Intern. Untuk itu perusahaan menetapkan "Piagam Pengawasan Intern" (*Internal Audit Charter*) sebagai landasan legal formal bagi SPI dalam menjalankan tugasnya. Piagam Satuan Pengawasan Intern berisi visi, misi, struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, peranan, wewenang, kode etik, kompetensi, independensi, pertanggung jawaban, serta mengatur hubungan antara SPI dengan manajemen, Komite Audit, dan Auditor Eksternal.

INTERN AUDIT CHARTER

Inspection activities carried out by The Internal Supervisory Unit are based on Decree of the Head of SPI No. 053/SPI/OPS/IX/2020 concerning the Internal Audit Charter. For this reason, the company has established an "Internal Audit Charter" as the formal legal basis for SPI in carrying out its duties. The Internal Audit Unit Charter contains the vision, mission, structure and position, duties and responsibilities, roles, authorities, code of conduct, competence, independence, and responsibility, and regulates the relation between SPI and management, Audit Committee, and External Auditors.

Visi

Menjadi Auditor Internal yang memiliki dedikasi dan profesionalisme tinggi, mendukung terwujudnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), sehingga perusahaan menjadi institusi yang efisien, efektif dan berdaya saing tinggi.

Misi

1. Melaksanakan pengawasan serta penilaian melalui audit, revidu, evaluasi serta monitoring atas efisiensi dan efektifitas kegiatan dan transaksi perusahaan, entitas perusahaan anak serta perusahaan terafiliasi di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
2. Melaksanakan jasa konsultasi melalui kegiatan sosialisasi, desiminasi, pendampingan, bimbingan teknis serta revidu dan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko proses tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan sistem manajemen ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 37001 & ISO 31000 kepada perusahaan, entitas perusahaan anak serta perusahaan terafiliasi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN PENGAWASAN INTERN

Sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, Satuan Pengawasan Intern memiliki tanggung jawab membantu Direktur Utama untuk mewujudkan sistem pengendalian internal perusahaan. Adapun tugas pokok dan fungsi SPI, yaitu:

1. Satuan Pengawasan Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan pemeriksaan operasional Perseroan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya, serta memberikan saran-saran perbaikan;

Vision

Become an Internal Auditor who has high dedication and professionalism, supporting the realization of good corporate governance, so the company becomes an efficient, effective, and highly competitive institution.

Mission

1. Carry out supervision and assessment through audits, reviews, evaluations, and monitoring of the efficiency and effectiveness of the company's activities and transactions, subsidiaries, and affiliated companies in the fields of finance, operations, human capital, information technology, and other activities.
2. Carry out consulting services through socialization, dissemination, mentoring, technical guidance, and review and evaluation of the effectiveness of the implementation of the internal control system, risk management system of good corporate governance processes, and management systems ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 37001 & ISO 31000 to companies, subsidiaries, and affiliated companies.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INTERNAL SUPERVISORY UNIT

According to applicable policies and regulations, the Internal Supervisory Unit has the responsibility of assisting the President Director to realize the company's internal control system. The core tasks and functions of SPI are:

1. The Internal Supervisory Unit is in charge of assisting the President Director in carrying out internal financial audits and operational audits of the Company, assessing control, management, and its implementation, and providing suggestions for improvement;

2. Satuan Pengawasan Intern memberdayakan diri sebagai strategic business partner bagi Direksi dengan memberikan masukan-masukan dan pertimbangan terhadap hal-hal strategis yang dihadapi Perseroan;
3. Satuan Pengawasan Intern didukung oleh personil dengan kualitas, kompetensi, dan kuantitas yang memadai untuk pelaksanaan tugasnya serta senantiasa mengembangkan keahlian dan pengetahuan guna menjamin kualitas auditnya;
4. Untuk menjaga kualitas hasil audit, Satuan Pengawasan Intern bekerja secara independen sesuai dengan standar Profesi Auditor Internal dan Pedoman Kerja Audit Internal;
5. Satuan Pengawasan Intern wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan pekerjaan lainnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit/Komisaris dan pihak-pihak lain yang dianggap tepat;
6. Kedudukan, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Satuan Pengawasan Intern dituangkan dalam Piagam Pengawasan Intern (*Audit Charter*).

SUMBER DAYA AUDIT INTERNAL

Agar hasil audit benar-benar memberikan benefit optimal bagi organisasi, maka perlu didukung oleh auditor yang mempunyai soft dan hard kompetensi sesuai yang dipersyaratkan. Kondisi SDM saat ini terdiri dari 1 orang Kepala SPI, 1 orang Supervisor, 9 orang Auditor, dan 1 orang Staff. Komposisi auditor terdiri dari keilmuan Teknik sebanyak 4 orang dan Non Teknik sebanyak 5 orang. Dari keilmuan Teknik sebanyak 2 orang telah memasuki usia 54 tahun. Sehubungan dengan bertambahnya jumlah objek pengawasan tahun 2024 dan kondisi auditor tersebut di atas, sehingga perlu dilakukan regenerasi serta penambahan auditor agar tidak terjadi kekurangan jumlah auditor yang dapat menghambat pencapaian target kinerja SPI.

2. The Internal Audit Unit empowers itself as a strategic business partner for the Board of Directors by providing inputs and considerations on strategic matters faced by the Company;
3. The Internal Supervisory Unit is supported by personnel with adequate quality, competence, and quantity for the implementation of its duties and constantly develops expertise and knowledge to ensure the quality of its audits;
4. To maintain the quality of audit results, The Internal Supervisory Unit works promptly and independently according to Professional standards Internal Auditor and Audit Work Guidelines Internal;
5. The Internal Supervisory Unit must submit reports on the results of audits and other work to the President Director with copies to the Audit Committee/the Board of Commissioners and other parties deemed appropriate;
6. The position, authority, responsibilities, and obligations of the Internal Supervisory Unit are outlined in the Internal Supervisory Charter (*Audit Charter*).

INTERNAL AUDIT RESOURCES

For the audit results to provide optimal benefits for the organization, it needs to be supported by auditors who have soft and hard competencies as required. The current HC consists of 1 SPI Head, 1 Supervisor, 9 Auditors, and 1 Staff. The composition of the auditors consists of 4 engineering and 5 non-engineering knowledge. From Engineering science, as many as 2 people have entered the age of 54 years. In connection with the increasing number of supervisory objects in 2024 and the condition of the auditors mentioned above, it is necessary to regenerate and add auditors so that no shortage of auditors can hinder the achievement of SPI performance targets.

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI

Program peningkatan kompetensi dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Auditor Internal. SPI mengikutkan auditornya pada program pelatihan baik eksternal maupun internal, seminar, workshop serta mempersiapkan auditor-auditor untuk mengikuti program pelatihan berkelanjutan auditor internal.

Pengembangan audit dilaksanakan pada tiga hal, yaitu:

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pada organisasi SPI.
- Meningkatkan profesionalisme serta keahlian tenaga-tenaga pada Divisi Satuan Pengawasan Internal melalui program pendidikan profesi, seminar, workshop di bidang audit serta mengikutsertakan dalam sertifikasi profesi.
- Penyempurnaan Manual Audit Perusahaan

Selama tahun 2023, terdapat berbagai pelatihan yang diikuti oleh Kepala SPI dan Auditor diantaranya program pendidikan profesi, seminar, *workshop* di bidang audit serta sertifikasi profesi, yang secara rinci sesuai tabel berikut:

COMPETENCY IMPROVEMENT PROGRAM

Competency improvement programs are carried out to improve the competence of Internal Auditors. SPI engages its auditors in external and internal training programs, seminars, and workshops, and prepares auditors to take part in internal auditor continuous training programs.

Audit development is carried out on three things, namely:

- Improve the quality and quantity of Human Capital in SPI organizations.
- Improve the professionalism and expertise of personnel in the Internal Supervisory Unit Division through professional education programs, seminars, and workshops in auditing and participating in professional certification.
- Improvement of the Company Audit Manual

During 2023, there are various trainings attended, by the Head of SPI and Auditors, including professional education programs, seminars, and workshops in auditing and professional certification, which in detail corresponds to the following table:

No	Peserta Participants	Pelatihan/Sertifikasi/ Seminar/Workshop Training/Certification/Seminar/Workshop	Tanggal Date
1	Joko Widyantoro Sulistijowati Dewi Fardila	Diklat Audit Operasional + Assemen Auditor Muda Operational Audit + Young Auditor Assessment Training	6 – 15 Februari/ February
2	Ignatius Rinda L. Joko Widyantoro Rachmat Dwi W Sulistijowati Teguh Imam P Dewi Fardila	Diklat ISO 37001 (SMAP) ISO 37001 Training (SMAP)	04 – 05 April/ April
3	Ignatius Rinda L.	Diklat Tingkat Manajerial dan Sertifikasi QIA QIA Managerial Level and Certification Training	19 – 28 Juni/ June
4	Ahmad Sabiq Eko S	Diklat Tingkat Pra-Manajerial Pre-Managerial Level Training	03 – 08 Juli/ July
5	Ahmad Sabiq Eko S	Diklat Tingkat Manajerial dan Sertifikasi QIA QIA Managerial Level and Certification Training	17 – 27 Juli/ July
6	Djoko Men Utomo Dewi Fardila	Diklat Tingkat Dasar Basic Training	04 – 16 September/ September

SERTIFIKASI INTERNAL AUDIT

Saat ini, jumlah karyawan (auditor internal) pada SPI sebanyak 12 orang, yang terdiri dari Kepala SPI, 1 supervisor, 9 auditor dan 1 staf administrasi. Sebanyak 5 orang di antaranya telah tersertifikasi.

No	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
1	Sulistijowati	Auditor Auditor	Audit Internal 1 Akuntansi dan Keuangan Internal Audit 1 Accounting and Finance
2	Joko Widyantoro	Auditor Auditor	Audit Internal 1 Akuntansi dan Keuangan Internal Audit 1 Accounting and Finance
3	Dewi Fardila	Auditor Auditor	Audit Internal 1 Akuntansi dan Keuangan Internal Audit 1 Accounting and Finance
4	Ahmad Sabiq Eko S	Kepala SPI Head of SPI	Qualified Internal Auditor (QIA) Qualified Internal Auditor (QIA)
5	Ignatius Rinda Laksana	Auditor Auditor	Qualified Internal Auditor (QIA) Qualified Internal Auditor (QIA)

PELAKSANAAN TUGAS SPI

Berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan, Satuan Pengawasan Intern tahun 2023 telah melaksanakan pemeriksaan di Unit Kerja/ Unit Bisnis/Proyek di lingkungan kerja Abipraya. Laporan pemeriksaan tersebut secara rinci telah diterbitkan dalam Laporan Tahunan Kegiatan Satuan Pengawasan Intern Tahun 2023.

INTERNAL AUDIT CERTIFICATION

Currently, the number of employees (internal auditors) at SPI is 12, consisting of the Head of SPI, 1 supervisor, 9 auditors and 1 administrative staff. A total of 5 of them have been certified.

SPI TASKS IMPLEMENTATION

Based on the Annual Inspection Work Program, the Internal Supervisory Unit in 2023 has carried out inspections in the Work Unit/Business Unit/ Project in the Abipraya work environment. The detailed inspection report was published in the 2023 Annual Report on the Activities of the Internal Supervisory Unit.

No	Uraian Description	Rencana Plan	Realisasi Realization
1	Audit Internal Internal Audit	29	21
	- Unit Kerja Work unit	7	-
	- Unit Bisnis Business unit	4	-
	- Proyek Project	17	18
	- Anak Bisnis Subsidiary	1	3
2	Audit Sistem System Audit	0	13
	- ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 : 2016 Anti-Bribery Management System		13
3.	Pengawasan diluar Audit Supervision outside of audit	2	2
	- ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 : 2016 Anti-Bribery Management System	1	1
	- Evaluasi Manajemen Risiko Risk Management Evaluation	1	
	- Tinjauan Hasil Selft Assesment GCG Review of GCG Self Assessment Results	-	1
	TOTAL OBJEK PENGAWASAN TOTAL OBJECTS OF SUPERVISION	31	36

Pencapaian KPI Audit Internal

Internal Audit KPI Achievement

KPI KPI	Target 2023 Target 2023	Realisasi 2023 Realization 2023
Keuangan Finance		
Beban Administrasi Umum General Administration Expenses	100%	100%
Pelanggan Customer		
Ceklist Kendali Mutu Temuan Audit Quality Control Checklist Audit Findings	100%	100%
Realisasi Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal dan Internal Secara Tepat Waktu Realization of Timely Follow-up of External and Internal Audit Results	100%	40%
Internal Proses Internal Process		
Pelaksanaan Pengawasan Sesuai Rencana Implementation of Supervision According to Plan	100%	100%
Penyelesaian Laporan Audit yang Tepat Waktu Timely Completion of Audit Report	100%	100%
Persentase Pemenuhan Terhadap Pengendalian Anti Penyuapan Percentage of compliance with anti-bribery control	100%	100%
Kepemimpinan dan Tata Kelola Leadership and Governance		
Kesesuaian Tujuan dan Pelaksanaan Audit dengan Audit Charter, Prosedur Audit dan Standar Audit Conformity of Audit Objectives and Implementation with Audit Charter, Audit Procedures, and Audit Standards	100%	90%
Jumlah Inovasi di SPI Total Innovations in SPI	100%	100%
Implementasi Performance Management di SPI Implement SPI Performance Management	100%	100%
Penyampaian Laporan Manajemen Risiko SPI Tepat Waktu Timely Submission of SPI Risk Management Report	100%	100%
Pembelajaran dan Pertumbuhan Learning and Growth		
Terlaksananya Supervisi untuk Penjamin Mutu Pelaksanaan Audit Internal Sesuai Standar Audit Implementation of Supervision for Quality Assurance of Internal Audit Implementation according to Audit Standards	100%	100%
Implementasi ERP di SPI ERP Implementation in SPI	100%	100%
Total KPI Total KPI	100%	96,65%

Pencapaian KPI SPI tahun 2023 sebesar 96,65% dengan catatan realisasi tindak lanjut hasil audit internal tidak memenuhi target karena kurangnya komitmen manajemen/auditee untuk melakukan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi temuan audit.

The achievement of SPI's KPI in 2023 of 96.65% with a record of realization of follow-up internal audit results did not meet the target due to the lack of commitment of management/auditees to fulfill the follow-up recommendations of audit findings.

ANALISA HASIL AUDIT

Tahun 2023 pelaksanaan audit internal terjadi penurunan terhadap temuan audit yaitu dari 504 temuan di tahun 2022 menjadi 326 temuan di tahun 2023, hal ini dikarenakan jumlah objek audit di tahun 2023 lebih sedikit dibanding tahun 2022 yaitu dari 42 objek audit menjadi 28 objek audit.

Jika dikelompokan berdasarkan kategori dalam proses bisnis perusahaan, dari 504 temuan tersebut terdapat temuan dalam kategori Manajemen Sumber Daya sebanyak 267 (52,97%), kategori Pengukuran, Analisis dan Perbaikan sebanyak 119 (23,61%), kategori Operasi/Produksi sebanyak 71 (14,08%), kategori Tanggung Jawab Manajemen sebanyak 25 (4,96%), kategori Manajemen Risiko sebanyak 19 (3,76%) dan kategori Pemasaran sebanyak 3 (0,59%).

ANALYSIS OF AUDIT RESULTS

In 2023, the implementation of internal audit Decreased in audit findings, from 504 findings in 2022 to 326 findings in 2023, because the number of audit objects in 2023 is less than in 2022, from 42 audit objects to 28.

If grouped based on categories in the company's business processes, of the 504 findings there were 267 (52.97%) in the Resource Management category, 119 (23.61%) in the Measurement, Analysis and Improvement category, 71 (14.08%) in the Operations/Production category, 25 (4.96%) in the Management Responsibility category, 19 (3.76%) in the Risk Management category, and the Marketing category was 3 (0.59%).

Tindak Lanjut Hasil Audit

Follow-up of Audit Results

No	Uraian Description	Jumlah Temuan Audit Number of Audit Findings	Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations	Status Closed		Status Open		%	
				S	TDD	BS	BD	Target KPI	Realisasi Realization
1	Audit Intern Internal Audit	319	577	229	-	21	327	100	40
2	Audit Ekstern KAP 2020 KAP External Audit 2020	4	4	3	-	1	-	100	75
3	Audit Ekstern KAP 2022 KAP External Audit 2022	3	3	-	-	-	3	100	0
	Total Total	326	584	232	-	22	330	100	40

Keterangan:

- S : Sesuai
- TDD : Tidak Dapat Ditindaklanjuti
- BS : Belum Sesuai
- BD : Belum Ditindaklanjuti

Description:

- S : In accordance
- TDD : Not Actionable
- BS : Not Appropriate
- BD : Not yet followed up

INFORMASI TERKAIT AUDIT KHUSUS

Pada tahun 2023, SPI tidak melakukan audit khusus yang ditugaskan oleh Direksi. Sehingga tidak ada keterangan lebih lanjut terkait pelaksanaan audit khusus.

SPECIFIC AUDIT-RELATED INFORMATION

In 2023, SPI will not conduct a specific audit commissioned by the Board of Directors. There is no further information regarding the implementation of special audits.

EVALUASI KINERJA UNIT INTERNAL AUDIT

Untuk memastikan kinerja SPI telah berjalan sesuai dengan fungsinya, SPI melakukan penilaian atas program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh internal SPI. Demikian juga SPI dilakukan evaluasi kinerja oleh Direksi dengan melihat tingkat pencapaian (realisasi) dalam target-target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) atas kegiatan pengawasan yang dilaksanakan serta penugasan-penugasan tertentu dari Direksi. Pada tahun 2023 tingkat pencapaian PKPT dan penugasan lain sepenuhnya tercapai dengan rincian sebagai berikut:

PERFORMANCE EVALUATION OF INTERNAL AUDIT UNIT

To ensure that SPI's performance runs according to its function, SPI assesses the quality assurance program and improves the internal control function carried out by SPI internally. Likewise, SPI is evaluated by the Board of Directors by looking at the level of achievement (realization) in the targets in the Annual Supervision Work Program (Program Kerja Pengawasan Tahunan: PKPT) for supervisory activities carried out and assignments from the Board of Directors. In 2023, the achievement level of PKPT and other assignments will be fully achieved with the following details:

Uraian Description	Rencana Plan	Realisasi Realization
Audit Internal Internal Audit	29	21
· Unit Kerja Work Unit	7	-
· Unit Bisnis Business Unit	4	-
· Proyek Project	17	18
· Anak Bisnis Subsidiaries	1	3
Audit Sistem System Audit	0	13
· ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System	-	13
Pengawasan di Luar Audit Supervision Outside Audit	2	2
· Tinjauan Laporan Keuangan Financial Report Review	1	1
· Evaluasi Manajemen Risiko Risk Management Evaluation	1	-
· Tinjauan Hasil <i>Self Assessment</i> GCG GCG Self-Assessment Results Review	-	1
Total Total	31	36

Laporan tugas dan pelaksanaan kerja SPI disampaikan kepada Direktur Utama dan juga dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris cq. Komite Audit sebagai tembusan.

The report on the duties and implementation of SPI work is submitted to the President Director and also reported to the Board of Directors, Board of Commissioners cq. Audit Committee as a copy.

AKUNTAN PUBLIK

Public Accountant

PENUNJUKAN AUDITOR EKSTERNAL

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS dan memperhatikan rekomendasi Komite Audit serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Hertanto Grace Karunawan sebagai auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan independen atas laporan keuangan perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023. Proses audit yang dilakukan Akuntan publik yang ditunjuk juga telah mengacu standar profesional akuntan sesuai dengan kontrak kerja dalam ruang lingkup audit yang akan diselesaikan dalam rentang waktu tertentu.

Pelaksanaan pemeriksaan juga telah memenuhi kriteria objektivitas mengenai kewajaran dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

JUMLAH PERIODE AUDIT LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN OLEH AKUNTAN

Tahun 2023 merupakan tahun pertama bagi KAP Bambang Karunawan, CPA melakukan audit atas laporan Keuangan perseroan untuk tahun buku 2023 dengan fee audit sebesar Rp399.600.000,

APPOINTMENT OF EXTERNAL AUDITOR

Based on the authority granted by the GMS and taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable legislation, the Board of Commissioners has appointed Public Accountant Firm Hertanto Grace Karunawan as an external auditor to conduct an independent examination of the company's financial reports for the period ending December 31, 2023. The audit process carried out by the appointed public accountant has also referred to the accountant's professional standards according to the employment contract within the scope of the audit to be completed within a certain period.

The examination implementation has also met the criteria of objectivity regarding fairness and conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

NUMBER OF FINANCIAL REPORTS AUDIT PERIODS BY ACCOUNTANTS

2023 is the first year for KAP Bambang Karunawan, CPA audited the company's financial reports for the 2023 financial year with an audit fee of IDR399,600,000

No	Akuntan Publik Public Accountant	Kantor Akuntan Accounting Firm	Periode Audit Audit Period
1	Bambang Karunawan, CPA	KAP Hertanto, Grace, Karunawan	2017
2	Drs. Hertanto, M.S Ak, CPA, CPMA, CA	KAP Hertanto, Grace, Karunawan	2018
3	Drs. Hertanto, M.S Ak, CPA, CPMA, CA	KAP Hertanto, Grace, Karunawan	2019
4	Ali Hery	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan (Crowe Indonesia)	2020
5	Ali Hery	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan (Crowe Indonesia)	2021
6	Ali Hery	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan (Crowe Indonesia)	2022
7	Bambang Karunawan, CPA	KAP Hertanto Grace Karunawan	2023

HASIL AUDIT DAN JASA LAINNYA

Hasil audit tahun buku 2023 atas laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan menyatakan bahwa Laporan Keuangan Perseroan telah disajikan secara wajar tanpa pengecualian dan bebas dari salah saji material berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selain jasa audit keuangan, KAP Hertanto Grace Karunawan tidak memberikan jasa lain kepada Perseroan.

AUDIT RESULTS AND OTHER SERVICES

The audit results for the 2023 financial year on the company's Consolidated Financial Reports state that the company's financial reports have been presented without exception and are free from material misstatements based on applicable accounting principles common in Indonesia. In addition to financial audit services, KAP Hertanto Grace Karunawan does not provide other services to the company.

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

Perseroan menyadari bahwa jalannya operasional Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko, baik yang berada di bawah kendali maupun di luar kendali Perseroan. Karena itu, risiko tidak boleh diabaikan dan harus dikelola secara integrasi, optimal, dan berkesinambungan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari praktik tata kelola yang baik.

Kewajiban Perseroan untuk menerapkan Manajemen Risiko terdapat dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara dan diperbaharui melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 Tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Terselenggaranya manajemen risiko yang efektif dan terintegrasi membutuhkan peran aktif Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perseroan. Direksi mendefinisikan dan menetapkan kebijakan manajemen risiko dengan memperhatikan strategi, sasaran, tujuan dan sifat operasi Perseroan yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris serta disosialisasikan kepada seluruh karyawan Perseroan.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko dilaksanakan di seluruh lingkungan Perseroan berlandaskan kepada struktur model tiga lini dimana seluruh fungsi memiliki peran dan tanggung jawab dalam penerapan pengelolaan risiko. Lingkungan bisnis yang dinamis, perkembangan *best practices* industri, perubahan dan ketentuan yang berlaku

The Company realizes that the Company's operations are inseparable from various risks, under and outside the control of the Company. Therefore, risks should not be ignored and should be managed in an integrated, optimal, and sustainable manner as an integral part of good governance practices.

The Company's obligation to implement Risk Management is contained in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011, dated August 1, 2011, concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises and updated through the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-02/MBU/03/2023 March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

Effective and integrated risk management implementation requires the active role of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees of the Company. The Board of Directors defines and establishes risk management policies by taking into account the strategy, objectives, and nature of the Company's operations, which must be approved by the Board of Commissioners and disseminated to all employees of the Company.

IMPLEMENTATION OF THE RISK MANAGEMENT

The risk management process is carried out throughout the Company's environment based on a three-line model structure where all functions have roles and responsibilities in the risk management implementation. The dynamic business environment, the development of industry best practices, changes, and applicable

menjadi bahan evaluasi kerangka manajemen risiko untuk disesuaikan dan diperbaharui apabila diperlukan. Pelaksanaan manajemen risiko dilakukan dalam suatu rangkaian proses yang terdiri dari:

1. Penetapan Lingkup, Konteks, dan Kriteria

Proses manajemen risiko disesuaikan terhadap konteks perusahaan agar dapat berjalan dengan efektif. Penetapan dilakukan berdasarkan kepada cakupan, sasaran dan hubungan dengan para pemangku kepentingan;

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko bertujuan untuk mengetahui besaran risiko yang melekat pada aktivitas Perusahaan untuk dimodifikasi terhadap selera risiko sehingga Perusahaan dapat menetapkan perlakuan dan mitigasi risiko yang teridentifikasi dan menentukan modal untuk membiayai risiko berdasarkan kepada data empiris;

a. Identifikasi risiko dilakukan secara kolektif oleh seluruh individu dengan mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan, regulasi yang berlaku dan komitmen Perseroan;

b. Metode analisa risiko dilakukan dengan kombinasi kualitatif dan kuantitatif terhadap kemungkinan dan dampak untuk menentukan tingkat risiko terhadap pencapaian sasaran Perseroan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;

c. Evaluasi risiko dilakukan dengan membandingkan tingkat risiko dengan selera risiko Perseroan. Hasil tersebut dipergunakan untuk memahami kekuatan dan kelemahan pengendalian serta batasan dampak yang dapat diterima oleh Perseroan.

3. Perlakuan Risiko

Kontrol risiko dilakukan berdasarkan kepada penetapan selera risiko dimana Perseroan harus beroperasi didalam koridor yang telah ditetapkan. Akuntabilitas perlakuan disesuaikan berdasarkan tingkat kewenangan dan kompleksitas;

regulations become material for evaluating the risk management framework to be adjusted and updated if necessary. The implementation of risk management is carried out in a series of processes consisting of:

1. Determination of Scope, Context, and Criteria

The risk management process is adjusted to the company's context to run effectively. Determination is made based on coverage, objectives, and relations with stakeholders;

2. Risk Assessment

Risk assessment aims to determine the amount of risk inherent in the Company's activities to be modified against risk appetite so that the Company can determine the treatment and mitigation of identified risks and determine capital to finance risks based on empirical data;

a. Risk identification is carried out collectively by all individuals by considering the needs of stakeholders, applicable regulations, and company commitments;

b. The risk analysis method is carried out with a combination of qualitative and quantitative possibilities and impacts to determine the level of risk to the achievement of company objectives based on predetermined criteria;

c. Risk evaluation is carried out by comparing the level of risk with the company's risk appetite. The material is used to understand the strengths and weaknesses of control and the limits of impact that can be accepted by the company.

3. Risk Control

Risk control is based on risk appetite determination where the company must operate within a predetermined corridor. Accountability of treatment is adjusted based on the level of authority and complexity;

4. Pemantauan dan Tinjauan

Proses pemantauan dan tinjauan dilakukan dengan membandingkan rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi risiko yang telah dikelola. Lingkup pemantauan dan tinjauan mencakup dokumen kendali sampai dengan operasional pengelolaan risiko yang dilakukan oleh Perseroan untuk mengetahui ketidaksesuaian terhadap sasaran pengelolaan risiko;

5. Pencatatan dan Pelaporan

Seluruh hasil manajemen risiko dicatatkan dan dilaporkan secara berkala kepada seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan pembelajaran dalam pengelolaan dan akuntabilitas;

6. Komunikasi dan Konsultasi

Proses pengumpulan informasi dan umpan balik dilakukan berdasarkan kecerdasan kolektif untuk membantu pemangku kepentingan yang relevan dalam memahami risiko. Komunikasi dan konsultasi dimaksudkan untuk:

- a. Menyatukan beragam area keahlian pada tiap tahap proses manajemen risiko;
- b. Memastikan berbagai pandangan dipertimbangkan dengan memadai saat menentukan kriteria risiko dan mengevaluasi risiko;
- c. Memberikan informasi yang memadai untuk memfasilitasi pengawasan risiko dan pengambilan keputusan;
- d. Membangun rasa keterlibatan dan kepemilikan di antara pihak yang terpengaruh oleh risiko.

STRATEGI MANAJEMEN RISIKO

Strategi manajemen risiko disusun mencakup beberapa prinsip yakni:

1. Perusahaan menerapkan sistem pengelolaan manajemen risiko berbasis ISO 31000:2018 yang terintegrasi dengan seluruh proses bisnis sesuai dengan *Good Corporate Governance* (GCG);

4. Monitoring and Review

The monitoring and review process is carried out by comparing the established plan with the realization of risks that have been managed. The scope of monitoring and review includes control documents up to risk management operations carried out by the Company to determine non-conformity with risk management objectives;

5. Recording and Reporting

All risk management results are recorded and reported regularly to all stakeholders as learning materials in management and accountability;

6. Communication and Consultation

Collecting information processes and feedback is carried out based on collective intelligence to assist relevant stakeholders in understanding risks. Communication and consulting are intended to:

- a. Bring together diverse areas of expertise at each stage of the risk management process;
- b. Ensure multiple views are adequately considered when determining risk criteria and when evaluating risk;
- c. Provide adequate information to facilitate risk monitoring and decision-making;
- d. Build a sense of involvement and ownership among parties affected by risk.

RISK MANAGEMENT STRATEGY

The risk management strategy is prepared to cover several principles, namely:

1. The Company implements an ISO 31000:2018-based risk management system that is integrated with all business processes according to *Good Corporate Governance* (GCG);

2. Pengelolaan risiko ditujukan kepada seluruh jajaran Perseroan untuk diimplementasikan secara proaktif agar tercapainya budaya risiko dan dikomunikasikan secara inklusif oleh manajemen puncak sebagai *tone of the top*;
3. Pengembangan kerangka kerja manajemen risiko diwujudkan dengan prinsip terukur, sistematis, lugas, efisien dan efektif; dan
4. Proses manajemen risiko diawasi dan ditinjau secara terencana, terkendali dan termutakhirkan dalam akuntabilitas pengelolaan risiko.

Dalam mengelola risiko, perusahaan menetapkan selera risiko dengan mempertimbangkan aspirasi pemegang saham sebagai berikut:

1. Perusahaan berusaha memastikan nilai kontribusi kepada negara berupa dividen sesuai dengan target yang ditetapkan.
2. Perusahaan terus secara aktif menjalankan inisiatif strategis dengan mengambil risiko moderat yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan konsentrasi portofolio.
3. Perusahaan meminimalkan disrupsi operasional kegiatan usaha dari kemungkinan dampak rencana kebijakan Kementerian/ Lembaga Pemerintah lainnya.
4. Perusahaan tidak memberikan toleransi terhadap setiap pelanggaran peraturan dan perundang-undangan.
5. Perusahaan tidak memberikan toleransi terhadap perusakan lingkungan yang dan harus berupaya meminimalkan disrupsi dampak perubahan iklim yang mempengaruhi kinerja operasional.
6. Perusahaan tidak memberikan toleransi terhadap ancaman reputasi yang dapat mempengaruhi secara signifikan pelaksanaan kegiatan bisnis.
7. Perusahaan tidak memberikan toleransi terhadap segala jenis tindak penyuapan.
8. Perusahaan memberikan minimum toleransi terhadap permasalahan proyek yang dilaksanakan berupa keterlambatan

2. Risk management is aimed at all levels of the Company to be implemented proactively to achieve a risk culture and communicated inclusively by top management as the tone of the top;
3. The development of a risk management framework is realized, with measurable, systematic, straightforward, efficient, and effective principles; and
4. The risk management process is monitored and reviewed in a planned, controlled, and updated manner in risk management accountability.

In managing risk, the company determines its risk appetite by considering shareholder aspirations as follows:

1. The company tries to ensure that the value of contributions to the state in the form of dividends is in line with the targets set.
2. The company continues to actively pursue strategic initiatives by taking the moderate risks necessary to maintain a balanced portfolio concentration.
3. The company minimizes operational disruption to business activities from the possible impact of policy plans from other ministries and government agencies.
4. The company does not tolerate any violations of regulations and laws.
5. Companies do not tolerate environmental damage and must strive to minimize the disruption caused by the impact of climate change, which affects operational performance.
6. The company does not tolerate reputation threats that can significantly affect the implementation of business activities.
7. The company does not tolerate any type of bribery.
8. The company provides a minimum tolerance for problems with projects implemented in the form of delays in work, excess use of the

pengerjaan, kelebihan dalam penggunaan anggaran, maupun kualitas pekerjaan.

9. Perusahaan melakukan pengambilan keputusan strategis yang diperlukan untuk mencapai manfaat jangka panjang, termasuk untuk mengantisipasi setiap perubahan dalam kegiatan usaha, meskipun terdapat potensi risiko moderat terhadap kinerja jangka pendek yang dapat dikelola secara penuh.
10. Perusahaan menempatkan prioritas utama atas keamanan informasi, kehandalan infrastruktur IT, dan kesiapan teknologi cyber yang harus dijalankan.

PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Penanggung Jawab Penerapan Manajemen risiko di lingkungan Perseroan dengan mengacu pada model pertahanan tiga lini (*Three Lines of Defence*) adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris
Bertanggungjawab dalam memastikan pemantauan atas efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal dan pengendalian risiko oleh Direksi dan Manajemen melalui tinjauan manajemen atas:
 - a. Memantau pelaksanaan strategi dan pengelolaan risiko strategis perusahaan secara berkala;
 - b. Pemantauan atas tindak lanjut temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh regulator, audit internal, dan audit eksternal melalui Komite Audit dan Komite Pemantauan Manajemen Risiko dan GCG.
 - c. Meninjau secara berkala terhadap pelaksanaan strategi perusahaan dalam kegiatan operasional maupun non operasional berdasarkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal bersama dengan manajemen.
2. Direksi
 - a. Menerapkan Sistem Manajemen Risiko berbasis SNI ISO 31000 yang diintegrasikan ke dalam semua proses bisnis dan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

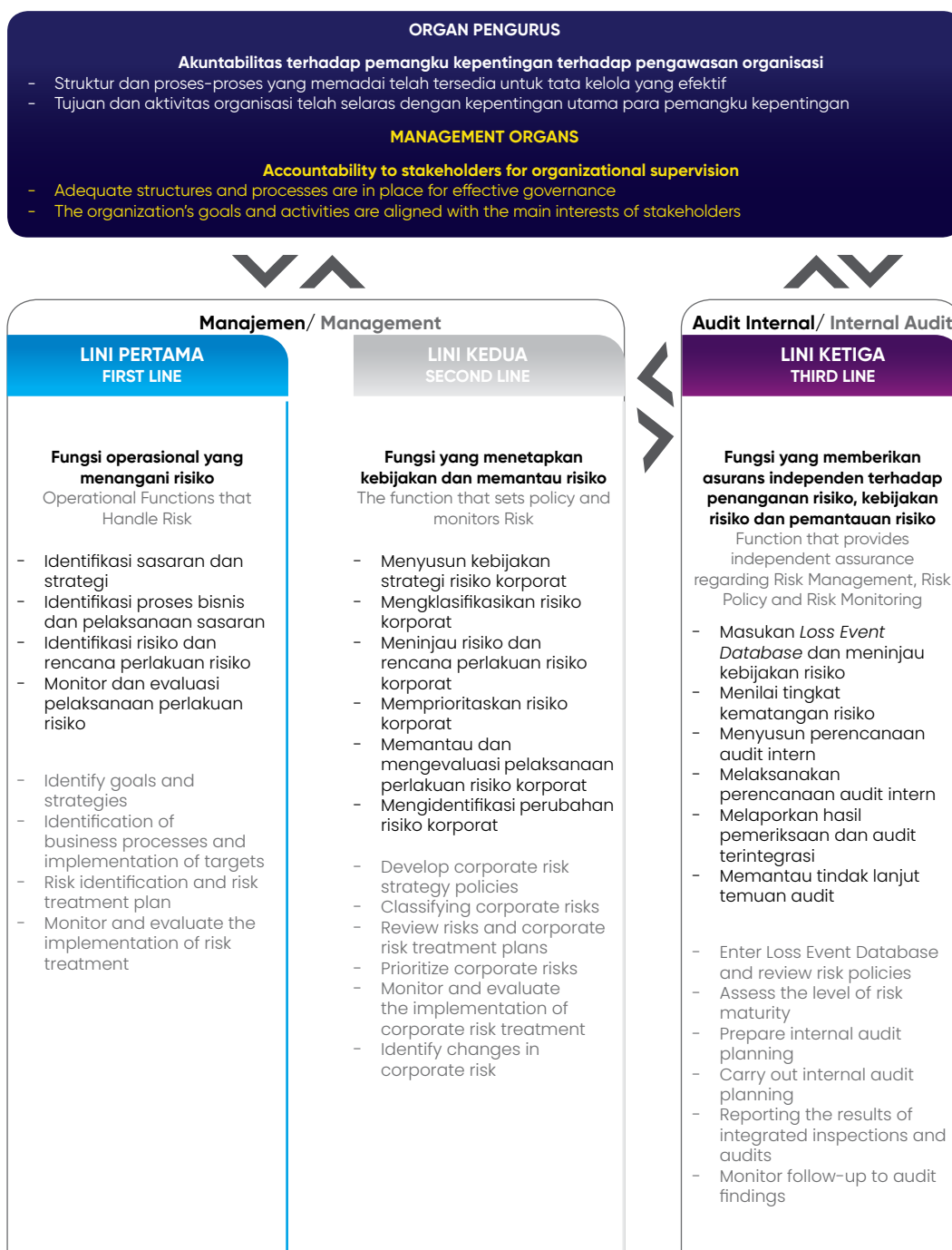
budget, and quality of work.

9. The company makes strategic decisions necessary to achieve long-term benefits, including anticipating any changes in business activities, even though there is a potential moderate risk to short-term performance that can be fully managed.
10. The company places top priority on information security, IT infrastructure reliability, and cyber technology readiness that must be implemented.

PERSON IN CHARGE OF THE RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

Person in Charge of the Risk Management Implementation within the Company with reference to the Three Lines of Defence model is as follows:

1. The Board of Commissioners
Responsible for ensuring monitoring of the effectiveness of the implementation of the internal control system and risk control by the Board of Directors and Management through management review of:
 - a. Monitoring strategy implementation and key risks of the company on a regular basis;
 - b. Monitoring of follow-up findings and recommendations submitted by regulators, internal audits, and external audits through the Audit Committee, the Risk Management, and the GCG Monitoring Committee.
 - c. Periodically review the implementation of the company's strategy in operational and non-operational activities based on internal control policies and procedures together with management.
2. The Board of Directors
 - a. Implements a Risk Management System based on SNI ISO 31000, which is integrated into all business processes and according to Good Corporate Governance.



b. Menynergikan proses manajemen risiko dilakukan berdasarkan *risk based thinking* approach dimulai dari penetapan Visi, Misi, RJPP, RKAP, KPI dan pelaksanaan seluruh proses bisnis termasuk pengambilan keputusan.

b. Synergizing the risk management process is carried out based on a risk-based thinking approach starting from the Vision, Mission, RJPP, RKAP, KPI determination, and all business processes implementation, including decision making.

- c. Menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penerapan manajemen risiko, baik personil, anggaran, sarana maupun kegiatan untuk peningkatan kompetensi bagi setiap karyawan untuk dapat menerapkan sistem manajemen risiko.

3. Lini Pertama

Pertahanan lapis pertama dilaksanakan oleh unit bisnis yang melakukan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang merupakan garis depan atau ujung tombak organisasi. Lini pertama diharapkan untuk:

- a. Memastikan adanya lingkungan pengendalian (*control environment*) yang kondusif di unit bisnis mereka.
- b. Menerapkan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan sewaktu menjalankan peran dan tanggung jawab mereka terutama dalam mengejar pertumbuhan perusahaan. Mereka diharapkan secara penuh kesadaran mempertimbangkan faktor risiko dalam keputusan dan tindakan yang dilakukannya.
- c. Mampu menunjukkan adanya pengendalian internal yang efektif di unit bisnis mereka, dan juga adanya pemantauan dan transparansi terhadap efektifitas pengendalian internal tersebut

4. Lini Kedua

Pertahanan lapis kedua tidak hanya dilaksanakan oleh fungsi manajemen risiko yang sudah terstruktur, namun, harus juga dilaksanakan oleh unit bisnis yang membawahi suatu proyek. Lini kedua diharapkan untuk:

- a. Bertanggung jawab dalam mengembangkan, mendesain dan memantau implementasi manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan.
- b. Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan Prosedur yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

- c. Provide the necessary resources for the risk management implementation, personnel, budget, facilities, and activities to increase competence for each employee to be able to implement a risk management system.

3. First-Line

The first line of defense is carried out by business units that carry out the company's daily operational activities, especially those that are the front line or spearhead of the organization. The first line is expected to:

- a. Ensure a conducive control environment in their business units.
- b. Implement established risk management policies when carrying out their roles and responsibilities, especially in pursuing company growth. They are expected to consciously consider risk factors in their decisions and actions.
- c. Able to demonstrate the existence of effective internal controls in their business units and the monitoring and transparency of the effectiveness of internal controls

4. Second Line

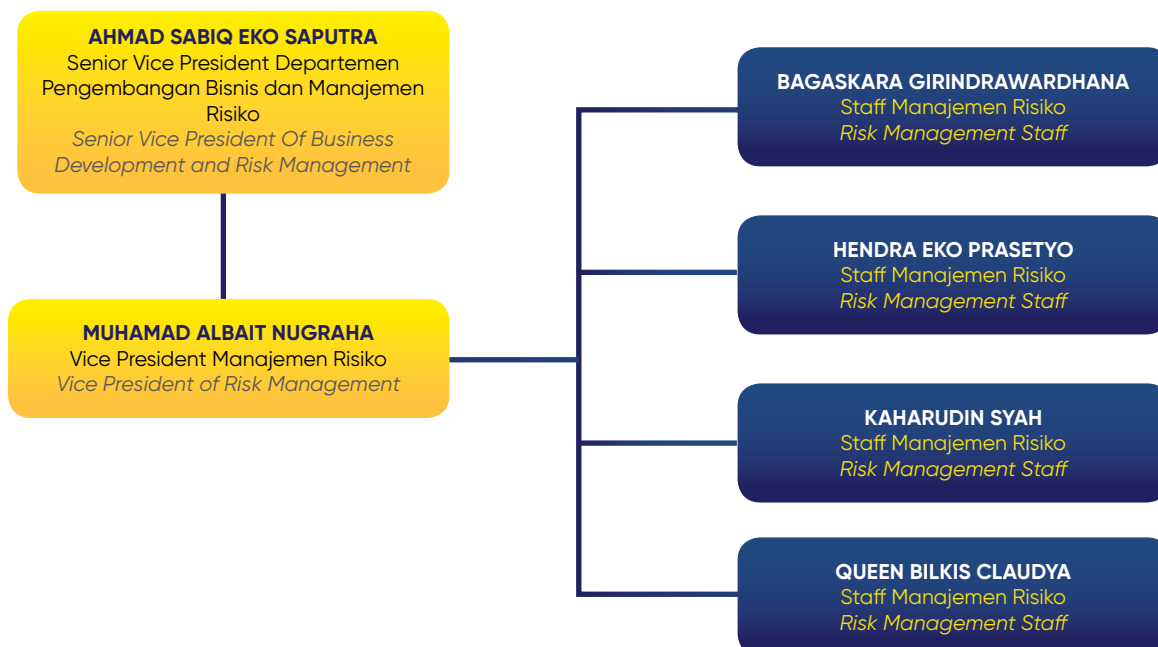
The second layer of defense is not only implemented by a structured risk management function but must also be implemented by the business unit that oversees a project. The second line is expected to:

- a. Responsible for developing, designing, and monitoring the implementation of the company's overall risk management.
- b. Supervise how business functions are carried out within the corridors of risk management policies and standard operational procedures set by the company.

- c. Memantau dan melaporkan risiko Perseroan secara menyeluruh kepada organ yang memiliki akuntabilitas tertinggi di Perseroan.
5. Lini Ketiga
Pertahanan lapis ketiga dilaksanakan oleh auditor baik auditor internal maupun auditor eksternal. Peran auditor internal jauh lebih intens dalam model tiga lini ini karena mereka adalah bagian internal perusahaan yang bersifat independen terhadap fungsi-fungsi lainnya. Lini ketiga diharapkan untuk:
- Melakukan kajian dan evaluasi terhadap rancang bangun dan implementasi manajemen risiko secara keseluruhan.
 - Memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- c. Monitor and report the company's risks thoroughly to the organs that have the highest accountability in the company.
5. Third Line
Third-layer defense is implemented by auditors, both internal and external auditors. The role of internal auditors is much more intense in this three line model because they are internal parts of the company that are independent of other functions. The third line is expected to:
- Conduct a review and evaluation of the overall risk management design and implementation.
 - Ensure that the first-tier and second-tier defenses run as expected.

STRUKTUR BAGIAN MANAJEMEN RISIKO

Bagan Struktur organisasi Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:



STRUCTURE OF THE RISK MANAGEMENT SECTION

The Company's Risk Management organizational structure chart is as follows:

PROFIL SVP PENGEMBANGAN BISNIS DAN MANAJEMEN RISIKO

SVP Pengembangan Bisnis dan Manajemen Risiko Perseroan dijabat oleh Ahmad Sabiq Eko Saputra, sejak 12 Desember 2023 berdasarkan Surat Keputusan No. 408/D/KPTS/XII/2023. Adapun profil singkat adalah sebagai berikut:



AHMAD SABIQ EKO SAPUTRA
SENIOR VICE PRESIDENT PENGEMBANGAN BISNIS DAN MANAJEMEN RISIKO
 SENIOR VICE PRESIDENT OF BUSINESS DEVELOPMENT AND RISK MANAGEMENT

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, 24 November 1980 (43 tahun). Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Sipil di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2005 dan Master Manajemen di Institut Bisnis Nusantara pada tahun 2021.

Ahmad Sabiq Eko Saputra mengawali karir sebagai Manager Pengawasan dan Pengendalian di PT Brantas Abipraya (Persero) pada tahun (2020–2023), Kepala SPI (2023) dan Senior Vice President Pengembangan Bisnis dan Manajemen Risiko di PT Brantas Abipraya (Persero) pada tahun (2023–sekarang).

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BIDANG MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelola manajemen risiko perusahaan, inisiatif pengembangan dilakukan secara menyeluruh terhadap kemampuan dan pemahaman manajemen risiko yang terintegrasi melalui berbagai aktivitas, termasuk peningkatan kesadaran akan Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis ISO 22301, pemahaman terhadap Sistem Manajemen Anti Penyipuan,

PROFILE OF SVP BUSINESS DEVELOPMENT AND RISK MANAGEMENT

The SVP of Business Development and Risk Management of the Company has been held by Ahmad Sabiq Eko Saputra, since 12 December 2023 based on Decision Letter No. 408/D/KPTS/XII/2023. The brief profile is as follows:

Indonesian citizen, born in Semarang, 24 November 1980 (43 years old). He completed his Bachelor's degree in Civil Engineering at the Muhammadiyah University of Surakarta in 2005 and a Master's Management degree at the Institut Bisnis Nusantara in 2021.

Ahmad Sabiq Eko Saputra started his career as Supervisory and Control Manager at PT Brantas Abipraya (Persero) in 2020–2023, Head of SPI in 2023, and Senior Vice President of Business Development and Risk Management at PT Brantas Abipraya (Persero) in 2023–2023.

COMPETENCY DEVELOPMENT IN THE RISK MANAGEMENT

To improve the quality of the company's risk management managers, development initiatives are carried out thoroughly on the ability and understanding of integrated risk management through various activities, including increasing awareness of the ISO 22301 Business Continuity Management System, understanding of the Anti-Bribery Management System, and through technical

serta melalui pelatihan teknis berupa pengukuran maturitas manajemen risiko, evaluasi efektivitas, dan tata kelola dalam manajemen risiko. Serangkaian sesi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terkait Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis sebagai langkah awal Perusahaan untuk menuju standarisasi ISO 22301. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip ISO 22301, tetapi juga memberikan dasar yang kokoh bagi manajemen risiko yang berkelanjutan.

Sebagai peningkatan efektivitas manajemen risiko, maka Perusahaan menyelenggarakan pendalaman terhadap pengukuran maturitas manajemen risiko dan evaluasi efektivitas manajemen risiko. Proses ini dilakukan agar proses tinjauan yang dilakukan oleh Unit Manajemen Risiko dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran maupun penciptaan nilai-nilai.

Sebagai pondasi tata kelola dalam manajemen risiko dilakukan penguatan melalui struktur organisasi yang efektif untuk mendukung proses manajemen risiko guna memastikan bahwa setiap pengelola risiko memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam konteks manajemen risiko. Langkah-langkah ini tidak terbatas pada pengembangan kapabilitas sumber daya manusia, namun merupakan langkah strategis untuk mengelola risiko yang kompleks serta dinamika industri di masa depan.

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Sebagai komitmen Perusahaan dalam pelaksanaan manajemen risiko, maka dilaksanakan sertifikasi bagi Unit Manajemen Risiko Perusahaan sebagai pernyataan bahwa kompetensi yang dimiliki koordinator risiko perusahaan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Pada tahun ini, dilaksanakan sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* bagi jajaran Direksi dan Dewan Komisaris, serta *Qualified Chief Risk Officer* untuk jajaran pimpinan unit atau *Senior Vice President*.

training in the form of risk management maturity measurement, evaluation of effectiveness, and governance in risk management. A series of sessions were conducted to raise awareness of the Business Continuity Management System as the Company's first step towards ISO 22301 standardization. This activity is not only increases understanding of the principles of ISO 22301, but also provides a solid foundation for sustainable risk management.

As an improvement in the effectiveness of risk management, the Company conducts a deepening of risk management maturity measurement and evaluation of risk management effectiveness. This process is carried out so that the review process carried out by the Risk Management Unit can contribute to the achievement of objectives and the creation of values.

As a foundation for governance in risk management, strengthening is carried out through an effective organizational structure to support the risk management process and ensure that each risk manager understands their respective roles and responsibilities in the context of risk management. These steps are not limited to developing human capital capabilities but are strategic steps to manage complex risks and industrial dynamics in the future.

RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

As the Company's commitment to the implementation of risk management, certification is carried out for the Company's Risk Management Unit as a statement that the competence of the company's risk coordinator is according to the level of need. This year, *Qualified Risk Governance Professional Certification* was carried out for the Board of Directors and the Board of Commissioners, and *Qualified Chief Risk Officer* for unit leaders or Senior Vice President.

Rekapitulasi Sertifikasi Manajemen Risiko

Recapitulation of Risk Management Certification

No	Personil Personnel	RI 2022	RI 2023	Jenis Sertifikasi Type of Certification
1	Risk Leaders Risk Leaders			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		5	QRGP
	Komite Committee	1	5	QRGP
	Direksi Board of Directors	1	4	QRGP
2	Risk Owner Risk Owner			
	SVP Departemen SVP Departemen		9	QCRO
	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary		1	QCRO
	Kepala SPI Head of SPI		1	QCRO
	Project Manager Project Manager			QCRO
3	VP Risk Management Unit VP Risk Management Unit	1		CRMP
4	Risk Management Unit Risk Management Unit	4		CRMO
	Total	3	23	

RISIKO-RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Penerapan Manajemen Risiko merupakan suatu aktivitas Perseroan untuk menjamin pencapaian suatu tujuan. Pengelolaan risiko di implementasikan terhadap sumber risiko yang teridentifikasi maupun yang diwaspadai. Risiko Utama yang dihadapi oleh Perseroan antara lain risiko keuangan, risiko operasional dan risiko strategis.

1. Risiko Keuangan: terdiri dari risiko mata uang asing, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas. Risiko yang menjadi tambahan dalam keuangan antara lain:
 - Risiko Pembayaran dari Owner (keterlambatan pembayaran) dan
 - Risiko Kegagalan Pembayaran dari Owner
2. Risiko Operasional dan Bisnis: terdiri dari risiko keterlambatan pembayaran, risiko operasi, dan risiko berkurangnya proyek dari pelanggan.

RISKS FACED BY THE COMPANY

Implementation of risk management is a company activity to ensure the achievement of a goal. Risk management is implemented based on identified and alert sources of risk. The main risks faced by the company include financial risk, operational risk, and strategic risk.

1. Financial Risk: consists of foreign currency risk, interest rate risk, and liquidity risk. Additional financial risks include:
 - Payment Risk from the Owner (late payment) and
 - Risk of Payment Failure from the Owner
2. Operational and Business Risks: Consists of the risk of late payments, operating risks, and the risk of reducing projects from customers.

Risiko untuk Operasional lebih berorientasi terhadap:

- Keterlambatan akibat Waktu, Risiko terhadap Mutu dan adanya penurunan Laba
3. Risiko Strategis: terdiri dari risiko penurunan proyek pemerintah, risiko persaingan usaha, dan risiko perubahan kebijakan pemerintah

UPAYA UNTUK MENGELOLA RISIKO

Perseroan melakukan pengelolaan terhadap kemungkinan munculnya risiko baik internal maupun eksternal. Atas dasar hal tersebut, Perseroan mengelola risiko dengan melakukan identifikasi risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko pengawasan terhadap risiko dan pelaporan secara berkala.

Dengan pengelolaan tersebut diharapkan risiko dapat dikendalikan dan tidak mengurangi nilai Perseroan secara signifikan. Namun, Perseroan juga menyadari adanya risiko yang berada di luar kendali yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya oleh upaya-upaya internal.

Risk for Operations is more oriented to:

- Delay due to Time, Risk to Quality, and a decrease in profit
3. Strategic Risk: consists of the risk of decline in government projects, business competition risk, and the risk of changes in government policy

EFFORTS TO MANAGE RISK

The company manages the possibility of emerging risks, both internal and external. Based on this, the company manages risk by carrying out risk identification, risk evaluation, risk mitigation, risk monitoring, and regular reporting.

In addition, the Company monitors and reviews risks regularly, so it is expected that these risks can be controlled and do not reduce the value of the Company significantly. However, the Company is also aware of risks beyond its control that cannot be eliminated by internal efforts.

Profil dan Mitigasi Risiko Perusahaan 2023

Company Risk Profile and Mitigation 2023

No	Profil Risiko Risk Profile	Sebab Risiko Risk Cause	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
1	Tidak Tercapainya <i>Financial Close</i> Due To Not Achieving <i>Financial Close</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Credit rating</i> perusahaan menurun 2. Investasi yang kurang menarik 3. Modal perusahaan yang sangat terbatas <ol style="list-style-type: none"> 1. The company's credit rating decreased 2. Less attractive investment 3. Very limited company capital 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama strategis investasi dengan bank ataupun pemerintah melalui <i>Viability Gap Fund</i> (VGF) 2. Memastikan investasi berdasarkan toleransi risiko perusahaan 3. Melakukan <i>Joint Operation</i> (JO) ataupun sumber pendanaan lainnya 4. Melakukan divestasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategic investment cooperation with banks or governments through VGF 2. Ensuring investment based on the company's risk tolerance 3. Conducting JO or sourcing other funding 4. Divesting
2	Keterbatasan Modal Kerja <i>Limited Working Capital</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tertundanya penerimaan pembayaran 2. Administrasi kontrak yang lemah <ol style="list-style-type: none"> 1. Delayed receipt of payments 2. Weak contract administration 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pola belanja proyek 2. Prioritisasi sumber pendanaan proyek kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) 3. Menetapkan kebijakan pemilihan mitra yang memiliki modal yang kuat 4. <i>Contract review</i> secara terpusat

Profil dan Mitigasi Risiko Perusahaan 2023

Company Risk Profile and Mitigation 2023

No	Profil Risiko Risk Profile	Sebab Risiko Risk Cause	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Project spending pattern policy 2. Prioritization of project funding sources to Country/ Region Revenue and Expenditure Budget (APBN/D) 3. Establish policies for selecting partners who have strong capital 4. Centralized contract review
3	Penurunan Volume Produksi Decrease In Production Volume	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keandalan mesin pembangkit 2. Penurunan debit air karena faktor alam 3. Disrupsi teknologi <ol style="list-style-type: none"> 1. Reliability of generating machines 2. Decrease in water discharge due to natural factors 3. Technological disruption 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan sistem pengawasan operasional 2. Melakukan penataan dan penghijauan alam sekitar sumber mata air 3. Mengembangkan bisnis melalui konsorsium PLN <ol style="list-style-type: none"> 1. Implement an operational supervision system 2. Structuring and greening the nature around springs 3. Developing business through the PLN consortium
4	Penurunan Pangsa Pasar Decreasing Market Share	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlambatan tingkat pertumbuhan ekonomi dunia 2. Penurunan ketersediaan anggaran belanja pemerintah khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) 3. Penurunan pengembangan segmen Sumber Daya Air (SDA) 4. Rendahnya inovasi teknologi 5. Persaingan yang semakin ketat di pasar konstruksi <ol style="list-style-type: none"> 1. Slowing down the world economic growth rate 2. Decreasing the availability of government expenditures, especially for PSN projects 3. Decreasing the development of the natural resources segment 4. Low technology innovation 5. Increasingly fierce competition in the construction market 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan/perencanaan harga berbasis risiko 2. Melakukan penetrasi terhadap kajian pasar yang alokasinya lebih besar 3. Melakukan divestasi terhadap non-perform project 4. Memperoleh pangsa pasar Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) 5. Memperkuat sindikasi perbankan 6. Melakukan inovasi menggunakan metode ataupun material baru <ol style="list-style-type: none"> 1. Risk-based pricing 2. Penetrating market studies with larger allocations 3. Divesting non-performing projects 4. Gaining KPBU market share 5. Strengthening banking syndication 6. Innovating the use of new methods or materials
5	Implementasi Teknologi Rendah Low Technology Implementation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kompleksitas teknologi terlalu tinggi 2. Kapabilitas pengguna yang masih rendah 3. Kurangnya infrastruktur teknologi di lingkungan Perseroan <ol style="list-style-type: none"> 1. The level of technology complexity is too high 2. User capabilities are still low 3. Lack of technology infrastructure in the Company environment 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi secara menyeluruh melalui penyelenggaraan berdasarkan wilayah kerja 2. Penetapan kebijakan penggunaan sistem 3. Meningkatkan kapabilitas teknologi di lingkungan Perseroan 4. Perubahan sistem sesuai standar Perseroan <ol style="list-style-type: none"> 1. Comprehensive socialization through implementation based on work area 2. Establishment of system usage policies 3. Improve technology capabilities in the Company environment 4. System changes according to company standards

Profil dan Mitigasi Risiko Perusahaan 2023

Company Risk Profile and Mitigation 2023

No	Profil Risiko Risk Profile	Sebab Risiko Risk Cause	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
6	Kecelakaan Kerja Work Accident	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensitas perubahan iklim yang signifikan 2. Timbulnya penyakit akibat kerja 3. Kontur lahan pekerjaan tidak mendukung <ol style="list-style-type: none"> 1. Significant intensity of climate change 2. The incidence of occupational diseases 3. The contour of the work land is not supportive 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan penerapan K3L 2. Kontingensi penerapan K3L <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring of the implementation of K3L 2. Contingency of implementing K3L
7	Kalah Dalam Mengikuti Tender Losing In Participating In Tenders	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi perusahaan dan pegawai yang masih kurang lengkap 2. Ketentuan perubahan Sertifikat Keahlian (SKA) menjadi Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) <ol style="list-style-type: none"> 1. Incomplete competence of companies and employees 2. Terms of changing SKA to SKK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan sertifikasi serentak 2. Prioritisasi pasar potensial <ol style="list-style-type: none"> 1. Acceleration of simultaneous certification 2. Prioritization of potential markets
8	Cost Overrun Cost Overrun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan 2. Proses akuntabilitas yang tidak bertanggung jawab 3. Kurangnya keterbukaan dalam tata kelola perusahaan 4. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku <ol style="list-style-type: none"> 1. Absence of supervision of the implementation of corporate governance 2. Irresponsible accountability process 3. Lack of openness in corporate governance 4. Lack of understanding of applicable regulations 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan <i>stockpiling</i> 2. Melakukan kontrak payung terpusat 3. Kebijakan penetapan harga berbasis risiko <ol style="list-style-type: none"> 1. Conduct <i>stockpiling</i> 2. Conduct centralized umbrella contracts 3. Risk-based pricing policy
9	Peyimpangan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Deviation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan 2. Proses akuntabilitas yang tidak bertanggung jawab 3. Kurangnya keterbukaan dalam tata kelola perusahaan 4. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku <ol style="list-style-type: none"> 1. Absence of supervision of the implementation of corporate governance 2. Irresponsible accountability process 3. Lack of openness in corporate governance 4. Lack of understanding of applicable regulations 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan tinjauan kebijakan perusahaan secara berkala 2. Melakukan sosialisasi untuk penguatan penerapan kode etik <ol style="list-style-type: none"> 1. Conduct periodic company policy reviews 2. Conduct socialization to strengthen the implementation of the code of conduct

Profil dan Mitigasi Risiko Perusahaan 2023

Company Risk Profile and Mitigation 2023

No	Profil Risiko Risk Profile	Sebab Risiko Risk Cause	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
10	Penyuapan Dari Atau Kepada Mitra Bribery From Or To Partners	<ol style="list-style-type: none"> Masih lemahnya proses pengawasan kode etik Belum adanya sentralisasi pengadaan dan pembayaran Adanya birokrasi dalam proses pengadaan ataupun pembayaran Masih terdapatnya celah dalam sistem pengadaan dan pembayaran 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengadaan dan pembayaran terpusat Program penghargaan bagi yang dapat menemukan tindak penyuapan Menggunakan sistem teknologi dan transparan
		<ol style="list-style-type: none"> Weak code of conduct supervision process of the code of conduct There is no centralization of procurement and payment There is bureaucracy in the procurement or payment process There are still gaps in the procurement and payment system 	<ol style="list-style-type: none"> Conduct centralized procurement and payment Reward program for those who can find bribery Using a technology and transparent system
11	Turnover Karyawan Yang Tinggi High Employee Turnover	<ol style="list-style-type: none"> Ketidaksesuaian kompetensi karyawan <i>Employee engagement</i> yang rendah <i>Benefit</i> yang diterima tidak sesuai 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan berbasis <i>Training Need Analysis</i> (TNA) Pengembangan Individual <i>career path</i> Integrasi sistem pengukuran kinerja
		<ol style="list-style-type: none"> Employee competency mismatch Low employee engagement Benefits received are not appropriate 	<ol style="list-style-type: none"> TNA-based development Individual career path development Performance measurement system integration
12	Keterbatasan/ Penurunan Kinerja Mitra Limitations/ Deterioration Of Partner Performance	<ol style="list-style-type: none"> Mitra enggan untuk bekerjasama akibat adanya tanggung jawab yang belum terselesaikan kepada mitra Keterbatasan pilihan mitra Pekerjaan dilakukan oleh mitra yang baru 	<ol style="list-style-type: none"> Membentuk tim pengelola mitra Menyelesaikan hutang perusahaan kepada mitra
		<ol style="list-style-type: none"> Partners are reluctant to cooperate due to unresolved responsibilities to partners Limited partner choice The work is carried out by new partners 	<ol style="list-style-type: none"> Forming a partner management team Resolving company debts to partners

EVALUASI EFEKTIVITAS MANAJEMEN RISIKO

Sebagai salah satu komitmen manajemen Perseroan untuk memajukan budaya kesadaran risiko secara menyeluruh, sekaligus menegaskan urgensi pengendalian internal yang berdaya guna di semua tingkatan organisasi. Kesadaran risiko dibentuk melalui proses berbasis risiko, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian risiko secara independen, pengawasan, hingga tinjauan, bahkan mencakup kampanye dan program pembelajaran. Dalam memastikan keberlangsungan sistem ini, program sosialisasi dilakukan secara berkala dan menjadi bagian dari penilaian kinerja untuk menilai efektivitas pengelolaan risiko.

EVALUATION OF RISK MANAGEMENT EFFECTIVENESS

One of the company's management's commitments is to promote a culture of risk awareness as a whole while affirming the urgency of effective internal control at all levels of the organization. Risk awareness is formed through a risk-based process, starting from planning, implementation, independent risk assessment, and supervision to review, even including campaigns and learning programs. To ensure the sustainability of this system, socialization programs are carried out periodically and become part of performance appraisals to assess the effectiveness of risk management.

Sebagai cara untuk memastikan dan menjaga pengelolaan risiko berjalan dengan efektif pada setiap fungsi, proses manajemen risiko dilakukan secara inklusif dengan melibatkan setiap tingkatan agar memahami dan mematuhi kebijakan strategi risiko yang ditetapkan. Pengelolaan risiko yang efektif diyakini akan terwujud melalui integrasi dengan proses bisnis sampai dengan pengambilan keputusan strategis. Kecukupan pada proses integrasi diukur berdasarkan aspek *process*, *people* dan *tools*, dimana masing-masing harus dapat mendukung satu sama lain agar terciptanya sinergi proses manajemen risiko. Dalam proses evaluasi kinerja manajemen risiko tahun 2023, maka dilakukan berdasarkan kepada tiga aspek utama kecukupan risiko sebagai berikut:

1) *Process*

Proses manajemen risiko telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan mengingat proses penilaian risiko sudah melalui pendekatan kuantitatif berdasarkan *best practice* yang didorong oleh PER-2. Bersama dengan hal tersebut, Perseroan melakukan integrasi manajemen risiko dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan baik secara operasional bisnis maupun aksi strategis. Pada tahun 2023, Perseroan mencatatkan nilai pemenuhan pelaporan manajemen risiko sebesar 100%. Kesadaran pengelola risiko terhadap pelaporan risiko sudah dapat dikatakan baik, walaupun dalam penerapan manajemen risiko secara inkremental ditingkatkan berdasarkan kepada pareto signifikansi hambatan.

2) *People*

Peningkatan kapabilitas organ pengelola risiko dilakukan secara *top-down* dan bertahap, dimana pada tahun ini berfokus pada sertifikasi Direksi dan Dewan Komisaris beserta jajaran dibawahnya. Proses ini akan dilanjutkan sampai dengan tingkat proyek.

3) *Tools*

Perseroan telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang diperuntukkan sebagai media pelaporan. Pada

In ensuring and maintaining effective risk management in each function, the risk management process is carried out inclusively by involving every level to understand and comply with the established risk strategy policies. Effective risk management is believed to be realized through integration with business processes to strategic decision-making. Adequacy in the integration process is measured based on aspects of process, people, and tools, where each must be able to support the other to create synergy in the risk management process. The risk management performance evaluation process in 2023, is carried out based on three main aspects of risk adequacy as follows:

1) *Process*

The risk management process has experienced significant improvements considering that the risk assessment process has gone through a quantitative approach based on best practices driven by PER-2. At the same time, the Company integrates risk management in the planning and decision-making stages of business ventures and strategic actions. In 2023, the Company recorded a risk management reporting fulfillment value of 100%. Risk managers' awareness of risk reporting can be said to be good, although the application of risk management is incrementally improved based on the pareto significance of obstacles.

2) *People*

Increasing the capability of risk management organs is carried out top-down and gradually, which this year focuses on certifying the Board of Directors, the Board of Commissioners, and their lower ranks. This process will continue up to the project level.

3) *Tools*

The Company already has a risk management information system intended as a reporting medium. In its implementation, there are

implementasinya, masih terdapat beberapa kendala perangkat karena adanya keterbatasan pengelolaan sistem. Perusahaan tetap berusaha memastikan sistem informasi manajemen risiko dapat mengantarkan hasil yang diharapkan.

still some device constraints due to system management limitations. The company continues to ensure that the risk management information system can deliver the expected results.

Peningkatan tata kelola BUMN secara signifikan mengalami peningkatan dengan diundangkannya peraturan Menteri BUMN nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Signifikan BUMN terutama dalam bidang manajemen risiko. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tinjauan manajemen secara terukur dengan melaksanakan penilaian maturitas manajemen risiko secara berkala.

The improvement of BUMN governance has significantly increased with the promulgation of the Minister of BUMN regulation number PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Activities of BUMN, especially in the field of risk management. One important aspect of implementing measurable management reviews is carrying out regular risk management maturity assessments.

Penilaian tersebut merupakan suatu proses evaluasi secara menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko untuk dapat memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa implementasi manajemen risiko di Perseroan telah memadai dalam menjamin tercapainya tujuan Perseroan. Hasil dari penilaian maturitas manajemen risiko akan menghasilkan suatu peta jalan perbaikan dan peningkatan manajemen risiko di masa mendatang sebagai arah inisiatif Perseroan.

This assessment is a comprehensive evaluation process of the implementation of risk management to provide confidence to management that the implementation of risk management in the company is adequate in ensuring the achievement of the company's objectives. The results of the risk management maturity assessment will produce a road map for improvement and enhancement of risk management in the future as a result of the company's initiatives.

Pada tahun 2023, Perseroan melakukan penilaian maturitas risiko secara mandiri dengan menggunakan parameter penilaian terdahulu, ERMA ISO 31000 *Risk Management Maturity Model*, dimana secara pendekatan yang dipakai belum mengikuti dengan petunjuk teknis nomor SK-8/DKU.MBU/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) pada Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang diundangkan pada akhir tahun 2023. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, tingkat penerapan manajemen risiko Perseroan meningkat dengan mencapai skor 3,45 dan masih pada tingkat "Managed". Sedangkan untuk penilaian indeks kematangan

In 2023, the company carried out an independent risk maturity assessment using the previous assessment parameters, the ERMA ISO 31000 Risk Management Maturity Model, where the approach used did not follow technical instructions number SK-8/DKU.MBU/12/2023 concerning Technical Instructions Assessment of the Risk Maturity Index in the State-Owned Enterprise Environment, which was promulgated at the end of 2023. Based on the assessment that has been carried out, the level of implementation of the company's risk management has increased by reaching a score of 3.45 and is still at the "managed" level. Meanwhile, the risk maturity index assessment based on the latest technical

risiko berdasarkan petunjuk teknis terbaru, akan dilakukan pada tahun 2024 mengingat adanya kewajiban pelaksanaan penilaian menggunakan penilai independen.

Adapun untuk mengarah kepada peraturan yang berlaku, Perseroan melakukan evaluasi kesesuaian penerapan manajemen risiko dengan capaian kinerja melalui pengukuran peringkat komposit risiko. Berdasarkan parameter kualitas penerapan manajemen risiko, Perseroan termasuk "Satisfactory" dengan skor 90. Sedangkan parameter pencapaian kinerja, Perseroan dapat dikatakan "Cukup" dengan mendapatkan skor 84. Kedua parameter tersebut dikonversi berdasarkan kepada indeks peringkat komposit risiko dan Perseroan didapati berada pada tingkat 2 (dua).

PERNYATAAN DIREKSI ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko Abipraya mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara berkesinambungan terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material yang didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko. Proses identifikasi risiko dilakukan guna menganalisa sumber, tingkat kemungkinan timbulnya risiko, maupun dampak yang dialami perusahaan. Adapun hal-hal yang diperhatikan dalam proses identifikasi risiko, yaitu:

1. Identifikasi seluruh risiko dilakukan secara berkala;
2. Memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh proyek dan aktivitas bisnis Abipraya;
3. Secara khusus melakukan identifikasi risiko terhadap proyek dan aktivitas baru, sebelum proyek/aktivitas baru dijalankan.

guidelines will be carried out in 2024, considering the obligation to carry out the assessment using an independent assessor.

Meanwhile, to comply with applicable regulations, the company evaluates the suitability of risk management implementation based on performance achievements through risk composite rating measurements. Based on the quality parameters of risk management implementation, the company is categorized as "satisfactory" with a score of 90. Meanwhile, for performance achievement parameters, the company can be said to be "adequate" by getting a score of 84. These two parameters are converted based on the composite risk rating index, and the company is found to be at level 2 (two).

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE ADEQUACY OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

Abipraya's risk management process includes the process of identifying, measuring, monitoring, and controlling risks on an ongoing basis against all material risk factors supported by the Risk Management Information System. The risk identification process is carried out to analyze the source, level of possible risk, and impact experienced by the company. The things that are considered in the risk identification process:

1. Identification of all risks is carried out periodically;
2. Have a method or system to identify risks in all Abipraya projects and business activities;
3. Specifically identify risks to new projects and activities before new projects/activities are executed.

Proses pengukuran risiko dilakukan untuk mengetahui besarnya eksposur sebagai acuan dalam melakukan pengendalian risiko. Pengukuran risiko tersebut dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif sesuai metode pengukuran yang ditetapkan dengan menggunakan metode internal.

Proses pemantauan risiko dilakukan untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan baik antara lain melalui pemantauan terhadap mitigasi dan limit risiko yang telah ditetapkan. Pemantauan risiko dilakukan baik oleh Satuan Kerja Operasional (*Risk Taking Unit*) sebagai pemilik risiko (*risk owner*) maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai (*Risk Control Unit*).

Sistem Manajemen Risiko Perseroan dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta memastikan tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga dapat digunakan dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Manajemen.

The risk measurement process is carried out to determine the amount of exposure as a reference in carrying out risk control. The risk measurement is carried out quantitatively and/or qualitatively according to the measurement method established using internal methods.

The risk monitoring process is carried out to ensure that risks have been managed properly, among others, through monitoring of mitigations and risk limits that have been set. Risk monitoring is carried out by the Operational Work Unit (Risk Taking Unit) as the risk owner and by the Risk Management Work Unit as the Risk Control Unit.

The Company Risk Management System was developed to support the implementation of the risk identification, measurement, monitoring, and control process, and to ensure the availability of accurate, complete, informative, timely, and reliable information so that it can be used in the framework of the decision-making process by Management.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Perseroan secara berkesinambungan dan dilaksanakan oleh seluruh manajemen serta pegawai di setiap jenjang organisasi. Karena itu, SPI yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen Perseroan sekaligus menjadi dasar bagi kegiatan operasional Perseroan yang sehat dan aman. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal di lingkungan Perseroan menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat sebagaimana yang telah dituangkan dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Satuan Pengendalian Internal terus berupaya mengembangkan Sistem Pengendalian Internal dengan menggunakan pendekatan pengembangan Sistem Pengendalian Internal COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions*) untuk mengamankan aset dan menjaga kesehatan keuangan Brantas Abipraya.

Sistem Pengendalian Internal mencakup:

- Lingkungan pengendalian internal dalam Perseroan yang disiplin dan terstruktur;
- Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha;
- Aktivitas pengendalian;
- Sistem informasi dan komunikasi; dan Monitoring, yang dalam implementasi secara operasional dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai kebijakan berupa pedoman, petunjuk operasional, maupun instruksi kerja

Internal Control System (Sistem Pengendalian Internal: SPI) is a supervisory mechanism established by the Company's management on an ongoing basis and implemented by all management and employees at every level of the organization. Therefore, effective SPI is a component of the Company's management and the basis for sound and safe operational activities. The implementation of the Internal Control System within the Company is the responsibility of all parties involved, as outlined in the duties and responsibilities of each party.

The Internal Control Unit continues to strive to develop the Internal Control System by using the COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions*) Internal Control System development approach to secure assets and maintain the financial health of Brantas Abipraya.

Internal Control System includes:

- Internal control environment in the Company that is disciplined and structured;
- Assessment and management of business risks;
- Control activities;
- Information and communication systems; and Monitoring, which in operational implementation is further elaborated into various policies in the form of guidelines, operational instructions, and work instructions

PENGENDALIAN ATAS PELAKSANAAN OPERASIONAL DAN PELAPORAN KEUANGAN

Penerapan pengendalian keuangan dan operasional dilakukan secara berjenjang meliputi seluruh elemen yang terdapat di Brantas Abipraya.

Pengendalian Keuangan dan Operasional yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah dengan melakukan pengawasan dan penasehatan terkait proses kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang dibantu oleh Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko. Sedangkan Direksi menerapkan sistem pengendalian internal melalui penerapan kebijakan dan prosedur Perusahaan secara konsisten dan memenuhi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, antara lain terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan dan manajemen risiko, rencana strategis, pembagian tugas, pendelegasian wewenang serta kebijakan akuntansi yang memadai.

Direksi menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, integritas yang tinggi, nilai etika serta kompetensi pegawai.

SPI merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Internal yang dibentuk untuk membantu Direktur Utama dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Saham yang bertanggung jawab di dalam melaksanakan audit internal di Perusahaan, SPI melakukan upaya peningkatan pengendalian internal (*internal control*) dalam pelaporan keuangan berbagai kegiatan operasional Perusahaan. Pengendalian internal dilingkungan Abipraya senantiasa dievaluasi agar mampu mengikuti perkembangan usaha Perusahaan.

CONTROL OVER OPERATIONAL IMPLEMENTATION AND FINANCIAL REPORTING

Financial and operational control application is carried out in stages covering all elements contained in Brantas Abipraya.

Financial and Operational Control carried out by the Board of Commissioners is by supervising and advising the adequacy and fairness process in preparing financial reports, and risk management by taking into account the precautionary principle assisted by the Audit Committee and Risk Management Committee. Meanwhile, the Board of Directors implements an internal control system through the implementation of the Company's policies and procedures consistently and complies with compliance with applicable regulations, among others, related to the Company's business activities and risk management, strategic plans, distribution of duties, delegation of authority and adequate accounting policies.

The Board of Directors establishes an effective internal control system to secure the Company's investments and assets. The internal control environment in the Company is carried out with discipline and structure, high integrity, ethical values, and employee competence.

SPI is part of the Internal Control System established to assist the President Director in fulfilling his obligations to Shareholders, who are responsible for carrying out internal audits in the Company, SPI makes efforts to improve internal control in financial reporting of various operational activities of the Company. Internal control within Abipraya is always evaluated to be able to follow the development of the Company's business.

KESESUAIAN PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN KERANGKA COSO

Sistem pengendalian internal Brantas Abipraya telah sesuai dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)* ditahun 2013. Tujuan pengendalian internal menurut COSO meliputi tujuan operasional, tujuan pelaporan dan tujuan kepatuhan.

Tujuan operasional berkaitan dengan efektivitas efisiensi operasi. Tujuan pelaporan berkaitan dengan kepentingan pelaporan keuangan yang memenuhi kriteria andal, tepat waktu, transparan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh regulator maupun Brantas Abipraya. Sedangkan tujuan kepatuhan berkaitan dengan kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Menurut COSO, unsur-unsur pengendalian intern meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi;
5. Kegiatan pemantauan.

Adapun Implementasi pengendalian internal di Abipraya yang mencakup elemen-elemen utama di atas telah sesuai dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)* sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Elemen lingkungan pengendalian Abipraya diwujudkan dalam bentuk pengawasan manajemen dan budaya pengendalian, di mana ruang lingkup pengendalian dilakukan baik di seluruh tingkatan, yaitu pengendalian tingkat aktivitas maupun pengendalian tingkat entitas.

COMPLIANCE OF INTERNAL CONTROL WITH THE COSO FRAMEWORK

The internal control system of Brantas Abipraya is according to the *Internal Control-Integrated Framework* developed by *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)* in 2013. Internal control objectives, according to COSO, include operational objectives, reporting objectives, and compliance objectives.

Operational objectives relate to the effectiveness of operating efficiency. The purpose of reporting relates to the importance of financial reporting that meets the criteria of reliable, timely, transparent, and other requirements set by regulators and Brantas Abipraya. The purpose of compliance is related to the company's compliance with legislation.

According to COSO, the elements of internal control include the following components:

1. Control environment;
2. Risk assessment;
3. Control activities;
4. Information and Communication;
5. Monitoring activities.

The implementation of internal control in Abipraya, which includes the core elements above, is according to the *Internal Control-Integrated Framework* developed by *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)* as follows:

1. Control Environment

The elements of the Abipraya control environment are manifested in the form of management supervision and control culture, where the scope of control is carried out at all levels, namely controlling activity levels and controlling entity levels.

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko

Risiko-risiko yang material dan memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap pencapaian tujuan perusahaan telah diidentifikasi dan diukur secara berkelanjutan oleh seluruh unit. Proses identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah risiko. Penilaian risiko merupakan proses untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola dan dilaksanakan pada seluruh tingkatan unit operasional, termasuk di dalamnya proses identifikasi, analisis dan penilaian risiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan perusahaan.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian meliputi:

- a. Aktivitas pengendalian secara umum telah melibatkan seluruh pegawai termasuk Direksi, yang disusun untuk memastikan arahan manajemen telah dilaksanakan dan tindakan untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi telah dilakukan,
- b. Kegiatan pengendalian sesuai fungsi organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, meliputi:

- a. Sistem Akuntansi
Mencakup metode, catatan dan proses rekonsiliasi data akunting dengan sistem informasi.
- b. Sistem Informasi.

5. Perseroan telah memiliki saluran komunikasi untuk memastikan semua pegawai memahami, mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

- a. Tersedianya jalur komunikasi bagi pegawai untuk melaporkan tindakan yang menyimpang antara lain melalui *Whistleblowing System*.

2. Identification and Risk Assessment

Risks that are material and have an unfavorable influence on the achievement of company objectives have been identified and measured on an ongoing basis by all units. The risk identification process is carried out to identify the amount of risk. Risk assessment is a process to determine how risks should be managed and implemented at all operational unit levels, including identifying, analyzing, and assessing risks processes faced in achieving company objectives.

3. Control Activities

Control activities include:

- a. Control activities, generally involving all employees including the Board of Directors, are structured to ensure that management directives are implemented and actions to address identified risks are taken.
- b. Control activities according to the functions of the organization.

4. Information and Communication Accounting, information and communication systems aim to identify problems that may arise and are used as a means of exchanging information in the context of carrying out tasks according to their respective responsibilities, including:

- a. Accounting System
Includes methods, records, and processes of reconciling accounting data with information systems.
- b. Information System.

5. The Company has a communication channel to ensure all employees understand and comply with applicable policies and procedures in carrying out their duties and responsibilities.

- a. The availability of communication channels for employees to report deviant actions, among others, through the *Whistleblowing System*.



- b. Masukan karyawan diakomodasi untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dan perbaikan, antara lain melalui *survey* karyawan dan *employee engagement survey*.
 - c. Komunikasi lintas unit dilaksanakan secara efektif.
 - d. Ketepatan waktu *follow up management* terhadap komunikasi yang diperoleh dari pelanggan, vendor, regulator dan pihak eksternal lainnya.
6. Perseroan telah memiliki mekanisme pelaporan risiko yang handal, tepat waktu dan mudah diakses.
 7. Kegiatan Pemantauan
Kegiatan pemantauan dilakukan untuk memantau efektivitas pelaksanaan pengendalian intern.
- b. Employee input is accommodated to improve productivity, quality, and improvement, among others, through employee and employee engagement surveys.
 - c. Cross-unit communication is implemented effectively.
 - d. Timeliness of follow-up management of communications obtained from customers, vendors, regulators, and other external parties.
6. The Company already has a reliable, timely, and easily accessible risk reporting mechanism.
 7. Monitoring Activities
Monitoring activities are carried out to monitor the effectiveness of the implementation of internal control.

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan komponen penting dalam manajemen Perseroan dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Perseroan yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Intern yang efektif dapat membantu Direksi dan Dewan Komisaris menjaga aset Perseroan, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Direksi Perseroan mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara SPI yang memadai serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan andal sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan oleh Perseroan.

Satuan Pengawasan Intern mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas SPI secara berkesinambungan berkaitan

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Internal Control System (SPI) is a component in the Company management and serves as the basis for the Company's healthy and safe operational activities. An effective Internal Control System can help the Board of Directors and the Board of Commissioners safeguard the Company's assets, ensure the availability of reliable financial and managerial reporting, improve the Company's compliance with applicable legislation, and reduce the risk of losses, irregularities, and violations of prudential aspects.

The Board of Directors of the Company has the responsibility of creating and maintaining adequate SPI and ensuring that the system runs safely and reliably according to the internal control objectives set by the Company.

The Internal Audit Unit evaluates and plays an active role in improving the effectiveness of SPI on an ongoing basis related to the Company's

dengan pelaksanaan operasional Perseroan yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan, melalui pelaksanaan audit dan konsultasi.

Hasil evaluasi disampaikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan SPI telah berjalan secara memadai. Dewan Komisaris melalui peran Komite Audit berperan aktif terkait evaluasi SPI dengan melakukan telaah hasil evaluasi oleh Satuan *Pengawasan Intern*. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, SPI di Abipraya telah berjalan secara memadai.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI), yaitu menyetujui dan memantau kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut. Dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab melakukan pengawasan, Dewan Komisaris juga dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

Selain itu, Direksi juga bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang handal dan efektif serta melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif di setiap level organisasi dan berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan terkait dengan prinsip kehati-hatian.

Satuan Pengawasan Intern melakukan evaluasi efektivitas SPI secara berkesinambungan, berkaitan dengan pelaksanaan operasional dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain melalui kegiatan pemeriksaan terhadap unit maupun aktivitas.

operational implementation, which has the potential to cause losses in achieving the targets set by the Company's management through the implementation of audits and consulting.

The evaluation results are submitted to the Board of Directors for follow-up and monitoring of its implementation to ensure that SPI has run adequately. The Board of Commissioners, through the role of the Audit Committee plays an active role in the SPI evaluation by reviewing the evaluation results by the Internal Audit Unit. Based on the evaluation that has been carried out, SPI in Abipraya has been running adequately.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR THE BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Board of Commissioners has supervised the implementation of the Internal Control System (SPI), namely approving and monitoring the policies of the Board of Directors that determine the internal control. In carrying out its duties, authorities, and responsibilities to supervise, the Board of Commissioners is also assisted by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee.

In addition, the Board of Directors is also responsible for the implementation of a reliable and effective Internal Control System (SPI), makes efforts to promote a risk-aware culture at every level of the organization, and plays an active role in preventing deviations committed by management in setting policies related to prudential principles.

The Internal Supervisory Unit evaluates the effectiveness of SPI on an ongoing basis, related to operational implementation in achieving the targets set by the Company, among others, through inspection activities.

Hasil evaluasi selalu disampaikan kepada Direksi dan unit terkait untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya. Terhadap permasalahan yang muncul selalu diupayakan perbaikan dan dilakukan *monitoring* secara konsisten untuk memastikan SPI telah berjalan secara efektif. Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah berperan aktif dalam mengevaluasi SPI melalui penelaahan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern.

The evaluation results are always submitted to the Board of Directors and related units for follow-up and monitoring of their implementation. Problems that arise are always sought for improvement, and consistent monitoring is carried out to ensure SPI has run effectively. The Board of Commissioners, through the Audit Committee has played an active role in evaluating SPI through a review of the results of audits conducted by the Internal Supervisory Unit.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Access to Company Information and Data

Dalam rangka memudahkan komunikasi dan akses para pemangku kepentingan termasuk informasi terbaru mengenai laporan kondisi keuangan, non-keuangan, dan data Perseroan lainnya yang terkait dengan pertanggungjawaban transparansi serta akuntabilitas perusahaan, Perseroan senantiasa melakukan pembaharuan sarana dan prasarana penunjang penyampaian informasi.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengelolaan media komunikasi, baik media elektronik maupun cetak, sehingga integritas dan kredibilitas atas informasi Perseroan kepada masyarakat dapat dijaga sebagaimana diatur dalam pada Pedoman Kebijakan Perusahaan.

Beberapa akses Informasi yang disediakan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

KOMUNIKASI EKSTERNAL

Website <http://www.brantas-abipraya.co.id>
Situs resmi Brantas Abipraya yang berisikan informasi terkait Perusahaan seperti struktur organisasi, kegiatan korporasi, pencapaian dll.

Perseroan telah menunjuk pengelola website Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Brantas Abipraya (Persero) tentang Penunjukan Sebagai Admin Portal dan Admin Sistem Perusahaan No. 132.1/D/KPTS/V/2015

Media sosial Abipraya

Akun media sosial resmi Perseroan yaitu Instagram @brantasabipraya, Youtube: PT Brantas Abipraya; Twitter @ptabipraya dan Facebook/ptabipraya

To facilitate communication and access to stakeholders including the latest information regarding financial condition reports, non-financial reports, and other Company data related to accountability, transparency, and corporate accountability, the Company continues to update facilities and infrastructure supporting information delivery.

The Corporate Secretary is responsible for coordinating the management of communication media, electronic and print media so that the integrity and credibility of the Company's information to the public can be maintained as stipulated in the Corporate Policy Guidelines.

Some access to information provided by the Company are as follows:

EXTERNAL COMMUNICATION

Website <http://www.brantas-abipraya.co.id>
Brantas Abipraya's official website that contains information related to the Company such as organizational structure, corporate activities, achievements, etc.

The Company has appointed the manager of the Company's website based on the Decree of the Board of Directors of PT Brantas Abipraya (Persero) concerning Appointment as Portal Admin and Company System Admin No. 132.1/D/KPTS/V/2015

Abipraya social media

The Company official social media accounts are Instagram @brantasabipraya, Youtube: PT Brantas Abipraya; Twitter @ptabipraya and Facebook/ptabipraya

Spirit

Majalah internal perusahaan yang didistribusikan untuk seluruh Insan Abipraya dan *stakeholder* Abipraya. Majalah ini juga dapat diakses di situs resmi Abipraya

Email

Perseroan secara terbuka menyiapkan jalur komunikasi dengan para pemangku kepentingan melalui surat elektronik untuk mengakomodir berbagai pertanyaan terkait dengan Perseroan dengan menghubungi Sekretaris Perusahaan pada email: brap@brantas-abipraya.co.id

Media Massa

Perseroan memuat informasi penting yang perlu diketahui oleh publik sebagai bentuk transparansi bagi para pemangku kepentingan dalam surat kabar berperedaran nasional. Selain itu Perseroan juga selalu menjaga hubungan baik dengan media massa untuk memberikan pembaruan informasi penting Perseroan dengan melakukan kunjungan media dan melalui *workshop*. Selama tahun 2023, Perseroan telah melakukan beberapa kunjungan baik ke kantor media cetak maupun media elektronik.

Siaran Pers

Perseroan secara aktif mempublikasikan setiap kejadian atau kegiatan penting dalam bentuk siaran pers yang disampaikan melalui media dan website Perseroan.

Annual Report

Perseroan menyediakan sarana informasi melalui *Annual Report* yang disusun setiap tahun. *Annual Report* disampaikan kepada pemegang saham, regulator serta seluruh *stakeholders* lainnya.

Sustainability Report

Perseroan juga menyediakan sarana informasi mengenai kegiatan sosial dan kemasyarakatan Perseroan secara menyeluruh melalui *Sustainability Report*.

Spirit

Internal company magazines are distributed to all Abipraya personnel and Abipraya stakeholders. This magazine can also be accessed on Abipraya's official website

Email

The Company has publicly prepared a line of communication with stakeholders via electronic mail to accommodate various questions related to the Company by contacting the Corporate Secretary at email: brap@brantas-abipraya.co.id

Mass Media

The Company contains information that needs to be known by the public as a form of transparency for stakeholders in national circulation newspapers. In addition, the Company always maintains good relations with the mass media to provide updates on important information about the Company by conducting media visits and workshops. During 2023, the Company has made several visits to both print and electronic media offices.

Press Release

The Company actively publishes every important event or activity in the form of a press release delivered through the media and the Company's website.

Annual Report

The Company provides information facilities through the Annual Report, which is prepared annually. The Annual Report is submitted to shareholders, regulators, and all other stakeholders.

Sustainability Report

The Company's Sustainability Report also provides information facilities regarding the Company's social and community activities as a whole through the Sustainability Report.

Laporan Manajemen

Perseroan telah menyampaikan informasi-informasi yang relevan dengan menyampaikan Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan kepada Pemegang Saham.

KOMUNIKASI INTERNAL

Perseroan menyediakan sarana komunikasi yang menjadi sarana diskusi bagi karyawan dengan manajemen yang secara berkala dilakukan, baik secara korporasi maupun per masing-masing unit kerja.

Abipraya Mobile

Media saku untuk interanal Insan Abipraya yang dapat diunduh di Google Play Store atau App Store hanya untuk karyawan dan karyawan Abipraya berisikan SK Direksi, Berikta, Daftar Proyek-Proyek dan Prosedur.

E-Disposisi

Media khusus untuk Karyawan dan Karyawati Abipraya yang berisikan surat masuk atau surat keluar dan arahan atau tindak lanjutnya.

Dalam menyampaikan/mengeluarkan informasi secara umum telah, Perseroan telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Kebijakan Komunikasi Keluar dan Pedoman Kebijakan Perusahaan. Pada tahun 2023, tidak terjadi kejadian/kasus atau temuan unit audit intern terkait pelanggaran dalam Kebijakan Komunikasi Keluar atau Pedoman Kebijakan Perusahaan, seperti kebocoran informasi yang bersifat rahasia.

Aplikasi PPID Mobile

Merupakan aplikasi PPID resmi milik Perseroan yang dapat diakses oleh Publik untuk mengakses oleh Publik untuk mengakses informasi seputar Perseroan dan mengajukan permohonan informasi publik.

Management Report

The Company has submitted relevant information by submitting Quarterly and Annual Management Reports to Shareholders.

INTERNAL COMMUNICATION

The Company provides communication means that becomes a means of discussion for employees with management, which is periodically carried out, corporately and per each work unit.

Abipraya Mobile

Media pocket for Abipraya Personnel, which can be downloaded on Google aps or Apple Store only for Abipraya's employees, contains the Decree of the Board of Directors, Berikta, List of Projects, and Procedures.

E-Disposisi

Media specifically for Abipraya's Employees, which contains incoming or outgoing letters, directions, or follow-up.

In conveying/releasing information in general, the Company has followed the procedures stipulated in the Outbound Communication Policy and the Policy Guidelines. In 2023, there were no incidents/cases or findings by the internal audit unit related to violations of the Outgoing Communications Policy or the Corporate Policy Guidelines, such as leakage of confidential information.

PPID Mobile application

The Company's official PPID application which can be accessed by the public to access information about the Company and submit requests for public information.

KODE ETIK

Code of Conduct

Perusahaan telah memiliki Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang tertuang dalam Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi PT Brantas Abipraya (Persero) Nomor 484.1/D/KPTS/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016. Perseroan selalu melakukan peninjauan dan pemutakhiran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku perusahaan, yang disesuaikan dengan perubahan kondisi dan peraturan yang berlaku pada BUMN.

Perusahaan telah memiliki kebijakan dan panduan tambahan yang dapat memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai praktik yang terdapat dalam pedoman tata kelola perusahaan dan pedoman etika dan perilaku, namun baru sebatas SOP/mekanisme penegakan CoC, dan Sistem Pelaporan Pelanggaran WBS.

PERNYATAAN KODE ETIK BERLAKU DI SELURUH LEVEL ORGANISASI PERUSAHAAN

Kode etik Perusahaan berlaku dan mengikat bagi setiap Insan Perusahaan dan seluruh level organisasi perusahaan. Setiap Insan Perusahaan wajib menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap Kode etik Perusahaan. Demikian pula para pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan seperti mitra kerja, pemasok, dan lain-lain wajib menghormati dan melaksanakan Pedoman ini selama berinteraksi dengan Perusahaan.

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan telah menandatangani komitmen penerapan kode etik dan menjadikan penerapan GCG sebagai salah satu KPI korporat. Selain itu Perseroan juga selalu konsisten melakukan asesmen penerapan GCG yang dilakukan oleh pihak independen dan hasil rekomendasinya selalu menjadi bagian dari proses peningkatan penerapan GCG.

The Company has a Code of Conduct as stated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Brantas Abipraya (Persero) Number 484.1/D/KPTS/XII/2016, dated December 15, 2016. The Company reviews and updates the Company's Code of Ethics and Conduct, which is adjusted to changes in conditions and regulations applicable to SOEs.

The Company already has additional policies and guidelines that can provide further guidance on various practices contained in the corporate governance guidelines and ethical and conduct guidelines, but only limited to SOPs/CoC enforcement mechanisms, and the WBS Violation Reporting System.

THE CODE OF CONDUCT STATEMENT APPLIES AT ALL LEVELS OF THE COMPANY'S ORGANIZATION

The Company's Code of Conduct applies and is binding for every Company Person and all levels of the Company's organization. Every Company Employee is required to sign a statement of compliance with the Company's Code of Conduct. Similarly, parties interested in the Company, such as partners, suppliers, etc. must respect and implement this Code while interacting with the Company.

The Board of Commissioners, the Board of Directors, and Employees have signed a commitment to implement the code of conduct and make the implementation of GCG one of the corporate KPIs. In addition, the Company also consistently assesses the implementation of GCG carried out by independent parties, and the results of its recommendations are always part of improving GCG implementation processes.

PENYEBARLUASAN/SOSIALISASI KODE ETIK

Perusahaan berkomitmen untuk melakukan sosialisasi, internalisasi, dan pemantauan Kode etik Perusahaan kepada seluruh karyawan dan pejabat Perusahaan maupun pihak eksternal Perusahaan dengan tujuan agar setiap individu paham dan mengerti serta dapat mengimplementasikan Pedoman tersebut.

Sosialisasi dan Internalisasi Kode Etik serta pemantauan pelaksanaan Kode etik dilaksanakan secara efektif dan menyeluruh oleh Sekretaris Perusahaan. Perseroan juga melakukan sosialisasi sebagai upaya untuk memperkenalkan, menyebarluaskan informasi tentang ketentuan dalam Kode etik kepada seluruh level dalam perusahaan serta pihak eksternal yang terkait dengan perusahaan. Penyebarluasan *Code of Conduct* dilaksanakan melalui *website intern* www.brantas-abipraya.co.id.

ISI PEDOMAN KODE ETIK

Pokok-pokok Kode Etik terbagi atas etika bisnis perusahaan dan etika perilaku Insan Abipraya. Etika Bisnis Perusahaan mengatur tentang:

1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Pemberian dan penerimaan hadiah/gratifikasi, suap & lainnya;
3. Kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup;
4. Pemberian kesempatan yang sama kepada pegawai untuk mendapatkan pekerjaan, promosi, dan pemberhentian kerja;
5. Etika yang terkait dengan *stakeholder*;
6. Standar etika jajaran manajemen dan pegawai;
7. Integritas laporan keuangan.

DISSEMINATION/SOCIALIZATION OF THE CODE OF CONDUCT

The Company is committed to socializing, internalizing, and monitoring the Company's Code of Conduct to all employees and officers of the Company as well as external parties of the Company with the aim that every individual understands and understands and can implement the Code.

Socialization and Internalization of the Code of Conduct and monitoring the implementation of the Code of Conduct are carried out effectively and thoroughly by the Corporate Secretary. The Company also conducts socialization as an effort to introduce and disseminate information about the provisions in the Code of Conduct to all levels of the company and external parties related to the company. Dissemination of the Code of Conduct is carried out through www.brantas-abipraya.co.id's internal website.

CONTENTS OF CODE OF CONDUCT GUIDELINES

The points of the Code of Conduct are divided into the company's business ethics and the ethics of behavior of Abipraya Personnel. The Company's Business Ethics regulates about:

1. Compliance with legislation;
2. Giving and receiving gifts/gratuities, bribes & others;
3. Concern for occupational safety and health and the environment;
4. Provide equal opportunities to employees to get jobs, promotions, and job terminations;
5. Ethics related to stakeholders;
6. Ethical standards of management and employees;
7. Integrity of financial reports.

Sementara itu, Etika Perilaku Insan Abipraya mengatur tentang:

1. Komitmen Insan Abipraya;
2. Menjaga nama baik perusahaan;
3. Menjaga hubungan baik antar Insan Abipraya;
4. Melindungi informasi perusahaan (*intangible asset*);
5. Pengelolaan data perusahaan dan penyusunan laporan;
6. Menjaga dan menggunakan aset perusahaan;
7. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup;
8. Memberi dan menerima hadiah, jamuan, hiburan, dan donasi;
9. Benturan kepentingan;
10. Aktivitas politik.

JENIS SANKSI

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam Kode etik dikategorikan sebagai pelanggaran dan tindak kejahatan (kejahatan meliputi korupsi dan tindak pidana ekonomi, serta tindak pidana umum). Ketidakpatuhan yang dikategorikan sebagai tindak kejahatan dan akan diindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku, serta ketidakpatuhan yang dikategorikan sebagai pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Disiplin Pegawai yang telah ditetapkan perusahaan.

Setiap Insan Perseroan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perseroan.

- Sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat laporan dari atasan langsung karyawan yang bersangkutan. Dewan Komisaris dan Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing.

Meanwhile, the Ethics of the Abipraya Human Behavior regulates about:

1. Abipraya People Commitment;
2. Maintain the name of the company;
3. Maintain good relations between the Abipraya people;
4. Protect company information (*intangible assets*);
5. Management of company data and preparation of reports;
6. Maintain and use company assets;
7. Maintain occupational safety and health and the environment;
8. Give and receive gifts, banquets, entertainment, and donations;
9. Conflict of interest;
10. Political activity.

TYPES OF SANCTIONS

Non-compliance with the provisions of the Code of Conduct is categorized as violations and crimes (crimes, including corruption, economic crimes, and general crimes). Non-compliance, categorized as a crime, will be followed up according to applicable legislation, and non-compliance, categorized as a violation, will be followed up according to the provisions of Employee Discipline set by the company.

Every employee of the Company who is proven to have violated the Code of Conduct will be sanctioned according to the rules and regulations applicable to the Company.

- Sanctions for employees who commit violations are determined by the Board of Directors after receiving a report from the direct supervisor of the employee concerned. The Board of Commissioners and the Board of Directors decide on the provision of coaching actions, disciplinary sanctions, and/or other measures, as well as prevention that must be carried out by direct superiors in their respective environments.

Tingkat Hukuman dan Sanksi

Level of Punishment and Sanctions

Tingkat Hukuman Level of Punishment	Jenis Sanksi Type of Sanction
Hukuman Disiplin Ringan Light Disciplinary Punishment	<ul style="list-style-type: none"> · Teguran · Surat Peringatan Pertama · Reprimand · First Warning Letter
Hukuman Disiplin Sedang Moderate Disciplinary Punishment	<ul style="list-style-type: none"> · Surat Peringatan Kedua · Surat Peringatan Ketiga · Second Warning Letter · Third Warning Letter
Hukuman Disiplin Berat Severe Disciplinary Punishment	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Termination of Employment (Pemutusan Hubungan Kerja: PHK)

- Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham.
- Sanksi bagi mitra kerja atau stakeholders lain yang melakukan pelanggaran adalah sesuai ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.
- Sanctions for the Board of Directors and the Board of Commissioners who commit violations are decided by the Shareholders.
- Sanctions for partners or other stakeholders who commit violations are according to the provisions as stated in the contract. It is related to a criminal act can be forwarded to the authorities.

PELANGGARAN DAN SANKSI YANG DIBERIKAN

Selama tahun 2023, tidak terdapat pelanggaran atas kode etik.

VIOLATIONS AND SANCTIONS GIVEN

During 2023, there were no violations of the code of conduct.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Whistleblowing System (WBS) adalah *system* yang mengatur tata cara pengaduan dan pengungkapan pelanggaran di PT Brantas Abipraya (Persero). Perseroan terus memperkuat implementasi GCG Perseroan dengan memiliki kebijakan tentang pelaporan atas dugaan pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Sejalan dengan komitmen Perseroan dalam implementasi GCG, Abipraya senantiasa memperhatikan kepentingan setiap *stakeholders* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Dalam pelaksanaannya, seringkali muncul pengaduan pelanggaran dari pihak *stakeholders* sebagai akibat dari kurang diperhatikannya hak-hak *stakeholders* dengan baik atau bahkan kadang-kadang terabaikan oleh pihak Perseroan.

Pengaduan pelanggaran oleh *stakeholders*, apabila tidak diselesaikan dengan baik akan berpotensi merugikan *stakeholders* dan atau Perseroan sendiri. Pedoman yang mengatur mekanisme standar dalam penanganan pengaduan pelanggaran mutlak diperlukan agar tidak terjadi perselisihan atau sengketa yang berlarut-larut antara pihak *stakeholders* dan Perseroan. Sehingga persoalan tersebut tidak berlanjut pada persoalan turunnya reputasi dan kepercayaan masyarakat pada Perseroan. Untuk itu, Perseroan telah membangun sistem pelaporan pelanggaran yang dikenal dengannama WBS (*Whistleblowing System*).

Adapun kebijakan mengenai WBS yang berlaku di tahun 2019 yakni Keputusan Direksi No. 82/D/KPTS /III/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran tanggal 17 Maret 2017.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

The Whistleblowing System (WBS) is a System that regulates the procedures for complaints and disclosure of violations at PT Brantas Abipraya (Persero). The Company continues to strengthen the Company's GCG implementation by having a policy on reporting alleged violations (*Whistleblowing System*).

In line with the Company's commitment to GCG implementation, Abipraya always pays attention to the interests of every stakeholder based on the principles of fairness and equality. In its implementation, complaints of violations often arise from stakeholders as a result of a lack of attention to rights stakeholders well or even sometimes neglected by the Company.

Complaints of violations by stakeholders, if not resolved properly, will potentially harm stakeholders and/or the Company itself. Guidelines that regulate standard mechanisms in handling complaints of violations are necessary so that there are no protracted disputes or disputes between stakeholders and the Company. So the problem does not continue to the problem of declining public reputation and trust in the Company. To that end, the Company has built a violation reporting system known as WBS (*Whistleblowing System*).

The policy regarding WBS that applies in 2019 is the Decree of the Board of Directors No. 82/D/KPTS/III/2017 concerning Management Procedures and Follow-up on Violation Reporting dated March 17, 2017.

KEBERADAAN DAN TUJUAN WBS

Penyelesaian pengaduan pelanggaran oleh Perseroan merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan *stakeholders* dalam rangka menjamin hak-haknya dalam berhubungan dengan Perseroan dan menjamin penanganan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Perseroan, Pemerintah dan Aparat Berwajib. Untuk itu maka perlu dirumuskan kebijakan, sistem dan prosedur penanganan yang selaras untuk mengatur penyelesaian pengaduan pelanggaran bagi *stakeholders* dalam suatu Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran. Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi di dalam suatu perusahaan.

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN

Tim *Whistleblowing System* dibentuk dalam rangka untuk mengelola laporan dugaan pelanggaran. Dalam Sistem Laporan Dugaan Pelanggaran ini, Tim WBS mempunyai tanggung jawab yaitu:

1. Menerima laporan dugaan penyimpangan;
2. Melakukan pencatatan atas dugaan penyimpangan;
3. Melakukan penelaahan atas laporan dugaan penyimpangan;
4. Melakukan pengarsipan berkas penanganan pelaporan dugaan penyimpangan;
5. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
6. Mengkoordinasikan pemberian perlindungan terhadap pelapor dengan instansi berwenang;
7. Memantau penanganan penyelesaian laporan yang masuk melalui Tim WBS;
8. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap efektivitas Tim WBS;
9. Jika diperlukan mengusulkan kepada Direktur Utama untuk dilakukan audit investigasi (audit khusus) oleh SPI.

EXISTENCE AND PURPOSE OF WBS

The settlement of complaints of violations by the Company is one form of increased protection for stakeholders to guarantee their rights in dealing with the Company and ensure handling that meets the provisions and requirements set by the Company, the Government, and the Authorities. For this reason, it is necessary to formulate policies, systems, and procedures for handling that are aligned to regulate the resolution of complaints of violations for stakeholders in a Violation Complaint Management Policy. Violation Complaint Management Policy is a system that can be used as a medium for reporting witnesses to convey information about violations that are indicated to occur in a company.

PARTY MANAGING THE COMPLAINT

The Whistleblowing System Team was set up to manage reports of alleged violations. In this Alleged Violation Report System, the WBS Team has the following responsibilities:

1. Receive reports of suspected irregularities;
2. Record suspected irregularities;
3. Reviewing reports of alleged irregularities;
4. Archiving files handling reports of alleged irregularities;
5. Maintain the confidentiality of the whistleblower's identity;
6. Coordinate the provision of protection to whistleblowers with competent authorities;
7. Monitor the handling of incoming report completions through the WBS Team;
8. Evaluate and improve the effectiveness of the WBS Team;
9. If necessary, propose to the President Director an investigative audit (special audit) by SPI.

PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Mekanisme penyampaian laporan pelanggaran yaitu laporan dapat langsung dan/atau tidak langsung disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan, selaku Sekretaris Tim *Whistleblowing System*. Perseroan juga menyediakan saluran khusus bagi pelapor yang akan menyampaikan pengaduan/laporan dugaan pelanggaran, yaitu:

Telepon : (021) 851 6290

Sms Center : 08119922322

Website : brantas-abipraya.co.id

Email : wbs.abipraya@brantas-abipraya.co.id

Faksimili : (021) 851 6095

Surat resmi ditujukan kepada Ketua Tim *Whistleblowing System*.

SUBMISSION OF VIOLATION REPORTS

The mechanism for submitting violation reports is that reports can be directly and/or indirectly submitted to the Corporate Secretary, as Whistleblowing System Team Secretary. The Company also provides a channel for whistleblowers who will submit complaints/reports of alleged violations, namely:

Phone : (021) 851 6290

Sms Center : 08119922322

Website : brantas-abipraya.co.id

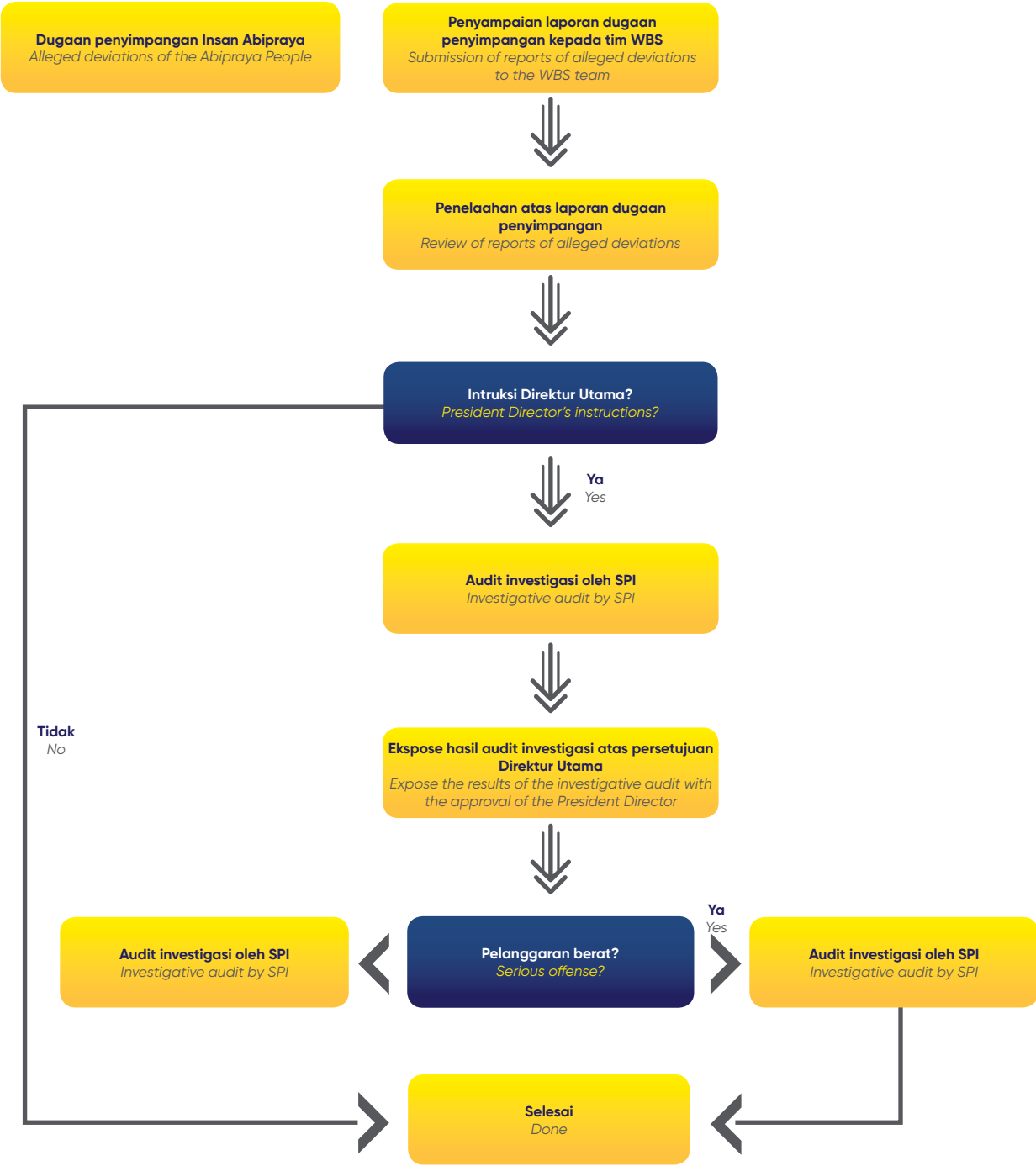
Email : wbs.abipraya@brantas-abipraya.co.id

Fax : (021) 851 6095

Official letter addressed to Whistleblowing System Team Leader.

Flow Chart Penanganan Laporan Dugaan Penyimpangan Insan Abipraya

Flow Chart for Handling Reports of Alleged Irregularities of Abipraya People



PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER

Perlindungan pelapor dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor dan perlindungan dari tindakan yang merugikan pelapor. Perseroan berkomitmen untuk melindungi pelapor dugaan pelanggaran yang beritikad baik, dan Abipraya akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem WBS.

Kebijakan mengenai perlindungan terhadap pelapor dugaan pelanggaran mengacu pada Keputusan Direksi No. 82/D/KPTS/III/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Pasal 7). Upaya Perseroan dalam melindungi pelapor antara lain:

1. Tersedianya fasilitas saluran pelaporan;
2. Jaminan kerahasiaan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor;
3. Jaminan keamanan informasi dan perlindungan terhadap tindakan balasan dari terlapor, berupa ancaman, keselamatan fisik, teror psikologis, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan pelapor;
4. Informasi pelaksanaan tindak lanjut.

SOSIALISASI SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WBS)

Sosialisasi WBS di internal Perseroan disampaikan melalui berbagai media seperti buletin internal, poster, sosialisasi etika maupun presentasi langsung kepada unit kerja terkait. Untuk eksternal, sosialisasi dilakukan melalui *website* Perseroan.

PENANGANAN PENGADUAN

Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan dan/atau yang masuk melalui saluran khusus untuk laporan dugaan pelanggaran, akan segera ditindaklanjuti dalam waktu tidak lebih dari 60 hari kalender sejak terjadinya dugaan pelanggaran. Sekretaris Perusahaan berhak melakukan komunikasi dengan pelapor.

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWER

Protection of the whistleblower is intended to guarantee the confidentiality of the reporter's identity and protection from actions that harm the whistleblower. The Company is committed to protecting whistleblowers of alleged violations in good faith, and Abipraya will comply with all applicable legislation in the WBS system implementation.

The policy regarding the protection of whistleblowers of alleged violations refers to the Board of Directors Decree No. 82/D/KPTS/III/2017 concerning Management Procedures and Follow-up for Reporting Violations (Article 7). The Company's efforts in protecting whistleblowers include:

1. Availability of reporting channel facilities;
2. Guaranteed confidentiality of identity and information that can be used to contact the whistleblower;
3. Guarantee of information security and protection against retaliation from the reported, in the form of threats, physical safety, psychological terror, and other actions that can harm the whistleblower;
4. Follow-up implementation information.

SOCIALIZATION OF THE WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

WBS socialization within the Company is delivered through various media such as internal bulletins, posters, ethical socialization, and direct presentations to related work units. For external, socialization is carried out through the Company website.

COMPLAINT HANDLING

Reports of alleged violations submitted to the Corporate Secretary and/or submitted through special channels for reports of violations will be immediately followed up, within no more than 60 calendar days from the alleged violation occurrence. The Corporate Secretary has the right to communicate with the whistleblower.

Pencatatan laporan dugaan pelanggaran dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Direksi, dan pelapor diwajibkan untuk melampirkan bukti-bukti terjadinya pelanggaran. Selanjutnya, Tim *Whistleblowing System* akan menelaah dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran, kemudian melakukan pengarsipan dokumen pelaporan.

JUMLAH PENGADUAN DAN TINDAK LANJUT

Sampai dengan akhir periode pelaporan tahun 2023, tidak ada pengaduan yang masuk dan diproses, serta tidak ada sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses.

Gratifikasi

Perseroan menerapkan prinsip-prinsip GCG berupaya menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan. Kebijakan anti korupsi Perseroan didasari penerapan beberapa peraturan perundangundangan, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi tersebut menyatakan dengan jelas dan rinci dalam arahan yang jelas perihal Klasifikasi Gratifikasi, Pemanfaatan dan Pengelolaan Gratifikasi, Pelaporan dan Sanksi.

The recording of reports of alleged violations is carried out by officials appointed by the Board of Directors, and the whistleblower is required to attach evidence of violations. Next, the Whistleblowing System Team will review and follow up on the alleged violations report, and then file reporting documents.

NUMBER OF COMPLAINTS AND FOLLOW-UPS

Until the end of the reporting period in 2023, no complaints have been submitted and processed, and no sanctions/follow-up on complaints have been processed.

Gratuities

The Company applies GCG principles to create a sound business climate, avoids actions, behaviors, or actions that can cause conflicts of interest, Corruption, Collusion, and Nepotism (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme: KKN), and always prioritizes the interests of the Company above personal, family, group or group interests. The Company's anti-corruption policy is based on the implementation of legislation, including:

1. Law No. 28 of 1999 concerning a Clean and Free Country implementation from Corruption, Collusion, and Nepotism.
2. Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption.

The Gratuity Control Guidelines state clearly and in detail in clear directions regarding Gratuity Classification, Utilization and Management of Gratuity, Reporting and Sanctions.

Insan Abipraya dilarang memberikan dan menjanjikan, baik langsung maupun tidak langsung hadiah, suap dan sejenisnya kepada penyelenggara negara, Mitra Kerja, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan, dimana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga digunakan untuk mempengaruhi dan menggerakkan pihak-pihak tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Insan Perusahaan juga dilarang menerima apapun yang tidak sah dari *Stakeholders* dengan maksud untuk memberikan keuntungan pribadi dan merugikan kepentingan Perusahaan, meminta hadiah, *entertainment* atau dalam bentuk lainnya. Lebih rinci kebijakan tentang larangan pemberian dan penerimaan ini diatur tersendiri dalam Kebijakan Larangan Pemberian dan Penerimaan Hadiah atau Suap (Gratifikasi) di Lingkungan perusahaan.

Sebagai wujud komitmen, Perusahaan senantiasa mengumumkan di media massa bahwa Perusahaan tidak dapat menerima maupun memberi hadiah, termasuk namun tidak terbatas pada bingkisan, parcel dan sejenisnya dalam kesempatan apapun, termasuk dan tidak terbatas pada Hari Raya Keagamaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Gratifikasi akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai dan Sistem Penilaian Kinerja yang berlaku di lingkungan Abipraya.

Abipraya personnel are prohibited from giving and promising, either directly or indirectly, gifts, bribes, and the like to state administrators, Business Partners, and other parties related to the Company, where such gifts are known or reasonably suspected to be used to influence and move these parties to do or not do something in their position that is contrary to their obligations.

Company personnel are also prohibited from receiving anything unauthorized from Stakeholders with the intent to provide personal gain and harm the interests of the Company, asking for a reward, entertainment, or in any other form. More detailed policies regarding the prohibition of giving and receiving are regulated separately in the Policy on the Prohibition of Giving and Receiving Gifts or Bribes (Gratuities) in the company environment.

As a form of commitment, the Company always announces in the mass media that the Company cannot receive or give gifts, including but not limited to gifts, parcels, and the like on any occasion, including but not limited to Religious Holidays, either directly or indirectly.

Violations of the provisions in the Gratuity Guidelines will be subject to sanctions according to the Employee Discipline Regulations and Performance Appraisal System applicable in the Abipraya Environment.

Sosialisasi Pedoman Gratifikasi

Implementasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi senantiasa disosialisasikan kepada segenap insan Perseroan dan *Stakeholders*, melalui hal-hal berikut:

1. Sosialisasi dilakukan melalui *website external* PT Brantas Abipraya (persero)
2. Sosialisasi dilakukan secara langsung
3. Sosialisasi dilakukan dalam perjanjian dalam hal ini *Stakeholder*
4. Sosialisai TV Kantor PT Brantas Abipraya (persero)
5. Sosialisasi dilakukan dengan *x-banner* yg ada di *loby* PT Brantas Abipraya (persero)

Pemanfaatan Dan Pengelolaan Gratifikasi

Pemanfaatan penerimaan Gratifikasi dilakukan dengan cara: Digunakan oleh penerima untuk menunjang kinerja, Dimanfaatkan oleh Perseroan untuk kegiatan operasional, sebagai barang *Display* atau Perpustakaan.

Pengelolaan Gratifikasi dilakukan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dibantu oleh Admin Unit yang ditunjuk atau melekat sesuai *Job Desk* yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

Mekanisme Pelaporan Penerimaan Gratifikasi

1. Penerimaan, penolakan dan permintaan Gratifikasi wajib dilaporkan oleh Insan Perseroan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
2. Insan Perseroan dilarang menerima/memberi Gratifikasi yang tidak diperbolehkan atau berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang/jabatan dan apabila Insan Perseroan dimaksud tidak melaporkannya maka dapat dilaporkan melalui mekanisme *Whistleblowing System*.

Socialization of Gratuity Guidelines

The implementation of the Gratuity Control Guidelines is socialized to all personnel of the Company and Stakeholders, through the following:

1. Socialization is carried out through PT Brantas Abipraya (Persero)'s external website
2. Socialization is carried out directly
3. Socialization is carried out in agreement in this case, Stakeholder
4. Office TV Socialization PT Brantas Abipraya (Persero)
5. Socialization is carried out by *x-banner* in PT Brantas Abipraya (Persero) loby

Utilization and Management of Gratuities

The utilization of Gratuity receipts is carried out by Used by recipients to support performance and utilized by the Company for operational activities, such as goods *Display* or Library.

Gratuity Management is carried out by the Gratuity Control Unit (UPG), in carrying out its duties and responsibilities, the Gratuity Control Unit (UPG) is assisted by the Admin Unit appointed or attached accordingly *Job Desk* stipulated by the Board of Directors of the Company regarding the Duties and Authorities of the Gratuity Control Unit (UPG).

Gratuity Receipt Reporting Mechanism

1. Acceptance, rejection, and request for Gratuity must be reported by Company personnel to the Gratuity Control Unit (UPG).
2. Company personnel are prohibited from receiving/giving Gratuities that are not allowed or have the potential for abuse of authority/position, and if the Company personnel do not report it, it can be reported through the *Whistleblowing System* mechanism.

3. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) melaporkan penerimaan Gratifikasi yang wajib dilaporkan disertai dengan dokumen pendukung kepada KPK paling lama 20 (Dua puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan gratifikasi.
 4. KPK akan melakukan analisa, verifikasi dan klasifikasi serta memberikan penetapan status Gratifikasi atas laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) paling lama selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
 5. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) membuat rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi serta melaporkannya kepada Direksi secara periodik setiap semester.
3. The Gratuity Control Unit (UPG) reports the receipt of the Gratuity, which must be reported accompanied by supporting documents to the KPK no later than 20 (Twenty) working days from receipt of the gratuity report.
 4. The KPK will analyze, verify, classify, and provide a determination of Gratuity status on the Gratuity report submitted by the Gratuity Control Unit (UPG) no later than 30 (thirty) working days.
 5. The Gratuity Control Unit (UPG) makes a recapitulation of reports on the acceptance and rejection of Gratuities and reports them to the Board of Directors periodically every semester.

LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DI TAHUN 2023

Sepanjang Tahun 2023 Perseroan tidak menerima adanya laporan Gratifikasi.

GRATUITY RECEIPT REPORT IN 2023

Throughout 2023, the Company did not receive any Gratuity reports.

PERKARA PENTING

Litigation

Sepanjang tahun 2023, Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris, tidak menghadapi gugatan atau kasus hukum di pengadilan dan/atau lembaga arbitrase atau kasus signifikan yang berdampak material pada kelangsungan bisnis Perseroan bersama dengan asetnya. Di bawah ini adalah kasus hukum yang dihadapi oleh Perseroan di luar aspek operasional pada tahun 2023:

Throughout 2023, the Company, the Board of Directors, and the Board of Commissioners will not face any lawsuits or legal cases in courts and/or arbitral institutions or significant cases that have a material impact on the continuity of the Company's business along with its assets. Below are the legal cases faced by the Company outside the operational aspect in 2023:

Perkara Perdata Civil Case	Lembaga Penyelesaian Settlement Agency	Penyebab Perkara Cause of the Matter	Status Status
Perlawanan Eksekusi Tanah di Pasar Rebo (Abpro) Resistance to land execution in Pasar Rebo (Abpro)	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta DKI Jakarta High Court	Adanya Sita Eksekusi yang dilakukan oleh PN Jakarta Timur berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Existence of Execution Seizure carried out by East Jakarta District Court based on Determination from the Head of the East Jakarta District Court	<ul style="list-style-type: none"> Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 949/PDT/2023/2023/PTDKI menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 506/Pdt.G/2022/PN.Jkt.tim tanggal 20 Oktober 2022 Upaya Eksekusi terhadap Aset yang berlokasi di Pasar Rebo milik PT BA dibatalkan DKI Jakarta High Court Decision Number 949/PDT/2023/2023/PTDKI stated that it canceled the East Jakarta District Court Decision Number 506/Pdt.G/2022/PN.Jkt.tim on October 20, 2022 Execution Attempt on Assets located in Pasar Rebo owned by PT BA canceled
Gugatan PMH dari PT Sahid Inti Dinamika PMH lawsuit from PT Sahid Inti Dinamika	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta DKI Jakarta High Court	Adanya gugatan PMH dari PT Sahid Inti Dinamika terhadap hasil pekerjaan PT BA terkait dengan Proyek Pembangunan Apartemen Sahid Asena There is a PMH lawsuit from PT Sahid Inti Dinamika against the results of PT BA's work related to the Sahid Asena Apartment Construction project	Menunggu Putusan Kasasi Waiting for Cassation Verdict
Gugatan Wanprestasi dari PT Abetama Sempurna Default Lawsuit from PT Abetama Sempurna	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta DKI Jakarta High Court	Adanya gugatan utang piutang yang diajukan oleh PT Abetama Sempurna selaku vendor pada Proyek Pembangunan Pemkab Lamongan There is a claim for receivables debt filed by PT Abetama Sempurna as a vendor at the Lamongan Regency Government Development project	Menunggu Putusan Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Awaiting an Appeal Decision at the DKI Jakarta High Court
Gugatan sengketa lahan di Bendungan Keureuto Land Dispute Lawsuit at Keureuto Dam	PN Simpang Tiga Redelo PN Simpang Tiga Redelo	Adanya Permasalahan Lahan yang diajukan oleh warga yang disebabkan tidak menerima ganti kerugian There are land problems filed, by residents caused by not receiving compensation	Masih dalam proses persidangan Still in the process of trial

Perkara Perdata Civil Case	Lembaga Penyelesaian Settlement Agency	Penyebab Perkara Cause of the Matter	Status Status
Pembatalan Putusan BANI Cancellation of the BANI Decision	Mahkamah Agung RI Supreme Court of the Republic of Indonesia	Adanya permasalahan keberatan terhadap putusan BANI terkait dengan Pembangunan Apartemen Sahid Asena yang pada saat tahun 2021 perkara tersebut telah diputus dan menyatakan gugatan ditolak. Sehingga PT Sahid Inti Dinamika mengajukan Banding ke Mahkamah Agung RI There is a problem of objection to the BANI decision related to the Construction of the Sahid Asena Apartment, in which the time of 2021, the case was decided and stated that the lawsuit was rejected. PT Sahid Inti Dinamika filed an Appeal to the Supreme Court of the Republic of Indonesia	Mahkamah Agung RI mengembalikan permohonan banding pembatalan Putusan BANI yang diajukan oleh PT Sahid Inti Dinamika dikarenakan permohonan yang diajukan cacat formil The Supreme Court of the Republic of Indonesia returned the appeal for the BANI Decision filed cancellation by PT Sahid Inti Dinamika because the application submitted was a legal defect.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI ANAK PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat Perkara Penting yang dihadapi Anak Perusahaan perseroan.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat Perkara Penting yang dihadapi perseroan yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

PENGARUH TERHADAP KONDISI PERUSAHAAN

Terhadap perkara hukum yang dihadapi oleh Perseroan, oleh karena Perseroan selama tahun 2023 tidak memiliki perkara hukum, sehingga tidak mempengaruhi operasional Perseroan.

SANKSI ADMINISTRATIF

Selain kegiatan diatas, pemantauan juga dilakukan terhadap sanksi administratif yang diberikan oleh otoritas. Pada tahun 2023 tidak terdapat denda administratif yang diterima perseroan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

IMPORTANT MATTERS FACED BY SUBSIDIARIES

Throughout 2023, there are no Important Cases faced by the Company's Subsidiaries.

IMPORTANT MATTERS FACED BY MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Throughout 2023, there are no Important Matters faced by the company involving members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

INFLUENCE ON COMPANY CONDITION

Regarding legal cases faced by the Company, because the Company during 2023 has no legal cases, it does not affect the Company's operations.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

In addition to the above activities, monitoring is also carried out on administrative sanctions given by the authority. In 2023, there were no administrative fines received by the company from the Financial Services Authority (OJK).



PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility



PERSEROAN MENILAI BAHWA TANGGUNG JAWAB SOSIAL MERUPAKAN BENTUK INVESTASI SOSIAL YANG DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT SECARA BERKESINAMBUNGAN BAGI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN SEKITAR.
The Company believes that social responsibility is a form of social investment that can provide sustainable benefits to the community and environment.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

Perseroan sangat memperhatikan dampak dari setiap kegiatan yang dilakukan terhadap para stakeholder agar efektivitas hubungan Perseroan dengan para stakeholder dapat tetap terjalin dengan harmonis dan dapat mendorong peningkatan kinerja Abipraya.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN PENERAPAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Perseroan sebagai perusahaan jasa konstruksi tidak hanya mengutamakan pertumbuhan perusahaan ataupun mengejar laba saja, tetapi juga mengutamakan tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan termasuk kepada pemegang saham, konsumen, karyawan, maupun masyarakat dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam melakukan aktivitasnya, Abipraya tetap

The Company pays close attention to the impact of every activity carried out on stakeholders so that the effectiveness of the Company's relation with stakeholders can remain harmonious and encourage the improvement of Abipraya's performance.

COMMITMENT AND POLICY IMPLEMENTATION OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAMS

The Company as a construction service company not only prioritizes company growth or the pursuit of profit, but also prioritizes responsibility to all stakeholders, including shareholders, consumers, employees, and the community in all aspects of the company's operations, which include economic, social, and environmental. In carrying out its activities, Abipraya continues to pay attention to the social and environmental impacts arising from the company's activities,

memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang timbul akibat aktivitas perusahaan, serta sebagai BUMN tetap berperan aktif didalam rencana aksi nasional tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGS).

Sebagai implementasi strategi pencapaian target dan indikator *Sustainable Development Goals* (SDGS) tersebut adalah dengan cara menerapkan program CSR/TJSL. Abipraya berkomitmen untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui pengelolaan CSR (TJSL) yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan sehingga pelaksanaannya semakin terarah dan terukur sesuai dengan arahan Menteri BUMN. Dalam penyusunan program TJSL, Abipraya menyelaraskan dengan hasil pemetaan skala prioritas TPB yang merupakan komitmen dunia atas kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi & lingkungan hidup. Sesuai dengan SDGS (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) dikelompokkan menjadi 17 prioritas, antara lain:

and as an SOE, continues to play an active role in the national action plan for Sustainable Development Goals (SDGs).

As implementation of the strategy to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) targets and indicators, it is by implementing CSR/TJSL programs. Abipraya is committed to supporting the National Economic Recovery (Pemulihan Ekonomi Nasional: PEN) through more integrated and sustainable CSR management (TJSL) so that its implementation is more directed and measurable according to the direction of the Minister of SOEs. In the CSR program preparation, Abipraya aligned with the results of mapping the SDGs priority scale, which is the world's commitment to sustainable development agreements based on human rights and equality to encourage social, economic & environmental development. According to the SDGS (Sustainable Development Goals) grouped into 17 priorities, including:



17 SDGS/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Abipraya telah menjalankan program CSR/TJSL secara khusus di sekitar wilayah kantor pusat dan proyek. Pelaksanaan kegiatan CSR/TJSL di kantor pusat diwujudkan melalui kegiatan antara lain:

- a. Donor darah;
- b. Santunan anak yatim dan dhuafa;
- c. Bantuan beasiswa anak asuh;
- d. Sarana air bersih;
- e. Sertifikasi dan Pelatihan Keterampilan (SKT) Pekerja;
- f. Sertifikasi dan Pelatihan K3L;
- g. Sertifikasi dan Pelatihan Manajemen MSDM.

Pelaksanaan kegiatan CSR/TJSL di lingkungan proyek-proyek diwujudkan melalui kegiatan antara lain:

- a. Penanaman pohon;
- b. Bantuan fasilitas pendidikan (bangku, kursi dll);
- c. Pelayanan kesehatan (pengobatan gratis);
- d. Bantuan sosial keagamaan (pembangunan tempat ibadah, sarana olah raga dll).

Perusahaan dalam menerapkan program TJSL berdasarkan pada peraturan kementerian BUMN Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-348/MBU/DSI/11/2020 tanggal 18 November 2020 perihal: Penyusunan Program TJSL BUMN Tahun 2021 dan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor: PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, serta Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun 2023. Program TJSL yang dilakukan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar lebih maju dan berkembang serta mempunyai engagement terhadap PT Brantas Abipraya (Persero). Program TJSL yang dilakukan PT Brantas Abipraya (Persero) disalurkan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi dan akuntabel kepada mitra

17 Sustainable Development Goals (SDGs) Abipraya has implemented CSR/TJSL programs specifically around the head office and project areas. The implementation of CSR/TJSL activities at the head office is realized through activities including:

- a. Blood donation;
- b. Compensation for orphans and poor;
- c. Foster child scholarship assistance;
- d. Clean water facilities;
- e. Certification and Skills Training (Sertifikasi dan Pelatihan Keterampilan: SKT) of Employees;
- f. OHS Certification and Training;
- g. HC Management Certification and Training.

The implementation of CSR/TJSL activities in the project environment is realized through activities including:

- a. Tree planting;
- b. Assistance for educational facilities (benches, chairs, etc.);
- c. Health services (free medical treatment);
- d. Religious social assistance (construction of places of worship, sports facilities, etc.).

The Company implementing the CSR program is based on the regulation of the Ministry of SOEs Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number S-348/MBU/DSI/11/2020 dated November 18, 2020, subject: Preparation of the SOEs CSR Program in 2021 and Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number: PER-1/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises, and the 2023 Budget Activity Plan (Rencana Kegiatan Anggaran: RKA) for the Social and Environmental Responsibility Program (TJSL). The CSR program conducted by PT Brantas Abipraya (Persero) aims to improve the ability of micro and small businesses to be more advanced, develop, and engage with PT Brantas Abipraya (Persero). The CSR program carried out by PT Brantas Abipraya (Persero) is distributed with prudence, transparency, and accountability principles to fostered partners who collaborate

binaan yang bekerja sama dengan PT Brantas Abipraya meliputi sektor jasa (bas borong) dan perdagangan.

Perubahan penyaluran dana PUMK yang semula disalurkan secara mandiri, diubah menjadi penyaluran Kerjasama. Dalam hal ini Kementerian BUMN merekomendasikan BRI sebagai pelaksana BUMN Penyalur Dana kepada Mitra Binaan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan sesuai surat dari Kementerian BUMN Nomor: S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 perihal: Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja Sama Program PUMK").

Program TJSJ yang dilakukan oleh Abipraya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar lebih maju dan berkembang serta mempunyai *engagement* terhadap Abipraya. Program TJSJ yang dilakukan Abipraya disalurkan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi dan akuntabel kepada mitra binaan yang bekerja sama dengan Abipraya meliputi sektor jasa (bas borong) dan perdagangan.

PRINSIP SERTA TUJUAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Prinsip serta tujuan pelaksanaan program TJSJ Abipraya, mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dan perubahannya yakni Peraturan Menteri BUMN No. PER-6/MBU/09/2022 tanggal 15 September 2022, terdapat empat prinsip yang menjadi acuan agar penerapan program TJSJ dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk menjamin pelaksanaan dan pencapaian keberhasilan program TJSJ sesuai dengan prioritas dan rencana kerja. Empat prinsip tersebut antara lain:

with PT Brantas Abipraya, covering the service sector (wholesale bus) and trade.

Changes in the distribution of PUMK funds, which were originally distributed independently, were changed to cooperation distribution. In this case, the Ministry of SOEs recommends BRI as the executor of SOEs Distributing Funds to Assisted Partners based on the Regulation of the Minister of SOEs Number: PER-1/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises and according to a letter from the Ministry of SOEs Number: S-721/MBU/11/2022 dated November 10, 2022, subject: Micro and Small Business Funding Program Cooperation ("PUMK Program Cooperation").

The CSR program conducted by Abipraya aims to improve the ability of micro and small businesses to be more advanced, develop, and engage with Abipraya. The CSR program carried out by Abipraya is distributed with prudence, transparency, and accountability principles to foster partners who collaborate with Abipraya, covering the service sector (wholesale bus) and trade.

PRINCIPLES AND OBJECTIVES OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY PROGRAMS

The principles and objectives of the Abipraya CSR program implementation refer to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-05/MBU/04/2021, dated April 20, 2021, concerning the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises and its amendments, namely the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-6/MBU/09/2022, dated September 15, 2022, four principles become a reference so that the implementation of the CSR program is carried out systematically and integrated to ensure the implementation and achievement of the success of the CSR program according to priorities and work plans. The four principles include:

1. Terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan;
2. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan;
3. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan;
4. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pelaksanaan program TJSL Abipraya dilakukan dengan berorientasi pada pencapaian TPB berdasarkan tujuan program TJSL BUMN, yaitu Menciptakan kondisi dan mendorong agar BUMN di Indonesia dapat memberikan bantuan/sumbangan yang terbaik bagi negeri dan rakyat Indonesia. Sesuai dengan perannya sebagai regulator, kementerian BUMN akan terus berupaya mengembangkan BUMN sehingga BUMN benar-benar menjadi tulang punggung bagi pembangunan ekonomi Indonesia dan menanamkan rasa bangga sebagai bangsa yang memiliki keragaman kekayaan nusantara, melalui proses pertukaran informasi dan kebudayaan.

Adapun program kegiatan pelaksanaan TJSL Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)
 1. Fokus melakukan penyaluran secara *clustering* dengan menjalin kerja sama sinergi dengan BUMN/BUMD/ Pemda yang mengelola mitra binaan atau pelaku UMKM;
 2. Melakukan kerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang membina pelaku UMKM.

1. Integrated, which is based on risk analysis and business processes that have links with stakeholders;
2. Directed, that is, having a clear direction to achieve company goals;
3. Measurable impact, namely having contributions and providing benefits that produce change or added value for stakeholders and the company;
4. Accountability, which can be accounted for to keep away from potential abuse and irregularities.

The implementation of the Abipraya CSR program is carried out oriented towards achieving SDGs based on the objectives of the SOEs CSR, namely Creating conditions and encouraging SOEs in Indonesia to provide the best assistance/contribution for the country and the people of Indonesia. According to its role as a regulator, the Ministry of SOEs will continue to strive to develop SOEs so that SOEs become the backbone of Indonesia's economic development and instill a sense of pride as a nation that has a diversity of archipelago wealth through the process of exchanging information and culture.

The programs of implementation of the Company CSR are as follows:

- 1) Micro and Small Business Funding Program (Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil: PUMK)
 1. Focus on clustering distribution by establishing synergy cooperation with SOEs/BUMD/Local Governments that manage fostered partners or MSME actors;
 2. Collaborate with Community Empowerment Institutions (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat: LPM) that foster MSME actors.

- | | |
|---|--|
| <p>2) Program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (Non PUMK)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyalurkan dana TJSL sesuai dengan ketentuan; 2. Bekerja sama dengan mitra profesional dan berkompeten untuk menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat; 3. Bekerjasama dengan komunitas masyarakat (<i>community development</i>) untuk meningkatkan kualitas program; 4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas TJSL melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, dan bentuk bantuan lainnya. | <p>2) Social and Environmental Responsibility Program (Non PUMK)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disbursing CSR funds according to the provisions; 2. Cooperate with professional and competent partners to organize community empowerment programs; 3. Working with the community (community development) to improve the quality of the program; 4. Increase the capacity and capability of CSR through the provision of education, training, apprenticeship, marketing, and other forms of assistance. |
|---|--|

Selain peraturan dan perundang-undangan, penerapan program CSR oleh Perusahaan juga mengacu kepada ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial (*Guidance on Social Responsibility*). ISO yang telah diratifikasi oleh Pemerintah pada tahun 2010 dan dijadikan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada tahun 2012 ini memberikan 7 (tujuh) subyek inti dalam pengelolaan CSR, yaitu:

- Tata kelola organisasi yang baik
- Penegakan hak asasi manusia
- Praktek ketenagakerjaan yang manusiawi dan berkeadilan
- Dampak kegiatan perusahaan terhadap Lingkungan
- Prosedur operasi yang wajar
- Tanggung jawab terhadap konsumen
- Pelibatan dalam pengembangan masyarakat.

UJI TUNTAS/DUE DILLIGENCE TERHADAP DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN DARI KEGIATAN PERUSAHAAN

Penyusunan program CSR Perusahaan diawali dengan pemetaan potensi masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan CSR atau dapat juga melalui usulan masyarakat, dimana pemetaan ini dapat dilakukan sendiri

In addition to regulations and legislation, the implementation of CSR programs by the Company also refers to ISO 26000 concerning Guidance on Social Responsibility. ISO, which was initiated by the Government in 2010 and made into a Indonesian National Standard (SNI) in 2012, provides 7 (seven) core subjects in CSR management, namely:

- Good organizational governance
- Human rights enforcement
- Humane and equitable labor practices
- Impact of company activities on the Environment
- Reasonable operating procedures
- Responsibility towards consumers
- Involvement in community development.

DUE DILIGENCE ON THE SOCIAL, ECONOMIC, AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF THE COMPANY'S ACTIVITIES

The preparation of the Company's CSR program begins with mapping the potential of the community that is the target of CSR implementation or can also be through community proposals, where this mapping can

ataupun bekerjasama dengan pihak ketiga, dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat. Hasil pemetaan akan dirumuskan untuk kemudian dirancang program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya, program yang telah disusun, ditetapkan, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dengan mekanisme *bottom up* dan melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian program CSR diharapkan menghasilkan *output* yang ditetapkan dan berkelanjutan baik dari sisi *outcome* maupun dari sisi program.

PEMANGKU KEPENTINGAN SIGNIFIKAN YANG TERDAMPAK ATAU BERPENGARUH ATAS DAMPAK DARI KEGIATAN PERUSAHAAN

Perseroan menyadari akan dampak yang akan terjadi terkait kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan semaksimal mungkin memberikan atau menciptakan dampak positif terhadap para pemangku kepentingan atas kegiatan usaha yang dijalankan. Disamping itu, Perusahaan pun secara optimal terus melakukan upaya-upaya dalam meminimalisir dampak negatif yang kemungkinan timbul atas kegiatan usaha Perusahaan.

Perusahaan melakukan klasifikasi para pemangku kepentingan signifikan yang terdampak atau berpengaruh atas dampak dari kegiatan usaha Perusahaan, diantaranya adalah:

1. Konsumen
2. Kreditur
3. Rekanan/Mitra Kerja
4. Manajemen/Karyawan
5. Lingkungan
6. Masyarakat
7. Regulator/Pemerintah/Pemegang saham
8. Pengguna Akhir

alone or in collaboration with a third party, to explore and identify the potential and needs of the community. The results of the mapping will be formulated, and then programs that are needed by the community. Furthermore, programs have been prepared, established, socialized, and implemented by actively involving the community with bottom-up mechanisms and partnering with other stakeholders. Thus, CSR programs are expected to produce set and sustainable outputs in terms of outcomes and from the program side.

SIGNIFICANT STAKEHOLDERS AFFECTED OR INFLUENCED BY THE IMPACT OF THE COMPANY'S ACTIVITIES

The Company is aware of the impact that will occur, related to the business activities carried out by the Company. For this reason, the Company as much as provides or creates a positive impact on stakeholders for the business activities carried out. In addition, the Company also optimally continues to make efforts to minimize negative that may arise on the Company's business activities.

The Company classifies significant stakeholders who are affected by the impact of the Company's business activities, including:

1. Consumers
2. Creditor
3. Partner
4. Management/Employee
5. Environment
6. Community
7. Regulator/Government/Shareholder
8. End User

ISU - ISU PENTING SOSIAL EKONOMI DAN LINGKUNGAN TERKAIT DAMPAK KEGIATAN PERUSAHAAN

Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan selalu mengamati perkembangan informasi, terutama isu-isu penting sosial ekonomi dan lingkungan, khususnya yang terkait langsung akan perkembangan bisnis Perusahaan. Salah satu isu penting yang cukup berdampak pada kegiatan Perusahaan adalah dalam melaksanakan proyek pembangunan infrastruktur akan melibatkan upaya-upaya pembebasan lahan serta penebangan pohon yang tentunya memberikan dampak kepada masyarakat sekitar proyek, untuk itu Perseroan perlu melakukan beberapa hal sebagai upaya agar masyarakat tetap terjaga kehidupan sosial dan kesejahteraannya diantaranya :

1. Inisiatif mempekerjakan hingga 70% tenaga lokal dari daerah disekitar proyek.
2. Melakukan penanaman bibit pohon serta penebaran benih ikan.
3. Membangun sarana ibadah untuk masyarakat lokal
4. Membangun infrastruktur sarana air bersih
5. Memberikan bantuan langsung yang berdampak pada masyarakat miskin serta khitanan massal.

PROGRAM YANG MELEBIHI TANGGUNG JAWAB MINIMAL PERUSAHAAN YANG RELEVAN DENGAN BISNIS YANG DIJALANKAN

Program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan di Perseroan selama ini telah dilaksanakan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan arahan kementerian BUMN dengan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia setiap tahunnya.

SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES RELATED TO THE IMPACT OF THE COMPANY'S ACTIVITIES

In carrying out its business, the Company always observes the development of information, socio-economic, and environmental issues, especially those directly related to the development of the Company's business. One of the issues that have quite an impact on the Company's activities is that carrying out infrastructure development projects will involves land acquisition efforts and tree cutting which certainly has an impact on the community around the project, for this reason the Company needs to do several things as an effort to maintain the social life and welfare of the community including:

1. Initiative to employ up to 70% local labor from the area around the project.
2. Planting tree seedlings and stocking fish seeds.
3. Build worship facilities for local communities
4. Build clean water infrastructure
5. Provide direct assistance that affects poor and mass circumcision.

PROGRAMS THAT EXCEED THE MINIMUM RESPONSIBILITIES OF THE COMPANY RELEVANT TO THE BUSINESS CARRIED OUT

Social and environmental responsibility programs in the Company have been implemented according to applicable laws and according to the direction of the Ministry of SOEs by adjusting to the available budget each year.

PENGELOLAAN PADA UNIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)

Pengelolaan pada Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pembinaan usaha kecil dan koperasi, yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Direksi Nomor 18/D/KPTS-J/IV/1992 tanggal 2 April 1992. Pembaharuan Tim Pelaksana terakhir melalui surat keputusan Direksi nomor 475/D/kPTS/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Pembentukan Tim Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah sebagai berikut :

Pembina Supervisor	: Direktur SDM dan Umum Director of HC and General Affairs
Ketua Head	: Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
Sekretaris Secretary	: Manager Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility Manager
Anggota Member	: Manager Keuangan dan HC Divisi Operasi 1 Manager Keuangan dan HC Divisi Operasi 2 Manager Keuangan dan HC Divisi Operasi 3 Finance Manager and HC Operations Division 1 Finance Manager and HC Operations Division 2 Finance Manager and HC Operations Division 3

Sasaran Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi rakyat dan pemerataan pembangunan melalui perluasan kesempatan berusaha bagi usaha kecil & koperasi, masyarakat, sosial dan lingkungan sekitarnya.

Mitra Binaan yang dibina oleh Perseroan adalah usaha kecil yang berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi dan mempunyai legalitas/surat izin sebagai salah satu persyaratan administrasi.

MANAGEMENT IN THE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY UNIT (CSR)

Management in the Social and Environmental Responsibility Unit (CSR) is carried out by the Implementation Team for the Development of small businesses and cooperatives, which was formed based on the decree of the Board of Directors Number 18/D/KPTS-J/IV/1992 dated April 2, 1992. The latest renewal of the Implementation Team through the Decree of the Board of Directors number 475/D/ kPTS/ XII/2022 dated December 20, 2022, concerning the Formation of a Social and Environmental Responsibility Program Team (CSR), is as follows:

The target of the Social and Environmental Responsibility Unit (CSR) is people's economic growth and equitable development creation through business opportunities expansion for small businesses & cooperatives, the community, society, and the surrounding environment.

Assisted Partners fostered by the Company are small businesses in the form of individual businesses, business entities that are not legal entities, or business entities that are legal entities, including cooperatives, and have legality/license as one of the administrative requirements.

PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pada tahun 2023, Perseroan telah mengeluarkan biaya tanggung jawab sosial sebesar Rp6.608.484.971,-

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FINANCING AND BUDGET

In 2023, the Company has incurred social responsibility costs of IDR6.608.484.971,-



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN LINGKUP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

Corporate Social Responsibility Scope of Human Rights Fulfillment

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN SERTA RUMUSAN PERUSAHAAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PADA HAK ASASI MANUSIA

Berdasarkan ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial, hak-hak Asasi manusia mencakup nondiskriminasi dan perhatian pada kelompok rentan; menghindari kerumitan; hak-hak sipil dan politik; hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; serta hak-hak dasar pekerja. Cakupan definitif tersebut telah dilaksanakan oleh Perusahaan, baik dalam kegiatan operasional yang melibatkan karyawan, kegiatan pengelolaan proyek yang melibatkan masyarakat di sekitar lokasi proyek, maupun kegiatan konstruksi yang melibatkan masyarakat di sekitar lokasi konstruksi. Perusahaan mendefinisikan hak Asasi manusia sebagai hak mendasar bagi setiap individu yang terlibat maupun yang terkena dampak dari kegiatan operasi dan usaha yang dilakukan Perusahaan.

COMMITMENTS AND POLICIES AS WELL AS THE COMPANY'S FORMULATION OF THE SCOPE OF SOCIAL RESPONSIBILITY ON HUMAN RIGHTS

Under ISO 26000 on Social Responsibility Guidelines, human rights include non-discrimination and attention to vulnerable groups; avoiding hassle; civil and political rights; economic, social, and cultural rights; and basic employees' rights. The definitive scope has been implemented by the Company, both in operational activities involving employees, project management activities involving communities around the project site, and construction activities involving communities around the site. The Company defines human rights as fundamental rights for every individual involved or affected by the Company's operations and business.

PENERAPAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PADA HAK ASASI MANUSIA

Komitmen Perusahaan dalam penegakan hak asasi manusia berlaku untuk seluruh karyawan, yakni memperlakukan semuanya secara setara tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan pandangan politik. Penilaian hak asasi manusia juga menjadi pertimbangan bagi Perusahaan dalam mengambil keputusan di semua lokasi operasional.

Dengan pertimbangan tersebut, maka Perusahaan berupaya semaksimal mungkin agar tidak melanggar hak asasi manusia di lokasi operasional, misalnya berkaitan dengan hak kepemilikan lahan, hak masyarakat untuk menjalani kehidupan dengan tenang tanpa terganggu atau terkena dampak negatif akibat pembangunan proyek maupun operasional proyek milik Perusahaan, dan sebagainya. Jika upaya penghormatan hak asasi manusia sudah ditegakkan, dan ternyata masih terjadi masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia, maka Perusahaan berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, melalui musyawarah untuk mufakat.

INFORMASI ISU HAM YANG RELEVAN DENGAN BISNIS PERUSAHAAN

Dengan melibatkan pemangku kepentingan lebih awal dalam penanganan isu HAM, Perusahaan dapat mengidentifikasi isu HAM yang berkaitan dengan operasional Perusahaan, yaitu Upah Pekerja, perlakuan terhadap pekerja perempuan serta keberadaan serikat pekerja dan kewajiban pada masyarakat sekitar proyek.

IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES ON HUMAN RIGHTS

The Company's commitment to upholding human rights applies to all employees, namely treat all equally without distinction of gender, ethnicity, religion, race, and political views. Human rights assessment is also a consideration for the Company in making decisions in all operational locations.

With this consideration, the Company makes every effort not to violate human rights at the operational location, for example, related to land ownership rights, the right of the community to live a quiet life without being disturbed or negatively affected by the construction of projects and project operations owned by the Company, and so on. If efforts to respect human rights have been upheld, and it turns out that there are still problems related to human rights, then the Company strives to resolve the problem properly through deliberation for consensus.

INFORMATION ON HUMAN RIGHTS ISSUES RELEVANT TO THE COMPANY'S BUSINESS

By involving stakeholders early in handling human rights issues, the Company can identify human rights issues related to the Company's operations, namely Employees' Wages, the treatment of female employees and trade unions and obligations existing to the community around the project.

MEKANISME PROSEDUR PENGHORMATAN TERHADAP HAM DARI KEGIATAN PERUSAHAAN

Dalam rangka memenuhi tanggung jawab Perusahaan untuk menghormati HAM, perusahaan memiliki kebijakan dan proses termasuk:

1. Kebijakan dan komitmen untuk memenuhi tanggung jawab untuk menghormati HAM;
2. Proses uji tuntas HAM untuk mengidentifikasi, mencegah, melakukan mitigasi, dan melakukan pertanggungjawaban dalam mengatasi dampak-dampak pada isu HAM;
3. Melaksanakan proses-proses untuk melakukan pemulihan atas setiap dampak buruk terhadap HAM yang merugikan Perusahaan maupun *stakeholders* lainnya.

CAPAIAN TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM ISU HAM

Isu-isu HAM juga berdampak pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, sehingga penerapan dalam kegiatan usaha dapat menghindarkan Perusahaan dari kendala penurunan produktivitas yang dapat mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat.

Untuk itu, Perseroan mengambil tantangan dengan memperhatikan seluruh aspek berkelanjutan dan memastikan bahwa prinsip-prinsip keberlanjutan tidak hanya sebagai kebijakan namun dapat dijalankan pada operasional di lapangan.

MECHANISM PROCEDURES FOR RESPECT FOR HUMAN RIGHTS FROM COMPANY ACTIVITIES

To fulfill the Company's responsibility to respect human rights, the Company has policies and processes including:

1. Policies and commitments to fulfill the responsibility to respect human rights;
2. Human rights due diligence process to identify, prevent, mitigate, and hold accountable in addressing impacts on human rights issues;
3. Carry out processes to remedy any adverse impacts on human rights that harm the Company and other stakeholders.

ACHIEVEMENTS ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN HUMAN RIGHTS ISSUES

Human rights issues also have an impact on economic, social, and environmental aspects, so that their implementation in business activities can prevent companies from experiencing problems with decreasing productivity, which can result in negative impacts on the environment and society.

For this reason, the Company takes on the challenge by paying attention to all aspects of sustainability and ensuring that sustainability principles are not only a policy but can be implemented in operations in the field.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN UNTUK OPERASI YANG ADIL

Corporate Social Responsibility for Fair Operation

ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial memberikan definisi operasi yang adil sebagai praktik yang mencakup: anti korupsi; keterlibatan yang bertanggungjawab dalam politik; kompetisi yang adil; promosi tanggungjawab sosial dalam rantai pemasok (*supply chain*); serta penghargaan atas *property rights*. Pengelolaan operasi organisasi Perusahaan telah memerhatikan seluruh aspek tersebut, termasuk di dalamnya komitmen terhadap anti korupsi dalam penyelenggaraan bisnis Perusahaan, serta larangan keterlibatan politik bagi warga Perseroan yang mengatasnamakan Perusahaan. Selain itu, Perusahaan menjunjung tinggi kompetisi yang adil, yang terlihat dari kepatuhan terhadap transaksi Pihak-pihak Berelasi sesuai keterbukaan informasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan.

DUE DILIGENT

Perusahaan memaparkan secara jelas mengenai hak-hak yang dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan dan mempertimbangkan dampak

ISO 26000 on Social Responsibility Guidance defines fair operation as a practice that includes: anti-corruption; responsible involvement in politics; fair competition; promotion of social responsibility in the supply chain; and appreciation of property rights. The management of the Company's organizational operations has paid attention to all these aspects, including the commitment to anti-corruption in the conduct of the Company's business, and the prohibition of political involvement for the Company's citizens on behalf of the Company. In addition, the Company upholds fair competition, which can be seen from compliance with Related Parties transactions according to the disclosure of information in the Company's Financial Statements.

DUE DILIGENT

The Company clearly explains the rights of each stakeholder and considers the negative and positive impacts of the activities carried out by

negatif dan positif atas aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan.

PENDEKATAN DALAM PERUMUSAN SERTA RELEVANSI DENGAN BISNIS

Pendekatan Perseroan dalam Praktik operasional yang jujur dan adil meliputi : dukungan dan tindakan pencegahan korupsi (*Anti-Corruption*), penghindaran terhadap perilaku pelanggaran hukum, terutama penggunaan pengaruh politik (*Responsible political involvement*), berkompetisi dengan pesaing sejarah jujur dan adil (*Fair Competition*), mempromosikan program tanggungjawab sosial di wilayah-wilayah yang terkena dampak Aktivitas operasi perusahaan (*Promoting social responsibility in the sphere of influence*), menghormati hak-hak kekayaan seperti hak paten, hak cipta dan lain sebagainya (*Respect for property rights*). Praktik operasional yang jujur dan adil bukan saja untuk kepentingan keberlanjutan usaha, tapi juga memberikan kesempatan pada semua *stakeholder* dan lingkungan dapat berkembang secara berkelanjutan.

REVIEW TERHADAP REGULASI

Perseroan memastikan seluruh aktivitas operasionalnya sesuai dengan kerangka hukum yang relevan, patuh pada seluruh aturan yang dibuatnya sendiri secara adil dan imparial, dan mengetahui perubahan-perubahan dalam regulasi.

PELAKSANAAN INISIATIF TJSL

Tanggungjawab sosial dan lingkungan di bidang operasional yang adil yaitu melaksanakan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum, serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memelihara lingkungan hidup. Masyarakat dalam hal ini mencakup karyawan perusahaan, pemasok, distributor, organisasi-organisasi nirlaba yang menjadi mitra perusahaan serta masyarakat secara umum.

the company.

APPROACH IN FORMULATION AND RELEVANCE TO BUSINESS

The Company's approach to honest and fair operational practices includes support and corruption prevention measures (*Anti-Corruption*), avoidance of unlawful behavior, especially the use of political influence (*Responsible political involvement*), competition with honest and fair historical competitors (*Fair Competition*), promote social responsibility programs in areas affected by the company's operations (*Promoting social responsibility in the sphere of influence*), respect property rights such as patents, copyrights, and so on (*Respect for property rights*). Honest and fair operational practices are not only in the interest of business sustainability but also provide opportunities for all stakeholders and the affected environment to develop sustainably.

REVIEWS OF REGULATION

The Company ensures all of its operational activities are according to the relevant legal framework, complies with all rules made by itself fairly and impartially, and is aware of regulations changes.

CSR INITIATIVES IMPLEMENTATION

Social responsibility in the field of fair operations, carrying out business activities beyond business activities required by law, and carrying out investments that support social activities to improve community welfare and maintain the environment. Society includes company employees, suppliers, distributors, and non-profit organizations that are partners of the company as well as society in general. The Company's initiatives in this regard include socialization of anti-corruption and bribery, involvement in

Inisiatif Perseroan dalam hal ini melingkupi sosialisasi anti korupsi dan suap, keterlibatan dalam politik yang bertanggung jawab, kompetisi yang *fair*, mendukung tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui rantai pasokan, menghormati *property right*.

PROSES PENGADAAN BARANG & JASA YANG ADIL DAN TRANSPARAN

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara adil dan transparan melalui proses tender. Proses ini dilaksanakan sesuai *Standard Operating Procedure*.

Kemitraan yang berkelanjutan adalah kemitraan yang saling membangun dan menguntungkan untuk mencapai keberlanjutan bersama. Keberlangsungan Perseroan tidak lepas dari dukungan setiap mitra yang bersama-sama berkomitmen dalam pencapaian keberlanjutan. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab Perseroan untuk memastikan setiap interaksi dengan para mitra usaha kami dilaksanakan dengan adil, terbuka, dan akuntabel.

REKRUTMEN YANG ADIL DAN BERKUALITAS

Perseroan menerapkan proses rekrutmen yang selalu menjunjung tinggi prinsip transparansi, kejujuran, keadilan, tanpa membedakan suku, agama, dan ras.

CAPAIAN DAN PENGHARGAAN

Pada 2023, Perseroan tidak mendapatkan tuntutan dan sanksi hukum terkait anti korupsi dan suap, maupun keterlibatan dalam politik yang bertanggung jawab, kompetisi yang *fair*, mendukung tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui rantai pasokan dan *property right*. Dengan kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa Perseroan telah memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam operasi yang adil.

responsible politics, fair competition, supporting social responsibility through the supply chain, and respect for property rights.

FAIR AND TRANSPARENT PROCUREMENT PROCESS

The Company is committed to carrying out the procurement process of goods and services fairly and transparently through the tender process. This process is carried out according to Standard Operating Procedure.

A sustainable partnership is a partnership that builds on each other and benefits each other to achieve mutual sustainability. The sustainability of the Company cannot be separated from the support of each partner who is jointly committed to achieving sustainability. Therefore, the Company's responsibility is to ensure that every interaction with our business partners is carried out fairly, openly, and accountably.

FAIR AND QUALITY RECRUITMENT

The Company implements a recruitment and selection process that upholds the principles of transparency, honesty, and justice, regardless of ethnicity, religion, and race.

ACHIEVEMENTS AND AWARDS

In 2023, the Company will not face legal prosecution and sanctions related to anti-corruption and bribery, as well as involvement in responsible politics, fair competition, and supporting social responsibility through supply chains and property rights. With these conditions, it can be said that the Company has fulfilled its social and environmental responsibilities in fair operations.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEPADA PELANGGAN

Social Responsibility to Customers

Pemenuhan tanggung jawab terhadap konsumen juga dilakukan Perseroan dengan memberikan jaminan bahwa kualitas pelaksanaan proyek telah sesuai dengan kesepakatan kontrak terkait. Jaminan kualitas dikontrol melalui penerapan manajemen mutu yang melibatkan konsumen dalam memberikan pengukuran terhadap kualitas pelaksanaan proyek.

KEBIJAKAN MANAJEMEN

Perseroan berupaya secara maksimal memberikan layanan konsumen sebagai bentuk tanggung jawab dan kepatuhan Perseroan terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821).

Perseroan memiliki komitmen untuk selalu menghadirkan produk yang memiliki kualitas, efikasi, dan keamanan yang sesuai dengan standar

The fulfillment of responsibilities towards consumers is also carried out by the Company by assuring that the quality of project implementation is according to related contractual agreements. Quality assurance is controlled through the implementation of quality management that involves consumers in providing measurements of the quality of project implementation.

MANAGEMENT POLICY

The Company strives to provide maximum customer service as a form of the Company's responsibility and compliance with Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 No. 22, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 3821).

The Company is committed to always presenting products that have quality, efficacy, and safety according to product quality standards

kualitas produk sebagaimana ketentuan regulator. Selain itu, wujud komitmen dan kebijakan tanggung jawab terhadap konsumen atau pelanggan direalisasikan melalui layanan pengaduan konsumen dan komitmen terhadap mutu produk. Melalui layanan pengaduan konsumen, Perseroan senantiasa berupaya memberikan alternatif solusi kepada konsumen atau pelanggan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Perseroan telah menetapkan kebijakan internal, agar seluruh jajaran berupaya keras memenuhi hak-hak konsumen tersebut, termasuk mematuhi seluruh peraturan perundangan yang mengatur hak-hak konsumen. Oleh karenanya, Perseroan terus berusaha meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada konsumen, sekaligus sebagai wujud kepatuhan terhadap undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

TARGET

Perseroan secara konsisten menjalankan program kerja dalam rangka menjaga mutu produk dan kepuasan pelanggan. Perseroan selalu tanggap terhadap keluhan pelanggan dan segera melakukan mitigasi sesuai prosedur yang berlaku di Perseroan. Terkait dengan kepuasan pelanggan, Perseroan secara periodik melakukan survei kepuasan pelanggan yang diharapkan dapat mendorong Perseroan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen.

KOMITMEN LAYANAN SETARA

Abipraya berkomitmen untuk memperlakukan konsumen secara setara, tanpa membedakan berdasarkan suku, agama, ras, warna kulit, pandangan politik, dan sebagainya. Prinsip kesetaraan tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 7, huruf c, "memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif." Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan, "Pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membedakan mutu pelayanan kepada konsumen."

as stipulated by regulators. In addition, commitment and responsibility policies towards consumers or customers are realized through consumer complaint services and commitment to product quality. Through consumer complaint services, the Company always strives to provide alternative solutions to consumers or customers based on the principle of mutual benefit.

The Company has established internal policies, so that all levels strive to fulfill these consumer rights, including complying with all legislation governing consumer rights. Therefore, the Company continues to strive to improve service and protection to consumers, as well as a form of compliance with Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection.

TARGET

The Company consistently carries out work programs to maintain product quality and customer satisfaction. The Company is always responsive to customer complaints and immediately mitigates them according to applicable procedures in the Company. Related to customer satisfaction, the Company periodically conducts customer satisfaction surveys, which are expected to encourage the Company to continue to improve the quality of service to consumers.

EQUAL SERVICE COMMITMENT

Abipraya is committed to treating consumers equally, without discriminating based on ethnicity, religion, race, color, political views, and so on. The principle of equality is an Article 7 implementation of the Consumer Protection Law, letter c, "treating or serving consumers correctly and honestly and not discriminatory." In the explanation of the article, it is stated, "Businessmen are prohibited from discriminating consumers in providing services. Businessmen are prohibited from discriminating the quality of service to consumers."

PROGRAM DAN STRATEGI

Sejalan dengan kebijakan hubungan dengan pelanggan, Perseroan membagi program kegiatan dan strategi yang meliputi:

- a. Program Penanganan Keluhan Pelanggan menyelesaikan keluhan pelanggan secara efektif dan cepat, melakukan koordinasi dengan tahapan:
 - Penerimaan keluhan dari pelanggan
 - Analisa permasalahan yang dikeluhkan oleh pelanggan dan ditindak lanjut oleh bagian terkait ada kemungkinan harus bekerjasama dengan Mitra
 - Identifikasi alternatif solusi
 - Penentuan solusi;
 - Implementasi solusi;
 - Penyampaian penyelesaian keluhan kepada pelanggan
 - Dokumentasi & evaluasi seluruh keluhan yang masuk untuk kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan dan inovasi proses kerja sehingga mampu menghasilkan produk dan layanan yang memenuhi tuntutan bisnis dan harapan pelanggan.
- b. Keluhan pelanggan umumnya langsung ditangani secara efektif dan cepat melalui tahapan tersebut diatas. Namun apabila keluhan tersebut belum dapat ditangani, maka akan menyampaikan informasi kepada pelanggan melalui email, rapat yang menjelaskan status dan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian keluhan.

Hasil tindak lanjut ini akan selalu dilakukan monitoring yang kemudian dievaluasi dan dibahas pada setiap pertemuan bulanan seperti rapat koordinasi sebagai usaha untuk memperoleh umpan balik tentang produk dan dukungan kepada pelanggan, perencanaan produk, optimalisasi performance peralatan, pengaturan produksi dan pasokan, perbaikan sistem kerja dan pengembangan bisnis baru.

PROGRAMS AND STRATEGIES

In line with the customer relation policy, the Company divides activity programs and strategies, which include:

- a. The Customer Complaint Handling Program resolves customer complaints effectively and quickly, coordinating with the stages:
 - Receive complaints from customers
 - Analysis of problems complained by customers and followed up by related departments there is a possibility that must cooperate with Partners
 - Identification of alternative solutions
 - Solution determination;
 - Solution implementation;
 - Submission of complaint resolution to customers
 - Documentation & evaluation of all incoming complaints to be followed up in the form of improvements and innovations in work processes to produce products and services that meet business demands and customer expectations.
- b. Customer complaints are generally handled effectively and quickly through the stages mentioned above. However, if the complaint cannot be handled, it will convey information to the customer via email and meetings that explain the status and time needed for complaint resolution.

The results of this follow-up will be monitored, which is then evaluated and discussed at every monthly meeting, such as coordination meetings as an effort to obtain feedback on products and support to customers, product planning, optimization of equipment performance, production and supply arrangements, work system improvements, and new business development.



Proses pengelolaan keluhan ini terintegrasi dengan hasil-hasil yang fokus pada pelanggan sehingga tidak terjadi pengulangan keluhan dari jenis keluhan yang sudah pernah diselesaikan. Hasil analisa dan evaluasi tersebut menjadi dasar untuk perbaikan proses kerja dan sistem kerja di Perseroan. Media komunikasi yang digunakan untuk mendukung kemudahan dan kelancaran komunikasi antara Perseroan dan pelanggan.

TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN KONSUMEN

Perseroan memberikan tanggapan yang cepat terhadap berbagai permintaan dan keluhan konsumen sebagai bagian dari komitmen pelayanan Perseroan. Perseroan meyakini penerapan komitmen pelayanan terbaik akan mampu mendukung target peningkatan kinerja Perseroan di masa mendatang. Untuk menjamin pelayanan pada pelanggan, Perseroan membuka layanan pengaduan dengan menyediakan saluran telpon, email maupun surat kepada pelanggan.

Komplain pelanggan dapat berupa:

- Komplain dengan surat resmi yang dikirim kepada pejabat struktural Perseroan
- Komplain secara lisan
- Komplain tertulis
- Komplain tertulis dikirimkan ke proyek

SISTEM MANAJEMEN MUTU

Kinerja Perusahaan yang terus meningkat secara berkesinambungan merupakan tujuan yang ingin diraih Perseroan. Untuk itu, Perseroan telah dan terus melakukan pembenahan dan perbaikan di berbagai bidang, termasuk salah satunya dengan menerapkan sistem manajemen mutu yang memuat standar standar kualitas produk dan layanan sesuai dengan kebijakan manajemen mutu dan senantiasa meningkatkan kinerja Perusahaan yang berbasis pada upaya perbaikan yang berkelanjutan. Standar tersebut

This complaint management process is integrated with customer-focused results so that there is no repetition of complaints of the type that have already been resolved. The analysis and evaluation results become the basis for improving the work process and system. Communication media is used to support the ease and smoothness of communication between the Company and customers.

FOLLOW-UP ON CONSUMER COMPLAINTS

The Company provides a quick response to various consumer requests and complaints as part of the Company's service commitment. The Company believes that the best service commitment implementation will be able to support the Company's performance improvement targets in the future. To ensure service to customers, the Company opens a complaint service by providing telephone lines, emails, and letters to customers.

Customer complaints can be:

- Complaints with official letters sent to the Company's structural officers
- Complaints orally
- Written complaints
- Written complaints sent to the project

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

The Company's performance that continues to improve continuously is a goal that the Company wants to achieve. For this reason, the Company has and continues to make improvements and repairs in various fields, implementing a quality management system that contains product and service quality standards according to quality management policies and continuously improving the Company's performance based on continuous improvement efforts. These standards are applied to various strategies by controlling

diterapkan pada berbagai strategi dengan mengendalikan kesesuaian penggunaan sistem standar terhadap peraturan perundang-undangan, persyaratan pemangku kepentingan serta kebutuhan organisasi.

Oleh karena itu, terdapat suatu standar untuk sistem yang diterapkan oleh manajemen, semakin baik sistem yang diterapkan manajemen dalam organisasi, maka semakin mudah bagi organisasi untuk mendapatkan standar internasional bagi penerapan sistem manajemen di dalam organisasinya.

KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU

Dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi, khususnya terkait mutu pengelolaan Perusahaan yang baik, Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen mutu dalam bentuk kebijakan sebagai berikut:

1. Bekerja demi kepuasan pelanggan dengan menerapkan sistem manajemen mutu yang terus menerus diperbaiki keefektifannya demi kesinambungan yang aman, andal dan ekonomis;
2. Melaksanakan komitmen terhadap nilai-nilai *corporate value* untuk mewujudkan tercapainya kinerja dan cita-cita Perusahaan;
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan menyediakan sarana prasarana serta lingkungan kerja yang memadai;
4. Menggunakan teknologi informasi sebagai media terwujudnya *customer satisfaction*;
5. Mengkomunikasikan dan meninjau secara terus menerus kebijakan mutu agar mencapai kesetaraan pemahaman di seluruh jajaran manajemen Perseroan;
6. Melaksanakan GCG secara konsisten.

PENERAPAN AUDIT INTERNAL & EKSTERNAL

Sebagai upaya untuk memastikan penerapan sistem manajemen di seluruh lini, perseroan menerapkan audit terpadu baik secara internal

the conformity of the use of the standard system to legislation, stakeholder requirements, and organizational needs.

Therefore, there is a standard for the system applied by management, the better the system applied by management in the organization, the easier it is for the organization to obtain international standards for the management system implementation in its organization.

QUALITY MANAGEMENT POLICY

To realize organizational goals related to the quality of good management of the Company, the Company has implemented quality management principles in the form of policies as follows:

1. Working for customer satisfaction by implementing a quality management system that is continuously improved in effectiveness for safe, reliable, and economical sustainability;
2. Carry out a commitment to corporate values to realize the achievement of the Company's performance and ideals;
3. Improve the competence of human capitals and provide adequate infrastructure and work environment;
4. Using information technology as a medium for realizing customer satisfaction;
5. Communicate and continuously review quality policies to achieve equality of understanding at all levels of the Company's management;
6. Implement GCG consistently.

IMPLEMENTATION OF INTERNAL & EXTERNAL AUDIT

To ensure the implementation of management systems in all lines, the company implements integrated audits, internally and externally,



maupun eksternal, atas implementasi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

SARANA PENGADUAN DAN LAYANAN PELANGGAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan yang diberikan secara berkelanjutan, Perseroan melakukan berbagai upaya yang dapat memenuhi harapan pelanggan. Perseroan menyediakan layanan untuk memfasilitasi pelanggan dalam menyampaikan pengaduan, baik saran dan kritik yaitu di situs resmi Perusahaan, www.brantas-abipraya.co.id pada kolom KIP (Keterbukaan Informasi Publik).

Sarana komunikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelanggan untuk memperoleh informasi mengenai produk dan layanan yang ditawarkan serta sebagai sarana bagi pelanggan untuk menyampaikan keluhan terkait produk maupun pelayanan yang diberikan. Perseroan telah menetapkan standar penanganan keluhan pelanggan sehingga setiap keluhan yang masuk dapat terselesaikan dengan baik.

DAMPAK KEUANGAN

Tanggung jawab social kepada pelanggan merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dengan pemahaman tersebut, maka pada implementasi program tanggung jawab social kepada pelanggan memiliki fungsi atau peran strategis bagi Perseroan, yaitu membentuk katup pengaman social (*social security*). Selain itu melalui program tanggung jawab social kepada pelanggan perusahaan juga dapat membangun reputasi, seperti meningkatkan citra perusahaan, merek perusahaan, maupun bidang usaha perusahaan.

on the implementation of ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018, and Anti-Bribery Management System.

MEANS OF COMPLAINTS AND CUSTOMER SERVICE

To improve the quality of services provided on an ongoing basis, the Company makes various efforts that can meet customer expectations. The Company provides services to facilitate customers in submitting complaints, both suggestions and criticisms, namely on the Company's official website, www.brantas-abipraya.co.id in the KIP (Public Information Openness) column.

This means of communication can be used by customers to obtain information about the products and services offered and as a means for customers to submit complaints related to the products and services provided. The Company has set standards for handling customer complaints so that every incoming complaint can be resolved properly.

FINANCIAL IMPACT

Social responsibility to customers is the company's commitment to support the creation of sustainable development. With this understanding, social responsibility programs implementation to customers has a strategic function or role for the Company, namely forming a social security valve. In addition, through social responsibility programs to customers, the company can also build a reputation such as improving the company's image, company brand, and company business lines.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN

Corporate Social Responsibility In The Environmental Sector

Abipraya berkomitmen untuk turut berkontribusi dalam mewujudkan kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat daya dukung lingkungan dengan menaati regulasi lingkungan yang ada. Komitmen tersebut dipegang karena Perusahaan meyakini bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KEBIJAKAN MANAJEMEN

Konstruksi hijau yang lebih ramah lingkungan perlu semakin dikukuhkan karena menghadirkan sejumlah nilai tambah bagi pelaksana konstruksi yang dikerjakan Abipraya, antara lain, efisiensi penggunaan energi listrik, air, material/bahan baku, dan bahan bakar minyak (BBM). Berbagai nilai tambah itu mendorong terjadinya efisiensi atau penghematan biaya produksi pada proses konstruksi, yang bermuara pada terciptanya keuntungan yang lebih maksimal.

Abipraya is committed to contributing to realizing environmental sustainability while strengthening the carrying the environment capacity by complying with existing environmental regulations. This commitment is held because the Company believes that a good and sound environment is the human right of every Indonesian citizen, as mandated in Article 28H of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945.

MANAGEMENT POLICY

Green construction that is more environmentally friendly needs to be strengthened because it presents several added values for construction implementers carried out by Abipraya, among others, the efficient use of electrical energy, water, materials/raw materials, and fuel (BBM). These added values encourage efficiency or savings in production costs in the construction process, which leads to the maximum profit implementation.

ACUAN KEBIJAKAN

Perseroan menjalankan amanah peraturan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup serta peraturan perundangan dan kewajiban lingkungan lain yang terkait. Oleh karena itu setiap langkah operasional di lapangan senantiasa dilaksanakan dengan memperhatikan butir-butir sebagai mana tercantum dalam dokumen AMDAL, RKL, RPL, UKL dan UPL yang merupakan prasyarat sekaligus parameter yang disepakati bersama oleh semua *Stakeholder* sebelum adanya kegiatan operasional.

RISIKO DAN DAMPAK LINGKUNGAN DARI KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN

Kegiatan usaha Perseroan, baik secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitar kegiatan usaha. Hal itu, disebabkan oleh:

1. Emisi udara dan peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK)
Proses pelaksanaan proyek berpotensi menimbulkan beberapa dampak negatif pada kondisi udara, di antaranya adalah peningkatan emisi gas rumah kaca dan paparan debu pada beberapa wilayah. Dampak negatif yang berpotensi muncul pada kondisi udara selalu dipantau oleh Perseroan. Apabila aktivitas pekerjaan menunjukkan tingkat pencemaran udara yang cukup tinggi, maka Perseroan akan melakukan evaluasi dan perbaikan pada beberapa alat;
2. Pencemaran limbah B3
Aktivitas pekerjaan konstruksi juga dapat menimbulkan potensi dampak pada pencemaran limbah B3. Beberapa limbah B3 yang dapat timbul karena aktivitas pelaksanaan pekerjaan proyek adalah ceceran bahan bakar minyak bekas,

POLICY REFERENCE

The Company carries out the regulatory mandate as stated in Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and laws and other related environmental obligations. Therefore, every operational step in the field is always carried out by taking into account the items as stated in the AMDAL, RKL, RPL, UKL, and UPL documents, which are prerequisites and parameters mutually agreed upon by all Stakeholders before operational activities.

RISKS AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF THE COMPANY'S BUSINESS ACTIVITIES

The Company's business activities, either directly or indirectly, will affect the quality of the environment around the business activities. It is due to:

1. Air emissions and increased Greenhouse Gas (GHG)
The project implementation process potentially causes several negative impacts on air conditions, including increased greenhouse gas emissions and dust exposure in some areas. Negative impacts potentially to arise on air conditions are monitored by the Company. If work activities show a high level of air pollution, the Company will evaluate and improve equipment;
2. B3 waste pollution
Construction work activities can also have a potential impact on B3 waste pollution. Some B3 waste that can arise due to project work implementation activities is spilled used fuel oil, spilled waste concrete, and other B3 waste. This waste has been managed well by the

tumpahan beton sisa dan limbah B3 lainnya. Limbah tersebut telah dikelola dengan baik oleh Perseroan sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan dampak buruk pada lingkungan;

3. Pencemaran Air

Air merupakan salah satu aspek penting dalam aktivitas Perseroan sehingga kondisi air harus selalu dijaga dan dipantau. Beberapa potensi pencemaran yang mungkin muncul karena aktivitas pekerjaan proyek di antaranya adalah pencemaran karena limbah cair yang mengalir.

TARGET

Perseroan telah menetapkan target dan tujuan penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan yang mencakup beberapa hal, yakni:

- Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, persyaratan, standar dan perangkat hukum;
- Mengelola lingkungan kerja dan kesehatan pekerja secara baik guna mencapai derajat kesehatan yang tinggi;
- Menggunakan sumber daya alam berupa bahan baku, energi, air dan bahan pendukung secara bijaksana dan tidak berlebihan;
- Menyelaraskan seluruh program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs);
- Melaksanakan kerja sama dengan para *Stakeholder* (pihak yang berkepentingan) yaitu instansi pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, lembaga atau kelompok masyarakat untuk turut berkontribusi secara aktif dalam program TJSL yang berbasis pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) pada skala lokal, nasional maupun internasional;
- Meminimalisir dampak negatif dan meningkatkan dampak positif terhadap penduduk sekitar lokasi kegiatan selama kegiatan operasional.

company so that it does not cause pollution or negative impacts on the environment.

3. Water Pollution

Water is one of the important aspects of the Company's activities so the conditions must always be maintained and monitored. Some potential pollution that may arise due to project work activities includes pollution due to liquid waste flowing.

TARGET

The Company has set targets and objectives for the implementation of environmental management policies, which include several things, namely:

- Comply with all legislation, requirements, standards, and legal instruments;
- Manage the work environment and employee health properly to achieve a high degree of health;
- Use natural resources in the form of raw materials, energy, water, and supporting materials wisely and not excessively;
- Align all social and environmental responsibility (CSR) programs with sustainable development goals (SDGs);
- Carry out cooperation with stakeholders (interested parties), namely government agencies, academics, community organizations, institutions, or communities to actively contribute to environmental management and CSR programs based on community empowerment on a local, national, and international scale;
- Minimize negative impacts and increase positive impacts on residents around the activity location during operational activities

AKTIVITAS TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN YANG TERKAIT DENGAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

Program Green Office

Sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan, Abipraya menerapkan program *Green Office* yang merupakan konsep kantor yang kegiatannya dijalankan dengan cara yang ramah lingkungan. Realisasi program ini yaitu seluruh pegawai serta pihak manajemen kantor berupaya untuk menerapkan berbagai penghematan, seperti hemat kertas, hemat listrik, hemat air, serta upaya perusahaan dalam mengelola sampah.

Untuk mendukung lingkungan yang asri di area kantor, Perseroan menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) di lokasi kantor pusat dan proyek. Pengelolaan RTH dilakukan oleh Departemen *Human Capital & General Affairs*. Selain itu, dalam pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan, Perseroan bekerjasama dengan Pihak ketiga Pengelola limbah B3, sehingga tercipta lingkungan kerja yang bebas limbah. Setiap harinya petugas keamanan melaksanakan patrol untuk memastikan saluran listrik dari perangkat komputer maupun lampu kantor telah mati saat jam kerja berakhir.

Di sisi lain, gedung kantor pusat Perseroan dan proyek-proyek konstruksi yang dikerjakan juga dilengkapi dengan dokumen lingkungan berupa Upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL), Upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diverifikasi setiap tahunnya.

PENGUNAAN MATERIAL DAN ENERGI YANG RAMAH LINGKUNGAN

Material merupakan bahan-bahan/materi-materi dasar yang digunakan dalam kegiatan yang dilakukan. Untuk dapat memproses Material menjadi bahan bernilai guna, perusahaan menggunakan energi tertentu. Perusahaan memiliki kebijakan terkait penggunaan material dan energi yang efisien serta berorientasi pada dampak lingkungan.

ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES RELATED TO COMPANY OPERATIONS

Green Office Program

As a concern for the environment, Abipraya implements the Green Office program, which is an office concept whose activities are carried out in an environmentally friendly. This program realizes that all employees and management strive to implement various savings, such as paper, electricity, water, and the company's efforts in managing waste.

To support a beautiful environment in the office area, the company provides green open space (RTH) at the head office and project locations. RTH management is carried out by the Human Capital and General Affairs Department. Apart from that, in managing the B3 waste produced, the company collaborates with third party B3 waste managers, thus creating a waste-free work environment. Every day, security officers carry out patrols to ensure that the power lines from computer equipment and office lights are turned off when working hours end.

On the other hand, the company's head office building and construction projects carried out are also equipped with environmental documents in the form of environmental management efforts (UKL), environmental monitoring efforts (UPL), and environmental impact analysis (AMDAL), which are verified annually.

USE OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY MATERIALS AND ENERGY

Materials are basic used in the activities carried out. To be able to process materials into valuable, companies use energy. The Company has policies related to materials and energy use that are efficient and oriented towards environmental impact.

Agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif, perusahaan mengategorikan penggunaan material dan energi pada 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan konstruksi dan non konstruksi sebagai kegiatan utama dalam proses produksi, serta kegiatan operasional sebagai kegiatan pendukung di kantor.

Bantuan Pelestarian Alam

Dengan menanam pohon akan menambah daya ikat tanah oleh akar pohon sehingga mengurangi risiko bencana alam tanah longsor. Program ini merupakan program berkelanjutan yang akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun selanjutnya.

Pengelolaan Energi Dan Material Dalam Kegiatan Operasional

Aktivitas sosial yang dilakukan Perseroan telah terintegrasi dengan upaya pelestarian lingkungan. Perseroan berupaya mengajak masyarakat secara luas untuk senantiasa menyadari pentingnya melestarikan lingkungan hidup. Dengan begitu, Perseroan dapat menjangkau lebih luas dalam berkontribusi pada lingkungan melalui penggunaan energi yang efisien. Dalam aktivitas sehari-hari, Perseroan selalu memperhatikan lingkungan hidup. Perseroan mempunyai kebijakan dalam kegiatan operasionalnya, mulai dari proses menjalankan proyek, produk yang dihasilkan sampai dengan lingkungan operasional perusahaan. Komitmen perseroan untuk memadukan kepentingan ekonomi (*profit*), kepedulian sosial (*people*) dan partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*) dalam operasi bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan program TJSJL penghematan penggunaan energi di lingkungan kantor pusat dan proyek-proyek yang dikerjakan oleh Perseroan. Program ini bertujuan efisiensi penggunaan energi.

Bagi Perseroan program TJSJL ini memiliki arti lebih dari sekadar perwujudan tanggung jawab terhadap lingkungan Perseroan. Akan tetapi

To provide a comprehensive picture, the company categorizes materials and energy use into 2 (two) activities, namely construction and non-construction activities as the core activities in the production process and operational activities as supporting activities in the office.

Nature Conservation Assistance

Planting trees will increase the binding of the soil by tree roots to reduce the risk of landslides. This program is an ongoing program that will continue in the following years.

Energy and Material Management in Operational Activities

The social activities carried out by the company have been integrated with environmental conservation efforts. The company strives to encourage the wider community to always be aware of the importance of preserving the environment. In this way, the company can reach a wider audience by contributing to the environment through efficient energy use. In its daily activities, the company always pays attention to the environment. The company has policies in its operational activities, starting from the process of running projects and the products produced to the company's operational environment. The company's commitment to combining economic interests (*profit*), social care (*people*), and active participation in preserving the environment (*planet*) in business operations is realized in the form of developing a TJSJL program to save energy use in the head office environment and projects carried out by the company. This program aims to make efficient use of energy.

For the company, a CSR program means more than just a manifestation of responsibility for the environment. However, through this program, the



melalui program ini Perseroan yakin bahwa tujuan pengembangan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan lingkungan yang lestari akan dapat tercapai.

1. Minimalisasi penggunaan kertas dengan cara bolak-balik (*2 sides used*).
2. Penggunaan pengatur waktu (*timer*) untuk beberapa lampu penerangan yang digunakan di area kantor. Selain itu pula di area toilet sudah dipasang pendeteksi (*sensor*) untuk mengatur nyala/mati lampu dan pengatur suplai air pada wastafel

Pengelolaan Limbah

Limbah dapat dikategorikan limbah Bahan Berbahaya & Beracun (B3) dan non-B3. Perusahaan memiliki kebijakan pengelolaan limbah B3 & non-B3 dengan prosedur standar penanganan dan pengolahan limbah. Oleh karena itu, kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek perusahaan dipersyaratkan untuk mengelola material berbahaya atau tidak berbahaya sesuai Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan limbah dilakukan secara berkala dan dilaporkan secara rutin kepada manajemen dan instansi terkait.

Limbah B3 dan non-B3 yang dihasilkan di dalam kegiatan konstruksi dikelola dengan pendekatan *Reduce-Reuse-Recycle*. Perseroan melakukan pengendalian limbah tersebut secara berkelanjutan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku.

Apabila tidak dapat dimanfaatkan kembali, perusahaan bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin untuk mengangkut, mengumpulkan, dan mengolah akhir limbah B3 dan non-B3. Terhadap limbah non-B3, perusahaan melakukan pemisahan, pengomposan limbah organik, pemanfaatan daur ulang dan daur pakai.

company believes that the goal of sustainable stakeholder development and a sustainable environment will be achieved.

1. Minimize the use of paper by going back and forth (*2 sides used*)
2. The use of timers for some lighting lamps used in the office area. In addition, in the toilet area, sensors have been installed to regulate the turn on/off of the lights and regulate the water supply on the sink

Waste Management

Waste can be categorized as hazardous and toxic (B3) or non-B3 waste. The company has a B3 and non-B3 waste management policy with standard waste handling and processing procedures. Therefore, contractors working on company projects are required to manage hazardous or non-hazardous materials in accordance with the law and implement regulations. Monitoring and evaluation of waste management is carried out periodically and reported regularly to management and related agencies.

B3 and non-B3 waste generated in construction activities is managed using a reduce, reuse, and recycle approach. The company controls this waste on an ongoing basis in accordance with applicable legal procedures and regulations.

If it cannot be reused, the company cooperates with third parties who have permission to transport, collect, and treat the final B3 and non-B3 waste. For non-B3 waste, the company conducts separation, composting of organic waste, utilization of recycling, and recycling of use.

Sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, bahan-bahan kimia berbahaya yang digunakan di proyek konstruksi dikelola untuk mencegah atau mengurangi risiko pencemaran lingkungan. Perseroan dan mitra kerja mengendalikan bahan kimia berbahaya dengan penyediaan gudang penyimpanan, Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB), label, petugas bersertifikasi yang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan.

Untuk air limbah, pengelolaan dilakukan untuk memastikan kualitas air limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan. Air limbah yang dihasilkan dipantau secara berkala baik oleh internal perusahaan maupun eksternal yang bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi.

PEMANTAUAN DAMPAK LINGKUNGAN SERTA MANAJEMEN KEBISINGAN, KUALITAS UDARA, DAN KUALITAS AIR

Perseroan mewajibkan setiap mitra kerja untuk melakukan identifikasi dampak lingkungan dari setiap aktivitas yang akan dilakukan, serta merumuskan tindakan tanggap darurat dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Dampak lingkungan yang berpotensi muncul akibat aktivitas proyek antara lain, dampak kebisingan terhadap lingkungan sekitar, dampak terhadap kualitas air, pencemaran tanah dan dampak terhadap kualitas udara.

Perusahaan dan mitra kerja melakukan beberapa pencegahan dan manajemen aktivitas di lapangan yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitar:

1. Pengendalian kebisingan

Untuk mengurangi dampak kebisingan di lingkungan Perseroan dan proyek, dilakukan pengukuran tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh mesin atau pekerjaan lainnya dan hasil pengukuran dipastikan tidak melebihi Nilai Ambang Batas (NAB).

According to applicable laws and regulations, hazardous chemicals used in construction projects are managed to prevent or reduce the risk of using these chemicals in the environment. Companies and partner contractors control hazardous chemicals by providing Material Safety Data Sheets (Lembar Data Keselamatan Bahan: LKDB), labels, and certified officers who supervise management implementation.

For wastewater, management is carried out to ensure wastewater quality according to environmental quality standards. The wastewater produced is monitored regularly by internal and external companies in collaboration with accredited laboratories.

ENVIRONMENTAL IMPACT MONITORING AND NOISE, AIR QUALITY, AND WATER QUALITY MANAGEMENT

The company requires each work partner to identify the environmental impact of each activity to be carried out as well as formulate emergency response measures to overcome environmental pollution. Environmental impacts that have the potential to arise as a result of project activities include, among others, the impact of noise on the surrounding environment, the impact on water quality, soil pollution, and the impact on air quality.

The company and partners carry out several prevention and management activities in the field that can affect the surrounding environment:

1. Noise control

To reduce the impact of noise on the Company and project environment, noise levels produced by machines or other work are measured and the measurement results are ensured not to exceed the Threshold Limit Value (NAB).

2. Pengendalian kualitas udara dan air
Metode kerja direncanakan sedemikian rupa untuk mengurangi dampak kegiatan konstruksi terhadap pencemaran udara. Selain mendirikan pagar pembatas di sekeliling proyek, jaring pengaman (*safety net*) dipasang untuk mengurangi dampak pencemaran debu keluar lokasi proyek, Perseroan melakukan uji lingkungan secara berkala untuk memastikan kualitas udara dan air tidak tercemar.

Kegiatan pembersihan lokasi kerja dan pengumpulan material sisa atau limbah dilakukan di lokasi pekerjaan secara terjadwal dan teratur.

Untuk meminimalisir debu akibat pembangunan proyek maka Perseroan harus menyiapkan:

1. *Carwash*/tempat pencucian roda mobil dan truk yang akan keluar menuju jalan warga
2. Jadwal penyiraman jalan secara rutin dan berkala
3. Menyediakan tim kebersihan untuk meminimalisir keluhan dan komplain warga akibat debu yang ditimbulkan dari aktifitas mobilisasi dan demobilisasi proyek

PENGADUAN MASALAH LINGKUNGAN

Perusahaan telah menyusun mekanisme pengaduan masalah lingkungan terkait proyek pembangunan yang dilakukan perusahaan. Upaya ini dilakukan untuk mengontrol tingkat kenyamanan masyarakat sekitar akibat pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan.

DAMPAK KEUANGAN DARI TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP LINGKUNGAN

Selama tahun 2023 aktivitas dari pelaksanaan bidang lingkungan tidak menyebabkan dampak keuangan secara signifikan.

2. Air and water quality control
Work methods are planned in such a way as to reduce the impact of construction activities on air pollution. In addition to erecting a perimeter fence around the project, a safety net was installed to reduce the impact of dust pollution leaving the project site. The company carries out periodic environmental tests to ensure air and water quality is not polluted.

Work site cleaning activities and the collection of leftover or waste materials are carried out at the work site on a scheduled and regular basis.

To minimize dust due to project construction, the company must prepare:

1. *Carwash*, car and truck wheel washes that will go out to residents' roads
2. Regular and periodic road watering schedule
3. Provide a cleaning team to minimize grievances and complaints from residents due to dust caused by project mobilization and demobilization

ENVIRONMENTAL COMPLAINTS

The company has established a mechanism for complaints about environmental problems related to development projects carried out by the company. This effort is made to control the comfort level of the surrounding community due to the development carried out by the company.

THE FINANCIAL IMPACT OF SOCIAL RESPONSIBILITY ON THE ENVIRONMENT

During 2023, the activities of the implementation of the environmental sector will not cause significant financial impact.


SERTIFIKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Perseroan melaksanakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka memastikan keberlanjutan perseroan di masa yang akan datang. Perseroan telah menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML)/ISO 14001. Perseroan melakukan identifikasi terhadap semua aspek kegiatan, produk, dan jasa yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Aspek dan dampak penting diregistrasi, dinilai serta dibuatkan program Unit Kerja dan program manajemen lingkungan (PML) untuk mengendalikan dan mengurangi dampak penting terhadap lingkungan.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CERTIFICATION

The Company implements efforts to protect and manage the environment to ensure the sustainability of the company in the future. The Company has implemented an environmental management system (EMS)/ISO 14001. The Company identifies all aspects of activities, products, and services that have an important impact on the environment. Important aspects and impacts are registered and assessed, and a Work Unit program and environmental management program (PML) are created to control and reduce important impacts on the environment.





TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Social Responsibility Related to Employment, Occupational Health and Safety

Lingkungan kerja yang sehat dan aman sesuai kaidah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), baik di perkantoran maupun di proyek, merupakan salah satu fokus Abipraya. Bagi Perseroan, lingkungan kerja serupa itu akan berdampak positif terhadap terciptanya ketenangan dan kenyamanan di kalangan pegawai/pekerja sehingga mendorong peningkatan produktivitas, yang bermuara dengan meningkatnya kinerja Perseroan.

KOMITMEN PENGELOLAAN PRAKTIK K3L

Budaya K3L senantiasa dikampanyekan agar semua karyawan menjalankan pekerjaannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Melalui berbagai upaya dan sinergi tersebut, Perseroan optimistis akan mampu mewujudkan lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan tujuan akhir tidak ada kecelakaan kerja (*zero accident*), penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan.

A healthy and safe work environment according to the principles of Occupational Safety and Health (OHS), both in offices and projects, is one of Abipraya's focuses. For the Company, such a work environment will have a positive impact on the growth of tranquility and comfort among employees to encourage increased productivity, which leads to increased Company performance.

COMMITMENT TO MANAGEMENT OF OHS PRACTICES

K3L culture is always promoted so that all employees carry out their work in accordance with applicable standard operating procedures. Through these various efforts and synergies, the company is optimistic that it will be able to create a healthy and safe work environment with the ultimate goal of zero work accidents, work-related diseases, and environmental pollution.

Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut, Perseroan menerapkan kebijakan terkait aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) sebagai bagian dari Tata kelola Perusahaan yang tercantum dalam Pedoman Tata kelola Perusahaan milik Perseroan. Di samping itu, Perseroan juga menerapkan standar keselamatan kerja sebagai bagian dari budaya kerja yang diharapkan mampu menciptakan kondisi lingkungan kerja yang kondusif bagi seluruh insan Perseroan.

PEMENUHAN HAK KARYAWAN

Bidang yang membawahi SDM menjadi penanggung jawab atas pengelolaan pengembangan SDM senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas kompetensi SDM Perseroan dengan serangkaian pendidikan dan pelatihan. Bagi Direksi, Dewan Komisaris dan organ-organ pendukungnya, Perseroan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi yang diharapkan dapat menambah kemampuan manajerial.

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan menginvestasikan pengembangan kompetensi karyawan sebesar sebesar Rp4.190.411.329, naik 44% dibandingkan biaya tahun sebelumnya, yang mencapai Rp2.910.835.443.

Guna menunjang peningkatan kinerja pegawai, Perseroan memberikan tunjangan lain seperti Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan cuti, dan bantuan uang duka bila pegawai atau keluarganya mengalami musibah meninggal dunia. Bentuk kesejahteraan dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai berupa:

- Program Jaminan Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Program Pensiun;
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan;
- Perlengkapan Kerja;
- Pakaian Kerja;
- Pelayanan Medis dan BPJS Kesehatan;

As an effort to realize this, the Company implements policies related to aspects of Environment, Occupational Safety and Health (OHS) as part of Corporate Governance as stated in the Corporate Governance Guidelines. In addition, the Company also implements work safety standards as part of a work culture that is expected to create conducive working environment conditions for all personnel.

FULFILLMENT OF EMPLOYEE RIGHTS

The division in charge of HC is responsible for the management of HC development and always strives to improve the quality of the Company's HC competencies with a series of education and training. For the Board of Directors, Board of Commissioners, and supporting organs, the Company provides the widest possible opportunity to participate in various competency improvement programs that are expected to increase managerial skills.

Throughout 2023, the Company invested in employee competency development amounting to IDR 4,190,411,329, an increase of 44% compared to the previous year's costs, which reached IDR 2,910,835,443.

To support an employee performance improvement, the Company provides other benefits such as Holiday Allowance (THR), leave allowance, and funeral money assistance if employees or their families experience a death. Forms of welfare and facilities provided to employees in the form of:

- Employee Guarantee Program (BPJS Ketenagakerjaan);
- Pension Plans;
- Religious Holiday Allowance;
- Work equipment;
- Workwear;
- Medical Services and BPJS Kesehatan;

- Perlindungan dan Bantuan Hukum;
- Olahraga dan Kesenian;
- Sumbangan Sosial (Suka dan Duka);
- Makan Siang;
- Rekreasi;
- Kendaraan Untuk Eselon I;
- Transportasi Untuk Eselon II;
- Telekomunikasi Bagi Pejabat.

KESETARAAN DAN KESEMPATAN KERJA

Perseroan memberikan kesempatan yang sama dan seluas- luasnya kepada seluruh karyawan untuk mengembangkan kompetensi tanpa memandang Suku, Agama, Ras (SARA), golongan ataupun gender. Perseroan telah memiliki kebijakan terkait karyawan perempuan yang hamil, karyawan perempuan yang hamil diberikan cuti melahirkan sebanyak 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk karyawan laki-laki yang menemani istrinya melahirkan diberikan cuti khusus selama 2 (dua) hari.

Perseroan memberikan kesempatan yang sama dan setara kepada seluruh karyawan untuk mengembangkan kompetensi tanpa memandang ras, suku, golongan ataupun *gender*. Bentuk dukungan ini diwujudkan melalui penyusunan kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditetapkan oleh Perseroan untuk meningkatkan daya saing Perusahaan. Setiap karyawan yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan akan diberikan kesempatan untuk mengisi jabatan 1 (satu) level di atasnya yang mengacu pada prosedur tetap promosi. selain itu, Perseroan telah menetapkan *Key Performance Indicator* (KPI) karyawan pada semua bidang.

PAKET REMUNERASI

Besaran imbal jasa yang diberikan oleh Perseroan kepada pegawai cukup kompetitif, namun juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan. Perseroan berpartisipasi dalam survey remunerasi yang dilakukan oleh konsultan remunerasi terkemuka. Hal tersebut dilakukan

- Legal Protection and Assistance;
- Sports and the Arts;
- Social Donations (Joys and Sorrows);
- Lunch;
- Recreation;
- Vehicles for echelon I;
- Transportation for echelon II;
- Telecommunications for officials.

EQUALITY AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

The Company provides equal and widest opportunities to all employees to develop competencies regardless of Ethnicity, Religion, Race (Suku, Agama, Ras: SARA), group, or gender. The Company has a policy related to pregnant female employees, who are given maternity leave for 3 (three) months, while male employees who accompany their wives to give birth are given special leave for 2 (two) days.

The Company provides equal opportunities to all employees to develop competencies regardless of race, ethnicity, class, or gender. This form of support is realized, through the preparation of Human Capital development policies set by the Company to improve competitiveness. Every employee who meets the required criteria will be allowed to fill the position 1 (one) level above, which refers to the permanent promotion procedure. In addition, the Company has established Key Performance Indicators (KPIs) for employees in all fields.

REMUNERATION PACKAGE

The amount of compensation provided by the Company to employees is quite competitive but also adjusted to the Company's financial capabilities. The Company participates in remuneration surveys conducted by leading remuneration consultants. It is done to ensure

untuk memastikan besaran paket kesejahteraan telah bersaing dengan perusahaan sejenis. Dari hasil survei tersebut, Perseroan dapat melakukan standardisasi sistem remunerasi yang mampu mempertahankan pegawai yang potensial serta memotivasi pegawai dalam meningkatkan kompetensi dan kinerjanya, namun tetap seimbang dengan kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan.

Sistem remunerasi pegawai dilakukan dengan melakukan penyesuaian gaji pokok yang dilakukan dengan model peningkatan umum (*general increase*), kemudian dikaitkan dengan inflasi & peningkatan prestasi (*merit increase*) kinerja pegawai. Adapun komponen paket remunerasi pegawai Perseroan terdiri dari gaji pokok, intensif prestasi, serta berbagai tunjangan dan fasilitas, antara lainnya:

- Tunjangan dan fasilitas Bulanan Tunjangan transportasi/BBM, tunjangan uang makan, tunjangan uang lembur, tunjangan *license* dan *rating*, tunjangan jabatan, tunjangan telepon, dan tunjangan operasional;
- Tunjangan dan fasilitas Tahunan Bantuan sewa rumah, tunjangan cuti (cuti tahunan dan cuti panjang), tunjangan kesejahteraan keluarga, tunjangan khusus dan insentif produksi.

Selain itu, Perseroan menetapkan bonus yang didasarkan pada estimasi manajemen dan disahkan oleh rapat umum Pemegang saham (RUPS), dibukukan sebagai beban (*expense*) pada tahun berjalan.

Sistem remunerasi di PT Brantas Abipraya menggunakan grading. *Grade* terbagi menjadi dua yaitu individu dan jabatan. *Grade* individu merupakan pengelompokan kompetensi tertentu yang menggambarkan tingkat kemampuan pegawai, yang memenuhi syarat dalam mengemban suatu jabatan/keahlian dalam organisasi perusahaan. *Grade* jabatan

that the amount of the welfare package is competitive with similar companies. From the survey results, the Company can standardize the remuneration system that can retain potential employees and motivate them to improve their competence and performance while balancing with the financial conditions and capabilities.

The employee remuneration system is carried out by making basic salary adjustments carried out with a general increase model, then linked to inflation & merit increase in employee performance. The components of the Company employee remuneration package consist of basic salary, intensive achievement, as well as various benefits and facilities, including:

- Monthly allowances and facilities transportation/fuel allowances, meal allowances, overtime allowances, license and rating allowances, position allowances, telephone allowances, and operational allowances;
- Annual allowances and facilities home rental assistance, leave allowances (annual leave and sabbatical), family welfare benefits, special allowances, and production incentives.

In addition, the Company sets bonuses based on management estimates and approved by the general meeting of shareholders (GMS), recorded as an expense in the current year.

The remuneration system at PT Brantas Abipraya uses grading. The grade is divided into two, namely, individual and position. Individual grade is a grouping of competencies that describe the ability level of employees, who are qualified to carry out a position/expertise in the company organization. Position grade is a level of position classification that is arranged based on the

merupakan tingkatan/level penggolongan jabatan yang disusun berdasarkan tanggung jawab jabatan-jabatan di dalam organisasi perusahaan.

PROGRAM PEMELIHARAAN KESEHATAN

Perseroan memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan baik itu rawat jalan atau rawat inap. Ketetapan dan kebijakan untuk pegawai dan keluarganya atas jaminan kesehatan tersebut yang meliputi suami/istri dan maksimal dua anak di bawah umur 21 tahun dan belum menikah.

PROGRAM ASURANSI JIWA DAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN

Perseroan membiayai program asuransi jiwa bagi pegawai dan bekerjasama dengan beberapa Perusahaan asuransi untuk mendukung program tersebut. Perseroan juga mengikutsertakan seluruh pegawai dalam program jaminan ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan.

KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3)

Perseroan terus menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang sejalan dengan standar internasional; ISO 45001:2018. Manajemen K3 dikelola oleh Departemen QHSE. Departemen ini berfungsi merencanakan, memantau dan mengevaluasi sistem manajemen K3 dan lingkungan di Perseroan. Di samping itu Perseroan juga membentuk Tim Panitia Pembina kesehatan & keselamatan kerja (P2K3) yang melibatkan seluruh elemen pekerja, baik dari direksi maupun staff untuk membahas isu-isu K3 yang ada di perusahaan.

Untuk mengantisipasi adanya kondisi darurat, Perseroan juga membentuk tim tanggap darurat. Tim tanggap darurat ini secara berkala melakukan pelatihan dan simulasi guna meningkatkan kesiapsiagaan tim dalam penanganan keadaan darurat.

responsibilities of positions in the company organization.

HEALTH CARE PROGRAM

The Company provides health care coverage for both outpatient and inpatient care. The provisions and policies for employees and their families for health insurance include husband/wife and a maximum of two children under 21 years and unmarried.

LIFE INSURANCE PROGRAM AND EMPLOYMENT SECURITY

The Company finances employees' life insurance programs and cooperates with several insurance companies to support the program. The Company also includes all employees in the employment security program at BPJS Ketenagakerjaan.

OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH (OHS)

The Company continues to implement an occupational safety and health management system in line with international standards; ISO 45001:2018. OHS management is managed by the QHSE Department. This department functions to plan, monitor, and evaluate the OHS and environmental management systems in the Company. In addition, Abipraya also formed an Occupational Health & Safety Committee Team (P2K3), which involved all elements of employees, both directors and staff, to discuss OHS issues in the company.

To anticipate emergencies, the Company also formed an emergency response team. This team periodically conducts training and simulations to improve the team's preparedness in handling emergencies.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan terkait aspek ketenagakerjaan, dan K3L telah dilaksanakan dalam kegiatan operasi sehari-hari. Praktik ketenagakerjaan dilandasi dengan hubungan kerja yang baik antara Perseroan dengan karyawan sebagai prasyarat utama dalam mencapai visi, misi, dan tujuan Perseroan. Sementara itu, K3L merupakan hal yang wajib untuk dicapai bagi Perseroan, mengingat bisnis di sektor konstruksi yang memiliki risiko kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan yang tinggi.

PRAKTIK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Perseroan telah memiliki komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sehingga target dan rencana yang ditetapkan adalah *zero accident*.

SISTEM MANAJEMEN K3

Pelaksanaan sistem manajemen K3 di Abipraya mengacu pada standar internasional yaitu ISO 45001: 2018. Abipraya juga telah mendapatkan sertifikat penghargaan SMK3 (Sistem Manajemen K3) berdasarkan surat keputusan Menteri ketenagakerjaan No.161 tahun 2018 dengan nilai hasil pencapaian penerapan yaitu 91,56% untuk kategori lanjutan (166 kriteria). Untuk memastikan pelaksanaan K3 berjalan dengan baik, Perseroan telah memiliki Departemen QHSSE yang mengawasi kinerja *quality, health, safety, security, dan environment* di lingkungan kerja Perseroan.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Perseroan telah melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial di bidang K3 dengan dampak kuantitatif yaitu Perseroan berhasil mendapatkan penghargaan Nihil kecelakaan kerja (*zero accident*). Hal tersebut bisa tercapai karena adanya kerja sama dan dukungan dari seluruh elemen yaitu manajemen, karyawan dan *stakeholder*. Rincian kegiatan serta dampak atau pencapaian dari program K3 adalah sebagai berikut:

The company's social and environmental responsibilities related to employment aspects and K3L have been implemented in daily operational activities. Employment practices are based on a good working relationship between the company and its employees, which is the main prerequisite for achieving the company's vision, mission, and goals. Meanwhile, K3L is something that must be achieved for the company, considering that businesses in the construction sector have a high risk of work accidents and environmental pollution.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH PRACTICES

The company has a commitment to occupational safety and health so that the target and plans set are zero accidents.

OHS MANAGEMENT SYSTEM

The implementation of the OHS management system at Abipraya refers to international standards, namely ISO 45001:2018. Abipraya has also received an SMK3 award certificate (OHS Management System) based on the Decree of the Minister of Manpower No. 161 of 2018 with an implementation achievement score of 91.56% for the category advanced (166 criteria). To ensure that OHS implementation runs well, the company has a QHSSE Department that oversees quality, health, safety, security, and environmental performance in the company's work environment.

IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES

The company has carried out social responsibility activities in the field of OHS with a quantitative impact; namely, the company succeeded in getting the Zero Work Accident Award. This can be achieved because of cooperation and support from all elements, namely management, employees, and stakeholders. Details of activities, impacts, or achievements of the OHS program are as follows:

1. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
Perseroan telah membentuk Panitia Pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) sebagai wadah partisipasi karyawan dalam penerapan K3 di tempat kerja. Tugas pokok P2K3 sebagai suatu badan pembantu di tempat kerja ialah memberikan saran-saran dan pertimbangan, baik diminta maupun tidak, kepada pengusaha/pengurus tempat kerja yang bersangkutan mengenai masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Pada penerapannya, anggota P2K3 mewakili seluruh pegawai tetap dalam menyampaikan usulan, masukan, maupun kritik terkait pelaksanaan K3.
2. Sarana Keselamatan
Perseroan memastikan seluruh unit operasi memiliki sarana dan prasarana terkait aspek K3L untuk meminimalisir risiko dan mencegah terjadinya insiden akibat kegagalan operasi sesuai standar peraturan yang berlaku. Terkait keselamatan bekerja, Perseroan memastikan dengan cara memitigasi risiko melalui hirarki pengendalian bahaya yang meliputi: eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi dan APD. Setiap pekerja memiliki dan menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan, antara lain: helm keselamatan, kacamata, sarung tangan, sepatu keselamatan, *full body harness*, dan APD lain untuk pekerjaan khusus.
3. Perseroan menerapkan sistem Manajemen K3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 50/2012 dan Peraturan Menteri PUPR No. 10/2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Perseroan juga telah memiliki kebijakan internal terkait implementasi QHSSE, yaitu Kebijakan K3L dan Kebijakan Keselamatan Konstruksi. Untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta pencemaran lingkungan dengan menjalankan aktivitas sebagai berikut:
 1. Occupational Safety and Health Committee (P2K3)
The Company has formed an occupational safety and health Advisory Committee (P2K3) as a forum for employee participation in OHS implementation in the workplace. The main task of P2K3 as an auxiliary body in the workplace is to provide suggestions and considerations, whether requested or not, to the employer/workplace administrator concerned regarding occupational safety and health issues. In its implementation, P2K3 members represent all permanent employees in submitting proposals, inputs, and criticisms related to the implementation of OHS.
 2. Safety Facilities
The company ensures that all operating units have facilities and infrastructure related to K3L aspects to minimize risks and prevent incidents resulting from operational failures in accordance with applicable regulatory standards. Regarding work safety, the company ensures that it mitigates risks through a hierarchy of hazard control, which includes elimination, substitution, technical engineering, administration, and PPE. Each worker has and uses personal protective equipment (PPE) that is appropriate to the type of work carried out, including a safety helmet, glasses, gloves, safety shoes, a full body harness, and other PPE for special work.
 3. The company implements an OHS management system in accordance with Government Regulation (PP) No. 50/2012 and PUPR Ministerial Regulation No. 10/2021 concerning Construction Safety Management Systems (SMKK). The company also has internal policies related to QHSSE implementation, namely the K3L Policy and Construction Safety Policy. To prevent accidents and occupational diseases, as well as environmental pollution, by carrying out the following activities:

- Membudayakan QHSSE kepada para pegawai dengan melaksanakan toolboxmeeting setiap harinya sebelum memulai pekerjaan;
- Melaksanakan *safety day* pada hari Rabu setiap minggunya;
- Melaksanakan *safety* patrol mingguan yang dipimpin oleh *Project Manager*;
- Pemenuhan struktur organisasi K3L di Kantor Pusat dan proyek;
- Melaksanakan Management Walkthrough (MWT) secara berkala yang terdiri dari jajaran Direksi dan BOD-1.
- Pemberian pelatihan K3L kepada Pekerja guna meningkatkan kompetensi, baik pelatihan internal, maupun eksternal;
- Menyediakan biaya K3L pada anggaran proyek.

- Cultivating QHSSE to employees by conducting toolbox meetings every day before starting work;
- Implement *safety day* on Wednesday every week;
- Implement weekly safety patrols led by Project Managers;
- Fulfillment of the OHS organizational structure at the Head Office and projects;
- Implement Management Walkthrough (MWT) periodically consisting of the Board of Directors and BOD-1.
- Provision of construction OHS training to employees to improve competence, both internal and external training;
- Determination of OHS costing in the project budget.

CAPAIAN KINERJA K3L

Berbagai upaya peningkatan kinerja aspek K3L terus dilakukan selama tahun 2023. Selama tahun 2023 tidak terjadi kasus yang mengakibatkan kematian, kehilangan waktu kerja (*lost time injury*), pembatasan kerja dan kasus yang memerlukan penanganan medis dan kasus yang menyebabkan kehilangan waktu kerja. Berikut ini statistik kecelakaan kerja selama 3 (tiga) tahun terakhir, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Kejadian Kecelakaan Kerja

Number of Work Accidents

Kategori Category	2023	2022	2021
Sementara Tidak Mampu Bekerja (SMTB) Temporary Unable to Work (Sementara Tidak Mampu Bekerja: SMTB)	0	0	0
Permanen Sebagai Partial Permanent as Partial	0	0	0
Cacat Permanen Permanent Disability	0	0	0
Fatal/Meninggal Fatal/Died	0	0	0

Keterangan:

- Non Lost Time Injury* (NLTi): kecelakaan yang tidak menyebabkan kehilangan hari kerja, pekerja yang mengalami kecelakaan (P3K) dapat langsung kembali bekerja pada hari itu juga;
- Kecelakaan ringan: kecelakaan yang mengakibatkan pekerja kehilangan 1 hari kerja;
- Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB): kecelakaan yang mengakibatkan pekerja kehilangan 2 sampai 35 hari kerja;

Description:

- Non-Lost Time Injury (NLTi): accidents that do not cause loss of working days, employees who have accidents (P3K) can immediately return to work on the same day;
- Minor accidents: accidents that result in employees losing 1 working day;
- Temporarily Unable to Work (STMB): accidents that result in employees losing 2 to 35 working days;

- Kecelakaan Berat: kecelakaan yang menyebabkan pekerja kehilangan hari kerja lebih dari 35 hari kerja atau pekerja mengalami cacat tetap;
- Fatal/Meninggal: kecelakaan yang menyebabkan pekerja meninggal dunia atau setara dengan kehilangan 6.000 hari kerja.
- Severe Accidents: accidents that cause employees to lose more than 35 working days or employees experience permanent disability;
- Fatal/Died: an accident that causes the employee to die or the equivalent of losing 6,000 days of work.

Severity Rate, Frequency Rate dan Jumlah Jam Kerja

Severity Rate, Frequency Rate, and Total Working Hours

Uraian Description	2023	2022	2021
Severity Rate Severity Rate	0	0	0.74
Frequency Rate Frequency Rate	0	0	0.09
Loss Time Injury (LTI) Loss Time Injury (LTI)	0	0	1
Jumlah Jam Kerja Total Working Hours	73.522.736 jam/ Hours	26.523.273 jam/ Hours	10.742.698 jam/ Hours

TURNOVER KARYAWAN

Rasio *employee turnover* dapat menunjukkan produktivitas dan loyalitas SDM. Selain itu, tingkat *turnover* karyawan juga merupakan refleksi dari budaya dan sistem kerja Perseroan yang dapat menjadi indikator bagi keberhasilan Perseroan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Sepanjang tahun 2023, jumlah karyawan yang keluar dari Perseroan ialah sebanyak 53 orang, menurun dibandingkan tahun 2022 dengan jumlah 72 orang yang keluar dari Perseroan. Sementara jumlah keseluruhan rekrutmen di sepanjang tahun 2023 sebanyak 80 orang meningkat dibandingkan tahun 2022 dengan jumlah rekrutmen sebanyak 39 orang.

EMPLOYEE TURNOVER

The employee turnover ratio can show HC productivity and loyalty. In addition, the employee turnover rate is the Company's culture and work system reflection, which can be the Company's success indicator in creating a conducive work environment. Throughout 2023, the number of employees leaving the Company is 53, a decrease compared to 2022, with 72 leaving the Company. Meanwhile, the total number of recruits throughout 2023 is 80 increased compared to 2022, with the number of recruits as many as 39 person.

No	Alasan Keluar Reason for Leaving	Jumlah Total
1	Pensiun Retire	19
2	Mengundurkan Diri-Peluang Lebih Baik Resignation-Better Opportunities	22
3	Indisipliner Indiscipline	2
4	Selesai kontrak Contract Completion	10
	Total Total	53

MEKANISME PENGADUAN MASALAH KETENAGAKERJAAN

Masalah pengaduan ketenagakerjaan di Perseroan dilakukan melalui beberapa tahap, yakni dwipartit, tripartit dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Tahap dwipartit terjadi di mana penanganan masalah dilakukan antara Perusahaan yang diwakili oleh manajemen dengan karyawan. Pada tahap ini, Perusahaan berhak mengeluarkan surat Peringatan (1 hingga 3) bila masalah yang dihadapi berupa pelanggaran seperti yang tercantum di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Jika pada tahap pertama belum ditemukan jalan keluar dari masalah, maka akan masuk ke tahap kedua.

Tahap kedua dilakukan secara tripartit yang melibatkan Dinas Tenaga kerja sebagai mediator dalam menangani masalah industrial antara karyawan dengan Perusahaan. Jika permasalahan pada tahap ini masih belum bisa diselesaikan, maka penanganan masalah ketenagakerjaan akan dilimpahkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat adanya pengaduan ketenagakerjaan yang dilimpahkan ke tripartit dan PHI.

BIAYA

Biaya rutin keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi pencegahan kecelakaan, pencegahan kebakaran, *emergency response plan* dan pemenuhan kelengkapan lainnya yang sesuai Sistem Manajemen K3L pada 2023 adalah Rp27.607.027.341

EMPLOYMENT GRIEVANCE MECHANISM

Employment grievance issues in the Company are carried out through several stages, namely bipartite, tripartite, and Industrial Relations Court (Pengadilan Hubungan Industrial: PHI). The bipartite stage occurs when the problem is handled between the Company, represented by management, and the employee. At this stage, the Company has the right to issue a Warning letter (1 to 3) if the problem encountered is a violation as stated in the Collective Labor Agreement (PKB). If the first stage has not found a way out of the problem, it will enter the second stage.

The second stage is carried out in a tripartite manner, involving the Manpower Office as a mediator in handling industrial problems between employees and the Company. If the problem at this stage still cannot be resolved, then the handling of employment issues will be delegated to the Industrial Relations Court (PHI). Throughout 2023, there are no labor complaints that are delegated to tripartite and PHI.

COST

The routine cost of occupational safety and health, which includes accident prevention, fire prevention, emergency response plan, and fulfillment of other completeness according to the OHS Management System in 2023, is IDR27.607.027.341



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility Related to Social and Community Development

Program TJSL BUMN bertujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan, serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi Perseroan. Selain itu juga berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah, dan terukur dampaknya serta akuntabel.

LANDASAN PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Sesuai dengan regulasi terbaru, yaitu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-01/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. BUMN menerapkan program TJSL melalui Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan Program TJSL Non PUMK.

The SOE CSR program aims to provide benefits for economic development, social development, environmental development, as well as legal and governance development for the company. In addition, it also contributes to the creation of added value for the company with principles that are integrated, directed, and measurable in impact and accountability.

BASIS FOR IMPLEMENTING SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

In accordance with the latest regulations, namely Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-01/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises, BUMN implements the CSR program through the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) and the Non-PUMK TJSL Program.

Pelaksanaan Program TJSL BUMN berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta berpedoman kepada ISO 26000 sebagai panduan pelaksanaan program, dengan harapan pelaksanaan Program TJSL BUMN yang lebih terukur, berdampak dan berkelanjutan. Adapun program TJSL BUMN bertujuan untuk:

1. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan;
2. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel;
3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

Perseroan telah merancang strategi keberlanjutan yang komprehensif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, melalui penerapan program TJSL yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis Perseroan. Perseroan senantiasa menyusun dan mengimplementasikan program-program TJSL yang mampu membawa manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Untuk mencapai tujuan penerapan TJSL yang efektif berlandaskan pada aspek SDGs, Perseroan telah memfokuskan program-program TJSL berlandaskan empat pilar yang menjadi target dan tujuan pelaksanaan TJSL, yaitu Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan, serta Pilar Hukum & Tata Kelola.

Pilar Sosial

TPB 2 : Tanpa Kelaparan

TPB 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera

TPB 4 : Pendidikan Berkualitas

The implementation of the SOE CSR Program is oriented towards achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) and is guided by ISO 26000 as a guide to program implementation, with the hope that the implementation of the SOE CSR Program will be more measurable, impactful, and sustainable. The SOE CSR program aims to:

1. Provide benefits for economic development, social development, environmental development, and legal and governance development for the company;
2. Contributing to the creation of added value for the company with principles that are integrated, directed and measurable in impact and accountable;
3. Fostering micro and small businesses to be more resilient and independent, and the communities around the company.

The Company has designed a comprehensive sustainability strategy to support the achievement of sustainable development goals, through the implementation of CSR programs that are more integrated, targeted, measurable impact, and accountable and are part of Abipraya's business approach. Abipraya always prepares and implements CSR programs that can bring optimal benefits to all stakeholders to achieve the goal of effective implementation of CDR based on aspects of SDGs, Abipraya has focused CSR programs based on four pillars, which are the targets and objectives of CSR implementation, namely the Social Pillar, the Economic Pillar, the Environmental Pillar, and the Legal & Governance Pillar.

Social Pillar

SDG 2 : No Hunger

SDG 3 : Healthy and Prosperous Life

SDG 4 : Quality Education

Pilar Ekonomi

TPB 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Economic Pillar

SDG 8 : Decent Work and Economic Growth

Pilar Lingkungan

TPB 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak
TPB 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
TPB 14 : Ekosistem Lautan
TPB 15 : Ekosistem Daratan

Environmental Pillar

SDG 6 : Clean Water and Adequate Sanitation
SDG 11 : Sustainable Cities and Settlements
SDG 14 : Ocean Ecosystems
SDG 15 : Land Ecosystems

Pilar Hukum dan Tata Kelola

TPB 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Legal and Governance Pillar

SDG 16 : Peace, Justice, and Resilient Institutions

Total realisasi tahun 2023 adalah sebesar Rp6.608.484.971,- atau sebesar 105,74% dari RKA TPB tahun 2023 sebesar Rp6.250.000.000,-.

The total realization of 2023, was IDR6,608,484,971 or 105.74% of the RKA TPB Year 2023 of IDR6,250,000,000.

No	Jenis Type	RKA 2023 RKA 2023	Realisasi 2023 Realization 2023	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
A	PILAR SOSIAL SOCIAL PILLAR	3.558.376.569	3.759.974.644	105,6
1	TPB/ SDG 2	1.452.573.450	1.681.070.500	115,7
2	TPB/ SDG 3	700.000.000	675.000.000	96,4
3	TPB/ SDG 4	1.405.803.119	1.403.904.144	99,8
B	PILAR EKONOMI ECONOMIC PILLAR	1.848.630.930	1.848.535.327	99,9
1	TPB/ SDG 8	1.848.630.930	1.848.535.327	99,9
C	PILAR LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL PILLAR	792.992.501	949.975.000	119,7
1	TPB/ SDG 6	100.000.000	100.000.000	100
2	TPB/ SDG 11	262.992.501	359.975.000	136,8
3	TPB/ SDG 14	60.000.000	60.000.000	100
4	TPB/ SDG 15	370.000.000	430.000.000	116,2
D	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA LEGAL AND GOVERNANCE PILLAR	50.000.000	50.000.000	100
1	TPB/ SDG 16	50.000.000	50.000.000	100
	TOTAL	6.250.000.000	6.608.484.971	105,7

Berikut penjabaran realisasi setiap pilar pelaksanaan TJSL Abipraya :

The following is a description of the realization of each pillar of Abipraya's CSR implementation:

Pilar Sosial

Social Pillar

No	Lingkup ISO 26000 ISO 26000 Scope	Nama Program Program Name	No TPB SDG No	Realisasi Realization
1	Pelibatan dan Pengembangan Komunitas Community Engagement and Development	Abipraya Peduli Pangan: Pembagian Sembako Gratis Abipraya Peduli Pangan: Free Food Distribution	2	1.681.070.500
2	Pelibatan dan Pengembangan Komunitas Community Engagement and Development	Abipraya Sehat: Bantuan Pandemi, Donor Darah, Pengobatan Gratis, dll Abipraya Sehat: Pandemic Relief, Blood Donation, Free Medicine, etc.	3	675.000.000
3	Pelibatan dan Pengembangan Komunitas Community Engagement and Development	Abipraya Pintar: Beasiswa Anak Asuh Abipraya Pintar: Foster Child Scholarship	4	1.403.904.144
Sub Total				3.759.974.644

Pilar Ekonomi

Economic Pillar

No	Lingkup ISO 26000 ISO 26000 Scope	Nama Program Program Name	No TPB SDG No	Realisasi Realization
1	Pelibatan dan Pengembangan Komunitas Community Engagement and Development	Abipraya Peduli UMKM: Pendanaan/ Pembiayaan UMKM (Program Kemitraan) Abipraya Peduli UMKM: MSME Funding/ Financing (Partnership Program)	8	1.848.535.327
Sub Total				1.848.535.327

Pilar Lingkungan

Environmental Pillar

No	Lingkup ISO 26000 ISO 26000 Scope	Nama Program Program Name	No TPB SDG No	Realisasi Realization
1	Lingkungan Hidup Environment	Abipraya Peduli Lingkungan: Sarana Air Bersih (Kolaborasi BUMN) Abipraya Peduli Lingkungan: Clean Water Facilities (SOE Collaboration)	6	100.000.000
2	Lingkungan Hidup Environment	Abipraya Peduli Lingkungan: Bantuan Sarana Ibadah & Sarana Umum Abipraya Peduli Lingkungan: Assistance for Worship Facilities & Public Facilities	11	359.975.000
3	Lingkungan Hidup Environment	Abipraya Peduli Lingkungan: Bibit Ikan Abipraya Peduli Lingkungan: Fish Seeds	14	60.000.000
4	Lingkungan Hidup Environment	Abipraya Peduli Lingkungan: Tanam Pohon PLTM Abipraya Peduli Lingkungan: PLTM Tree Planting	15	430.000.000
Sub Total				949.975.000

Pilar Hukum dan Tata Kelola

Legal and Governance Pillar

No	Lingkup ISO 26000 ISO 26000 Scope	Nama Program Program Name	No TPB SDG No	Realisasi Realization
1	Tata Kelola Organisasi Organizational Governance	Abipraya Patuh: Assesment GCG 2023 Abipraya Patuh: GCG Assessment 2023	16	50.000.000
Sub Total				50.000.000

**REALISASI TJSL SESUAI 3 (TIGA)
BIDANG PRIORITAS**

Realisasi Target Kinerja Program TJSL BUMN sesuai dengan Surat Menteri BUMN Nomor S-683-MBU/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan RKAP Tahun 2023 dan surat Deputy Bidang SDM, Teknologi dan Informasi atas nama Menteri BUMN Nomor S-125/DSI.MBU/11/2022 tanggal 15 November 2022 hal Key Performance Indicator Program TJSL BUMN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**REALIZATION OF CSR ACCORDING TO
3 (THREE) PRIORITY**

The realization of the SOE's CSR Program Performance Target is in accordance with the Letter of the Minister of SOE's Number S-683-MBU/10/2022 dated October 24, 2022, concerning the Aspirations of Shareholders and Capital Owners for Preparing the 2023 RKAP, and the letter from the Deputy for Human Capital, Technology, and Information on behalf of the Minister of SOE Number S-125/DSI.MBU/11/2022 dated November 15, 2022, regarding the Key Performance Indicator for the 2023 SOE's CSR Program is as follows:

Program TJSL BUMN yang sejalan dengan Program Prioritas di Bidang Pendidikan

SOE CSR Programs that are in line with Priority Programs in the Education Sector

No	Program di Bidang Pengembangan UMK Program in MSE Development	Dampak Program Program Impact	Rp/IDR
1	Abipraya Pintar: Beasiswa Anak Asuh Abipraya Pintar: Foster Child Scholarship	Meningkatkan angka kelulusan Pendidikan pada jenjang SD, SMP dan SMA bagi keluarga kurang mampu Increase the graduation rate of elementary, junior, and senior high school education for underprivileged families	462.500.000
2	Abipraya Pintar: Pelatihan dan Sertifikasi Keterampilan Kerja (SKT) dan K3 Abipraya Pintar: Training and Certification of Occupational Skills (SKT) and OHS	Memberikan manfaat bagi Perusahaan dan tenaga kerja sehingga dapat berdaya saing tinggi karena memiliki tenaga kerja yang telah tersertifikasi Provide benefits for the Company and its workforce so that they can be highly competitive because they have a certified workforce.	339.699.999
3	Program Kolaborasi Dukungan Pendidikan: Sinergi dengan Yayasan BUMN Education Support Collaboration Program: Synergy with SOE Foundation		350.000.000

Program TJSL BUMN yang sejalan dengan Program Prioritas di Bidang Lingkungan

SOE CSR Programs that are in line with Priority Programs in the Environmental Sector

No	Program di Bidang Pengembangan UMK Program in MSE Development	Dampak Program Program Impact	Rp/IDR
1	Abipraya Peduli Lingkungan: Penghijauan di PLTM Abipraya Peduli Lingkungan: Greening at PLTM	Mencegah tanah longsor dan erosi dilingkungan Proyek PLTM Prevent landslides and erosion in the PLTM Project area	225.000.000

Program TJSL BUMN yang sejalan dengan Program Prioritas di Bidang Lingkungan

SOE CSR Programs that are in line with Priority Programs in the Environmental Sector

No	Program di Bidang Pengembangan UMK Program in MSE Development	Dampak Program Program Impact	Rp/IDR
2	Abipraya Peduli Lingkungan: Sarana Air Bersih Abipraya Peduli Lingkungan: Clean Water Facilities	Memberikan kemudahan mengakses air bersih untuk masyarakat sekitar Desa Batu Teritip-Dumai-Riau Provide easy access to clean water for the community around Batu Teritip Village-Dumai-Riau	100.000.000
3	Abipraya Peduli Lingkungan: Penebaran Bibit Ikan Abipraya Peduli Lingkungan: Fish Seed Stocking	Menjaga ekosistem dan berkontribusi Maintain ecosystem and contribute	60.000.000

Program TJSL BUMN yang sejalan dengan Program Prioritas di Bidang Pengembangan UMK

SOE CSR programs that are in line with the Priority Program for MSE Development

No	Program di Bidang Pengembangan UMK Program in MSE Development	Dampak Program Program Impact	Rp/IDR
1	Pelatihan Pemasaran Produk UMK MSE Product Marketing Training	Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Improve community welfare, encourage accelerated economic growth	38.316.327
2	Pelatihan Manajemen Keuangan Financial Management Training	Memberikan pengetahuan dan keterampilan UMK dalam pengembangan usaha melalui pelatihan, bimbingan dalam meningkatkan Manajemen Keuangan Providing knowledge and skills of MSEs in business development through training, guidance in improving Financial Management	30.219.000
3	Pengadaan Peralatan Usaha Procurement of business equipment	Meningkatkan UMK dan mendorong tumbuhnya UMK dan untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan usahanya sehingga nantinya mampu membangun lapangan pekerjaan bagi orang-orang sekitarnya Increase MSEs and encourage the growth of MSEs and to increase production and develop their business so that later they are able to build jobs for surrounding people	30.000.000

PROGRAM CREATING SHARE VALUE

Perseroan melihat TJSL sebagai upaya untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan di sekitar daerah operasional Perusahaan serta bekerja sama dengan Pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Program TJSL yang dijalankan Perseroan diharapkan dapat meningkatkan penciptaan nilai bersama yang berkelanjutan sehingga berdampak tidak hanya pada peningkatan kinerja ekonomi bagi Perusahaan, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan dan tentunya bagi masyarakat sosial.

CREATING SHARE VALUE PROGRAM

Abipraya sees CSR as an effort to create and maintain harmonious relations with the environment around the Company's operational areas and work with the Government and related parties to provide benefits to the community. The CSR program run by Abipraya is expected to increase the creation of sustainable shared value so that it has an impact not only on improving economic performance for the Company but also has a positive impact on the environment and the social community.

Sepanjang tahun 2023, Abipraya telah mengembangkan beberapa program TJSL menjadi program *Creating Share Value*, diantaranya sebagai berikut:

Throughout 2023, Abipraya has developed several CSR programs into *Creating Share Value* programs, including the following:

No	Program Program	Dampak Program Program Impact	Rp/IDR
1	Abipraya Pintar: Sertifikasi dan Pelatihan Keterampilan (SKT) Pekerja dan K3 Abipraya Pintar: Employee Certification and Skills Training (SKT) and OHS	Pekerja di proyek memiliki sertifikasi di bidangnya Employees in the project have certification in their field	339.699.999
2	Abipraya Pintar: Sertifikasi dan Pelatihan Manajemen SDM Abipraya Pintar: HC Management Certification and Training	Meningkatkan Keterampilan khususnya di bidang Manajemen SDM yang bersertifikat Improve Skills especially in the field of certified HC Management	117.307.500

PROGRAM PENDANAAN UMK

Perwujudan kontribusi Perseroan dalam mendukung pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan juga diimplementasikan melalui Program Pendanaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK). Program PUMK merupakan bentuk dari kegiatan TJSL yang lebih mengarah kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dengan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil yang dibentuk bersama masyarakat. Pelaksanaan program PUMK ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses permodalan bagi usaha mikro dan usaha kecil sekaligus melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kemampuan UMK agar lebih tangguh dan mandiri.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-01/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan sesuai surat dari Kementerian BUMN Nomor: S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 perihal: Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja Sama Program PUMK").

MSE FUNDING PROGRAM

The realization of the Company contribution in supporting the government in sustainable development is also implemented through the Funding Program for Micro and Small Enterprises (PUMK). The PUMK program is a form of CSR activities that are more directed towards improving the quality of life of the surrounding community by fostering micro and small businesses formed within the community. The implementation of the PUMK program aims to provide easy access to capital for micro and small businesses, as well as to guide to improvement of the ability of MSEs to be more resilient and independent.

Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-01/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises and in accordance with the letter from the Ministry of SOE Number: S-721/MBU/11/2022 dated November 10, 2022 regarding: Micro and Small Business Funding Program Cooperation ("PUMK Program Cooperation").

Sumber Dana Program Pendanaan UMK Perseroan tahun 2023 terdiri dari:

The source of funds for the Company MSE Funding Program in 2023 consists of:

Uraian Description	RKA 2023	Realisasi 2023 Realization 2023	%
Dana Tersedia: Funds Available:			
Saldo Awal Beginning balance	24.452.056	20.034.653	81,93
Tambahan dana dari BUMN Pembina Additional funding from BUMN Pembina	-	-	-
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan Repayment of Fostered Partner Loans	1.700.000.000	1.707.738.246	100,46
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Loan Administration Services Income	51.000.000	40.918.483	80,23
Pendapatan Lain Other Income	1.000.000	5.798.936	579,89
Pengeluaran Lain Other Expenses	-	-	-
SubTotal Dana Tersedia SubTotal Available Funds	1.776.452.056	1.774.490.318	99,89
Penyaluran Dana: Fund Distribution:			
Penyaluran Pinjaman kepada Mitra Binaan Distribution of Loans to Foster Partners	-	-	-
Penyaluran Pinjaman melalui BUMN/Lembaga Penyalur Lain Loan distribution through BUMN/Other Channeling Institutions	-	-	-
Kerjasama Program PUMK dengan BRI PUMK Program collaboration with BRI	1.750.000.000	1.750.000.000	100,00
SubTotal Penyaluran Dana SubTotal Fund Distribution	1.750.000.000	1.750.000.000	100,00
Saldo Akhir per 31 Desember Ending balance as of December 31	26.452.056	24.490.318	92,58

Sampai dengan 31 Desember 2023, Total pengembalian pinjaman yang diterima sebesar Rp1.707.738.246,- atau sebesar 100,46% dari total penerimaan RKA 2023 sebesar Rp1.700.000.000,-

As of December 31, 2023, the total loan repayment received was IDR1,707,738,246 or 100.46% of the total 2023 RKA revenue of IDR1,700,000,000.

Penyaluran PUMK melalui Kerjasama dengan BRI disalurkan pada tahun 2023 sebesar Rp1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

The distribution of PUMK through cooperation with BRI will be channeled in 2023, amounting to IDR1,750,000,000, - (one billion seven hundred fifty million rupiah).

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT/
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

**No. 00117/2.1000/AU.1/03/0912-1/1/III/2024
Tanggal 25 Maret 2024**

Spirit for Giving the Best

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

	<u>Halaman/ Page</u>	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		<i>DIRECTOR'S STATEMENT LETTER</i>
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	1	<i>INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT</i>
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut		<i>CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2023 and for the year then ended</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	7	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	8	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	9	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	10	<i>Consolidated Notes to Financial Statements</i>



Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA

Jl. Di. Panjaitan Kav.14, Jakarta 13340 Telp. (021) 8516290, Fax. (021) 8516095
Website: www.brantas-abipraya.co.id, Email: brap@brantas-abipraya.co.id

Certified :
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018
ISO 37001 : 2016

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
("Grup")**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARY
(the "Group")**

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

For and on behalf of Board of Director, We, the undersigned:

Nama	:	Sugeng Rochadi	:	Name
Alamat Kantor	:	Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14 Jakarta	:	Office Address
Alamat Domisili	:	Jl. Bendungan Senguruh 22 RT 003 RW 007 Sumpersari	:	Domicile Address
	:	Lowokwaru Malang Jawa Timur	:	
Nomor Telepon	:	021 8516290	:	Phone Number
Jabatan	:	Direktur Utama / President Director	:	Position

Nama	:	Suradi	:	Name
Alamat Kantor	:	Jl. D.I Panjaitan Kav. 14 Jakarta	:	Office Address
Alamat Domisili	:	Perum Tytyan Kencana Blok P No 12 RT 004 RW 004	:	Domicile Address
	:	Marga Mulya Bekasi Utara Jawa Barat	:	
Nomor Telepon	:	021 8516290	:	Phone Number
Jabatan	:	Direktur keuangan dan Manajemen Risiko / Finance and Risk Management Director	:	Position

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup;
1. *We are responsible for the preparation and presentation of the Group's consolidated financial statements;*
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
2. *The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
3. a. *All information contained in the Group's consolidated financial statements is complete and correct;*
b. *The Group's consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts; and*
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Grup.
4. *We are responsible for the Group's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The Statement letter is made truthfully.

Jakarta, 25 Maret 2024/ March 25, 2024

Direktur Utama/
President Director

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/
Finance and Risk Management Director

Sugeng Rochadi

Suradi



No. 00117/2.1000/AU.1/03/0912-1/1/III/2024

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Brantas Abipraya (Persero) ("Perusahaan") dan Entitas Anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal-hal lain

Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 9 Maret 2023.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor.

No. 00117/2.1000/AU.1/03/0912-1/1/III/2024

Independent Auditor's Report

The Stockholders, Board of Commissioners and Directors

PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Brantas Abipraya (Persero) ("the Company") and its Subsidiary ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other matters

The Group's consolidated financial statements dated 31 December 2022 and for the year then ended were audited by another independent auditor who expressed an unmodified opinion on the financial statements on March 9, 2023.

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

No. 00117/2.1000/AU.1/03/0912-1/1/III/2024

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apa pun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

No. 00117/2.1000/AU.1/03/0912-1/1/III/2024

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditors Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.

No. 00117/2.1000/AU.1/03/0912-1/1/III/2024

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

No. 00117/2.1000/AU.1/03/0912-1/1/III/2024

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

No. 00117/2.1000/AU.1/03/0912-1/1/III/2024

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

No. 00117/2.1000/AU.1/03/0912-1/1/III/2024

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN



00117

**Bambang Karunawan, CPA.
Register Akuntan Publik/ Register of Public Accountant No. AP.0912**

25 Maret 2024/ March 25, 2024

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2023
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

ASET	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	5	1.512.017.389.902	1.476.793.407.269	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - bersih				Account receivables - net
Pihak berelasi	6a	1.209.733.329.375	574.752.418.589	Related parties
Pihak ketiga	6a	240.844.017.112	330.388.270.807	Third parties
Piutang retensi - bersih				Retention recivables - net
Pihak berelasi	7	251.424.097.675	138.792.417.083	Related parties
Pihak ketiga	7	33.455.092.013	45.154.174.807	Third parties
Tagihan bruto kepada pemberi kerja - bersih				Gross Amount due from customers - net
Pihak berelasi	8	321.563.045.906	757.933.486.559	Related parties
Pihak ketiga	8	189.194.117.139	170.866.461.950	Third parties
Pekerjaan dalam proses	8	32.247.235.198	65.020.620.444	Work in process
Piutang lain-lain - bersih				Other receivable - net
Pihak berelasi	9	13.807.242.463	2.027.566.728	Related parties
Pihak ketiga	9	24.121.610.509	14.087.643.568	Third parties
Piutang sewa pembiayaan - bagian jatuh tempo dalam satu tahun - bersih	10	13.491.432.719	11.546.018.999	Finance lease receivables - current maturities - net
Aset keuangan konsesi - bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	11	13.455.198.333	23.247.365.762	Concession financial assets - current maturities
Persediaan	12	253.906.587.728	162.220.532.506	Inventories
Uang muka dari pihak ketiga	13	134.247.744.841	420.647.732.941	Advances from third parties
Pajak dibayar dimuka	14	288.103.559.067	187.302.675.093	Prepaid taxes
Beban dibayar dimuka	15	199.688.795.965	181.084.034.869	Prepaid expenses
Jaminan	16	-	70.300.000	Guarantee
Aset real estate - bagian lancar	17	417.882.538.421	398.633.707.024	Real estate assets - current portion
Jumlah Aset Lancar		5.149.183.034.366	4.960.568.834.998	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Piutang usaha - jangka panjang	6b	368.011.524.986	3.190.624.423	Account receivables - long term
Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun - bersih	10	203.221.905.868	212.624.947.120	Finance lease receivable net off current maturities - net
Aset keuangan konsesi - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	11	831.691.244.211	839.953.177.668	Finance assets from Concession project - net off current maturities
Kas yang dibatasi penggunaannya		11.772.806.298	11.772.299.621	Restricted cash
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	18	974.283.536.954	357.599.802.346	Investments in associates and joint ventures
Investasi jangka panjang lainnya	19	36.570.000.000	17.613.000.000	Other longterm investment
Aset pajak tangguhan	25c	905.124.004	675.433.448	Deferred tax assets
Aset tetap - bersih	20	1.566.752.226.906	1.440.630.510.030	Property, plant and equipment - net
Aset real estate - bagian tidak lancar	17	13.601.488.094	13.601.488.094	Real estate assets - non current portion
Aset tidak berwujud - bersih	21	4.514.536.480	5.374.281.963	Intangible assets - net
Uang muka proyek IPP	22	118.164.770.896	109.341.245.443	Advances of IPP Project
Jumlah Aset Tidak Lancar		4.129.489.164.697	3.012.376.810.156	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET		9.278.672.199.063	7.972.945.645.154	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2023
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha				Account payables
Pihak berelasi	23	465.462.509.293	545.958.220.662	Related parties
Pihak ketiga	23	2.727.079.587.426	2.198.046.541.388	Third parties
Utang lain-lain				Other payables
Pihak berelasi	24	11.038.447.871	10.494.552.280	Related parties
Pihak ketiga	24	491.606.876	1.300.003.393	Third parties
Utang pajak	25a	157.129.060.194	175.743.330.355	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	26	915.190.278.480	414.416.904.887	Accrued expense
Uang muka pemberi kerja dan konsumen	27	524.117.939.309	261.823.320.306	Advance from project owners and costumers
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:				Long-term liabilities current maturities:
Utang bank	28	17.654.219.623	25.756.029.953	Bank loans
Utang lembaga keuangan non bank	29	210.579.804.391	68.684.414.706	Loan from non bank financial institution
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		5.028.743.453.463	3.702.223.317.930	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Utang usaha - jangka panjang	23	598.333.764.754	445.434.145.274	Account payables - long term
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun :				Long term liabilities - net of current maturities:
Utang bank	28	939.932.166.480	1.207.586.486.105	Bank loans
Utang lembaga keuangan non bank	29	359.071.852.079	508.795.194.284	Loan from non bank financial instution
Uang muka pemberi kerja dan konsumen	27	182.196.432.208	226.977.081.716	Advance from project owners and costumers
Liabilitas imbalan pascakerja	30	18.650.626.300	20.737.531.731	Post employment benefits liability
Cadangan pemeliharaan	31	6.874.028.728	5.753.992.503	Overhaul reserve
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		2.105.058.870.549	2.415.284.431.613	Total Non Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		7.133.802.324.012	6.117.507.749.543	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham				Share capital - par value of Rp 1,000,000 per share
Modal dasar - 600.000 saham Ditempatkan dan disetor penuh 161.555 saham	32	161.555.000.000	161.555.000.000	Authorized capital-600.000 shares Issued and fully paid 161,555 shares
Revaluasi aset tetap		529.484.737.145	431.318.334.150	Revaluation of property, plant and equipment
Rugi komprehensif lain		(46.612.069.326)	(36.984.453.633)	Other comprehensive loss
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya				Appropriated
Cadangan untuk pengembangan Perusahaan		1.205.058.853.905	1.070.858.230.381	Reserve for The Company's development
Cadangan bertujuan		32.311.000.000	32.311.000.000	Appropriated reserve
Belum ditentukan penggunaannya		232.198.072.864	165.912.558.859	Unappropriated
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		2.113.995.594.588	1.824.970.669.757	Equity attributable to owners of parent entity
Kepentingan nonpengendali	33	30.874.280.463	30.467.225.854	Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS		2.144.869.875.051	1.855.437.895.611	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		9.278.672.199.063	7.972.945.645.154	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian

The accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements are an integral part of the Consolidated Financial Statements

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
PENDAPATAN USAHA	34	4.864.991.814.619	4.012.546.365.442	REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	35	(4.529.176.699.438)	(3.640.561.005.685)	COST OF REVENUES
LABA KOTOR		335.815.115.181	371.985.359.757	GROSS PROFIT
Bagian laba ventura bersama	36	322.065.459.814	208.305.334.083	Share in profit of joint ventures
Beban penjualan	37	(1.174.294.576)	(1.031.403.601)	Sales expenses
Beban administrasi dan umum	37	(232.741.934.164)	(209.815.334.640)	Administration and general expenses
Beban keuangan	38	(174.409.090.517)	(177.677.804.169)	Financial charges
Pendapatan (beban) lainnya - bersih	39	(45.429.424.344)	(5.212.446.125)	Other income (expenses) - net
Bagian laba (rugi) bersih entitas asosiasi	18	105.620.429.133	42.853.312.029	Share in profit (loss) of associates
Pajak penghasilan final	25b	(99.345.272.081)	(90.980.919.605)	Final income tax
LABA SEBELUM PAJAK		210.400.988.446	138.426.097.729	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	25b	(8.499.920.178)	(3.045.606.287)	INCOME TAX EXPENSES - NET
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		201.901.068.268	135.380.491.442	PROFIT OF THE YEAR
PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN:				OTHER COMPREHENSIVE INCOME LOSS:
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada tahun berikutnya:				Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Keuntungan revaluasi aset tetap		98.166.402.995	-	Gain on revaluation of fixed asset
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti		(9.620.981.448)	(8.464.519.184)	Remeasurement of defined benefit obligation
Jumlah pendapatan komprehensif lain - setelah pajak		88.545.421.547	(8.464.519.184)	Total other comprehensive income - net tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		290.446.489.815	126.915.972.258	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Profit attributable to:
Pemilik entitas induk		200.486.137.529	134.200.623.524	Parent entity owner
Kepentingan nonpengendali		1.414.930.739	1.179.867.918	Non controlling interest
Labu bersih tahun berjalan		201.901.068.268	135.380.491.442	Profit for the year
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				Total Comprehensive Income attributable to:
Pemilik entitas induk		289.024.924.831	125.760.600.320	Parent entity owner
Kepentingan non pengendali		1.421.564.984	1.155.371.938	Non controlling interest
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan		290.446.489.815	126.915.972.258	Total comprehensive income for the year

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian
tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements are
an integral part of the consolidated financial statements

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Catatan/ Notes	Modal disetor/ Paid-up capital	Revaluasi aset tetap/ Revaluation of property, plant and equipment	Pendapatan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Cadangan untuk pengembangan Perusahaan/ Reserve for The Company's development	Saldo laba/ Retained earnings		Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Jumlah/ Total	Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interests	Jumlah ekuitas/ Total equity
					Ditetapkan penggunaannya/ Appropriated					
					Cadangan bertujuan/ Appropriated reserve					
Saldo 1 Januari 2022	161.555.000.000	431.318.334.150	(28.537.918.775)	1.014.329.959.235	32.311.000.000	88.240.206.481	1.134.881.165.716	29.276.743.798	1.728.493.324.889	
Pembentukan cadangan	-	-	-	56.528.271.146	-	(56.528.271.146)	-	-	-	
Pembayaran dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	134.200.623.524	134.200.623.524	1.179.867.918	135.380.491.442	
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti	-	-	(8.446.534.858)	-	-	-	-	(17.984.326)	(8.464.519.184)	
Perubahan ekuitas pada entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	28.598.464	28.598.464	
Saldo 31 Desember 2022	161.555.000.000	431.318.334.150	(36.984.453.633)	1.070.858.230.381	32.311.000.000	165.912.558.859	1.269.081.789.240	30.467.225.854	1.855.437.895.611	
Modal disetor	-	-	-	-	-	-	-	(400.000.000)	(400.000.000)	
Pembentukan cadangan	-	-	-	134.200.623.524	-	(134.200.623.524)	-	-	-	
Pembayaran dividen	-	-	-	-	-	-	-	(614.510.375)	(614.510.375)	
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	200.486.137.529	200.486.137.529	1.414.930.739	201.901.068.268	
Selisih lebih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
penilaian kembali aset tetap	-	98.166.402.995	-	-	-	-	-	-	98.166.402.995	
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti	-	-	(9.627.615.693)	-	-	-	-	6.634.245	(9.620.981.448)	
Perubahan ekuitas pada entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo 31 Desember 2023	161.555.000.000	529.484.737.145	(46.612.069.326)	1.205.058.853.905	32.311.000.000	232.198.072.864	1.469.567.926.769	30.874.280.463	2.144.869.875.051	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian
tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements are
an integral part of the consolidated financial statements

	Catatan/ Notes	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan		4.254.512.613.881	3.891.204.710.026	Receipt from customers
Pembayaran ke pemasok, sub kontraktor karyawan dan pihak ketiga lainnya		(3.631.728.173.618)	(3.289.264.929.710)	Payment to suppliers, sub contractor, employees and other third parties
Penerimaan bunga		8.299.443.078	6.471.769.422	Interest received
Pembayaran pajak		(136.400.344.350)	(237.643.908.355)	Taxes paid
Pembayaran bunga dan beban keuangan		(173.827.525.446)	(172.742.758.784)	Financing and interest charges paid
Penerimaan restitusi pajak		77.606.969.572	136.384.216.224	Tax refund received
Penerimaan klaim dan lainnya - bersih		3.442.311.416	46.279.807.378	Received of claim and other refund - nett
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		401.905.294.533	380.688.906.201	Net cash provided from operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap		(100.622.043.476)	(110.088.034.588)	Acquisition of property, plant and equipment
Pembayaran uang muka proyek IPP		(8.823.525.453)	(8.844.220.581)	Payment for advance for IPP project
Peningkatan investasi entitas asosiasi	18	(209.330.400.000)	(301.800.000.000)	Increase in investment in associates
Kenaikan investasi jangka panjang	19	(18.957.000.000)	(1.625.000.000)	Increase in long term investment
Penambahan aset tidak berwujud	21	(1.603.851.900)	(2.078.800.000)	Addition in intangible assets
Hasil penjualan aset tetap		6.315.562.500	-	proceeds from sale of fixed assets
Penerimaan hibah		13.106.559.573	-	Grant receipt
Penempatan pada kas yang dibatasi penggunaannya		-	(11.703.421.287)	Placement of restricted cash in bank
Kas bersih (digunakan untuk) aktivitas investasi		(319.914.698.756)	(436.139.476.456)	Net cash (used in) investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman bank	28	155.000.000.000	470.000.000.000	Proceed from bank loan
Pembayaran pinjaman bank	28	(430.843.977.857)	(396.481.356.342)	Repayment of bank loan
Penerimaan pinjaman lembaga keuangan non bank	29	240.000.000.000	119.438.104.810	Proceed from loan from non bank financial institution
Pembayaran pinjaman lembaga keuangan non bank	29	(248.321.669.688)	(302.725.616.123)	Repayment of loan from non bank financial institution
Pendanaan kerjasama operasi		236.197.278.975	272.916.749.779	Join operation financing
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		(47.968.368.570)	163.147.882.124	Net cash provided from (used in) financing activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		34.022.227.207	107.697.311.869	INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT
DAMPAK SELISIH KURS		1.201.755.426	(13.226.699.243)	IMPACT ON FOREIGN EXCHANGE
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE		1.476.793.407.269	1.382.322.794.643	BEGINNING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENT
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE		1.512.017.389.902	1.476.793.407.269	ENDING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENT

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Brantas Abipraya (Persero) ("Perusahaan") didirikan sebagai hasil pemekaran dari Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Kali Brantas yang lebih dikenal dengan sebutan Proyek Brantas, berdasarkan akta notaris No. 88 tanggal 12 November 1980 Kartini Muljadi, S.H. Notaris di Jakarta.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali Perubahan. Perubahan terakhir terkait perubahan susunan dewan direksi dan dewan komisaris, berdasarkan akta notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi S.H., M.Kn, notaris publik di Kabupaten Bogor, No 13 tanggal 15 Februari 2023. Perubahan Anggaran Dasar ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 16 Februari 2023 No. AHU-AH.01.09-0092425 Tahun 2023.

Kantor pusat Perusahaan berkedudukan di Jl. D.I Panjaitan Kav.14, Jakarta Timur dengan lokasi kegiatan utama di seluruh Indonesia.

b. Kegiatan Perusahaan

Kegiatan utama Perusahaan adalah kontraktor umum dan bidang usaha lainnya yang dapat menunjang kegiatan utama tersebut. Perusahaan mempunyai divisi dan unit bisnis sebagai berikut:

- Divisi I
- Divisi II
- Divisi III
- Divisi Peralatan dan Precast

Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham mayoritas.

Proyek-proyek yang dikerjakan oleh Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2023, baik pemerintah maupun swasta, merupakan proyek-proyek bidang pengairan, jalan, jembatan, gedung, dan proyek kelistrikan.

Dalam rangka mengembangkan usaha konstruksi, Perusahaan melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan mitra nasional dalam menangani proyek-proyek skala besar dan proyek-proyek yang padat teknologi.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ruang lingkup kegiatan Perseroan terutama bergerak dalam bidang pelaksanaan jasa konstruksi, industri pabrikasi, jasa persewaan, jasa keagenan, investasi, agro

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

PT Brantas Abipraya (Persero) (the "Company") was established as expansion result of the Holding Expansion Project of Brantas River Development, better known as the Brantas Project, based on notarial deed No. 88 dated November 12, 1980 Kartini Muljadi, S.H. Notary in Jakarta.

The Company's Articles of Association have been amended several times. The most recent amendment is changes in the composition of board of directors and board of commissioner, based on notarial deed from Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H, M.Kn, public notary in Kabupaten Bogor No. 13 dated February 15, 2023. The notification had been duly received by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia by virtue of its letter dated on February 16, 2023 No. AHU-AH.01.09-0092425 Tahun 2023.

The Company's head office is located at Jl. D.I Panjaitan Kav.14 , East Jakarta with the location of the main activities in Indonesia.

b. The Company's Activities

The main activity of the Company is the general contractor and other business sectors that can support the main activities. The Company has divisions and business units as follows:

- *Division I*
- *Division II*
- *Division III*
- *Tools and Precast Division*

The Company is majority owned by the Government of the Republic of Indonesia.

The projects undertaken by the Company until December 31, 2023, whether government or private, are projects in irrigation field, road, bridge, building, and electricity project.

In order to develop construction business, the Company has a Joint Operation (JO) with national partners in addressing the large scale projects and technology-intensive projects.

According to article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is mainly to engage in the services in constructions, manufacturing industry, rental services, agency services, investment, agro

(Lanjutan/Continued)

industri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan bidang konstruksi, teknologi informasi, dan pengembangan untuk menghasilkan barang dan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan.

industry, trade, area management, services to improve the ability of the construction seeter, information technology, and development to produce the high quality and strong competitiveness goods and services, and also the pursuit of profit in order to increase the value of the Company.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

To achieve these goals and objectives, the Company carries on business as follows:

1. Pekerjaan Konstruksi meliputi:

1. *Construction Works including:*

- a. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal, Perkantoran, Industri, Perbelanjaan, Kesehatan, Pendidikan, Penginapan, Tempat Hiburan dan Olahraga, Lainnya
- b. Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk Gedung, Jalan dan Jalan Rel, Prefabrikasi Untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komuniaksi dan Limbah
- c. Konstruksi Jalan Raya, Jembatan dan Jalan Layang, Jalan Rel dan Jembatan Rel 15, Landasan Pacu Pesawat Terbang
- d. Konstruksi Terowongan
- e. Konstruksi Jaringan Irigasi
- f. Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase
- g. Konstruksi Bangunan Elektrikal, Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya, Prasarana Sumber Daya Air, Pelabuhan Bukan Perikanan, Pelabuhan Perikanan, Pengolahan dan Penampungan Barang Minyak dan Gas, Sipil Lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
- h. Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi Laut dan Rambu Sungai, Telekomunikasi Navigasi Udara, Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api, Sentral Telekomunikasi
- i. Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah
- j. Pengerukan, Pembongkaran, Penyiapan Lahan
- k. Pemasangan Bangunan Prefabrikasi Untuk Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya
- l. Instalasi Listrik, Telekomunikasi, Navigasi Laut dan Sungai, Navigasi Udara, Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api, Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya, Elektronika, Saluran Air (Plumbing), Pemanas dan Geotermal,

- a. *Construction of Residential Building, Office Building, Industry, Shopping, Health, Education, Lodging, Entertainment and Sport Center, and Others*
- b. *Installation of Prefabricated Building for Building Structure, Roads and Railroad, Prefabricated for Irrigation Construction, Communications and Waste Canal Networks*
- c. *Construction of Highways, Bridges and Flyovers, Railroads and 15 Railroads Bridges, Aircraft Runways*
- d. *Tunnel Construction*
- e. *Construction of Irrigation System*
- f. *Building for Management, Distribution, and Storage for Drinking Water, Wastewater and Drainage*
- g. *Construction of Electrical Buildings, Other Electrical and Telecommunication Networks, Water Resources Infrastructure, Non-Fishing Ports, Fishing Ports, Oil and Gas Processing and Storage, Other civil not classified in others*
- h. *Telecommunication Construction of Marine Navigation Auxiliary Facilities and River Signs, Air Navigation Telecommunication, Railways Signals and Telecommunication, and Telecommunication Centre*
- i. *Ground Water Well Drilling and Installation*
- j. *Dredging, Demolition, Land Preparation*
- k. *Installation of Prefabricated Buildings for Construction of Other Civilian Buildings*
- l. *Installation of Electrical, Telecommunications, Sea and River Navigation, Air Navigation, Railway Signals and Telecommunications, Highway Signals and Signs, Electronics, Waterworks (Plumbing),*

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

- | | |
|---|---|
| <p>Minyak dan Gas, Pendingin dan Ventilasi Udara, Mekanikal, Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Konstruksi Lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain</p> <p>m. Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Aluminium, Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon, pengecatan, Dekorasi Interior, Dekorasi Eksterior</p> <p>n. Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya</p> <p>o. Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang, Perancah (Steiger), Atap/Roof Covering, Kerangka Baja</p> <p>p. Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator</p> <p>q. Konstruksi Khusus Lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain</p> <p>2. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis yang berhubungan kegiatan diatas</p> <p>3. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya</p> <p>4. <i>Building management</i> meliputi Aktivitas Arsitektur dan Jasa Inspeksi Teknik Instalasi</p> <p>5. Pabrikasi bahan dan komponen bangunan meliputi:</p> <p>a. Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya</p> <p>b. Industri Barang dari Semen</p> <p>c. Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk konstruksi</p> <p>d. Industri Mortar atau Beton Siap Pakai</p> <p>6. Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan</p> <p>7. Pabrikasi barang logam, kayu, karet, plastik dan beton, meliputi:</p> <p>a. Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu</p> <p>b. Barang Dari Plastik Untuk Bangunan</p> <p>c. Industri Barang Bangunan Dari Kayu</p> <p>8. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil</p> <p>9. Layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta peralatan konstruksi, meliputi:</p> <p>a. Perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi</p> <p>b. Perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu</p> <p>c. Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu</p> <p>d. Perdagangan besar berbagai macam material bangunan</p> | <p><i>Heating and Geothermal, Oil and Gas, Air Conditioning and Ventilation, Mechanical, Meteorology, Climatology and Geophysics, Other Construction not elsewhere classified</i></p> <p>m. <i>Installation Works for Glass and Aluminium, Flooring, Wall, Sanitary Equipment and Ceiling, Painting, Interior Decoration, Exterior Decoration</i></p> <p>n. <i>Other Building Construction Completion</i></p> <p>o. <i>Installation of Foundations and Piles, Scaffolding (Steiger), Roof Covering, and Steel Frame</i></p> <p>p. <i>Construction Equipment Rental with Operator</i></p> <p>q. <i>Other Special Constructions not elsewhere classified</i></p> <p>2. <i>Engineering Activities and Technical Consultation related to above activities</i></p> <p>3. <i>Other Management Consulting Activities</i></p> <p>4. <i>Building management includes architecture activities and inspection services on installation techniques</i></p> <p>5. <i>Manufacturing of Building Materials and Components as follows:</i></p> <p>a. <i>Excavation of Rock, Sand and Other Clay</i></p> <p>b. <i>Industry of Goods from Cement</i></p> <p>c. <i>Industry of Goods from Cement and Limestone for Construction</i></p> <p>d. <i>Mortar or Ready-mix Concrete Industry</i></p> <p>6. <i>Heavy Construction Industry of Ready to Use Mortar for Building</i></p> <p>7. <i>Fabrication of metal, wood, rubber, plastic and concrete goods, as follows:</i></p> <p>a. <i>Wood prefabricated building industry</i></p> <p>b. <i>Items from plastic for building</i></p> <p>c. <i>Wood building goods industry</i></p> <p>8. <i>Lease activities without right of option for machinery, construction equipment and civil engineering</i></p> <p>9. <i>Agency services for building materials and component as well as construction equipment, as follows:</i></p> <p>a. <i>Trade in metal goods for constructions material</i></p> <p>b. <i>Trade in cement, lime stone, sand and stone</i></p> <p>c. <i>Trade in woods construction materials</i></p> <p>d. <i>Trade in various kind of building materials</i></p> |
|---|---|

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> e. Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya f. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya | <ul style="list-style-type: none"> e. <i>Trade in other construction materials</i> f. <i>Trade in machinery, equipment and other supplies</i> |
| <p>10. Investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) b. Industri c. Industri penunjang lainnya antara lain <i>smelter, industrial plant</i> dan <i>oil & gas</i> | <p>10. <i>Investment and/ or business management in the fields of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Basic infrastructure and facilities (infrastructure)</i> b. <i>Industry</i> c. <i>Other supporting industries include smelters, industrial plants and oil and gas</i> |
| <p>11. Ekspor impor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perdagangan besar berbagai macam material bangunan b. Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya | <p>11. <i>Export and import which includes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Trade in various kinds of building material</i> b. <i>Trade in other construction material</i> |
| <p>12. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya</p> | <p>12. <i>Trade in Machinery, Equipment and Other Equipment</i></p> |
| <p>13. Pengelolaan dan/atau pengembangan Kawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Pariwisata; b. Kawasan Industri; | <p>13. <i>Management and/ or development of the area as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Tourism area</i> b. <i>Industrial area</i> |
| <p>14. Pengembangan sistem meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis dan kegiatan semacamnya; b. Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa; c. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain | <p>14. <i>System development includes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Engineering Activities and Technical Consulting and Other Related Activities</i> b. <i>Technology and Engineering Research and Development</i> c. <i>Other Professional, Scientific and Technical Activities not Elsewhere Classified</i> |
| <p>15. Layanan jasa bidang teknologi informasi meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penerbit Piranti Lunak (<i>Software</i>) b. Aktivitas Pemograman Komputer Lainnya c. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi d. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya e. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya f. Aktivitas Pengolahan Data g. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial h. Aktivitas <i>Hosting</i> dan kegiatan semacamnya | <p>15. <i>Information technology services, as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Software publisher (software)</i> b. <i>Other computer programming activities</i> c. <i>Information security consulting activities</i> d. <i>Computer consulting and other computer facilities management activities</i> e. <i>Information technology and other services activities</i> f. <i>Data processing activities</i> g. <i>Web portals and/ or digital platforms for commercial purposes</i> h. <i>Hosting activities and other related activities</i> |

(Lanjutan/Continued)

- | | |
|---|---|
| <p>16. Layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya b. Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknik dan kegiatan semacamnya c. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain d. Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa <p>17. Pengembangan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Real estate</i> yang dimiliki sendiri atau disewa b. Kawasan Pariwisata c. Kawasan Industri d. <i>Real estate</i> atas dasar Balas Jasa (<i>Fee</i>) Atau Kontrak <p>18. Aktivitas Jalan Tol</p> <p>19. Bidang tenaga listrik, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangkit tenaga listrik b. Transmisi tenaga listrik c. Distribusi tenaga listrik d. Aktivitas penunjang kelistrikan e. Pengadaan uap/air panas dan udara dingin <p>20. Penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum b. Penampungan dan Penyaluran Air Baku c. Aktivitas Penunjang Pengelolaan Air | <p>16. <i>Capacity building services in the field on construction services, as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Other management consulting activities</i> b. <i>Engineering and technical consulting and other related activities</i> c. <i>Other professional, Scientific, and Technical Activities not elsewhere classified</i> d. <i>Technology and Engineering Research and Development</i> <p>17. <i>Development which includes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Owned or leased real estate</i> b. <i>Tourism area</i> c. <i>Industrial area</i> d. <i>Real estate on fees or contract</i> <p>18. <i>Tol Road Activities</i></p> <p>19. <i>Electric power sector, as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Power plant</i> b. <i>Electric power transmission</i> c. <i>Distribution of electric power</i> d. <i>Electrical support activities</i> e. <i>Steam/hot water and cold air supplies</i> <p>20. <i>Implementation of the development drinking water supply systems, as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Storage Purification and Distribution of Drinking Water</i> b. <i>Raw Water Storage and Distribution</i> c. <i>Water Management Support Activity</i> |
|---|---|

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana diatas, perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki perseroan untuk pergudangan, perkantoran, perhotelan, rest area, resort pariwisata, olahraga dan rekreasi, pendidikan, dan penelitian, rumah sakit, pusat perbelanjaan, prasarana telekomunikasi dan sumber daya energi.

In addition to the main business activities as above, the company can carry out business activities in the context of optimizing the company's resources for warehousing, offices, hotels, rest areas, tourism resorts, sports and recreation, education and research, hospitals, shopping centers, telecommunications infrastructure and energy resources.

c. Pengurus Perusahaan

Dewan Komisaris

Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. SK-19/MBU/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota- anggota Dewan Komisaris

c. Management of the Company

Board of Commissioners

In accordance with the Decree of the State Minister for State Owned Enterprises No. SK-19/MBU/01/2023 dated January 31, 2023 concerning the dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Perusahaan ditetapkan di Jakarta, susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

the Company, the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2023 is as follows:

Komisaris Utama dan Independen	Haryadi	Chairman and Independent Commissioner
Komisaris Independen	Kenny Daryat Danang	Independent Commissioner
Komisaris	Imam Haryono	Commissioner
Komisaris	Diana Kusumastuti	Commissioner
Komisaris	Hj. Tursandi Alwi	Commissioner

Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. SK-281/MBU/09/2020 tanggal 10 September 2020 dan Nomor: SK-232/MBU/07/2021 tanggal 9 Juli 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan ditetapkan di Jakarta, susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

In accordance with the Decree of the State Minister for State Owned Enterprises No. SK-281/MBU/09/2020 dated September 10, 2020 and No. SK-232/MBU/07/2021 dated July 9, 2021 concerning the dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company, the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2022 is as follows:

Komisaris Utama dan Independen	Haryadi	Chairman and Independent Commissioner
Komisaris Independen	Kenny Daryat Danang	Independent Commissioner
Komisaris	Imam Haryono	Commissioner
Komisaris	Khalawi Abdul Hamid	Commissioner
Komisaris	Sudirman	Commissioner

Dewan Direksi

Board of Directors

Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. SK-238/MBU/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota direksi, sehingga susunan Dewan Direksi per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

In accordance with the Decree of the State Minister for State-Owned Enterprises No. SK-238/MBU/10/2022 dated October 26, 2022 regarding changes to position nomenclature, transfer of duties and appointment of members of the board of directors, so that the composition of the Board of Directors as of December 31, 2023 and 2022 is as follows:

Direktur Utama	Sugeng Rochadi	President Director
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Suradi	Finance and Risk Management Director
Direktur SDM dan Umum	Tumpang Muhammad	HC and General Director
Direktur Operasi 1	Mohammad Toha Fauzi	Director of Operation 1
Direktur Operasi 2	Purnomo	Director of Operation 2

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris 04/DK/KPTS/V/2023 tanggal 3 Mei 2023, susunan Komite Nominasi & Remunerasi, Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko (PMR) & Good Corporate Governance (GCG) tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut

Based on Decree 04/DK/KPTS/V/2023 dated May 3, 2023, the composition of the Nomination & Remuneration Committee, Audit Committee and Risk Management Monitoring Committee (PMR) & Good Corporate Governance (GCG) as of December 31, 2023 are as follows

Komite Nominasi & Remunerasi

Nomination & Remuneration Committee

Ketua	Haryadi	Chairman
Anggota	Tursandi Alwi	Members
Anggota	Kenny Darya Nanang	Members
Anggota	Azka Merci Fauzia Lestarie	Members

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Komite Audit

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota

Imam Haryono
Tursandi Alwi
Buntoro Heri Prasetya
Tri Prijana

Chairman
Members
Members
Members

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota

Diana Kusumatuti
Kenny Darya Nanang
Fajar Rachman
Amiruddin

Chairman
Members
Members
Members

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 408/D/KPTS/III/2023 tanggal 12 Desember 2023, Sekretaris Perusahaan tanggal 31 Desember 2023 adalah Dian Sovana.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah karyawan tetap Perusahaan masing-masing adalah 509 pegawai dan 488 pegawai (pegawai organik).

Jumlah remunerasi Direksi dan Komisaris Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Audit Committee

Risk Management Monitoring Committee

Corporate Secretary

Based on Decree No.408/D/KPTS/III/2023 dated December 12, 2023 of the Board of Directors, the Secretary of the Company on December 31, 2023 is Dian Sovana.

As of December 31, 2023 and 2022 the Company have a total of 509 employees and 488 employees (permanent employee), respectively.

The Commissioners and Directors remuneration for the years ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Dewan Komisaris			Board of Commissioners
Gaji/honor/tunjangan	10.831.500.863	10.426.973.661	Salary/honor/allowance
Asuransi pasca kerja	74.250.000	213.526.695	Post employment benefit insurance
Jumlah	10.905.750.863	10.640.500.356	Total
	2023	2022	
Dewan Direktur			Board of Directors
Gaji/honor/tunjangan	19.577.991.004	10.704.180.943	Salary/honor/allowance
Asuransi pasca kerja	4.997.847.251	3.128.019.271	Post employment benefit insurance
Jumlah	24.575.838.251	13.832.200.214	Total

e. Entitas Anak

Perusahaan mempunyai kepemilikan secara langsung atau tidak langsung pada entitas anak berikut pada akhir periode pelaporan:

e. Subsidiaries

The Company has ownership interest, directly or indirectly to the following subsidiaries at the end of the reporting period:

Nama perusahaan/ Name of the Company	Domisili/ Domicilie	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Tahun operasi komersial/ Start of commercial operations	Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ Total assets (before elimination)	
			2023	2022		31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Kepemilikan langsung/ Direct ownership							
PT Brantas Energi (BE)	Jakarta	Pengelola sumber daya kelistrikan/ Electricity resource manager		99,93%	Tahapan produksi/ Production stage	884.679	2.204.678

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Nama perusahaan/ <i>Name of the Company</i>	Domisili/ <i>Domicilie</i>	Jenis usaha/ <i>Nature of business</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>		Tahun operasi komersial/ <i>Start of commercial operations</i>	Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ <i>Total assets (before elimination)</i>	
			2023	2022		31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Kepemilikan tidak langsung/ <i>Indirect ownership</i>							
PT Brantas Adya Surya Energi (BASE)	Jakarta	Pengelola sumber daya kelistrikan/ <i>Electricity resources manager</i>	80%	80%	Beroperasi/ <i>Operating</i>	49.892	50.408
PT Sahung Brantas Energi (SBE)	Jakarta	Pengelola sumber daya kelistrikan/ <i>Electricity resources manager</i>	99,95%	99,95%	Beroperasi/ <i>Operating</i>	186.085	206.461
PT Brantas Cakrawala Energi (BCE)	Jakarta	Pengelola sumber daya kelistrikan/ <i>Electricity resources manager</i>	99,99%	99,99%	Tahap konstruksi/ <i>Construction stage</i>	294.991	311.472
PT Brantas Nipa Jaya Energi (BNJE)	Jakarta	Pengelola sumber daya kelistrikan/ <i>Electricity resources manager</i>	99,99%	98,59%	Tahap konstruksi/ <i>Construction stage</i>	235.406	245.036
PT Brantas Prospek Energi (BPE)	Jakarta	Pengelola sumber daya kelistrikan/ <i>Electricity resources manager</i>	99,99%	99,99%	Tahap konstruksi/ <i>Construction stage</i>	337.745	355.217
PT Brantas Hidro Energi (BHE)	Jakarta	Pengelola sumber daya kelistrikan/ <i>Electricity resources manager</i>	99,95%	99,97%	Tahap konstruksi/ <i>Construction stage</i>	259.078	264.146
PT Perjaya Bravo Energi (PBE)	Jakarta	Pengelola sumber daya kelistrikan/ <i>Electricity resources manager</i>	90%	90%	Tahap pengembangan/ <i>Development stage</i>	1.953	1.951
PT Minahasa Brantas Energi (MBE)	Jakarta	Pengelola sumber daya kelistrikan/ <i>Electricity resources manager</i>	99,997%	99,996%	Tahap pengembangan/ <i>Development stage</i>	37.622	35.862
PT Abipraya Nusantara Energi (ANE)	Jakarta	Pengelola sumber daya kelistrikan/ <i>Electricity resources manager</i>	92,5%	92,5%	Tahap pengembangan/ <i>Development stage</i>	2.488	2.486
PT Brantas Mahalona Energi (BME)	Jakarta	Pengelola sumber daya kelistrikan/ <i>Electricity resources manager</i>	99,98%	99,98%	Tahap pra operasi/ <i>Pre - operation stage</i>	27.490	14.297
PT Brantas Energi Mandiri (BEM)	Jakarta	Pengelola sumber daya kelistrikan/ <i>Electricity resources manager</i>	83%	83%	Tahap pra operasi/ <i>Pre - operation stage</i>	2.626	2.624
PT Brantas Energi (BTE)	Total	Jakarta Pengelola sumber daya kelistrikan/ <i>Electricity resources manager</i>	99,98%	99,98%	Tahap pra operasi/ <i>Pre - operation stage</i>	101.933	39.284
PT Limbong Energi (LHE)	Hidro	Jakarta Pengelola sumber daya kelistrikan/ <i>Electricity resources manager</i>	93,00%	93,00%	Tahap pra operasi/ <i>Pre - operation stage</i>	3.486	3.484
PT Tiar Daya (TDH)	Hidro	Jakarta Pengelola sumber daya kelistrikan/ <i>Electricity resources manager</i>	70,02%	70,02%	Tahap pengembangan/ <i>Development stage</i>	8.632	8.587
PT Brantas Prospek Mandiri (BPM)	Jakarta	Pengelola sumber daya kelistrikan/ <i>Electricity resources manager</i>	99,98%	99,80%	Tahap pra operasi/ <i>Pre - operation stage</i>	18.892	11.584
PT Gadang Energi (GHE)	Hidro	Jakarta Pengelola sumber daya kelistrikan/ <i>Electricity resources manager</i>	98,97%	99,97%	Tahap pra operasi/ <i>Pre - operation stage</i>	3.930	3.928

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Nama perusahaan/ <i>Name of the Company</i>	Domisili/ <i>Domicilie</i>	Jenis usaha/ <i>Nature of business</i>	Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>		Tahun operasi komersial/ <i>Start of commercial operations</i>	Jumlah aset (sebelum eliminasi)/ <i>Total assets (before elimination)</i>	
			2023	2022		31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
PT Rantepao Hidro Energi (RHE)	Jakarta	Pengelola sumber daya kelistrikan/ <i>Electricity recources manager</i>	80%	80%	Tahap pra operasi/ <i>Pre - operation stage</i>	76	73
PT Brantas Prospek Enjiniring (BPEnj)	Jakarta	Pengelola sumber daya kelistrikan/ <i>Electricity recources manager</i>	93%	93%	Tahap konstruksi/ <i>Construction stage</i>	4.729	4.721
PT Graha Investama Bersama (GIB)	Tangerang Selatan	Pembangunan, Perdagangan dan Jasa Properti/ <i>Construction, trading and property service</i>	89,92%	89,92%	Beroperasi/ <i>Operating</i>	372.570	375.031
PT Guna Rogate Indah (GRI)	Jakarta	Jasa konstruksi/ <i>Construction service</i>	89,29%	89,29%	Beroperasi/ <i>Operating</i>	76.484	65.014
PT Buana Enjiniring Konsultan	Jakarta	Pengelola sumber daya kelistrikan/ <i>Electricity recources manager</i>	99,%	99,%	Beroperasi/ <i>Operating</i>	22.660	8.178

Kepemilikan langsung

PT Brantas Energi (BE)

PT Brantas Energi didirikan berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Negara BUMN No. S627/MBU/2011 tanggal 15 November 2011, PT Brantas Energi didirikan berdasarkan akta No. 06 tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Suparmin, S.H., M.Kn. di Bogor, dan akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-62350.AH.01.01 TH.2011 tanggal 16 Desember 2011.

Pada tanggal 30 Januari 2019, PT Brantas Energi telah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp617.000.000.000 menjadi Rp767.000.000.000 yang seluruhnya diambil oleh PT Brantas Abipraya sehingga persentase kepemilikan PT Brantas Abipraya pada PT Brantas Energi menjadi 99,93%. BE memulai operasi sejak didirikan Desember 2011.

Perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 24 November 2023 yang dibuat dihadapan Virly Yusrini, SH., M.Kn., notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp767.000.000.000 menjadi sebesar Rp784.420.000.000 yang terdiri dari 784.420 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 per lembar saham. Akta tersebut telah diberitahukan dan diterima oleh

Direct ownership

PT Brantas Energi (BE)

PT Brantas Energi was established based on the approval of the Minister of State Enterprises No. S627/MBU/2011 dated November 15, 2011. PT Brantas Energi was established based on The Deed Number No. 06 dated December 12, 2011, by Notary Suparmin, S.H., M.Kn. in Bogor, the deed which was approved by the Minister of Law and Human Rights in his letter number AHU-62350.AH.01.01 TH.2011 dated December 16, 2011.

In January 30, 2019, PT Brantas Energi increased the paid up capital from Rp617,000,000,000 to Rp767,000,000,000 which was entirely subscribed by PT Brantas Abipraya so that the percentage of ownership of PT Brantas Abipraya in PT Brantas Energi becomes 99.93%. BE start operating since it is establishment in December 2011.

The agreement has been amended by several times, the latest based on the Notarial Deed No. 9 dated November 24, 2023 by Virly Yusrini, SH., M.Kn., Notary in Jakarta, the shareholders agree to increase of issued and paid up capital from Rp767,000,000,000 to Rp784,420,000,000, which divided into 784,420 shares with a par value of Rp1,000,000 per share. The deed has received a notification letter from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0148186 tanggal 29 November 2023.

No. AHU-AH.01.03-0148186 dated November 29, 2023.

Kepemilikan tidak langsung

Indirect ownership

PT Brantas Adya Surya Energi (BASE)

PT Brantas Adya Surya Energi (BASE)

PT Brantas Adya Surya Energi (BASE) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 03 tanggal 24 April 2014 Notaris Virly Yusrini, S.H., M.Kn., Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU- 07847.40.10.2014 pada tanggal 8 Mei 2014. BASE mulai mengoperasikan PLTS Gorontalo sejak 19 Februari 2016.

PT Brantas Adya Surya Energi (BASE) was established based on the Establishment Deed No. 03 April 24, 2014 by Notary Virly Yusrini, S.H. M.Kn., the deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No.AHU- 07847.40.10.2014, on May 8, 2014. BASE start to operate PLTS Gorontalo since February 19, 2016.

PT Sahung Brantas Energi (SBE)

PT Sahung Brantas Energi (SBE)

PT Sahung Brantas Energi (SBE) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 21 Desember 2011 Notaris Suparmin, S.H., M.Kn., akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-64763.AH.01.01 TH.2011 tanggal 30 Desember 2011. SBE mulai mengoperasikan PLTM Padang Guci sejak 13 April 2017.

PT Sahung Brantas Energi (SBE) was established based on the Establishment Deed No. 10 December 21, 2011 by Notary Suparmin, S.H., M.Kn., the deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No.AHU- 64763.AH.01.01 TH.2011 on December 30, 2011. SBE start to operate PLTM Padang Guci since April 13, 2017.

PT Brantas Cakrawala Energi (BCE)

PT Brantas Cakrawala Energi (BCE)

PT Brantas Cakrawala Energi didirikan berdasarkan akta pendirian No. 05 tanggal 16 Mei 2012 di hadapan notaris Suparmin, S.H., M.Kn., akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-29420.AH.01.01 TH.2012 tanggal 31 Mei 2012.

PT Brantas Cakrawala Energi was established based on the establishment deed No. 05 May 16, 2012 by Notary Suparmin, S.H., M.Kn., the deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No.AHU-29420.AH.01.01TH.2012 on May 31, 2012.

Pada tanggal 27 Desember 2019, BCE meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp68.000.000.000 menjadi Rp91.000.000.000 yang seluruhnya diambil oleh BE sehingga persentase kepemilikan BE pada BCE menjadi 99,99%. BCE mulai mengoperasikan PLTM Sako sejak 27 Desember 2019.

On December 27, 2019, BCE increased the paid up capital from Rp68,000,000,000 to Rp91,000,000,000 which was entirely subscribed by BE so that the percentage of ownership of BE in BCE becomes 99.99%. BCE start to operate PLTM Sako since December 27, 2019.

PT Brantas Nipa Jaya Energi (BNJE)

PT Brantas Nipa Jaya Energi (BNJE)

PT Brantas Nipa Jaya Energi didirikan berdasarkan akta pendirian No.10 tanggal 16 Mei 2014 notaris Retno Santi Prasetyati, S.H., akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak

PT Brantas Nipa Jaya Energi was established based on the establishment deed No. 10 May 16, 2014 by Notary Retno Santi Prasetya, S.H., the deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-10578.40.10.2014 pada tanggal 28 Mei 2014.

Republic of Indonesia based on Decree No.AHU-10578.40.10.2014 on May 28, 2014.

Pada tanggal 30 Januari 2019, PT Brantas Nipa Jaya Energi telah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp42.000.000.000 menjadi Rp148.700.000.000 yang seluruhnya diambil oleh PT Brantas Energi sehingga persentase kepemilikan PT Brantas Energi pada PT Brantas Nipa Jaya Energi menjadi 98,59%.

In January 30, 2019, PT Brantas Nipa Jaya Energi increased the paid up capital from Rp42,000,000,000 to Rp148,700,000,000 which was entirely subscribed by PT Brantas Energi so that the percentage of ownership of PT Brantas Energi in PT Brantas Nipa Jaya Energi becomes 98.59%.

Pada tanggal 14 September 2023 Berdasarkan Akta Notaris No. 34 oleh Ety Chaerita Halim S.H., M.KN., Notaris di Kota Bekasi, para pemegang saham menyetujui pengalihan seluruh kepemilikan saham milik PT Hydro Energi Mandiri, tersebut sebanyak 1.050 kepada PT Gasaribu Energi Investama tersebut diatas yang akan dilanjutkan dengan akta jual beli saham setelah akta ini.

On September 13, 2023, based on Deed No. 34 by Notary Ety Chaerita Halim S.H., M.KN., Notary in Bekasi City, the shareholders agree to transfer all share ownership belonging to PT Hydro Energi Mandiri, amounting to 1,050 to PT Gasaribu Energi Investama mentioned above which will be followed by a share sale and purchase deed after this deed.

PT Brantas Prospek Energi (BPE)

PT Brantas Prospek Energi (BPE)

PT Brantas Prospek Energi didirikan berdasarkan akta pendirian No. 10 tanggal 30 Agustus 2013 Notaris Suparmin, S.H., M.KN., Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-50093.AH.01.01 Tahun.2013 tanggal 26 September 2013

PT Brantas Prospek Energi was established based on the establishment deed No. 10 August 30, 2013 by Notary Suparmin, S.H., M.KN., the deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No.AHU-50093.AH.01.01 TH.2013 on September 26, 2013.

Pada tanggal 30 Januari 2019, PT Brantas Prospek Energi telah meningkatkan modal dasar dari Rp40.000.000.000 menjadi Rp151.000.000.000 yang seluruhnya diambil oleh PT Brantas Energi, sehingga persentase kepemilikan PT Brantas Energi pada PT Brantas Prospek Energi menjadi 99,99%.

In January 30, 2019, PT Brantas Prospek Energi increased the paid up capital from Rp40,000,000,000 to Rp151,000,000,000 which was entirely subscribed by PT Brantas Energi so that the percentage of ownership of PT Brantas Energi in PT Brantas Prospek Energi becomes 99.99%.

Pada tanggal 22 November 2021, berdasarkan Akta No. 22 oleh Notaris Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., BPE penurunan modal ditempatkan dan disetor dari Rp151.000.000.000 menjadi Rp75.000.000.000. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Berdasarkan Surat keputusan No. AHU-0077839.AH.01.02 TAHUN 2021 tanggal 1 Januari 2022. sehingga persentase kepemilikan BE pada BPE menjadi 99,99%. BPE mulai mengoperasikan PLTM Maiting Hulu 2 sejak 1 Mei 2022.

On November 22, 2021, based on Deed No.22 by Notary Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., BPE decreased issued the paid up from Rp151,000,000,000 to Rp75,000,000,000. The deed has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0077839. AH.01.02 TH.2021 on January 1, 2022. So that the percentage of ownership of BE in BPE becomes 99.99%. BPE start to operate PLTM Maiting Hulu 2 since May 1, 2022.

PT Brantas Hidro Energi (BHE)

PT Brantas Hidro Energi (BHE)

PT Brantas Hidro Energi didirikan berdasarkan akta pendirian Perusahaan Terbatas No. 09 tanggal 18 Februari 2013 yang dibuat di

PT Brantas Hidro Energi was established based on the establishment deed No. 9 February 18, 2013 by Notary Suparmin, S.H., M.KN., the deed

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

hadapan Notaris Suparmin, SH., M.Kn., akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-10946 AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013.

Pada tanggal 22 Maret 2021, berdasarkan Akta No. 13 oleh Notaris TB Afifi, S.H., M.Kn., BHE meningkatkan modal dasar dari Rp34.000.000.000 menjadi Rp60.000.000.000 sehingga persentase kepemilikan BE pada BHE menjadi 99,95%.

Pada tanggal 22 November 2021 berdasarkan Akta No.14 oleh Notaris Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., BHE meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp60.000.000.000 menjadi Rp90.000.000.000. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0495281 Tanggal 14 Januari 2022. Sehingga persentase kepemilikan BE pada BHE menjadi 99,97%.

BHE mulai mengoperasikan PLTM Padang Guci 2 sejak 13 Desember 2021.

PT Perjaya Bravo Energi (PBE)

PT Perjaya Brafo Energi (PBE) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 55 tanggal 22 Desember 2011 Notaris Zainuddin Thohir, S.H., akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-01271.AH.01.01 TH.2012 pada tanggal 9 Januari 2012.

Pada tanggal 30 Januari 2019, PBE telah menurunkan modal dasar dari Rp21.000.000.000 menjadi Rp2.400.000.000, sehingga persentase kepemilikan BE pada PBE menjadi 90%.

PT Minahasa Brantas Energi (MBE)

PT Minahasa Brantas Energi didirikan berdasarkan akta pendirian Perusahaan No. 07 tanggal 25 November 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Retno Santi Prasetyati, S.H., M.Kn., akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0117049.AH.01.09 TH.2013 tanggal 6 Desember 2013.

of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No.AHU-10946AH.01.01 TH.2013 on March 6, 2013.

On March 22, 2021, based on Deed No. 13 by Notary TB Afifi, S.H., M.Kn., BHE increased the paid-up capital from Rp34,000,000,000 to Rp60,000,000,000 which was entirely subscribed by BE so that the percentage of ownership of BE in BHE becomes 99.95%.

On November 22,2021, based on Deed No.14 by Notary Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., BHE increased issued the paid-up capital from Rp60,000,000,000 to Rp90,000,000,000. The deed has been received and recorded in the administrative system of legal entities and the Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with Letter No. AHU-AH.01.03-0495281 January 14, 2022. So that the percentage of ownership of BE in BHE becomes 99.97%.

BHE start to operate PLTM Padang Guci 2 since December 13, 2021.

PT Perjaya Bravo Energi (PBE)

PT Perjaya Brafo Energi (PBE) was established based on the Establishment Deed No. 55 on December 22, 2011 by Notary Zainuddin Thohir, S.H., the deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-01271.AH.01.01 TH.2012 on January 9, 2012.

On January 30, 2019, PBE decreased the paid up capital from Rp21,000,000,000 to Rp2,400,000,000 so that the percentage of ownership of BE in PBE becomes 90%.

PT Minahasa Brantas Energi (MBE)

PT Minahasa Brantas Energi was established based on the establishment deed No. 7 November 25, 2013 by Notary Retno Santi Prasetyati,S.H. M.Kn., the deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No.AHU-0117049.AH.01.09 TH.2013 on December 6, 2013.

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Pada tanggal 27 Desember 2019, PT Minahasa Brantas Energi telah meningkatkan modal dasar dari Rp17.000.000.000 menjadi Rp23.000.000.000, sehingga persentase kepemilikan Perusahaan pada PT Minahasa Brantas Energi menjadi 99,996%.

In December 27, 2019, PT Minahasa Brantas Energi increased the paid up capital from Rp17,000,000,000 to Rp23,000,000,000, so that the percentage of ownership of Company in PT Minahasa Brantas Energi becomes 99,996%.

Pada tanggal 18 Juli 2023 Berdasarkan Akta notaris No. 36 tanggal oleh Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., para pemegang saham menyetujui meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp23.000.000.000 menjadi sebesar Rp31.000.000.000 yang terbagi atas 31.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham.

On July 18, 2023, based on Deed No. 36 dated by Notary Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., the shareholders agreed to increase the issued and paid-up capital from the original Rp23,000,000,000 to Rp31,000,000,000, divided into 31,000 shares with a nominal value amounting to Rp1,000,000 per share

PT Abipraya Nusantara Energi (ANE)

PT Abipraya Nusantara Energi (ANE)

PT Abipraya Nusantara Energi didirikan berdasarkan Akta Notaris H. Deny Adam Hakim, S.H., M.Kn., No. 3 tanggal 11 Juli 2014 akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17622.40.10.2014 tanggal 15 Juli 2014.

PT Abipraya Nusantara Energi was established based on the establishment deed No. 3 July 11, 2014 by Notary H. Deny Adam, S.H. M.Kn., the deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No.AHU-17622.40.10.2014 on July 15, 2014.

Pada tanggal 30 Januari 2019, PT Abipraya Nusantara Energi telah menurunkan modal dasar dari Rp15.000.000.000 menjadi Rp4.000.000.000, sehingga persentase kepemilikan PT Brantas Energi pada PT Abipraya Nusantara Energi menjadi 92,5%.

In January 30, 2019, PT Abipraya Nusantara Energi decreased the paid up capital from Rp15,000,000,000 to Rp4,000,000,000 which was entirely subscribed by PT Brantas Energi so that the percentage of ownership of PT Brantas Energi in PT Abipraya Nusantara Energi becomes 92,5%.

PT Brantas Mahalona Energi (BME)

PT Brantas Mahalona Energi (BME)

PT Brantas Mahalona Energi (BME) didirikan berdasarkan Akta Notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.Kn., No. 01 tanggal 21 Juli 2014. Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-21999.40.10.2014 tanggal 26 Agustus 2014.

PT Brantas Mahalona Energi (BME) was established based on the establishment deed No. 01 dated July 21, 2014 by Notary Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H. M.Kn., the deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No.AHU-21999.40.10.2014, on August 26, 2014.

Pada tanggal 16 April 2021 berdasarkan akta No. 20 oleh Notaris Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., BME meningkatkan modal dasar dari Rp320.000.000 menjadi Rp20.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp80.000.000 menjadi Rp5.000.000.000 sehingga persentase kepemilikan BE pada BME menjadi 99,98%.

On April 16, 2021, based on Deed No. 20 by Notary Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., BME increased authorized capital from Rp320,000,000 to Rp20,000,000,000 and issued the paid-up capital from Rp80,000,000 to Rp5,000,000,000 so that the percentage of ownership of BE in BME becomes 99.98%.

Pada tanggal 30 November 2021 berdasarkan Akta No.32 oleh Notaris Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., BME meningkatkan modal

On November 30, 2021, based on Deed No.32 by Notary Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., BME Decreased issued the paid-up capital

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

ditempatkan dan disetor dari Rp5.000.000.000 menjadi Rp8.000.000.000.

from Rp5,000,000,000 to Rp8,000,000,000.

PT Brantas Energi Mandiri (BEM)

PT Brantas Energi Mandiri (BEM)

PT Brantas Energi Mandiri didirikan berdasarkan akta pendirian No. 03 tanggal 8 Agustus 2014 notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.Kn., akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-22002.40.10.2014, tanggal 26 Agustus 2014.

PT Brantas Energi Mandiri was established based on the establishment deed No. 3 August 8, 2014 by Notary Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H. M.Kn., the deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No.AHU-22002.40.10.2014, on August 26, 2014.

Pada tanggal 30 Januari 2019, PT Brantas Energi Mandiri telah menurunkan modal dasar dari Rp12.000.000.000 menjadi Rp10.000.000.000, sehingga persentase kepemilikan PT Brantas Energi pada PT Brantas Energi Mandiri menjadi 83%.

In January 30, 2019, PT Brantas Energi Mandiri decreased the paid up capital from Rp12,000,000,000 to Rp10,000,000,000 which was entirely subscribed PT Brantas Energi so that the percentage of ownership of PT Brantas Energi in PT Brantas Energi Mandiri becomes 83%.

Pada tanggal 22 November 2021 berdasarkan Akta No.19 oleh Notaris Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., BEM meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp2.500.000.000 menjadi Rp3.000.000.000. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat No.AHU-AH.01.03-0495290 Tanggal 17 Januari 2022. Sehingga persentase kepemilikan BE pada BEM menjadi 85,83%.

On November 22, 2021, based on Deed No.19 by Notary Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., BME increased issued the paid-up capital from Rp2,500,000,000 to Rp3,000,000,000. The deed has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with Letter No. AHU-AH.01.03-0495290 Dated January 17, 2022. So that the percentage of ownership of BE in BEM becomes 85.83%.

PT Brantas Total Energi (BTE)

PT Brantas Total Energi (BTE)

PT Brantas Total Energi didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Sabrina, S.H., No. 33 tanggal 21 Juli 2014. Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-20518.40.10.2014, tanggal 14 Agustus 2014.

PT Brantas Total Energi was established based on the establishment deed No. 33 July 21, 2014 by Notary Sabrina, S.H., the deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No.AHU-20518.40.10.2014, on August 14, 2014.

Pada tanggal 29 Maret 2021 berdasarkan akta No. 21 oleh Notaris TB Afifi, S.H., M.Kn., BTE meningkatkan modal dasar dari Rp804.000.000 menjadi Rp16.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp201.000.000 menjadi Rp4.000.000.000 Sehingga persentase kepemilikan BE pada BTE menjadi 99,98%.

On March 29, 2021, based on Deed No. 21 by Notary Riza Endriyana, S.H., MH., M.Kn., BTE increased authorized capital from Rp804,000,000 to Rp16,000,000,000 and issued the paid-up capital from Rp201,000,000 to Rp4,000,000,000 so that the percentage of ownership of BE in BTE becomes 99.98%.

Pada tanggal 22 November 2021 berdasarkan Akta No.21 oleh Notaris Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., BTE meningkatkan modal dasar dari Rp16.000.000.000 menjadi Rp51.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor Rp4.000.000.000 menjadi

On November 22, 2021, based on Deed No.21 by Notary Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., BTE increased authorized capital from Rp16,000,000,000 to Rp51,000,000,000 and issued the paid-up capital from Rp4,000,000,000 to Rp51,000,000,000. The deed has obtained

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Rp51.000.000.000. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Berdasarkan Surat keputusan No. AHU-000077840.AH.01.02 TH.2021 tanggal 14 Januari 2022. Sehingga persentase kepemilikan BE pada BTE menjadi 99,98%.

approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. AHU-000077840.AH.01.02 TH.2021 dated January 14, 2022. So that the percentage of ownership of BE in BTE becomes 99.98%.

PT Limbong Hidro Energi (LHE)

PT Limbong Hidro Energi (LHE)

PT Limbong Hidro Energi didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris H. Deny Adam Hakim, S.H., M.Kn., No. 3 tanggal 11 September 2014. Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-25605.40.10.2014 pada tanggal 19 September 2014.

PT Limbong Hidro Energi was established based on the establishment deed No. 3 September 11, 2014 by Notary H. Deny Adam, S.H. M.Kn., the deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No.AHU-25605.40.10.2014 on September 19, 2014.

Pada tanggal 30 Januari 2019, PT Limbong Hidro Energi telah menurunkan modal dasar dari Rp12.000.000.000 menjadi Rp3.000.000.000, sehingga persentase kepemilikan PT Brantas Energi pada PT Limbong Hidro Energi menjadi 93%.

In January 30, 2019, PT Limbong Hidro Energi decreased the paid up capital from Rp12,000,000,000 to Rp3,000,000,000 which was entirely subscribed by PT Brantas Energi so that the percentage of ownership of PT Brantas Energi in PT Limbong Hidro Energi becomes 93%.

PT Tiar Daya Hidro (TDH)

PT Tiar Daya Hidro (TDH)

PT Tiar Daya Hidro didirikan berdasarkan akta pendirian No. 12 tanggal 25 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Handoyo, S.H., M.Kn., akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-52392.AH.01.01.Tahun 2011 pada tanggal 27 Oktober 2011.

PT Tiar Daya Hidro was established based on the establishment deed No. 12 February 25, 2011 by Notary Handoyo, S.H. M.Kn., the deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No.AHU-52392.AH.01.01 TH 2011 on October 27, 2011.

Pada tanggal 30 Januari 2019, PT Tiar Daya Hidro telah menurunkan modal dasar dari Rp36.360.000.000 menjadi Rp33.360.000.000, sehingga persentase kepemilikan PT Brantas Energi pada PT Tiar Daya Hidro menjadi 70,02%.

In January 30, 2019, PT Tiar Daya Hidro decreased the paid up capital from Rp36,360,000,000 to Rp33,360,000,000 which was entirely subscribed by PT Brantas Energi so that the percentage of ownership of PT Brantas Energi in PT Tiar Daya Hidro becomes 70,02%.

PT Brantas Prospek Mandiri (BPM)

PT Brantas Prospek Mandiri (BPM)

PT Brantas Prospek Mandiri didirikan berdasarkan akta pendirian No. 01 tanggal 8 Agustus 2014 notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.Kn., akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-22000.40.10.2014 pada tanggal 26 Agustus 2014.

PT Brantas Prospek Mandiri was established based on the establishment deed No. 1 August 8, 2014 by Notary Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H. M.Kn., the deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No.AHU-22000.40.10.2014, on August 26, 2014.

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Pada tanggal 31 Maret 2021 berdasarkan Akta No. 35 oleh Notaris Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., BPM meningkatkan modal dasar dari Rp120.000.000 menjadi Rp20.000.000.000, dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp30.000.000 menjadi Rp5.000.000.000, sehingga persentase kepemilikan BE pada BPM menjadi 99,98%.

On March 31, 2021, based on Deed No. 35 by Notary Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., BPM increased authorized capital from Rp120,000,000 to Rp20,000,000,000 and issued the paid-up capital from Rp30,000,000 to Rp5,000,000,000 so that the percentage of ownership of BE in BPM becomes 99.98%.

Pada tanggal 30 November 2021 berdasarkan Akta No.31 oleh Notaris Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., BPM meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp5.000.000.000 menjadi Rp8.000.000.000, sehingga persentase kepemilikan BE pada BPM menjadi 99,99%. Akta Tersebut Telah diterima dan dicatat dalam system Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sesuai Surat No. AHA-AH.01.03-0495283 Tanggal 14 Januari 2022.

On November 30, 2021, based on Deed No.31 by Notary Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., BPM increased issued the paid-up capital from Rp5,000,000,000 to Rp8,000,000,000 so that the percentage of ownership of BE in BPM becomes 99.99%. The deed has been received and recorded in the system of Administration of Legal Entities and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with Letter No. AHA-AH.01.03- 0495283 January 14, 2022.

PT Gadang Hidro Energi (GHE)

PT Gadang Hidro Energi (GHE)

PT Gadang Hidro Energi didirikan berdasarkan akta pendirian No. 2 tanggal 3 Juni 2015 Notaris Virly Yusrini, S.H., M.Kn., akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2443308.AH.01.01.Tahun 2015 pada tanggal 12 Juni 2015.

PT Gadang Hidro Energi was established based on the establishment deed No. 02 June 3, 2015 by Notary Virly Yusrini, S.H. M.Kn., the deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No.AHU-2443308.AH.01.01 TH.2015 on June 12, 2015.

Pada tanggal 30 Januari 2019, PT Gadang Hidro Energi telah menurunkan modal dasar dari Rp12.000.000.000 menjadi Rp2.920.000.000, sehingga persentase kepemilikan PT Brantas Energi pada PT Gadang Hidro Energi menjadi 98,97%.

In January 30, 2019, PT Gadang Hidro Energi decreased the paid up capital from Rp12,000,000,000 to Rp2,920,000,000 which was entirely subscribed by PT Brantas Energi so that the percentage of ownership of PT Brantas Energi in PT Gadang Hidro Energi becomes 98,97%.

PT Rantepao Hidro Energi (RHE)

PT Rantepao Hidro Energi (RHE)

PT Rantepao Hidro Energi didirikan berdasarkan akta pendirian No. 10 tanggal 18 Juni 2015 notaris Virly Yusrini, S.H., M.Kn., Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2444703.AH.01.01. Tahun 2015 pada tanggal 22 Juni 2015.

PT Rantepao Hidro Energi was established based on the establishment deed No. 10 June 18, 2015 by Notary Virly Yusrini, S.H. M.Kn., the deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No.AHU-2444703.AH.01.01. TH 2015 on June 22, 2015.

Pada tanggal 30 Januari 2019, PT Rantepao Hidro Energi telah menurunkan modal dasar dari Rp12.000.000.000 menjadi Rp100.000.000, sehingga persentase kepemilikan PT Brantas Energi pada PT Rantepao Hidro Energi menjadi 80%.

In January 30, 2019, PT Rantepao Hidro Energi decreased the paid up capital from Rp12,000,000,000 to Rp100,000,000 which was entirely subscribed by PT Brantas Energi so that the percentage of ownership of PT Brantas Energi in PT Rantepao Hidro Energi becomes 80%.

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

Pada tanggal 22 November 2021, berdasarkan Akta No.16 oleh Notaris Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., RHE meningkatkan modal dasar dari Rp100.000.000 menjadi Rp1.000.000.000. Akta tersebut telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Berdasarkan Surat keputusan No. AHU-0077842.AH.01.02 Tahun 2021 Tanggal 14 Januari 2022. Sehingga persentase kepemilikan BE pada RHE menjadi 98%.

PT Brantas Prospek Enjiniring (BPEnj)

PT Brantas Prospek Enjiniring didirikan berdasarkan akta pendirian No. 02 tanggal 8 Agustus 2014 notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi S.H., M.Kn., akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-21998.40.10.2014 pada tanggal 26 Agustus 2014.

Pada tanggal 30 Januari 2019, PT Brantas Prospek Enjiniring telah menurunkan modal dasar dari Rp12.000.000.000 menjadi Rp3.000.000.000, sehingga persentase kepemilikan PT Brantas Energi pada PT Brantas Prospek Enjiniring menjadi 93%.

Pada tanggal 22 November 2021, berdasarkan Akta No. 18 oleh Notaris Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., BPEnj meningkatkan modal dasar dari Rp3.000.000.000 menjadi Rp4.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp3.000.000.000 menjadi Rp3.210.000.000. Akta tersebut telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Berdasarkan Surat keputusan No. 0077845.AH.01.02 Tahun 2021 Tanggal 17 Januari 2022. Sehingga persentase kepemilikan BE pada BPEnj menjadi 93,46%.

PT Graha Investama Bersama (GIB)

PT Graha Investama Bersama (Perusahaan) didirikan berdasarkan akta notaris No. 5 dari Apsari Sri Ekowati, S.H., tanggal 6 Desember 2012. Akta pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-19884.AH.01.01 tanggal 16 April 2013.

Pada tahun 2019 PT GIB melakukan peningkatan modal dasar melalui konversi utang PT BE sebesar Rp93.601.000.000 berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham

On November 22, 2021, based on Deed No.16 by Notary Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., RHE increased issued the paid-up capital from Rp100,000,000 to Rp1,000,000,000. The Deed has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Based on Decree No. AHU-0077842.AH.01.02 TH.2021 Dated January 14, 2022. So that the percentage of ownership of BE in RHE becomes 98%.

PT Brantas Prospek Enjiniring (BPEnj)

PT Brantas Prospek Enjiniring was established based on the establishment deed No. 2 August 8, 2014 by Notary Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H. M.Kn., the deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No.AHU-21998.40.10.2014, on August 26, 2014.

In January 30, 2019, PT Brantas Prospek Enjiniring decreased the paid up capital from Rp12,000,000,000 to Rp3,000,000,000 which was entirely subscribed by PT Brantas Energi so that the percentage of ownership of PT Brantas Energi in PT Brantas Prospek Enjiniring becomes 93%.

On November 22, 2021, based on Deed No.18 by Notary Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., BPEnj increased authorized capital from Rp3,000,000,000 to Rp4,000,000,000 and issued the paid-up capital from Rp3,000,000,000 to Rp3,210,000,000. The Deed has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Based on Decree No. 0077845.AH.01.02 TH.2021 January 17, 2022. So that the percentage of ownership of BE in BPEnj becomes 93.46%.

PT Graha Investama Bersama (GIB)

PT Graha Investama Bersama (the Company) was established based on notarial deed No. 5 of Apsari Sri Ekowati, S.H., dated December 6, 2012. The Establishment deed was approved by Minister of Justice and Human Rights in his decree No. AHU-19884.AH.01.01 dated April 16, 2013.

On 2019 PT GIB conduct an increase in authorized capital through debt conversion of PT BE as of Rp93,01,000,000 based on the deed of Shareholders Declaration Outside The

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 103 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Charles Hermawan, S.H., Notaris di Tangerang, sehingga modal dasar Perusahaan dari semula sebesar Rp60.000.000.000 menjadi sebesar Rp300.000.000.000 dan persentase kepemilikan PT BE pada PT Graha Investama Bersama menjadi 89,92%.

BE mengakuisisi GIB pada 17 Juni 2019. GIB memulai operasi sejak didirikan Desember 2012.

PT Guna Rogate Indah (GRI)

PT Guna Rogate Indah (GRI) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 71 oleh Rusnaldy, S.H., tanggal 19 November 2015 Akta pendirian tersebut telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHAU-2471943.AH.01.01.TH.2015 tanggal 8 Desember 2015.

Pada tanggal 30 Oktober 2019 Berdasarkan Akta No.106 oleh Notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi, SH., M.Kn., PT Guna Rogate Indah (GRI) meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari Rp2.500.000.000, menjadi Rp2.800.000.000. sehingga persentase kepemilikan BE pada GRI menjadi 89,29%.

GRI memulai operasi sejak didirikan November 2015.

PT Buana Enjiniring Konsultan (BEK)

PT Buana Enjiniring Konsultan ("Perusahaan") didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Virly Yusrini, S.H., M.Kn., No. 1 tanggal 3 Juli 2015. Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2447076.AH.01.11. Tahun 2015 pada tanggal 6 Juli 2015.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir sesuai dengan akta No. 10 Tanggal 8 Maret 2022 notaris Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., tentang Perubahan anggaran dasar Perusahaan. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0025849.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 April 2022.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, Perusahaan bergerak dibidang usaha bidang teknik engineering, perencanaan dan pengawasan pembangunan, jasa

Extraordinary General Meeting Of Shareholders No. 103 dated May 20, 2019 by Charles Hermawan, S.H., Notary in Tangerang, so that the Company's authorized capital from Rp60,000,000,000 to Rp300,000,000,000 and percentage of ownership of PT BE in PT Graha Investama Bersama becomes 89.92%.

BE acquired GIB on June 17, 2019. GIB started operation since establishment on December 2012.

PT Guna Rogate Indah (GRI)

PT Guna Rogate Indah (GRI) was established based on Notarial Deed No. 71 by Rusnaldy, S.H., dated November 19, 2015, The Establishment deed was approved by Minister of Justice and Human Rights in his decree No. AHAU-2571943.AH.01.01. TH.2015 dated December 8, 2015.

On October 30, 2019, based on Deed No. 106 by Notary Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.Kn., Based on the Deed No.106 PT Guna Rogate Indah (GRI) increased the paid-up capital from Rp2,500,000,000 become Rp2,800,000,000. so that the percentage of ownership of BE in GRI becomes 89.29%.

GRI started operation since establishment on November 2015.

PT Buana Enjiniring Konsultan (BEK)

PT Buana Enjiniring Konsultan ("Company") was established in Jakarta based on Deed of Notary Virly Yusrini, S.H., M.Kn., No. 1 dated July 3, 2015. The establishment deed was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU- 2447076.AH.01.11. 2015 on July 6, 2015.

The Company's Articles of Association have been amended several times and the latest was in accordance with deed No. 10 dated March 8, 2022 notary Agus Sumardi, S.H., SE, M.Kn., concerning Amendments to the Company's articles of association. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. AHU-0025849.AH.01.02.TAHUN 2022 dated April 10, 2022.

In accordance with article 3 of the Articles of Association, the Company is engaged in business in the fields of engineering technique, development planning and supervision,

(Lanjutan/Continued)

penyelenggara usaha teknik, manajemen dan administrasi engineering, konsultasi bidang listrik (electrical) serta konsultan bidang design.

engineering business management and administration services, electrical consulting and design consulting.

BEK mulai beroperasi sejak 2016.

BEK started operation since 2016.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) AND INTERPRETATIONS OF PSAK (ISAK)

Perubahan atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK)

Standar akuntansi revisian berikut, yang relevan untuk Grup, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 dan tidak memiliki pengaruh material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup:

The following revised accounting standards, which are relevant to the Group, are effective from January 1, 2023 and do not result in material impact to the Group's consolidated financial statements:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material;
- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas;
- Amendemen PSAK 16: "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- Amendemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi, Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi "estimasi akuntansi" dan penjelasannya;
- Amendemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tanggahan, terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal yang diadopsi dari Amendemen IAS 12 *Income Taxes* tentang *Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*.

- *Amendment to PSAK 1: "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of accounting policies that change the term "significant" to "material" and provide an explanation of material accounting policies;*
- *Amendment to PSAK 1: "Presentation of Financial Statements" regarding the classification of liabilities;*
- *Amendment to PSAK 16: "Fixed Assets" regarding results before intended use;*
- *Amendment to PSAK 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" regarding the definition of "accounting estimates" and explanations;*
- *Amendment to PSAK 46 "Income Taxes" regarding Deferred Tax, related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction adopted from Amendment to IAS 12 Income Taxes concerning Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction.*

Standar akuntansi revisian berikut yang telah diterbitkan dan relevan untuk Grup berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 dan belum diterapkan secara dini oleh Grup:

The following revised accounting standards issued and relevant to the Group are effective from January 1, 2024 and have not been early adopted by the Group:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar;
- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan; dan
- Amendemen PSAK 73: "Sewa" tentang liabilitas sewa pada transaksi jual beli dan sewa-balik.

- *Amendment to PSAK 1 "Presentation of Financial Statements" about the classification of liabilities as current or non-current;*
- *Amendment to PSAK 1: "Presentation of Financial Statements" about non-current liabilities with covenants; and*
- *Amendment to PSAK 73 "Leases" about lease liability in a sales and leaseback.*

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025.

Effective for periods beginning on or after January 1, 2025.

(Lanjutan/Continued)

- PSAK 74 (amendemen) Kontrak Asuransi.

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan konsolidasian, Grup sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar-standar tersebut, terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan Grup disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS - IAI), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. VIII.G.7 mengenai Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali properti dan instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasi atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran, terlepas dari apakah harga tersebut dapat diamati secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengestimasi nilai wajar dari suatu aset atau liabilitas, Grup memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Nilai wajar untuk tujuan pengukuran dan/atau pengungkapan pada laporan keuangan konsolidasian ditentukan atas dasar tersebut, kecuali untuk transaksi

- PSAK 74 (amendment) Insurance Contract.

As at the authorisation date of these consolidated financial statements, the Group is assessing the implication of the above standards, to the Group's consolidated financial statements.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Statement of compliance

The financial statements of the Group has been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board - Indonesian Institute of Accountant (DSAK - IAI) and Islamic Accounting Standard Board - Indonesian Institute of Accountant (DSAS - IAI), and Regulations of Financial Services Authority (OJK) No. VIII.G.7 regarding the Presentations and Disclosures of the Financial Statements of Listed Entities.

b. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements has been prepared on the historical cost basis except for certain properties and financial instruments that are measured at revalued amounts or fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Group takes into account the characteristics of the asset or liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date. Fair value for measurement and/or disclosure purposes in these consolidated financial statements is determined on such a basis, except for share-based payment transactions that are within the scope of PSAK 53 Share-based Payment, leasing transactions that are

(Lanjutan/Continued)

pembayaran berbasis saham yang merupakan ruang lingkup PSAK 53 Pembayaran Berbasis Saham, transaksi sewa yang merupakan ruang lingkup PSAK 73, dan pengukuran yang memiliki kemiripan dengan nilai wajar namun bukan merupakan nilai wajar, seperti nilai realisasi bersih dalam PSAK 14 Persediaan atau nilai pakai dalam PSAK 48.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Dasar konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas (termasuk entitas terstruktur) yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak. Pengendalian tercapai jika Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*, eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah entitas tersebut adalah *investee* jika fakta dan keadaan yang mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

Ketika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari mayoritas di *investee*, ia memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola suara pemilihan dalam RUPS sebelumnya.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada

within the scope of PSAK 73, and measurements that have some similarities to fair value but are not fair value, such as net realizable value in PSAK 14 Inventories or value in use in PSAK 48.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Basis of consolidated

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries. Control is achieved where the Company has the power over the investee, is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee, and has the ability to use its power to affect its returns.

The Company reassesses whether the entity is in fact an investee when facts and circumstances indicate that there has been changes to one or more of the three control elements mentioned above.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee, when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders' meetings.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti mengendalikan entitas anak.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra Grup, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam Grup dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasi.

Kepentingan non pengendali di entitas anak diidentifikasi secara terpisah dari ekuitas Grup yang ada. Kepentingan pemegang saham non pengendali yang merupakan kepentingan kepemilikan yang memberikan pemiliknya hak terhadap bagian proporsional aset bersih pada saat likuidasi pada awalnya dapat diukur sebesar nilai wajar atau bagian proporsional kepentingan non pengendali atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat untuk masing-masing akuisisi. Kepentingan non pengendali lain awalnya diukur sebesar nilai wajar. Setelah akuisisi, jumlah tercatat kepentingan non pengendali adalah jumlah kepentingan tersebut pada pengakuan awal ditambah bagian kepentingan non pengendali dari perubahan selanjutnya di ekuitas.

Laba atau rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non pengendali. Jumlah penghasilan komprehensif entitas anak diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non pengendali memiliki saldo defisit.

Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Grup atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan non pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan non pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan dengan pemilik entitas induk.

expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

When necessary, adjustment are made to the financial statements of subsidiary to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

All assets and liabilities in intra Group, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions in the Group are eliminated in full on consolidation.

Non-controlling interests in subsidiaries are identified separately from the Group's equity therein. Those interests of non-controlling stockholders that are present ownership interests entitling their holders to a proportionate share of net assets upon liquidation may initially be measured at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the fair value of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement is made on an acquisition-by-acquisition basis. Other non-controlling interests are initially measured at fair value. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interests is the amount of those interests at initial recognition plus the non-controlling interests' share of subsequent changes in equity.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interest. Total comprehensive income of subsidiary is attributed to the owners of the Company and the non-controlling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance.

Changes in the Group's ownership interest in existing subsidiary that do not result in the Group losing control over the subsidiary are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiary. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

(Lanjutan/Continued)

Ketika Grup kehilangan pengendalian pada entitas anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan (*retained interest*) dan (ii) jumlah tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill), dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan non pengendali. Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak yang dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan/diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK 71, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran atau, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

d. Kombinasi bisnis

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar, kecuali untuk:

- Aset atau liabilitas pajak tangguhan yang berkaitan dengan pengaturan imbalan kerja diakui dan diukur masing-masing berdasarkan PSAK 46 Pajak Penghasilan dan PSAK 24 Imbalan Kerja;
- Instrumen liabilitas atau ekuitas yang berkaitan dengan perjanjian pembayaran berbasis saham dari pihak yang diakuisisi atau pengaturan pembayaran berbasis saham Grup yang dibuat untuk menggantikan pengaturan pembayaran berbasis saham dari pihak yang mengakuisisi diukur berdasarkan PSAK 53

When the Group loses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/permitted by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 71, Financial Instruments: Recognition and Measurement or, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a joint venture.

d. Business combination

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value, except that:

- *Deferred tax assets or liabilities and assets or liabilities related to employee benefit arrangements are recognized and measured in accordance with PSAK 46 Income Taxes and PSAK 24 Employee Benefits, respectively;*
- *Liabilities or equity instruments related to share-based payment arrangements of the acquiree or share-based payment arrangements of the Group entered into to replace share-based payment arrangements of the acquirer are measured in accordance with PSAK 53 Share-based Payments at the acquisition date; and*

(Lanjutan/Continued)

Pembayaran Berbasis Saham pada tanggal akuisisi; dan

- Aset (atau kelompok lepasan) yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual berdasarkan PSAK 58 Aset tidak Lancar yang dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan diukur sesuai dengan standar tersebut.

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih tersebut diakui segera dalam laba rugi sebagai keuntungan pembelian dengan diskon.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Grup dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration arrangement*), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis.

Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap goodwill. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

Perlakuan akuntansi selanjutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjensi diklasifikasikan. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada setiap tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi lain diukur ulang ke

- *Assets (or disposal groups) that are classified as held for sale in accordance with PSAK 58 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations and are measured in accordance with that standard.*

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed. If, after the reassessment, the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a gain from bargain purchase.

When the consideration transferred by the Group in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination.

Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. Other contingent consideration is remeasured to fair value at subsequent reporting dates with

(Lanjutan/Continued)

nilai wajar pada tanggal pelaporan selanjutnya dengan perubahan nilai wajar diakui di laba rugi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup (termasuk operasi bersama) atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugian dihasilkan, jika ada, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai jika kepemilikan tersebut dilepas/dijual.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

e. Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan dimana aset dan liabilitas yang diperoleh dari kombinasi bisnis dicatat oleh pengakuisisi pada jumlah tercatatnya.

Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat disajikan sebagai tambahan modal disetor dan tidak direklasifikasi ke laba rugi ketika hilang sepengendalian.

Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas telah bergabung sejak periode dimana entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

f. Transaksi dan penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing

Grup menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah. Saldo dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs penutup.

changes in fair value recognized in profit or loss.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest (including joint operations) in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate if that interests were disposed/sold of.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

e. Business combination under common control

Business combination of entities under common control that qualifies as a business are accounted for under pooling of interest method where assets and liabilities acquired in the business combination are recorded by the acquirer at their book values.

The difference between the transfer price and the book value is presented as additional paid in capital and not reclassified to profit or loss when the control is lost.

The pooling of interest method is applied as if the entities had been combined from the period when the merging entities were placed under common control.

f. Foreign currency transaction and translation of financial statements

The Group maintains its accounting records in Indonesian Rupiah. Balances denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the closing rate.

(Lanjutan/Continued)

Pada setiap tanggal pelaporan, aset, liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Kurs mata uang asing utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

On each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the middle rate published by Bank Indonesia. The main currency rates used are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	15.416	14.269	<i>United States Dollar (USD) 1</i>

Keuntungan atau kerugian dari selisih kurs, yang sudah terealisasi maupun yang belum, baik yang berasal dari transaksi mata uang asing maupun penjabaran aset dan liabilitas moneter dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian.

Realised and unrealised foreign exchange gains or losses arising from transactions in foreign currency and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised in the statements of consolidated income.

g. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

g. Related parties transactions

The Group enters into transactions with related parties as defined in PSAK 7 "Related Parties Disclosures".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

h. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

h. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

1. Aset keuangan

Pengakuan awal

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah pengakuan awal tersebut.

1. Financial assets

Initial recognition

Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest.

Financial assets are classified in the two categories as follows:

- *Financial assets at amortised cost.*
- *Financial assets at Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL) or Other Comprehensive Income (FVOCI).*

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and can not change the classification already made at initial recognition.

(Lanjutan/Continued)

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan pada laba rugi.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu pada tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Aset keuangan Grup meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, piutang pihak berelasi, aset lancar lain-lain, dan aset keuangan tidak lancar lainnya (instrumen keuangan yang memiliki dan tidak memiliki kuotasi harga). Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the assets.

The Group's financial assets include cash and cash equivalents, trade and other receivables, due from related parties, other current assets and other non-current financial assets (quoted and unquoted financial instruments). Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as non-current.

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- *Financial assets at amortized cost.*

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the Effective Interest Rate ("EIR") method, less impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in the profit or loss. The losses arising from impairment are also recognized in the profit or loss.

- *Financial assets at fair value through profit or loss*

Financial assets at fair value through profit or loss are subsequently carried in the statement of financial position at fair value, with changes in fair value recognized in the profit or loss.

(Lanjutan/Continued)

diakui dalam laporan laba rugi.

Grup memiliki investasi dalam instrumen ekuitas, yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

The Group has investments in equity instruments, which are classified as financial asset at fair value through profit and loss.

2. Liabilitas keuangan

2. Financial liabilities

Pengakuan awal

Initial recognition

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

Financial liabilities within the scope of PSAK 71 are classified as follows:

- Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.
- Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

- *Financial assets at amortized cost.*
- *Financial liabilities at Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL) or Other Comprehensive Income (FVOCI).*

Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs.

Liabilitas keuangan Grup meliputi utang usaha, utang pengadaan, akrual, pinjaman dan utang obligasi, utang pihak berelasi, uang muka pelanggan, liabilitas keuangan jangka pendek, dan jangka panjang lain-lain. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

The Group's financial liabilities include trade payables, procurement payable, accruals, loans and bonds payable, due to related parties, deposits from customer, and other current and non-current financial liabilities. Financial liabilities are classified as non current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Subsequent measurement

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi

Financial liabilities at amortized cost

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya amortisasi (misalnya pinjaman dan utang yang dikenakan bunga) selanjutnya diukur dengan menggunakan metode EIR. Amortisasi EIR termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Financial liabilities at amortized cost (e.g interest-bearing loans and borrowings) are subsequently measured using the EIR method. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi EIR.

Gains or losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Sukuk diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait. Perbedaan

Sharia bond is recognized initially at nominal value, adjusted with premium or discount and the related transaction costs

(Lanjutan/Continued)

antara nilai tercatat dan nilai nominal diakui pada laporan laba rugi sebagai beban transaksi sukuk menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu sukuk.

Imbal hasil terkait dibebankan dalam laporan laba rugi sebagai biaya keuangan.

Sukuk, setelah disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi, disajikan sebagai bagian dari liabilitas.

3. Instrumen keuangan disalinghapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan. Hak yang berkekuatan hukum tersebut tidak harus bergantung pada kejadian masa depan dan harus dapat dilaksanakan dalam kegiatan usaha normal dan dalam hal gagal bayar, pailit atau kebangkrutan dari Grup atau pihak lawan.

4. Penurunan nilai dari aset keuangan

Untuk piutang dagang dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan yang diizinkan oleh PSAK 71, yang mensyaratkan kerugian ekspektasian sepanjang umur piutang harus diakui sejak pengakuan awal piutang.

5. Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak kontraktual arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir; atau (2) Grup telah mengalihkan hak kontraktual mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus

incurred. Any differences between carrying amount and nominal value is recognized in the profit or loss as sharia bond transaction costs using the straight-line method during the period of sharia bond.

The related return element is charged to the profit or loss as finance cost.

Sharia bond, adjusted with unamortized premium or discount and transaction costs, is presented as part of liabilities.

3. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Group or the counterparty.

4. Impairment of financial assets

For trade receivables and contract assets without significant financing component, the Group applies the simplified approach permitted by PSAK 71, which requires expected lifetime losses to be recognized from initial recognition of the receivables.

5. Derecognition of financial assets and liabilities

Financial assets

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the contractual rights to the cash flows from the financial assets expire; or (2) the Group has transferred its contractual rights to receive the cash flows of the financial assets or retained the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset, but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients.

(Lanjutan/Continued)

kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut berakhir atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Dalam hal suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas persyaratan dari suatu liabilitas yang ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi.

6. Nilai wajar instrumen keuangan

Grup menilai instrumen keuangan, sebesar nilai wajar pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Grup harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar utamanya bertindak untuk kepentingan ekonomi terbaik mereka.

Pengukuran nilai wajar atas aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar dalam menghasilkan manfaat ekonomi tertinggi dalam penggunaan aset atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut secara maksimal.

Financial liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

6. Fair value of financial instruments

The Group measures financial instruments, at fair value at each statement of financial position date.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset and liability, or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

(Lanjutan/Continued)

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan dimana data memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input relevan yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
- Level 3 - Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran yang tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui sebesar nilai wajar dalam laporan keuangan secara berulang, Grup menentukan apakah terjadi transfer antara Level di dalam hierarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada setiap akhir periode pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Grup telah menentukan kategori aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko dari aset atau liabilitas tersebut, dan level hierarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

Penyesuaian risiko kredit

Grup melakukan penyesuaian harga dalam kondisi pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit di pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang sedang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar liabilitas keuangan, risiko kredit Grup terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- *Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;*
- *Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;*
- *Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

For assets and liabilities that are recognized at fair value in the financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

Credit risk adjustment

The Group adjusts the price in the more advantageous market to reflect any differences in counterparty credit risk between instruments traded in that market and the ones being valued for financial asset positions. In determining the fair value of financial liability positions, the Group's own credit risk associated with the instrument is taken into account.

(Lanjutan/Continued)

i. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas pada bank dan semua deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak dijaminkan (termasuk deposito *on call*) yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya.

j. Deposito berjangka dan rekening koran bank yang dibatasi penggunaannya

Deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan pada saat penempatan namun dijaminkan, atau dibatasi penggunaannya, dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan pada saat penempatannya disajikan sebagai "aset keuangan lancar lainnya". Rekening bank yang dijaminkan atau dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai rekening bank yang dibatasi penggunaannya. Deposito berjangka disajikan sebesar nilai nominal.

k. Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee* tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Ventura bersama adalah pengaturan bersama di mana para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto dari pengaturan tersebut. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan tentang aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 58, Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas

i. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and cash in banks and all deposits which are unrestricted time and not pledge as collateral (including deposits on call) with original maturities of three months or less.

j. Time deposits and restricted cash in banks

Time deposits with a maturity date of three months or less since the date of placement which are used as collateral or are restricted, and time deposits with a maturity date of more than three months since the dates of placement are presented as "other current financial assets". Current bank accounts which are used as collateral or are restricted, are presented as restricted cash in bank. Time deposits are stated at nominal values.

k. Investments in associates and joint ventures

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.

A joint venture is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangements have rights to the net assets of the joint arrangement. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.

The results of operations and assets and liabilities of associates or joint ventures are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method except when the investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with PSAK 58, Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. Under the equity method, an investment in an associate or a joint venture is initially recognized in the consolidated statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Group's share of the profit or loss and other comprehensive income of the

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

asosiasi atau ventura bersama yang terjadi setelah perolehan. Ketika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi atau ventura bersama melebihi kepentingan Grup pada entitas asosiasi atau ventura bersama (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, yang secara substansi, membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam entitas asosiasi atau ventura bersama), Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian selanjutnya. Kerugian selanjutnya diakui hanya apabila Grup mempunyai kewajiban bersifat hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sejak tanggal saat *investee* menjadi entitas asosiasi atau ventura bersama. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Grup atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi dan liabilitas kontingen dari entitas asosiasi atau ventura bersama yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai goodwill. Goodwill termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilainya sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan kepemilikan Grup dari nilai wajar bersih aset yang teridentifikasi dan liabilitas kontingen atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali segera diakui di dalam laba rugi pada periode diperolehnya investasinya.

Persyaratan dalam PSAK 48 Penurunan Nilai Aset ("PSAK 48"), diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Bila diperlukan, jumlah tercatat investasi (termasuk goodwill) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai diakui langsung pada nilai tercatat investasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal saat investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Grup mempertahankan kepemilikan dalam entitas yang sebelumnya merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dan sisa

associate or joint venture. When the Group's share of losses of an associate or a joint venture exceeds the Group's interest in that associate or joint venture (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the associate or joint venture) the Group discontinues recognizing its share of further losses. Subsequent losses are recognized only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate or joint venture.

An investment in an associate or a joint venture is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes an associate or a joint venture. Any excess of the cost of acquisition over the Group's share of the net fair value of identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the associate or a joint venture recognized at the date of acquisition, is recognized as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment. Any excess of the Group's share of the net fair value of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the cost of acquisition, after reassessment, is recognized immediately in profit or loss in the period in which the investment is acquired.

The requirements of PSAK 48 Impairment of Assets ("PSAK 48") are applied to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Group's investment in an associate or a joint venture. When necessary, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with PSAK 48, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with PSAK 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when the investment ceases to be an associate or a joint venture, or when the investment is classified as held for sale. When the Group retains an interest in the former associate or joint venture and the retained interest is a financial asset, the Group measures any retained investment at fair value

(Lanjutan/Continued)

investasi tersebut merupakan aset keuangan, Grup mengukur setiap sisa investasi pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 71. Selisih antara jumlah tercatat pada asosiasi atau ventura bersama pada tanggal metode ekuitas dihentikan, dan nilai wajar dari setiap bunga yang ditahan dan dihasilkan dari pelepasan sebagian kepentingan dalam asosiasi atau ventura bersama termasuk dalam penentuan keuntungan atau kerugian pada pelepasan asosiasi atau ventura bersama.

Selanjutnya, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika entitas asosiasi atau ventura bersama telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait. Seluruh jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama direklasifikasi ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) pada saat penghentian metode ekuitas.

Grup melanjutkan penerapan metode ekuitas jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada ventura bersama atau investasi pada ventura bersama menjadi investasi pada entitas asosiasi. Tidak terdapat pengukuran kembali ke nilai wajar pada saat perubahan kepentingan.

Jika Grup mengurangi bagian kepemilikan pada entitas asosiasi atau ventura bersama tetapi Grup tetap menerapkan metode ekuitas, Grup mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan (jika keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait).

Ketika Grup melakukan transaksi dengan entitas asosiasi atau ventura bersama, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi atau ventura bersama diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sepanjang kepemilikan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama yang tidak terkait dengan Grup.

Grup menerapkan PSAK 71, termasuk persyaratan penurunan nilai, untuk kepentingan jangka panjang dalam entitas asosiasi atau ventura bersama ketika metode ekuitas tidak

at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognition in accordance with PSAK 71. The difference between the carrying amount of the associate or joint venture at the date the equity method was discontinued, and the fair value of any retained interest and any proceeds from disposing of a part of interest in the associate or joint venture is included in the determination of the gain or loss on disposal of the associate or joint venture.

In addition, the Group recorded for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that associate or joint venture on the same basis as would be required if that associate or joint venture had directly disposed of the related assets or liabilities. Therefore, if a gain or loss previously recognized in other comprehensive income by that associate or joint venture would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities, the Group reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when the equity method is discontinued.

The Group continues to use the equity method when an investment in an associate becomes an investment in a joint venture or an investment in a joint venture becomes an investment in an associate. There is no remeasurement to fair value upon such changes in ownership interests.

When the Group reduces its ownership interest in an associate or a joint venture but the Group continues to use the equity method, the Group reclassifies to profit or loss the proportion of the gain or loss that had previously been recognized in other comprehensive income relating to that reduction in ownership interest (if that gain or loss would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities).

When a Group transacts with an associate entity or a joint venture, profits and losses resulting from the transactions with the associate or joint venture are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of its interest in the associate or joint venture that are not related to the Group.

The Group applies PSAK 71, including the impairment requirements, to long-term interests in an associate or joint venture to which the equity method is not applied and which form

(Lanjutan/Continued)

diterapkan dan yang merupakan bagian dari investasi neto pada *investee*.

Selanjutnya, dalam menerapkan PSAK 71 untuk kepentingan jangka panjang, Grup tidak memperhitungkan penyesuaian nilai tercatat yang disyaratkan oleh PSAK 15 (misalnya, penyesuaian nilai tercatat kepentingan jangka panjang yang timbul dari alokasi kerugian *investee* atau penilaian penurunan nilai berdasarkan PSAK 15).

I. Kepemilikan dalam Operasi Bersama

Operasi bersama adalah pengaturan bersama dimana para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan tersebut. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Ketika entitas Grup melakukan kegiatan berdasarkan operasi bersama, Grup sebagai operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

- Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
- Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
- Pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;
- Bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan
- Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama.

Grup mencatat aset, liabilitas, pendapatan dan beban terkait dengan kepemilikannya dalam operasi bersama sesuai dengan PSAK yang berlaku untuk aset, liabilitas, pendapatan dan beban tersebut.

Ketika entitas grup melakukan transaksi dengan operasi bersama di mana entitas Grup tersebut bertindak sebagai salah satu operator bersamanya (seperti penjualan atau kontribusi aset), Grup melakukan transaksi dengan pihak lain dalam operasi bersama, dengan demikian, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian Grup tersebut hanya sebatas kepentingan para pihak lain dalam operasi bersama.

part of the net investment in the investee.

Furthermore, in applying PSAK 71 to long-term interests, the Group does not take into account adjustments to their carrying amount required by PSAK 15 (i.e. adjustments to the carrying amount of long-term interests arising from the allocation of losses of the investee or assessment of impairment in accordance with PSAK 15).

I. Interests in Joint Operations

A joint operation is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangements, which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.

When a group entity undertakes its activities under joint operations, the Group as a joint operator recognizes in relation to its interest in a joint operation:

- *Its assets, including its share of any assets held jointly;*
- *Its liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly;*
- *Its revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation;*
- *Its revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation;*
- *Its expenses, including its share of any expenses incurred jointly.*

The Group accounts for the assets, liabilities, revenues and expenses relating to its interest in a joint operation in accordance with the PSAK that applicable to the particular assets, liabilities, revenues and expenses.

When a group entity transacts with a joint operation in which a group entity is a joint operator (such as a sale or contribution of assets), the Group is considered to be conducting the transaction with the other parties to the joint operation, and gains and losses resulting from the transactions are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of other parties' interests in the joint operation.

(Lanjutan/Continued)

Ketika entitas grup melakukan transaksi dengan operasi bersama di mana entitas grup tersebut bertindak sebagai salah satu operator bersamanya (seperti pembelian aset), Grup tidak mengakui bagian keuntungan dan kerugiannya sampai Grup menjual kembali aset tersebut kepada pihak ketiga.

When a group entity transacts with a joint operation in which a group entity is a joint operator (such as a purchase of assets), the Group does not recognize its share of the gains and losses until it resells those assets to a third party.

m. Piutang usaha

Pada saat pengakuan awal piutang usaha diakui sebesar nilai wajarnya dan selanjutnya diukur pada nilai yang diamortisasi setelah dikurangi dengan cadangan penurunan nilai piutang. Piutang dihapusbukukan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih.

m. Trade receivables

Trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortised cost less provision for receivables impairment. Accounts are written-off in the period during which they are determined to be not collectible.

n. Piutang retensi

Piutang retensi merupakan piutang kepada pemberi kerja yang akan dilunasi oleh pemberi kerja setelah pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak, atau ketidaksesuaian telah diperbaiki.

n. Retention receivables

Retention receivables are receivables from customers collectable after the fulfillment of the conditions as set in the contract, or unconditional have been rectified.

Piutang retensi diukur pada nilai wajar piutang berdasarkan penerimaan arus kas yang diharapkan dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, kecuali efek diskontonya tidak material, maka dinyatakan pada biaya, setelah dikurangi provisi atas penurunan nilai piutang. Piutang retensi dicatat pada saat tagihan termin terakhir ditahan oleh pemberi kerja sebesar persentase tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak sampai dengan selesainya masa pemeliharaan.

The retention receivables are measured at the fair value of the consideration receivable based on the expected timing of cash in flows and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, except where the effect of discounting would be immaterial as such, they are stated at cost, less provision for impairment of receivables. Retention receivables are recorded when the final billing is retained by customers based on a certain percentage as set in the contract up to the maintenance period.

o. Tagihan dan utang bruto pemberi kerja

Jumlah tagihan dan utang bruto pemberi kerja berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan kepada pihak pemberi kerja yang masih dalam pelaksanaan. Nilai dari tagihan dan utang bruto merupakan selisih antara pendapatan yang diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian dan termin yang ditagih.

o. Gross amount due from and to customers

Gross amount due from and to customers resulting from construction contract services which are still in progress. The value of due from and to customers represents the difference between the revenue recognized based on percentage of completion method and the progress billings.

Jumlah tagihan bruto pemberi kerja diperoleh apabila pendapatan diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian melebihi termin yang ditagih. Jumlah utang bruto pemberi kerja terjadi apabila termin yang ditagih melebihi pendapatan yang diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian.

Gross amount due from customers are obtained when the revenue recognized based on percentage of completion method exceeds the progress billings. Gross amounts due to customers are obtained when the progress billing exceeds the revenue recognized based on the percentage of completion method.

p. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai

p. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is calculated using first in

(Lanjutan/Continued)

realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode *first in first out*. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Penyisihan untuk penurunan nilai persediaan ditentukan berdasarkan estimasi penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang.

Persediaan bahan untuk konstruksi

Bahan yang dibeli dicatat sebagai persediaan bahan untuk konstruksi, setiap pengambilan bahan (bon pemakaian bahan) dicatat sebagai biaya bahan pada periode yang bersangkutan dengan menggunakan metode *first in first out*. Setiap akhir periode dilakukan *stock opname* persediaan dan diadakan penyesuaian bila terjadi selisih antara nilai buku dan fisik.

q. Aset real estat

Persediaan real estat

Persediaan real estat terdiri dari tanah matang, kavling tanah dan bangunan (rumah tinggal dan unit kondominium) yang siap dijual, bangunan (rumah tinggal) yang sedang dikonstruksi dan tanah yang sedang dikembangkan dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah.

Biaya perolehan tanah yang sedang dikembangkan meliputi biaya perolehan tanah yang belum dikembangkan ditambah dengan biaya pengembangan langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan pada aset pengembangan real estat serta biaya pinjaman. Tanah yang sedang dikembangkan akan dipindahkan ke bangunan yang sedang dikonstruksi pada saat tanah tersebut selesai dikembangkan atau dipindahkan ke aset tanah bila tanah tersebut siap dijual dengan menggunakan metode luas areal.

Biaya perolehan bangunan yang sedang dikonstruksi meliputi biaya perolehan tanah yang telah selesai dikembangkan ditambah dengan biaya konstruksi, biaya lain-lain terkait dengan pengembangan dan biaya pinjaman serta dipindahkan ke aset tanah dan bangunan yang siap dijual pada saat selesai dibangun dan siap dijual. Biaya ditentukan menggunakan metode identifikasi khusus.

first out method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

A provision for impairment of inventory is determined on the basis of the estimated future sales of individual inventory.

Material inventory for construction

Purchased materials are recorded as inventory of materials for construction, each withdrawal (note of material used) recorded as material cost in the period concerned using the first in first out method. Every end of the period stock inventory is performed and adjustments are made when there is a difference between book and physical value.

q. Real estate assets

Real estate inventories

Real estate inventories consist of land lot already developed, land and buildings (houses and condominium units) ready for sale, buildings (houses) under construction, and land under development, are stated at cost or net realizable value, whichever is lower.

The cost of land under development consists of cost of land not yet developed, direct and indirect costs related to the development of real estate assets and borrowing costs. The cost of land under development is transferred to the buildings under construction account when the development is completed or transferred to the land account when it is ready for sale based on the area of salable lots.

The cost of buildings under construction consists of the cost of developed land, construction costs, other costs related to the development and borrowing costs, and is transferred to the land and buildings ready for sale account when the development of the land and construction of buildings are completed and ready for sale. Cost is determined using the specific identification method.

(Lanjutan/Continued)

r. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka dibebankan pada operasi sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya bersangkutan.

s. Aset Tetap - Pemilikan Langsung

Aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan termasuk biaya pengangkutan, biaya penanganan, biaya persiapan lahan, biaya instalasi dan peralatan, biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari konstruksi aset atau perolehan aset tetap, dan kapitalisasi biaya pinjaman tertentu yang timbul selama tahap konstruksi, dikurangi akumulasi penyusutan (kecuali hak atas tanah) dan penurunan nilai.

Hak atas tanah secara umum dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi. Masing-masing jenis hak atas tanah dianalisa untuk menentukan apakah hak atas tanah tersebut harus dicatat sebagai aset tetap atau aset hak guna tergantung pada substansi ekonomik yang mendasari kepemilikan hak atas tanah. Jika hak atas tanah tersebut tidak secara efektif memberikan pengendalian atas aset pendasar, melainkan hanya memberikan hak untuk menggunakan aset pendasar, transaksi tersebut dicatat sebagai sewa berdasarkan PSAK 73 "sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka hak atas tanah tersebut dicatat sebagai aset tetap berdasarkan PSAK 16 "Aset tetap".

Penyusutan dimulai pada tanggal aset tersebut digunakan atau siap untuk digunakan, menggunakan metode jam jasa untuk peralatan umum dan peralatan besar proyek atau pabrik, metode saldo menurun untuk kendaraan dan peralatan kantor dan untuk bangunan dihitung menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/ Years	
Golongan I	50%	Group I
Golongan II	20%	Group II
Golongan III	10%	Group III
Golongan IV	5%	Group IV

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Grup akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Pada saat aset tetap sudah tidak

r. Prepaid expenses

Prepaid expenses are charged to operations over the periods benefited.

s. Property, Plant and Equipment - Direct Acquisitions

Property and equipment are stated at cost which includes freight costs, handling costs, site preparation costs, installation costs, internal labor costs and certain capitalized borrowing costs incurred during the construction phase, less accumulated depreciation (except land rights) and impairment in value.

Land rights are generally stated at cost and are not amortised. Each of the land rights is analysed to determine whether it should be accounted for as either a property and equipment or a right-of-use asset, depending on the underlying economic substance of the land rights ownership. If the land rights do not effectively provide control of the underlying assets, but only give the rights to use the underlying assets, they are accounted for as leases under PSAK 73, "Leases". If the land rights are substantially similar to those of land purchases, they are accounted for as fixed assets under PSAK 16 "Fixed Assets".

Depreciation is applied from the date the assets are put into service or when the assets are ready for service using service hours method for general equipment and heavy equipment project and plant, the declining balance method for vehicle and office equipment and for building, computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the fixed assets as follows:

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as separate asset as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. When property and equipment are retired or otherwise disposed of, their costs and the related

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

digunakan atau dijual, biaya perolehan beserta akumulasi penyusutannya dihentikan pengakuannya dari kelompok aset tetap dan keuntungannya/ kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan dan pemasangan peralatan dikapitalisasi sebagai aset dalam pembangunan dan pemasangan. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi/ pemasangan selesai.

Aset dalam pembangunan dan pemasangan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman. Semua biaya pinjaman seperti bunga, beban keuangan dalam sewa, dan selisih kurs (diestimasi setiap 3 bulan sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga dengan membatasi selisih kurs yang diperhitungkan sebagai biaya pinjaman sebesar jumlah biaya pinjaman atas biaya pinjaman yang setara dalam mata uang fungsional) yang dapat diatribusikan ke aset kualifikasian, dikapitalisasi ke harga perolehan aset dalam pembangunan dan pemasangan. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat pembangunan/ pemasangan selesai dan aset yang dibangun/ dipasang tersebut siap untuk digunakan.

Biaya yang bergantung pada peristiwa masa depan selanjutnya diakui sebagai bagian nilai tercatat aset sebesar jumlah imbalan ketika terdapat ketidakpastian kewajiban tersebut terjadi.

Nilai sisa aset, masa manfaat, dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan pada setiap akhir periode pelaporan.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan aset ditentukan dengan membandingkan antara penerimaan hasil pelepasan dan jumlah tercatat aset tersebut dan diakui di laporan laba rugi.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari laporan keuangan. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi.

Tanah disajikan sebesar nilai wajar. Penilaian terhadap tanah tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk

accumulated depreciation are derecognized from the accounts and any resulting gains or losses are recognized in profit or loss.

The accumulated costs of the construction of buildings and the installation of equipment are capitalized as assets under construction and installation. These costs are reclassified to property and equipment when the construction or installation is complete.

Assets under construction and installation are stated at cost, which may include borrowing costs. All borrowing costs such as interest, finance charges in respect of leases and foreign exchange differences (estimated quarterly to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs by capping the exchange differences taken as borrowing costs at the amount of borrowing costs on the functional currency equivalent borrowings) that can be attributed to qualifying assets, are capitalized to the cost of property and equipment under construction and installation. Other borrowing costs are recognized as an expense in the period in which they are incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when the construction or installation is completed and the constructed or installed asset is ready for its intended use.

Cost contingent on future events are subsequently recognized as part of the cost of the asset at the amount of consideration when the obligation is certain to be occurred.

The assets' residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted in appropriate, at the end of each reporting period.

Gains and losses on disposals of assets are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are recognized in the profit or loss.

Property and equipment that are no longer used or sold, are removed from the financial statements. Any resulting gain or loss on disposal of fixed assets are recognized in profit and loss.

Land is shown at fair value. Valuation of land is performed by external independent valuers. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a

(Lanjutan/Continued)

memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya.

Frekuensi revaluasi bergantung pada perubahan nilai wajar dari aset tetap yang direvaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan disyaratkan. Beberapa aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan tersebut tidak perlu dilakukan untuk aset tetap yang perubahan nilai wajarnya tidak signifikan. Sebaliknya, aset tetap mungkin perlu direvaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian revaluasi aset tetap, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah dibebankan laporan laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Surplus revaluasi tanah yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

t. Goodwill

Goodwill timbul atas akuisisi dari suatu bisnis yang dicatat pada biaya perolehan yang ditetapkan pada tanggal akuisisi dari bisnis tersebut dikurangi akumulasi penurunan nilai, jika ada.

Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill dialokasikan pada setiap unit penghasil kas dari Grup (atau kelompok unit penghasil kas) yang diperkirakan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering jika terdapat indikasi bahwa unit penghasil kas tersebut mungkin mengalami penurunan nilai.

Jika jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan

revalued asset does not differ materially from its carrying amount.

The frequency of revaluations depends on changes in the fair value of the fixed assets being revalued. If the fair value of the revalued asset differs materially from its carrying amount, then further revaluation is required. Some fixed assets experience significant and fluctuating changes in fair value and therefore need to be revalued annually. Annual revaluation does not need to be carried out for fixed assets whose fair value changes are not significant. Otherwise, fixed assets may need to be evaluated every three or five years.

Any revaluation increase arising on the revaluation of land is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under property and equipment revaluation, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which was previously recognized in profit or loss, in which case the increase is credited to profit and loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising on the revaluation of such land is charged to profit or loss to the extent that it exceeds the balance, if any, held in the properties revaluation reserve relating to a previous revaluation of such land.

The revaluation surplus in respect of land is directly transferred to retained earnings when the asset is derecognized.

t. Goodwill

Goodwill arising on an acquisition of a business is carried at cost as established at the date of acquisition of the business less accumulated impairment losses, if any.

For the purpose of impairment testing, goodwill is allocated to each of the Group's cash-generating units (or group of cash-generating units) expected to benefit from the synergies of the combination. A cash-generating unit to which goodwill has been allocated is tested for impairment annually, or more frequently when there is an indication that the unit may be impaired.

If the recoverable amount of the cash-generating unit is less than its carrying amount,

(Lanjutan/Continued)

nilai dialokasikan pertama kali untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill yang dialokasikan pada unit penghasil kas dan kemudian ke aset lain dari unit penghasil kas secara prorata berdasarkan jumlah tercatat dari setiap aset dalam unit penghasil kas tersebut. Setiap kerugian penurunan nilai goodwill diakui secara langsung dalam laba rugi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Pada pelepasan unit penghasil kas yang relevan, jumlah yang dapat diatribusikan dari goodwill termasuk dalam penentuan laba rugi atas pelepasan.

u. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi, kecuali aset tersebut dicatat pada jumlah revaluasi, di mana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Apabila penurunan nilai selanjutnya dipulihkan, jumlah tercatat aset (unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat yang tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset (unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi

the impairment loss is allocated first to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the unit and then to the other assets of the unit pro-rata on the basis of the carrying amount of each asset in the unit. Any impairment loss for goodwill is recognized directly in profit or loss in the statement of profit or loss and other comprehensive income. An impairment loss recognized for goodwill is not reversed in subsequent periods.

On disposal of the relevant cash-generating unit, the attributable amount of goodwill is included in the determination of the profit or loss on disposal.

u. Impairment of non-financial assets

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at revaluation amount, in which the impairment loss is treated as revaluation decrease.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (cash generating unit)

(Lanjutan/Continued)

penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang bersangkutan dicatat pada jumlah revaluasi, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan nilai revaluasi.

in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase.

v. Sewa

v. Leases

Grup sebagai penyewa

The Group as lessee

Pada tanggal insepasi suatu kontrak, Grup menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Grup menilai apakah:

At inception of a contract, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether:

- Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian - ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substansial, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
 - Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 - Grup mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

- *The contract involves the use of an identified asset - this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has the substantive substitution right, then the asset is not identified;*
- *The Group has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Group has the right to direct the use of the identified asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In certain circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Group has the right to direct the use of the asset if either:*
 - *The Group has the right to operate the asset; or*
 - *The Group designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used.*

Pada tanggal insepasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non sewa.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

(Lanjutan/Continued)

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa.

Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah

Grup memilih untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih;

The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, use the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable.

Each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant interest rate on the outstanding balance of the liabilities.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Group has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Group recognizes the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Lease modification

The Group account for a lease modification as a separate lease if both:

- *The modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets;*

(Lanjutan/Continued)

- Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup sewa dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu;
 - Mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
 - Menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
 - Mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal efektif modifikasi;
 - Menurunkan jumlah tercatat aset hak guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
 - Membuat penyesuaian terkait dengan aset hak guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.
- *The consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract;*
 - *Remeasures and allocates the consideration in the modified contract;*
 - *Determines the lease term of the modified lease;*
 - *Remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;*
 - *Decreases the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognize in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*
 - *Makes a corresponding adjustment to the right-of-use assets for all other lease modifications.*

Grup sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika demikian, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Grup mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomik aset pendasar.

Apabila aset disewakan melalui sewa pembiayaan, nilai kini pembayaran sewa diakui sebagai piutang. Selisih antara nilai piutang bruto dan nilai kini piutang tersebut diakui sebagai penghasilan sewa pembiayaan tangguhan.

Penghasilan sewa diakui selama masa sewa dengan menggunakan metode investasi neto yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan.

The Group as lessor

When the Group acts as a lessor, it shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease. As part of this assessment, the Group considers certain indicators such as whether the lease term is for the major part of the economic life of the underlying asset.

When assets are leased out under a finance lease, the present value of the lease payments is recognized as receivable. The difference between the gross receivable and the present value of the receivable is recognized as unearned finance lease income.

Lease income is recognized over the term of the lease using the net investment method that reflects a constant periodic rate of return.

(Lanjutan/Continued)

Apabila aset disewakan melalui sewa operasi, aset disajikan di laporan posisi keuangan sesuai pengelompokan aset tersebut. Penghasilan sewa diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Transaksi jual dan sewa balik

Pencatatan transaksi jual dan sewa balik bergantung kepada apakah pengalihan aset memenuhi syarat sebagai penjualan. Grup menerapkan persyaratan penentuan saat kewajiban pelaksanaan telah terpenuhi dalam PSAK 72 untuk menentukan apakah pengalihan aset dicatat sebagai penjualan.

Pengalihan aset merupakan penjualan

Jika pengalihan aset oleh Grup sebagai penjual - penyewa memenuhi persyaratan dalam PSAK 72 untuk dicatat sebagai penjualan, maka Grup mengukur aset hak guna yang timbul dari sewa balik pada proporsi jumlah tercatat aset sebelumnya yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan oleh Grup. Dengan demikian Grup mengakui hanya jumlah keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak yang dialihkan ke pembeli - pesewa.

Jika nilai wajar imbalan untuk penjualan aset tidak sama dengan nilai wajar aset, atau jika pembayaran untuk sewa tidak sama dengan harga pasar, maka Grup melakukan penyesuaian sebagai berikut:

- Jika di bawah harga pasar, maka dicatat sebagai pembayaran sewa di muka; dan
- Jika di atas harga pasar, maka dicatat sebagai tambahan pembiayaan yang diberikan oleh pembeli - pesewa kepada Grup.

Grup mengukur kemungkinan penyesuaian yang disyaratkan di atas berdasarkan mana yang lebih dapat ditentukan dari:

- Selisih antara nilai wajar imbalan penjualan dan nilai wajar aset; dan
- Selisih antara nilai kini pembayaran kontraktual sewa dan nilai kini pembayaran sewa pada harga pasar.

w. Aset tak berwujud

Biaya atas pembelian *software* akuntansi diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi

When assets are leased out under an operating lease, the asset is presented in the statements of financial position based on grouping of the asset. Lease income is recognized over the term of the lease on a straight-line basis.

Sale and leaseback transactions

The accounting for sale and leaseback transactions depends on whether the transfer of the asset qualifies as a sale. The Group applies the requirements for determining when a performance obligation is satisfied in PSAK 72 to determine whether the transfer of an asset is accounted for as a sale.

Transfer of the asset is a sale

If the transfer of an asset by the Group as the seller - lessee satisfies the requirements of PSAK 72 to be accounted for as a sale, then the Group measures the right-of-use assets arising from the lease back at the proportion of the previous carrying amount of the asset that relates to the right-of-use retained by the Group. Accordingly, the Group shall recognise only the amount of any gain or loss that relates to the rights transferred to the buyer - lessor.

If the fair value of the consideration for the sale of an asset does not equal the fair value of the asset, or if the payments for the lease are not at market rates, the Group make the following adjustments to measure the sale proceeds at fair value:

- *Any below-market terms shall be accounted for as a prepayment of lease payments; and*
- *Any above-market terms shall be accounted for as additional financing provided by the buyer - lessor to the Group.*

The Group measures any potential adjustment required above on the basis of the more readily determinable of:

- *The difference between the fair value of the consideration for the sale and the fair value of the asset; and*
- *The difference between the present value of the contractual payments for the lease and the present value of payments for the lease at market rates.*

w. Intangible assets

The cost of purchase of accounting software is recognized as an intangible asset and amortized

(Lanjutan/Continued)

selama periode atas pengakuan *software* akuntansi sebagaimana tercantum dalam kontrak atau umur ekonomis aset, mana yang lebih pendek.

Biaya legal pengurusan hak atas tanah pada saat perolehan tanah tersebut diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah pada aset tetap dan/atau properti investasi.

Biaya pembaruan atau pengurusan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi selama periode hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam kontrak atau umur ekonomis aset, mana yang lebih pendek.

x. Uang muka pemberi kerja

Uang muka pemberi kerja (jasa konstruksi) merupakan uang muka yang diterima dari pemberi kerja atas pekerjaan konstruksi saat kontrak kerja ditandatangani dan secara proporsional akan diperhitungkan dengan pembayaran termin yang didasarkan atas kemajuan fisik yang telah dicapai.

y. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif masa kini sebagai akibat peristiwa masa lalu terdapat kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan jumlah kewajiban tersebut dapat diukur secara andal. Provisi tidak diakui untuk kerugian operasi masa depan.

Provisi diukur sebesar nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diharapkan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban.

Peningkatan provisi karena berjalannya waktu diakui sebagai biaya keuangan.

z. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, yaitu aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

over the period of land rights as stated in the contract or economic life of the asset, whichever is shorter.

The legal cost of land rights upon acquisition of the land is recognized as part of the cost of land under property and equipment and/or investment property.

The cost of renewal or extension of legal rights on land is recognized as an intangible asset and amortized over the period of land rights as stated in the contract or economic life of the asset, whichever is shorter.

x. Advances from project owners

Advances from project owners (construction services) represent advances received from the project owners on construction works when the employment contract is signed and proportionally will be calculated by the payment of terminology based on the physical progress that achieved.

y. Provision

Provision is recognized when the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past events it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and the amount has been reliably estimated. Provision is not recognized for future operating losses.

Provisions are measured at the present value of management's best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period. The discount rate used to determine the present value is a pretax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability.

The increase in the provision due to the passage of time is recognised as finance costs.

z. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

(Lanjutan/Continued)

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Biaya pinjaman diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

aa. Liabilitas imbalan pasca kerja

Grup mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) yang menerapkan pengaturan pasal 81 dan pasal 185 (b) Undang-undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Grup ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil atas aset program dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Pengukuran kembali terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak perubahan pada batas atas aset (jika ada) dan imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya untuk mencerminkan aset atau liabilitas pensiun neto yang diakui pada laporan keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi ketika terjadi amendemen program atau kurtailmen, atau ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon, jika lebih dahulu.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian);
- Beban atau pendapatan bunga neto;
- Pengukuran kembali.

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

Borrowing costs are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

aa. Post-employments benefit liabilities

The Group recognized unfunded employee benefits liability in accordance with Government Regulation No. 35 Year 2021 (PP 35/2021) that implement the provisions of article 81 and article 185 (b) of Law No. 11/2020 on Job Creation (Cipta Kerja). Pension costs under the Group's defined benefit pension plans are determined by periodic actuarial calculation using the projected unit credit method and applying the assumptions on discount rate, return on plan assets and annual rate of increase in compensation.

Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur in order for the net pension asset or liability recognized in the statement of financial position to reflect the full value of the plan deficit and surplus. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately in retained earnings and will not be reclassified to profit or loss.

Past service cost is recognized in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs, or when the Group recognizes related restructuring costs or termination benefits, if earlier.

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorized as follows:

- *Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements);*
- *Net interest expense or income;*
- *Remeasurement.*

The Group presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

(Lanjutan/Continued)

Kewajiban imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan atas program.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup juga memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya, seperti cuti berimbalan jangka panjang dan penghargaan. Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan manfaat biaya diakui dalam laba rugi.

bb. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

The retirement benefit obligation recognized in the statement of financial position represents the actual deficit or surplus in the Group's defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

Other long-term employee benefits

The Group also provides other long term employee benefits such as long service leaves and awards. The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method with the benefit cost recognized in profit and loss.

bb. Recognition of revenue and expense

Revenue from contracts with customers

Revenue recognition have to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows:

1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price. The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative stand-alone selling price is estimated based on expected cost plus margin.*
5. *Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).*

(Lanjutan/Continued)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 (dua) cara, yakni:

1. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
2. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan melebihi saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang Usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Pendapatan Tanggahan".

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat pengendalian barang telah dialihkan kepada pelanggan. Pendapatan dari jasa diakui pada periode akuntansi saat jasa tersebut diberikan.

Konstruksi

Pendapatan yang berhubungan dengan kontrak konstruksi dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan yang diakui setara dengan estimasi terbaru dari total nilai kontrak dikalikan dengan tingkat penyelesaian sebenarnya yang ditentukan dengan mengacu pada keadaan fisik kemajuan pekerjaan (metode output).

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

Jika adanya kemungkinan bahwa kontrak akan menghasilkan kerugian pada saat penyelesaian kontrak, penyisihan atas kerugian yang diperkirakan hingga penyelesaian kontrak diakui sebagai penyisihan kini pada laporan keuangan. Kerugian diakui secara penuh ketika dapat diukur secara andal, terlepas dari tingkat penyelesaian.

The implementation of obligation can be fulfilled in 2 (two) ways, it is:

- 1. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- 2. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.*

Payment of the transaction price is different for each contract. A contract asset is recognised once the consideration paid by the customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by the customer exceeds the balance of performance obligation which has been satisfied. Contract assets are presented under "Trade Receivables" and contract liabilities are presented under "Deferred Revenue".

Revenue from the sale of goods is recognised when control of the goods have been transferred to customers. Revenue from services is recognized in the accounting period in which the services are rendered.

Construction

Revenues related to construction contracts are accounted for using the percentage of completion method. Under this method, the revenue recognized equals the latest estimate of the total value of the contract multiplied by the actual completion rate determined by reference to the physical state of progress of the works (output method).

Contract revenue comprises the initial amount of revenue that agreed in the contract and variations in contract work, claims and incentive payments to the extent that is probable that it will result in revenue and can be reliably measured.

If it is regarded as probable that a contract will generate a loss on completion, a provision for expected losses to completion is recognized as a current provision in the financial statements. The loss is provided for in full as soon as it is can be reliably measured, irrespective of the completion rate.

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Dalam menentukan harga transaksi, Grup menyesuaikan jumlah imbalan yang dijanjikan terhadap dampak nilai waktu uang jika waktu pembayaran yang disepakati oleh para pihak dalam kontrak (baik secara eksplisit atau implisit) memberikan pelanggan atau Grup manfaat signifikan berupa pendanaan atas pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan. Tujuan ketika menyesuaikan komponen pendanaan signifikan dalam jumlah imbalan yang dijanjikan adalah agar Grup mengakui pendapatan pada jumlah yang mencerminkan harga yang akan dibayar oleh pelanggan atas barang atau jasa yang dijanjikan jika pelanggan telah membayar secara kas barang atau jasa tersebut ketika entitas mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan (yaitu harga jual kas). Grup menyajikan dampak pendanaan (pendapatan bunga atau beban bunga) secara terpisah dari pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dalam laporan penghasilan komprehensif.

Biaya kontrak yang tidak mungkin dipulihkan diakui segera sebagai beban tahun berjalan pada laba rugi.

Grup mengakui aset kontrak dan liabilitas kontrak sehubungan dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Aset kontrak disajikan sebagai piutang retensi dan jumlah tagihan bruto pemberi kerja. Liabilitas kontrak disajikan sebagai jumlah utang bruto pemberi kerja dan pendapatan diterima dimuka.

Beban langsung dan beban tidak langsung proyek yang dapat dialokasikan ke suatu proyek tertentu, diakui sebagai beban pada proyek yang bersangkutan, sedangkan beban yang tidak dapat didistribusikan atau tidak dapat dialokasikan ke aktivitas proyek menjadi beban non-proyek (beban usaha).

Penjualan kondominium dan tanah dan bangunan

Grup memiliki kontrak untuk menjual dengan satu kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi, yaitu penjualan unit real estat bersama dengan jasa pengalihan hak milik kepada pembeli setelah pembayaran penuh harga kontrak. Grup telah menentukan bahwa hal ini terpenuhi pada saat pengalihan kendali, yang umumnya terjadi ketika unit real estat yang telah selesai diserahkan kepada pelanggan dan pelanggan telah menerima sesuai dengan kontrak penjualan. Jumlah imbalan yang ditunjukkan dalam kontrak untuk menjual adalah tetap dan tidak memiliki pertimbangan variabel.

In determining the transaction price, the Group adjust the promised amount of consideration for the effects of the time value of money if the timing of payments agreed to by the parties to the contract (either explicitly or implicitly) provides the customer or the Group with a significant benefit of financing the transfer of goods or services to the customer. The objective when adjusting the promised amount of consideration for a significant financing component is for the Group to recognize revenue at an amount that reflects the price that a customer would have paid for the promised goods or services if the customer had paid cash for those goods or services when (or as) they transfer to the customer (ie the cash selling price). The Group present the effects of financing (interest revenue or interest expense) separately from revenue from contracts with customers in the statement of comprehensive income.

Contract costs that are not probable of being recovered are recognized as current year expenses in profit or loss.

The Group has recognized contract assets and contract liabilities related with revenue from contract with customers. Contract assets are presented as retention receivables and gross amount due from customers. Contract liabilities are presented as gross amount due to customers and unearned revenues.

Direct and indirect costs of projects which can be allocated to a particular project, are recognized as an expense on the related projects, while the expenses that cannot be distributed or cannot be allocated to the project activities are recognized as non-project expenses (operating expenses).

Sale of condominium and land and buildings

The Group entered into contracts to sell with one identified performance obligation which is the sale of the real estate unit together with the services to transfer the title to the buyer upon full payment of contract price. The Group has determined that this is satisfied at the point in time when control transfers, which generally occurs when the completed real estate unit is delivered to the customers and the customers have accepted it in accordance with the sales contract. The amount of consideration indicated in the contract to sell is fixed and has no variable consideration.

(Lanjutan/Continued)

Penjualan unit real estat dapat mencakup kontrak untuk (i) tanah kavling; (ii) rumah tinggal; (iii) gedung perkantoran; dan (iv) unit kondominium dan Grup menyimpulkan bahwa terdapat satu kewajiban pelaksanaan dalam masing-masing kontrak ini.

Dalam skema pembayaran tertentu, ketika pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dan pengalihan pengendalian atas properti kepada pembeli tidak bertepatan dan perbedaan antara waktu penerimaan pembayaran dan pemenuhan kewajiban pelaksanaan adalah 12 bulan atau lebih, entitas menyesuaikan harga transaksi dengan pelanggannya dan mengakui komponen pembiayaan.

Dalam menyesuaikan komponen pembiayaan, Grup menggunakan tingkat diskonto yang mencerminkan transaksi pembiayaan terpisah antara Grup dan pelanggan pada awal kontrak. Pendapatan bunga atau beban bunga akan diakui bergantung pada pengaturannya. Grup telah memilih untuk menerapkan panduan praktis untuk tidak menyesuaikan harga transaksi atas keberadaan komponen pembiayaan yang signifikan ketika periode antara pengalihan pengendalian barang atau jasa kepada pelanggan dan tanggal pembayaran adalah 12 bulan atau kurang.

Setelah penyerahan unit real estat yang telah selesai, Grup memberikan garansi 90 hari untuk memperbaiki kerusakan kecil atas tanah dan bangunan rumah, gedung perkantoran dan unit kondominium yang diserahkan. Hal ini dinilai oleh Grup sebagai jaminan kualitas dan tidak diperlakukan sebagai kewajiban pelaksanaan yang terpisah.

Pendapatan sewa peralatan

Mengacu pada kebijakan akuntansi sewa di catatan 3v.

Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

cc. Perjanjian Konsesi Jasa

Pendapatan Grup berasal dari perjanjian konsesi jasa. Konstruksi jasa yang berhubungan dengan perjanjian konsesi jasa diakui sebagai pendapatan sesuai dengan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak" berdasarkan persentase penyelesaian dan pemenuhan kewajiban. Jika hasil kontrak konstruksi tidak dapat diestimasi secara andal, pendapatan

The sale of real estate unit may cover the contract for the (i) parcel of land; (ii) landed house; (iii) office building; and (iv) condominium unit and the Group concluded that there is one performance obligation in each of these contracts.

Under certain payment schemes, the time when payments are made by the buyer and the transfer of control of the property to the buyer do not coincide and where the difference between the timing of receipt of the payments and the satisfaction of a performance obligation is 12 months or more, the entity adjusts the transaction price with its customer and recognizes a financing component.

In adjusting for the financing component, the Group uses a discount rate that would reflect that of a separate financing transaction between the Group and its customer at contract inception. An interest income or interest expense will be recognized depending on the arrangement. The Group has elected to apply the practical expedient not to adjust the transaction price for the existence of significant financing component when the period between the transfer of control of good or service to a customer and the payment date is 12 months or less.

After the delivery of the completed real estate unit, the Group provides a 90-day warranty to repair minor defects on the delivered serviced lot and house, office building and condominium unit. This is assessed by the Group as a quality assurance warranty and not treated as a separate performance obligation.

Expense recognition

Refer to accounting policies on leases in note 3v.

Expense recognition

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

cc. Concession Service Agreements

Group income comes from services concession agreements. Construction services related to service concession agreements are recognized as income in accordance with PSAK 72, "Revenue from Contracts" by using the percentage of completion method. If the outcome of a construction contract cannot be estimated reliably, revenue is calculated using

(Lanjutan/Continued)

dihitung menggunakan metode keuntungan nihil sebesar jumlah pengeluaran yang terjadi dan kemungkinan dapat dipulihkan.

the method nil profit amount and possible expenses incurred can be recovered.

Pendapatan atas konstruksi diakui dengan penetapan estimasi marjin konstruksi dari biaya yang dikeluarkan untuk termin penyelesaian pembangkit listrik selama periode berjalan.

Revenue from construction is recognized by the determination of the estimated margin of the construction costs incurred for the settlement terms of electricity generation during the period.

Pendapatan keuangan dari konsesi jasa mencerminkan pendapatan bunga atas piutang dari perjanjian konsesi jasa, yang diakui dengan menggunakan metode bunga efektif.

Financial income from service concession reflects the interest income on receivables from service concession arrangement, which is recognized using the effective interest method.

Pendapatan dari penyerahan listrik kepada PLN berdasarkan perjanjian konsesi jasa sejauh komponen investasi dari transaksi pendapatan diperhitungkan sebagai transaksi jasa konsesi menggunakan model aset keuangan.

Revenue from delivery of electricity to the PLN to the extent of the investment component of the revenue transaction is accounted for a service concession transaction using financial assets model.

Aset Keuangan dari Proyek dan Layanan Pengaturan Konsesi

Financial Assets from Concession Project and Service Concession Arrangements

Aset keuangan - konsesi jasa yang timbul karena perjanjian konsesi jasa merupakan hak Grup untuk mengakui pendapatan atas konstruksi yang telah dilakukan. Pembangunan infrastruktur ditambah marjin tertentu dikapitalisasi sebagai aset keuangan. Akumulasi biaya-biaya konstruksi direklasifikasi sebagai harga pokok penjualan dalam laporan laba rugi komprehensif Grup pada periode yang bersangkutan. Sedangkan konstruksi yang berkaitan dengan perjanjian konsesi jasa diakui sebagai pendapatan berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan yang dilakukan ditambah dengan marjin.

Financial assets - service concession arising from service concession arrangement is the right of Group to recognize revenue on construction that has been done. Infrastructure development plus a certain margin capitalized as financial assets. Accumulated construction costs reclassified as cost of goods sold in Group's statement of comprehensive income in the period in question. While construction related to service concession agreements are recognized as revenue based on the percentage of work completion plus a margin.

dd. Pajak penghasilan

dd. Income tax

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

The tax currently payable is based on taxable profit to the year. Taxable profit differs from profit before tax as reported in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the period computed using prevailing tax rates.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit.

(Lanjutan/Continued)

pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang

Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities

(Lanjutan/Continued)

berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

ee. Pajak final

Pajak penghasilan dari konstruksi dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 2022. Pajak final dikenakan sebesar 2,65% atas kontrak yang diperoleh mulai 1 Maret 2022.

ee. Final tax

Income tax from constructions is computed based on the Government Regulation Republic of Indonesia No. 9 Year 2022. Final tax will be charged at 2.65% final for the contract obtained from March 1, 2022.

Untuk bidang usaha realti mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2016 dengan tarif 2,5% untuk rumah menengah ke atas dan 1% untuk rumah sederhana. Sedangkan jasa pengelolaan dan persewaan property mengacu pada UU PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10% final.

For the field of realty business refers to Government Regulation of Republic of Indonesia No. 34 Year 2016 the rate of 2.5% for middle-and upper houses and 1% for a modest house. While management services and rental of property refers to the income Tax Act article 4 point 2 with a rate of 10% final.

Pajak penghasilan final disajikan secara terpisah dari beban pajak penghasilan pada laporan laba rugi.

Final income tax is presented separately from income tax expenses in statement of profit or loss.

Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final, beban pajaknya diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan. Selisih antara jumlah pajak final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi komprehensif, diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak. Perbedaan nilai tercatat aset dan liabilitas yang berhubungan dengan pajak final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Income subject to final tax, income tax expense is recognized proportionally with the accounting income recognized during the year. The difference between the final amount of tax payable and the amount charged as current tax in the statement of comprehensive income, is recognized as prepaid tax or tax debt. Differences in carrying value of assets and liabilities related to final tax bases are not recognized as deferred tax assets or liabilities.

ff. Segmen operasi

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasi utama. Pengambil keputusan operasi utama, yang bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi adalah Dewan Direksi.

ff. Operating segment

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision maker. The chief operating decision maker, who is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments is the Board of Directors.

Segmen adalah bagian khusus Grup yang terlibat dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged in providing certain products and services (business segment), which component is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Pendapatan, beban, hasil, aset, dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be

(Lanjutan/Continued)

serta yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai dengan segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar segmen dieliminasi.

allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-segment balances and transactions are eliminated.

gg. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi terhadap jumlah yang dilaporkan. Oleh karena tidak adanya kepastian dalam membuat estimasi, maka terdapat kemungkinan hasil aktual di masa yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasi tersebut.

gg. Use of estimate

The preparation of financial statements in accordance with financial accounting standards requires management to make estimations and assumptions against reported amounts. Because of the lack of certainty in making estimates, there is likely to be actual results in the future different from those estimates.

hh. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan menyajikan bukti kondisi yang terjadi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuaian) yang dicerminkan di dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian, diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian bila material.

hh. Events after the reporting period

Events after the reporting period presents evidence of conditions that occur at the end of the reporting period (adjusting events) are reflected in the consolidated financial statements. Events after the reporting period which are not adjusting events are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when material.

ii. Pembagian Dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham Grup diakui sebagai liabilitas Ketika dividen tersebut disetujui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

ii. Dividend distribution

Dividend distributions to the Group's share holder are recognized as a liability when the dividends are approved in the Group's General Meeting of Shareholder ("GMS").

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 3, the directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

(Lanjutan/Continued)

Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi

Di bawah ini adalah pertimbangan kritis, selain dari estimasi yang telah diatur, dimana direksi telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Grup dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Grup menandatangani beberapa perjanjian bersama sehubungan dengan kegiatan operasi mereka dimana suatu entitas yang memiliki bentuk hukum terpisah dari pihak-pihak yang terkait dengan pengaturan bersama dan Grup itu sendiri. Selanjutnya, tidak ada pengaturan kontraktual atau fakta dan keadaan lain yang menunjukkan bahwa pihak-pihak dalam pengaturan bersama memiliki hak atas aset dan kewajiban pengaturan bersama. Dengan demikian, manajemen mengklasifikasikan sebagai ventura bersama.

Penerapan suatu pengaturan

Penerapan suatu pengaturan adalah tidak praktis ketika entitas tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha yang rasional dilakukan. Untuk suatu periode sebelumnya tertentu, tidak praktis untuk menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan atau penyajian kembali retrospektif untuk mengoreksi kesalahan jika:

- Dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif tidak dapat ditentukan;
- Penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan asumsi mengenai maksud manajemen yang ada pada periode sebelumnya tersebut; atau
- Penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan estimasi signifikan atas jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara objektif informasi mengenai estimasi yang:
 1. Menyediakan bukti atas keadaan yang ada pada tanggal di saat jumlah tersebut diakui, diukur atau diungkapkan; dan
 2. Tersedia ketika laporan keuangan periode sebelumnya diselesaikan dengan informasi lain.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Critical judgments in applying accounting policies

Below are the critical judgments, apart from those involving estimations, that the directors have made in the process of applying the Group's accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

The Group has entered into several joint agreements in relation to their operations where an entity that has a legal form confers separation between the parties to the joint arrangement and the Group itself. Furthermore, there is no contractual arrangement or any other facts and circumstances that indicate that the parties to the joint arrangement have rights to the assets and obligations for the liabilities of the joint arrangement. Accordingly, management has classified these as a joint venture.

The adoption of an arrangement

The adoption of an arrangement is not practical when the entity cannot apply it after the whole rational business done. For a period previously specified, it is not practical to apply a change in accounting policy retrospectively or serves or restatement of the retrospective to correct an error if:

- *The impact of application of retrospective or restatement of the retrospective can not be done;*
- *The application of retrospective or restatement of the retrospective requires an assumption about the intent of management that exist in the previous period; or*
- *The application of retrospective or restatement of the retrospective requires significant estimates on the amount and it is impossible to distinguish objectively information about the estimation:*
 1. *Provides evidence of circumstances that existed on the date when such amounts recognized, measured or disclosed; and*
 2. *Available when the financial statement of the previous period is resolved with other information.*

Key Sources of Estimation Uncertainly

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

(Lanjutan/Continued)

Perhitungan Cadangan Kerugian

Saat mengukur ECL, Grup menggunakan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana penggerak ini akan saling mempengaruhi. Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar. Perhitungan didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual terutang dan yang diharapkan akan diterima, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probability of default merupakan input utama dalam mengukur ECL. *Probability of default* adalah perkiraan kemungkinan gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan

Grup membuat penyisihan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan yang digunakan pada masa mendatang. Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi penyisihan penurunan nilai persediaan telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penyisihan penurunan nilai persediaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil usaha Grup. Nilai tercatat persediaan diungkapkan dalam Catatan 12 dan 39.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Calculation of Loss Allowances

When measuring ECL the Group uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other. Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit enhancements.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. *Probability of default* is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

Allowance for Decline in Value of Inventories

The Group provides allowance for decline in value of inventories based on estimated future usage of such inventories. While it is believed that the assumptions used in the estimation of the allowance for decline in value of inventories are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the assessment of the allowance for decline in value of inventories, which ultimately will impact the result of the Group's operations. The carrying amount of inventories is disclosed in Note 12 and 39.

Estimated Useful life of Property, Plant and Equipment

The useful life of each item of the Group's property and equipment, are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property and equipment would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying values of these assets.

(Lanjutan/Continued)

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 20.

The carrying values of property, plant and equipment are disclosed in Note 20.

Penilaian Instrumen Keuangan

Valuation of Financial Instruments

Seperti dijelaskan dalam Catatan 3, Grup menggunakan teknik penilaian yang meliputi input yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi untuk mengestimasi nilai wajar dari beberapa jenis instrumen keuangan. Catatan 44 memberikan informasi yang rinci mengenai asumsi utama yang digunakan dalam menentukan nilai wajar instrumen keuangan, serta analisis sensitivitas yang rinci untuk asumsi tersebut.

As described in Note 3, the Group uses valuation techniques that include inputs that are not based on observable market data to estimate the fair value of certain types of financial instruments. Note 44 provides detailed information about the key assumptions used in the determination of the fair value of financial instruments, as well as the detailed sensitivity analysis for these assumptions.

Direksi berpendapat bahwa teknik penilaian yang dipilih dan asumsi yang digunakan adalah tepat dalam menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan.

The directors believe that the chosen valuation techniques and assumptions used are appropriate in determining the fair value of financial instruments.

Pengakuan Pendapatan dan Beban Konstruksi

Revenue and Expense Recognition of Construction

Kebijakan pengakuan pendapatan dan beban konstruksi Grup mensyaratkan penggunaan estimasi yang dapat mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan dan beban pokok pendapatan. Grup mengakui pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi berdasarkan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian).

The policy of revenue and expense recognition of construction contract of the Group requires use of estimates which may impact the reported amount of revenues and cost of revenues. Group recognizes revenues and expenses related to construction contracts based on the completion stage of contract activities at end of reporting period (percentage of completion method).

Grup melaksanakan proyek yang lamanya lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai kontrak konstruksi. Kebijakan akuntansi Perseroan untuk proyek membutuhkan pendapatan dan biaya yang akan dialokasikan pada periode akuntansi dan pengakuan berikutnya pada akhir periode atas aset atau liabilitas kontrak untuk proyek yang masih dalam proses.

Group undertakes projects that frequently span more than one accounting period and are accounted for as construction contracts. Group's accounting policies for these projects require revenue and costs to be allocated to individual accounting periods and the consequent recognition at period end of contract assets or liabilities for projects is still in progress.

Penerapan kebijakan ini mengharuskan manajemen untuk menerapkan pertimbangan dalam memperkirakan total pendapatan dan total biaya yang diharapkan pada setiap proyek. Estimasi tersebut direvisi ketika proyek berlangsung untuk mencerminkan status proyek dan informasi terbaru yang tersedia untuk manajemen, perubahan estimasi tersebut diterapkan secara prospektif. Manajemen proyek melakukan tinjauan rutin untuk memastikan perkiraan terbaru yang sesuai. Perubahan atas estimasi akan dicatat prospektif. Walaupun Grup berkeyakinan bahwa estimasi yang dibuat adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada tahap penyelesaian actual dapat mempengaruhi secara material pendapatan dan beban pokok pendapatan dari konstruksi.

The application of these policies requires management to apply judgement in estimating the total revenue and total costs expected on each project. Such estimates are revised as a project progresses to reflect the current status of the project and the latest information available to management. Project management teams perform regular reviews to ensure the latest estimates are appropriate, the changes in estimation are applied prospectively. Change to estimates is accounted for prospectively, while Group believes that their estimates are reasonable and appropriate, significant differences to the actual completion stage may materially affect the revenues of construction contracts.

(Lanjutan/Continued)

Pengakuan Pendapatan Konsesi Jasa dari Konstruksi

Grup mengakui pendapatan konsesi jasa dari konstruksi berdasarkan nilai beban konstruksi ditambah marjin tertentu. Marjin ditentukan berdasarkan estimasi penilaian pasar untuk proyek yang serupa.

Perjanjian konsesi jasa

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan.

Pada akhir masa konsesi jasa, Grup harus menyerahkan aset tersebut kepada PT PLN (Persero) tanpa biaya, dalam keadaan beroperasi, kondisi yang baik dan peralatan yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian fasilitas penyediaan listrik.

Jika Grup berpendapat bahwa Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) memenuhi kriteria sebagai model aset keuangan, di mana aset konsesi diakui sebagai aset keuangan sesuai dengan ISAK 16, "Perjanjian jasa konsesi". Diluar hal-hal tersebut, Grup memberlakukan PSAK 73 - Sewa dimana hasil konstruksi diakui sebagai aset sewa guna.

Revenue Recognition from Construction Service

Group recognizes revenue from construction service concession based on the value of construction load plus a certain margin. Margins are determined based on estimates of the market for similar projects.

Service concession arrangement

ISAK 16 outlines an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services. It provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as property and equipment, but should be recognized as a financial asset.

Upon expiry of the service concession period, the Group shall handover the assets to the PT PLN (Persero) without cost, fully operational and in good working condition and equipment found therein directly related to, and in connection with, the operation of the electricity supply facilities.

If the Group has made judgment that the Power Purchase Agreement (PJBL) qualifies under the financial assets model, wherein the concession asset is recognized as a financial asset in accordance with ISAK 16, "Concession service agreement". Apart from these matters, the Group applies PSAK 73 - Leases where the result of construction is recognized as a leased asset.

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Kas			Cash on hand
Rupiah	2.065.001.676	853.410.085	Rupiah
Bank			Bank
Pihak berelasi			Related parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	749.228.356.750	588.188.960.325	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	205.441.432.320	384.473.554.613	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	72.924.016.072	35.765.213.097	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank DKI	26.326.195.602	125.000	PT Bank DKI
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	3.352.442.177	4.338.515.416	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	83.499.973	110.767.067.214	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Indonesia Eximbank	16.508.749	16.508.749	Indonesia Eximbank
PT BPD Nusa Tenggara Barat	4.349.769	4.609.099	PT BPD Nusa Tenggara Barat
Dollar U.S.			U.S. Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11.560.792.928	63.117.227.334	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.598.479.495	5.565.386.172	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	68.893.026	404.231.170	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Sub Jumlah	1.076.604.966.862	1.192.641.398.189	Sub Total
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Syariah Indonesia	183.161.024.461	249.198.090.471	PT Bank Syariah Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	186.396.903	512.300.786	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank BNI Syariah	-	33.568.822.235	PT Bank BNI Syariah
PT Bank Tabungan Negara Syariah	-	19.385.503	PT Bank Tabungan Negara Syariah
PT Bank UOB Indonesia	-	-	PT Bank UOB Indonesia
Sub Jumlah	183.347.421.364	283.298.598.995	Sub Total
Jumlah	1.262.017.389.902	1.476.793.407.269	Total
Deposito berjangka - pihak berelasi			Time deposits - related parties
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	250.000.000.000	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Sub Jumlah	250.000.000.000	-	Sub Total
Jumlah	1.512.017.389.902	1.476.793.407.269	Total
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun:			Interest rates of time deposits per annum:
Dalam Rupiah	5,00%	-	In Rupiah

Jangka waktu deposito berjangka rata-rata berkisar antara 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan.

The time deposits have terms of 1 (one) month to 3 (three) months.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 kurs konversi yang digunakan Grup masing-masing adalah US\$ 15.416 dan US\$ 15.731.

The conversion rates used by the Group on December 31, 2023 and 2022 were US\$ 15,416 dan US\$ 15,731, respectively.

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

6. PIUTANG USAHA

6. ACCOUNT RECEIVABLES

a. Jangka pendek

a. Short term

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pihak berelasi			Related parties
Jasa konstruksi			Construction service
PT Citra Karya Jabar Tol	513.583.055.561	257.393.138.483	PT Citra Karya Jabar Tol
PT Istaka Karya (Persero)	37.431.780.540	37.431.780.540	PT Istaka Karya (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	31.647.954.607	-	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
PT Brantas Abipraya - Prima KSO	16.460.361.757	-	PT Brantas Abipraya - Prima KSO
PT Brantas Abipraya - TGP - Supraharmonia KSO	15.179.607.411	-	PT Brantas Abipraya - TGP - Supraharmonia KSO
PT Utama Karya (Persero)	14.156.575.225	-	PT Utama Karya (Persero)
PT Brantas Abipraya - Deta KSO	11.813.621.464	-	PT Brantas Abipraya - Deta KSO
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Dinas PU dan Penataan Ruang	9.242.399.881	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Dinas PU dan Penataan Ruang
Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi	9.152.219.922	-	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Kementerian PUPR	6.837.547.173	36.556.709.632	Kementerian PUPR
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	4.296.773.135	-	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
PT Brantas Abipraya - Sacna - BRP KSO	4.150.368.168	-	PT Brantas Abipraya - Sacna - BRP KSO
PT Brantas Abipraya - SBS - Silcon KSO	3.200.170.301	-	PT Brantas Abipraya - SBS - Silcon KSO
PT Patra Jasa	2.971.186.836	-	PT Patra Jasa
PT Semen Indogreen Sentosa	2.767.269.739	-	PT Semen Indogreen Sentosa
PT Angkasa Pura II (Persero)	2.473.814.247	-	PT Angkasa Pura II
PT Brantas Abipraya - Adhi KSO	2.129.654.884	-	PT Brantas Abipraya - Adhi KSO
PT Brantas Abipraya - Adhi Karya - Marga Konstruksi Nusantara KSO	2.062.867.299	-	PT Brantas Abipraya - Adhi Karya - Marga Konstruksi Nusantara KSO
Sacna - KAI KSO	1.913.914.800	-	Sacna - KAI KSO
PT Brantas Abipraya - Tata Guna Patria - Supraharmonia Consultindo KSO	1.535.515.454	-	PT Brantas Abipraya - Tata Guna Patria - Supraharmonia Consultindo KSO
Abipraya-Kemitraan, KSO	1.214.602.077	-	Abipraya-Kemitraan, KSO
Jalintim Adhi Abipraya (JAA)	-	18.894.890.482	Jalintim Adhi Abipraya (JAA)
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mahakam Ulu	-	7.488.138.798	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mahakam Ulu
PT Pelindo I (Persero)	-	5.735.889.723	PT Pelindo I (Persero)
PT Utama Karya (Persero)	-	4.702.607.575	PT Utama Karya (Persero)
Perum Perikanan Indonesia Cabang Jakarta	-	4.296.773.135	Perum Perikanan Indonesia Cabang Jakarta
Perum Perumnas	-	3.423.239.497	Perum Perumnas
Lain-lain (dibawah Rp1.000.000.000)	2.007.695.583	527.170.625	Others (below Rp1,000,000,000)
Jumlah	696.228.956.064	376.450.338.490	Total
<u>Piutang ventura bersama - jangka pendek</u>			<u>Joint ventures receivables - short term</u>
PT Brantas Abipraya - PT Pelita Nusa Perkasa KSO	69.526.015.804	-	PT Brantas Abipraya - PT Pelita Nusa Perkasa KSO
Abipraya - Sacna - BRP KSO	61.534.546.432	-	Abipraya - Sacna - BRP KSO
PT Brantas Abipraya - Bahagia Bangun Nusa KSO	44.450.250.661	-	PT Brantas Abipraya - Bahagia Bangun Nusa KSO
Hutama - Adhi - Abipraya KSO	36.804.653.829	-	Hutama - Adhi - Abipraya KSO
Abipraya - Indrapurindo - Pelita Nusa KSO	32.674.733.027	-	Abipraya - Indrapurindo - Pelita Nusa KSO

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Waskita-Abipraya, KSO.	30.474.681.489	-	Waskita-Abipraya, KSO.
Abipraya-Bumi Karsa-CPA KSO	26.970.306.165	-	Abipraya-Bumil Karsa-CPA KSO
PT Abipraya - Pelita KSO	25.966.530.607	42.780.620.698	PT Abipraya - Pelita KSO
PT Abipraya-Taruna-Gemuntur KSO	16.900.842.268	-	PT Abipraya-Taruna-Gemuntur KSO
Abipraya - Maju KSO	14.617.317.592	-	Abipraya - Maju KSO
PT Brantas Abipraya - PT Aset Prima Tama - PT Pusaka Dewa Kresna	13.201.591.024	-	PT Brantas Abipraya - PT Aset Prima Tama - PT Pusaka Dewa Kresna
PT Brantas Abipraya - Suryaprima KSO	12.320.558.530	-	PT Brantas Abipraya - Suryaprima KSO
PT Brantas Abipraya - Memiontec, KSO	11.130.306.533	-	PT Brantas Abipraya - Memiontec, KSO
PT Brantas Abipraya-Mina KSO	8.887.221.246	-	PT Brantas Abipraya-Mina KSO
PT Abipraya Langgeng Marinda KSO	7.641.390.568	-	PT Abipraya Langgeng Marinda KSO
PT Brantas Abipraya - PT Bengalon Jaya Lestari KSO	6.596.950.652	-	PT Brantas Abipraya - PT Bengalon Jaya Lestari KSO
Abipraya - Adhi KSO	4.901.882.582	-	Abipraya - Adhi KSO
PT Brantas Abipraya - Wika	4.261.903.611	-	PT Brantas Abipraya - Wika
PT Abipraya - Lestari KSO	3.755.567.332	-	PT Abipraya - Lestari KSO
Abipraya - Eria Makmur KSO	3.687.967.110	-	Abipraya - Eria Makmur KSO
PT Lince Romauli Raya - PT Guna Rogate Indah - PT Bahana Prima Nusantara KSO	3.094.208.411	7.067.193.175	PT Lince Romauli Raya - PT Guna Rogate Indah - PT Bahana Prima Nusantara KSO
Adhi - Abipraya KSO	2.983.652.856	-	Adhi - Abipraya KSO
Abipraya - Daka KSO	2.751.237.106	-	Abipraya - Daka KSO
Sumber Cahaya Agung - PT Guna Rogate Indah - PT Bina Rekayas Anugrah	2.191.740.485	-	Sumber Cahaya Agung - PT Guna Rogate Indah - PT Bina Rekayas Anugrah
PT Abipraya - Megatama KSO	1.367.054.263	-	PT Abipraya - Megatama KSO
PT Brantas Abipraya - PT Utama Karya - PT Bahagia Bangun Nusa KSO	-	45.625.760.945	PT Brantas Abipraya - PT Utama Karya - PT Bahagia Bangun Nusa KSO
Abipraya - Pelita Nusa KSO	-	20.856.407.272	Abipraya - Pelita Nusa KSO
PT Brantas Abipraya - PT Universal Surya Prima KSO	-	9.702.369.765	PT Brantas Abipraya - PT Universal Surya Prima KSO
Abipraya - Bengalon KSO	-	3.240.664.946	Abipraya - Bengalon KSO
PT Utama Karya - PT Brantas Abipraya KSO	-	-	PT Utama Karya - PT Brantas Abipraya KSO
Lain-lain (dibawah Rp1.000.000.000)	3.972.124.495	1.435.936.848	Others (below Rp1,000,000,000)
Jumlah	452.665.234.678	130.708.953.649	Total
Produk beton	25.925.440.320	24.200.093.667	Concrete product
Jasa alat	85.161.491.030	88.236.686.151	Tool services
Jumlah pihak berelasi	1.259.981.122.092	619.596.071.957	Total related parties
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian kredit	(50.247.792.717)	(44.843.653.368)	Allowance for credit losses
Jumlah pihak berelasi - bersih	1.209.733.329.375	574.752.418.589	Total related parties - net
Pihak ketiga			Third parties
Jasa konstruksi			Construction service
KSU Perumnas-PT Bakrie Pangripta Loka	65.049.756.665	72.973.831.171	KSU Perumnas-PT Bakrie Pangripta Loka
PT Sapta Tunggal Mulia	55.992.927.678	55.992.927.678	PT Sapta Tunggal Mulia
Apartemen Centro City Tower	19.691.590.015	-	Apartemen Centro City Tower
PT Anggareksa Lokeswara	13.192.249.658	13.192.249.658	PT Anggareksa Lokeswara
PT Sahid Inti Dinamika	7.319.752.235	7.319.752.235	PT Sahid Inti Dinamika
PT Magna Beatum	6.819.670.000	6.819.670.000	PT Magna Beatum
PT Dua Putra Bengawan	4.352.346.744	7.371.346.744	PT Dua Putra Bengawan

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
PT Wijaya Graha Prima	3.771.057.709	-	PT Wijaya Graha Prima
PT Megah Maminasata	2.262.040.874	2.262.040.874	PT Megah Maminasata
PT Kurnia Bentan Sejahtera	-	28.316.161.988	PT Kurnia Bentan Sejahtera
PT Multhi Artha Griya Kerjasama Operasi	-	19.691.590.015	PT Multhi Artha Griya Kerjasama Operasi
Pendayagunaan Air Umbulan (KSU-PAU)	-	9.077.287.500	Pendayagunaan Air Umbulan (KSU-PAU)
Universitas Muhammadiyah Surakarta	-	118.752.526	Universitas Muhammadiyah Surakarta
Sub Jumlah	178.451.391.578	223.135.610.389	Total
Pihak ketiga			Third parties
Jasa non konstruksi			Non-construction services
Individual (penjualan properti) <i>Building management</i>	100.424.683.174	111.685.922.113	Individual (property's sales) <i>Building management</i>
Produk beton	54.413.715.529	15.915.541.226	Concrete product
Sewa alat	15.500.740.506	6.139.049.740	Equipment rent
Lain-lain	-	1.131.276.569	Others
Sub Jumlah	170.339.139.209	137.154.108.130	Sub Total
Jumlah pihak ketiga	348.790.530.787	360.289.718.519	Total third parties
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian kredit	(107.946.513.675)	(29.901.447.712)	Allowance for credit losses
Jumlah pihak ketiga - bersih	240.844.017.112	330.388.270.807	Total third parties - net
Jumlah piutang usaha - bersih	1.450.577.346.487	905.140.689.396	Total account receivables - net

b. Jangka panjang

b. Long term

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Abipraya - Bumi Karsa - Istaka KSO	209.123.211.073	-	Abipraya - Bumi Karsa - Istaka KSO
Abipraya - Pelita KSO	152.302.299.414	-	Abipraya - Pelita KSO
Hutama - WIKA - BAP KSO	5.836.226.064	-	Hutama - WIKA - BAP KSO
Hutama - Adhi - Abipraya KSO	-	2.151.796.194	Hutama - Adhi - Abipraya KSO
Lain-lain (dibawah Rp1.000.000.000)	749.788.435	1.038.828.229	Others (below Rp1.000.000.000)
Jumlah piutang ventura - jangka panjang	368.011.524.986	3.190.624.423	Total joint ventures receivables - long term

Piutang *building management* merupakan piutang kepada tenant atas pengelolaan apartemen Urban Heights Residences.

Receivables from *building management* represent receivables from tenants for services charge of Urban Heights Residences apartments.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh nilai tercatat piutang usaha Grup berdenominasi Rupiah. Piutang usaha dijaminkan atas utang bank (Catatan 28).

As of December 31, 2023 and 2022, all the carrying amount of the Group's trade receivables were denominated in Rupiah. Trade accounts receivables were used as collateral to bank loans (Note 28).

Jangka waktu rata-rata kredit penjualan barang adalah 60-90 hari. Tidak ada bunga yang dibebankan pada piutang usaha untuk 60-90 hari pertama dari tanggal faktur.

The average credit period on sale of goods is 60-90 days. No interest is charged on trade accounts receivable for the first 60-90 days from the date of the invoice.

Cadangan kerugian kredit untuk piutang usaha telah diukur sejumlah ECL sepanjang umur. ECL pada

Allowance for credit losses for trade accounts receivable has been measured at an amount equal

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

piutang usaha diestimasi berdasarkan matriks provisi dengan mengacu pada pengalaman gagal bayar debitur masa lalu dan analisis posisi keuangan debitur saat ini, disesuaikan dengan faktor-faktor yang spesifik dari debitur dan kondisi ekonomi umum industri di mana debitur beroperasi. Grup telah mengakui penyisihan kerugian sebesar 100% atas seluruh piutang yang telah tertunggak lebih dari jangka waktu tertentu. Tidak ada perubahan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan berjalan.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha di kemudian hari.

Mutasi cadangan kerugian kredit adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023
Saldo awal tahun berjalan	74.745.101.080
Tambahan cadangan kerugian	83.925.230.208
Jumlah dipulihkan	(476.024.896)
Penghapusan piutang	-
Saldo akhir tahun	158.194.306.392

to lifetime ECL. The ECL on trade accounts receivable are estimated using a provision matrix by reference to past default experience of the debtor and an analysis of the debtor's current financial position, adjusted for factors that are specific to the debtors and general economic conditions of the industry in which the debtors operate. The Group has recognized a loss allowance of 100% against all receivables past due over certain period of time. There has been no change in the estimation techniques or significant assumptions made during the current reporting period.

Management believes that allowance for impairment losses is adequate to cover possible loss from uncollectible accounts receivables in the future.

The movements in allowance for credit losses are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	
	60.511.199.849	Balance at beginning of year
	14.658.592.884	Addition in loss allowance due
	(411.640.405)	Amounts recovered
	(13.051.248)	Write-off of accounts receivable
	74.745.101.080	Balance at end of year

7. PIUTANG RETENSI

	31 Desember/ December 31, 2023
Piutang berelasi	
PT Citra Karya Jabar Tol	107.840.300.758
PT Perumnas (Persero)	26.834.636.754
Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SNVT Pembangunan Bendungan BWS Bali-Penida	18.114.689.926
Kementerian PUPR SNVT Serayu Opak	15.106.688.258
Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	13.303.650.898
Kementerian PUPR SNVT Pembangunan Bendungan II BWS Nusa Tenggara II	12.832.720.653
Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda	10.670.969.565
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi	10.550.007.797
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	7.512.415.303
Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulbar	6.052.557.510

7. RETENTION RECEIVABLES

	31 Desember/ December 31, 2022	Related parties
	45.371.508.349	PT Citra Karya Jabar Tol
	27.378.548.807	PT Perumnas (Persero)
		Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SNVT Pembangunan Bendungan BWS Bali-Penida
		Kementerian PUPR SNVT Serayu Opak
		Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum
		Kementerian PUPR SNVT Pembangunan Bendungan II BWS Nusa Tenggara II
		Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda
		Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi
	6.787.500.000	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
		Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulbar

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
PT Trans Marga Jateng Kementerian PUPR, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, SNVT PJPA Sumatera VIII Provinsi Sumatera Selatan	6.039.628.876	3.963.723.243	PT Trans Marga Jateng Kementerian PUPR, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, SNVT PJPA Sumatera VIII Provinsi Sumatera Selatan
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Bank Indonesia	3.941.441.441	-	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Bank Indonesia
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.239.052.000	3.239.052.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Serayu Opak	2.599.234.981	2.000.000.000	SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Serayu Opak
PT Jalintim Adhi Abipraya	2.092.591.863	2.092.591.863	PT Jalintim Adhi Abipraya
Pemukiman Wilayah I Prov. NTT Kementerian PUPR SNVT PJPA Cimanuk – Cisanggarung	-	11.935.702.438	Pemukiman Wilayah I Prov. NTT Kementerian PUPR SNVT PJPA Cimanuk – Cisanggarung
BBPJJN Jatim-Bali Dirjen Bina Marga Kemen PUPR	-	7.582.356.912	BBPJJN Jatim-Bali Dirjen Bina Marga Kemen PUPR
PPK BPB Satker Pel Prasarana Pemukiman Wil. II Prov Sumut	-	5.692.500.000	PPK BPB Satker Pel Prasarana Pemukiman Wil. II Prov Sumut
Lain-lain (dibawah Rp2.000.000.000)	-	5.164.650.966	Lain-lain (dibawah Rp2.000.000.000)
Sub Jumlah	251.764.239.991	139.024.097.510	Sub Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian kredit	(340.142.316)	(231.680.427)	Allowance for credit losses
Jumlah pihak berelasi – bersih	251.424.097.675	138.792.417.083	Total related parties – net
Pihak ketiga			Third parties
Universitas Airlangga	6.976.836.182	12.584.065.654	Universitas Airlangga
Apartemen Centro City Tower	6.153.570.159	-	Apartemen Centro City Tower
KSU PT Bakrie Pangripta Loka – PT Perum Perumnas	5.778.205.493	6.976.836.182	KSU PT Bakrie Pangripta Loka – PT Perum Perumnas
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon	4.716.029.990	-	PT Krakatau Industrial Estate Cilegon
PT Multhi Artha Griya	4.468.285.795	4.716.029.990	PT Multhi Artha Griya
PT Kurnia Bentan Sejahtera	2.886.547.761	3.447.164.406	PT Kurnia Bentan Sejahtera
PT Sahid Inti Dinamika	2.198.650.750	-	PT Sahid Inti Dinamika
PT Pikko Land Development Tbk	-	5.778.205.493	PT Pikko Land Development Tbk
PT Sapta Tunggal Mulia	-	4.468.285.795	PT Sapta Tunggal Mulia
PT Anggareksa Lokeswara	-	2.886.547.761	PT Anggareksa Lokeswara
PT Meta Adhya Tirta Umbulan	-	2.552.275.000	PT Meta Adhya Tirta Umbulan
PT Indonic Tangerang Investment	-	1.243.750.000	PT Indonic Tangerang Investment
Lain-lain (dibawah Rp1.000.000.000)	1.747.647.878	1.204.308.656	Others (below Rp1,000,000,000)
Sub Jumlah	34.925.774.008	45.857.468.937	Sub Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.470.681.995)	(703.294.130)	Allowance for impairment losses
Jumlah pihak ketiga - bersih	33.455.092.013	45.154.174.807	Total third parties - net
Jumlah piutang retensi - bersih	284.879.189.688	183.946.591.890	Total retention receivables - net

Cadangan kerugian kredit untuk piutang retensi telah diukur sejumlah ECL sepanjang umur. ECL pada piutang usaha diestimasi berdasarkan matriks provisi dengan mengacu pada pengalaman gagal bayar debitur masa lalu dan analisis posisi keuangan debitur saat ini, disesuaikan dengan faktor-faktor yang spesifik dari debitur dan kondisi ekonomi umum industri di mana debitur beroperasi. Grup telah mengakui penyisihan kerugian sebesar 100% atas seluruh piutang yang telah tertunggak lebih dari jangka waktu tertentu.

Allowance for credit losses for retention receivable has been measured at an amount equal to lifetime ECL. The ECL on trade accounts receivable are estimated using a provision matrix by reference to past default experience of the debtor and an analysis of the debtor's current financial position, adjusted for factors that are specific to the debtors and general economic conditions of the industry in which the debtors operate. The Group has recognized a loss allowance of 100% against all receivables past due over certain period of time.

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Tidak ada perubahan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan berjalan.

There has been no change in the estimation techniques or significant assumptions made during the current reporting period.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang retensi adalah cukup.

Management believes that the allowance for impairment losses of retention receivable is adequate.

Mutasi cadangan kerugian kredit adalah sebagai berikut:

The movements in allowance for credit losses are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal tahun berjalan	934.974.557	797.681.607	<i>Balance at beginning of year</i>
Tambahan cadangan kerugian	875.849.754	137.292.950	<i>Addition in loss allowance due</i>
Jumlah dipulihkan	-	-	<i>Amounts recovered</i>
Saldo akhir tahun	1.810.824.311	934.974.557	<i>Balance at end of year</i>

8. TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA

8. GROSS AMOUNT DUE FROM COSTUMERS

Rincian akumulasi biaya konstruksi dan penagihan yang telah dilakukan sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut:

Details of accumulated construction cost and progress billings which has done up to the consolidated statement of financial position date are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Biaya konstruksi kumulatif	4.535.835.043.800	3.345.702.726.001	<i>Cumulative construction cost</i>
Laba konstruksi kumulatif yang diakui	657.880.574.995	307.801.591.158	<i>Cumulative recognized construction profit</i>
Jumlah	5.193.715.618.795	3.653.504.317.159	<i>Total</i>
Penagihan sampai saat ini	(4.650.711.220.552)	(2.659.683.748.206)	<i>Progress billing to this date</i>
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	543.004.398.243	993.820.568.953	<i>Gross amount due from costumers</i>

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah	60.738.610.965	-	<i>Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah</i>
Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda	36.085.303.819	-	<i>Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda</i>
Perum BULOG	34.695.510.885	64.140.768.548	<i>Perum BULOG</i>
Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, PT Perumnas (Persero)	31.313.941.193	-	<i>Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, PT Perumnas (Persero)</i>
Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII	28.633.469.333	-	<i>Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII</i>
Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII	24.930.114.220	-	<i>Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII</i>

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

	31 Desember/ December 31, 2023		31 Desember/ December 31, 2022	
Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara	22.261.532.412	-		Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara
Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Sumatera I	16.487.698.382	-		Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Sumatera I
Kementerian PUPR, Dirjen Cipta Karya, Wilayah Sulawesi Barat	13.690.706.168		16.065.158.366	Kementerian PUPR, Dirjen Cipta Karya, Wilayah Sulawesi Barat
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan	11.269.930.237	-		Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	7.543.171.773		17.990.084.185	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kementerian PUPR, Direktorat Jendral Perumahan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II	7.517.648.288	-		Kementerian PUPR, Direktorat Jendral Perumahan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II
PT Pelabuhan Indonesia III	6.515.700.000		27.600.234.428	PT Pelabuhan Indonesia III
Kementerian PUPR, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II	5.989.184.162	-		Kementerian PUPR, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II
PT Citra Karya Jabar Tol	3.356.987.355		323.731.311.154	PT Citra Karya Jabar Tol
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	3.268.977.543	-		Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
PT Utama Karya (Persero)	1.959.528.614		16.917.767.440	PT Utama Karya (Persero)
Kementerian PUPR, Direktorat Jendral Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II	1.108.783.697	-		Kementerian PUPR, Direktorat Jendral Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II
PT Jalintim Adhi Abipraya	-		71.133.095.392	PT Jalintim Adhi Abipraya
Balai Wilayah Sungai NTT II	-		47.467.039.729	Balai Wilayah Sungai NTT II
PPK BPB Satker Pel Prasarana Pemukiman Wil. II Prov Sumut	-		33.094.122.315	PPK BPB Satker Pel Prasarana Pemukiman Wil. II Prov Sumut
Kementerian PUPR, Dirjen Perumahan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II	-		26.568.218.558	Kementerian PUPR, Dirjen Perumahan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II
PT Trans Marga Jateng	-		22.003.718.456	PT Trans Marga Jateng
Kementerian PUPR, Dirjen SDA, BBWS Citarum, Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum	-		21.416.024.054	Kementerian PUPR, Dirjen SDA, BBWS Citarum, Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Citarum
PT Angkasa Pura II (Persero)	-		17.488.493.526	PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Trans Marga Jateng	-		12.814.727.978	PT Trans Marga Jateng
PT Pelabuhan Indonesia III	-		6.515.700.000	PT Pelabuhan Indonesia III
Bank Indonesia	-		6.016.718.780	Bank Indonesia
SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII	-		5.735.168.213	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	-		4.624.572.318	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Institut Teknologi Sumatera	-		4.270.881.115	Institut Teknologi Sumatera
PT BA Bank Mandiri KSO	-		4.085.170.787	PT BA Bank Mandiri KSO
PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Banten	-		3.137.573.875	PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Banten
Kementerian PUPR, Dirjen SDA, BBWS Serayu Opak, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Serayu Opak	-		2.601.001.788	Kementerian PUPR, Dirjen SDA, BBWS Serayu Opak, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Serayu Opak
Pengurus Masjid Ikhtiar Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea	-		1.114.005.629	Pengurus Masjid Ikhtiar Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea
Kementerian PUPR, Dirjen SDA, BBWS Serayu Opak, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air	-		546.859.396	Kementerian PUPR, Dirjen SDA, BBWS Serayu Opak, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Satker penyediaan Perumahan Prov. NTT	-	68.399.131	Satker penyediaan Perumahan Prov. NTT
BBWS Bengawan Solo	-	6.626.756	BBWS Bengawan Solo
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000.000.000)	4.609.717.516	936.361.102	Others (each below Rp1.000.000.000)
Sub Jumlah	321.976.516.562	758.089.803.019	Sub Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(413.470.656)	(156.316.460)	Allowance for impairment losses
Sub jumlah pihak berelasi - bersih	321.563.045.906	757.933.486.559	Total related parties - net
Pihak ketiga			Third parties
PT Graha Indah Semesta	107.305.464.102	108.999.464.102	PT Graha Indah Semesta
PT Bakrie Pangaripta Loka – PT Perum Perumnas KSO	27.071.241.834	27.071.241.834	PT Bakrie Pangaripta Loka – PT Perum Perumnas KSO
PT Magna Beatum	19.319.627.129	19.319.627.129	PT Magna Beatum
PT Sapta Tunggal Mulia	11.732.267.163	11.732.267.163	PT Sapta Tunggal Mulia
PT Sahid Inti Dinamika	10.711.797.977	10.711.797.977	PT Sahid Inti Dinamika
PT Patra Jasa	7.368.418.652	-	PT Patra Jasa
PT Pertamina Port and Logistic	6.454.066.250	-	PT Pertamina Port and Logistic
PT Wijaya Graha Prima	6.296.732.362	-	PT Wijaya Graha Prima
CV Faathir Rizka	5.996.762.223	-	CV Faathir Rizka
PT Anggareksa Lokeswara	5.599.265.724	5.599.265.724	PT Anggareksa Lokeswara
PT Pikko Land Development, Tbk	2.831.871.290	2.831.871.290	PT Pikko Land Development, Tbk
Lain-Lain (dibawah Rp1.000.000.000)	2.537.531.706	2.271.531.751	Other (less than Rp1,000,000,000)
Sub jumlah	213.225.046.412	188.537.066.970	Sub total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(24.030.929.273)	(17.670.605.020)	Allowance for impairment losses
Jumlah pihak ketiga – bersih	189.194.117.139	170.866.461.950	Total third parties - net
Jumlah tagihan bruto kepada pemberi kerja - bersih	510.757.163.045	928.799.948.509	Total gross amount due from costumers - net
Rincian pekerjaan dalam proses pelanggan adalah sebagai berikut:			Detail of work in progress based on customers are as follows:
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pihak berelasi			
Kementerian PUPR, Dirjen SDA, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas	32.247.235.198	-	Kementerian PUPR, Dirjen SDA, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas
Perum Perumnas	-	45.217.307.285	Perum Perumnas
Kementerian PUPR, Dirjen SDA Wilayah Sulawesi Selatan	-	12.382.270.000	Kementerian PUPR, Dirjen SDA Wilayah Sulawesi Selatan
Direktorat Jenderal Cipta Karya Prov Jawa Barat	-	3.592.144.904	Direktorat Jenderal Cipta Karya Prov Jawa Barat
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Prov. Jawa Barat	-	1.842.000.000	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Prov. Jawa Barat
Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wil I Prov. Jawa Barat	-	1.141.717.499	Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wil I Prov. Jawa Barat
Direktorat Jenderal Cipta Karya Prov Jawa Barat	-	845.180.756	Direktorat Jenderal Cipta Karya Prov Jawa Barat
Jumlah pekerjaan dalam proses	32.247.235.198	65.020.620.444	Total work in progress
Mutasi cadangan kerugian kredit adalah sebagai berikut:			The movements in allowance for credit losses are as follows:

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal tahun berjalan	17.826.921.480	12.025.986.180	Balance at beginning of year
Tambahan cadangan kerugian	6.617.478.449	5.848.268.600	Addition in loss allowance due
Jumlah dipulihkan	-	(47.333.300)	Amounts recovered
Reklasifikasi ke piutang usaha	-	-	Reclassification to trade receivable
Saldo akhir tahun	24.444.399.929	17.826.921.480	Balance at end of year

9. PIUTANG LAIN-LAIN

9. OTHER RECEIVABLES

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pihak berelasi			Related parties
Kementerian PUPR	11.782.308.444	-	Kementerian PUPR
PT Jalintim Adhi Abipraya	1.962.658.533	1.820.908.096	PT Jalintim Adhi Abipraya
Brantas-Adyawinsa-Dian Persada KSO	-	147.039.312	Brantas-Adyawinsa-Dian Persada KSO
Yayasan Abipraya Sejahtera	59.619.320	59.619.320	Yayasan Abipraya Sejahtera
Koperasi Karyawan Brantas Abipraya	2.656.166	-	Koperasi Karyawan Brantas Abipraya
Jumlah pihak berelasi - bersih	13.807.242.463	2.027.566.728	Total related parties – net
Pihak ketiga			Third parties
Klaim asuransi Construction All Risk (CAR)	21.679.725.564	23.971.237.105	Insurance claim Construction All Risk (CAR)
Hibah	7.862.852.537	-	Grant
Building Management	6.723.896.363	-	Building Management
PT Garanta Bangun Persada	6.027.637.501	-	PT Garanta Bangun Persada
Penjualan material	1.964.764.000	3.164.764.000	Material sales
Pegawai	1.015.699.571	1.106.918.386	Employee
Lain-lain	886.511.560	1.205.764.929	Others
Sub jumlah	46.161.087.096	29.448.684.420	Sub total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(22.039.476.587)	(15.361.040.852)	Allowance for impairment losses
Jumlah pihak ketiga – bersih	24.121.610.509	14.087.643.568	Total third parties – net

Piutang lain-lain Kementerian PUPR merupakan piutang lain-lain atas pengadaan tanah kepada warga terdampak bangunan pada pembangunan Embung Anak Munting Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Nota Kesepahaman antara Satuan Kerja Vertikal Tertentu Air Tanah dan Air Baku Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan PT Brantas Abipraya (Persero) No. HK.02.03/SNVT/AT&AB-NT.II.304 tanggal 12 Mei 2023 tentang penggunaan dana badan usaha terlebih dahulu (dana talangan) untuk pembayaran ganti rugi pengadaan tanah kepada warga terdampak pembangunan (pemilik lahan yang dibebaskan).

Piutang lain-lain dari PT Jalintim Adhi Abipraya (JAA) merupakan piutang jaminan pelaksanaan masa konstruksi dan pembayaran gaji pegawai Perusahaan yang di tempatkan di JAA.

Other receivables from Kementerian PUPR represent other receivables for the procurement of land to residents affected by buildings in the construction of the Anak Munting Reservoir, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province based on a Memorandum of Understanding between Satuan Kerja Vertikal Tertentu Air Tanah dan Air Baku Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat with PT Brantas Abipraya (Persero) No. HK.02.03/SNVT/AT&AB-NT.II.304 dated May 12, 2023 concerning the use of business entity funds in advance (bailout funds) for payment of compensation for land acquisition to residents affected by development (owners of acquired land).

Other receivables from PT Jalintim Adhi Abipraya (JAA) represent performance bond guarantee for the construction and payment of salaries for the Company's employees placed at JAA.

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Piutang lain-lain Brantas-Adyawinsa-Dian Persada KSO merupakan piutang atas pembayaran gaji pegawai KSO selama pengerjaan proyek pengembangan, pembangunan, kepemilikan, penjualan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap sesuai dengan perjanjian KSO Nomor: 001/KSO/BE-AEP-DP/II/2019.

Other receivables from Brantas-Adyawinsa-Dian Persada KSO are receivables for KSO employee salaries during the development, construction, ownership, sale and operation of the Atap Solar Power Plant (PLTS) in accordance with the KSO agreement Number: 001/KSO/BE-AEP-DP/II/2019.

Piutang lain-lain Yayasan Abipraya Sejahtera merupakan dana talangan setoran modal Yayasan Abipraya Sejahtera kepada PT Perjaya Brafo Energi, PT Brantas Cakrawala Energi dan PT Brantas Energi.

Other receivables from Yayasan Abipraya Sejahtera represent a capital injection of bailout funds of Yayasan Abipraya Sejahtera in PT Perjaya Brafo Energi, PT Brantas Cakrawala Energi and PT Brantas Energi.

Klaim asuransi CAR per 31 Desember 2022, merupakan klaim atas proyek:

CAR insurance claims as of December 31, 2022, are project claims:

- Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pacal
- Proyek Pembangunan Waduk Tukul
- Proyek Pembangunan PLTM Maiting Hulu
- Proyek Pembangunan Rumah Susun Jalan Inspeksi BKT Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur
- Proyek Pembangunan Kantor Bupati, DPRD, Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu Tahap I

- *Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pacal*
- *Proyek Pembangunan Waduk Tukul*
- *Proyek Pembangunan PLTM Maiting Hulu*
- *Proyek Pembangunan Rumah Susun Jalan Inspeksi BKT Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur*
- *Proyek Pembangunan Kantor Bupati, DPRD, Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu Tahap I*

Piutang penjualan material sisa adalah piutang penjualan persediaan bahan baku material sisa proyek pekerjaan paket rekonstruksi jalan Seredala - Dekai (MYC) Papua kepada beberapa pihak ketiga.

Receivables from sales of residual materials are the acquisition of sales of raw material inventories left over from the Seredala - Dekai (MYC) Papua road reconstruction work package project to several third parties.

Piutang kepada PT Garanta Bangun Persada merupakan piutang atas penjualan aktiva tetap bergerak alat berat kondisi operasi lokasi Yakuhimo, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Aktiva Tetap Bergerak Alat Berat No.001/TPATB/SPJB/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023.

Receivables from PT Garanta Bangun Persada represent receivables for the sale of movable fixed assets, heavy equipment, operating conditions at the Yakuhimo location, based on the Sale and Purchase Agreement for Heavy Equipment Movable Fixed Assets No.001/TPATB/SPJB/VI/2023 dated 16 June 2023.

Piutang lain-lain hibah merupakan piutang hibah kepada Palladium International Limited atas dana hibah yang diberikan oleh Kedutaan Besar Inggris Jakarta dan Menteri Energi dan Sumber Daya dengan program Mentari untuk membantu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM) Batanghari 3 x 1,7MW sesuai dengan perjanjian hibah tanggal 14 November 2022 antara PT BTE dengan Palladium International Limited.

Other grants receivables represent grant receivables from Palladium International Limited for grant funds provided by the British Embassy Jakarta and the Minister of Energy and Resources with the Mentari program to assist in the construction of the 3 x 1.7MW Batanghari Micro Hydro Power Plant (PLTM) in accordance with grant agreement dated November 14, 2022 between PT BTE and Palladium International Limited.

Cadangan kerugian kredit untuk piutang lain-lain telah diukur sejumlah ECL sepanjang umur. ECL pada piutang lain-lain diestimasi berdasarkan matriks provisi dengan mengacu pada pengalaman gagal bayar debitur masa lalu dan analisis posisi keuangan debitur saat ini, disesuaikan dengan faktor-faktor yang spesifik dari debitur dan kondisi ekonomi umum industri di mana debitur beroperasi.

Allowance for credit losses for others accounts receivable has been measured at an amount equal to lifetime ECL. The ECL on others accounts receivable are estimated using a provision matrix by reference to past default experience of the debtor and an analysis of the debtor's current financial position, adjusted for factors that are specific to the debtors and general economic conditions of the

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Grup telah mengakui penyisihan kerugian sebesar 100% atas seluruh piutang yang telah tertunggak lebih dari jangka waktu tertentu.

industry in which the debtors operate. The Group has recognized a loss allowance of 100% against all receivables past due over several period.

Mutasi cadangan kerugian kredit adalah sebagai berikut:

The movements in allowance for credit losses are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal tahun berjalan	15.361.040.852	14.862.333.606	Balance at beginning of year
Tambahan cadangan kerugian	6.643.271.844	498.707.246	Addition in loss allowance due
Jumlah dipulihkan	35.163.891	-	Amounts recovered
Saldo akhir tahun	22.039.476.587	15.361.040.852	Balance at end of year

Tidak ada perubahan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan berjalan.

There has been no change in the estimation techniques or significant assumptions made during the current reporting period.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain adalah cukup.

Management believes that the allowance for impairment losses of other receivable is adequate.

10. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

10. FINANCE LEASE RECEIVABLES

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Piutang sewa pembiayaan	565.224.829.162	613.456.800.677	Finance lease receivables
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(347.620.605.347)	(388.455.749.094)	Unearned revenue on finance lease
Jumlah	217.604.223.815	225.001.051.583	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian kredit	(890.885.228)	(830.085.464)	Allowance for credit losses
Piutang sewa pembiayaan – bersih	216.713.338.587	224.170.966.119	Finance lease receivable – net
Dikurangi:			Less:
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(13.491.432.719)	(11.546.018.999)	Current portion
Piutang sewa jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu setahun	203.221.905.868	212.624.947.120	Long-term finance lease receivables - net current portion

Jumlah angsuran sewa pembiayaan sesuai dengan jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Total finance lease installments based on maturity date are as follows:

	Pembayaran minimum sewa pembiayaan/ Minimum lease payments		Nilai kini dari pembayaran minimum/ Present value of minimum lease payments		
	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Angsuran sewa pembiayaan					Finance lease installments
Telah jatuh tempo dan sampai dengan satu tahun	52.754.609.186	52.381.076.444	13.491.433.581	11.545.932.700	Due and within one year
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	512.470.306.278	561.075.724.233	204.112.790.234	213.455.118.883	More than one year up to five years
Sub Jumlah	565.224.915.464	613.456.800.677	217.604.223.815	225.001.051.583	Sub Total
Pendapatan sewa pembiayaan belum diakui					Unearned lease income due and within

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Telah jatuh tempo dan sampai dengan satu tahun	39.263.175.605	40.835.143.744	-	-	Due and within one year
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	308.357.516.044	347.620.605.350	-	-	More than one year up to five years
Sub Jumlah	347.620.691.649	388.455.749.094	-	-	Sub Total
Jumlah	217.604.223.815	225.001.051.583	217.604.223.815	225.001.051.583	Total

Mutasi cadangan kerugian kredit adalah sebagai berikut:

The movements in allowance for credit losses are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal	830.085.464	767.859.727	Balance at beginning of year
Penyisihan kerugian kredit	60.799.764	62.225.737	Allowance for credit losses
Saldo akhir	890.885.228	830.085.464	Ending balance

Merupakan piutang sewa atas jual – beli tenaga listrik antara BASE dan SBE dengan PT PLN (Persero) berdasarkan *Power Purchase Agreement* (“PPA”) dan berita acara COD masing-masing pada tanggal 19 Februari 2016 dan 13 April 2017.

Represents lease receivables for the sale - purchase of electricity between BASE and SBE with PT PLN (Persero) based on the *Power Purchase Agreement* (“PPA”) and COD dated February 19, 2016 and April 13, 2017, respectively.

Hak atas tanah BASE diperoleh berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (“HGB”) yang dapat diperbaharui dengan masa yang akan berakhir pada 22 Desember 2045. BASE yakin bahwa manajemen dapat memperbaharui hak tersebut.

The land rights of BASE were obtained based on a *Renewable Certificate of Usage Building Right* (“HGB”) with a period ending on December 22, 2045. BASE believed that the validity of the certificates can be extended.

Hak atas tanah SBE diperoleh berdasarkan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“IPPKH”) Nomor: SK.39/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang berakhir pada 15 Februari 2037 serta Sertifikat Hak Guna Bangunan (“HGB”) yang terdiri atas 2 HGB atas Gardu Hubung yang dapat diperbaharui dengan masa yang akan berakhir pada 6 Desember 2047. SBE yakin bahwa manajemen dapat memperbaharui hak tersebut.

The land rights of SBE were obtained based on the *Borrow to Use Permit of Forest Area* (“IPPKH”) Number: SK.39/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2019 dated January 17, 2019 which ended on February 15, 2037 as well as *Certificates of Building Usage Right* (“HGB”) which consists 2 HGB for renewable substations with a period ending on December 6, 2047. SBE believed that the validity of the certificates can be extended.

Pada tanggal 31 Desember 2023, aset pembangkit listrik terkait *Power Purchase Agreement* (“PPA”) BASE dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diasuransikan terhadap semua risiko kerusakan kepada PT Asuransi Perisai Listrik Nasional baik berupa bangunan gedung, mesin, dan peralatan pendukung dengan nilai pertanggungan senilai Rp39.912.342.892. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

As at December 31, 2023, hydro power plant assets related to the *Power Purchase Agreement* (“PPA”) BASE with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) were insured against all risks of damage with PT Asuransi Perisai Listrik Nasional the entire in the form of buildings, machinery, and ancillary equipment, with insurance coverage amounting to Rp39,912,342,892. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from the assets insured.

Pada tanggal 31 Desember 2023, PT SBE belum mengasuransikan bangunan gedung, mesin, dan peralatan pendukung PLTM Padang Guci-1 (3x2,0 MWp).

As at December 31, 2023, PT SBE has not yet insured the buildings, machines and supporting equipment of PLTM Padang Guci-1 (3x2.0 MWp).

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Pada tanggal 31 Desember 2022, aset pembangkit listrik terkait *Power Purchase Agreement* ("PPA") BASE dan SBE dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diasuransikan terhadap semua risiko kerusakan kepada PT Asuransi Binagriya Upakara baik berupa bangunan gedung, mesin, dan peralatan pendukung dengan nilai pertanggungan masing – masing senilai Rp39.912.342.892 dan Rp48.675.438.600. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

As at December 31, 2021, hydro power plant assets related to the *Power Purchase Agreement* ("PPA") BASE and SBE with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) were insured against all risks of damage with PT Asuransi Binagriya Upakara the entire in the form of buildings, machinery, and ancillary equipment, with insurance coverage amounting to Rp39,912,342,892 and Rp48,675,438,600, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from the assets insured.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tanah, mesin dan peralatan yang berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Gorontalo dan pembangkit listrik tenaga minihydro (PLTM) Padang Guci-1 tersebut dijaminkan pada PT Indonesia Infrastructure Finance dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu PT Bank BNI Syariah) sehubungan dengan pinjaman yang diterima BASE dan SBE (Catatan 29 - utang lembaga keuangan non bank).

As at December 31, 2023 and 2022, land, machine and equipment pertaining to solar cell power plant (PLTS) Gorontalo and minihydro power plants (PLTM) Padang Guci – 1 pledge guaranteed at PT Indonesia Infrastructure Finance and PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Formerly PT Bank BNI Syariah) in connection with the loan received by BASE and SBE (Note 29 - non-bank financial institution loan).

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

The management believes that the amount of allowance for impairment losses are adequate to cover the possible losses that might arise from uncollectible receivables.

11. ASET KEUANGAN DARI PROYEK KONSESI

11. FINANCIAL ASSETS FROM CONCESSION PROJECT

Merupakan pokok aset keuangan konsesi atas instalasi dan pembangkit listrik per 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut:

Represents principal of concession financial assets on the installation and power plant as of December 31, 2023 dan 2022, as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal	863.200.543.430	558.862.620.132	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	-	5.275.573.817	<i>Additions</i>
Pendapatan keuangan dari konsesi jasa	100.130.848.840	83.233.233.199	<i>Finance revenue from concession service</i>
Reklasifikasi dari aset dalam pelaksanaan	-	320.465.483.321	<i>Reclassification from assets under completion</i>
Saldo akhir	963.331.392.270	967.836.910.469	<i>Ending balance</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Penerimaan dari PLN	(118.184.949.726)	(104.636.367.039)	<i>Received from PLN</i>
Jumlah	845.146.442.544	863.200.543.430	<i>Total</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun			<i>Current portion</i>
Telah difakturkan	5.193.264.876	15.885.500.283	<i>Billed</i>
Belum difakturkan	8.261.933.457	7.361.865.479	<i>Unbilled</i>
Jumlah bagian jangka pendek	13.455.198.333	23.247.365.762	<i>Total short-term</i>
Bagian jangka panjang	831.691.244.211	839.953.177.668	<i>Long-term</i>

Aset keuangan konsesi ini terkait dengan pengembalian biaya modal atas pembangkit listrik, sebagaimana diatur dalam PPA dengan PLN. Anak

These concession financial assets related to the return of capital costs on power plants, as stipulated in the PPA with PLN. Company subsidiaries have

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Perusahaan memiliki hak kontraktual dari perjanjian konsesi jasa untuk menerima jumlah pembayaran tetap selama masa konsesi.

contractual rights of a service concession arrangements to receive a fixed payment amount during the concession period.

Piutang lancar merupakan piutang atas pengembalian biaya modal atas pembangkit listrik yang akan dilunasi kurang dari satu tahun. Estimasi pelunasan tersebut berdasarkan jadwal yang telah disepakati didalam PPA dengan PLN.

Current receivables are receivables for the return of capital costs on power plants that will be repaid less than one year. Estimation is based on the repayment schedule agreed in the PPA with PLN.

BCE telah menyelesaikan konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) Sako di Padang dan tanggal operasi komersial (COD) PLTM tersebut dimulai pada tanggal 27 Desember 2019.

BCE has completed its construction on Minihydro Power Plant (PLTM) Sako in Padang and the commercial operation date (COD) of its PLTM on December 27, 2019.

BHE telah menyelesaikan konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) Padang Guci 2 di Bengkulu dan tanggal operasi komersial (COD) PLTM tersebut dimulai pada tanggal 13 Desember 2021.

BHE has completed its construction on Minihydro Power Plant (PLTM) Padang Guci 2 in Bengkulu and the commercial operation date (COD) of its PLTM on December 13, 2021.

BPE telah menyelesaikan konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) Maiting Hulu 2 di Sulawesi Selatan dan tanggal operasi komersial (COD) PLTM tersebut dimulai pada tanggal 1 Mei 2022.

BPE has completed its construction on Minihydro Power Plant (PLTM) Maiting Hulu 2 in South Sulawesi and the commercial operation date (COD) of its PLTM on May 1, 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2023, aset pembangkit listrik terkait *Power Purchase Agreement* ("PPA") BPE dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) diasuransikan terhadap semua risiko kerusakan kepada PT Asuransi Perisai Listrik Nasional berupa bangunan gedung, mesin, peralatan pendukung dengan nilai pertanggungan sebesar Rp228.000.000.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungan.

As at December 31, 2023, hydro power plant assets related to the Power Purchase Agreement ("PPA") BPE with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) were insured against all risks of damage with PT Asuransi Perisai Listrik Nasional the entire in the form of buildings, machinery, ancillary equipment with insurance coverage amounting to Rp228.000.000.000. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from the assets insured.

Pada tanggal 31 Desember 2023, PT BCE dan PT BHE belum mengasuransikan bangunan gedung, mesin, dan peralatan pendukung PLTM Sako-1 (2 x 3,0 MWp) dan PLTM Padang Guci 2 (2 x 3,5 MW).

As of December 31, 2023, PT BCE and PT BHE has not yet insured the buildings, machines and supporting equipment of PLTM Sako-1 (2 x 3,0 MWp) and PLTM Padang Guci 2 (2 x 3,5 MW).

Hak atas tanah BCE diperoleh berdasarkan Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) Nomor: SK.217/KSD AE-SET/2015 tanggal 17 September 2015 serta Sertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB") atas Akses Jalan yang dapat diperbaharui dengan masa yang akan berakhir pada 21 April 2049. BCE yakin bahwa manajemen dapat memperbaharui hak tersebut.

The land rights of PT BCE were obtained based on Water Energy Utilization Water ("IUPEA") Number: SK.217/KSD AE-SET/2015 dated September 17, 2015 as well as the Certificates of Building Usage right ("HGB") for Road Access which can be renewed with period that will end on April 21, 2049. BCE believes that the validity of the certificates can be extended.

BHE memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH") sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 31/1/IPPKH/PMDN/2017 tanggal 12 Desember 2017 seluas 68,74 Ha dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019. Izin tersebut telah

BHE obtained a Borrow to Use Permit of Forest Area ("IPPKH") in accordance with the Decree of the Head of the Investment Coordinating Board on behalf of the Minister of Environment and Forestry Number: 31/1/IPPKH/PMDN/2017 dated December 12, 2017 covering an area of 68.74 Ha with a period of up to August 7, 2019. The permit has been

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

diperpanjang sesuai dengan surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: Sk.223/1/KLHK/2020 tanggal 3 September 2020 dengan jangka waktu sampai dengan 10 Agustus 2044. BHE yakin bahwa manajemen dapat memperbaharui hak tersebut.

extended in accordance with the Decree of the Head of the Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia Number: Sk.223/1/KLHK/2020 dated September 3, 2020 with a period of up to August 10, 2044. BHE believed that the validity of the certificates can be extended.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tanah, mesin dan peralatan yang berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga minihydro (PLTM) Sako dan Padang Guci 2 tersebut dijamin pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima BCE dan BHE (Catatan 29 - Utang lembaga keuangan non bank).

As at December 31, 2023 and 2022, land, machine and equipment pertaining to minihydro power plants (PLTM) Sako and Padang Guci 2 pledge guaranteed at PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), in connection on credit facilities received by BCE and BHE (Note 29 - Non-bank financial institution loan).

12. PERSEDIAAN

12. INVENTORIES

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Bahan baku			<i>Raw materials</i>
Bahan material konstruksi	155.132.577.460	107.243.557.458	<i>Construction materials</i>
Bahan baku produk beton	36.729.945.735	9.202.936.858	<i>Raw materials of concrete products</i>
Suku cadang	10.155.877.059	8.817.617.005	<i>Spare parts</i>
BBM dan pelumas	9.608.437.069	2.970.537.072	<i>Fuel oil and lubricant</i>
Barang dalam proses produk beton	14.775.592.977	-	<i>Work in process of concrete products</i>
Barang jadi produk beton	27.504.157.428	33.985.884.113	<i>Finished goods of concrete products</i>
Jumlah	253.906.587.728	162.220.532.506	Total

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, berdasarkan penelaahan terhadap kondisi fisik persediaan pada akhir tahun, manajemen menghapuskan nilai atas persediaan yang tidak dapat dipakai dan dijual kembali (Catatan 39). Atas nilai persediaan lainnya, tidak diperlukan penyisihan karena tingkat perputaran persediaan yang cukup tinggi.

As of December 31, 2023 dan 2022, based on a review of the physical condition of the inventories at the end of the year, management writes off the unused and unresells inventory (Note 39). As for the remaining inventories, no allowance is required because the inventory turnover rate is still high.

Sebagian persediaan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka pendek Grup dan telah diasuransikan dengan *banker's clause* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Some inventories are used as collateral for the Group's short term loans and has been insured with banker's clause of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

13. UANG MUKA

13. ADVANCES

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Uang muka setoran modal untuk entitas asosiasi			<i>Advances for investment in associates entity</i>
PT Jalintim Adhi Abipraya	14.300.000.000	1.800.000.000	<i>PT Jalintim Adhi Abipraya</i>
PT Citra Karya Jabar Tol	-	300.000.000.000	<i>PT Citra Karya Jabar Tol</i>
Pemasok	66.364.424.355	59.125.144.714	<i>Suppliers</i>
Subkontraktor	45.115.569.975	57.376.391.622	<i>Subcontractors</i>
Pembelian turbin	4.500.000.000	-	<i>Turbine purchase</i>
Pegawai	1.996.865.395	1.593.599.012	<i>Employee</i>
Operasional	1.077.049.761	499.441.464	<i>Operational</i>
Konsultan	795.101.715	-	<i>Consultant</i>
Mandor	50.000.000	165.382.252	<i>Foreman</i>

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Sewa alat	9.097.640	1.023.569	Equipment rent
Lain-lain	39.636.000	86.750.308	Others
Jumlah	134.247.744.841	420.647.732.941	Total

Uang muka setoran modal untuk entitas asosiasi adalah setoran modal yang belum diaktakan.

Advances for paid-up capital for associates are paid-up capital that has not been notarized.

Uang muka pemasok dan subkontraktor merupakan uang muka yang diberikan kepada pemasok dan subkontraktor sehubungan dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan proyek, serta pengadaan bahan baku dan material konstruksi di proyek.

Supplier and subcontractors advances represents advances paid to suppliers and subcontractors in connection with contract implementation of project work, also procurement of construction raw and construction materials at the project.

Uang muka operasional merupakan uang muka yang diberikan kepada pelaksana proyek untuk keperluan operasional proyek.

Operational advance represent advance which is given to the project implementers for project operational purposes.

Uang muka konsultan merupakan uang muka atas pekerjaan pengembangan *Enterprise Resources Planning* (ERP).

Consultant advance payment is an advance payment for Enterprise Resources Planning (ERP) development work.

Uang muka pembelian turbin merupakan uang muka yang diberikan PT BPM dan PT BME kepada CV RCE Engineering atas pekerjaan pemasokan dan pemasangan komponen mekanikal dan elektrikal proyek PLTM Pandanduri 2x0.29 MW dan proyek PLTM Titab 2x0.635 MW.

Advance turbine purchase represent advance given by PT BPM and PT BME to CV RCE Engineering for the work of supplying and installing mechanical and electrical components for the 2x0.29 MW Pandanduri PLTM project and the 2x0.635 MW Titab PLTM project.

14. PAJAK DIBAYAR DIMUKA

14. PREPAID TAXES

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Klaim pengembalian pajak	3.455.766.172	3.455.766.172	Claim for tax refund
PPH Badan Pasal 29 Tahun 2018			Corporate Income Tax Article 29 2018
PPH Pasal 23 Tahun 2018	26.934.333	26.934.333	Income tax Article 23 2018
Pajak pertambahan nilai	244.937.820.540	157.000.620.180	Value added tax
Pajak penghasilan			Income tax
Pasal 4 (2) (Final)	35.746.848.792	23.641.483.338	Article 4 (2) (Final)
Pasal 22	3.154.095.192	-	Article 22
Pasal 23	508.154.963	3.177.871.070	Article 23
Pasal 25	273.939.075	-	Article 25
Jumlah	288.103.559.067	187.302.675.093	Total

15. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

15. PREPAID EXPENSES

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Pekerjaan persiapan konstruksi	97.984.193.355	83.923.147.752	Preparation of constructions works
Peralatan kantor dan rumah tangga proyek	62.904.478.528	51.530.633.453	Office equipment and household project
Pekerjaan persiapan pabrik beton dan on site plant	26.592.428.440	26.349.341.784	Concrete plant and on site plant preparation works

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pemasaran dan penjualan	1.894.676.723	6.016.081.455	<i>Marketing and sales</i>
Provisi bank dan jaminan	2.990.201.045	4.955.556.712	<i>Bank provision and guarantee</i>
Asuransi	3.736.549.658	3.549.452.041	<i>Insurance</i>
Peralatan proyek	3.089.050.092	2.435.356.407	<i>Project equipment</i>
Sewa rumah dan bangunan	348.103.805	2.324.465.265	<i>House and building rental</i>
Lain-lain	149.114.319	-	<i>Other</i>
Jumlah	199.688.795.965	181.084.034.869	Total

Beban dibayar dimuka pekerjaan persiapan merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pekerjaan persiapan konstruksi Grup seperti biaya perusahaan proyek, tender dan biaya konstruksi lainnya.

Prepaid expenses of contractions preparation works represent costs disposed connection to preparation of construction project activities such as of project management cost, bid and other related construction costs.

Beban dibayar dimuka pekerjaan persiapan pabrik beton dan *on site plant* merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan persiapan kegiatan pabrik beton dan *on site plant* dan biaya terkait persiapan produksi beton lainnya.

Prepaid expenses of concrete plant and on site preparation work represent cost disposed of in connection to preparation of concrete plant and on site plant activities and cost related to preparation of other concrete production.

16. JAMINAN

Merupakan saldo dana Perusahaan yang ditahan oleh sebagai jaminan retensi Proyek Bandara Juanda.

16. GUARANTEE

Represents the balance of the Company's funds held for the issuance of guarantees as collateral for the retention of the Juanda Airport Project.

17. ASET REAL ESTATE

Grup memiliki properti hunian berupa bangunan jadi, properti dalam konstruksi dan tanah dalam pengembangan dengan rincian sebagai berikut:

17. REAL ESTATE ASSETS

The Group owns residential properties consist of finished buildings, properties under construction and lands under development detailed as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Bagian lancar:			<i>Current portion:</i>
Bangunan jadi	116.441.756.946	146.520.390.143	<i>Finished buildings</i>
Bangunan dalam konstruksi	199.807.945.115	189.480.480.521	<i>Buildings under construction</i>
Tanah dalam pengembangan	101.632.836.360	62.632.836.360	<i>Land under development</i>
Jumlah	417.882.538.421	398.633.707.024	Total
Bagian tidak lancar:			<i>Non-current portion:</i>
Tanah untuk pengembangan	13.601.488.094	13.601.488.094	<i>Land for development</i>

a. Aset real estate lancar

Bangunan jadi terdiri atas beberapa proyek sebagai berikut:

a. Current real estate assets

Buildings consisted of several projects as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Apartemen Urban Height Arya Green Maguwoharjo	109.862.404.803 -	131.069.851.115 11.164.772.609	<i>Apartemen Urban Height Arya Green Maguwoharjo</i>

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Arya Green Simatupang	2.293.585.724	-	Arya Green Simatupang
Arya Green Kalasan	4.285.766.419	4.285.766.419	Arya Green Kalasan
Jumlah	116.441.756.946	146.520.390.143	Total

Bangunan dalam konstruksi terdiri atas beberapa proyek sebagai berikut: *Finished buildings under construction consisted of several projects as follows:*

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Arya Green Pamulang	94.737.636.623	95.620.105.291	Arya Green Pamulang
Arya Green Residence Tajur Halang	81.270.350.734	79.478.440.286	Arya Green Residence Tajur Halang
Arya Green Kalasan	10.321.794.176	10.210.729.024	Arya Green Kalasan
Arya Green Simatupang	-	2.222.589.668	Arya Green Simatupang
Arya Green Maguwoharjo	13.478.163.582	1.930.926.573	Arya Green Maguwoharjo
Arya Setu Village	-	17.689.679	Arya Setu Village
Jumlah	199.807.945.115	189.480.480.521	Total

Tanah dalam pengembangan terdiri atas beberapa proyek sebagai berikut: *Land under development of several projects as follows:*

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Tanah - Subang	62.632.836.360	62.632.836.360	Land - Subang
Tanah - Bali	39.000.000.000	-	Land - Bali
Jumlah	101.632.836.360	62.632.836.360	Total

Bangunan dalam konstruksi merupakan biaya perolehan aset real estate berupa rumah tinggal dan apartemen yang masih dalam proses konstruksi. Manajemen berpendapat tidak terdapat hambatan dalam penyelesaian proyek.

Buildings under construction represent acquisition cost of real estate asset which consist of houses and apartments under construction. Management believes that there are no constraints in the completion of the projects.

Seluruh aset real estate lancar tidak dijaminkan dan tidak diasuransikan.

The entire current real estates are not used as collateral and are not insured.

b. Aset real estate tidak lancar

b. Non current real estate assets

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Tanah – Pasuruan	5.337.750.000	5.337.750.000	Land – Pasuruan
Tanah – Malang	2.429.038.094	2.429.038.094	Land – Malang
Tanah – Blitar	2.477.700.000	2.477.700.000	Land – Blitar
Tanah – Medan	2.089.200.000	2.089.200.000	Land – Medan
Tanah – Mojokerto	1.067.400.000	1.067.400.000	Land – Mojokerto
Tanah – Padang	172.000.000	172.000.000	Land – Padang
Tanah – Banjar Baru	22.400.000	22.400.000	Land – Banjar Baru
Tanah – Pontianak	6.000.000	6.000.000	Land – Pontianak
Jumlah	13.601.488.094	13.601.488.094	Total

Sebagian aset real estate tidak lancar digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima Grup dan diasuransikan sesuai *banker's clause*.

Some non-current real estate assets are used as collateral for the facility obtained by the Group and insured in accordance with banker's clause.

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

18. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

	31 Desember/ December 31, 2023
Investasi pada entitas asosisasi	973.917.045.785
Investasi pada ventura bersama	366.491.169
Jumlah	974.283.536.954

a. Investasi pada entitas asosiasi

Entitas/ Entity	Domisili/ Domicilie	Bidang usaha/ Nature of Business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)		Nilai tercatat/ Carrying amount	
			31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT)	Jakarta	Pembangunan dan pengusahaan jalan tol/ Construction and development of toll road	%	%	Rp	Rp
PT Jalintim Adhi Abipraya (JAA)	Jakarta	Konstruksi dan aktivitas jalan tol/ Construction and toll road development	24%	25,69%	699.999.992.612	227.757.126.431
PT Rajawali Liki Energi (RLE)	Jakarta	Pembangkit tenaga/ Power plant	40%	40%	255.645.723.523	111.137.760.571
Jumlah/Total			45%	45%	18.271.329.650	18.199.479.166
					973.917.045.785	357.094.366.168

PT Jalintim Adhi Abipraya (JAA)

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 36 tanggal 07 April 2022, Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., notaris publik di Jakarta, Perusahaan memiliki kepemilikan 40% atas JAA.

Perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No.127 tanggal 20 Maret 2023 mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp214.380.000.000 dimana Perusahaan mengambil bagian sebesar Rp7.400.000.000 sehingga kepemilikan Perusahaan menjadi sebesar Rp85.752.000.000 atau sebesar 40% atas JAA

Perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No.109 tanggal 13 Juli 2023 mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp257.994.000.000 dimana Perusahaan mengambil bagian sebesar Rp17.446.000.000 sehingga kepemilikan Perusahaan menjadi sebesar Rp103.198.000.000 atau sebesar 40% atas JAA.

PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT)

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 2 Juli 2021 dari Nurdiani Alfantinah, S.H., M.Kn., notaris publik di Kabupaten Sumedang, Perusahaan memiliki kepemilikan 25,69% atas CKJT.

Perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan Akta No.47 tanggal 21 Juli 2023 mengenai penambahan modal dasar

18. INVESTMENT IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURE

	31 Desember/ December 31, 2022	
	357.094.366.168	<i>Investment in associates</i>
	505.436.178	<i>Investment in joint venture</i>
Total	357.599.802.346	Total

a. Investment in associates

Entitas/ Entity	Domisili/ Domicilie	Bidang usaha/ Nature of Business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)		Nilai tercatat/ Carrying amount	
			31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT)	Jakarta	Pembangunan dan pengusahaan jalan tol/ Construction and development of toll road	%	%	Rp	Rp
PT Jalintim Adhi Abipraya (JAA)	Jakarta	Konstruksi dan aktivitas jalan tol/ Construction and toll road development	24%	25,69%	699.999.992.612	227.757.126.431
PT Rajawali Liki Energi (RLE)	Jakarta	Pembangkit tenaga/ Power plant	40%	40%	255.645.723.523	111.137.760.571
Jumlah/Total			45%	45%	18.271.329.650	18.199.479.166
					973.917.045.785	357.094.366.168

PT Jalintim Adhi Abipraya (JAA)

Based on Notarial Deed No.36 dated April 07, 2022 from Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, the Company owns 40% of JAA.

The agreement has change by several times, the latest being based on Deed No.127 dated March 20, 2023 regarding the increase in paid-up and paid-in capital amounting to Rp214,380,000,000 of which the Company took a share of Rp7,400,000,000 so that the Company's ownership amounted to Rp85,752,000,000 or % of JAA.

The agreement has change by several times, the latest being based on Deed No.109 dated July 13, 2023 regarding the increase in paid-up and paid-in capital amounting to Rp257,994,000,000 of which the Company took a share of Rp7,400,000,000 so that the Company's ownership amounted to Rp103,198,000,000 or % of JAA.

PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT)

Based on Notarial Deed No 1 dated July 2, 2021 from Nurdiani Alfantinah, S.H., M.Kn., public notary in Kabupaten Sumedang, the Company owns 25,69% of CKJT.

The agreement has change by several times, the latest being based on Deed No. 47 dated 21 July 2023 regarding the increase in authorized capital to

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

menjadi sebesar Rp3.000.000.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp2.076.185.000.000 dimana Perusahaan mengambil bagian sebesar Rp484.484.400.000 sehingga kepemilikan Perusahaan menjadi sebesar Rp694.484.400.000 atau sebesar 29,79% atas CKJT.

Rp3,000,000,000,000 and an increase in paid-up and paid-in capital amounting to Rp2,076,185,000,000 of which the Company took a share of Rp484,484,400,000 so that the Company's ownership amounted to Rp694,484,400,000 or 29.79% of CKJT.

PT Rajawali Liki Energi (RLE)

PT Rajawali Liki Energi (RLE)

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 28 tanggal 12 Agustus 2016 dari Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.Kn., notaris publik di Kabupaten Bogor, Perusahaan memiliki kepemilikan 45% atas RLE.

Based on Notarial Deed No 28 dated August 12, 2016 from Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.Kn., public notary in Kabupaten Bogor the Company owns 45% of RLE.

Perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan Akta No.532 tanggal 14 Juni 2017 mengenai penambahan modal dasar menjadi sebesar Rp154.000.000.000 dan pengingkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp40.728.500.000 sehingga kepemilikan Perusahaan menjadi sebesar Rp18.328.500.000 atau sebesar 45% atas RLE.

The agreement has change by several times, the latest being based on Deed No. 532 dated June 14, 2017 regarding the increase in authorized capital to Rp154,000,000,000 and an increase in paid-up and paid-in capital amounting to Rp40,728,500,000 of so that the Company's ownership amounted to Rp18,328,500,000 or 45% of RLE.

Mutasi investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Changes in investments in associates is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Nilai tercatat awal tahun	357.094.366.168	249.101.068.695	Carrying amount at beginning of year
Mutasi investasi – bersih	511.130.400.000	65.139.985.444	Investment movements – net
Bagian laba entitas asosiasi	105.692.279.617	42.853.312.029	Share in profit of associates
Jumlah	973.917.045.785	357.094.366.168	Total

Ringkasan informasi keuangan masing-masing entitas asosiasi ditetapkan di bawah ini. Ringkasan informasi keuangan di bawah ini merupakan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan entitas asosiasi yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Summarized financial information in respect of each of the Company's associates is set out below. The summarized financial information below represents amounts shown in the associates' financial statements prepared in accordance to Indonesian Financial Accounting Standards.

	PT Rajawali Liki Energi		
	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Aset lancar	12.351.346.283	11.826.672.071	Current asset
Aset tidak lancar	28.641.387.381	28.616.614.964	Non current asset
Liabilitas jangka pendek	-	-	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	-	-	Non current liabilities
Pendapatan	-	-	Revenue
Laba (rugi) tahun berjalan	159.667.744	-	Income (loss) for the year
Jumlah laba (rugi) komprehensif	159.667.744	-	Comprehensive income (loss)

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

PT Jalintim Adhi Abipraya			
	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Aset lancar	231.718.816.220	241.587.784	Current asset
Aset tidak lancar	634.588.995.666	776.615.886.014	Non current asset
Liabilitas jangka pendek	140.690.371.314	291.042.787.670	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	50.753.131.762	28.957.349.071	Non current liabilities
Pendapatan	430.893.883.520	592.717.930.057	Revenue
Laba (rugi) tahun berjalan	120.143.971.751	190.978.327.908	Income (loss) for the year
Jumlah laba (rugi) komprehensif	120.143.971.751	190.978.327.908	Comprehensive income (loss)

PT Citra Karya Jabar Tol			
	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Aset lancar	291.207.792.752	354.762.104.293	Current asset
Aset tidak lancar	10.688.097.983.715	6.669.736.822.717	Non current asset
Liabilitas jangka pendek	3.611.826.855.307	5.868.326.504.400	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	5.047.358.485.276	17.006.703	Non current liabilities
Pendapatan	262.226.828.899	2.790.256.536.991	Revenue
Laba (rugi) tahun berjalan	(36.428.497.207)	29.810.101.616	Income (loss) for the year
Jumlah laba (rugi) komprehensif	(36.428.497.207)	29.810.101.616	Comprehensive income (loss)

Rekonsiliasi dari ringkasan informasi keuangan di atas terhadap jumlah tercatat dari bagian entitas asosiasi yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Reconciliation of the summarized financial information above to the carrying amount of the interest in the associates recognized in the consolidated financial statements:

PT Rajawali Liki Energi			
	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Aset bersih entitas	40.602.954.778	40.443.287.035	Net assets of entity
Penyesuaian	-	-	Adjustment
Jumlah	40.602.954.778	40.443.287.035	Total
Proporsi bagian Grup	45%	45%	Proportion of the Group
Nilai tercatat bagian Grup	18.271.329.650	18.199.479.166	Carrying amount of the Group

PT Jalintim Adhi Abipraya			
	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Aset bersih entitas	674.864.308.810	456.857.337.057	Net assets of entity
Penyesuaian	(35.750.000.000)	(179.012.935.630)	Adjustment
Jumlah	639.114.308.810	277.844.401.427	Total
Proporsi bagian Grup	40%	40%	Proportion of the Group
Nilai tercatat bagian Grup	255.645.723.523	111.137.760.571	Carrying amount of the Group

PT Citra Karya Jabar Tol			
	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Aset bersih entitas	2.320.120.435.884	1.156.155.415.907	Net assets of entity
Penyesuaian	596.546.200.000	(280.166.468.095)	Adjustment
Jumlah	2.916.666.635.884	875.988.947.812	Total
Proporsi bagian Grup	24%	26%	Proportion of the Group
Nilai tercatat bagian Grup	699.999.992.612	227.757.126.431	Carrying amount of the Group

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Jasamarga Probolinggo Banyuwangi bergerak di bidang pengusahaan jalan tol. Akta ini telah mendapat surat pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0225379 tanggal 13 April 2022.

activities. This Deed has received a notification letter from the Minister of Law and Human Rights through decision letter No. AHU-AH.01.03-0225379 dated April 13, 2022.

PT Jasamarga Jogja Bawen

PT Jasamarga Jogja Bawen

Perusahaan memiliki penyertaan sebesar 2,5% dari modal PT Jasamarga Jogja Bawen atau sebesar Rp1.825.000.000. berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No.23 tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., PT Jasamarga Jogja Bawen bergerak di bidang pengusahaan jalan tol. Akta ini telah mendapat surat pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0046722 tanggal 21 Januari 2022.

The Company owns investment equivalent to 2,5% of PT Jasamarga Jogja Bawen paid in capital or Rp1,825,000,000 based on the Deed of Statement of Shareholders' Decisions Outside the General Meeting of Shareholders No. 28 dated January 19, 2022 by Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H., PT Jasamarga Jogja Bawen engaged in toll road activities. This Deed has received a notification letter from the Minister of Law and Human Rights through decision letter No. AHU-AH.01.03-0046722 dated January 21, 2022.

PT Karya Logistik Nusantara

PT Karya Logistik Nusantara

Perusahaan memiliki penyertaan sebesar 14,71% dari modal PT Karya Logistik Nusantara atau sebesar Rp12.500.000.000 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.12 tanggal 2 Februari 2023 dari Rosinda Rajagukguk-Siregar S.H., M.Kn., PT Karya Logistik Nusantara bergerak di bidang pemasok berbagai material konstruksi dasar. Akta ini telah mendapat surat pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No.AHU-0011167.AH.01.01. Tahun 2023.

The Company owns investment equivalent to 14,71% of PT Karya Logistik Nusantara paid in capital or Rp12,500,000,000 based on the Deed of establishment No. 12 dated February 2, 2023 Rosinda Rajagukguk-Siregar S.H., M.Kn., PT Karya Logistik Nusantara engaged in toll road activities. This Deed has received a notification letter from the Minister of Law and Human Rights through decision letter No. AHU-0011167.AH.01.01. Tahun 2023.

20. ASET TETAP

20. FIXED ASSETS

	2023						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassifications	Keuntungan (kerugian) revaluasi/ Gain (loss) on revaluation	Saldo akhir/ Ending balance	
Nilai revaluasi:							Acquisition from revaluation:
Hak atas tanah	663.639.160.000	4.056.737.005	-	-	98.166.402.995	765.862.300.000	Land rights
Nilai perolehan langsung:							Acquisition cost direct:
Bangunan	175.147.940.727	4.350.496.723	-	-	-	179.498.437.450	Building
Alat besar	669.626.110.447	20.301.000.000	25.773.707.033	-	-	664.153.403.414	Heavy equipment
Kendaraan	2.002.094.761	-	-	-	-	2.002.094.761	Vehicles
Peralatan umum	32.824.095.615	-	1.363.544.500	-	-	31.460.551.115	General equipment
Peralatan kantor	24.710.711.521	283.679.850	-	-	-	24.994.391.371	Office equipment
Sub Jumlah	1.567.950.113.071	28.991.913.578	27.137.251.533	-	98.166.402.995	1.667.971.178.111	Sub Total
Aset dalam penyelesaian:							Asset under completion:
Hotel	130.130.927.910	-	-	-	(240.927.910)	129.890.000.000	Hotel
Pembangkit listrik	266.342.614.435	71.632.298.687	-	-	(8.288.617.654)	329.686.295.468	Power plants
Sub Jumlah	396.473.542.345	71.632.298.687	-	-	(8.529.545.564)	459.576.295.468	Sub Total
Jumlah	1.964.423.655.416	100.624.212.265	27.137.251.533	-	89.636.857.431	2.127.547.473.579	Total
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Bangunan	67.722.715.853	9.666.394.936	-	-	-	77.389.110.789	Building
Alat besar	398.119.055.501	53.696.076.218	25.773.707.033	-	-	426.041.424.686	Heavy equipment
Kendaraan	1.739.215.508	94.200.000	-	-	-	1.833.415.508	Vehicles

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

2023							
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Keuntungan (kerugian) revaluasi/ <i>Gain (loss) on revaluation</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Peralatan umum	32.649.053.596	-	1.363.544.500	-	-	31.285.509.096	General equipment
Peralatan kantor	23.563.104.928	682.681.666	-	-	-	24.245.786.594	Office equipment
Jumlah	523.793.145.386	64.139.352.820	27.137.251.533	-	-	560.795.246.673	Total
Nilai tercatat	1.440.630.510.030					1.566.752.226.906	Carrying value
2022							
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Disposals</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Keuntungan revaluasi/ <i>Gain on revaluation</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Nilai revaluasi: Hak atas tanah	663.639.160.000	-	-	-	-	663.639.160.000	Acquisition from revaluation: Land rights
Nilai perolehan langsung:							Acquisition cost direct:
Bangunan	174.607.230.467	540.710.260	-	-	-	175.147.940.727	Building
Alat besar	640.975.237.739	28.650.872.708	-	-	-	669.626.110.447	Heavy equipment
Kendaraan	2.002.094.761	-	-	-	-	2.002.094.761	Vehicles
Peralatan Umum	32.824.095.615	-	-	-	-	32.824.095.615	General equipment
Peralatan Kantor	23.954.322.433	756.389.088	-	-	-	24.710.711.521	Office equipment
Sub Jumlah	1.538.002.141.015	29.947.972.056	-	-	-	1.567.950.113.071	Sub Total
Aset dalam penyelesaian:							Asset under completion:
Hotel	130.130.927.910	-	-	-	-	130.130.927.910	Hotel
Pembangkit listrik	488.881.673.820	41.487.543.097	-	(264.026.602.482)	-	266.342.614.435	Power plants
Sub Jumlah	619.012.601.730	41.487.543.097	-	(264.026.602.482)	-	396.473.542.345	Sub Total
Jumlah	2.157.014.742.745	71.435.515.153	-	(264.026.602.482)	-	1.964.423.655.416	Total
Akumulasi penyusutan:							Accumulated depreciation:
Bangunan	58.463.213.438	9.259.502.415	-	-	-	67.722.715.853	Building
Alat besar	347.547.985.339	50.571.070.162	-	-	-	398.119.055.501	Heavy equipment
Kendaraan	1.645.015.508	94.200.000	-	-	-	1.739.215.508	Vehicles
Peralatan Umum	32.649.053.596	-	-	-	-	32.649.053.596	General equipment
Peralatan Kantor	21.216.168.340	2.346.936.588	-	-	-	23.563.104.928	Office equipment
Jumlah	461.521.436.221	62.271.709.165	-	-	-	523.793.145.386	Total
Nilai tercatat	1.695.493.306.524					1.440.630.510.030	Carrying value

Beban penyusutan dialokasi sebagai berikut:

Depreciation expenses was allocated to the following:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Beban pokok pendapatan	58.671.970.608	55.616.715.576	Cost of revenue
Beban usaha	5.467.382.212	6.654.993.589	Operating expenses
Jumlah	64.139.352.820	62.271.709.165	Total

Aset tetap pemilikan langsung digunakan sebagai jaminan atas utang bank.

Directly acquired property and equipment are used as collateral for short terms bank loans.

Aset tetap bangunan dan peralatan telah diasuransikan kepada beberapa Perusahaan asuransi terhadap risiko gempa bumi, kebakaran, dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebagai berikut:

Fixed assets of building and equipment are insured with various insurance Companies against earthquake, fire and other possible risk, with amount of average:

Perusahaan asuransi/ <i>Insurance Company</i>	Mata uang/ <i>Currency</i>	Jumlah pertanggungan/ <i>Sum insured 2023/2022</i>
PT Asuransi Tri Pakarta Syariah	Rupiah	78.420.716.698
PT BRI Asuransi Indonesia	Rupiah	33.833.863.650
PT Asuransi Binagriya Upakara	Rupiah	13.050.000.000

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggung jawaban tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap. Manajemen tidak melakukan penyisihan penurunan nilai aset tetap pada 31 Desember 2023 dan 2022.

Based on management's review, there are no events or changes in circumstances which indicated impairment of the carrying amount of the fixed assets. Management did not perform allowance of impairment of fixed assets as of December 31, 2023 and 2022,

Pada 2023, penilaian atas nilai wajar aset tetap berupa tanah dilakukan oleh penilai independen yang telah teregistrasi di OJK, KJPP Sugeng, Irwan, Gunawan & Rekan untuk tahun 2023 dengan No Laporan 00007/2.0045-00/PI/03/0140/1/II/2024 tanggal 30 Januari 2024.

On 2023, the revaluation fixed assets fair value of land was performed by independent appraiser registered in OJK, KJPP Sugeng, Irwan, Gunawan & Rekan for 2023, based on report No 00007/2.0045-00/PI/03/0140/1/II/2024 dated January 30, 2024.

Pada 2023, penilaian atas nilai wajar aset tetap dalam pelaksanaan berupa tanah dan bangunan, serta peralatan yang difungsikan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Tangka (2 x 3.15 MW) milik PT Brantas Nipa Jaya Energi dilakukan oleh penilai independen yang telah teregistrasi di OJK, KJPP Sugeng, Irwan, Gunawan & Rekan untuk tahun 2023 No Laporan 00068/2.0045-01/PI/02/0502/1/II/2024 tanggal 21 Februari 2024

On 2023, the revaluation fixed assets in progress in the form of land and buildings, as well as equipment that functions as a Tangka Minihydro Power Plant (PLTM) (2 x 3.15 MW) owned by PT Brantas Nipa Jaya Energi was performed by independent appraiser registered in OJK, KJPP Sugeng, Irwan, Gunawan & Rekan for 2023, based on report No 00068/2.0045-01/PI/02/0502/1/II/2024 dated February 21, 2024.

Pada 2023, penilaian atas nilai wajar aset tetap dalam pelaksanaan berupa Tanah, Bangunan, dan Sarana Pelengkap hotel milik PT Graha Investama Bersama dilakukan oleh penilai independen yang telah teregistrasi di OJK, KJPP Sugeng, Irwan, Gunawan & Rekan untuk tahun 2023 dengan No Laporan 00421/2.0025-00/PI/05/0639/1/II/2024 tanggal 22 Februari 2024

On 2023, the revaluation fixed fixed assets in progress in the form of land, buildings and hotel auxiliary facilities owned by PT Graha Investama Bersama was performed by independent appraiser registered in OJK, KJPP Sugeng, Irwan, Gunawan & Rekan for 2023, based on report No.00421/2.0025-00/PI/05/0639/1/II/2024 dated February 22, 2024.

21. ASET TIDAK BERWUJUD

21. INTANGIBLE ASSETS

	2023			
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Saldo akhir/ Ending balance	
Nilai perolehan pemilikan				Acquisition cost
Perangkat lunak	9.776.889.545	1.603.851.900	11.380.741.445	Software
Akumulasi amortisasi				Accumulated amortization
Perangkat lunak	4.402.607.582	2.463.597.383	6.866.204.965	Software
Jumlah	5.374.281.963		4.514.536.480	Total
	2022			
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Saldo akhir/ Ending balance	
Nilai perolehan pemilikan				Acquisition cost
Perangkat lunak	7.698.089.545	2.078.800.000	9.776.889.545	Software
Akumulasi amortisasi				Accumulated amortization
Perangkat lunak	2.238.343.529	2.164.264.053	4.402.607.582	Software
Jumlah	5.459.746.016		5.374.281.963	Total

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

22. UANG MUKA PROYEK PP

22. ADVANCE OF IPP PROJECT

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
PLTM Poigar-2	37.563.572.854	35.618.376.641	PLTM Poigar-2
PLTM Tangka	18.784.665.316	18.462.216.408	PLTM Tangka
PLTM Kadundung	8.617.683.739	8.572.448.739	PLTM Kadundung
PLTM Pancung Taba Padang	8.478.033.407	8.231.469.897	PLTM Pancung Taba Padang
PLTM Batanghari	6.400.293.528	-	PLTM Batanghari
Lain-lain (di bawah Rp5.000.000.000)	38.320.522.052	38.456.733.758	Others (less than Rp5,000,000,000)
Jumlah	118.164.770.896	109.341.245.443	Total

Akun ini merupakan uang muka IPP atas biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan proyek IPP yang konstruksinya belum dilakukan.

This account is an advance for IPP for costs incurred for the development of the IPP project which construction has not been carried out.

23. UTANG USAHA

23. TRADE ACCOUNT PAYABLES

Jangka pendek

Short term

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pihak berelasi			Related parties
KKBA	12.947.620.657	3.192.513.682	KKBA
PT Bhirawa Steel	7.736.487.192	-	PT Bhirawa Steel
PT Hakaaston	4.497.148.000	-	PT Hakaaston
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	2.982.150.000	-	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Yodya Karya	1.779.279.279	-	PT Yodya Karya
PT Adhi Persada Beton	-	1.696.219.200	PT Adhi Persada Beton
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000.000.000)	521.582.757	1.041.352.984	Others (each below Rp1,000,000,000)
Sub Jumlah	30.464.267.885	5.930.085.866	Sub Total

**Pihak berelasi
Utang ventura bersama
jangka pendek**

**Related parties
Joint venture
current portion**

PT Brantas Abipraya - TGP- Supraharmonia KSO (SPAM Sepaku 1 & 2)	168.943.293.724	-	PT Brantas Abipraya - TGP- Supraharmonia KSO (SPAM Sepaku 1 & 2)
PT Brantas Abipraya - Indah KSO (Sumbu Kebangsaan Tahap 2)	97.606.456.040	-	PT Brantas Abipraya - Indah KSO (Sumbu Kebangsaan Tahap 2)
PT Adhi karya (Persero)Tbk - PT Brantas Abipraya - MKSN KSO (Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi)	79.389.360.515	-	PT Adhi karya (Persero)Tbk - PT Brantas Abipraya - MKSN KSO (Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi)
PT Brantas Abipraya - PT Gala Karya KSO (Jembatan Jombang - Mojokerto - Gempol)	33.010.886.007	-	PT Brantas Abipraya - PT Gala Karya KSO (Jembatan Jombang - Mojokerto - Gempol)
PT Brantas Abipraya - PT Sacna KSO (Silinga Tahap 2)	18.421.658.411	-	PT Brantas Abipraya - PT Sacna KSO (Silinga Tahap 2)
PT Brantas Abipraya – PT Daka Megaperkasa KSO (Jembatan Nanga Pinoh)	16.320.869.229	47.537.427.621	PT Brantas Abipraya – PT Daka Megaperkasa KSO (Jembatan Nanga Pinoh)
PT Brantas Abipraya - PT Guna Rogate Indah KSO - (KLHK)	14.224.419.130	-	PT Brantas Abipraya - PT Guna Rogate Indah KSO - (KLHK)
PT Brantas Abipraya – PT Pelita Nusa Perkasa KSO (Preservasi Jalan Pameu)	2.277.845.388	7.572.107.953	PT Brantas Abipraya – PT Pelita Nusa Perkasa KSO (Preservasi Jalan Pameu)
PT Brantas Abipraya – PT Mina Transindo Totabuan KSO	-	87.244.503.627	PT Brantas Abipraya – PT Mina Transindo Totabuan KSO

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
(Bendungan Beringin Sila) PT Brantas Abipraya – PT Pelita Nusa Perkasa KSO (Bendungan Semantok Paket III)	-	77.414.783.901	(Bendungan Beringin Sila) PT Brantas Abipraya – PT Pelita Nusa Perkasa KSO (Bendungan Semantok Paket III)
PT Brantas Abipraya – PT Sarana Bhuana Jaya KSO (Peningkatan Kali Besar)	-	70.367.099.432	PT Brantas Abipraya – PT Sarana Bhuana Jaya KSO (Peningkatan Kali Besar)
PT Brantas Abipraya – PT Duta Rama – PT Rancang Semesta Nusantara KSO (Waduk Brigif)	-	44.537.888.143	PT Brantas Abipraya – PT Duta Rama – PT Rancang Semesta Nusantara KSO (Waduk Brigif)
PT Brantas Abipraya – PT Bengalon Jaya Lestari	-	38.679.004.560	PT Brantas Abipraya – PT Bengalon Jaya Lestari
PT Brantas Abipraya – PT SAC Nusantara KSO (Bendungan Ciawi)	-	35.769.637.033	PT Brantas Abipraya – PT SAC Nusantara KSO (Bendungan Ciawi)
PT Brantas Abipraya – PT Bina Nusa Lestari KSO (Irigasi SS. Macan)	-	29.475.296.350	PT Brantas Abipraya – PT Bina Nusa Lestari KSO (Irigasi SS. Macan)
PT Brantas Abipraya – PT Basuki Rahmanta Putra KSO (Bendungan Sepaku Semoi)	-	26.777.152.625	PT Brantas Abipraya – PT Basuki Rahmanta Putra KSO (Bendungan Sepaku Semoi)
PT Brantas Abipraya – PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk KSO (Sekolah Mamuju)	-	22.283.658.963	PT Brantas Abipraya – PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk KSO (Sekolah Mamuju)
PT Brantas Abipraya – PT Eriamakmur KSO (Jalan Bts. Serawak – Merbau)	-	19.118.012.100	PT Brantas Abipraya – PT Eriamakmur KSO (Jalan Bts. Serawak – Merbau)
PT Brantas Abipraya – PT Bumi Karsa KSO (Muara Sungai Bogowonto)	-	11.463.046.854	PT Brantas Abipraya – PT Bumi Karsa KSO (Muara Sungai Bogowonto)
PT Brantas Abipraya – PT Adi Kencana KSO	-	8.923.861.355	PT Brantas Abipraya – PT Adi Kencana KSO
PT Brantas Abipraya – PT Utama Karya KSO	-	6.156.166.603	PT Brantas Abipraya – PT Utama Karya KSO
KSO – PT Bodiacs Karya Persada Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000.000.000)	4.803.452.964	3.177.536.660	KSO – PT Bodiacs Karya Persada Others (each below Rp1,000,000,000)
Sub Jumlah	434.998.241.408	540.028.134.796	Sub Total
Jumlah pihak berelasi	465.462.509.293	545.958.220.662	Total related parties
Pihak ketiga			Third parties
Utang fasilitas supply chain financing (scf)	1.911.451.224.805	1.596.813.561.167	Supply chain financing (scf) payable
Utang pemasok			Supplier payables
PT Krakatau Pipe Industries	21.736.399.680	-	PT Krakatau Pipe Industries
PT Raja Musi Perkasa	17.265.234.200	-	PT Raja Musi Perkasa
PT Intisumber Bajasakti	17.230.268.859	14.679.263.379	PT Intisumber Bajasakti
PT Bumi Gresik Sukses	14.416.386.265	5.493.396.219	PT Bumi Gresik Sukses
PT Berkat Jaya Konstruksi	14.136.974.830	-	PT Berkat Jaya Konstruksi
PT Tangguh Karya Unggul	9.466.403.279	-	PT Tangguh Karya Unggul
PT Lisa Concrete Indonesia	8.406.747.500	-	PT Lisa Concrete Indonesia
PT Cemindo Gemilang Tbk	8.328.642.912	-	PT Cemindo Gemilang Tbk
CV Rizki Control Elektrikal Engineering	8.262.192.654	-	CV Rizki Control Elektrikal Engineering
PT The Master Steel Manufactory	8.143.766.949	-	PT The Master Steel Manufactory
PT Geotekindo	6.975.104.832	-	PT Geotekindo
PT Focon Indo Beton	6.751.588.175	-	PT Focon Indo Beton
PT Buntara Megah Inti	6.496.714.329	6.496.714.329	PT Buntara Megah Inti
PT Cipta Ekatama Nusantara	6.439.259.502	6.439.259.502	PT Cipta Ekatama Nusantara
PT Intishar Berkah Globalindo	6.186.349.605	-	PT Intishar Berkah Globalindo
PT Adhimix PCI Indonesia	5.844.046.856	-	PT Adhimix PCI Indonesia
CV Sumber Bangun Perkasa Jaya	5.837.226.915	-	CV Sumber Bangun Perkasa Jaya
PT Sukses Mandiri Berkah	5.789.448.994	-	PT Sukses Mandiri Berkah
PT Citra Baru Steell	5.758.431.496	-	PT Citra Baru Steell
PT Rajawali Puncak Jayawijaya	5.746.400.000	-	PT Rajawali Puncak Jayawijaya

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
PT Bilah Baja Makmur Abadi	5.051.963.136	-	PT Bilah Baja Makmur Abadi
PT Menara Inti Jaya Grup	5.018.471.332	-	PT Menara Inti Jaya Grup
PT Jatim Logam	4.865.292.000	-	PT Jatim Logam
PT Indo Beton	4.814.745.108	-	PT Indo Beton
CV Dinar Mulya Barakah	4.651.799.796	-	CV Dinar Mulya Barakah
PT Krida Dinamika Autonusa	4.482.247.562	-	PT Krida Dinamika Autonusa
PT Diva Mandiri Semesta	4.288.679.643	-	PT Diva Mandiri Semesta
PT Power Block Indonesia	4.032.014.500	2.298.150.000	PT Power Block Indonesia
PT Kaltim Industrial Estate	3.458.380.522	-	PT Kaltim Industrial Estate
PT Sonar Nusantara Utama	3.430.151.414	-	PT Sonar Nusantara Utama
CV Agung	2.967.511.688	5.450.694.427	CV Agung
PT Jongka Indonesia	2.823.642.500	8.902.590.000	PT Jongka Indonesia
PT Wiradjaja Prima Kencana	2.794.825.328	-	PT Wiradjaja Prima Kencana
PT Sumiden Serasi Wire Products	2.773.010.100	6.158.154.609	PT Sumiden Serasi Wire Products
CV Geronimo Mandiri	2.679.599.894	-	CV Geronimo Mandiri
PT Sarana Cipta Intinusa	2.640.884.258	2.640.884.258	PT Sarana Cipta Intinusa
PT Widya Waskita Wijaya	2.511.476.664	-	PT Widya Waskita Wijaya
PT Karya Utama Bangkit	2.412.256.707	-	PT Karya Utama Bangkit
PT Sumber Buana Group	2.273.267.630	-	PT Sumber Buana Group
PT Jati Kencana Baru	2.124.775.813	-	PT Jati Kencana Baru
PT Sinar Indogreen Kencana	2.024.918.870	-	PT Sinar Indogreen Kencana
PT Cisangkan	1.827.591.453	-	PT Cisangkan
PT Duta Sarana Perkasa	1.675.593.750	-	PT Duta Sarana Perkasa
CV Makarya Artha Graha	1.514.622.510	-	CV Makarya Artha Graha
PT Tensindo Kreasi Nusantara	1.453.730.000	-	PT Tensindo Kreasi Nusantara
PT Jaya Glassindo Abadi	-	7.880.511.960	PT Jaya Glassindo Abadi
PT Dirgantara Betonindo	-	7.734.094.406	PT Dirgantara Betonindo
PT Bangun Mitra Anugrah Lestari	-	7.385.797.611	PT Bangun Mitra Anugrah Lestari
PT Focon Indo Beton	-	7.337.342.698	PT Focon Indo Beton
Tensindo Stressing Girder	-	6.840.580.752	Tensindo Stressing Girder
CV Makmur	-	6.263.861.280	CV Makmur
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000.000.000)	197.012.259.004	206.466.975.478	Other (each below Rp1,000,000,000)
Jumlah utang pemasok	464.821.299.014	308.468.270.908	Total
Utang subkontraktor			Subcontractor account payable
PT Pratama Widya	18.692.163.679	7.943.345.021	PT Pratama Widya
PT Lancar Jaya Mandiri Abadi	18.646.063.667	-	PT Lancar Jaya Mandiri Abadi
PT Bumi Sekar Indah	10.523.522.020	6.996.487.935	PT Bumi Sekar Indah
PT Harbangan Ashera Nabolax	7.484.760.433	-	PT Harbangan Ashera Nabolax
Pt Waagner Biro Indonesia	6.071.089.219	-	Pt Waagner Biro Indonesia
PT Alkatec Mandiri Kencana	5.434.900.000	-	PT Alkatec Mandiri Kencana
PT Bauer Pratama Indonesia	-	13.085.265.495	PT Bauer Pratama Indonesia
PT Lia Pijer Energi	-	7.033.328.719	PT Lia Pijer Energi
PT Tangguh Karya Unggul	-	2.251.587.615	PT Tangguh Karya Unggul
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5.000.000.000)	187.885.222.398	172.778.769.347	Other (each below Rp5,000,000,000)
Jumlah utang subkontraktor	254.737.721.416	210.088.784.132	Total subcontractor payable
Utang pemasok alat	61.859.931.236	61.732.880.383	Supplier equipment payable
Utang mandor	18.137.657.143	20.943.044.798	Foreman payable
Utang lain-lain	16.071.753.812	-	Other trade payable
Jumlah pihak ketiga	2.727.079.587.426	2.198.046.541.388	Total third parties
Jumlah	3.192.542.096.719	2.744.004.762.050	Total

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Jangka panjang	Long term		
	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pihak berelasi			Related parties
Utang ventura bersama jangka panjang			Joint venture long term portion
PT Brantas Abipraya - DETA KSO	163.600.661.858	-	PT Brantas Abipraya - DETA KSO
PT Brantas Abipraya- PT Sacna KSO	139.605.029.630	-	PT Brantas Abipraya- PT Sacna KSO
PT Brantas Abipraya - PT PP – RE KSO	110.592.226.342	-	PT Brantas Abipraya - PT PP - RE KSO
PT Brantas Abipraya - Mutual Prima Karya KSO	60.006.047.982	-	PT Brantas Abipraya - Mutual Prima Karya KSO
PT Brantas Abipraya – PT Bumi Karsa KSO (Bendungan Budog)	53.149.255.451	80.066.638.777	PT Brantas Abipraya – PT Bumi Karsa KSO (Bendungan Budog)
PT Brantas Abipraya – PT Aneka Dharma Persada KSO (Bendungan Bener 1)	26.610.458.957	61.837.468.903	PT Brantas Abipraya – PT Aneka Dharma Persada KSO (Bendungan Bener 1)
PT Brantas Abipraya – PT Adhi Karya (Persero) Tbk KSO (Bendungan Bener 4)	19.966.469.004	53.046.263.965	PT Brantas Abipraya – PT Adhi Karya (Persero) Tbk KSO (Bendungan Bener 4)
PT Brantas Abipraya-SBS-Silcon KSO	17.594.792.966	-	PT Brantas Abipraya-SBS-Silcon KSO
PT Brantas Abipraya – PT Daka Megaperkasa KSO (Kali Bekasi Paket 7)	7.208.822.564	39.230.718.087	PT Brantas Abipraya – PT Daka Megaperkasa KSO (Kali Bekasi Paket 7)
PT Brantas Abipraya – PT SAC Nusantara KSO (Bendungan Bagong)	-	94.142.560.521	PT Brantas Abipraya – PT SAC Nusantara KSO (Bendungan Bagong)
PT Brantas Abipraya – PT Bumi Karsa – PT Istaka Karya (Persero) KSO (Bulango)	-	54.193.177.572	PT Brantas Abipraya – PT Bumi Karsa – PT Istaka Karya (Persero) KSO (Bulango)
PT Brantas Abipraya – PT Guntur KSO (Teluk Jakarta)	-	17.542.558.679	PT Brantas Abipraya – PT Guntur KSO (Teluk Jakarta)
PT Brantas Abipraya – PT Basuki Rahmanta Putra KSO	-	13.314.353.392	PT Brantas Abipraya – PT Basuki Rahmanta Putra KSO
PT Brantas Abipraya – PT Sinar Arengka Setia Maju KSO (Rob Sungai Loji – Banger)	-	12.923.465.040	PT Brantas Abipraya – PT Sinar Arengka Setia Maju KSO (Rob Sungai Loji – Banger)
PT Brantas Abipraya – PT Pelita Nusa Perkasa KSO (Bendungan Keureuto)	-	10.496.316.628	PT Brantas Abipraya – PT Pelita Nusa Perkasa KSO (Bendungan Keureuto)
PT Brantas Abipraya – PT Pelita Nusa Perkasa KSO (Bendungan Jragung)	-	8.640.623.710	PT Brantas Abipraya – PT Pelita Nusa Perkasa KSO (Bendungan Jragung)
Jumlah	598.333.764.754	445.434.145.274	Total

24. UTANG LAIN-LAIN

24. OTHER PAYABLES

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pihak berelasi			Related parties
PT Rajawali Liki Energi	10.423.937.496	10.423.937.496	PT Rajawali Liki Energi
Utang dividen	614.510.375	-	Dividen payables
Lain-lain	-	70.614.784	Others
Jumlah pihak berelasi	11.038.447.871	10.494.552.280	Total related parties

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Pihak ketiga			Third parties
Pembelian tanah	106.510.800	-	Pembelian tanah
Lain-lain	385.096.076	1.300.003.393	Others
Jumlah pihak ketiga	491.606.876	1.300.003.393	Total third parties
Jumlah	11.530.054.747	11.794.555.673	Total

Utang lain-lain pihak berelasi kepada PT Rajawali Liki Energi merupakan utang atas pinjaman yang digunakan untuk optimalisasi pendanaan BE-anak Perusahaan berdasarkan perjanjian pinjaman No. 001/BE-RLE/PP/III/2018 tanggal 9 Maret 2018.

Other payable of related parties to PT Rajawali Liki Energi are loans for loans used to optimize BE-subsidary funding under a loan agreement No. 001/BE-RLE/PP/III/2018 dated March 9, 2018.

Utang dividen merupakan utang dividen berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2023 kepada kepentingan non pengendali dari PT Brantas Cakrawala Energi, PT Sahung Brantas Energi dan PT Brantas Adya Surya Energi masing-masing sebesar Rp41.423, Rp4.824.323 dan Rp610.184.630.

Dividend payable represents dividend payable based on the decision of the 2023 General Meeting of Shareholders to non-controlling interests of PT Brantas Cakrawala Energi, PT Sahung Brantas Energi and PT Brantas Adya Surya Energi amounting to Rp41,423, Rp4,824,323 and Rp610,184,630 respectively.

25. PERPAJAKAN

25. TAXES

a. Utang pajak

a. Taxes payable

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pajak pertambahan nilai	44.200.032.642	81.137.527.541	Value added tax
Pajak penghasilan			Income tax
Pasal 4 (2) (Final)	99.137.941.898	87.713.851.309	Article 4 (2) (Final)
Pasal 21	4.461.233.666	2.732.697.354	Article 21
Pasal 22	2.570.824.514	2.871.456.489	Article 22
Pasal 23	728.830.043	1.208.407.956	Article 23
Pasal 25	66.697.688	61.255.621	Article 25
Pasal 29	5.963.499.743	18.134.085	Article 20
Jumlah	157.129.060.194	175.743.330.355	Total

b. Pajak penghasilan

b. Income tax

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Beban pajak final			Final tax expense
Perusahaan	(95.588.135.078)	(88.902.932.907)	Company
Entitas anak	(3.757.137.003)	(2.077.986.698)	Subsidiary
Jumlah	(99.345.272.081)	(90.980.919.605)	
Beban pajak kini			Current tax expense
Perusahaan	(2.888.641.454)	(1.847.536.342)	Company
Entitas anak	(5.792.762.343)	(1.310.052.236)	Subsidiary
Jumlah	(8.681.403.797)	(3.157.588.578)	
Manfaat penghasilan pajak tanggungan entitas anak	181.483.619	111.982.291	Deferred tax (expense) income benefit subsidiary
Jumlah	(107.845.192.259)	(94.026.525.892)	Total

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Pajak kini			Current tax
Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dan laba (rugi) kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:			<i>A reconciliation between profit before tax in accordance of statements of comprehensive income and taxable income (loss) of the Company are as follows:</i>
	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Laba konsolidasi sebelum beban pajak penghasilan	210.400.988.446	138.426.097.729	<i>Consolidated profit before income tax expense</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Rugi sebelum pajak penghasilan – entitas anak	27.211.947.712	11.976.115.369	<i>Loss before income tax – subsidiaries</i>
Penyesuaian eliminasi konsolidasi Laba sebelum pajak penghasilan – perusahaan	(54.580.251.286)	(22.275.822.877)	<i>Consolidated elimination adjustment</i>
Perbedaan temporer	183.032.684.872	128.126.390.221	<i>Profit before income tax</i>
Perbedaan permanen	(25.889.884.841)	(4.460.919.964)	<i>Temporary difference</i>
	(144.012.611.604)	(116.021.005.977)	<i>Permanent difference</i>
Laba kena pajak	13.130.188.427	7.644.464.280	Taxable income
Beban pajak penghasilan kini dengan tarif pajak efektif 22% (2019: 25%) – Perusahaan	2.888.641.454	1.681.782.142	<i>Current income tax expense with effective tax rate 22% (2019:25%) - Company</i>
Dikurangi pembayaran pajak penghasilan - Perusahaan: PPh 22 dan PPh 23 PPh 25	2.015.258.963	1.617.539.938	<i>Less income tax payments – Company Article 22 and Article 23</i>
	59.827.731	52.280.857	<i>Article 25</i>
Sub Jumlah	2.075.086.694	1.669.820.795	<i>Sub Total</i>
Utang pajak penghasilan – Perusahaan	(813.554.760)	(11.961.347)	Income tax payable – Company
Beban pajak penghasilan kini – entitas anak	(5.792.762.302)	(1.310.052.235)	<i>Current income tax expense – subsidiaries</i>
Pembayaran pajak penghasilan – entitas anak	642.817.360	1.303.879.497	<i>Payment of income tax – subsidiaries</i>
Utang pajak penghasilan – entitas anak	(5.149.944.983)	(6.172.738)	Income tax payable – subsidiaries
Utang pajak penghasilan – Konsolidasian	(5.963.499.743)	(18.134.085)	Income tax payable – consolidated

c. Aset pajak tangguhan

c. Deferred tax assets

	1 Januari/ January 1, 2022	Dikreditkan ke laba (rugi) tahun berjalan/ Credited to profit (loss) for the period	Dikreditkan ke pendapatan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2022	Dikreditkan ke laba (rugi) tahun berjalan/ Credited to profit (loss) for the period	Dikreditkan ke pendapatan komprehen sif lain/ Credited to other comprehen sive income	31 Desember/ December 31, 2023	
Perusahaan								<i>Company</i>
Liabilitas imbalan pasca kerja	463.179.334	111.982.291	100.271.823	675.433.448	181.483.619	48.206.937	905.124.004	<i>Post – employment benefit obligation</i>
Jumlah	463.179.334	111.982.291	100.271.823	675.433.448	181.483.619	48.206.937	905.124.004	Total

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

26. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

26. ACCRUED EXPENSES

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Beban produksi	803.084.840.136	345.640.008.202	<i>Production cost</i>
Beban usaha	109.447.899.996	64.460.372.678	<i>Operating expenses</i>
Beban bunga	1.987.522.182	1.352.480.909	<i>Interest expenses</i>
Beban pemeliharaan	-	1.117.707.781	<i>Maintenance expenses</i>
Lain-lain	670.016.166	1.846.335.317	<i>Others</i>
Jumlah	<u>915.190.278.480</u>	<u>414.416.904.887</u>	Total

27. UANG MUKA PEMBERI KERJA DAN KONSUMEN

27. ADVANCES FROM PROJECT OWNER AND COSTUMERS

Merupakan uang muka yang diterima dari pemberi kerja atau pemilik proyek atas pekerjaan konstruksi yang memiliki jangka waktu penyelesaian proyek lebih dari satu tahun. Jumlah tersebut secara proporsional akan dikompensasikan dengan tagihan yang didasarkan atas kemajuan fisik yang telah dicapai.

Represents advances received from the employer or owner of the construction project that has completion period of more than one year. The amount is deducted in proportion based on the physical progress achieved.

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Jangka pendek			Short term
Pemberi kerja jasa konstruksi	509.051.737.716	243.207.275.377	<i>Constructions project owners</i>
Konsumen properti dan realti	15.021.932.833	17.481.048.929	<i>Property and realty customers</i>
Konsumen sewa alat	44.268.760	1.134.996.000	<i>Equipment rental customers</i>
Jumlah	<u>524.117.939.309</u>	<u>261.823.320.306</u>	Total
Jangka panjang			Long term
Pemberi kerja konstruksi	182.196.432.208	226.977.081.716	<i>Construction revenue – Company</i>
Jumlah	<u>706.314.371.517</u>	<u>488.800.402.022</u>	Total

28. UTANG BANK

28. BANK LOANS

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Jangka panjang			Long term
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	621.500.000.000	681.500.000.000	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT Bank Syariah Indonesia	186.214.468.867	352.058.546.720	<i>PT Bank Syariah Indonesia</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	150.000.000.000	200.000.000.000	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk</i>
Biaya transaksi belum di amortisasi	(128.082.764)	(216.030.662)	<i>Transactions costs are not amortized</i>
Jumlah	<u>957.586.386.103</u>	<u>1.233.342.516.058</u>	Total
Dikurangi:			Less:
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			<i>Current maturities</i>
PT Bank Syariah Indonesia	(17.654.219.623)	(25.756.029.953)	<i>PT Bank Syariah Indonesia</i>
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	<u>939.932.166.480</u>	<u>1.207.586.486.105</u>	Long term bank loans - net of current maturities

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

<u>Kreditas/ Creditors</u>	<u>Jenis fasilitas/ Type of facilities</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	<u>Tanggal perjanjian/ Date of agreements</u>	<u>Tanggal jatuh tempo/ Maturity date</u>	<u>Tingkat suku bunga/ Interest rate</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perusahaan/ The Company	Kredit Modal Kerja Transaksional 1/ Working Capital Credit Transactional 1	900.000.000.000	26 Maret 1997 (Amandemen terakhir 17 Maret 2023)/ March 26, 1997 (Latest amendment March 17, 2023)	22 Maret 2025/ March 22, 2025	8,25%
PT Bank Syariah Indonesia Perusahaan/ The Company	Pembiayaan Murabahah Investasi/ Murabahah Investment Financing	250.000.000.000	22 Mei 2017 (Amandemen terakhir 3 Desember 2020)/ Mei 22, 2017 (Latest amendment December 3, 2020)	Februari 2024/ February, 2024	17,5%
	Kredit Modal Kerja Transaksional/ Transactional Working Capital Credit	700.000.000.000	20 Desember 2022/ December 20, 2022	14 Februari 2025/ February 14, 2025	8%
	Pembiayaan Investasi IMBT dan MMQ/ IMBT and MMQ Investment financing	250.000.000.000	20 Desember 2022/ December 20, 2022	20 Desember 2027/ December 20, 2027	9%-10%
Entitas anak – kepemilikan tidak langsung/ Subsidiaries – indirect ownership	Fasilitas Kredit Musyarakah Mutanaqisah/ Musyarakah Mutanaqisah Credit Facility	135.000.000.000	30 November 2017	30 November 2026/ November 30, 2026	9%
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Perusahaan/ The Company	Kredit Modal Kerja Konstruksi Standby loan/ Working Capital Credit Construction Standby Loan	200.000.000.000	27 September 2022/ September 27, 2022	31 Januari 2025/ January 31, 2025	8,25%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Perusahaan/ The Company	Kredit Modal Kerja Transaksional/ Transactional Working Capital Loans	300.000.000.000	20 Desember 2018 (Amandemen terakhir 29 September 2023)/ December 20, 2018 (Latest amendment December 20, 2023)	2 Oktober 2024/ October 2, 2024	9%
	Kredit Modal Kerja RC Terbatas/ RC Limited Working Capital Loan	25.000.000.000	20 Desember 2018 (Amandemen terakhir 29 September 2023)/ December 20, 2018 (Latest amendment December 20, 2023)	2 Oktober 2024/ October 2, 2024	9%

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perusahaan menandatangani perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving, Kredit Modal Kerja Transaksional, Non-Cash Loan, Supplier Financing dan Treasury Line dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perjanjian telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan surat perjanjian kredit No.CBG.CB2/SCD.SPPK.018/2023 tanggal 17 Maret 2023. Plafond kredit sebesar Rp900.000.000.000 dengan suku bunga 8,25%. Jangka waktu fasilitas diperpanjang selama 24 bulan.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- Hak tanggungan sebesar Rp8.185.000.000 atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 640/Sei

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

The Company signed a Revolving Working Capital Credit Facility, Transactional Working Capital Credit, Non-Cash Loan, Supplier Financing and Treasury Line Facility agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The agreement has undergone several changes, most recently based on credit agreement letter No.CBG.CB2/SCD.SPPK.018/2023 dated March 17, 2023. The credit plafond is Rp900,000,000,000 with an interest rate 8.25%. The facility term is extended for 24 months.

This credit facility is collateralized with:

- The dependants rights amounting to Rp8,185,000,000 of a plot of land based on Certificate of Building Use Rights No.

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

(Lanjutan/Continued)

- Sikambing B, luas 1.741m² yang terletak di Jl. Kasuari No. 8, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kotamadya Medan, Sumatera Utara berikut bangunan dan sarana pelengkap yang didirikan di atas tanah.
- Hak tanggungan sebesar Rp29.725.000.000 atas dua (2) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 339/Kejapanan luas 15.830m² dan No. 2/Karangrejo luas 345m² yang terletak di Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur berikut bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut.
 - Hak tanggungan sebesar Rp11.334.097.000 atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 79/Gadingkasri, luas 738m² yang terletak di Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kotamadya Malang Propinsi Jawa Timur berikut bangunan – bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut.
 - Hak tanggungan sebesar Rp2.881.000.000 atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 95/Desa Ngoro, luas 10.674m² yang terletak di Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur berikut bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut.
 - Hak tanggungan sebesar Rp6.602.000.000 atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/Ngreco, luas 27.530m² yang terletak di Desa Ngreco Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur berikut bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut.
 - Hak tanggungan sebesar Rp79.012.000.000 atas tiga (3) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01660/Cipinang Cempedak luas 2.915m², Nomor: 1651/Cipinang Cempedak luas 29m², dan No. 1650/Cipinang Cempedak luas 23m² yang terletak di Jalan D.I Panjaitan Kavling 14 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur berikut bangunan bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut.
 - Hak tanggungan sebesar Rp395.280.000.000 atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan seluas 24.400m² yang terletak di Jalan Yos Sudarso - Jakarta Utara.
- 640/Sei Sikambing B, area of 1,741m² located at Jl. Kasuari No. 8, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Sunggal, Kotamadya Medan, Sumatera Utara including buildings and complementary facilities that were established on the land.
- The dependants rights amounting to Rp29,725,000,000 of two (2) plot of land based on Certificate of Building Use Rights No. 339/Kejapanan area of 15,830m² and No. 2/Karangrejo, area of 345m² located in Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur including buildings that were erected on the land.
 - The dependants rights amounting to Rp11,334,097,000 of a plot of land based on Certificate of Building Use Rights No. 79/Gadingkasri, area of 738m² located in Kelurahan Gadingsari, Kecamatan Klojen, Kotamadya Malang, Propinsi Jawa Timur including buildings that were established on the land.
 - The dependants rights amounting to Rp2,881,000,000 of a plot of land based on Certificate of Building Use Rights No 95/Desa Ngoro, area of 10,674m² located in Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Propinsi East Java including buildings that were established on the land.
 - The dependants rights amounting to Rp6,602,000,000 of a plot of land based on Certificate of Building Use Rights No. 1/Ngreco, area of 27,530m² located in Desa Ngreco, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur including buildings that were established on the land.
 - The dependants rights amounting to Rp79,012,000,000 of Three (3) plot of land based on Certificate Of Building Use Rights No. 01660/Cipinang Cempedak, area of 2915m², No. 1651/Cipinang Cempedak area of 29m², and No. 1,650/Cipinang Cempedak area of 23m² Cempedak located at Jl. D.I Panjaitan Lot 14, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur including buildings that were established on the land.
 - The dependants rights amounting to Rp395,280,000,000 of a plot of land based on Certificate of Building Use Rights area of 24,400m² located at Yos Sudarso Jakarta Utara.

(Lanjutan/Continued)

Agunan aset lainnya, terdiri dari:

- Piutang usaha yang telah diikat fidusia sebesar Rp1.550.000.000.000 (satu triliun lima ratus lima puluh milyar rupiah).
- Persediaan yang telah diikat fidusia sebesar Rp25.000.000.000.
- Kontrak yang diikat cessie.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar minimum 1 kali;
- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 1 kali; dan
- Rasio utang terhadap ekuitas (DER) maksimum 3 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

b. PT Bank Syariah Indonesia

Perusahaan

Perusahaan menandatangani perpanjangan perjanjian Fasilitas Pembiayaan Murabahah Investasi dan Fasilitas Pembiayaan Penjaminan iB Hasanah dengan PT Bank Syariah Indonesia berdasarkan Addendum Surat Keputusan Pembiayaan *Supply Chain Financing* dan Plafond Investasi No. BNISy/CRD/SKP.1/129/R tanggal 13 Desember 2019.

Pinjaman ini dijamin dengan:

- Fidusia piutang usaha dengan pengikatan sebesar 120% dari limit pembiayaan.
- Fidusia alat berat, mesin dan peralatan lainnya yang menjadi objek pembiayaan senilai maksimum pembiayaan.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar minimum 1 kali;
- Rasio utang terhadap ekuitas maksimum 3 kali.

Perusahaan memperoleh Fasilitas Modal Kerja Transaksional, Sublimit BSI *Buyer Financing*, LC/SKBDN/*Deferred Payment* dan Bank Garansi dari PT Bank Syariah Indonesia berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) No. 01/131-3/SP3/CB2 tanggal 23 November 2021.

Other assets collateral, consisting of:

- *Accounts receivable which have been fiducia bound by Rp1,550,000,000,000 (one trillion five hundred and fifty billion rupiah).*
- *Inventories bound by fiduciary amounting to Rp25,000,000,000.*
- *Contracts are tied cessie.*

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- *Current ratio minimum 1 time;*
- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimum 1 time; and*
- *Debt to equity ratio (DER) maximum of 3 times.*

As of December 31, 2023, the Company's Complied terms and conditions of the loans.

b. PT Bank Syariah Indonesia

The Company

The Company obtained an extension agreement of Murabahah Investment Financing Facility and iB Hasanah Guarantee Financing Facility with PT Bank Syariah Indonesia formerly PT Bank BNI Syariah based on Amendment of Decree on Supply Chain Financing and Investment Plafond No. BNISy/CRD/SKP.1/129/R dated December 13, 2019.

This facility credit is collateralized with:

- *Fiduciary of receivables with binding of 120% of the financing limit.*
- *Fiduciary of heavy equipment / machinery and others equipment which are the object of financing with a maximum value of the financing limit.*

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- *Current ratio minimum 1 line;*
- *DER maximum of 3 times.*

The Company obtained a Transactional Working Capital Facility, Sublimit BSI Buyer Financing, LC/SKBDN/Deferred Payment and Bank Guarantee from PT Bank Syariah Indonesia based on Lending Offer Letter (SP3) No. 01/131-3/SP3/CB2 dated November 23, 2021.

(Lanjutan/Continued)

Perusahaan telah menandatangani addendum perjanjian berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan (SP3) No. 02/134-3/SP3/CB2 tanggal 20 Desember 2022, perihal perpanjangan jangka waktu fasilitas Modal Kerja Transaksional plafond sebesar Rp700.000.000.000. Jangka waktu fasilitas diperpanjang selama 24 bulan dengan suku bunga 8% per tahun. Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan investasi baru yang diberikan sebesar Rp250.000.000.000 dengan skema Line facility - Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) dan Musyawarah Mutanaqishah (MMQ) - Non-Revolving untuk tujuan investasi pembelian baru dan *refinancing*. Jangka waktu fasilitas selama 60 bulan. Pada tahun 2023 Perusahaan belum melakukan pencairan pada fasilitas pembiayaan investasi baru.

Pinjaman ini dijamin dengan Fidusia piutang usaha atas proyek dengan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia (AJF) No. 31 tanggal 29 November 2021 dengan nilai penjaminan sebesar Rp875.000.000.000.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar minimum 100%;
- Rasio utang terhadap ekuitas (DER) maksimum 300%; dan
- DSCR minimum 100%.
- Leverage maksimum 500%.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

PT Sahung Brantas Energi

SBE entitas anak PT BE memperoleh perpanjangan perjanjian Fasilitas Kredit Musyarakah Mutanaqishah dengan PT Bank BNI Syariah berdasarkan Akta notaris No. 39 tanggal 30 November 2017 oleh Fessy Farizqoh Alwi, SH, M.Kn., fasilitas tersebut untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro yang berlokasi di Kabupaten Kaur.

Pinjaman ini dijamin dengan tanah dan bangunan beserta mesin. Tanah tersebut terdiri dari:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10001/Bungin Tambun III.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10002/Bungin Tambun III.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10003/Bungin Tambun III.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10004/Bungin Tambun III.

The company has signed an addendum to the agreement based on the Financing Offer Letter (SP3) No. 02/134-3/SP3/CB2 dated December 20, 2022, regarding the extension of the term of the Transactional Working Capital facility with a ceiling of Rp700,000,000,000. The facility term is extended for 24 months with an interest rate of 8% per year. The company obtained a new investment financing facility in the amount of Rp250,000,000,000 with the Line facility scheme - Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) and Musyawarah Mutanaqishah (MMQ) - Non-Revolving for investment purposes for new purchases and refinancing. The facility term is 60 months. In 2023 the Company has not made any withdrawals from new investment financing facilities.

This facility credit is collateralized with Receivable Fiduciary of project with binding base on Akta Jaminan Fidusia (AJF) No. 31 dated November 29, 2021 with a guarantee value of Rp875,000,000,000.

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- Current ratio minimum 100%;
- Debt to equity ratio (DER) maximum of 300%; and
- DSCR minimum 100%.
- Leverage maximum 500%

As of December 31, 2023, the Company's Complied terms and conditions of the loans.

PT Sahung Brantas Energi

SBE subsidiary of PT BE obtained an extension agreement of Musyarakah Mutanaqishah Financing Facility with PT Bank BNI Syariah based on the deed No. 39 dated November 30, 2017 by Fessy Farizqoh Alwi, SH, M.Kn., the facility is for the construction of a Mini Hydro Power Plant located in Kabupaten Kaur.

The loan is collateralized by land and buildings and machine. The land consists of:

- A landrights with certificate No 10001/Bungin Tambun III.
- A landrights with certificate No 10002/Bungin Tambun III.
- A landrights with certificate No 10003/Bungin Tambun III.
- A landrights with certificate No 10004/Bungin Tambun III.

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10005/Bungin Tambun III.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10006/Bungin Tambun III.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10007/Bungin Tambun III.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10008/Bungin Tambun III.

- A landrights with certificate No 10005/Bungin Tambun III.
- A landrights with certificate No 10006/Bungin Tambun III.
- A landrights with certificate No 10007/Bungin Tambun III.
- A landrights with certificate No 10008/Bungin Tambun III.

c. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas Kredit Modal Kerja Standby Loan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk tanggal 29 Mei 2019 No. 84/KOM-KKI/2019. Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit No 375/DKO-KO2/SPPK/2022 tanggal 27 September 2022, plafond kredit yang diberikan sebesar Rp300.000.000.000 dengan jangka waktu selama 12 bulan. Suku bunga 9% floating. Fasilitas tersebut digunakan untuk modal kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan untuk proyek yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD/BUMN.

c. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

The Company signed a Standby Loan Working Capital Credit facility agreement with PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk dated May 29, 2019 No. 84/KOM-KKI/2019. Based on the Credit Offer Letter No. 375/DKO-KO2/SPPK/2022 dated September 27, 2022, the credit limit provided is Rp300,000,000,000 with a term of 12 months. 9% floating interest rate. This facility is used for working capital for construction services businesses and procurement for projects whose funding sources come from the APBN/APBD/BUMN.

d. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan menandatangani perpanjangan perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving, Kredit Modal Kerja Transaksional, Supplier Financing dan Forex line dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Perjanjian telah mengalami perubahan terakhir pada tanggal 30 September 2021 berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit No. KPS3/2.1/338/R. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha dan persediaan proyek- proyek terkait yang diikat dengan fidusia.

d. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

The Company entered into an extension agreement of Revolving Working Capital Loan, transactional working capital credit, Supplier Financing and Forex line facility with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. The agreement has been amended on September 30, 2021 based Letter of Approval for Extension of Credit Facility No. KPS3/2.1/338/R. The loan is collateralized with accounts receivable and inventories of the projects.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar minimum 1 kali;
- Rasio utang terhadap ekuitas (DER) maksimum 4 kali; dan
- DSCR minimum 1 kali.

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- Current ratio minimum 1 line;
- DER maximum of 4 times; and
- DSCR minimum 1 time.

Pada tahun 2023 Perusahaan telah melunasi seluruh pinjamannya berdasarkan Surat Pelunasan No.345/D/KEU/V/2023 tanggal 26 Juni 2023.

In 2023 the Company has paid off all of its loans based on Repayment Letter No.345/D/KEU/V/2023 dated June 26, 2023.

Rekonsiliasi utang bank yang timbul dari arus kas aktivitas pendanaan adalah:

Reconciliation bank loans liabilities arise from cash flow financing activities as follow:

	2022	Arus kas masuk/ Cash inflow	Arus kas keluar/ Cash outflow	Perubahan nonkas/ Non-cash changes	2023	
Utang bank	1.233.342.516.058	155.000.000.000	(430.843.977.857)	87.847.902	957.586.386.103	Bank loan
Jumlah	1.233.342.516.058	155.000.000.000	(430.843.977.857)	87.847.902	957.586.386.103	Total

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

29. UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON BANK JANGKA PANJANG	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	29. LONG TERM LOANS FROM NON BANK FINANCIAL INSTRUMENT
Jangka panjang			Long term
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	408.154.368.285	349.311.754.434	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Indonesia Infrastructure Finance	165.000.000.000	232.518.459.858	PT Indonesia Infrastructure Finance
Biaya transaksi belum diamortisasi	(3.502.711.815)	(4.350.605.302)	Amortized transactions cost
Jumlah	569.651.656.470	577.479.608.990	Total
Dikurangi:			Less:
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(210.579.804.391)	(68.684.414.706)	Current maturity
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dalam satu tahun	359.071.852.079	508.795.194.284	Long-term portions current maturity less current maturity

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rincian fasilitas pinjaman diatas adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2023 and 2022, details of the above facilities are as follows:

Kreditur/ Creditor	Fasilitas/ Facility	Mata uang/ Currency	Maksimum fasilitas/ Maximum facility	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate
PT Sarana Multi Infrastruktur Perusahaan	Pembiayaan Investasi/ Investment Financing	Rupiah	250.000.000.000	10 Desember 2021 (Amandemen terakhir 22 September 2023)/ December 10, 2021 (Latest amendment September 22, 2023)	31 Juli 2024/ July 31, 2024	8,25%
Entitas anak – kepemilikan tidak langsung	Pembiayaan Investasi/ Investment Financing	US Dollar	\$10.824.000	30 November 2018/ November 30, 2018	30 November 2030/ November 30, 2030	5%
Entitas anak – kepemilikan tidak langsung	Pembiayaan Investasi/ Investment Financing	Rupiah	143.710.000.000	18 Desember 2019/ December 18, 2019	5 September 2030/ September 5, 2030	9,80%
	Pembiayaan Investasi/ Investment Financing	Rupiah	205.400.000.000	27 Agustus 2021/ August 27, 2021	25 Maret 2032/ March 25, 2032	8,5% (5 tahun) Floating JIBOR 1 bulan +5%
PT Indonesia Infrastructure Finance Perusahaan	Senior Loan Working Capital	Rupiah	250.000.000.000	22 September 2023/ September 22, 2023	31 Juli 2024/ July 31, 2024	8,25%
Entitas anak – kepemilikan tidak langsung	Pinjaman Berjangka Senior/ Senior Term Loan	US Dollar	\$2.500.000	18 November 2015/ November 18, 2015	18 November 2023/ November 18, 2023	6%

(Lanjutan/Continued)

a. Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Perusahaan

Perusahaan memperoleh perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Perjanjian telah mengalami perubahan terakhir pada tanggal 1 Agustus 2019 berdasarkan Surat Penegasan Fasilitas Pembiayaan No. S-581/SMI/DPI/0819. Fasilitas tersebut untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur.

Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan fidusia piutang proyek dengan pengikatan sebesar 125% dari limit pembiayaan.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar minimum 1 kali;
- Rasio utang terhadap ekuitas (DER) maksimum 4 kali;
- EBITDA terhadap beban bunga maksimum 1,66 kali; dan
- Utang terhadap EBITDA maksimum 6 kali.

Pada tahun 2023, Perusahaan telah melunasi seluruh pinjamannya berdasarkan surat keterangan lunas No. S-21/SMI/DPI/0124 tanggal 10 Januari 2024.

PT Brantas Cakrawala Energi (BCE)

BCE menandatangani perjanjian Fasilitas Pembiayaan Investasi dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) pada tanggal 30 November 2018 berdasarkan Akta Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn., No. 57. Fasilitas tersebut untuk membiayai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihydro (PLTM) Sako kapasitas 2 x 3 MW di Kecamatan Ranah Ampek Hulu, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- Sebidang tanah berdasarkan akta pelepasan hak No.1 tanggal 10 November 2015, No.1 tanggal 11 Januari 2016 dan No.2 tanggal 6 Februari 2017.
- Mesin dan peralatan, diikat secara fidusia.
- Tagihan listrik kepada PT PLN (Persero), diikat secara fidusia.
- Tagihan atas pendapatan dari klaim asuransi proyek PLTM Sako, diikat secara fidusia.
- Gadai saham masing-masing pemegang saham dalam bentuk akta notarial.

a. Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

The Company

The Company obtained an extension agreement of Working Capital Loan with PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). The agreement has been amended on August 1, 2019 based on Letter of Affirmation on Financing Facilities No. S-581/SMI/DPI/0819. The facilities are used to fund infrastructure project.

This financing facility is secured with project receivables that should be maintained at 125% from facility limit.

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- Current ratio minimum 1 time;
- Debt to equity ratio (DER) maximum of 4 times
- EBITDA to interest maximum 1.66 times; and
- Debt to EBITDA maximum 6 times.

In 2023, the Company has paid off all of its loans based on repayment certificate No. S-21/SMI/DPI/0124 dated January 10, 2024.

PT Brantas Cakrawala Energi (BCE)

BCE entered into an agreement of Investment Financing Facility with PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) on November 30, 2018 based on Deed No. 57 of Fessy Farizqoh Alwi, S.H., MKN., The facilities are used to fund construction of the Sako Minihydro Power Plant (PLTM) capacity of 2 x 3 MW at Kecamatan Ranah Ampek Hulu, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

This facility credit is collateralized with:

- A land right based on the deed of release No.1 dated November 10, 2015, No.1 dated January 11, 2016 and No.2 dated February 6, 2017.
- Machinery and equipment, fiduciary bound.
- Claim of electricity to PLN (Persero), fiduciary bound.
- Claim of income from the PLTM Sako project insurance, fiduciary bound.
- Pledge of shares of each shareholder in the form of notarial deed.

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

- Gadai atas Rekening *Collection Account*, *Debt Service Payment Account*, *Debt Service Reserve Account* dan *Excess Account* dalam bentuk akta notarial.
- *Corporate Guarantee* dari PT Brantas Energi.

BCE diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- *Ratio Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*: EBITDA / (Biaya bunga ditambah angsuran pokok pembiayaan) minimum 1 kali; dan
- *Ratio Debt to Equity Ratio (DER)*: (*Total interest-bearing debt*) to equity maksimum 3 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2023 Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi Pinjaman yaitu rasio DER, akan tetapi BCE belum memenuhi syarat DSCR minimum.

PT Brantas Hidro Energi (BHE)

BHE menandatangani perjanjian Fasilitas Pembiayaan Investasi dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) pada tanggal 18 Desember 2019 berdasarkan Akta Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn., No. 31. Fasilitas tersebut untuk membiayai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Padang Guci 2 kapasitas 2 x 3,5 MW.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- Hak tanggungan
- Jaminan fidusia atas mesin atau peralatan proyek
- Jaminan fidusia atas pendapatan proyek termasuk kompensasi hasil pengakhiran dokumen proyek
- Jaminan fidusia atas klaim asuransi
- Gadai saham
- Gadai rekening
- Jaminan Perusahaan
- *Letter of undertaking*

PT Brantas Hidro Energi diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- DSCR: EBITDA/(Biaya bunga ditambah angsuran pokok pembiayaan) minimal 1 kali; dan
- DER: (*Total interest-bearing debt*) to equity maksimum 3 kali.

- *Pledge of Collection Account, Debt Service Payment Account, Debt Service Reserve Account and Excess Account in the form of notarial deed.*
- *Corporate Guarantee from PT Brantas Energi.*

BCE is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR): EBITDA / (interest expense plus principal installments) minimum 1 time; and*
- *Debt to Equity Ratio (DER): (Total interestbearing debt) to equity, maximum 3 times.*

As at December 31, 2023, the Company has complied with the terms and conditions of the loan, namely the DER ratio, but BCE has not met the minimum DSCR requirements.

PT Brantas Hidro Energi (BHE)

BHE - subsidiary entered into an agreement of Investment Financing Facility with PTSarana Multi Infrastruktur (Persero) on December 18, 2019 based on Deed No. 31 of Fessy Farizqoh Alwi, S.H., MKN. The facilities are used to fund construction of the Padang Guci Minihydro Power Plant (PLTM) capacity of 2 x 3.5 MW.

This facility credit is collateralized with:

- *Dependent rights*
- *Fiduciary guarantee for project machines or equipment*
- *Fiduciary guarantee for project revenue including compensation for the end of project documents*
- *Fiduciary security for insurance claims*
- *Share mortgage*
- *Mortgage accounts*
- *Company Guarantee*
- *Letter of undertaking*

PT Brantas Hidro Energi is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- *DSCR: EBITDA/(Interest expense plus principal installments) minimum 1 time; and*
- *DER: (Total interest-bearing debt) to equity, maximum 3 times.*

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Pada tanggal 31 Desember 2023 BHE telah memenuhi syarat dan kondisi Pinjaman yaitu rasio DER, akan tetapi Perusahaan belum memenuhi syarat DSCR minimum.

As at December 31, 2023, BHE has complied with the terms and conditions of the loan, namely the DER ratio, but the Company has not met the minimum DSCR requirements.

PT Brantas Prospek Energi (BPE)

BPE menandatangani perjanjian Fasilitas Pembiayaan Investasi dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) pada tanggal 27 Agustus 2021 berdasarkan Akta Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn. No.06. Fasilitas tersebut untuk membiayai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Maiting Hulu 2 kapasitas 2 x 4,0 MWp.

PT Brantas Prospek Energi (BPE)

BPE - subsidiary entered into an agreement of Investment Financing Facility with PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) on August 27, 2021 based on Deed No.06 of Fessy Farizqoh Alwi, SH., MKN. The facilities are used to fund the development of the Mini hydro Power Plant (PLTM) Maiting Hulu 2 capacity of 2 x 4,0 MWp.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

This facility credit is collateralized with:

- Hak Tanggungan atas Tanah dan Bangunan Proyek
- Fidusia atas mesin atau peralatan proyek
- Fidusia atas tagihan/piutang listrik kepada PT PLN terkait Proyek termasuk hasil kompensasi akibat pengakhiran *Power Purchase Agreement*
- Fidusia atas hak tagihan klaim asuransi Proyek
- Gadai saham masing-masing pemegang saham Debitur
- Gadai rekening *Collection Account, Debt Service Reserve Account dan Excess Cash Account* atas nama Debitur
- *Letter of undertaking* dari PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Brantas Energi
- *Corporate Guarantee* dari PT Brantas Energi

- *Encumbrance Right on Land and Building Projects*
- *Fiduciary over project machinery or equipment*
- *Fiduciary on electricity bills/receivables to PT PLN related to the Project including compensation results due to termination of the Power Purchase Agreement*
- *Fiduciary of Project insurance claims*
- *Pledge of shares of each shareholder Debtor*
- *Pledge of Collection Account, Debt Service Reserve Account and Excess Cash Account on behalf of the Debtor*
- *Letter of undertaking from PT Brantas Abipraya (Persero) and PT Brantas Energi*
- *Corporate Guarantee dari PT Brantas Energi*

PT Brantas Prospek Energi diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

PT Brantas Prospek Energi is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- *Ratio Debt Service Coverage Ratio (DSCR):* EBITDA / (Biaya bunga ditambah angsuran pokok pembiayaan) minimal 1 kali; dan
- *Ratio Debt to Equity Ratio (DER):* (Total interest-bearing debt) to equity maksimum 1,5 kali.

- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR):* EBITDA/ (Interest expense plus principal installments) minimum 1 time; and
- *Debt to Equity Ratio (DER):* (Total interestbearing debt) to equity, maximum 1,5 times.

Pada tanggal 31 Desember 2023, BPE belum memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan oleh bank.

As of December 31, 2023, BPE has not met the financial ratios required by the bank.

b. PT Indonesia Infrastructure Finance

b. PT Indonesia Infrastructure Finance

Perusahaan

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Modal Kerja tanggal 23 Desember 2021, antara Perusahaan dengan PT Indonesia Infrastructure

The Company

Based on the Working Capital Loan Facility Agreement dated December 23, 2021, between the Company and PT Indonesia Infrastructure

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Finance, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dengan batas maksimal Rp250.000.000.000 dan tingkat bunga 8,25%, batas waktu ketersediaan penarikan fasilitas sampai dengan 23 September 2023.

Perusahaan telah menandatangani addendum perjanjian No. ADD.01-PF.07/XII/IIF-TL/2021 tanggal 22 September 2023. Jangka waktu fasilitas sampai dengan 31 Juli 2024.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar minimum 1 kali;
- Rasio utang terhadap ekuitas (DER) maksimum 3 kali;
- Rasio DSCR minimum 1 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

PT Brantas Adya Surya Energi (BASE)

BASE telah mengadakan perjanjian fasilitas pinjaman berjangka senior dengan PT Indonesia Infrastructure Finance. Perjanjian telah mengalami perubahan terakhir pada tanggal 27 Juni 2016 melalui Waarmerking No. 92/RMR/W/VI/2016 oleh Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.Kn.

Pinjaman ini dijamin dengan jaminan gadai rekening dan gadai saham dalam bentuk akta notarial.

BASE diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar dari peminjam, tidak boleh kurang dari 1,25 berbanding 1.
- DSCR dari peminjam, tidak boleh kurang dari 1,25 berbanding 1. Dimana perhitungan DSCR sama dengan EBITDA dibagi dengan kewajiban pembayaran pokok dan bunga tahun berjalan. Untuk menghindari keragu-raguan, dalam perhitungan DSCR dengan periode kurang dari 1 tahun maka nilai EBITDA dan bunga disetahunkan.

Pada tahun 2023, Perusahaan telah melunasi seluruh pinjamannya berdasarkan surat keterangan lunas No. S.2006/XI/IIF/2023 tanggal 24 November 2023.

Rekonsiliasi utang bank yang timbul dari arus kas aktivitas pendanaan adalah:

Finance, the Company obtained a loan facility with a maximum limit of Rp250,000,000,000 and an interest rate of 8.25%, the deadline for withdrawing the availability of the facility is up to September 23, 2023.

The company has signed addendum to agreement No. ADD.01-PF.07/XII/IIF-TL/2021 dated 22 September 2023. The term of the facility is until July 31, 2024.

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- *Current ratio minimum 1 time;*
- *Debt to equity ratio (DER) maximum of 3 times*
- *DSCR ratio minimum 1 time.*

As of December 31, 2023, the Company's Complied terms and conditions of the loans.

PT Brantas Adya Surya Energi (BASE)

BASE has entered into a Working Capital Loan with PT Indonesia Infrastructure Finance. The agreement has been amended on June 27, 2016 based on Waarmerking No. 92/RMR/W/VI/2016 by Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.Kn.

The loan is collateralized with guaranteed mortgage account and pledged of share in the form of notarial deed.

BASE is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- *Current ratio of borrowers, should not be less than 1.25 to 1.*
- *The borrower's DSCR, should not be less than 1.25 to 1. Where the DSCR calculation is equal to EBITDA divided by the current year's principal and interest payment obligations. To avoid doubt, in calculating the DSCR with a period of less than 1 year, the EBITDA and interest are annualized.*

In 2023, the Company has paid off all of its loans based on repayment certificate No. S.2006/XI/IIF/2023 dated November 24, 2023.

Reconciliation bank loans liabilities arise from cash flow financing activities as follow:

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

	2022	Arus kas masuk/ Cash inflow	Arus kas keluar/ Cash outflow	Perubahan nonkas/ Non-cash changes	2023	
Utang lembaga keuangan non bank	577.479.608.990	240.000.000.000	(248.321.669.688)	493.717.168	569.651.656.470	From non bank financial institution
Jumlah	577.479.608.990	240.000.000.000	(248.321.669.688)	493.717.168	569.651.656.470	Total

30. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

30. POST EMPLOYEMENT BENEFIT LIABILITY

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Program pensiun imbalan pasti	-	5.954.054.246	Pension program liabilities
Imbalan pasca kerja lainnya	18.650.626.300	14.783.477.485	Other employee benefit obligation
Jumlah	18.650.626.300	20.737.531.731	Total

a. Program pensiun imbalan pasti

a. Pension program liabilities

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan lokal. Perusahaan menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun PT Brantas Abipraya (Persero) yang berkaitan dengan hak dan besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana disahkan oleh Menteri Keuangan RI No. KEP- 053/KM.17/2000 tanggal 14 Februari 2000. Dana pensiun PT Brantas Abipraya (Persero) merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dengan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Kebijakan pendanaan terdiri dari iuran normal, iuran tambahan dan manfaat pensiun. Besaran iuran normal yang diperlukan adalah sebesar 20,56% dari penghasilan dasar pensiun (PhDP) terakhir.

The Company established defined contribution pension plan covering all the local permanent. The Company organized pension plans by the Pension Fund Regulatory PT Brantas Abipraya (Persero) relating to the rights and magnitude of Retirement Benefits as approved by the Ministry of Finance of Republic of Indonesia No. KEP- 053/KM.17/2000 dated February 14, 2000. Pension fund PT Brantas Abipraya (Persero) is an Employer Retirement Fund (DPPK) to the Defined Benefit Pension Plan (PPMP). Funding policy consists of the normal fees, additional fees and retirement benefits. The amount of the normal fees required is 20.56% of last pension base earnings (PhDP).

Dari jumlah tersebut Peserta aktif harus membayar sebesar 5% dari PhDP dan Pemberi Kerja sebesar 15,56% dari PhDP. Iuran tambahan Dana Pensiun yang ditetapkan oleh Aktuaria dari Pemberi Kerja untuk menutup defisit.

From the amount, active participant must pay an amount of 5% of PhDP and Employer of 15.56% of the PhDP. Additional Pension Fund established by the Actuary of the Employer to cover the deficit.

Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebanyak 364 dan 379

The total amount of employees eligible for the benefits until December 31, 2023 and 2022 are 364 and 379 employees respectively.

Beban imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya yang diakui di laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in comprehensive income in respect of the defined benefit pension plan and other long-term employee benefits are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	66.560.394.916	61.339.392.194	Present value of defined benefit obligation
Nilai wajar aset program	(70.403.288.705)	(55.385.337.948)	Fair value of program assets
Liabilitas (aset) bersih	(3.842.893.789)	5.954.054.246	Net liability (assets)

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Liabilitas imbalan pasca kerja Perusahaan sehubungan dengan program pensiun yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Post-employment benefit of the Company relating to the pension plan that included in the consolidated statement of financial position is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Biaya jasa kini	7.121.330.932	6.362.516.610	Current service cost
Biaya jasa lalu	-	-	Past service cost
Beban bunga neto	4.371.604.931	3.941.276.559	Net interest cost
Penghasilan bunga	(3.947.264.683)	(3.307.789.981)	Interest income
Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi	7.545.671.180	6.996.003.188	Amount recognized in the income statements
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(973.120.437)	(2.374.545.531)	Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumptions
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman	(1.265.381.285)	(1.781.776.726)	Actuarial gains and losses arising from experience adjustments
Imbalan hasil atas aset program tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto	1.880.812.503	1.742.820.542	The yield of the plan assets does not include the amount included in the net interest
Setiap perubahan atas dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto	3.842.893.789	-	Any change to the impact of the asset ceiling, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset)
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografi	-	-	Actuarial gains and losses arising from changes in assumptions about demographics
Komponen imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	-	(2.413.501.715)	The defined benefit component recognized in other comprehensive income
Jumlah	3.485.204.570	4.582.501.473	Net liability

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of the employee benefits obligation is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal periode	61.339.392.194	60.321.056.194	The present value of the defined benefit obligation at the beginning of the period
Biaya jasa kini	7.121.330.932	6.362.516.610	Current service cost
Biaya jasa lalu	-	-	Past service cost
Biaya bunga	4.371.604.931	3.941.276.559	Interest cost
luran peserta program	995.516.989	903.126.391	Participant cost
Pembayaran manfaat	(5.028.948.408)	(6.032.261.303)	Payment of benefits
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(973.120.437)	(2.374.545.531)	Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumptions
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman	(1.265.381.285)	(1.781.776.726)	Actuarial gains and losses arising from experience adjustments
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografi	-	-	Actuarial gains and losses arising from changes in assumptions about demographics
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode	66.560.394.916	61.339.392.194	Present value of compensation obligation definitely at the end of the period

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Mutasi nilai wajar dari aset program adalah sebagai berikut:

Movements in the fair value of the plan assets were as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo nilai wajar aset program pada awal tahun	55.385.337.948	50.625.573.303	<i>The fair value of the plan assets at the beginning of the year</i>
Penghasilan bunga	3.947.264.683	3.307.789.981	<i>Interest income</i>
Iuran yang dibayarkan:			<i>Contributions paid:</i>
Iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja	16.984.929.996	8.323.930.118	<i>Contributions paid by the employer</i>
Iuran yang dibayarkan oleh peserta program	995.516.989	903.126.391	<i>Contributions paid by program participants</i>
Pembayaran manfaat	(5.028.948.408)	(6.032.261.303)	<i>Payment of benefits</i>
Imbalan hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto	(1.880.812.503)	(1.742.820.542)	<i>The yield of program assets does not include the amount entered in the net interest</i>
Nilai wajar aset program pada akhir periode	70.403.288.705	55.385.337.948	<i>Fair value of plan assets at the end of the period</i>

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined benefits obligation are discount rate, expected salary increase and mortality. The sensitivity analyses below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Tingkat diskonto	6,84% p.a	7,13% p.a	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	7%	8% p.a	<i>Rate of salary increase</i>
Tingkat kematian	TMI'19	TMI'19	<i>Death rate</i>
Tingkat cacat	0,1% p.a	0,1% p.a	<i>Defect rate</i>
	0,01% untuk karyawan sebelum usia 30 tahun dan akan menurun samapai 0% pada usia 45 tahun/ 0.01% for employee before the age of 30 years old and will decrease until 0% at the age of 45 years old	0,01% untuk karyawan sebelum usia 30 tahun dan akan menurun samapai 0% pada usia 45 tahun/ 0.01% for employee before the age of 30 years old and will decrease until 0% at the age of 45 years old	
Tingkat pengunduran diri	1% dari tingkat kelangsungan hidup/ 1% of survival rate	1% dari tingkat kelangsungan hidup/ 1% of survival rate	<i>Rate of resignation</i>
Tingkat pensiun dini	1% dari tingkat kelangsungan hidup/ 1% of survival rate	1% dari tingkat kelangsungan hidup/ 1% of survival rate	<i>Early retirement rate</i>

Mutasi nilai wajar dari aset program adalah sebagai berikut:

Movements in the fair value of the plan assets were as follows:

(Lanjutan/Continued)

	Dampak kenaikan/(penurunan) pada kewajiban imbalan pasti/ Increase/(decrease) impact on defined benefit obligation			
	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions	
2022				2022
Tingkat diskonto	1%	(8.971.331.081)	11.569.170.450	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji di masa mendatang	1%	4.157.436.206	(3.672.486.404)	Future salary increase
2023				2023
Tingkat diskonto	1%	56.346.071.464	79.839.730.448	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji di masa mendatang	1%	71.061.405.279	62.605.187.311	Future salary increase

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode projected unit credit pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefits obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis above, the present value of the post-employment benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the post-employment benefits obligation recognized in the consolidated statement of financial.

b. Imbalan pasca kerja lainnya

Grup menyelenggarakan program imbalan pasca kerja berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 35/2021. Tidak ada pendanaan yang dilakukan sehubungan dengan program imbalan pasca kerja tersebut.

Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebanyak 876 dan 669.

Liabilitas imbalan pasca kerja Perusahaan sehubungan dengan program pensiun yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	18.826.619.579	16.538.215.177	Present value of defined benefit obligation
Nilai wajar aset program	(1.817.846.855)	(1.754.737.692)	Fair value of program assets
Liabilitas bersih	17.008.772.724	14.783.477.485	Net liability

Beban imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya yang diakui di laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut:

b. Other post-employment benefit obligation

The Grup implements a post-employment benefits program based on Law No. 11 of 2020 regarding Cipta Kerja and Government Regulation No. 35/2021. No funding is made with relating to the employee benefit programs.

The total amount of employees eligible for the benefits until December 31, 2023, and 2022 are 876 and 669 respectively.

Post-employment benefit of the Company relating to the pension plan that included in the consolidated statement of financial position is as follows:

Post-employment benefit cost and other long-term employee benefit recognized in income statement is as follows:

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Biaya jasa kini	2.273.955.498	1.702.400.839	Current service cost
Biaya jasa lalu			Pass service cost
Kurtailmen	-	-	Curtailment
Masa kerja lebih dari satu tahun	-	-	Period more than 1 Year
Perubahan program	(173.301.357)	394.925.643	Program changes
Beban bunga neto	1.063.406.531	627.719.266	Net interest cost
Penghasilan bunga	(125.058.623)	(110.758.443)	Interest income
Pengukuran kembali manfaat jangka panjang lainnya	(3.549.556)	-	Remeasurement of other long term benefits
Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi	3.035.452.493	2.614.287.305	Amount recognized in the income statements
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(1.280.092.737)	1.635.899.300	Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumptions
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman	7.402.127.091	9.060.958.157	Actuarial gains and losses arising from experience adjustments
Imbalan hasil atas aset program tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto	61.949.460	51.173.623	The yield of the plan assets does not include the amount included in the net interest
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografi	-	-	Actuarial gains and losses arising from changes in assumptions about demographics
Komponen imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	6.183.983.814	10.748.031.080	The defined benefit component recognized in other comprehensive income
Jumlah	9.219.436.307	13.362.318.385	Net liability

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of the employee benefits obligation were as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal periode	16.538.215.267	13.256.351.560	The present value of the defined benefit obligation at the beginning of the period
Penyesuaian implementasi standar baru	-	(337.626.654)	
Biaya jasa kini	2.273.955.498	1.702.400.839	Current service cost
Biaya jasa lalu			Past service cost
Kurtailmen	-	-	Curtailment
Masa kerja lebih dari satu tahun	-	-	Period more than 1 Year
Perubahan program	(173.301.357)	394.925.643	Program changes
Biaya bunga	1.062.574.168	627.719.266	Interest cost
Pembayaran manfaat	(6.993.308.795)	(9.802.412.934)	Payment of benefits
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(1.275.903.082)	1.638.899.300	Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumptions
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman	7.394.387.880	9.060.958.157	Actuarial gains and losses arising from experience adjustments
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografi	-	-	Actuarial gains and losses arising from changes in assumptions about demographics
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode	18.826.619.579	16.538.215.177	Present value of compensation obligation definitely at the end of the period

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of the employee benefits obligation were as follows:

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo nilai wajar aset program pada awal tahun	1.754.737.692	1.695.152.872	<i>The fair value of the plan assets at the beginning of the year</i>
Penghasilan bunga	125.058.623	110.758.443	<i>Interest income</i>
luran yang dibayarkan:	-	-	<i>Contributions paid:</i>
luran yang dibayarkan oleh pemberi kerja	-	-	<i>Contributions paid by the employer</i>
Imbalan hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto	(61.949.460)	(51.173.623)	<i>The yield of program assets does not include the amount entered in the net interest</i>
Nilai wajar aset program pada akhir periode	1.817.846.855	1.754.737.692	<i>Fair value of plan assets at the end of the period</i>

Program imbalan pasca kerja memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

The program of post-employment benefit give an exposure of Company to actuarial risks such as investment risk, interest rate risk, longevity risk and salary risk.

Risiko investasi

Investment risk

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi pemerintah berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Saat ini program tersebut memiliki investasi yang relatif seimbang pada efek ekuitas, deposito dan emas.

The present value of the defined benefit plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality government bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently the plan has a relatively balanced investment in equity securities, time deposit and gold.

Karena sifat jangka panjang dari liabilitas program, dewan dana pensiun perlu menetapkan bahwa bagian wajar dari aset program harus diinvestasikan pada efek ekuitas dan real estat untuk meningkatkan imbal hasil yang dihasilkan oleh dana.

Due to the long-term nature of the plan liabilities, the board of the pension fund considers it appropriate that a reasonable portion of the plan assets should be invested in equity securities and in real estate to Leverage the return generated by the fund.

Risiko Tingkat Bunga

Interest Risk

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan di offset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Risiko Harapan Hidup

Longevity Risk

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants during their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Risiko Gaji

Salary Risk

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

The cost of providing post-employment benefits is calculated by independent actuary, Actuarial Consulting Office Yusi dan Rekan. The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Tingkat diskonto	6,84% p.a	7,13% p.a	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	6,37% - 7,10% p.a	5,52% - 7,43% p.a	<i>Rate of salary increase</i>
Tingkat kematian	TMI'19	TMI'19	<i>Death rate</i>
Tingkat cacat	0,1% p.a 0,01% untuk karyawan sebelum usia 30 tahun dan akan menurun samapai 0% pada usia 45 tahun/ 0.01% for employee before the age of 30 years old and will decrease until 0% at the age of 45 years old	0,1% p.a 0,01% untuk karyawan sebelum usia 30 tahun dan akan menurun samapai 0% pada usia 45 tahun/ 0.01% for employee before the age of 30 years old and will decrease until 0% at the age of 45 years old	<i>Defect rate</i>
Tingkat pengunduran diri	1% dari tingkat kelangsungan hidup/ 1% of survival rate	1% dari tingkat kelangsungan hidup/ 1% of survival rate	<i>Rate of resignation</i>
Tingkat pensiun dini	1% of survival rate	1% of survival rate	<i>Early retirement rate</i>

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined benefits obligation are discount rate, expected salary increase and mortality. The sensitivity analyses below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasca kerja untuk perubahan asumsi aktuarial pokok pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

The sensitivity of the post-employment benefit to changes in the principal actuarial assumptions as at December 31, 2023 and 2022 is as follows:

	Dampak kenaikan/(penurunan) pada kewajiban imbalan pasti/ Increase/(decrease) impact on defined benefit obligation			
	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions	
2022				2022
Tingkat diskonto	1%	(8.971.331.081)	11.569.170.450	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji di masa mendatang	1%	4.157.436.206	(3.672.486.404)	<i>Future salary increase</i>
2023				2023
Tingkat diskonto	1%	20.559.032.910	17.275.638.076	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji di masa mendatang	1%	19.991.645.346	17.805.810.952	<i>Future salary increase</i>

(Lanjutan/Continued)

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefits obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefits obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

31. CADANGAN PEMELIHARAAN

Merupakan cadangan pemeliharaan dan rekondisi aset pembangkit listrik pada PLTM Padang Guci 1, PLTM Padang Guci 2, PLTM Maiting Hulu, PLTS Gorontalo, dan PLTM Sako.

31. MAINTENANCE RESERVE

Represents a reserve for maintenance and recondition of power plant assets at PLTM Padang Guci 1, PLTM Padang Guci 2, PLTM Maiting Hulu, PLTS Gorontalo, dan PLTM Sako.

32. MODAL SAHAM

Berdasarkan akta Notaris No. 15 tanggal 12 Agustus 2008 Tjipto Pranowo, S.H., di Jakarta, modal dasar ditetapkan sebesar Rp40.000.000.000 terbagi atas 40.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 10.000 saham atau sebesar Rp10.000.000.000.

Berdasarkan akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Brantas Abipraya (Persero) yang dibuat di hadapan Notaris Retno Santi Prasetyati, S.H., di Jakarta No. 32 tanggal 15 Agustus 2012, menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula Rp40.000.000.000 menjadi Rp600.000.000.000, menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 151.555 saham masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 atau seluruhnya seharga Rp151.555.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia dan untuk memenuhi pengeluaran/penempatan saham tersebut sebesar Rp151.554.480.000 berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Brantas Abipraya (Persero) dan sebesar Rp520.000 berasal dari kapitalisasi cadangan Perusahaan. Modal saham Perusahaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

32. CAPITAL STOCK

According to Notarial deed No. 15 dated August 12, 2008 of Tjipto Pranowo, S.H., in Jakarta, the Authorized capital is set at Rp40,000,000,000 divided into 40,000 shares, each with nominal value of Rp1,000,000. The authorized capital has been subscribed and fully paid by the Republic of Indonesia as many as 10,000 shares or Rp10,000,000,000.

According to Deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Company of PT Brantas Abipraya (Persero) of Notary Retno Santi Prasetyati, S.H., in Jakarta No. 32 dated August 15, 2012, approved the increase in authorized capital from Rp40,000,000,000 to Rp600,000,000,000 approved the expenditure/ shares placement that are still in the deposits (treasury) amounted to 151,555 (one hundred and fifty one thousand five hundred and fifty five) shares with a nominal value of Rp1,000,000 or entirely worth of Rp151,555,000,000 which is entirely taken by the Republic of Indonesia and to meet expenditure/ share placement amounted to Rp151,554,480,000, derived from the transfer of state property on the Ministry of Civil Works as stated in the Indonesian Government Regulation Nomor 63 of 2010 on the Addition of the Share Investment of the Republic of Indonesia to the Capital Stock of the Company PT Brantas Abipraya (Persero) and amounted to Rp520,000 derived from the capitalization reserve of the Company. Capital stock of the Company as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Modal dasar: 600.000 saham nilai nominal @ Rp1.000.000	600.000.000.000	600.000.000.000	Authorized capital: 600,000 shares nominal value @ Rp1,000,000,000
Modal dalam portepel	(438.445.000.000)	(438.445.000.000)	Shares in treasury
Modal ditempatkan dan disetor	161.555.000.000	161.555.000.000	Subscribed and paid capitals

33. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

33. NON CONTROLLING INTEREST

	<u>31 Desember/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>	
Saldo awal	30.467.225.854	29.276.743.798	Beginning balance
Laba bersih tahun berjalan	1.414.930.739	1.179.867.918	Profit for the year
Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan	6.634.245	(17.984.326)	Other comprehensive income for the year
Perubahan ekuitas pada entitas anak	(400.000.000)	28.598.464	Changes in equity of subsidiary
Dividen kepentingan non pengendali	(614.510.375)	-	Non controlling interest dividends
Jumlah	30.874.280.463	30.467.225.854	Total

Ringkasan informasi keuangan pada masing-masing entitas anak Perusahaan yang memiliki kepentingan nonpengendali yang material ditetapkan di bawah ini. Ringkasan informasi keuangan di bawah ini merupakan jumlah sebelum eliminasi intra Perusahaan.

Summarized financial information in respect of each of the Company's subsidiary that has material non-controlling interests is set out below. The summarized financial information below represents amounts before intra the Company eliminations.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Aset lancar	417.018.730.622	405.558.432.752	Current assets
Aset tidak lancar	1.651.138.434.225	1.619.152.502.144	Non-current assets
Liabilitas jangka pendek	441.293.769.669	637.098.142.044	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	673.412.346.476	471.761.549.432	Non-current liabilities
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pendapatan	253.829.009.468	203.041.196.986	Revenues
Laba tahun berjalan	21.678.846.919	10.778.045.424	Profit of the year
Laba (rugi) komprehensif yang diatribusikan kepada			Comprehensive Profit (loss) attributable to
Pemilik entitas induk	20.046.682.146	9.604.689.160	Owners of parent entity
Keuntungan nonpengendali	1.340.633.513	1.173.356.264	Non-controlling interest
Jumlah	21.387.315.659	10.778.045.424	Total

34. PENDAPATAN USAHA

34. REVENUES

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Jasa konstruksi	4.503.895.858.163	3.665.184.585.605	Construction services revenue
Produk beton	125.203.206.674	37.300.503.511	Concrete product revenue
Jasa peralatan	98.504.779.387	145.241.438.696	Equipment services
Pendapatan atas jasa konsultan Properti dan realti	10.710.218.194	-	Revenue from consulting services
Pendapatan keuangan atas jasa konsesi	10.389.008.685	26.257.884.922	Property and realty
Pendapatan konstruksi atas jasa konsesi	116.288.743.516	89.493.090.763	Financial revenue from concession project
Pendapatan konstruksi atas jasa konsesi	-	49.068.861.945	Construction revenue from concession project
Jumlah	4.864.991.814.619	4.012.546.365.442	Total

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
<u>Jasa konstruksi</u>			<u>Construction services</u>
<u>Pihak berelasi:</u>			<u>Related parties:</u>
PT Citra Karya Jabar Tol	656.668.792.417	984.161.478.160	PT Citra Karya Jabar Tol
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat	484.715.695.910	-	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SNVT Pembangunan Bendungan BWS Bali - Penida	329.772.776.275	-	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SNVT Pembangunan Bendungan BWS Bali - Penida
PPK Pengembangan Kawasan Permukiman	315.299.277.831	-	PPK Pengembangan Kawasan Permukiman
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, SNVT Pembangunan Bendungan II BWS Nusa Tenggara II	215.176.557.381	45.529.399.729	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, SNVT Pembangunan Bendungan II BWS Nusa Tenggara II
Universitas Riau	177.678.274.813	-	Universitas Riau
Pejabat Pembuat Komite (PPK) Irigasi dan Rawa II, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Citarum	177.573.074.874	-	Pejabat Pembuat Komite (PPK) Irigasi dan Rawa II, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Citarum
PPK Air Tanah dan Air Baku II SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Kalimantan IV Provinsi Kalimantan Timur	177.137.744.778	-	PPK Air Tanah dan Air Baku II SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Kalimantan IV Provinsi Kalimantan Timur
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Satuan Kerja O & P Sumber Daya Air Nusa Tenggara I	170.191.271.000	28.000.470.000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Satuan Kerja O & P Sumber Daya Air Nusa Tenggara I
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta dan Jawa Barat	131.675.316.034	-	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta dan Jawa Barat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII SNVT PJPA Sumatera VIII Provinsi Sumatera Selatan	129.337.716.027	-	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII SNVT PJPA Sumatera VIII Provinsi Sumatera Selatan
PPK II Politeknik Maritim Negeri Indonesia	114.918.290.000	-	PPK II Politeknik Maritim Negeri Indonesia
Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Barat	112.993.027.650	-	Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Barat
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	98.324.799.445	-	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas	93.059.923.633	-	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Perumahan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II	86.982.319.422	-	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Perumahan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II
PPK Air Minum, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Jawa Tengah, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Directorate General of Human Settlement, Ministry of Public Works and Housing	80.768.661.019	-	PPK Air Minum, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Jawa Tengah, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Directorate General of Human Settlement, Ministry of Public Work and Housing
PPK Bendungan SNVT Pembangunan Bendungan BWS Kalimantan IV	64.479.779.398	-	PPK Bendungan SNVT Pembangunan Bendungan BWS Kalimantan IV
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan	63.963.901.658	-	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan
Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara	59.485.605.510	-	Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Perumahan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur	56.872.834.135	5.344.051.997	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Perumahan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara II, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur
PPK Sungai dan Pantai I SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Serayu Opak	56.261.995.006	-	PPK Sungai dan Pantai I SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Serayu Opak
Pejabat Pembuat Komite (PPK) Irigasi dan Rawa I, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Citarum	53.885.802.787	-	Pejabat Pembuat Komite (PPK) Irigasi dan Rawa I, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Citarum
PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat	52.266.078.941	-	PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat
PPK 5.3 Provinsi Jawa Barat	51.324.325.550	-	PPK 5.3 Provinsi Jawa Barat
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Kerja Cipta Karya Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawesi Utara	36.468.244.845	-	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Kerja Cipta Karya Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawesi Utara
Institut Teknologi Sumatera	35.728.634.691	64.270.155.171	Institut Teknologi Sumatera
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur	34.418.792.095	-	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur
PT Perumnas (Persero)	32.729.972.601	55.981.089.436	PT Perumnas (Persero)
PT Pertamina Port and Logistics SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Cimanuk Cisanggarung Ditjen	25.816.265.000	-	PT Pertamina Port and Logistics SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Cimanuk Cisanggarung Ditjen
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten	25.255.030.255	-	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten
Bank Indonesia	28.113.100.619	38.110.278.520	Bank Indonesia
	26.103.171.678	25.819.233.173	

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II SNVT PJPA Cimanuk -	18.979.405.406	-	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II SNVT PJPA Cimanuk -
Cisanggarung Pejabat Pembuat Komite (PKK) Irigasi dan Rawa IV	18.880.589.353	-	Cisanggarung Pejabat Pembuat Komite (PKK) Irigasi dan Rawa IV
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera I SNVT Pelaksanaan Jaringan			Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera I SNVT Pelaksanaan Jaringan
Pemanfaatan Air Sumatera I	18.115.922.876	-	Pemanfaatan Air Sumatera I
Patra Jasa	17.933.963.012	-	Patra Jasa
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana	12.240.032.993	24.590.581.539	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi I	11.645.543.243	-	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sulawesi I
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PPK Danau, Situ, dan Embung SNVT Pembangunan Bendungan BWS Kalimantan IV	9.956.485.944	47.566.944.978	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) PPK Danau, Situ, dan Embung SNVT Pembangunan Bendungan BWS Kalimantan IV
7.887.170.968	-		
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Bali	6.933.076.375	58.984.258.228	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Bali
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	6.600.000.244	119.870.099.717	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Pompengan - Jenebarang, Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Pompengan-Jenebrang Provinsi Sulawesi Selatan	5.708.137.884	12.382.270.000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Pompengan - Jenebarang, Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Pompengan-Jenebrang Provinsi Sulawesi Selatan
PT Bank Mandiri (Persero) Perusahaan Umum Bulog	4.992.983.517	-	PT Bank Mandiri (Persero) Perusahaan Umum Bulog
4.700.823.878	60.761.757.162		
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Citarum	4.612.773.095	43.483.559.905	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Citarum
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali, di Provinsi Jawa Timur	4.234.424.489	-	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali, di Provinsi Jawa Timur
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Timur	4.038.788.002	67.391.271.473	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Timur
PT Trans Marga Jateng	2.585.253.834	71.224.334.977	PT Trans Marga Jateng

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Kementerian PUPR, Dirjen Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah	2.393.945.946	1.312.854.215	Kementerian PUPR, Dirjen Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah
PT Hutama Karya (Persero)	2.218.361.949	25.953.695.484	PT Hutama Karya (Persero)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	377.526.122.129	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PT Jalintim Adhi Abipraya	-	141.540.095.983	PT Jalintim Adhi Abipraya
SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Serayu Opak	-	110.365.875.155	SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Serayu Opak
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	105.093.324.651	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	86.952.950.853	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	77.731.460.418	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara	-	69.237.772.549	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Satker Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	-	64.401.904.996	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Satker Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Bengawan Solo
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	-	64.047.506.337	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
Kementerian PUPR Dirjen SDA,SNVT Serayu Opak	-	58.451.330.264	Kementerian PUPR Dirjen SDA,SNVT Serayu Opak
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	55.802.284.042	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kementerian PUPR, Dirjen Perumahan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II	-	55.336.422.520	Kementerian PUPR, Dirjen Perumahan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	54.304.908.739	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian PUPR, Dirjen SDA, BWS Sulawesi III, Satker Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Palu-Lariang	-	54.183.469.057	Kementerian PUPR, Dirjen SDA, BWS Sulawesi III, Satker Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS. Palu-Lariang
Kementerian PUPR, Dirjen SDA, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cimanuk - Cisanggarung	-	44.472.604.136	Kementerian PUPR, Dirjen SDA, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cimanuk - Cisanggarung
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Perumahan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah	-	42.045.697.078	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Perumahan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Bina Konstruksi, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur	-	41.353.578.378	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Bina Konstruksi, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	40.787.021.901	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi	-	40.384.492.185	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	39.818.010.822	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PT Trans Marga Jateng	-	35.012.546.456	PT Trans Marga Jateng

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan	-	25.785.385.257	Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
PT Citra Karya Jabar Tol	-	22.695.819.907	PT Citra Karya Jabar Tol
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat, Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Barat	-	21.748.828.742	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat, Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Barat
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR	-	19.990.327.763	Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Bali - Penida, Satuan Kerja Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Bali – Penida	-	15.865.539.640	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Bali - Penida, Satuan Kerja Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Bali – Penida
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	12.767.887.899	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian PUPR Dirjen SDA	-	12.827.907.044	Kementerian PUPR Dirjen SDA
BBWS Pompengan Jeneberang	-	11.770.465.357	BBWS Pompengan Jeneberang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, Satuan Kerja NVT Air Tanah Dan Air Baku Nusa Tenggara II Prov. NTT, Kegiatan Pendayagunaan Air	-	10.675.917.117	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, Satuan Kerja NVT Air Tanah Dan Air Baku Nusa Tenggara II Prov. NTT, Kegiatan Pendayagunaan Air
Kementerian PUPR, Dirjen SDA, SNVT Pembangunan Bendungan Balai Wilayah Sungai Bali – Penida	-	9.330.625.225	Kementerian PUPR, Dirjen SDA, SNVT Pembangunan Bendungan Balai Wilayah Sungai Bali – Penida
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Perumahan, Balai Pelaksana	-	7.825.125.835	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Perumahan, Balai Pelaksana
Kementerian PUPR Wilayah III NTT	-	5.792.527.830	Kementerian PUPR Wilayah III NTT
SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII	-	5.735.168.213	SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	-	4.323.509.009	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII
Direktorat Jenderal Cipta Karya Prov Jawa Barat	-	3.592.144.904	Direktorat Jenderal Cipta Karya Prov Jawa Barat
PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	-	3.053.543.825	PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wil I NTT	-	2.877.872.729	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wil I NTT
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Prov. Jawa Barat	-	2.008.291.304	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Prov. Jawa Barat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTT	-	1.842.000.000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTT
Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wil I Prov. Jawa Barat	-	1.444.042.977	Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wil I Prov. Jawa Barat
	-	1.141.717.499	

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	1.081.081.081	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000.000.000)	756.620.198	1.573.024.907	Others (each bellow Rp1,000,000,000)
Sub Jumlah	4.457.661.053.800	3.645.335.916.577	Sub Total
Pihak ketiga:			Third parties:
PT Wijaya Graha Prima	26.661.536.508	-	PT Wijaya Graha Prima
PT. Sejahtera Ekagraha	8.111.406.601	-	PT. Sejahtera Ekagraha
CV.Faathir Rizka	5.996.762.223	-	CV.Faathir Rizka
Abipraya – Duta – Rancang, KSO	-	2.293.121.509	Abipraya – Duta – Rancang, KSO
PT Anggaraksa Lokeswara	-	1.788.024.834	PT Anggaraksa Lokeswara
PT Indonic Tangerang Invesment	-	1.791.902.811	PT Indonic Tangerang Invesment
Pengurus Masjid Ikhtiar Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea	-	1.289.623.144	Pengurus Masjid Ikhtiar Perumahan Dosen Unhas Tamalanrea
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000.000.000)	5.465.099.031	12.685.996.730	Others (each bellow Rp1,000,000,000)
Sub Jumlah	46.234.804.363	19.848.669.028	Sub Total
Jumlah	4.503.895.858.163	3.665.184.585.605	Total

35. BEBAN POKOK PENDAPATAN

35. COST OF REVENUES

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Subkontraktor	2.118.924.237.924	1.461.597.322.331	Sub contractors
Bahan material	1.326.406.576.985	1.166.946.121.306	Raw material
Peralatan	403.740.515.778	400.466.941.306	Equipments
Upah langsung	116.235.557.271	129.590.619.086	Direct wages
Properti dan realti	24.192.152.099	24.356.526.625	Property dan realty
Persiapan dan penyelesaian proyek	124.661.225.621	83.713.454.768	Project preparation and settlement
Penyusutan (Catatan 20)	58.671.970.608	55.616.715.576	Depreciation (Note 20)
Beban konstruksi atas jasa konsesi	-	35.829.503.560	Construction cost on concession project
Beban umum proyek:			Project general expenses:
Pegawai	221.857.898.261	175.697.307.547	Employees
Umum dan administrasi	102.137.652.307	82.442.266.695	General and administrative
Kendaraan	19.398.104.547	14.887.516.529	Vehicle
Administrasi bank dan keuangan	9.957.461.631	6.434.206.496	Bank and financial administrative
Penjualan	2.993.346.406	2.982.503.860	Sales
Jumlah	4.529.176.699.438	3.640.561.005.685	Total

36. BAGIAN LABA (RUGI) VENTURA BERSAMA

36. SHARE OF PROFIT (LOSS) ON JOINT VENTURES

Perusahaan melakukan perjanjian ventura bersama dengan berbagai pihak sebagaimana tersebut pada masing-masing perjanjian, berupa penyerahan dana kepada pengelola sesuai kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Ventura Bersama menurut porsi yang ditetapkan. Pengelola proyek dipilih dari anggota yang berasal dari masing-masing pihak yang melakukan ventura bersama. Pengelola proyek ini melaksanakan kegiatan pembangunan proyek yang berasal dari pemberi kerja yang bertanggungjawab sepenuhnya seluruh kegiatan tersebut termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan proyek kepada seluruh pihak ventura bersama.

The Company make a joint venture agreements with various parties as specified at each agreement, in the form of funds transfer to the manager according to the specified portion determined in the Joint Venture Agreement. Project manager is appointed from among members of the joint venture parties. The project manager shall carry out activities of projects development trusted by the owner and shall be fully responsible for the entire activities, including responsibility for financial reporting of the project to the entire joint venture project members.

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Detail bagian laba (rugi) ventura bersama adalah sebagai berikut:

Details on share of profit (loss) on joint ventures are as follow:

	<u>2023</u>		<u>2022</u>
Jalan Tol IKN Segmen Karangjoang-KKT Kariangau	54.405.795.104	-	Jalan Tol IKN Segmen Karangjoang-KKT Kariangau
Jalan Kerja Kawasan Sub BWP 1.B dan 1.C	50.073.006.063	-	Jalan Kerja Kawasan Sub BWP 1.B dan 1.C
Jar. Perpipan Transmisi Air Minum SPAM Sepaku Paket-2	45.458.517.939	-	Jar. Perpipan Transmisi Air Minum SPAM Sepaku Paket-2
Proyek Pembangunan Bendungan Bulango Ulu Paket II (MYC)	41.539.225.812	32.653.004.751	Proyek Pembangunan Bendungan Bulango Ulu Paket II (MYC)
Pek.Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B; Rencana Outer Ring Road - Sp.3 ITCI	26.579.650.821	-	Pek.Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B; Rencana Outer Ring Road - Sp.3 ITCI
Tol Probowangi-Jawa Timur	23.264.746.199	-	Tol Probowangi-Jawa Timur
Proyek Pembangunan Bendungan Jragung Paket III	21.405.697.785	4.303.835.048	Proyek Pembangunan Bendungan Jragung Paket III
Proyek Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Rumah Susun ASN 4	19.441.361.337	-	Proyek Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Rumah Susun ASN 4
Tol Tempino Jambi	18.963.058.165	-	Tol Tempino Jambi
Pembangunan Pengaman Pantai di Pesisir Teluk Jakarta Tahap 6 Paket 2	18.057.507.825	-	Pembangunan Pengaman Pantai di Pesisir Teluk Jakarta Tahap 6 Paket 2
Pembangunan Jaringan Perpipaan Transmisi Air Minum SPAM Sepaku Paket 1	16.326.053.516	-	Pembangunan Jaringan Perpipaan Transmisi Air Minum SPAM Sepaku Paket 1
Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Paket 1 (MYC)	13.087.314.989	18.631.014.707	Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Paket 1 (MYC)
Proyek Penyelesaian Pembangunan Bendungan Keureuto (MYC)	13.006.337.370	12.468.313.004	Proyek Penyelesaian Pembangunan Bendungan Keureuto (MYC)
Proyek Pembangunan Bendungan Bagong Paket I Kab Trenggalek (MYC)	11.807.980.774	20.474.920.000	Proyek Pembangunan Bendungan Bagong Paket I Kab Trenggalek (MYC)
Proyek Pengendalian Banjir dan ROB Sungai Loji-Banger Paket II (KSO)	8.918.376.744	18.382.923.477	Proyek Pengendalian Banjir dan ROB Sungai Loji-Banger Paket II (KSO)
Pem. Bandara VVIP (Sisi Landasan Udara)	8.532.693.775	-	Pem. Bandara VVIP (Sisi Landasan Udara)
Paket Pekerjaan Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripiraja, dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP (IKN)	6.995.159.078	-	Paket Pekerjaan Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripiraja, dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP (IKN)
Proyek Daerah Irigasi Singa yang dibangun (Tahap II)	6.635.424.653	-	Proyek Daerah Irigasi Singa yang dibangun (Tahap II)
Proyek Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Kali Besar dan Sodetan/ Kanal Museum Bahari	6.574.014.931	15.348.300.516	Proyek Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Kali Besar dan Sodetan/ Kanal Museum Bahari
Proyek Pembangunan Bendungan Budong-Budong Kab Mamuju Tengah	5.814.755.695	5.814.755.695	Proyek Pembangunan Bendungan Budong-Budong Kab Mamuju Tengah
Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Paket 4 (MYC)	4.133.288.953	29.025.940.849	Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Paket 4 (MYC)
Proyek Rehabilitasi, Peningkatan dan Modernisasi Jaringan Irigasi SS. Macan CS	3.198.780.242	4.321.626.225	Proyek Rehabilitasi, Peningkatan dan Modernisasi Jaringan Irigasi SS. Macan CS
Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 1 KIPP IKN	3.191.744.466	-	Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 1 KIPP IKN
Proyek Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Mendukung Rumah Khusus Bagi	2.732.968.052	-	Proyek Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Mendukung Rumah Khusus Bagi

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Warga Eks Timor Timur			Warga Eks Timor Timur
Preservasi Jalan Pejagan-Prupuk-Tegal-Bts. Banyumas/Brebes	2.345.464.216	3.142.458.209	Preservasi Jalan Pejagan-Prupuk-Tegal-Bts. Banyumas/Brebes
Proyek Penutupan Terowong			Proyek Penutupan Terowong
Pengelak Bendungan Kuningan	2.241.450.012	-	Pengelak Bendungan Kuningan
IPA SPAM Kaltim	2.069.033.078	-	IPA SPAM Kaltim
Proyek Pembangunan Pengendalian Banjir DAS Sanggai 1A Lanjutan (KIPP) (IKN)	1.470.063.644	-	Proyek Pembangunan Pengendalian Banjir DAS Sanggai 1A Lanjutan (KIPP) (IKN)
Kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Terdampak Bencana Gempa di Kabupaten Mamuju dan Majene	1.188.941.783	-	Kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Terdampak Bencana Gempa di Kabupaten Mamuju dan Majene
Proyek Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jasa Rancang dan Bangun (Design&Build) Penyediaan Barang Pengganti Barang Negara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahap II Tahun 2023	1.082.655.974	-	Proyek Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jasa Rancang dan Bangun (Design&Build) Penyediaan Barang Pengganti Barang Negara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahap II Tahun 2023
Penanganan Pelebaran & Perb. Geometrik Jl. Soreang-Rancabali-Cidaun	978.604.820	-	Penanganan Pelebaran & Perb. Geometrik Jl. Soreang-Rancabali-Cidaun
Proyek Pengaman Muara Sungai Bogowonto Sisi Barat (KSN YIA)	889.198.770	7.948.310.030	Proyek Pengaman Muara Sungai Bogowonto Sisi Barat (KSN YIA)
Proyek Patimbangan Port (II) Package 5 : Car Terminal Construction	631.718.508	-	Proyek Patimbangan Port (II) Package 5 : Car Terminal Construction
Lingkar Jalan Akses Pelabuhan Multipurpose Peti Kemas (Wae Kelambu)	605.870.922	-15.435.420.548	Lingkar Jalan Akses Pelabuhan Multipurpose Peti Kemas (Wae Kelambu)
Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang	547.180.406	-	Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang
Penanganan Banjir Sungai Sepaku Kec. Sepaku (IKN)	540.108.176	-	Penanganan Banjir Sungai Sepaku Kec. Sepaku (IKN)
Proyek Pembangunan Bendungan Cijurey Paket 1	113.524.302	-	Proyek Pembangunan Bendungan Cijurey Paket 1
Proyek Pekerjaan Pembangunan Bendungan Sidan di Kabupaten Badung, Bangli dan Gianyar Provinsi Bali	(576,17)	-	Proyek Pekerjaan Pembangunan Bendungan Sidan di Kabupaten Badung, Bangli dan Gianyar Provinsi Bali
Proyek Pekerjaan LOT-5 Jerukwudel - Baran - Duwet, Provinsi D.I. Yogyakarta	(500.000)	-	Proyek Pekerjaan LOT-5 Jerukwudel - Baran - Duwet, Provinsi D.I. Yogyakarta
Proyek Pembangunan Baru Jaringan Perpipaan Distribusi Utama dan Reservoir Offtake SPAM Regional Mebidang	(3.750.000)	4.203.582.357	Proyek Pembangunan Baru Jaringan Perpipaan Distribusi Utama dan Reservoir Offtake SPAM Regional Mebidang
Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi Paket 2	(4.880.180)	-	Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi Paket 2
Proyek Pembangunan Bendungan Keureuto Kabupaten Aceh Utara Paket - 1	(9.251.299)	(63.169.300)	Proyek Pembangunan Bendungan Keureuto Kabupaten Aceh Utara Paket - 1
Preservasi Pelebaran Jalan Menuju Standar Dan Preservasi Jembatan Sekatak Buji – Malinau	(11.959.694)	-	Preservasi Pelebaran Jalan Menuju Standar Dan Preservasi Jembatan Sekatak Buji – Malinau
Proyek Peningkatan Jalan Selacau-Cililin-Cisokan dan Pembangunan Jembatan Tajim	(341.180.000)	1.034.820.327	Proyek Peningkatan Jalan Selacau-Cililin-Cisokan dan Pembangunan Jembatan Tajim
Proyek Pembangunan Bendungan Ciawi (Cipayung) Lanjutan Tahap II Preservasi Jalan Bts. Bulungan - Tj. Selor	(706.400.324)	22.940.469.864	Proyek Pembangunan Bendungan Ciawi (Cipayung) Lanjutan Tahap II Preservasi Jalan Bts. Bulungan - Tj. Selor
Proyek Construction Of Wastewater Treatment Plant In Jambi - WWTP	(1.564.937.592)	(14.286.100.611)	Proyek Construction Of Wastewater Treatment Plant In Jambi - WWTP

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
B1 Jambi			B1 Jambi
Pembangunan Waduk Brigif dan Waduk Lebak Bulus Beserta Kelengkapannya	(1.844.763.174)	16.927.399.000	Pembangunan Waduk Brigif dan Waduk Lebak Bulus Beserta Kelengkapannya
Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 7	(2.286.031.149)	1.350.608.754	Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 7
Proyek Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi Kabupaten Penajam Paser Utara	(3.932.780.000)	32.677.788.388	Proyek Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi Kabupaten Penajam Paser Utara
Preservasi Jalan Bts. Serawak-Aruk-Sp. Tanjung-Galing	(4.615.822.614)	(6.641.453.257)	Preservasi Jalan Bts. Serawak-Aruk-Sp. Tanjung-Galing
Pembangunan JDU Spam Regional Mebidang-Sumut	(4.652.859.116)	5.467.711.160	Pembangunan JDU Spam Regional Mebidang-Sumut
Preservasi Jalan & Jembatan Kertosono-Jombang-Mojokerto-Gempol	(4.975.919.135)	(10.138.261.848)	Preservasi Jalan & Jembatan Kertosono-Jombang-Mojokerto-Gempol
Preservasi Jalan Pamueu - Sp. Uning	(6.286.737.626)	(3.404.873.823)	Preservasi Jalan Pamueu - Sp. Uning
Proyek Pembangunan DI Irigasi Baliase Kanan 1 (Paket III)	(12.923.148.111)	-	Proyek Pembangunan DI Irigasi Baliase Kanan 1 (Paket III)
Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi DI Bintang Bano (Paket 4)	(18.536.168.022)	4.950.975.102	Proyek Pembangunan Jaringan Irigasi DI Bintang Bano (Paket 4)
Proyek Pekerjaan Jembatan Nanga Pinoh	(21.561.881.099)	21.577.579.308	Proyek Pekerjaan Jembatan Nanga Pinoh
Proyek Pembangunan Bendungan Beringin Sila Paket 1	(36.381.009.395)	(26.333.263.940)	Proyek Pembangunan Bendungan Beringin Sila Paket 1
Pembangunan Kampus UIN Raden Intan Lampung	-	2.382.796.728	Pembangunan Kampus UIN Raden Intan Lampung
Proyek Pembangunan Flyover Ganefo (Mranggen) Ruas Semarang - Godong	-	(5.253.608.668)	Proyek Pembangunan Flyover Ganefo (Mranggen) Ruas Semarang - Godong
Proyek Pembangunan Bendungan Semantok Paket I Rejoso Kabupaten Nganjuk Jawa Timur (MYC)	-	(68.316.380)	Proyek Pembangunan Bendungan Semantok Paket I Rejoso Kabupaten Nganjuk Jawa Timur (MYC)
Lain-lain (di bawah Rp1 Miliar)	(651.573.293)	3.900.668.959	Lain-lain (di bawah Rp1 Billion)
Jumlah	322.065.459.814	208.305.334.083	Total

37. BEBAN PENJUALAN DAN ADMINISTRASI DAN UMUM

37. SALES AND ADMINISTRATION AND GENERAL EXPENSES

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Penjualan	1.174.294.576	1.031.403.601	Sales
Umum dan Administrasi			General and Administration
Pegawai	180.181.100.899	138.922.039.389	Employee
Umum dan administrasi	43.906.818.202	45.017.388.738	General and administration
Perbaikan fasilitas	-	16.601.724.797	Facilities maintenance
Penyusutan dan amortisasi (Catatan 20 dan 21)	7.930.979.595	8.819.257.642	Depreciation and amortization (Notes 20 and 21)
Kendaraan	84.702.401	438.435.063	Vehicle
Administrasi bank dan keuangan	638.333.067	16.489.011	Bank and financial administration
Jumlah	232.741.934.164	209.815.334.640	Total

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

38. BEBAN KEUANGAN

Merupakan beban bunga atas kredit bank/non-bank, beban provisi, dan beban administrasi bank yang terkait dengan perolehan pinjaman selama periode berjalan setelah dikurangi biaya bunga yang secara langsung dapat diatribusikan dengan biaya perolehan suatu proyek tertentu yang memenuhi syarat.

38. FINANCIAL CHARGES

Represent interest expenses of bank loans/non-banks, provision, fees, and bank administrative expenses related to the acquisition of bank loans during the current period after deducting the interest cost which are directly attributable to the cost of qualifying project.

39. PENDAPATAN (BEBAN) LAINNYA - BERSIH

	2023
Pendapatan	
Penerimaan hibah	20.972.457.359
Laba nilai wajar atas aset alat <i>extracomptable</i>	20.301.000.000
Laba penjualan aset tetap	11.575.045.046
Klaim CAR	10.968.848.278
Jasa giro	7.872.995.452
Laba selisih kurs	4.764.359.176
Laba penilaian atas konversi piutang menjadi tanah dalam pengembangan	1.593.451.337
Laba atas akuisisi	-
Pemulihan penyisihan piutang	511.188.787
Lainnya	415.259.563
Sub Jumlah	78.974.604.998
Beban	
Penyisihan nilai piutang	(103.609.447.692)
Penurunan nilai wajar aset	(9.024.870.801)
Penurunan nilai wajar persediaan	(6.238.313.199)
Rugi selisih kurs	(3.562.603.749)
Denda	(1.826.693.901)
Penurunan nilai wajar persediaan real estate	-
Lainnya	(142.100.000)
Sub Jumlah	(124.404.029.342)
Jumlah	(45.429.424.344)

39. OTHER REVENUE (EXPENSE) - NET

	2022	
		Income
	-	Grant receipt
	-	Fair value gain on extracomptable equipment assets
	-	Profit on sale of fixed assets
	43.428.085.919	Insurance claim
	7.455.302.542	Interest income
	-	Foreign exchange gain
	-	Valuation gain on conversion of receivables into land under development
	1.419.233.335	Gain on acquisition
	458.973.705	Reversal of allowance of impairment
	8.089.029.765	Others
	60.850.625.266	Sub Total
		Expenses
	(21.205.087.418)	Allowance of receivables
	-	Assets fair value impairment
	-	inventory fair value impairment
	(13.226.699.243)	Foreign exchange loss
	(1.091.338.463)	Penalties
	-	Real estate inventory fair value impairment
	(30.539.865.097)	Others
	(81.170)	Sub Total
	(66.063.071.391)	Total
	(5.212.446.125)	

40. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat pihak berelasi:

- Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan adalah pemegang saham utama Perusahaan.
- Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan: Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Perusahaan.
- Entitas yang merupakan Perusahaan asosiasi dari Perusahaan.

40. NATURE AND TRANSACTION OF RELATED PARTIES

Nature of relationship:

- The Government of the Republic of Indonesia represented by Ministry of Finance, is the majority stockholder of the Company.
- All entities that are owned and controlled by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia including entities where the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia has significant influence: State owned Enterprise (SOE).
- Related parties which main shareholder is the same with Company.
- The entities which part of the investment in associates.

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

- e. Entitas yang merupakan ventura bersama dari Perusahaan.
f. Manajemen kunci yang meliputi anggota dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.
- e. *The entities which part of joint ventures.*
f. *Key management personnel included Commissioners and Directors of the Company.*

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat pihak berelasi/ The nature of relationship	Transaksi/ Transactions
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kepemilikan sama terkait/ <i>Common ownership</i>	Kas dan setara kas, utang bank/ <i>Cash and cash equivalents, bank loans</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Kepemilikan sama terkait/ <i>Common ownership</i>	Kas dan setara kas, utang bank/ <i>Cash and cash equivalents, bank loans</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kepemilikan sama terkait/ <i>Common ownership</i>	Kas dan setara kas, utang bank/ <i>Cash and cash equivalents, bank loans</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Kepemilikan sama terkait/ <i>Common ownership</i>	Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i>
PT BPD Nusa Tenggara Barat	Kepemilikan sama terkait/ <i>Common ownership</i>	Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Kepemilikan sama terkait/ <i>Common ownership</i>	Kas dan setara kas, utang bank/ <i>Cash and cash equivalents, bank loans</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	Kepemilikan sama terkait/ <i>Common ownership</i>	Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i>
PT Bank DKI	Kepemilikan sama terkait/ <i>Common ownership</i>	Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i>
PT Aneka Tambang Tbk.	Kepemilikan sama terkait/ <i>Common ownership</i>	Piutang usaha, tagihan bruto kepada pemberi kerja/ <i>Trade account receivable, gross amount due from costumers</i>
Pemda Kabupaten Tulang Bawang	Kepemilikan sama terkait/ <i>Common ownership</i>	Piutang usaha/ <i>Trade account receivable</i>
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Kepemilikan sama terkait/ <i>Common ownership</i>	Piutang usaha, Piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja/ <i>Trade account receivable, retention receivables, gross amount due from costumers</i>
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Kepemilikan sama terkait/ <i>Common ownership</i>	Piutang usaha, Piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja/ <i>Trade account receivable, retention receivables, gross amount due from costumers</i>
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	Kepemilikan sama terkait/ <i>Common ownership</i>	Piutang usaha, Piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja/ <i>Trade account receivable, retention receivables, gross amount due from costumers</i>

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat pihak berelasi/ The nature of relationship	Transaksi/ Transactions
Pemda Kabupaten Lombok Tengah	Kepemilikan sama terkait/ <i>Common ownership</i>	Piutang retensi/ <i>Retention receivable</i>
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Kepemilikan sama terkait/ <i>Common ownership</i>	Piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja/ <i>Trade account receivable, retention receivables, gross amount due from costumers</i>
PT Jalintim Adhi Abipraya	Entitas asosiasi/ <i>Associate entity</i>	Tagihan bruto kepada pemberi kerja, piutang lain-lain, investasi pada entitas asosiasi, utang lain-lain/ <i>Gross amount due from costumer, other receivables, investment in associates, others payables</i>
Perum BULOG	Kepemilikan sama terkait/ <i>Common ownership</i>	Tagihan bruto kepada pemberi kerja/ <i>Gross amount due from costumer</i>
Otoritas Jasa Keuangan	Kepemilikan sama terkait/ <i>Common ownership</i>	Tagihan bruto kepada pemberi kerja/ <i>Gross amount due from costumer</i>
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Kepemilikan sama terkait/ <i>Common ownership</i>	Tagihan bruto kepada pemberi kerja/ <i>Gross amount due from costumer</i>
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Kepemilikan sama terkait/ <i>Common ownership</i>	Tagihan bruto kepada pemberi kerja/ <i>Gross amount due from costumer</i>
PT Rajawali Liki Energi	Entitas asosiasi/ <i>Associate entity</i>	Investasi pada entitas asosiasi, utang usaha, utang lain-lain/ <i>Investment in associates, account payables, others payables</i>
PT Buana Enjiniring Konsultan	Entitas asosiasi/ <i>Associate entity</i>	Investasi pada entitas asosiasi, utang usaha/ <i>Investment in associates, account payables</i>
PT Citra Karya Jabar Tol	Entitas asosiasi/ <i>Associate entity</i>	Investasi pada entitas asosiasi, utang lain-lain/ <i>Investment in associates, others payables</i>
PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi	Kepemilikan sama terkait/ <i>Common ownership</i>	Investasi jangka panjang lainnya/ <i>Other longterm investments</i>
PT Jasamarga Jogja Bawean	Kepemilikan sama terkait/ <i>Common ownership</i>	Investasi jangka panjang lainnya/ <i>Other longterm investments</i>
Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Kepemilikan sama terkait/ <i>Common ownership</i>	Piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja/ <i>Retention receivable, gross amount due from costumer</i>
Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Dinas PU dan	Kepemilikan sama terkait/ <i>Common ownership</i>	Piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja/

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat pihak berelasi/ <i>The nature of relationship</i>	Transaksi/ <i>Transactions</i>			
	Penataan Ruang Perumahan	<i>Retention receivable, gross amount due from customer</i>			
Sifat pihak berelasi:		<i>Nature of relationship:</i>			
	2023	2022			
	Jumlah/ Amount	Jumlah/ Amount			
	Persentase terhadap jumlah aset atau liabilitas/ Percentage to total	Persentase terhadap jumlah aset atau liabilitas/ Percentage to total			
Aset		Assets			
Kas dan setara kas	1.076.604.966.862	11,45%	1.192.641.398.189	14,96%	<i>Cash and cash equivalents</i>
Piutang usaha – bersih	1.577.744.854.361	17,00%	577.943.043.012	7,25%	<i>Trade account receivables - net</i>
Piutang retensi – bersih	251.424.097.675	2,71%	138.792.417.083	1,74%	<i>Retention receivables – net</i>
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	321.563.045.906	3,47%	757.933.486.559	9,51%	<i>Gross amount due from costumers - net</i>
Pekerjaan dalam proses	32.247.235.198	0,35%	65.020.620.444	0,82%	<i>Work on progress</i>
Piutang lain-lain – bersih	13.807.242.463	0,15%	2.027.566.728	0,03%	<i>Other receivables – net</i>
Liabilitas					Liabilities
Utang usaha	1.063.796.274.047	14,91%	991.392.365.936	16,21%	<i>Account payables</i>
Utang lain-lain	11.038.447.871	0,15%	10.494.552.280	0,17%	<i>Others payables</i>
Pinjaman jangka panjang	1.365.740.754.388	18,81%	1.582.654.270.492	25,87%	<i>Long term loans</i>

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, yang meliputi antara lain:

In the normal course of business, the Company entered into certain transactions with related parties, including the following:

	2023	2022				
Catatan/ Notes	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah pendapatan usaha/ Percentage to revenues/	Jumlah/ Amount			
			Persentase terhadap jumlah pendapatan usaha/ Percentage to revenues/			
Pendapatan usaha	34	4.457.661.053.800	91,63%	3.589.533.632.535	89,46%	Revenues

41. AKUISISI ENTITAS ANAK KEPEMILIKAN TIDAK LANGSUNG

PT Guna Rogate Indah (GRI)

Pada tanggal 30 Oktober 2019, PT Brantas Energi mengakuisisi 89,29% saham GRI dengan nilai perolehan sebesar Rp2.800.000.000 milik pihak ketiga. Entitas anak mencatat aset dan liabilitas PT Guna Rogate Indah dengan menggunakan nilai wajar aset bersih.

Tidak terdapat selisih antara aset bersih yang diakuisisi berdasarkan nilai wajar aset bersih dengan biaya perolehan.

41. INDIRECT OWNERSHIP SUBSIDIARIES ACQUISITION

PT Guna Rogate Indah (GRI)

On October 30, 2019, PT Brantas Energi acquired 89.29% ownership in GRI through the acquisition cost of Rp2,800,000,000 shares from third party. The Subsidiary recognised the assets and liabilities of PT Guna Rogate Indah at fair value.

There is no difference between fair value of net assets of the acquired assets and the acquisition cost.

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

	<u>2019</u>	
Aset		Assets
Kas dan setara kas	5.976.000	Cash and cash equivalents
Piutang	2.400.000.000	Account receivables
Aset lainnya	394.024.000	Other assets
Jumlah Aset	2.800.000.000	Total assets
Liabilitas		Liabilities
Liabilitas lancar	-	Current liabilities
Jumlah Liabilitas	-	Total Liabilities
Aset bersih	2.800.000.000	Net assets

PT Graha Investama Bersama (GIB)

Pada tanggal 17 Juni 2019, BE mengakuisisi 89,92% saham PT Graha Investama Bersama melalui konversi utang GIB kepada BE menjadi modal saham sebesar Rp148.938.619.300. BE mengakui/ mencatat aset dan liabilitas GIB dengan menggunakan nilai wajar aset bersih pada tanggal 30 Juni 2019.

Tujuan akuisisi ini adalah untuk memperluas cakupan bisnis grup dalam bidang property.

Nilai wajar sementara dari aset dan liabilitas teridentifikasi GIB pada tanggal akuisisi adalah:

PT Graha Investama Bersama (GIB)

On June 17, 2019, BE acquired 89.92% ownership in PT Graha Investama Bersama through conversion debt GIB to BE into a share capital amounting to Rp148,938,619,300. BE recognized the assets and liabilities of GIB at fair values as of June 30, 2019.

The objective of the acquisition is to expand the Group's scope of business in the properties.

The provisional fair values of the identifiable assets and liabilities of GIB as at the date of acquisition were:

	<u>Nilai wajar/ Fair value</u>	
Aset		Assets
Kas dan setara kas	1.296.337.941	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	31.095.525.473	Account receivables
Persediaan	293.606.072.543	Inventories
Biaya dibayar dimuka	5.107.501.222	Prepaid expenses
Uang muka	84.681.800	Advances
Rekening dibatasi penggunaannya	236.106.603	Restricted account
Aset tetap	747.153.475	Fixed assets
Jumlah aset	332.173.379.057	Total assets
	<u>Nilai wajar/ Fair value</u>	
Liabilitas		Liabilities
Utang usaha - pihak ketiga	118.881.832.198	Account payables - third parties
Utang lain-lain - pihak berelasi	821.547.022	Other account payables - related parties
Utang pajak	645.295.072	Taxes payables
Utang sewa pembiayaan - bagian jatuh tempo dalam satu tahun	83.602.000	Lease payable - current portion
Uang muka penjualan	5.957.891.510	Sales advance
Liabilitas imbalan pasca kerja	983.211.435	Post-employment benefit liability
Jumlah Liabilitas	127.373.379.237	Total Liabilities
Saldo laba	153.169.061.478	Retained earning
Nilai wajar aset neto teridentifikasi	51.630.938.342	Fair value of identified net assets
Bagian kepentingan non pengendali	1.047.205.021	Part of non-controlling interests
Penyertaan PT Brantas Energi	143.304.932.309	Investment of PT Brantas Energi
Laba atas akuisisi entitas anak	10.386.074.198	Profit of acquisition of subsidiary
Imbalan pembelian yang dialihkan	206.369.149.871	Purchase consideration transferred

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

	<u>Nilai wajar/ Fair value</u>	
Dikurangi kas yang diperoleh dari entitas anak yang di akuisisi	(1.296.337.941)	<i>Net cash of the acquired subsidiary</i>
Akuisisi entitas anak setelah dikurangi kas yang diperoleh	205.072.811.929	<i>Acquisition of a subsidiary net cash acquired</i>

Selisih antara nilai wajar penilaian KJPP Asrori dan Rekan Dengan nilai buku sebesar Rp10.386.074.198 dicatat sebagai pendapatan atas akuisisi dikurangi dengan kepentingan nonpengendali sebesar Rp1.047.205.021.

The difference between fair value KJPP Asrori and Rekan with book value amounting to Rp10,386,074,198 is recognised as profit of acquisition deducted by non-controlling interest amounting to Rp1,047,205,021.

42. INFORMASI SEGMENT

42. SEGMENT INFORMATION

Uraian	2023						Jumlah/ Total	Description
	Konstruksi/ Construction	Peralatan/ Equipment	Beton/ Precast	Listrik/ Electricity	Properti/ Property	Konstruksi atas konsesi jasa/ Construction for concession		
Pendapatan Hasil segmen	4.486.323.740.947 381.595.166.625	98.888.814.388 (30.145.172.062)	126.905.567.554 (77.383.846.530)	116.288.743.516 58.917.686.924	10.389.008.685 (1.317.156.977)	26.195.939.529 4.148.437.201	4.864.991.814.619 335.815.115.181	<i>Revenue Segment result</i>
Bagian laba bersih ventura bersama	322.065.459.814	-	-	-	-	-	322.065.459.814	<i>Joint operation profit portion</i>
Beban usaha tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	-	-	(233.916.228.740)	<i>Unallocated operating expense</i>
Beban keuangan yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	-	-	(174.409.090.517)	<i>Unallocated financial charges</i>
Pendapatan (beban) lainnya – bersih yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	-	-	(45.429.424.344)	<i>Unallocated others income (expense) - net</i>
Bagian laba (rugi) bersih entitas asosiasi	-	-	-	-	-	-	105.620.429.133	<i>Share in profit (loss) of associates</i>
Pajak penghasilan final	-	-	-	-	-	-	(99.365.272.081)	<i>Final income tax</i>
Laba sebelum pajak							210.400.988.446	<i>Profit before income tax</i>
Beban pajak penghasilan							(8.499.920.178)	<i>Income tax expense</i>
Laba bersih tahun berjalan							201.901.068.268	<i>Profit for the Year</i>
Pendapatan komprehensif lain							88.545.421.547	<i>Other comprehensive income</i>
Laba komprehensif tahun berjalan							290.446.489.815	<i>Comprehensive income for the year</i>

Uraian	2022						Jumlah/ Total	Description
	Konstruksi/ Construction	Peralatan/ Equipment	Beton/ Precast	Listrik/ Electricity	Properti/ Property	Konstruksi atas konsesi jasa/ Construction for concession		
Pendapatan Hasil segmen	3.657.455.276.953 420.528.367.519	145.241.438.696 13.118.168.558	37.300.503.511 (114.008.620.979)	89.493.090.763 38.697.804.957	26.257.884.922 (7.319.027.335)	56.798.170.597 20.968.667.037	4.012.546.365.442 371.985.359.757	<i>Revenue Segment result</i>
Bagian laba bersih ventura bersama	208.340.124.518	-	-	(34.790.435)	-	-	208.305.334.083	<i>Joint operation profit portion</i>
Beban usaha tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	-	-	(210.846.738.241)	<i>Unallocated operating expense</i>
Beban keuangan yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	-	-	(177.677.804.169)	<i>Unallocated financial charges</i>
Pendapatan (beban) lainnya – bersih yang tidak dapat dialokasikan	-	-	-	-	-	-	(5.212.446.125)	<i>Unallocated others income (expense) - net</i>

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Bagian laba (rugi) bersih entitas asosiasi	42.853.312.029	-	-	-	-	42.853.312.029	Share in profit (loss) of associates
Pajak penghasilan final	-	-	-	-	-	(90.980.919.605)	Final income tax
Laba sebelum pajak						138.426.097.729	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan						(3.045.606.287)	Income tax expense
Laba bersih tahun berjalan						135.380.491.442	Profit for the Year
Pendapatan komprehensif lain						(8.464.519.184)	Other comprehensive income
Laba komprehensif tahun berjalan						126.915.972.258	Comprehensive income for the year

43. KOMITMEN

Grup melakukan perikatan kontrak konstruksi dengan berbagai pihak kontrak signifikan pada tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

43. COMMITMENT

The Group has entered into a construction contract with other parties, significant contracts for year 2023 and 2022 are as follows:

No.	Nama Proyek/ Name of project	Nilai kontrak/ Contract value	Lokasi/ Location	Pemilik proyek/ Project owner	Waktu pelaksanaan proyek/ Time period	
					Dimulai/ Started	Selesai/ Finished
1.	Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Paket 1 (MYC)	404.325.045.682	Jawa Tengah	Kementerian PUPR, Dirjen SDA, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	16-Oct-18	20-Sep-23
2.	Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Paket 4 (MYC)	873.327.000.000	Jawa Tengah	Kementerian PUPR, Dirjen SDA, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	16-Oct-18	20-Sep-23
3.	Pembangunan Bendungan Beringin Sila (Paket I) Di Kabupaten Sumbawa	995.626.881.818	Nusa Tenggara Barat	Kementerian PUPR, Dirjen SDA, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I,	31-Dec-18	08-Jun-23
4.	ICB Package LSS-05 Secondary Canal and Drains Upgrading Works Left Bank V for Rentang Irrigation Modernization Project	186.407.575.005	Indramayu	Kementerian PUPR, Dirjen SDA, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cimanuk - Cisanggarung	05-May-20	14-Aug-23
5.	Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi Kabupaten Penajam Paser Utara	303.502.558.909	Penajam Paser Utara	Kementerian PUPR, Dirjen SDA, Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, SNVT Pembangunan Bendungan BWS Kalimantan III	27-Jul-20	31-Dec-23
6.	Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Kegiatan Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan Paket B	293.073.164.972	Sumatera Selatan	PT Jalintim Adhi Abipraya	19-Aug-20	03-Aug-23
7.	Pembangunan Bendungan Jragung Kabupaten Semarang Paket III	669.002.196.538	Semarang	Kementerian PUPR, Dirjen SDA, Balai Wilayah Sungai Pamali – Juana	16-Sep-20	31-Dec-24
8.	Pembangunan Sarana Pengendali Banjir Sungai Bogowonto dan Anak Sungainya (KSN YIA)	297.711.818.182	Purworejo	Kementerian PUPR, Dirjen SDA, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak	24-Sep-20	24-Jun-23
9.	Construction of Wastewater Treatment Plant in Jambi - Jambi WWTP B1	84.725.217.077	Jambi	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Jambi	26-Oct-20	15-Dec-23
10.	Pembangunan Pengaman Muara Sungai Bogowonto Sisi Barat (KSN YIA)	173.685.239.683	Purworejo	Kementerian PUPR, Dirjen SDA, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak	21-Oct-20	08-Jul-23
11.	Peembangunan Bendungan Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah	655.268.600.000	Mamuju	Kementerian PUPR, Dirjen SDA, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS. Kaluku Karama	08-Dec-20	31-Dec-23
12.	Preservasi Jalan Pejagan -	103.044.447.000	Banyumas	Kementerian Pekerjaan Umum	20-May-21	07-Sep-23

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

No.	Nama Proyek/ Name of project	Nilai kontrak/ Contract value	Lokasi/ Location	Pemilik proyek/ Project owner	Waktu pelaksanaan proyek/ Time period	
					Dimulai/ Started	Selesai/ Finished
13.	Prupuk - Tegal - Bts. Banyumas/Brebes – Wangon			dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Kalimantan Utara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Aceh, PPK 3.2 Provinsi Aceh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Jawa Timur		
14.	Paket Preservasi Jalan BTS. Bulungan - Tj. Selor	64.253.212.803	Kalimantan Utara		29-Jun-21	01-Apr-23
15.	Preservasi Jalan Pamueu - Sp. Uning	70.449.633.591	Aceh Utara		17-Jun-21	28-Dec-23
16.	Preservasi Jalan Dan Jembatan Kertosono - Jombang - Mojokerto – Gempol	120.867.300.403	Jombang		29-Jul-21	16-Nov-23
17.	Pembangunan Jembatan Nanga Pinoh - Ela Hilir - Batas Kalteng Cs (MYC)	94.133.198.090	Kalimantan Tengah		13-Aug-21	01-Dec-23
18.	Pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nageko (Paket-2)	704.671.277.273	Kabupaten Nagekeo		19-Aug-21	31-Dec-24
19.	Penanganan Tebing Sisi Kanan Bendungan Bili Bili	27.606.106.000	Sulawesi Selatan		23-Aug-21	23-Aug-23
20.	Penyelesaian Pembangunan Bendungan Keureuto Kabupaten Aceh Utara (MYC)	4.052.465.455	Aceh Utara		06-Sep-21	25-Nov-23
21.	Rehabilitasi Bendungan Cipancuh Tahap II Renovasi Bangunan Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara	48.610.017.000	Subang		08-Nov-21	31-Jan-23
22.		50.000.000.000	Maluku Utara	Bank Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Sumatera Utara	01-Nov-21	23-Aug-23
23.	Pembangunan Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) Pollung Kab. Humbang Hasundutan Rehabilitasi dan Renovasi	82.271.439.000 115.869.894.335	Kab. Humbang Hasundutan Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum	20-Dec-21 29-Dec-21	14-Apr-23 22-Feb-23

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

No.	Nama Proyek/ Name of project	Nilai kontrak/ Contract value	Lokasi/ Location	Pemilik proyek/ Project owner	Waktu pelaksanaan proyek/ Time period	
					Dimulai/ Started	Selesai/ Finished
24.	Sarana dan Prasarana Sekolah Terdampak Bencana Gempa di Kabupaten Mamuju dan Majene		Mamuju dan Majene	Dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat, Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Barat		
25.	Pengendalian Banjir Kali Bekasi Paket 7	257.145.000.000	Bekasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung - Cisadane, Satuan Kerja NVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Ciliwung - Cisadaner	11-Jan-22	10-Jan-25
26.	Pekerjaan Pembangunan Gudang Curah Kering Di Pelabuhan Banten	59.909.000.000	Banten	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten	06-Dec-21	06-Jan-23
27.	Pembangunan PLTM Batanghari 3 x 1,7 MW Sumatera Barat	104.878.000.000	Sumatera Barat	PT Brantas Total Energi	25-May-22	16-Nov-23
28.	Remedial Dan Penanganan Sedimentasi Bendungan Di Pulau Sumbawa I	181.132.000.000	Sumbawa	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Satuan Kerja O & P Sumber Daya Air Nusa Tenggara I	23-May-22	16-Aug-23
29.	Pembangunan Gedung Laboratorium Teknik (GLT) 4 dan Pembangunan	90.908.000.000	Lampung	Institut Teknologi Sumatera	03-Jun-22	25-Nov-23
30.	Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kota Lama Kesawan Kota Medan	76.681.000.000	Medan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana	08-Jul-22	30-Nov-23
31.	Pembangunan Jembatan Pada Lokasi Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan (Cisumdawu) Seksi 5A	-	Jawa Barat	PT Citra Karya Jabar Tol	03-Jun-22	25-Nov-23
32.	Proyek Penanganan Tanggap Darurat Bencana Dampak Awan Panas Dan Guguran Gunung Semeru Di Kab Lumajang 2.1	-	Lumajang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Satker Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Brantas	03-Jun-22	25-Nov-23
33.	Pembangunan Gedung Perkuliahan Terpadu, Gedung Laboratorium Terpadu, Gedung Utama Ilmu Kesehatan, Gedung Serbaguna Universitas Riau	212.000.000.000	Pekanbaru	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi	22-Aug-22	22-Oct-23
34.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Pasca Gempa Mamuju - Majene T.A. 2022-2023 (MYC)	98.495.000.000	Sulawesi Barat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat, Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Barat	30-Aug-22	24-Sep-23
35.	Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lematang Kota Pagarlalam Phase II Paket I	276.004.000.000	Pagaralam	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, SNVT PJPA Sumatera VIII Provinsi Sumatera Selatan	19-Sep-22	6-Mar-25
	Pekerjaan Jasa Konstruksi Penanganan Infrastruktur Permukiman Pasca Gempa Bumi Kabupaten Cianjur Paket 3	-	Cianjur	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat	23-Dec-2022	2-Apr-2023

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

No.	Nama Proyek/ Name of project	Nilai kontrak/ Contract value	Lokasi/ Location	Pemilik proyek/ Project owner	Waktu pelaksanaan proyek/ Time period	
					Dimulai/ Started	Selesai/ Finished
36.	Pekerjaan Jasa Konstruksi Penanganan Infrastruktur Permukiman Pasca Gempa Bumi Kabupaten Cianjur Paket 11 - Rehabilitasi Kantor Desa Cikaroya, Ciwalen, Sukawangi, dan Dikpora Kabupaten Cianjur	-	Cianjur	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat	19-Jan-2023	19-Apr-2023
37.	Pekerjaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Dampak Awan Panas dan Guguran Gunung Semeru di Kab Lumajang 3.1	-	Lumajang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas	9-Dec-2022	8-May-2023
38.	Pekerjaan Peningkatan Fasilitas Penunjang Kawasan Labuan Bajo	-	Labuan Bajo	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur	20-Feb-2023	29-Apr-2023
39.	Rehabilitasi Saluran Induk Tarum Utara (Bendung Leuweung Seureuh - B.Tub 26)	168.940.297.000	Jawa Barat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	2-Mar-2023	25-Apr-2023
40.	Penataan Jalan dan Trotoar pada Ruas Sp. Binongko - Sp. Sylvia	-	Nusa Tenggara Timur	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	20-Mar-2023	1-May-2023
41.	Proyek Peningkatan dan Modernisasi Jaringan Irigasi SS. Jengkol CS, SS. Pengkolan CS, SS. Sukamandi CS, SS. Beres CS	162.507.220.000	Jawa Barat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	21-Mar-2023	14-May-2023
42.	Proyek Peningkatan dan Modernisasi Jaringan Irigasi SS. Kandanghaur CS, SS. Eretan CS	212.903.458.908	Jawa Barat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	30-Mar-2023	23-May-2024
43.	Proyek Pembangunan Kampus Baru Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin) Tahun Anggaran 2023	109.962.787.586	Semarang	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Politeknik Maritim Negeri Indonesia	2-May-2023	27-Nov-2023
44.	Proyek Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pasca Gempa Mamuju Majene	88.627.027.027	Mamuju	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat	4-May-2023	28-May-2024
45.	Proyek Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Lahat	-	Sumatera Selatan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII	14-Mar-2023	12-Jun-2023
46.	Proyek Penyempurnaan Bendungan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara	159.882.214.414	Samarinda	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda	19-Jun-2023	10-Nov-2024
47.	Proyek Penyempurnaan dan Penataan Kawasan	204.089.189.189	Samarinda	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat	21-Jul-2023	30-Jun-2024

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

No.	Nama Proyek/ Name of project	Nilai kontrak/ Contract value	Lokasi/ Location	Pemilik proyek/ Project owner	Waktu pelaksanaan proyek/ Time period	
					Dimulai/ Started	Selesai/ Finished
48.	Bendungan Sepaku Semoi			Jenderal Sumber Daya Air , Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda		
49.	Proyek Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2023 di Kab. Lumajang	-	Lumajang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air , Balai Besar Wilayah Sungai Brantas	17-Jul-2023	14-Okt-2023
50.	Proyek Pembangunan JDU SPAM Regional Wosusokas Segmen 1 dan Reservoir Distribusi	219.800.000.000	Jawa Tengah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah	20-Jul-2023	7-Feb-2026
51.	Proyek Pembangunan Sekolah Polisi Negara dan Mako Brimob Polda Sulawesi Utara	134.234.234.234	Sulawesi Utara	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara	11-Agus-2023	28-Jun-2024
52.	Proyek Pekerjaan Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur Tahap 3	-	Cianjur	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Perumahan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II	22-Ags-2023	31-Des-2023
53.	Proyek Pekerjaan Jasa Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Rehab Total Gedung Sekolah Paket 2	177.927.927.928	DKI Jakarta	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan	25-Ags-2023	21-Des-2023
54.	Proyek Rehabilitasi Bendung Karet Krueng Aceh di Kabupaten Aceh Besar (MYC)	93.255.072.973	Aceh	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Sumatera I	1-Sep-2023	25-Okt-2024
55.	Proyek Construction of Smart Building for BPKP Training Facility at Ciawi, Denpasar, Medan and Makassar	146.837.688.259	Ciawi	Badang Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	8-Sep-2023	3-Ags-2024
56.	Proyek Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rumah Sakit UPT Vertikal Provinsi Papua	576.095.890.312	Papua	Kemenerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	12-Sep-2023	30-Nov-2024
57.	Proyek Penataan Kampung Seni Borobudur di Dusun Kujon	228.109.909.910	Jawa Tengah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah	9-Nov-2023	3-Sep-2023
58.	Proyek Pembangunan Jimbaran dan Jalan Elevated Kawasan Karawang	191.415.000.000	Karawang	Bank Indonesia	29-Nov-2023	27-Nov-2024
	Proyek Rehabilitasi dan Renovasi Stadion Di Provinsi Jawa Barat	167.270.570.270	Jawa Barat	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat	27-Des-2023	22-Ags-2024

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

44. KATEGORI KELAS INSTRUMEN KEUANGAN

44. CATEGORIES AND CLASSES OF FINANCIAL INSTRUMENTS

31 Desember 2023	Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial assets at amortized cost</i>	Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial liabilities at fair value through profit or loss</i>		Jumlah aset keuangan/ <i>Total financial assets</i>	December 31, 2023
		Dimiliki untuk diperdagangkan/ <i>Held-for-trading</i>	Ditetapkan sebagai FVTPL/ <i>Designated at FVTPL</i>		
Aset keuangan					Financial assets
Kas dan setara kas	1.512.017.389.902	-	-	1.512.017.389.902	Cash and cash equivalents
Piutang usaha – net					Trade accounts receivables - net
Pihak berelasi	1.577.744.854.361	-	-	1.577.744.854.361	Related parties
Pihak ketiga	240.844.017.112	-	-	240.844.017.112	Third parties
Piutang retensi – net					Retention receivables - net
Pihak berelasi	251.424.097.675	-	-	251.424.097.675	Related parties
Pihak ketiga	33.455.092.013	-	-	33.455.092.013	Third parties
Tagihan bruto kepada pemberi kerja – net					Gross amount due from costumers - net
Pihak berelasi	353.810.281.104	-	-	353.810.281.104	Related parties
Pihak ketiga	189.194.117.139	-	-	189.194.117.139	Third parties
Piutang lain-lain – net					Other receivables – net
Pihak berelasi	13.807.242.463	-	-	13.807.242.463	Related parties
Pihak ketiga	24.121.610.509	-	-	24.121.610.509	Third parties
Kas yang dibatasi penggunaannya	11.772.806.298	-	-	11.772.806.298	Restricted account
Piutang sewa pembiayaan	-	-	216.713.338.588	216.713.338.588	Financial lease receivables
Aset keuangan dari proyek konsesi	-	-	845.146.442.544	845.146.442.544	Financial assets from concession project
Investasi jangka panjang lainnya	-	36.570.000.000	-	36.570.000.000	Other long term investment
Jumlah aset keuangan	4.208.191.508.576	36.570.000.000	1.061.859.781.132	5.306.621.289.708	Total financial assets

31 Desember 2022	Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial assets at amortized cost</i>	Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial liabilities at fair value through profit or loss</i>		Jumlah aset keuangan/ <i>Total financial assets</i>	December 31, 2022
		Dimiliki untuk diperdagangkan/ <i>Held-for-trading</i>	Ditetapkan sebagai FVTPL/ <i>Designated at FVTPL</i>		
Aset keuangan					Financial assets
Kas dan setara kas	1.476.793.407.269	-	-	1.476.793.407.269	Cash and cash equivalents
Piutang usaha – net					Trade accounts receivables - net
Pihak berelasi	577.943.043.012	-	-	577.943.043.012	Related parties
Pihak ketiga	330.388.270.807	-	-	330.388.270.807	Third parties
Piutang retensi – net					Retention receivables - net
Pihak berelasi	138.792.417.083	-	-	138.792.417.083	Related parties
Pihak ketiga	45.154.174.807	-	-	45.154.174.807	Third parties
Tagihan bruto kepada pemberi kerja – net					Gross amount due from costumers - net
Pihak berelasi	822.954.107.003	-	-	822.954.107.003	Related parties
Pihak ketiga	170.866.461.950	-	-	170.866.461.950	Third parties
Piutang lain-lain – net					Other receivables – net
Pihak berelasi	2.027.566.728	-	-	2.027.566.728	Related parties
Pihak ketiga	14.087.643.568	-	-	14.087.643.568	Third parties
Kas yang dibatasi penggunaannya	11.772.299.621	-	-	11.772.299.621	Restricted account
Piutang sewa pembiayaan	-	-	224.170.966.119	224.170.966.119	Financial lease receivables
Aset keuangan dari proyek konsesi	-	-	863.200.543.430	863.200.543.430	Financial assets from concession project
Investasi jangka panjang lainnya	-	17.613.000.000	-	-	Other long term investment
Jumlah aset keuangan	3.590.779.391.848	17.613.000.000	1.087.371.509.549	4.678.150.901.397	Total financial assets

(Lanjutan/Continued)

45. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

a. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Grup adalah risiko suku bunga, risiko mata uang asing, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Grup dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Grup.

i. Risiko mata uang asing

Risiko mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar.

Selain pinjaman jangka panjang, Grup memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi operasionalnya. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional unit operasional atau pihak lawan. Eksposur dalam mata uang asing tersebut jumlahnya tidak material.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jika nilai tukar Rupiah melemah/menguat sebesar 5% dan 1% dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp5.777.830.187 dan Rp3.454.342.234, terutama sebagai keuntungan/ kerugian atas transaksi kas dan setara kas, deposito berjangka dan utang lembaga keuangan nonbank.

ii. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Grup yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang dan utang sewa pembiayaan.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Perusahaan mengelola beban bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga tetap dan suku bunga variabel dan dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang

45. FINANCIAL RISK AND CAPITAL RISK MANAGERMENTS

a. Financial risk management objectives and policies

The main risks arising from financial instruments held by the Group are interest rate, foreign currency risk, credit risk, and liquidity risk. The Group's operational activities are carried out carefully by managing those risks in order not to incur any potential losses for the Group.

i. Foreign exchange risk

Foreign exchange risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in exchange rates.

In addition to long-term loans, the Group has exposure in foreign currencies arising from its operational transactions. Such exposure arises because the relevant transaction is made in a currency other than the functional currency of the operating unit or the other party. The exposure in such foreign currency is immaterial.

On December 31, 2023 and 2022, if the rupiah weakened/ strengthened by 5% and 1% with all other variables constant, income before tax for the year ended December 31, 2023 and 2022 would be lower/higher by Rp5.777.830.187 and Rp3,454,342,234 mainly as gains/losses on transactions of cash and cash equivalents, time deposits and non- bank financial institutions.

ii. Interest rate risk

interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Group's exposures to interest rate risk relates primarily to short term loans, long term loans and finance lease liabilities.

To minimize interest rate risk, the Company manage interest expense through fixed rate and variable-rate debt combinations and by evaluating market interest rates. Management also conducts a review of the various interest rates offered by creditors to obtain favorable interest rates before

(Lanjutan/Continued)

ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang baru.

making a decision to initiate a new debt obligation.

Eksposur Perusahaan terhadap suku bunga dalam aset keuangan dan liabilitas keuangan dirinci dalam bagian manajemen risiko likuiditas pada catatan ini.

The Company's exposures to interest rates on financial assets and financial liabilities are detailed in the liquidity risk management section of this note.

Analisis sensitivitas suku bunga

Interest rate sensitivity analysis

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk instrumen keuangan pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan 60 basis poin digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada karyawan kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

The sensitivity analysis below have been determined based on the exposure to interest rates for financial instruments at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming the amount of the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. 50 basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates.

Jika suku bunga lebih tinggi/rendah 60 basis poin dan semua variabel lainnya tetap konstan, laba Grup akan turun dan naik sebesar Rp10.248.909.206 dan Rp10.864.932.750 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh eksposur Grup terhadap suku bunga atas pinjamannya dengan suku bunga variabel.

If interest rates had been 20 basis points higher/lower and all other variables were held constant, the Group's profit for the year respectively would increase and decrease by Rp10,248,909,206 and Rp10,864,932,750 for the year ended December 31, 2023 and 2022. This is mainly attributable to the Group's exposure to interest rates on its variable rate borrowings.

iii. Risiko likuiditas

iii. Liquidity risk

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi liabilitas keuangan karena kurangnya dana.

Liquidity risk is the risk that the Group will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds.

Grup memantau likuiditasnya dengan memantau ketat jadwal pembayaran utang untuk liabilitas keuangan dan arus kas keluar untuk kegiatan sehari-hari, serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui jumlah fasilitas kredit yang cukup, baik yang mengikat dan tidak mengikat.

The Group monitors its liquidity needs by closely monitoring schedule of debt servicing payments for financial liabilities and its cash outflows due to day-to-day operations, as well as ensuring the availability of funding through adequate amount of credit facilities, both committed and uncommitted.

Tabel di bawah ini menganalisa liabilitas keuangan Grup yang diselesaikan secara neto yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah

The table below analyzes the Group's financial liabilities into relevant maturity Grouped based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan:

undiscounted cash flows:

	2023				Jumlah/ Total
	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 month	3 bulan dan 1 tahun/ 3 months and 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	2-5 tahun/ 2-5 years	
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities					
Utang usaha/ Trade account payable	2.727.079.587.426	465.462.509.293	598.333.764.754	-	3.790.875.861.473
Utang lain-lain/ Others payables	491.606.876	11.038.447.871	-	-	11.530.054.747
Biaya masih harus dibayar/ Accrued expenses	915.190.278.480	-	-	-	915.190.278.480
Utang bank/ Bank loans	-	17.654.219.623	939.740.250.177	191.916.303	957.586.386.103
Utang lembaga keuangan non-bank/ Loans from non-bank financial institution	-	210.579.804.391	266.748.676.704	92.323.175.375	569.651.656.470
Jumlah/ Total	3.642.761.472.782	704.734.981.178	1.804.822.691.635	92.515.091.678	6.244.834.237.273
	2022				Jumlah/ Total
	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 month	3 bulan dan 1 tahun/ 3 months and 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	2-5 tahun/ 2-5 years	
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities					
Utang usaha/ Trade account payable	2.198.046.591.388	545.958.220.662	445.434.145.274	-	3.189.438.957.324
Utang lain-lain/ Others payables	1.300.003.393	10.494.552.280	-	-	11.794.555.673
Biaya masih harus dibayar/ Accrued expenses	414.416.904.887	-	-	-	414.416.904.887
Utang bank/ Bank loans	-	25.756.029.953	937.586.486.105	270.000.000.000	1.233.342.516.058
Utang lembaga keuangan non-bank/ Loans from non-bank financial institution	24.000.000.000	44.684.414.706	508.795.194.284	-	577.479.608.990
Jumlah/ Total	2.637.763.499.668	1.072.327.362.875	1.446.381.680.389	270.000.000.000	5.426.472.542.932

b. Manajemen modal

Tujuan utama dari pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan bahwa rasio modal selalu dalam kondisi sehat agar dapat mendukung kinerja usaha dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Grup mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya. Agar dapat menjaga dan menyesuaikan struktur modalnya, Grup akan menyesuaikan jumlah utang, pembayaran dividen kepada para pemegang saham atau menerbitkan surat saham. Tidak ada perubahan dalam tujuan, kebijakan dan proses dan sama seperti penerapan tahun-tahun sebelumnya.

b. Capital management

The main objective of the Group's capital management is to ensure that the capital ratio is always in a healthy condition in order to support business performance and maximize the shareholder value. The Group manages its capital structure and makes adjustments with respect to changes in economic conditions and the characteristics of their business risks. In order to maintain and adjust its capital structure, the Group may adjust the amount of debt, dividend payments to shareholders, or issue shares certificates. No changes have been made in the objectives, policies and processes as they have been applied in previous years.

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Secara periodik, Perusahaan melakukan penilaian utang untuk menilai kemungkinan pembiayaan kembali utang yang ada dengan utang baru yang memiliki biaya yang lebih efisien sehingga mengoptimalkan biaya utang dan menggunakan hasil pinjaman untuk investasi yang lebih menguntungkan.

Periodically, the Company conducts debt valuation to assess possibilities of refinancing existing debts with new ones which have more efficient cost that will lead to more optimized cost- of-debt and use of the proceeds for more profitable investment.

Manajemen juga memantau modal dengan menggunakan beberapa ukuran Leverage keuangan seperti rasio pinjaman terhadap ekuitas. Tujuan Perusahaan adalah berusaha untuk menjaga kepatuhan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman.

Management also conducts capital monitoring by using some measures of financial Leverage such as debt to equity ratio. The purpose of Company is attempted to maintain the compliance as required by the lender.

Rasio pinjaman berbunga terhadap ekuitas Perusahaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The Company's debt-to-equity ratios as of December 31, 2023 and 2022 were as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Utang bank	957.586.386.103	1.233.342.516.058	<i>Bank loans</i>
Utang lembaga keuangan non bank	569.651.656.470	577.479.608.990	<i>Loan from non bank financial institutions</i>
Total utang	1.527.238.042.573	1.810.822.125.048	Total loans
Total ekuitas	2.144.869.875.051	1.855.437.895.611	Total equity
Rasio pinjaman terhadap ekuitas	0,71	0,98	Debt to equity ratio

46. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

46. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Perubahan Anggaran Dasar PT Brantas Abipraya (Persero)

Changes to the Articles of Association of PT Brantas Abipraya (Persero)

Berdasarkan surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Brantas Abipraya (Persero) No. S-150/MBU/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 pemegang saham menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

Based on the Approval Letter for Amendments to the Articles of Association of PT Brantas Abipraya (Persero) No. S-150/MBU/03/2024 dated March 14, 2024, shareholders agreed to several things as follows:

- Menyetujui perubahan pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar PT Brantas Abipraya (Persero) mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perusahaan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 atau KBLI terbaru dan penambahan kegiatan usaha utama Perseroan dalam dalam rangka rencana Investasi atau tender untuk *Wastewater Treatment Plant (WWTP)* dan rencana investasi atau tender untuk Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), serta penambahan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan dalam rangka pendayagunaan aset tetap Perseroan untuk mengembangkan Abipraya Sport Center.

- Approved changes to Article 3 paragraphs (2) and (3) of the Articles of Association of PT Brantas Abipraya (Persero) regarding the Aims and Objectives and Business Activities of the Company to be adjusted to the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) 2020 or the latest KBLI and additions to the Company's main business activities in the context of investment plans or tenders for Wastewater Treatment Plants (WWTP) and investment plans or tenders for Waste Processing and Final Processing Places (TPPAS) and Waste Power Plants (PLTSa), as well as additional business activities in the context of optimizing the resources owned by the Company in the context of utilizing the Company's fixed assets to develop the Abipraya Sport Center.*

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

2. Perubahan pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar PT Brantas Abipraya (Persero) mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perusahaan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 atau KBLI terbaru dan penambahan kegiatan usaha utama Perseroan dalam dalam rangka rencana Investasi atau tender untuk *Wastewater Treatment Plant* (WWTP) dan rencana investasi atau tender untuk Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), serta penambahan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan dalam rangka pendayagunaan aset tetap Perseroan untuk mengembangkan Abipraya Sport Center.
 3. Untuk memenuhi pengeluaran/penempatan saham yang diambil bagian sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, menyetujui penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perseroan, sebesar Rp211.982.000.000,00 (dua ratus sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah) sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp211.981.785.000,00 (dua ratus sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 dan 1975/1976.
 - b. Sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) yang berasal dari kapitalisasi cadangan PT Brantas Abipraya (Persero) sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana laporannya Nomor 00117/2.1051/AU.1/03/0555-3/1/III/2023 tanggal 9 Maret 2023.
 4. Dengan adanya penambahan modal tersebut, maka modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula sebesar Rp161.555.000.000,00 (seratus enam puluh satu miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp373.537.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
 5. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi PT Brantas Abipraya (Persero) dengan hak substitusi untuk menyatakan segala sesuatu yang diputuskan dalam keputusan ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh
2. *Changes to Article 3 paragraphs (2) and (3) of the Articles of Association of PT Brantas Abipraya (Persero) regarding the Aims and Objectives and Business Activities of the Company to be adjusted to the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI) 2020 or the latest KBLI and additions to the Company's main business activities in in the context of investment plans or tenders for Wastewater Treatment Plants (WWTP) and investment plans or tenders for Waste Processing and Final Processing Places (TPPAS) and Waste Power Plants (PLTSa), as well as additional business activities in the context of optimizing the Company's resources in in order to utilize the Company's fixed assets to develop the Abipraya Sport Center.*
 3. *To fulfill the issuance/placement of shares taken as part of number 2 above, approve the addition of the capital of the Republic of Indonesia to the Company's share capital, amounting to IDR 211,982,000,000.00 (two hundred eleven billion nine hundred eighty two million rupiah) as follows:*
 - a. *Amounting to IDR 211,981,785,000.00 (two hundred eleven billion nine hundred eighty one million seven hundred eighty five thousand Rupiah) originating from the transfer of State Property to the Ministry of Public Works and Public Housing, the procurement of which is sourced from the State Revenue and Expenditure Budget Fiscal Years 1973/1974 and 1975/1976.*
 - b. *Amounting to IDR 215,000.00 (two hundred and fifteen thousand rupiah) originating from the capitalization of PT Brantas Abipraya (Persero) reserves as recorded in the 2022 Financial Report which has been audited by the Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan as stated report Number 00117/2.1051/AU.1/03/0555-3/1/III/2023 dated March 9 2023.*
 4. *With this additional capital, the Company's issued and paid-up capital was originally IDR 161,555,000,000.00 (one hundred and sixty-one billion five hundred fifty-five million rupiah) to Rp373,537,000,000.00 (three hundred seventy-three billion five hundred thirty-seven million rupiah).*
 5. *To grant power and authority to the Directors of PT Brantas Abipraya (Persero) with the right of substitution to declare everything decided in this decision, including drafting and restating the entire Articles of Association in the form of an*

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

(Lanjutan/Continued)

Anggaran Dasar dalam bentuk akta otentik di hadapan Notaris atau pejabat berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk memperoleh pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.

6. Mewajibkan Direksi Perseroan untuk melaporkan secara tertulis kepada kami atas pelaksanaan persetujuan ini.

authentic deed before a Notary or authorized official, and making adjustments or improvements made necessary if required by the competent authority to obtain approval for changes to the Company's Articles of Association in question.

6. Require the Company's Directors to report in writing to us regarding the implementation of this agreement.

47. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

Informasi keuangan tambahan menyajikan informasi terkait kontribusi Perusahaan kepada Pemerintah Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-6/DKU.MBU/02/2024. Selama tahun yang berakhir 31 Desember 2023, jumlah setoran pajak yang dilakukan oleh Perusahaan terkait pajak badan, pajak final, pajak penghasilan, PPN Keluaran dan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp486.896.566.026.

48. REKLASIFIKASI AKUN

Reklasifikasi tertentu telah dilakukan terhadap laporan keuangan tahun sebelumnya untuk meningkatkan keterbandingan dengan laporan keuangan tahun berjalan.

47. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

The supplementary financial information presents information related to the Company's contribution to the Government of Indonesia as required by the Circular Letter of Ministry of State-Owned Enterprises of The Republic of Indonesia No. S-6/DKU.MBU/02/2024. During the year ended December 31, 2023, total tax payments made by the Company related to corporate income tax, final tax, income tax VAT Out and Land & Building Tax amounted to Rp486.896.566.026.

48. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Certain reclassifications have been made to the prior year's financial statements to enhance comparability with the current year's financial statements.

	Seperti yang dilaporkan sebelumnya/ <i>As previously reported</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Setelah Reklasifikasi/ <i>After reclassification</i>	
Piutang usaha – bersih				<i>Account receivables – net</i>
Pihak berelasi	577.943.043.012	(3.190.624.423)	574.752.418.589	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	330.388.270.807	-	330.388.270.807	<i>Third parties</i>
Piutang usaha – jangka panjang	-	3.190.624.423	3.190.624.423	
Utang usaha				<i>Account payables</i>
Pihak berelasi	991.392.365.936	(445.464.145.274)	545.928.220.662	<i>Related parties</i>
Pihak ketiga	2.198.046.541.388	-	2.198.046.541.388	<i>Third parties</i>
Utang usaha – jangka panjang	-	445.464.145.274	445.464.145.274	<i>Account payables – long term</i>

49. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh direktur untuk diterbitkan pada tanggal 25 Maret 2023.

49. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements is the responsibility of management, and has been approved by the director to be published on March 25, 2023.



PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
Construction Industry & Investment

Head Office
E. D.I. Perjanjan Kencana, Cawang
Jakarta Timur 13340
☎ +62 21 531 8290
☎ +62 21 651 6095

✉ brap@brantas-abipraya.co.id



MOVING BEYOND COLLABORATION TO BECOME A LEGENDARY COMPANY

Kolaborasi Tanpa Batas untuk Menjadi Perusahaan Legendaris



Gedung Brantas Abipraya
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 14, Cawang,
Jakarta Timur 13340

Phone : (021) 851 6290
Fax : (021) 851 6095
Website : www.brantas-abipraya.co.id
Email : brap@brantas-abipraya.co.id

2023 LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT